Firman Noor

PERPECAHAN & SOLIDITAS

PARTAI ISLAM DI INDONESIA:

KASUS PKB DAN PKS DI DEKADE AWAL REFORMASI

PERPECAHAN
&
SOLIDITAS
PARTAI ISLAM DI INDONESIA:
KASUS PKB DAN PKS DI DEKADE AWAL REFORMASI

Firman Noor

PERPECAHAN & SOLIDITAS

PARTAI ISLAM DI INDONESIA:

KASUS PKB DAN PKS DI DEKADE AWAL REFORMASI

LIPI Press

Katalog dalam Terbitan (KDT)
Perpecahan dan Soliditas Partai Islam: Kasus PKB dan PKS di Dekade Pertama Reformasi/Firman Noor – Jakarta: LIPI Press, 2015.
xvi + 572 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-842-4

1. Politik	2. Ideologi
3. Islam	4. Partai

320.55

Copyeditor : Annisa dan Lani
Proofreader : Risma Wahyu H. dan Sonny Heru K.
Penata Isi : Siti Qomariah dan Rahma Hilma Taslima
Desainer Sampul : Rusli Fazi

Cetakan Pertama : Desember 2015

Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi
Jln. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta 10350
Telp. (021) 314 0228, 314 6942. Faks. (021) 314 4591
E-mail: press@mail.lipi.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

TABEL

GAMBAR

PENGANTAR PENERBIT

Sebagai penerbit ilmiah, LIPI Press mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Penyediaan terbitan ilmiah yang berkualitas adalah salah satu perwujudan tugas LIPI Press untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Buku *Perpecahan dan Soliditas Partai Islam dalam Perspektif Pelembagaan Partai: Kasus PKB dan PKS di Dekade Awal Reformasi* ini merupakan sebuah studi perbandingan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mengelola partai, yang berdampak pada kegagalan dan keberhasilan masing-masing partai tersebut dalam mempertahankan keutuhannya.

Buku ini terdiri atas 13 bab yang mengulas dua fenomena, yaitu perpecahan dan soliditas. Empat hal yang dibandingkan dari kelembagaan partai, baik PKB maupun PKS adalah (1) keberadaan kepemimpinan atas dasar prosedur, berarti adanya konsistensi dalam menjalankan konstitusi dan prosedur partai dalam membuat berbagai kebijakan, (2) keberadaan mekanisme penyelesaian konflik yang mumpuni dan terlembaga, di mana perselisihan atau potensi konflik diselesaikan secara kelembagaan dan bukan keputusan individual, (3) adanya kaderisasi yang sistematis, di mana kedudukan seseorang ditentukan oleh prestasinya dan bukan semata karena faktor *like or*

dislike, dan (4) adanya komitmen atas nilai-nilai yang diyakini bersama, yakni komitmen atas ideologi yang diusung oleh partai.

Buku ini selain dapat memperkaya referensi studi politik Indonesia, juga dapat digunakan untuk memahami dinamika kepartaian di Indonesia. Selain itu, semoga buku ini dapat bermanfaat, baik bagi mahasiswa, dosen, peneliti, maupun masyarakat umum untuk memperoleh pemahaman lebih dalam lagi mengenai dinamika kepartaian Islam dalam politik Indonesia di era kontemporer.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

LIPI Press

KATA PENGANTAR

Firman Noor, Ph.D. adalah intelektual muda yang sangat produktif di bidangnya, bukan saja sebagai peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), melainkan juga aktif mengajar di Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia untuk Program Sarjana maupun Pascasarjana. Sejak lama, ia fokus pada politik Islam dan Islam politik. Mata kuliah seperti pemikiran politik Islam dan kekuatan-kekuatan politik Islam adalah beberapa yang diampu oleh Firman Noor Ph.D.

Minat dan perhatiannya yang mendalam pada fenomena Islam dan politik mengantarkannya menulis buku yang tengah berada di tangan pembaca ini. Buku ini adalah hasil penelitian bertahun-tahun yang dilakukan Firman Noor, Ph.D. selama menempuh pendidikan Doktor Ilmu Politik di Institute of Arab & Islamic Studies, Exeter University, Inggris. Dapat saya sampaikan di sini bahwa intisari dari buku ini adalah sebuah studi perbandingan antara PKB dan PKS dalam mengelola partai, yang berdampak pada kegagalan dan keberhasilan masing-masing partai tersebut dalam mempertahankan keutuhannya.

Sepanjang satu dekade Reformasi telah banyak partai besar dan menengah yang mengalami perpecahan internal dengan menghasilkan kepengurusan kembar. PKB merupakan partai yang mengalami

perpecahan terburuk (tiga kali dalam sepuluh tahun) dalam sepanjang sejarah Reformasi, tidak saja pada rumpun partai-partai berbasis Islam, tetapi juga jika dibandingkan dengan partai-partai nasionalis-sekuler. Namun, pada pihak lain, fenomena sebuah partai Islam, yaitu PKS, menarik untuk dilihat, yang pada satu dekade era Reformasi justru mampu mempertahankan keutuhannya. Tidak pernah terlihat adanya sebuah faksi dalam PKS yang secara kontinu berkonflik, apalagi memunculkan kepengurusan kembar yang mengatasnamakan partai itu.

Fenomena tersebut tentu saja sangat menarik dan patut mendapat perhatian, terutama mengingat peran partai politik tersebut yang penting dalam kehidupan politik dewasa ini. Kajian atas dua fenomena, perpecahan dan soliditas, tersebut dengan demikian diharapkan tidak saja dapat mengidentifikasi persoalan-persoalan internal yang terjadi pada partai-partai Islam, tetapi dapat pula turut berkontribusi dalam memperbaiki situasi internal partai menuju partai yang lebih modern atau terlembaga. Meskipun memfokuskan diri pada partai-partai Islam, kajian dalam buku ini sesungguhnya juga dapat dijadikan landasan pemikiran untuk mengkaji persoalan perpecahan dan soliditas pada partai-partai di luar partai Islam.

Buku ini menganalisis perbedaan dengan kalangan yang melihat fenomena perpecahan partai sebagai semata dampak dari ambisi individu atau elite yang haus kekuasaan, yang dengan kata lain menempatkan individu dan elite pula sebagai pihak yang berperan besar dalam menjaga keutuhan partai. Berbeda dengan jawaban yang cenderung memiliki pendekatan perilaku, buku ini melihat fenomena perpecahan dan keutuhan partai sebagai dampak dari kegagalan atau kemampuan partai untuk melembagakan dirinya. Artinya, faktor institusi/lembaga menjadi hal yang patut diperhatikan sebagai faktor yang menentukan situasi internal partai ketimbang faktor individu. Dengan kata lain, buku ini menggunakan kerangka pemikiran institusionalisasi atau pelembagaan dalam melihat fenomena perpecahan dan soliditas. Singkatnya, perpecahan muncul

sebagai dampak kegagalan partai dalam melembagakan dirinya, dan di sisi lain, keberhasilan sebuah partai melembagakan dirinya menjadi penyebab bagi keberhasilan partai itu mempertahankan keutuhannya.

Ada empat hal yang diperbandingkan oleh buku ini dalam melihat pelembagaan partai di PKB dan PKS, yakni: (1) keberadaan kepemimpinan atas dasar prosedur, yang secara singkat berarti adanya konsistensi dalam menjalankan konstitusi dan prosedur partai dalam membuat berbagai kebijakan, (2) keberadaan mekanisme penyelesaian konflik yang mumpuni dan terlembaga, di mana perselisihan atau potensi konflik diselesaikan secara kelembagaan dan bukan keputusan individual, (3) adanya kaderisasi yang sistematis, yang salah satunya menguatkan kesadaran berpartai dengan baik dan memunculkan *sense of fairness*, di mana kedudukan seseorang ditentukan oleh prestasinya dan bukan semata karena faktor *like or dislike*, dan (4) adanya komitmen atas nilai-nilai yang diyakini bersama, yakni komitmen atas ideologi yang diusung oleh partai.

Dari penelitian Firman Noor, Ph.D., dapat dilihat bahwa keempat faktor itu tidak eksis di PKB, yang kemudian menggiring partai ini pada perpecahan internal di tahun 2001, 2005, dan 2008. Di sisi lain, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keempat hal tersebut eksis di PKS yang menyebabkan partai ini mampu mempertahankan keutuhannya, meski dalam beberapa momen muncul potensi friksi internal yang cukup serius.

Dalam konteks memahami fenomena PKB dan PKS sebagai sebuah kekuatan politik Islam, kehadiran buku ini menjadi sangat penting dan patut diapresiasi tidak hanya dalam rangka memperkaya literatur studi politik Indonesia saja, tetapi secara khusus dapat digunakan untuk memahami dinamika kepartaian di Indonesia yang sampai saat ini masih terus berproses mencari jati dirinya di tengah gempuran liberalisasi politik dan pragmatisme yang menguat.

Firman Noor berhasil menuliskannya dalam bahasa yang sederhana dan mudah dicerna oleh pembaca yang awam sekalipun. Oleh karena itu, buku ini sangat layak menjadi bacaan wajib bagi

setiap mahasiswa, dosen, peneliti, ataupun masyarakat umum untuk memperoleh pemahaman mengenai dinamika kepartaian Islam dalam politik Indonesia. Kepada Firman Noor, Ph.D., saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini, semoga memberi pencerahan untuk masyarakat Indonesia.

Depok, Juni 2015
Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.
(Ketua Departemen Ilmu Politik, FISIP UI)

BAB I
PENDAHULUAN

Jatuhnya Soeharto menandai bab baru di dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Era baru ini memberikan kebebasan politik yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama dekade-dekade sebelumnya, hal ini belum pernah terjadi. Presiden Soeharto menciptakan pemerintahan yang sentralistik dan represif. Pemerintahan ini di akhir kekuasaan-nya sangat membatasi hak-hak rakyat atas nama stabilitas politik. Stabilitas politik diyakini merupakan prasyarat untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Keberadaan pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun dari tahun 1966 hingga 1998 pada umumnya dianggap sebagai era penindasan politik. Setidaknya ini anggapan kalangan pro-demokrasi di Indonesia, dan era tersebut menyebabkan banyak kemunduran dalam kehidupan politik di negeri ini.

Era Reformasi membawa kebebasan berekspresi yang begitu luas. Di tahun-tahun pertama era Reformasi, Indonesia mengalami apa yang O'Donnel dan Schmitter sebut sebagai proses demokratisasi politik.[1] Hal ini terutama terlihat dengan lahirnya berbagai kebijakan pemerintah yang memberikan kelonggaran kontrol politik atas rakyat dan di lain pihak memberikan rakyat peluang untuk memperoleh

[1] Gullermo O'Donnell dan Philippe C. Schmitter, *Transition from Authoritarian Role: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*, (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986), 7.

kembali perannya di dalam proses pengambilan keputusan. Presiden Bacharuddin J. Habibie muncul sebagai tokoh utama di balik berbagai kebijakan demokratisasi, seperti pelepasan sejumlah tahanan politik, kebebasan pers, dan memungkinkan pendirian banyak partai politik. Hal ini mengubah berbagai aspek kehidupan politik di negara ini yang secara lebih luas mendukung kemunculan nilai-nilai demokrasi.

Kebangkitan partai-partai politik berlangsung karena realitas di Indonesia. Rakyat secara suka cita merespons kebijakan pemerintah yang memungkinkan rakyat mendirikan partai politik menurut kepentingan mereka. Euforia berikutnya diilustrasikan dengan munculnya lebih dari seratus partai politik baru. Selama periode ini, 184 partai politik muncul. Sebanyak 141 di antaranya berstatus badan hukum. Fenomena yang luar biasa ini pada umumnya dianggap sebagai kondisi normal di sebuah negara yang mengalami periode transisi politik seperti kasus Indonesia. Di antara 141 partai politik yang memperoleh status legal, 60 di antaranya dianggap layak mendapatkan verifikasi dan setelah divalidasi oleh Tim Sebelas, hanya 48 partai yang memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam pemilu pada tahun 1999.[2]

Dalam perkembangannya, kualitas partai politik dalam menjalankan kewajiban utamanya, seperti mewakili kepentingan rakyat dalam proses pengambilan keputusan dan mengelola kegiatan organisasi sehari-hari, tidak otomatis mengiringi keberadaan partai-partai politik ini. Pemerintahan sebelumnya memberikan situasi dan kondisi yang sedikit banyak menghambat partai-partai politik muncul sebagai institusi yang solid dan profesional. Pemerintahan Orde Baru kurang memperhatikan perkembangan partai politik dan tidak sungguh-sungguh perhatian dalam mendukung modernisasi partai politik agar dapat berfungsi dengan benar. Selain itu, rezim Soeharto cenderung membatasi perkembangan partai politik. Sikap ini memperlihatkan

[2] Tim Sebelas mengumumkan bahwa 48 partai politik layak ikut dalam pemilu tahun 1999. Pengumuman ini dinyatakan di Gedung KPU pada 4 Maret 1999 dan dilakukan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1999.

posisi politik rezim Soeharto, yaitu tidak menghendaki keberadaan partai politik mengambil peran yang semestinya. Pemerintahan Soeharto yang eksklusif, dalam hal ini tidak menganggap partai politik sebagai mitra dalam pemerintahan dan kecuali dengan Golongan Karya (Golkar) sebagai partai politik pemerintah, memperlakukan partai politik sebagai unit yang kurang signifikan di dalam sistem politik Indonesia. Akibatnya, partai politik hanya memainkan peranan kecil dalam proses pengambilan keputusan. Peranan ini hanya melegalisasi kebijakan-kebijakan pemerintah atau disebut "juru stempel".

Kemudian, berkenaan dengan masalah-masalah organisasi, perkembangan yang terbatas ini juga menghambat peluang bagi partai politik mengembangkan pengelolaan internal partainya dengan tepat. Partai politik lebih percaya pada dukungan pemerintah, misalnya dalam hal penempatan orang-orang tertentu pada posisi penting di dewan pengurus partai daripada mendengar aspirasi para anggotanya sendiri yang lebih mengetahui kualitas orang-orang tersebut. Di lain pihak, pemerintah memiliki kepentingan untuk melakukan intervensi di dalam partai politik. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan pengaruhnya pada partai-partai politik tersebut. Menurut Sanit, sikap pemerintah ini tidak hanya merupakan bagian strategi untuk mencari siapa yang sebenarnya musuh dan pendukung pemerintah, tetapi juga membuat kontrol atas partai-partai politik itu lebih mudah dilakukan.[3] Pada dasarnya, partai-partai politik di era Orde Baru tidak meningkatkan independensinya dan sebenarnya secara efektif dikontrol pihak pemerintah. Situasi ini pada akhirnya menciptakan berbagai masalah internal organisasi seperti masalah pengelolaan dan kaderisasi partai politik itu sendiri.

Sebagian besar merasa partai politik tidak sungguh-sungguh efisien menjalankan fungsinya. Kajian Baswedan tentang perilaku partai politik, misalnya, menunjukkan sebagian besar partai politik

---

[3] Arbi Sanit, "Manajemen Politik dalam Negeri", di "Tiras", 9 Februari 1995, dalam Kamarudin, *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi: Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu 2004*, (Jakarta: Visi Publishing 2003), 37.

besar tidak hadir di dalam kehidupan sehari-hari rakyat, membiarkan rakyat untuk menangani masalah mereka sendiri hingga beberapa hari sebelum pemilu berikutnya.[4] Pada umumnya, rakyat juga menganggap sebagian besar partai politik terperangkap dalam permainan kekuasaan elitis dalam upaya memperoleh posisi di hadapan publik tanpa membuat dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.

Fenomena penting lain yang terjadi dan menjadi fakta penting di dekade pertama era Reformasi adalah fenomena fragmentasi atau perpecahan di dalam partai-partai politik. Selain menunjukkan adanya masalah internal yang signifikan, di tingkat praktis fenomena ini memberi kontribusi terhadap penurunan peran partai di masyarakat.[5] Fenomena ini hampir terjadi di seluruh partai politik besar. Dari kubu sekuler, misalnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang terpecah menjadi beberapa partai baru, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) dan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP). Sejumlah kader Golkar yang kecewa, terutama setelah kekalahan di pemilu internal, mendirikan sejumlah partai seperti Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Pasca-Pilpres 2014 muncul lagi perpecahan di partai berlambang beringin ini yang melibatkan kelompok Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Di lain pihak, sejumlah kader yang tidak puas dari Partai Demokrat meninggalkan partai dan mendirikan partai baru seperti Partai Barisan Nasional (Barnas).

Fenomena ini juga terjadi di kubu partai-partai Islam. Pada awal Juli 2008, misalnya, dua pimpinan yang bersaing dari Partai

---

[4] Anies Baswedan, "Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory", *Asian Survey*, 44:5, (September-Oktober 2004), 688. Sukardi Rinakit, "Indonesia", dalam Konrad-Adenauer-Stiftung (ed.), *Parties and Democracy: The KAS Democracy Report 2007*, (Bonn: Bouvier, 2007), 151.

[5] Lili Romli, "Potret Buram Partai Politik di Indonesia", dalam Mahrus Irsyam dan Lili Romli (eds.), *Menggugat Partai Politik* (Depok: Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI, 2003), 142–144. Kamarudin, *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi, Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu 2004*, (Jakarta: Visi Publishing, 2003), 170–174. Tentang pembahasan mengenai kinerja partai politik di tingkat lokal pasca-Orde Baru lihat Lili Romli (ed.), *Potret Partai Politik Pasca Orde Baru,* (Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2003).

Kebangkitan Bangsa (PKB) pada waktu bersamaan mengajukan dirinya di kantor KPU untuk memperoleh nomor urut pada pemilu 2009 yang merupakan kewajiban untuk setiap partai politik yang hendak berpartisipasi di pemilu. Ketua PKB Abdul Muhaimin Iskandar, keponakan mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Ketua kedua PKB versi "Ancol" adalah Zannuba Arifah Wahid (Yenny), putri Gus Dur yang merupakan Sekretaris Umum PKB versi "Parung" yang dipimpin ayahnya, sama-sama menyatakan diri sebagai pihak yang sah. Di depan para politisi senior, pejabat KPU dan wartawan di ruang pertemuan KPU, baik Muhaimin dan Yenny saling berebut kartu yang mengumumkan nomor urut PKB dalam Pemilu 2009. Setelah intervensi pejabat KPU, keduanya pada akhirnya setuju memegang kartu nomor urut itu bersama-sama. Insiden yang luput dari perhatian publik ini memperlihatkan dalamnya perpecahan di parpol ini.

Kemunculan dua dewan pengurus PKB, yaitu Muhaimin dan Gus Dur, memberikan bukti lanjutan tentang perpecahan internal yang kronis. Hal ini memengaruhi sebagian besar parpol berbasis Islam selama 10 tahun era Reformasi. PKB menderita perpecahan yang mendalam sejak tahun 2001, dan kini sejumlah kadernya yang tidak puas membentuk dua partai tandingan, yaitu Partai Kejayaan Demokrasi (PKD) dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).

Selain PKB, partai Islam lainnya seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) juga mengalami perpecahan internal yang serius yang mengarah ke arah pembentukan partai-partai baru atau eksodus anggotanya ke parpol lainnya. Dalam kasus PPP, perpecahan parpol ini menjadi Partai Persatuan (PP) dan Partai Bintang Reformasi (PBR). Belakangan, PPP mengalami perpecahan internal lagi yang melibatkan kubu PPP-Romahurmuzy dan PPP-Djan Faridz. Selain itu, kader PAN yang membelot juga mendirikan Partai Matahari Bangsa (PMB). Satu-satunya partai berbasis Islam besar yang tidak mengalami perpecahan internal adalah

Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sejauh ini, PKS mampu mengelola perbedaan internalnya dan berhasil mengonsolidasi parpol ini.

Tren perpecahan di partai-partai Islam Indonesia sejauh ini mengilustrasikan bahwa Islam, sebagai ideologi politik, terlihat merupakan nilai penting, tetapi pada waktu bersamaan tidak mampu bekerja dengan baik sebagai unsur pemersatu. Bagi sebagian besar partai Islam Indonesia, khususnya di awal era Reformasi, Islam sebagai fondasi politik tidak mampu mencegah partai-partai ini dari konflik internal yang destruktif. Akan tetapi, di lain pihak, dalam tubuh PKS situasi tersebut tampak tidak berlaku. Kasus PKS menunjukkan bagaimana Islam sebagai sebuah landasan berpolitik dapat berfungsi sebagai perekat bagi sebuah parpol Islam. Sebagai parpol Islam yang dengan jelas menjadikan Islam sebagai dasarnya, partai ini mampu memperlihatkan peran Islam dalam mempertahankan harmoni dan kohesi atau soliditas internalnya. Adanya dua kenyataan yang bertolak belakang tersebut di atas mengisyaratkan adanya faktor lain yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perpecahan di tubuh partai-partai Islam, yang pada waktu bersamaan, memainkan bagian penting dalam mencegah parpol Islam ke arah perpecahan.

Fenomena perpecahan partai politik memperlihatkan bahwa transisi demokrasi tidak hanya mendukung pendirian partai politik, tetapi juga melahirkan konflik dan perselisihan internal yang serius. Hal terakhir ini kadang-kadang menjadi batu loncatan atau pemicu untuk munculnya perpecahan internal. Sejauh ini, perpecahan pada umumnya terjadi karena demokrasi pada dasarnya menoleransi kebebasan berekspresi masyarakat serta memperjuangkan opini dan kepentingannya. Akan tetapi, transisi demokrasi seharusnya tidak dianggap sebagai jawaban final terhadap seluruh fenomena dan masalah politik yang muncul setelah kejatuhan rezim lama, termasuk masalah perpecahan internal partai-partai politik. Keberadaan transisi demokrasi yang dengan jelas menimbulkan kasus-kasus politik yang menarik dan penting seharusnya secara rasional dianggap hanya sebagai latar belakang politik atau pra-kondisi konteks politik

fenomena tertentu. Dalam hal ini, sekali lagi, kita harus mempertimbangkan aspek atau variabel relevan yang memberi dampak langsung atau memiliki korelasi terhadap kasus-kasus politik spesifik seperti perpecahan internal partai.

Buku ini akan membahas mengapa partai-partai politik Islam selama dekade pertama era Reformasi mengalami perpecahan internal dan gagal mengembangkan soliditas. Di sisi lain, buku ini juga akan menjelaskan alasan di balik kemampuan partai Islam menjaga keutuhannya. Singkatnya, buku ini akan mengeksplorasi dan menganalisis faktor-faktor dan alasan-alasan di balik masalah perpecahan dan soliditas partai-partai politik Islam dengan mengaitkannya dengan keberadaan proses pelembagaan partai selama dekade pertama era Reformasi (1998–2008).

Buku ini berpendapat bahwa alasan di balik kemunculan perpecahan dan soliditas tidak mencakup satu faktor saja. Hipotesis dari buku ini adalah kesatuan dan disiplin partai sangat terkait dengan kemampuan partai-partai ini untuk melembagakan dirinya. Faktor-faktor yang memberi kontribusi terhadap atau terkait dengan perpecahan atau soliditas partai adalah: (1) keberadaan model kepemimpinan prosedural dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, partai mendasarkan dirinya melalui konstitusinya atau prosedurnya untuk pembuatan kebijakan yaitu didasarkan pada statuta organisasi (aturan main partai); (2) keberadaan mekanisme resolusi konflik internal; (3) keberadaan kaderisasi yang sistematis dan terorganisasi dengan baik, dan (4) keberadaan nilai-nilai bersama sebagai penyedia identitas dan faktor pemersatu.

Dari penjelasan di atas, hipotesis buku ini adalah jika sebuah partai politik terinstitusionalisasi atau terlembaga (ditunjukkan dengan keberadaan kepemimpinan prosedural, efektifnya mekanisme resolusi konflik internal, keberlanjutan kaderisasi yang sistematis, dan komitmen terhadap nilai-nilai bersama sebagai pedoman kebijakan dan nilai-nilai pemersatu), semakin besar peluang partai politik tersebut untuk dapat mempertahankan soliditasnya. Di lain pihak,

Tabel 1.1 Perbandingan Institusionalisasi Partai antara PKB dan PKS

	PKB	PKS
Kepemimpinan prosedural di dalam proses pengambilan keputusan	-	+
Mekanisme resolusi konflik	-	+
Kaderisasi sistematis	-	+
Komitmen terhadap nilai-nilai bersama	-	+

Catatan: - : Tidak Ada; + : Ada

jika sebuah partai politik tidak terlembaga (ditunjukkan dengan kurang efektifnya kepemimpinan prosedural, kegagalan mekanisme resolusi konflik internal, hambatan dalam kaderisasi sistematis, dan kegagalan untuk memberikan ideologi sebagai pedoman kebijakannya dan mempersatukan nilai-nilai bersama), semakin besar kemungkinan partai itu akan mengalami perpecahan.

Berkaitan dengan tujuan di atas, buku ini menganalisis tiga peristiwa penting yang terjadi pada PKB selama dekade pertama keberadaannya. Tiga peristiwa penting tersebut adalah perpecahan pertama pada 2001, perpecahan kedua pada 2005, dan perpecahan ketiga pada 2008. Ketiga peristiwa ini merupakan contoh utama dan topik pembahasan di setiap bab. Eksplorasi atas fenomena ini penting dikarenakan hal ini akan memberikan bukti yang nyata tentang kegagalan implementasi pelembagaan di partai ini yang mengarah ke perpecahan partai.

Melalui eksplorasi pada fenomena yang berbeda di PKB dan PKS, buku ini akan mengkaji secara komprehensif alasan di balik kegagalan dan kemampuan sebuah partai politik untuk melaksanakan dan mempertahankan pelembagaannya, atau dengan kata lain, mengungkap sejumlah faktor yang mendorong ketiadaan atau keberadaan pelembagaan ini.

Fenomena perpecahan dan soliditas partai-partai Islam selama era Reformasi Indonesia penting untuk dikaji karena hal ini memberikan tidak hanya pembahasan akan sebuah tren di dalam Islam

politik, tetapi juga pemahaman atas kondisi politik di Indonesia, khususnya perkembangan partai-partai politik Islam.

A. Partai, Fenomena Perpecahan dan Soliditas, serta Pelembagaan

1. Partai

Kajian tentang partai politik merupakan salah satu bidang yang paling penting dan menarik dalam ilmu politik. Relevansi kajian ini terkait dengan posisi partai politik sebagai *power seeking* dan *preserving machinery* yang di dalamnya kekuasaan itu sendiri merupakan salah satu inti utama politik. Kajian tentang partai politik dikembangkan oleh para pakar sejak kuartal ketiga abad ke-19.[6] Selama periode itu terdapat berbagai kajian tentang partai politik, terutama sebagai respons terhadap cepatnya perkembangan peranan sebuah partai politik di pemerintahan.[7] Di akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, perkembangan baru terjadi ketika kajian tentang partai politik mulai membahas partai sebagai organisasi ekstra-parlementer. Buku Ostrogorski yang membahas partai politik modern, misalnya, merupakan salah satu karya yang menandai permulaan bidang kajian ini di era modern.[8] Hal ini diikuti dengan sejumlah kajian yang berpengaruh, misalnya, dari Michels. Dia memfokuskan pada kecenderungan oligarki di partai politik.[9] Bersama dengan munculnya pendekatan baru di bidang ilmu politik, kajian tentang partai politik berlanjut dengan berbagai fokus baru kajian dan melahirkan lebih

---

[6] Susan E. Scarrow, "The Nineteenth-Century Origins of Modern Political Parties: The Unwanted Emergence of Party-Based Politics", dalam Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook of Party Politics*, (London: SAGE Publication, 2006), 21–22.

[7] *Ibid*. Hal ini mencakup buku-buku yang ditulis oleh Alexis De Tocqueville, *Democracy in America*, (New York: George Adeland, 1839). Earl Grey dan Henry George, *Parliamentary Government Considered with a Reference to a Reform of Parliament*, (London: Richard Bentley, 1858). Woodrow Wilson, *Congressional Government: A Study in American Politics*, (Boston: Houghton, Mifflin and Co, 1885).

[8] M. Ostrogorski, *Democracy and the Organisation of Political Parties*, (London: Macmillan, 1902).

[9] Robert Michels, *Political Parties*, (London: Jarrold, 1915).

banyak teori yang lebih maju yang dikembangkan oleh para pakar. Mereka membahas berbagai pokok bahasan yang terkait dengan perkembangan partai politik, termasuk ideologi, budaya politik, perkembangan politik dan demokrasisasi, hubungannya dengan sistem politik dan partai politik, serta pelembagaan.

Para pakar telah mengembangkan berbagai definisi tentang "partai politik". Sartori menegaskan bahwa peran partai politik sebagai mediator atau "organisasi corong" (*channeling organisator*) antara kepentingan masyarakat dan negara.[10] Definisi ini pada dasarnya menganggap partai politik sebagai unsur pemerintahan demokratis dan alat masyarakat dalam menyalurkan kepentingannya. Definisi yang lebih komprehensif melihat partai politik sebagai institusi yang terdiri dari orang-orang yang mencari posisi di pemerintahan yang didasarkan pada kepentingan khusus atau ideologi melalui kompetisi untuk memperoleh dukungan masyarakat.[11] Dalam definisi ini, partai politik dikaitkan dengan asal-usul, kewajiban utama, dan cara partai politik menyampaikan kepentingannya yang berbeda dengan organisasi lain seperti kelompok kepentingan atau kelompok penekan.

Di lain pihak, para pakar lain melihat partai politik sebagai sebuah sistem. Eldersveld meyakini bahwa partai politik adalah "organisme sosial dan miniatur sistem politik" pada waktu bersamaan. Sebagai sebuah sistem politik, partai politik menurutnya "memiliki proses perwakilan, sistem elektoral dan sub-proses untuk merekrut pemimpin, menentukan tujuan serta memecahkan konflik sistem

---

[10] Giovani Sartori, *Parties and Party Systems, A Framework for Analysis, Volume I,* (Cambridge: Cambridge University Press, 1976), 41.

[11] Roger Soltau, *An Introduction in Politics*, (London: Longmans, Green & Co, 1961), 199. Sigmund Neumann, "Toward A Comparative Study of Political Parties", dalam Harry Eckstein dan David E. Apter (eds.), *Comparative Politics: A Reader*, (New York: The Free Press, 1963), 352. R. M. MacIver, *The Modern State,* (Oxford: Oxford University Press, 1926), 396–406. Bernard Hennessy, "On the Study of Party Organization", dalam William J. Crotty (ed.), *Approaches to the Study of Party Organization*, (Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1968), 1–2. Leon D. Epstein, *Political Parties in Western Democracies*, (New Brunswick, NI: Transaction Book, 1980), 9–12.

internal”.[12] Dalam pandangan yang relatif serupa, Maor menyatakan bahwa partai politik adalah institusi yang memiliki cara berpola yang sudah berlangsung lama dan berulang-ulang untuk melakukan berbagai hal. Dia meyakini partai politik merupakan sistem yang memiliki sejumlah tugas internal yang unik termasuk mengorganisasi dukungan masyarakat, menghargai para aktivisnya, memodifikasi strategi elektoral, menciptakan partai yang kohesif dalam menjalankan perannya di legislatif, memastikan soliditas partai politik, memperluas dukungan elektoral, dan mempertahankan kekuatan elektoral.[13] Perspektif Maor adalah mengenai berbagai kajian tentang masalah internal partai politik sebagai cara yang penting untuk memahami perilaku dan tujuan sebuah partai politik.

Buku ini akan mengombinasikan seluruh pendekatan di atas dengan memahami partai politik sebagai kelompok orang yang terikat oleh kesamaan keyakinan, kepentingan, dan komitmen untuk bersama-sama memperjuangkan keyakinan dan idealisme, menghasilkan kebijakan atau memberikan kebijakan alternatif bagi pemerintah, dan menguasai jabatan publik dan politik dengan cara-cara konstitusional; dan sebagai organisasi yang harus mengelola kepentingan internalnya sebagai respons terhadap kebutuhan internal dan eksternal.

Kajian komparatif tentang partai politik meliputi hampir seluruh dunia dan pada akhirnya mencakup negara-negara berkembang ketika banyak pihak mulai memperhatikan kehidupan politik di luar dunia Barat. Dalam konteks negara-negara berkembang, pada awalnya wacana atau teori tentang partai politik dasarnya menyerupai teori-teori yang berkembang di negara-negara maju. Akan tetapi, dalam perkembangannya, kajian partai politik di wilayah tersebut menghasilkan berbagai teori penting tersendiri.

---

[12] Samuel J. Eldersveld, *Political Parties: A Behavioral Analyses*, (Chicago: Rand McNally, 1964), 1.

[13] Moshe Maor, *Political Parties and Party Systems: Comparative Approaches and The British Experience*, (London: Routledge, 1997), 10–14.

Berbagai kajian tentang politik modern di Amerika Latin dan negara-negara pascakolonial, misalnya, telah mencapai banyak kesimpulan penting, termasuk kesimpulan tentang peranan partai politik di dalam proses demokratisasi dan perkembangan organisasional partai politik. Pada umumnya, berbagai kajian partai politik di negara-negara berkembang cenderung sangat terkait dengan pembahasan tentang berbagai masalah spesifik, seperti demokratisasi, ideologi, dan sejumlah kajian baru tentang sistem partai dan pelembagaan.[14] Berkaitan dengan hal ini, berbagai kajian yang dilakukan oleh Randall dan Svasand[15], Mainwaring dan Timothy[16], Sachsenroder dan Frings[17], serta Mainwaring[18], misalnya, menunjukkan berkembangnya perhatian tentang kajian partai politik, khususnya di negara-negara demokrasi baru. Di negara-negara tersebut, partai politik cenderung dianggap sebagai pelaku atau sebuah sistem yang keberadaannya terutama dipengaruhi oleh kemampuan untuk mengembangkan dan melembagakan dirinya, sebagai respons yang tepat atau jawaban terhadap kemajuan internal dan ekspansi eksternal.

Sementara itu, kajian partai politik di Indonesia kontemporer cukup dipengaruhi oleh perkembangan kajian kontemporer tentang topik sejenis sebagaimana yang disebutkan di atas. Akan tetapi, banyak pakar sebenarnya telah melakukan kajian tentang berbagai topik terkait dengan partai politik jauh sebelum kajian berpengaruh terkini muncul. Generasi pakar pertama (1960–1970-an) yang tertarik

---

[14] Vicky Randall, *Political Parties in the Third World*, (London: Sage, 1988). Scott Mainwaring, "Politicians, Parties, and Electoral Systems: Brazil in Comparative Perspectives", *Comparative Politics*, 24:1, (Oktober 1991), 21–43.

[15] Randall dan Svasand, "Party Institutionalization in New Democracies".

[16] Scott Mainwaring dan Timothy R. Scully, *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*, (Stanford: Stanford University Press, 1995).

[17] Wolfgang Sachsenroder dan Ulrike E. Frings (eds.), *Political Party Systems and Democratic Development in East and Southeast Asia: Volume I Southeast Asia*, (Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 1998).

[18] Scott Mainwaring, "Political Parties and Democratization in Brazil and the Southern Cone", *Comparative Politics*, 21:1, (Oktober 1988), 91–120.

dengan partai politik Indonesia melahirkan banyak karya-karya yang berpengaruh. Karya-karya itu menginspirasi berbagai kajian serupa hingga sekarang. Berbagai kajian mereka pada umumnya didominasi oleh topik tentang asal-usul partai politik dan ideologi politik serta kajian atas keberadaan satu partai tertentu pada satu atau lebih dari empat periode politik di Indonesia.[19] Selain itu, berbagai kajian ini pada umumnya mengaitkan partai politik dengan pemilu dan budaya politik.[20] Berkaitan dengan jumlah partai yang dibahas, berbagai kajian ini mencakup pembahasan mulai dari pembahasan beberapa parpol[21] di dalam sebuah rentang waktu tertentu hingga meneliti satu partai politik saja[22] di periode tertentu.

2. Partai Islam

Salah satu cabang kajian partai politik di Indonesia membahas partai-partai politik Islam. Banyak pengamat membahas peranan utama partai-partai Islam tidak hanya di era pra-kemerdekaan, tetapi juga di situasi sekarang ini. Partai politik pertama yang berdiri di dalam sejarah Indonesia adalah partai Islam yang disebut Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Sementara di India partai tertua adalah sebuah partai sekuler, Partai Kongres, dalam konteks Indonesia, partai tertua yang pernah ada adalah partai Islam atau partai berbasis agama. Dalam posisi ini dan karena alasan lain, yang akan dibahas

---

[19] Sebagian besar pakar politik Indonesia sepakat bahwa ada empat episode politik di dalam sejarah Indonesia modern, yaitu (1) Demokrasi Liberal (1945–1959), (2) Demokrasi Terpimpin/Orde Lama (1959–1966), (3) Orde Baru (1966–1998), dan (4) era Reformasi (1998 hingga sekarang).

[20] William Liddle, *Ethnicity, Party and National Integration: An Indonesian Case Study,* (New Haven: Yale University Press, 1970). Herbert Feith, *The Indonesian Election of 1955*, (Ithaca: Cornell University, 1957).

[21] Daniel S Levv, "Political Parties in Indonesia", *Journal of Southeast Asian History*, 8:1, (Maret 1967), 52–67.

[22] Kenneth Ward, *The Foundation of the Partai Muslimin Indonesia*, (Ithaca: Cornell University, 1970). Donald Hindley, *The Indonesian Communist Party, 1951–1963*, (Los Angeles: University of California Press, 1964). Deliar Noer, *Masjumi: Its Organisation, Ideology, and Political Role in Indonesia*, M.A. Thesis, (Cornell University, 1960).

di pembahasan berikutnya, partai-partai politik Islam menjadi salah satu objek kajian utama dalam studi politik di Indonesia.

Sejumlah akademisi membuat definisi untuk menjabarkan dan memahami keberadaan partai-partai Islam. Menurut sejumlah pakar, partai Islam di Indonesia dibagi menjadi beberapa kategori.[23] Kategori pertama adalah yang dengan jelas menyatakan Islam sebagai dasar organisasi. Kategori kedua adalah partai politik yang menggunakan simbol Islam atau simbol yang sangat erat terkait atau diidentifikasikan dengan Islam, seperti bulan sabit dan bintang serta Kabah atau kata-kata dari bahasa Arab, walaupun asas partai politik ini tidak sepenuhnya didasarkan pada Islam, atau memadukan antara Islam dan 'isme' lainnya, seperti nasionalisme (Pancasila) atau sosialisme sebagai ideologinya. Kategori ketiga adalah partai politik berbasis massa Islam, yang tidak menggunakan simbol Islam, melakukan perpaduan antara Islam dan ideologi lain sebagai dasar atau orientasi politiknya, namun bertumpu atau tidak dapat dipisahkan dari komunitas Islam. Kategori kedua dan ketiga partai politik Islam kadang-kadang dipersepsikan sebagai partai Islam yang mengedepankan nilai atau substansi Islam sebagai tujuannya daripada mencoba menanamkan syariah Islam secara formal ke dalam konstitusi negara. Munculnya kedua kategori ini pada dasarnya menunjukkan adanya transformasi dalam kehidupan partai Islam di Indonesia.

Sebelum tahun 1983, partai-partai Islam diidentifikasi dengan partai-partai yang menggunakan Islam sebagai dasar partai. Seluruh Partai Islam dengan jelas mendeklarasikan Islam sebagai dasar partainya dalam AD/ART, sebagaimana kategori pertama dari pembagian kategori di atas. Akan tetapi, setelah tahun 1983, ketika Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai dasar seluruh partai politik terjadi

---

[23] Azyumardi Azra, "Islam Politik pada Masa Pasca-Soeharto", dalam A.M. Fatwa, *Satu Islam Multi Partai: Membangun Integritas di Tengah Pluralitas,* (Bandung: Mizan, 2000), 13. Arskal Salim, *Partai Islam dan Relasi Agama-Negara*. (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1999), 8. Eep Saefullah Fatah, "Format Baru Politik Islam Belajar dari Kekeliruan Politik Lama", *Republika*, 2 Januari 1999.

sebuah perubahan. Partai-partai Islam menambahkan atau memasukkan 'isme' lain sebagai dasar partai dan Islam sepanjang 'isme' itu masih sejalan dengan semangat Islam. Penggunaan Pancasila yang kemudian dikaitkan dengan semangat nasionalisme atau perpaduan antara Islam dan Pancasila menjadi sesuatu yang umum terjadi. Dalam kasus PBR, misalnya, bahkan terjadi perpaduan antara Islam dan sosialisme.[24] Fenomena semacam ini tampak sejalan dengan kecenderungan untuk memahami Islam dengan cara yang lebih substansial dalam kehidupan politik. Partai-partai Islam meyakini bahwa perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai Islam sebagai titik tolak bagi partai politik dan sebagai sebuah cita-cita politik tidak selalu dikaitkan dengan penegakan simbol-simbol Islam atau sekadar dengan menyatakan bahwa Islam adalah dasar partai. Mereka berpendapat bahwa lebih penting menghadirkan esensi Islam kepada masyarakat daripada menampilkan simbol Islam semata. Kemudian, jenis partai Islam ini acapkali terbuka bagi kalangan nonmuslim untuk memegang posisi penting di partai.[25] Berkenaan dengan hal ini, partai-partai tersebut tetap dapat dilabelkan sebagai partai yang berkomitmen terhadap penyebaran nilai-nilai Islam walaupun tidak menyatakan Islam sebagai dasar partainya dalam AD/ART.

Dalam penelitiannya tentang partai-partai Islam di Indonesia, Amir menyatakan bahwa sebuah partai politik juga dapat dikategorisasi sebagai partai Islam apabila partai tersebut didominasi tokoh-tokoh Islam dan memiliki kecenderungan untuk bertujuan membela atau mempertahankan kepentingan umat Islam.[26] Oleh karena itu, dia berkesimpulan bahwa partai-partai Islam terbagi dalam dua tipe. Tipe pertama mencakup partai-partai yang tertarik dengan penggunaan simbol-simbol Islam, termasuk menyatakan

---

[24] Tentang PBR lihat Edison Muchlis, "Upaya Pelembagaan Partai: Kasus Partai Bintang Reformasi", dalam Lili Romli, *Pelembagaan Partai Politik Pasca-Orde Baru: Studi Kasus Partai Golkar, PKB, PBB, PBR dan PDS*, (Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2008).

[25] Arskal Salim, "Fragmentasi Partai Islam", *Kompas*, 26 Juni 1999.

[26] Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*, (Jakarta: LP3ES 2003), 20–21.

Islam sebagai dasar partainya dan secara jelas menyatakan diri dalam posisi mendukung kepentingan umat Islam. Tipe kedua mencakup partai-partai yang tidak menggunakan simbol Islam dan cenderung menggabungkan nilai-nilai Islam dan ideologi lain untuk membentuk dasar partainya, tetapi didirikan dan didominasi oleh tokoh-tokoh Islam dalam kepengurusan partainya dan memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kepentingan umat Islam serta menjadikan basis sosial dan kelompok-kelompok Islam.

Buku ini sejalan dengan berbagai argumen kategorisasi terkini atas partai-partai Islam. Partai-partai Islam dalam buku ini mencakup partai-partai yang didirikan oleh tokoh-tokoh Islam atau umat Islam, yang dimaksudkan terutama untuk memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok muslim dan nilai-nilai Islam; selain juga kepentingan nasional dan masyarakat banyak. Dalam kaitan dengan dasar partai, Islam merupakan ajaran yang dapat digunakan secara eksklusif atau dipadukan dengan isme lain, seperti Pancasila, sebagai dasar atau ideologi partai. Perlu dicatat pula bahwa bagi sebagian partai Islam, termasuk PKB, keyakinan untuk memasukkan Pancasila sebagai dasar partainya didasarkan pada perspektif Islam. Dengan keyakinan itu, partai-partai ini masih menganggap dirinya sebagai partai-partai Islam.[27] Yusuf Muhammad, salah satu tokoh penting PKB yang juga pendiri partai ini, misalnya, mengasosiasikan partainya sebagai "bus yang akan membawa umat Islam ke Mekah".[28] Berkenaan dengan definisi partai Islam di atas, buku ini menempatkan dan membahas PKB dan PKS sebagai bagian dari kelompok partai Islam.

Para akademisi telah membahas keberadaan partai-partai Islam di Indonesia dalam berbagai topik. Dalam konteks era Reformasi, penelitian tentang partai-partai Islam yang dilakukan oleh sejumlah akademisi membahas fenomena seperti aspek ideologi dan misi

[27] Muhaimin Iskandar, "PKB: Politik Rahmatan Lil'Alamin", dalam Sahar L. Hassan, Kuat Sukardiyono dan Dadi M. H. Basri (eds.), *Memilih Partai Islam: Visi, Misi dan Persepsi*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1998), 24.

[28] Muhammad Munib Huda (ed.), *Mutiara Nahdatul Ulama,* (Jakarta: Fatma Press, 1998), 78.

partai-partai Islam baru,[29] keterlibatan dan perjuangan partai-partai Islam dalam perpolitikan Indonesia,[30] konstelasi dan pluralitas di dalam partai Islam,[31] konflik internal,[32] dan pelembagaan partai.[33] Sementara itu, beberapa kajian yang membahas secara spesifik tentang sebuah partai Islam juga dilakukan. Misalnya, penelitian tentang PPP yang dilakukan oleh Harahap,[34] PKB yang dikaji oleh Choirie[35] dan juga didiskusikan oleh sejumlah akademisi baik yang mendukung maupun yang menentang kelahirannya.[36] Choirie juga secara khusus membahas ideologi PKB serta membandingkannya dengan ideologi UMNO (*United Malay National Organization*).[37]

---

[29] Al-Chaidar, *Pemilu 1999: Pertarungan Ideologis Partai-Partai Islam Versus Partai-Partai Sekuler* (Jakarta: Darul Falah, 1998). Hassan, Sukardiyono dan Basri (eds.), *Memilih Partai Islam: Visi, Misi dan Persepsi*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1998).

[30] Hamid Basyaib dan Hamid Abidin, *Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam dari Pra Pemilu 1999 sampai Pemilihan Presiden*, (Jakarta: Alphabet, 1999). Kamarudin, *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu 2004*. Lili Romli, *Islam Yes, Partai Islam Yes,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

[31] Fatwa, *Satu Islam Multi Partai: Membangun Integritas di Tengah Pluralitas*. Amir, *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*.

[32] Kamarudin, *Konflik Internal PKB*, (Depok: Akses Publishing, 2008).

[33] Lili Romli, "Model Pelembagaan Partai Politik di Indonesia: Kasus Partai Keadilan Sejahtera", dalam Edison Muchlis (ed.), *Reformasi Kelembagaan Partai Politik Pasca-Orde Baru di Indonesia,* (Jakarta: LIPI Press, 2007). Syamsuddin Haris, "Problematik Pelembagaan PPP", dalam *ibid.* Tri Ratnawati, "Beberapa Masalah Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Alternatif Solusi", dalam Romli (ed.), *Pelembagaan Partai Politik Pasca Orde Baru Studi Kasus Partai Golkar, PKB, PBB, PBR dan PD*, (Jakarta: P2P LIP, 2008). Nyimas Latifah Letty Azis, "Pelembagaan Partai Bulan Bintang (PBB): Penerus Misi Masyumi" dalam *ibid.* Edison Muchlis, "Upaya Pelembagaan Partai: Kasus Partai Bintang Reformasi", dalam *ibid.*

[34] Abdul Asri Harahap, *PPP: Sintesa Nasionalisme dan Religiusitas*, (Jakarta: Integritas Dinamika Press, 2004).

[35] A. Effendy Choirie, *PKB Politik Jalan Tengah NU*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2002).

[36] Muhammad Munib Huda (ed.), *Pro Kontra Partai Kebangkitan Bangsa,* (Jakarta: Fatma Press, 1998).

[37] A. Effendy Choirie, *Islam-Nasionalisme UMNO-PKB Studi Komparasi dan Diplomasi*, (Jakarta: Pensil-234, 2008).

Berkenaan dengan PKS, sejumlah akademisi meneliti latar belakang dan hubungan partai ini dengan gerakan dakwah[38] dan ajaran-ajaran Hasan Al Banna.[39] Beberapa akademisi juga melakukan kajian mengenai ideologi PKS.[40] Ada pula yang mengaitkan keberadaannya dengan jaringan gerakan kebangkitan Islam di tingkat global,[41] membahas strategi dan konsep politik PKS,[42] hingga menganalisis berbagai aspek terkait dengan konsep dan pelaksanaan kaderisasi.[43] Berbagai kajian terkini tentang PKS juga membahas gerakan dan perilaku politik elite dan kader PKS dan bagaimana kedua hal tersebut kemudian memengaruhi dinamika internal partai.[44]

Kajian tentang partai-partai politik Islam telah menghasilkan berbagai karya penting. Sejumlah kajian tentang partai-partai Islam cukup memengaruhi kajian terkini. Hal tersebut mencakup di

---

[38] Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, (Bandung: Teraju, 2002).

[39] Aay Muhammad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera, Ideologi dan Praktis Politik Kaum Muda Kontemporer*, (Bandung: Teraju, 2004).

[40] Nandang Burhanudin, *Pergerakan Syariah Islam Menurut Partai Keadilan*, (Jakarta: Al Jannah, 2004). M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, (Yogyakarta: LkiS, 2008).

[41] Anthony Bubalo dan Greg Fealy, *Joining the Caravan? The Middle East, Islamism and Indonesia*, (Alexandria: Lowy Institute for International Policy, 2005). Yon Machmudi, *Partai Keadilan Sejahtera, Wajah Baru Islam Politik Indonesia*, (Bandung: Harakatuna Publishing, 2005).

[42] Sapto Waluyo, *Kebangkitan Politik Dakwah, Konsep dan Praktik Politik Partai Keadilan Sejahtera di Masa Transisi*, (Bandung: Harakatuna Publishing 2005).

[43] Hurriyah, *Sistem Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera (1998-2003)*, Skripsi, Tidak Diterbitkan, (Depok: Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2004).

[44] Ahmad-Norma Permata, "The Prosperous Justice Party (PKS) and the Decline of Political Islam in the 2009 Election in Indonesia", dalam Ahmad-Norma Permata dan Najib Kailani, *Islam and the 2009 Indonesian Election, Political and Cultural Issues: The Case of the Prosperous Justice Party (PKS),* (Bangkok: IRASEC, 2010). Arief Munandar, *Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004*, Disertasi Ph.D, Tidak Diterbitkan, (Depok: Program Pascasarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2011).

antaranya kajian tentang ideologi partai,[45] sejarah kemunculan dan perjuangan partai-partai Islam di pentas perpolitikan nasional,[46] dan hubungan partai-partai politik Islam dengan rezim Orde Baru.[47] Akan tetapi, apa yang masih belum seutuhnya terbahas tuntas adalah penelitian yang secara langsung membahas fenomena perpecahan dan soliditas dalam hubungannya dengan pelembagaan partai politik.

3. Perpecahan dan Soliditas

Beberapa kalangan dalam dunia akademis telah membahas fenomena fragmentasi dan soliditas partai politik secara mendalam. Dari penjelasan mereka terlihat bahwa tidak ada penjelasan atau faktor tunggal di balik persoalan itu. Subbagian berikut akan membahas latar belakang atau faktor-faktor kemunculan perpecahan dan soliditas. Pengkajian mendalam masalah ini diharapkan dapat menjelaskan berbagai persoalan di balik munculnya perpecahan dan soliditas, di mana faktor-faktor yang memainkan peran paling menentukan dalam memunculkan soliditas sejatinya merupakan faktor-faktor yang sama untuk menghindari terjadi perpecahan, begitu pula sebaliknya.

a. Perpecahan

Masalah perpecahan atau fragmentasi dan soliditas atau kohesi partai politik telah dikaji dari berbagai sudut pandang. Dalam buku ini, perpecahan, atau kerap juga disebut fragmentasi, yang dimaksud adalah sebuah situasi di mana sebuah partai terpecah menjadi sejumlah kelompok atau faksi yang saling mengklaim sebagai pihak yang paling autentik atau sah dan oleh karenanya berhak untuk

---

[45] Deliar Noer, "Islam dan Politik: Mayoritas atau Minoritas?", *Prisma*, No. 5 tahun 1998.

[46] Umar Radi, *Strategi PPP 1973-1982: Suatu Studi tentang Kekuatan Politik Islam di Tingkat Nasional,* (Jakarta: Integritas Press, 1984). Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Politik Nasional: 1945-1965,* (Jakarta: Grafitti Press, 1987). M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993).

[47] Ward, *The Foundation of the Partai Muslimin Indonesia*. Syamsuddin Haris, *PPP dan Politik Orde Baru*, (Jakarta: Grasindo, 1991).

menguasai atau memanfaatkan seluruh aset partai dan berhak untuk menyatakan sebagai perwakilan sesungguhnya atas aspirasi dan kepentingan partai.

Akademisi meyakini bahwa fenomena perpecahan partai politik merupakan akibat dari situasi di mana partai gagal merespons berkembangnya ketidakpuasan di antara para anggota melalui dialog. Menurut Hirschman, dalam kajiannya mengenai pengelolaan negara dan perusahaan sebagai sebuah organisasi, keputusan seseorang atau sekelompok orang untuk keluar dari satu organisasi terkait dengan keyakinan atau kesadaran atas tidak lagi bermanfaatnya dialog. Dialog menjadi artifisial dan berubah menjadi sekadar ajang pembelaan diri atau kepentingan masing-masing pihak. Sebaliknya, pilihan untuk menjadi tetap loyal atau tetap berada di dalam sebuah organisasi mencerminkan adanya keyakinan akan prospek positif dari dialog, sebagai media untuk mengekspresikan kepentingan dan membangun kembali pemahaman dan komitmen bersama.[48] Dengan kata lain, dalam pandangan Hirschman, sejauh mana aspirasi itu didengar dan secara proporsional diakomodasi oleh partai memainkan peranan penting dalam menjaga soliditas sebuah organisasi.

Di dalam konteks partai politik, kajian Lewis Fickett tentang perpecahan politik memperlihatkan adanya perbedaan dalam pemahaman ideologi dan kehadiran konflik personal di antara elite adalah akar-akar utama perpecahan partai. Fickett menunjukkan bahwa perpecahan akan tetap menjadi masalah yang tidak terselesaikan sepanjang masalah-masalah dasar ini tidak secara tepat ditangani.[49] Kajiannya secara umum menekankan peranan penting variabel budaya dan personal dalam berkembangnya perpecahan internal.

Dalam kaitan dengan peranan ideologi, Daniel Bell dan Bernard Shaw menyatakan bahwa walaupun ideologi kadang-kadang digunakan

---

[48] Albert O. Hirschman, *Exit, Voice and Loyalty: Response to Decline in Firms, Organisation and States*, (Massachusetts: Harvard University Press, 1970).

[49] Lewis P. Fickett, Jr., *The Major Socialist Parties of India: A Study in Leftist Fragmentation, Foreign and Comparative Studies*, (New York: Maxwell School of Citizenship and Public Affairs Syracuse University, 1976).

untuk menyembunyikan atau menutupi ambisi pribadi sebagai sumber utama terjadinya konflik, kasus-kasus yang terjadi di partai-partai berorientasi demokrat sosial di negara-negara Barat memperlihatkan peranan utama ideologi di balik gejolak soliditas partai.[50] Artinya, gejolak partai yang mengguncang soliditas partai turut disebabkan oleh perbedaan dalam menafsirkan dan menyikapi ideologi. Stephen Padgett dalam kajiannya tentang Partai Demokratik Sosial Jerman juga meyakini perbedaan dalam memahami ideologi sebagai faktor penting di balik perpecahan partai. Dia menegaskan bahwa semakin sebuah partai politik cenderung menjadi organisasi terbuka, semakin besar peluang munculnya keragaman di internal partai, termasuk keragaman dalam memaknai ideologi, yang pada gilirannya berpotensi memperlemah kesatuan partai.[51]

Di lain pihak, Martin Bull meyakini bahwa perselisihan tentang orientasi dan strategi partai untuk mencapai tujuan adalah faktor-faktor yang patut dipertimbangkan manakala membahas latar belakang perpecahan partai. Lebih dari itu, dia berkesimpulan bahwa lemahnya mekanisme disiplin dan digunakannya model rekrutmen partai berbasis massa cenderung mengurangi disiplin kader dan pada akhirnya memberikan peluang munculnya konflik internal.[52] Berbagai kajian di atas memperlihatkan hubungan antara lemahnya kesatuan ideologi dan kurangnya disiplin organisasional dengan lemahnya kesatuan partai.

Dalam konteks keindonesiaan, pembahasan tentang perpecahan partai secara tidak langsung dikembangkan oleh para pakar melalui berbagai kajian konflik internal dan pengelolaan partai. Salah satu karya yang menggambarkan fenomena perpecahan sejumlah partai politik Islam di era Reformasi ditulis oleh Soebekti, Achmad, dan

---

[50] David S. Bell dan Eric Show (eds.), *Conflict and Cohesion in Western European Social Democratic Parties,* (London: Pinter Publisher 1994), 175.

[51] Stephen Padget, "The German Social Democratic Party: Between Old and New Left", dalam *ibid.,* 10–28.

[52] Martin F. Bull, "Social Democracies' Newest Recruit? Conflict and Cohesion in the Italian Democratic Party of the Left", dalam *ibid.*, 31–48.

Hendrowinoto.[53] Meski demikian, buku ini juga memotret fenomena perpecahan partai-partai politik pada umumnya dan tidak secara khusus mengenai partai-partai Islam. Buku ini mendiskusikan sejumlah faktor di balik perpecahan partai di era Reformasi, yaitu kegagalan untuk menciptakan kepemimpinan yang baik, ketidakmampuan untuk membangun sistem internal yang adil, dan keberadaan elite-elite partai yang pragmatis.

Haris dalam kajiannya tentang PPP di era Orde Baru memperlihatkan berbagai faktor yang menciptakan masalah-masalah serius di partai dalam penanganan konflik internal.[54] Pertama adalah keberadaan kepemimpinan yang elitis dan eksklusif, yang mengerdilkan masukan atau pandangan alternatif dan tidak menoleransi perbedaan. Keadaan ini menciptakan resistensi dan pada akhirnya disharmoni di antara anggota dan kader partai. Kedua adalah distribusi posisi atau jabatan strategis yang tidak proporsional dan berkeadilan, baik di dalam partai maupun di pemerintahan. Ketimpangan pembagian ini menciptakan suasana yang tidak nyaman terutama bagi kubu NU, sebagai kelompok mayoritas yang selama masa tertentu justru mendapat lebih sedikit jabatan, dan menjadi isu sensitif terus-menerus di partai ini.

Ketiga adalah struktur organisasi yang irasional dengan cabang-cabang yang memiliki hak untuk membuat kebijakan secara independen, yang kerap menyebabkan tidak saja terjadinya tumpang-tindih dalam proses pembuatan kebijakan, tetapi belakangan memunculkan disintegrasi internal. Faktor keempat adalah intervensi pemerintah. Hal ini terjadi terutama disebabkan ketidakmampuan untuk memecahkan masalah internal dan kecenderungan, khususnya pada kelompok minoritas, mengundang pihak pemerintah sebagai patron politik untuk membantu menyelesaikan masalah. Keadaan ini sebenarnya sejalan dengan kepentingan rezim otoriter Orde Baru untuk

---

[53] E. Soebekti, Achmad, Nirwan Ki S. Hendrowinoto (eds.), *Di Saat Ekonomi Terpuruk Partai Politik Rame-Rame Pecah Kongsi*, (Jakarta: Gria Media Prima 2002).

[54] Haris, *PPP dan Politik Orde Baru.*

memiliki akses terhadap partai politik agar dapat mengontrol dan pada akhirnya memperlemah partai-partai politik non-pemerintah. Faktor terakhir adalah dua faksi utama di dalam partai, yaitu Parmusi dan NU, memiliki cara pandang berbeda dalam melihat keberadaan partai. Parmusi cenderung melihat PPP di dalam perspektif sekuler dan cenderung pragmatis dalam aktivitas politiknya, sementara NU menganggap PPP sebagai partai Islam yang memiliki kewajiban utama memperjuangkan kepentingan Islam secara lebih ketat.

Dalam kajiannya tentang konflik internal PKB, Kamarudin mengungkapkan sebab-sebab di balik kegagalan PKB menghindari konflik internal yang kemudian membawa partai ini ke arah perpecahan internal.[55] Faktor pertama, keberadaan kepemimpinan personal Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Dewan Syura PKB. Hal ini didukung AD/ART partai yang memberikan kekuasaan yang besar kepada Dewan Syura, khususnya dalam menentukan arah partai dan proses pengambilan kebijakannya. Faktor kedua, ketidakmauan setiap kelompok yang bertikai untuk mengompromikan kepentingannya. Ketiga, ketidakmampuan memecahkan masalah-masalah internal secara independen. Kegagalan ini cenderung memberikan peluang kepada faktor eksternal untuk berperan, yang pada akhirnya justru cenderung memperburuk ketimbang meredakan konflik. Contohnya, keputusan ambigu Mahkamah Agung (MA) tentang pihak mana yang berhak mengklaim keabsahan untuk memimpin PKB, sebagai faktor eksternal tidak hanya menguatkan keyakinan masing-masing kelompok untuk memiliki hak mewakili PKB, tetapi juga mendorong pemerintah untuk akhirnya tetap mengakomodasi keberadaan kedua kelompok yang saling bertikai. Sikap pemerintah yang mengakomodasi keduanya itu justru pada akhirnya makin memperkuat konflik. Faktor keempat adalah kegagalan pendekatan budaya untuk memecahkan konflik internal termasuk *islah* (upaya untuk mengumpulkan kelompok-kelompok yang bertikai dalam tradisi Islam).

---

[55] Kamarudin, *Konflik Internal PKB*, 257–258.

Kamarudin juga meyakini bahwa kasus konflik internal di PKB menunjukkan adanya gejala pragmatisme (perilaku mementingkan diri sendiri) di antara anggota-anggota partai. Menurut Kamarudin, sikap ini memperkuat konflik kepentingan dan memperlemah ketaatan santri terhadap kiai yang pada akhirnya menghancurkan spirit kebersamaan.[56]

Pembahasan di atas menunjukkan sejumlah faktor-faktor di balik fenomena perpecahan internal, yaitu perbedaan dalam pemahaman ideologi partai, defisiensi nilai-nilai bersama, kehadiran konflik personal di antara elite, perselisihan terkait orientasi dan strategi partai dalam mencapai tujuannya, lemahnya penegakan disiplin partai, model partai berbasis massa dalam rekrutmen, kegagalan menciptakan kepemimpinan yang baik, ketidakmampuan untuk mengonstruksi sistem internal yang adil, dan ketidakmampuan untuk memecahkan masalah partai secara independen yang mengundang intervensi pihak ketiga.

b. Soliditas

Istilah soliditas atau kohesi di dalam konteks akademis ilmu politik telah dikembangkan dalam beberapa pengertian dan kerangka kerja. Sejumlah pakar memfokuskan pembahasan mengenai kohesi atau soliditas partai dengan menyoroti perilaku memilih anggota partai di parlemen. Hal ini terutama membahas tentang bagaimana partai mencoba mengontrol perilaku pilihan anggotanya dalam menjalankan kepentingan partai di badan legislatif, terutama konsisten dengan pilihan partai pada saat pemungutan suara. Pembahasan mereka juga menyentuh alasan-alasan di balik kegagalan atau keberhasilan partai membangun kohesivitas atau soliditas terkait terutama dengan sikap anggota-anggota mereka di parlemen.[57]

---

[56] *Ibid.*, 261–262.

[57] Ergun Ozbudun, *Party Cohesion in Western Democracies: A Causal Analysis, Comparative Politics Series,* (New York: Sage, 1970). Leon D. Epstein, "Cohesion of British Parliamentary Parties" dalam John C. Wahlike dan Heinz Eulau (eds.), *Legislative Behaviour: A Reader in Theory and Research*, (Glencoe: The Free Press, 1959), 132–143. Leon D.

Buku ini tidak menggunakan pengertian soliditas yang sama dengan kajian di atas. Soliditas yang dimaksud di dalam buku ini adalah kemampuan mempertahankan keberadaan dan keutuhan. Kehadiran soliditas di dalam partai politik sebagai sebuah sistem, oleh karena itu, akan dikaitkan dengan kapasitas atau kemampuan sebuah partai untuk menyatukan dan mempertahankan seluruh subsistem di dalam partai politik, yang memastikan bahwa seluruh unsur bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Karena alasan ini, pengertian soliditas akan dimaknai sama dengan berbagai istilah seperti kesatuan, kohesi, harmoni, dan homogenitas.

Berkenaan dengan hal tersebut, persoalan bagaimana memelihara soliditas, koherensi partai, dan pengurangan ketegangan di antara unsur partai menjadi penting. Sebagai sebuah sistem yang terdiri dari subsistem, dalam konteks pembangunan soliditas, partai akan memainkan peran seperti yang disebutkan Parson sebagai "integrasi", yakni "persoalan mempertahankan solidaritas di antara unit-unit, untuk kepentingan agar dapat berfungsi secara efektif".[58]

Sejumlah akademisi telah menyampaikan pandangannya terkait dengan latar belakang terciptanya soliditas partai. Menurut Mahendra Singh, secara umum, ada dua faktor yang menjelaskan mengapa partai itu bersifat kohesif, yaitu faktor-faktor internal yang berada di dalam partai itu sendiri dan faktor eksternal seperti situasi sosio-kultural dan sistem politik tempat partai tersebut eksis. Terkait

---

Epstein, *Political Parties in Western Democracies*, (New Brumswick, New Jersey: Transaction Books, 1980), 315–350. Gerhard Lowenberg dan Samuel Patterson, *Comparing Legislatures*, (Boston: Little Brown, 1979). Robert Harmel dan Kenneth Janda, *Parties and Their Environemnts: Limits to Reform?,* (New York: Longman, 1982), 74–94. V.O. Key Jr., *Politics, Parties and Pressure Groups,* 5th Edition, (New York: Thomas Y. Crowell, 1964), 653–689. Maor, *Political Parties and Party System Comparative Approaches and the British Experience,* 135–167.

[58] Talcott Parsons, "Some Highlights of the General Theory of Action", dalam Ronland Yound (ed.), *Approaches to the Study of Politics*, (Evanston: Northwestern University Press, 1962), 294.

dengan aspek pertama,[59] dia meyakini bahwa partai yang menjadikan ideologi, dan bukan hal-hal yang bersifat pragmatis, sebagai faktor pengikat, cenderung mampu mempertahankan soliditas internal. Hal ini berarti partai berlandaskan ideologi dengan disipilin tinggi (*totalitarian-ideological party*) akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi partai yang solid daripada partai yang berorientasi pragmatis (*restricted-pragmatic party*). Dia juga meyakini bahwa partai yang menerapkan kebijakan rekrutmen yang ketat, dengan anggota yang terbatas, akan lebih solid daripada partai yang terbuka.

Singh melihat partai yang melaksanakan model partai cabang (*branch party model*) cenderung lebih kondusif untuk soliditas internal darpada partai kaukus (*caucus party model*), yang kekuasaannya cenderung terdesentralisasi. Terkait dengan hal ini, dengan demikian, partai yang tersentralisasi cenderung lebih mampu menjaga soliditasnya daripada partai yang terdesentralisasi. Singh juga menyatakan bahwa partai yang mengartikulasikan aturan mainnya secara jelas akan lebih kohesif karena memiliki pedoman untuk seluruh kegiatan partai. Dengan kata lain, partai semacam ini memiliki peluang yang lebih baik untuk dapat mempertahankan soliditasnya daripada partai dengan artikulasi yang lemah, yang "tidak menentukan aturan yang jelas untuk mengelola struktur internal dari unsur-unsur serta unit-unitnya dan keterkaitan mereka dengan partai."[60]

Berkenaan dengan aspek eksternal, Singh melihat sistem presidensial sebagai unsur yang secara potensial akan melemahkan soliditas partai. Dia juga melihat bahwa negara federal dan penggunaan sistem distrik dalam pemilu akan berperan sama. Akan tetapi, dia juga meyakini pernyataan itu tidak sepenuhnya benar karena fenomena rendahnya soliditas partai juga dapat ditemukan di negara-negara yang menggunakan sistem parlemen, negara kesatuan, dan

---

[59] Mahendra P. Singh, *Cohesion in Predominant Party: The Pradesh Congress and Party Politics in Bihar*, (New Delhi: S. Chand & Co (Pvt) LTD, 1975), 12–19.

[60] *Ibid.*, 16.

sistem mayoritas dalam pemilu. Hal ini berarti bahwa sistem politik cenderung bermain sebagai unsur pelengkap dalam soliditas partai.

Singh juga meyakini bahwa masyarakat yang terpecah (*fragmented society*) berpotensi memberi efek negatif terhadap perkembangan soliditas, khususnya bagi partai-partai yang berupaya berdiri di atas semua golongan dan menjadi representasi mereka. Kemudian, dalam situasi di mana kompetisi antarpartai demikian ketat, kesadaran untuk menjaga kesatuan partai dalam rangka memenangkan kompetisi kerap membuka jalan bagi kemunculan soliditas partai. Meskipun demikian, berkenaan dengan kasus Partai Kongres di Bihar, Singh juga melihat soliditas sebenarnya dapat juga terjadi ketika partai politik tidak menghadapi kompetitor serius di distriknya.[61] Pada umumnya, Singh melihat relativitas aspek eksternal sebagai satu-satunya unsur atau sumber yang penting terhadap soliditas atau kohesi sebuah partai.

Kajian lain tentang ideologi partai menegaskan adanya korelasi antara ideologi dan soliditas. Kajian Duverger atas partai politik, misalnya, melihat bahwa ideologi sayap kiri lebih mampu mendisiplinkan anggota partai sehingga mampu menciptakan partai yang lebih terkonsolidasi. Dia meyakini bahwa partai hierarkis, yang menjadi karakter dari partai-partai kiri ataupun partai-partai yang kekuasaannya terpusat (*centralized parties*), memiliki kecenderungan kuat menjadi partai politik yang solid. Lebih lanjut, dia meyakini bahwa semakin ekstrem ideologi yang dimiliki sebuah partai politik, semakin besar peluang partai itu dapat menghindari perpecahan.[62] Berkenaan dengan ideologi, kajian Kumar atas partai-partai politik India memperlihatkan peran penting ideologi bagi soliditas partai terutama sebagai faktor pemersatu antara faksi-faksi dan berbagai variabel yang memperkuat organisasi partai.[63]

---

[61] *Ibid.*, 7–12.

[62] Lihat pembahasan tentang opini Duverger di Maor, *Political Parties and Party Systems: Comparative Approaches and The British Experience,* 137.

[63] Kadar Nath Kumar, *India Political Parties,* (New Delhi: Mittal Publication, 1990), 328.

Sementara itu, beberapa akademisi cenderung melihat peran rekrutmen partai dalam pembangunan soliditas partai. Dalam hal ini, Alan Ware melihat soliditas dapat lebih mudah dipertahankan apabila partai politik merupakan "partai kader" dibandingkan 'partai massa', karena partai kader dapat lebih menjamin militansi dan soliditas di antara para kader.[64] Di lain pihak, Ozbudun, berbeda dari Ware, menyatakan bahwa partai massa memiliki kualifikasi menjadi unsur pendukung terhadap soliditas partai, karena partai politik semacam ini dapat menjamin independensi keuangan dan berkurangnya hubungan *patron-client* di tubuh partai, di mana hubungan *patron-client* itu sendiri dapat membahayakan loyalitas kader terhadap partai.[65]

Brass meyakini bahwa pemimpin adalah unsur yang sangat penting dalam menciptakan soliditas partai. Hal ini dikarenakan kemampuan mereka untuk menyatukan kelompok, yang didasarkan pada pemahaman atas masalah-masalah yang tengah dihadapi, kemampuan untuk menyelesaikan konflik dan mengenali setiap seni manipulasi, termasuk menyediakan berbagai imbalan material untuk mempertahankan loyalitas pengikutnya.[66] Sejalan dengan pandangan ini, menurut Prassad, ideologi sejatinya memainkan peranan sekunder dalam mempertahankan soliditas, karena persoalan lebih menentukan ada pada para pemimpin.[67] Dengan kata lain, peran pemimpin politik dalam menjamin soliditas partai menurutnya jauh lebih menentukan ketimbang ideologi partai. Berbagai studi ini dengan demikian mengonfirmasi peran pemimpin partai sebagai unsur yang menentukan dalam hal pembangunan soliditas partai. Myron Weiner juga meyakini peran pemimpin terhadap soliditas partai khususnya sebagai unsur yang dapat menjaga kompromi di antara faksi-faksi

---

[64] Alan Ware (ed.), *Political Parties, Electoral Change and Structural Response*, (Oxford: Basil Blackwell, 1987), 12.

[65] Ozbudun, *Party Cohesion in Western Democracies: A Causal Analysis*.

[66] Paul R. Brass, *Factional Politics in an Indian State – The Congress Party in Uttar Pradesh*, (Berkeley: University California Press, 1965), 232–238.

[67] R. C Prassad, "Viable System" dalam "Our Political Parties: Seminar", 24 Desember 1969, 29–32 dalam Kumar, *India Political Parties*, 300–301.

yang berselisih, sumber prestise bagi para anggota, dan sumber utama yang mengartikulasikan nilai-nilai.[68] Weiner juga melihat faktor lain yang berperan penting dalam mempertahankan soliditas partai. Faktor lain itu adalah sikap toleran terhadap keberadaan faksi-faksi lain dan adanya konsensus atau kesamaan idealisme.[69]

Beberapa kajian tentang partai demokratik sosial di Eropa Barat menunjukkan beberapa kondisi di balik kemunculan soliditas partai.[70] Hal ini mencakup gaya organisasi atau struktur organisasi partai (dalam hal ini, partai tengah dan partai dengan tingkat disiplin yang tinggi cenderung lebih kondusif terhadap soliditas partai), ideologi (yang menyatukan kader partai dan pengikut ideologinya), tokoh karismatik (khususnya terkait dengan Partai Pekerja Sosialis Spanyol), adanya nilai-nilai pemersatu dan keadaan eksternal seperti sistem politik, masalah-masalah nasional, dan adanya partai-partai pesaing.

Sementara itu, dalam konteks politik kekinian, kajian yang dilakukan oleh Subhan Akbar dalam membahas kemampuan Partai Keadilan (PK), pendahulu PKS, untuk mempertahankan soliditasnya menarik pula untuk diperhatikan. Dalam kajian Subhan Akbar, dia berkesimpulan bahwa fenomena soliditas partai adalah hasil dari tiga hal, yakni keberhasilan membangun semacam ideologi pemersatu, kepemimpinan yang mengedepankan musyawarah, dan sistem kaderisasi yang baik.[71]

Masih terkait dengan PKS, kajian atas aktivitas internal PKS khususnya Taklim Rutin Mingguan (TRM) atau *halaqah* yang dilakukan Prabowo memperlihatkan adanya korelasi antara keberadaan *halaqah* dan kemampuan untuk mencari tujuan yang *superordinate* atau nilai

---

[68] Myron Weiner, *Party Politics in India: The Development of a Multi-Party System,* (Princeton: Princeton University Press, 1957), 241–242.

[69] *Ibid.*, 242–246.

[70] Bell dan Shaw (eds.), *Conflict and Cohesion in Western European Social Democratic Parties.*

[71] Subhan Akbar, *Partai Keadilan Sejahtera: Faktor-Faktor Penguat Soliditas*, Skripsi, Tidak Diterbitkan, (Depok: Program Ekstensi, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2004).

pemersatu bagi kader PKS. Nilai-nilai pemersatu itu akan mendukung partai dalam mempertahankan soliditasnya. Prabowo berkesimpulan bahwa keberadaan aktivitas yang terlembaga seperti *halaqah* di partai memungkinkan partai mempertahankan soliditasnya.[72] *Halaqah* juga merupakan salah satu unsur kaderisasi PKS yang menunjukkan bahwa keberadaan proses kaderisasi yang baik adalah prasyarat bagi soliditas partai.

Berbagai pembahasan di atas memperlihatkan sejumlah faktor penting yang memengaruhi soliditas partai, yang secara umum mencakup aspek eksternal dan internal. Berkenaan dengan aspek eksternal, faktor-faktor ini mencakup kondisi sosial dan budaya yang melingkupi partai politik, kehidupan partai politik, dan keberadaan sistem politik. Adapun aspek internal mencakup sejumlah faktor seperti tipe organisasi, ideologi partai, peranan pemimpin, dan keberadaan kaderisasi yang baik.

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa perpecahan dan soliditas merupakan fenomena yang memiliki sejumlah alasan di balik keberadaannya yang sepintas terlihat terpisah atau berbeda. Meski demikian, kajian tentang berbagai persoalan di balik masalah ini pada dasarnya berkesimpulan dan menunjukkan bahwa kemampuan untuk menghindari perpecahan, dengan sejumlah variabel atau dimensi, dalam hal tertentu, sesungguhnya merupakan titik masuk untuk mempertahankan soliditas. Dari sini dapat dibangun sebuah argumen sebagaimana yang diyakini oleh buku ini bahwa sebuah parameter atau bahan kajian dapat digunakan sebagai landasan untuk mengukur atau membahas keberadaan atau ketiadaan perpecahan dan soliditas secara simultan atau bersamaan.

Sementara itu, sejumlah faktor yang dibahas di atas tampak menjadi kurang relevan karena tidak didukung dengan data yang meyakinkan atau oleh kondisi nyata di tingkat praktis. Sejumlah faktor bahkan

---

[72] Triatno Yudho Prabowo, *Pengaruh Taklim Rutin Terhadap Perilaku Politik Kader Partai Keadilan Sejahtera dari Perspektif Teori Integroup Relation, Skripsi,* (Jakarta: Universitas Islam Jakarta Syarif Hidayatullah, 2006).

terlihat memiliki masalah karena bersifat kontradiktif. Masalah model organisasi, misalnya, cenderung menjadi perdebatan karena perpecahan secara potensial dapat terjadi, baik pada partai "kader" maupun pada partai "massa". Kajian Ozbudun dan Ware yang memberikan hasil kontradiktif dari hubungan antara partai kader dan soliditas merepresentasikan keadaan ini. Selain itu, posisi pemimpin juga masih diperdebatkan. Bagi sebagian kalangan, pemimpin diyakini merupakan variabel atau unsur pendukung bagi terciptanya soliditas, tetapi bagi yang lainnya, variabel ini justru memiliki potensi membahayakan soliditas partai politik, terutama terkait dengan adanya ambisi pribadi dan konflik kepentingan antar elite.

Di samping itu, sebagian temuan penelitian komparatif yang dibahas di atas terlihat kurang relevan dengan kajian ini. Hubungan antara ideologi sayap kiri dan kecenderungan untuk mampu mempertahankan soliditas partai, misalnya, sulit untuk diterapkan dalam konteks politik Indonesia. Begitu juga dengan kajian yang meyakini adanya korelasi antara jumlah partai politik yang besar dan kecenderungan soliditas, terlihat kurang relevan dengan kasus Indonesia. Untuk hal yang pertama, ini dikarenakan terminologi "kiri" dan "kanan" sendiri tidak menemukan relevansi dalam politik Indonesia kontemporer.[73] Masyarakat cenderung mengategorisasi partai politik di Indonesia berdasarkan pada nasionalis (sekular) atau (nasionalis) Islam. Untuk persoalan kedua, kasus Indonesia terlihat justru bertentangan dengan temuan komparatif itu. Indonesia yang secara terus-menerus menerapkan sistem multipartai tetap saja masih menghadapi fenomena perpecahan bahkan sekarang ini tampak lebih intens. Dalam konteks ini, faktor eksternal, walaupun tidak dapat sepenuhnya ditolak, dapat dianggap sekadar faktor pendukung terjadinya perpecahan partai. Sehubungan dengan itu adalah sesuatu yang dapat diterima jika diasumsikan bahwa sepanjang partai-partai

---

[73] Saiful Mujani dan R. William Liddle, "Voters and the New Indonesian Democracy", dalam Edward Aspinall dan Marcus Mietzner, *Problem of Democratization in Indonesia: Elections, Institutions and Society*, (Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 2010), 75–99.

politik dapat mengelola masalah internalnya sendiri dengan baik, partai-partai politik akan cenderung dapat mempertahankan diri dari perpecahan.

Apa yang tampaknya merupakan celah atau belum benar-benar dibahas dari berbagai kajian di atas adalah penjelasan tentang peranan ketiadaan atau keberadaanan pelembagaan partai dalam mengondisikan atau menciptakan perpecahan dan soliditas partai, khususnya di dalam konteks partai politik Islam Indonesia kontemporer.

Keberadaan kepemimpinan yang tidak demokratis dan tidak mampu memecahkan masalah internal secara independen, misalnya, pada dasarnya dapat dikaitkan dengan kegagalan partai politik untuk bersikap konsisten atau bersikukuh dalam mempertahankan aturan main atau secara konsisten mengikuti AD/ART partai. Begitu juga keberadaan elite yang terpecah seharusnya juga dapat dilihat sebagai produk kegagalan partai untuk menciptakan komunikasi yang baik dan kepercayaan di antara mereka. Keadaan ini sebenarnya merupakan hasil dari sebuah potensi konflik, yang tadinya bisa saja tidak seberapa, namun tidak terkelola dengan baik sehingga membesar. Sementara itu, kemampuan untuk mempertahankan kepercayaan dan loyalitas seharusnya dapat dilihat sebagai bagian dari keberhasilan mempertahankan kaderisasi dan bertindak adil serta mengikuti aturan main partai. Kemudian, kemampuan untuk menghindari elite yang dapat bertindak di luar batas aturan main melalui sikap konsisten dalam menjalankan dan menghormati AD/ART partai jelas turut memainkan peranan penting. Keberadaan mekanisme yang dapat memberikan solusi atas konflik internal tidak dapat pula diabaikan sebagai latar belakang penting untuk menciptakan soliditas internal. Oleh karena itu, buku ini berargumen bahwa keadaan internal partai yang akan membawa partai ke arah perpecahan atau soliditas banyak ditentukan oleh kemampuan partai itu sendiri untuk membangun dan memelihara pelembagaannya.

4. Pelembagaan Partai

Buku ini akan menggunakan kajian institusionalisasi atau pelembagaan partai politik. Bidang kajian ini berhubungan dengan kajian politik yang dikembangkan oleh Duverger[74] yang menurut Sartori, membuka pendekatan baru terhadap kajian partai-partai politik dengan berfokus pada masalah-masalah organisasi internal dan mengaitkannya dengan bidang umum teori organisasi.[75] Huntington adalah pakar politik yang pertama menawarkan definisi dan kriteria tentang pelembagaan, yakni "*the process by which organizations and procedures acquire value and stability*". Dalam definisi itu tersirat makna bahwa pelembagaan adalah proses di mana semua pengaturan dan prosedur (aturan main) memperoleh nilai (atau menjadi sebuah nilai) dan mencapai kestabilan (atau dijalankan secara konsisten).[76]

Definisi semacam ini menjadi panduan untuk memahami salah satu makna dari pelembagaan yakni manakala aturan dan prosedur menjadi demikian bernilai dan secara konsisten ditegakkan. Hal yang menarik dari definisi mengenai pelembagaan ini adalah bahwa Huntington menyebutnya sebagai sebuah proses. Hal ini mengindikasikan bahwa pelembagaan terkait dengan sebuah kegiatan atau aktivitas yang (tengah) terjadi dan bukan semata sebuah bentuk akhir.

Huntington kemudian menawarkan sejumlah kriteria untuk mengukur keberadaan pelembagaan partai politik: kemampuan partai politik untuk mengembangkan kemampuan adaptasi, kompleksitas, otonomi, dan koherensi. Kemampuan adaptasi terkait dengan tingkat kemampuan untuk bertahan dalam sebuah sistem politik dan dalam konteks hubungan kekuasaan. Dia meyakini bahwa "semakin mampu sebuah organisasi atau prosedur beradaptasi, semakin tinggi organisasi itu terlembaga". Kompleksitas terkait

---

[74] Maurice Duverger, *Political Parties: Their Organisation and Activity in the Modern State*, (London: Methuen, 1964).

[75] Sartori, *Parties and Party Systems. A Framework for Analysis, Volume 1*, 71.

[76] Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Society*, (New Haven: Yale University Press, 1968), 394.

dengan keberadaan sejumlah subunit di dalam partai politik. Hal ini juga dapat berkaitkan dengan berbagai subunit organisasi, baik secara hierarkis maupun fungsional. Dia berkesimpulan bahwa ada hubungan antara sejumlah ragam subunit dan kemampuan partai politik untuk mempertahankan loyalitas anggotanya. Pada akhirnya, keadaan ini akan memberi kontribusi terhadap penciptaan stabilitas internal di dalam partai politik.

Otonomi merujuk ke tingkat perbedaan dan memiliki batasan yang jelas dengan kelompok-kelompok lain. Hal ini berarti partai yang terlembaga mampu mempertahankan independensi baik secara organisasional maupun prosedural dari pengaruh kelompok sosial lainnya, termasuk kelompok nonpolitik dan metode perilaku atau ekspresi kepentingan. Koherensi diukur berdasarkan pada keberadaan konsensus internal, termasuk kemampuan untuk membangun resolusi konflik. Dia mengartikan bahwa kapasitas untuk menciptakan kesatuan, *esprit de corps*, kepercayaan diri, dan disiplin sangatlah penting dalam pelembagaan partai.[77]

Beberapa akademisi lain belakangan juga mengembangkan definisi dan kondisi pelembagaan. Di antaranya yang amat patut diperhatikan adalah kontribusi Panebianco yang mendefinisikan pelembagaan sebagai "cara organisasi menciptakan soliditas atau menjadi solid."[78] Proses ini pada dasarnya dikaitkan dengan kemampuan partai untuk mempertahankan otonominya dari lingkungan yang menaunginya dan tingkat *systemness* (kesisteman) atau tingkat interdependensi di antara anggotanya. Oleh karena itu, menurut Panebianco, sebuah partai yang terlembaga adalah partai yang dapat meningkatkan otonomi dari intervensi kelompok lain serta mempertahankan interdependensi antaraktor-aktor internalnya dan berbagai unit yang berbeda di dalamnya. Dia menyatakan tahap awal dari periode perkembangan partai menentukan kemampuan

---

[77] *Ibid.*, 394–405.

[78] Angelo Panebianco, *Political Parties: Organization and Power*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 49.

partai untuk mencapai tipe ideal. Menurut pendapatnya, sebuah partai politik yang dikembangkan melalui proses yang tersentralisasi, ketimbang melalui proses yang terdifusi, dan dengan 'dukungan eksternal' yang terbatas, ketimbang bergantung penuh pada 'legitimasi eksternal', kemungkinan besar akan lebih mudah memiliki otonomi dan mampu membangun tingkat interdependensi yang tinggi di antara unsur-unsurnya.[79]

Maor membagi pemahaman atas proses pelembagaan ke dalam dua kategori.[80] Kategori pertama merujuk kepada proses pelembagaan sebagai sebuah proses yang mencakup berbagai kajian dari Duverger, Huntington, hingga Panebianco. Hal utama dari kategori ini adalah pelembagaan terkait dengan sejarah dan upaya sebuah partai politik untuk mengembangkan diri atau menjadi terlembaga. Dengan kata lain, pelembagaan partai terkait dengan proses perkembangan partai. Kategori kedua melihat proses pelembagaan sebagai keadaan sebuah partai yang telah mendapatkan pengakuan publik. Dalam perspektif ini, menurut Janda, partai yang terlembaga adalah "*one that is reified in the public mind so that 'the party' exists as a social organisation apart from its momentary leaders and this organisation demonstrate recurring patterns of behaviour valued by those who identified with it*".[81] Dari definisi itu terkandung makna bahwa partai yang terlembaga adalah partai yang tertanam dalam benak publik (*reification*). Dengan demikian, kategorisasi Maor melihat pelembagaan sebagai baik sebuah proses internal maupun sebagai hasil upaya untuk bertahan di masyarakat.

Meski demikian, walaupun dia berkesimpulan bahwa kedua kategori itu memberikan banyak manfaat manakala mengkaji pelembagaan partai politik, dia juga menyadari bahwa ada kelemahan dari ked-

[79] *Ibid.*, 63–68.

[80] Maor, *Political Parties and Party System: Comparative Approaches and the British Experiences*, 66–79.

[81] Karena alasan ini, Janda mengembangkan enam variabel sebagai indikator sebuah partai yang terlembaga, yaitu: tahun kelahiran, perubahan nama, ketidaklanjutan organisasional, kompetisi kepemimpinan, instabilitas legislatif, instabilitas elektoral. Kenneth Janda, *Political Parties: A Cross National Survey*, (New York: The Free Press, 1980), 19.

uanya, yang terutama terkait dengan kecenderungan generalisasi yang berlebihan dan mengabaikan sejumlah aspek lain yang relevan. Untuk itu, dia menyatakan perlunya pembahasan masalah lain untuk mengukur pelembagaan partai secara lebih komprehensif, seperti masalah struktur partai (misalnya, jumlah anggota, jumlah staf yang digaji); cara partai mengelola masalah-masalah internal dan eksternal (terkait dengan masalah, misalnya, rekrutmen politik dan mobilisasi masyarakat), dan keterlibatan dalam sistem pemerintahan (terkait dengan proses kebijakan).[82]

Kajian terkini tentang pelembagaan partai adalah kajian yang dilakukan Randall dan Svasand. Keduanya berpendapat bahwa pelembagaan seharusnya dipahami sebagai "*the process by which the party becomes established in terms both of their integrated patterns of behaviours and of attitudes, or culture*". Kedua pakar tersebut kemudian membedakan aspek proses ini dari aspek internal yang merujuk pada perkembangan internal dan aspek eksternal yang terkait dengan hubungan dengan masyarakat. Didasarkan pada pemahaman ini, keduanya menyatakan empat unsur atau dimensi untuk mengukur pelembagaan partai: kesisteman, infusi nilai, otonomi dalam pengambilan keputusan, dan reifikasi.[83]

Makna derajat kesisteman adalah sebuah regularitas atau rutinitas interaksi di antara para anggota yang didasari oleh aturan main yang ada. Dalam konteks ini, derajat kesisteman terkait dengan terbangunnya kesepakatan umum (*prevalent conventions*) di antara anggota partai yang membimbing perilaku semua kader dan anggota partai. Aturan ini pada akhirnya harus menjadi dasar berkegiatan di dalam partai. Infusi nilai berkaitan dengan keberadaan identitas yang khas, yang menyebabkan anggota dan pendukung partai memiliki identifikasi dan komitmen yang sama dengan partai. Menurut keduanya, hal ini merujuk pada sejauh mana anggota dan pendukung partai saling mengidentifikasi diri dan berbagi komitmen yang sama atas keyakinan

[82] *Ibid.,* 90.

[83] Randall dan Svasand, "Party Institutionalization in New Democracies", 12–13.

Tabel 1.2 Dimensi Pelembagaan Partai

	Internal	Eksternal
Struktural	Systemness (Kesisteman)	Otonomi dalam Pengambilan Keputusan
Sikap	Infusi Nilai	Reifikasi

Sumber: Vicky Randall dan Lars Svasand, "Party Institutionalization in New Democracies", di *Party Politics,* Vol. 8 Januari/1/2002, h. 13.

atau nilai-nilai tertentu. Mereka juga mengartikan hal ini berhubungan dengan kemampuan menciptakan budaya atau sistem nilai yang khas, yang pada akhirnya akan dapat memberi dampak positif kepada soliditas partai. Sementara itu, otonomi keputusan merujuk pada tingkat kemandirian di dalam proses pengambilan keputusan internal. Keadaan ini merujuk pada kemampuan partai mempertahankan kemandirian terhadap lingkungannya. Selanjutnya, reifikasi merujuk pada keadaan di mana keberadaan partai tertanam dalam pikiran masyarakat. Hal ini berarti partai tidak hanya sekadar eksis di tengah masyarakat, tetapi yang lebih penting lagi, partai memiliki posisi yang spesial dalam benak masyarakat sebagai hasil dari hubungan yang baik dan akrab di antara keduanya.[84]

Basedau and Stroh melakukan modifikasi dari teori pelembagaan yang dikembangkan oleh Randall dan Svasand. Menurut mereka, pelembagaan pada dasarnya merupakan upaya di seputar menghadirkan kestabilan (*stability*) dan penyebaran nilai (*value infusion*) dalam sebuah partai (Basedau dan Stroh, 2008: 7). Mereka mengatakan "*party institutionalization is a process in which individual parties that participate in election experience an increase in organizational stability and value*". Lebih lanjut, mereka mengatakan bahwa untuk mengukur pelembagaan partai politik, perlu ada beberapa pembatasan, yakni (1) pelembagaan yang dimaksud adalah pelembagaan partai dan bukan pelembagaan sistem kepartaian, dengan demikian yang ditelaah adalah eksistensi sebuah partai, (2) pelembagaan yang dimaksud pada dasarnya adalah seputar meningkatkan kestabilan dan penyebaran nilai (yang dimaknai

[84] *Ibid*, 13–14.

Table 1.3 Dimensi Pelembagaan Partai

	Stabilitas	Infusi Nilai
Eksternal	Akar di Masyarakat	Otonomi
Internal	Level Organisasi	Koherensi

Source: Mathias Basedau dan Alexander Stroh, "Measuring Party Institutionalization in Developing Countries: A New Research Instrument Applied to 28 African Political Parties", *GIGA Working Papers*, (Hamburg: GIGA Research Program, 2008), 9.

sebagai kesepahaman bahwa partai adalah organisasi yang harus ada/*one should not do without*), dan (3) mencakup persoalan eksternal dan internal.

Atas dasar kriteria mendasar itu, mereka mengombinasikan persoalan meraih kestabilan dan penyebaran nilai dalam konteks eksternal dan internal. Hasil kombinasi itu melahirkan empat dimensi pelembagaan, yakni (1) level organisasi, berupa kelengkapan pengurus dan aparat partai yang hadir di semua level kepengurusan dan bekerja demi kepentingan partai, (2) koherensi, yakni kemampuan bergerak sebagai sebuah kesatuan yang utuh, (3) otonomi, yang merupakan kemampuan partai untuk terbebas dari segenap intervensi kepentingan, baik dari individu-individu yang berasal dari dalam partai maupun kelompok-kelompok yang berasal dari luar partai, dan (4) berakar di masyarakat, di mana partai memiliki dukungan yang stabil di masyarakat.

Dalam kaitan dengan keberadaan infusi nilai, McGuire menyatakan bahwa infusi nilai memiliki peran yang utama (*causal primacy*) terhadap pelembagaan partai. McGuire menyatakan bahwa "*value infusion helps an organization survive long enough to become taken for granted and both value infusion and taken-for-grantedness, enhance an organisation's capacity to shape and constrain behaviour over an extended period of time.*"[85] Dengan demikian, adanya infusi nilai pada akhirnya memiliki korelasi dengan keberlangsungan hidup sebuah organisasi. Keberadaan infusi nilai pada dasarnya berkaitan dengan pembentukan identitas atau budaya yang khas, yang mengidentifikasi dan membedakan antara

[85] James W. McGuire, *Peronism without Peron: Unions, Parties and Democracy in Argentina*, (Stanford: Stanford University Press, 1997), 8.

satu partai politik dengan yang lainnya. Hal ini juga terkait dengan pembentukan nilai-nilai bersama (*common values*), yang menurut McGuire eksis sebagai sesuatu yang dapat diterima dengan wajar (*taken-for-grantedness*), yang juga pada akhirnya menentukan perilaku anggota dan dalam batas-batas tertentu memunculkan rasa kebersamaan di antara kader.

Berkaitan dengan "infusi nilai", Levitsky berpendapat bahwa pelembagaan partai seharusnya tidak dilihat hanya sebagai masalah konsistensi dalam melaksakan prosedur partai. Adanya sikap dari anggota untuk menghargai keberadaan partainya patut pula dilihat sebagai bentuk lain dari pelembagaan partai. Menurut Levitsky, partai politik yang lemah dalam soal pelaksanaan prosedur tetapi kuat dalam "infusi nilai", yang membuat partai tersebut kemudian mampu mempertahankan keberadaannya, tidak dapat dinilai sebagai partai yang gagal dalam hal pelembagaan. Di sini, partai sebenarnya menjadi bernilai atau bahkan nilai itu sendiri, sejalan dengan pandangan Huntington mengenai pelembagaan, yakni sebagai proses yang di dalamnya pengaturan dan aturan main menjadi bernilai. Dengan demikian, Levitsky berpendapat bahwa selain "masalah-masalah teknis" terkait dengan aturan main, yang juga harus diperhitungkan dalam mengukur pelembagaan sebuah partai adalah kemampuan untuk membangun komitmen, bagi seluruh anggota partai, berdasarkan pada "unsur-unsur nonteknis".[86] Dalam hal ini, masalah-masalah seperti norma, ideologi, atau nilai-nilai bersama menjadi relevan manakala membahas pelembagaan partai.

Dalam konteks Indonesia, sejumlah penelitian tentang pelembagaan partai dilakukan. Kajian komparatif Ufen tentang pelembagaan partai di tiga negara Asia Tenggara menyimpulkan bahwa partai-partai politik Indonesia lebih maju dibandingkan partai-partai politik di Filipina dan Thailand dalam kaitan dengan pelembagaan

---

[86] Steven Levitsky, "Institutionalisation and Peronism: The Case, The Concept and Case for Unpacking the Concept," *Party Politics*, 4:1, 77–92.

partai.[87] Walaupun kualitas pelembagaan di masing-masing partai itu tidak sama, dia meyakini bahwa partai-partai politik Indonesia lebih baik dari partai-partai politik di dua negara lain tersebut.

Dengan menggunakan pendekatan Levitsky terhadap pelembagaan partai yang menerapkan dua dimensi pelembagaan partai, yaitu infusi nilai, yang terkait dengan kemampuan untuk membangun akar politik di masyarakat sipil berdasarkan komitmen atas nilai tertentu dan "rutinisasi" perilaku, Ufen menunjukkan bahwa partai-partai politik lama seperti Golkar, PPP, dan PDI adalah partai-partai politik yang paling terlembaga, khususnya Golkar. Akan tetapi, dia juga meyakini bahwa partai-partai baru seperti PKB dan PKS juga memiliki akar yang cukup kuat di masyarakat, terutama di masyarakat muslim tradisional, di pedesaan untuk PKB dan di wilayah perkotaan untuk PKS, yang menunjukkan adanya pelembagaan dari partai-partai itu. Akan tetapi, Ufen juga mengakui bahwa seiring berjalannya waktu, situasi ini mulai dipertanyakan dan ditantang dengan kondisi politik terkini sejumlah partai politik. Berlangsungnya sejumlah pemilu lokal dan pemilu nasional belakangan ini, misalnya, makin memperlihatkan lemahnya infusi nilai, termasuk yang dialami PKB, yang mengindikasikan lemahnya pelembagaan. Kegagalan kandidat PKB untuk memenangkan Pemilu Gubernur tahun 2008 di Provinsi Jawa Timur,[88] sebagai salah satu kantong politik "tradisional" yang sangat penting bagi PKB, menjadi indikasi kuat ketiadaan infusi nilai pada PKB.

Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) mengembangkan kategori LIPI dalam menganalisis pelembagaan partai dari sejumlah partai politik utama di era Reformasi Indonesia. Faktor-faktor ini mencakup keberadaan demokrasi

---

[87] Andreas Ufen, "Political Party and Party System Institutionalization in South East Asia: A Comparison of Indonesia, The Philippines and Thailand", *GIGA Working Papers 44/2007*, (Maret 2007).

[88] Calon gubernur PKB Achmady hanya memperoleh 7% dari total suara yang terkumpul. Pemilu itu sendiri dimenangkan Soekarwo yang didukung tiga partai utama, yaitu PD, PAN, dan PKS.

internal, identitas partai atau infusi nilai yang terkait erat dengan ideologi partai, hubungan yang solid di antara anggota partai, otonomi keuangan, kaderisasi yang sistematis, dan hubungan yang baik dengan publik.[89]

Dalam kaitan dengan ideologi partai, penelitian P2P LIPI mencakup berbagai masalah, seperti keberadaan platform politik, pemahaman atas sikap politik partai, komitmen terhadap tujuan politik, dan keberadaan *sense of togetherness*. Demokrasi internal berkaitan dengan masalah-masalah seperti pelaksanaan aturan main, desentralisasi sumber kekuasaan, keberadan kontrol yang efektif, dan prosedur untuk menyeleksi kepemimpinan. Soliditas atau kohesi mencakup adanya resolusi konflik internal, pelembagaan konsensus, dan *code of conduct*. Adapun otonomi keuangan mencakup asal usul sumber keuangan, serta keberlanjutan dan pengelolaan dana partai. Kaderisasi yang sistematis dapat diartikan adanya rekrutmen yang sistematis, pengelolaan keanggotaan, serta pengorganisasian data dan informasi keanggotaan. Hubungan yang baik dengan publik terkait dengan pelaksanaan sebuah mekanisme hubungan yang telah direncanakan dan adanya tenggat waktu pelaksanaan yang jelas.

Kajian ini berkesimpulan bahwa hampir seluruh partai-partai politik yang penting di Indonesia mengalami masalah dengan proses pelembagaannya, khususnya dalam kaitan dengan masalah-masalah yang disebutkan di atas. Kajian ini membahas sepuluh partai besar yang sudah ada sebelum pemilu 2009, yaitu PDIP, Golkar, PKB, PPP, PD, PKS, PAN, PBB, PBR, dan PDS. Dari sepuluh partai yang diteliti, kajian ini berkesimpulan bahwa hanya PKS yang dapat dikategorikan sebagai sebuah partai yang terlembaga, sementara partai-partai lain-nya dapat dianggap sebagai partai yang setengah terlembaga dan dua di antaranya, PDIP dan PKB, dianggap sebagai partai yang mengalami masalah serius dalam proses pelembagaan.[90] Kajian yang menarik ini secara tepat mengidentifikasi berbagai masalah yang

[89] Muchlis (ed.), *Reformasi Kelembagaan Partai Politik Pasca Orde Baru di Indonesia,* 18–19.

[90] *Ibid.*

dikaitkan dengan pelembagaan partai, walaupun masalah-masalah tersebut tidak cukup menjelaskan berbagai dampak yang ditimbulkan, baik internal maupun eksternal, bagi partai-partai politik tersebut. Kajian ini juga pada umumnya tidak dikaitkan dengan masalah kecenderungan perpecahan.

Berbagai pembahasan di atas menunjukkan bahwa pelembagaan partai memiliki banyak penafsiran baik dalam hal definisi maupun kategorinya. Dari pelbagai kategori atau definisi yang telah dibahas, setidaknya terdapat tiga aspek atau kategori yang terkait dengan pelembagaan. Ketiga aspek itu adalah internal atau prosedural, eksternal atau eksistensi, dan informal atau substansial.

Aspek internal adalah kondisi-kondisi dalam partai politik yang terkait terutama dengan kedudukan prosedur atau aturan main, khususnya AD/ART atau konstitusi partai dalam kehidupan partai dan elemen-elemen partai di dalamnya. Aspek internal ini mencakup tingkat kesisteman, konsistensi dalam pelaksanaan regulasi internal, koherensi, manajemen konflik, serta rekrutmen dan kaderisasi yang sistematis. Aspek internal ini menjadi salah satu tolok ukur yang paling sering dikedepankan oleh banyak kalangan dalam mengukur kualitas atau tingkat pelembagaan. Semakin sebuah partai menaati aturan main dan memiliki kelengkapan aturan main, semakin terlembagalah partai itu.

Aspek kedua dapat dikatakan sebagai sisi substansial dari pelembagaan. Dalam aspek ini pelembagaan dilihat sebagai upaya pemantapan nilai-nilai, melalui infusi nilai (*value infusion*), terutama dalam soal bagaimana mengekalkan jati diri partai di benak para pendukungnya. Aspek ini mewakili aliran dalam pelembagaan yang berupaya membebaskan kajian pelembagaan partai politik dari keterjebakan formalistik, artinya sebagai kajian yang terfokus semata pada persoalan prosedural atau hal-hal yang bersifat rutin. Aspek ini menekankan arti penting hal-hal elementer-substantif, misalnya norma, keyakinan atau ideologi yang dianut oleh partai, nilai-nilai bersama, *platform,* kebiasaan, penghormatan terhadap sebuah tradisi, figur, atau kehebatan masa lalu.

Aspek eksternal adalah kondisi-kondisi di sekitar partai politik. Aspek eksternal melihat bagaimana pola hubungan partai politik dengan elemen-elemen lain yang melingkupi dan pengaruhnya terhadap kehidupan partai. Aspek eskternal juga terkait dengan persoalan sejauh mana hubungan partai dengan lingkungan, apakah itu sistem politik maupun masyarakat. Hal mendasar yang dilihat adalah bukan sekadar pola hubungan seperti apa yang dikembangkan, melainkan soal kemampuan partai untuk bertahan (*survive*) di tengah masyarakat atau dalam sebuah sistem politik. Aspek eksternal ini mencakup kemandirian dalam pengambilan keputusan, kemampuan adaptasi dan pengembangan hubungan yang mapan dengan masyarakat (reifikasi), dan keberlanjutan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Akan tetapi, dari pembahasan di atas terlihat bahwa ketiga aspek ini tidak dikaitkan secara langsung, terkait dengan masalah perpecahan dan soliditas.

5. Pelembagaan Partai dan Fenomena Perpecahan atau Soliditas: Beberapa Dimensi

Untuk mengisi celah kajian tersebut, buku ini mengoperasionalisasikan pelembagaan partai sebagai variabel bebas terhadap perpecahan dan soliditas partai. Untuk itu, buku ini fokus pada aspek internal dari pelembagaan dan infusi nilai saja, dan mengesampingkan aspek eksternal seperti reifikasi dan kemampuan untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam pemilu, yang tampak kurang relevan dalam pembahasan perpecahan dan soliditas partai.

Sementara itu, penekanan pada aspek internal secara substansi sejalan dengan sudut pandang yang melihat partai sebagai "miniatur sistem politik". Menurut Eldersveld, salah satu fungsi utama partai politik adalah mempertahankan keberadaannya melalui pengelolaan internal organisasi yang tepat.[91]

---

[91] Maor, *Political Parties and Party Systems: Comparative Approaches and The British Experience*, 11–12.

Dalam buku ini, aspek internal diturunkan menjadi tiga faktor, yaitu (1) kepemimpinan prosedural dalam proses pengambilan keputusan, (2) keberadaan mekanisme resolusi konflik, dan (3) kaderisasi sistematis untuk pengembangan kader dan rekrutmen politik. Sementara berkaitan dengan aspek substansial, yakni (4) "infusi nilai", yang juga adalah salah satu dimensi pelembagaan, diturunkan menjadi persoalan komitmen terhadap nilai-nilai bersama. Oleh karena itu, di buku ini akan ada empat unsur pelembagaan yang akan dianalisis dalam kaitan dengan perpecahan dan soliditas partai politik. Faktor-faktor ini meski terpisah bersifat interaktif, di mana keempatnya saling mendukung dan memengaruhi satu dengan lainnya.

a. Kepemimpinan Prosedural dalam Proses Pengambilan Keputusan

Dimensi pertama adalah apa yang disebut oleh Randall dan Svasand sebagai tingkat kesisteman atau dalam perspektif penulis disebut kepemimpinan prosedural, khususnya dalam proses pengambilan keputusan. Kepemimpinan prosedural dalam proses pengambilan keputusan menghendaki pelaksanaan kebijakan yang konsisten. Setelah kebijakan itu disepakati dan ditetapkan, tidak ada alasan bagi partai dan para pemimpinnya untuk tidak menjalankan. Menurut Levitsky,[92] pelembagaan sejatinya adalah kondisi di mana aturan dan prosedur menjadi sesuatu yang diketahui, diterima, dan ditaati.

Tokoh karismatik dapat dimanfaatkan sebagai simbol pemersatu yang menurut Panebianco dapat membawa dampak yang berharga terhadap partai pada momen-momen tertentu.[93] Akan tetapi, tokoh karismatik sebaiknya tidak diposisikan di atas undang-undang atau aturan main partai. Keberadaan kepemimpinan prosedural akan memelihara rasa kebersamaan, karena hal ini menjamin pelaksanaan aturan main secara konsekuen, memunculkan persamaan perlakuan

[92] Steven Levitsky, "Organisation and Labor-Based Party Adaptation: The Transformation of Argentine Peronism" dalam Comparative Perspective, *World Poltics*, 54:1, (Oktober 2001), 33–34.

[93] Panobianco, *Political Parties: Organisation and Power*, 65–67.

atas seluruh kader, dan pemberian kesempatan yang luas kepada kader untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kasus Partai Kongres Nasional India, "politik *sycophancy*" atau asal bapak senang dan kecenderungan untuk menciptakan personifikasi partai yang mengabaikan mekanisme prosedural selama tahun-tahun pertama kepemimpinan Indira Gandhi menjadi titik masuk kemunduran pelembagaan partai, yang akhirnya mengarah kepada perpecahan partai.[94] Walaupun sebagaimana yang disebutkan Michels, kecenderungan oligarki sebenarnya merupakan bagian dari kehidupan partai politik,[95] pelaksanaan kepemimpinan prosedur tetap harus dilaksanakan karena hal ini berpotensi membantu partai untuk menghindari ketidakpercayaan dan perpecahan.

b. Mekanisme Resolusi Konflik

Kedua adalah kemampuan untuk mengembangkan *conflict resolution mechanism* (mekanisme resolusi konflik internal/CRM). CRM adalah mekanisme yang berhubungan dengan upaya-upaya menghentikan dan pengelolaan konflik. Keberadaan mekanisme ini diyakini membantu mengembangkan hasil yang bersifat *win-win solution,* yang bisa memuaskan setiap kelompok yang berkonflik karena dapat memenuhi semua atau sekurang-kurangnya memenuhi sebagian dari tuntutannya.[96] Mekanisme ini merupakan bagian dari pengelolaan konflik, yang menurut Mial, Ramsbotham dan Woodhouse, secara umum merupakan aktivitas yang berkaitan dengan upaya menangani konflik.[97] Kemudian, Bennet mengartikan bahwa keberhasilan

---

[94] James Warner Bjorkman, "Party, Personality and Dynasty", dalam Alan Ware (ed.), *Political Parties, Electoral Change and Structural Response*, (Oxford: Basil Blackwell, 1987), 59–68.

[95] Robert Michels, *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*, (New York: The Free Press, 1966), 353–354.

[96] James H. Laue, "The Emergence and Institutionalisation of Third Party Roles in Conflict", dalam John Burton dan Frank Dukes (eds.), *Conflict: Readings in Management and Resolution*, (Hampshire: Macmillanh, 1990), 258.

[97] Hugh Mial, Oliver Rambsbotham, dan Tom Woodhouse, *Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts*, (Malden: Blackwell

pengelolaan konflik adalah prasyarat untuk keberhasilan CRM.[98] Dalam hal ini, Maoz meyakini adanya tumpang-tindih peran yang mungkin terjadi antara CRM dan pengelolaan konflik.[99]

Buku ini membahas CRM sebagai mekanisme yang terkait dengan atau menjadi bagian pengelolaan konflik. Sekurang-kurangnya ada dua tingkat resolusi konflik; yaitu (1) pencegahan konflik, sebelum konflik terjadi dan (2) penghentian konflik, setelah konflik berlangsung. Partai politik yang terlembaga adalah partai politik yang memiliki kapasitas untuk mencegah potensi konflik dan menemukan solusi komprehensif untuk menghentikan konflik.

Partai politik sudah sepatutnya memiliki aturan untuk memecahkan konflik internal dan membentuk semacam badan (atau subunit) yang berfungsi menangani masalah-masalah konflik internal. Keberadaan mekanisme atau badan yang menangani fungsi ini penting karena partai politik sebagai sebuah sistem memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan fungsi partai, termasuk pengelolaan soliditas internal. Agar dapat mengoperasikan fungsi ini secara efektif, mekanisme ini harus memiliki posisi yang khusus, hampir sama seperti semacam badan yudikatif dalam konteks sistem pemerintahan. Tokoh yang mampu dan dihormati harus merupakan bagian badan ini, yang dilengkapi dengan hak-hak independen untuk menyusun kebijakan dan bebas dari intervensi.

Dengan kemampuan potensial untuk memecahkan masalah-masalah internal, keberadaan mekanisme ini harus pula mencegah partai politik dari intervensi eksternal, misalnya intervensi dari pihak

---

Publisher Inc., 1999), 21.

[98] D. Scott Bennet, "Patterns of Conflict Management and Resolution in Enduring Rivalries", di Zeev Maoz, Alex Mintz, T. Clifton Morgan, Glenn Palmer dan Richard J. Stoll (eds.), *Multiple Paths to Knowledge in International Relations: Methodology in the Study of Conflict Management and Conflict Resolution,* (Oxford: Lexington Books, 2004), 225–229.

[99] Zeev Maoz, "Conflict Management and Conflict Resolution: A Conceptual and Methodological Introduction", dalam Zeev Maoz, Alex Mintz, T. Clifton Morgan, Glenn Palmer dan Richard J. Stoll, (eds.), *Multiple Paths to Knowledge in International Relations: Methodology in the Study of Conflict Management and Conflict Resolution*, (Oxford: Lexington Books, 2004), 19.

pemerintah yang melihat konflik internal yang berlarut-larut sebagai peluang untuk memasukkan agendanya ke dalam partai politik itu. Menurut Pirages, intervensi pihak ketiga, khususnya dari pemerintah, bukan merupakan solusi yang sesungguhnya. Intervensi semacam ini tidak membantu partai politik untuk memecahkan masalah karena cenderung mengurangi pilihan-pilihan yang dapat diambil oleh kelompok yang berkonflik untuk membangun posisi tawar guna mencapai kesepakatan, sebagai bagian dari resolusi konflik, sebelum intervensi itu terjadi.[100] Dengan kata lain, situasi ini pada akhirnya cenderung mencegah *win-win solution* berdasarkan sebuah proses dan kepentingan alamiah dari setiap kelompok.

Di dalam kasus-kasus politik Indonesia, intervensi eksternal ini kadang-kadang terjadi ketika salah satu kelompok yang berkonflik secara sengaja mengundang unsur eksternal untuk bertindak sebagai mediator guna memecahkan konflik.[101] Tetapi, faktor eksternal ini, terutama dari pihak pemerintah di era Orde Baru, justru cenderung memperburuk daripada memecahkan masalahnya. Alasan utamanya karena pemerintahan Orde Baru memiliki agenda tersembunyi untuk memperlemah soliditas pihak-pihak oposisi ketimbang bersungguh-sungguh memecahkan masalah.[102]

Dalam hal ini, keberadaan mekanisme ini juga dapat menjadi instrumen untuk mempertahankan otonomi partai. Kemudian, keberadaan solusi mekanisme konflik internal juga akan memperkuat perasaan diperlakukan secara adil di antara anggota partai. Ini dapat terjadi dikarenakan CRM akan melindungi anggota dari tindakan diskriminasi dan aksi sepihak dari pihak elite dan anggota lainnya. Selain itu, mekanisme ini dapat pula mendukung dialog intrapartai

---

[100] Dennis C. Pirage, *Stabilitas Politik dan Pengelolaan Konflik*, (Jakarta: FIS-UI, 1982), 57–58.

[101] Haris, *PPP dan Politik Orde Baru.* Kamarudin, *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi: Refleksi Pemilu 1998 untuk Pemilu 2014*, 18–22.

[102] Arbi Sanit, "Manajemen Politik Dalam Negeri", dalam "Tiras", 9 Februari 1995, dalam Kamarudin, *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi. Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu 2004*, 37.

karena memberikan peluang saling berbagi sudut pandang dan membangun pemahaman, sebagaimana yang dianggap hal penting oleh Hirschman.[103] Oleh karena itu, keberadaan mekanisme ini, bersama dengan berbagai konsekuensi positifnya, berpotensi meminimalisasi kekecewaan anggota partai, termasuk kecenderungan untuk memecah partai politik.

c. Kaderisasi Sistematis

Kaderisasi sistematis mencakup persoalan seperti menyelenggarakan rekrutmen politik yang *fair*, adanya evaluasi sistematis atas performa kader, pelatihan yang terarah dan berkala baik untuk anggota biasa maupun elite, dan adanya kepastian jenjang karier. Substansi kegiatan ini harus diikuti oleh pembekalan atau orientasi atas sejumlah informasi mendasar untuk dijadikan pegangan anggota, termasuk tentang (1) ideologi dan misi partai politik, (2) peranan kader baik sebagai anggota partai maupun sebagai bagian dari masyarakat, (3) pengelolaan partai politik dan pengenalan aturan-aturan main, dan (4) nilai-nilai bersama yang dijunjung tinggi oleh partai dan seluruh anggota. Dalam kaitan dengan fungsi ini, kaderisasi harus pula menjadi ajang atau media yang efektif untuk mentransmisi nilai-nilai dan sikap politik partai. Kegiatan kaderisasi ini harus dengan jelas tertulis di dalam statuta partai atau pada dokumen resmi dan disampaikan ke seluruh anggota partai sehingga dapat dipelajari secara kolektif. Kaderisasi harus pula memiliki parameter yang jelas dan mudah dipahami oleh seluruh kader. Adanya aturan main kaderisasi yang jelas tidak hanya akan menghindari pemahaman sepihak dan eksklusif, tetapi dapat pula mencegah upaya elite atau siapa pun untuk memanipulasi kegiatan ini demi kepentingan personal mereka. Keadaan ini juga dapat meminimalisasi potensi konflik internal karena dapat mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh adanya mekanisme atau pelaksanaan mekanisme yang tidak transparan atau manipulatif.[104]

---

[103] Hirschman, *Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organisations and States.*

[104] Hidayat (ed.), *Kerangka Penguatan Partai Politik di Indonesia,* 50.

Kaderisasi sistematis juga mensyaratkan konsistensi dan keberlanjutan dalam pelaksanaannya. Kaderisasi tidak dapat dihentikan karena alasan tertentu. Hal ini merupakan bagian dari aktivitas yang oleh beberapa kalangan disebut sebagai "rutinisasi", yang merupakan salah satu indikator keberadaan pelembagaan partai. Arti penting adanya keberlanjutan adalah agar partai politik dapat menjamin proses suksesi dan melanjutkan regenerasi internal yang didasarkan pada prinsip meritrokrasi. Dengan kata lain, hasil proses kaderisasi harus menjadi standar atau tolok ukur bagi rekrutmen jabatan dan seleksi kepemimpinan partai. Rekrutmen itu sendiri mencakup juga rekrutmen calon anggota legislatif dan seleksi kandidat untuk jabatan eksekutif, yang dalam hal ini, menurut Ranney, sudah merupakan "tugas partai politik memutuskan siapa yang secara sah berhak untuk menduduki jabatan publik."[105] Lebih dari itu, berkaitan dengan fungsi yang disebutkan di atas, dapat dikatakan pula bahwa proses ini sesungguhnya merupakan bagian dari upaya mempertahankan koherensi partai dan membangun disiplin internal bagi seluruh anggota. Oleh karena itu, keberadaan kaderisasi sistematis secara umum pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi soliditas partai.

d. Komitmen terhadap Nilai-Nilai Bersama atau Ideologi

Kehadiran komitmen atas nilai-nilai bersama adalah dampak dari keberadaan apa yang disebut Selznick dan Levitsky sebagai "infusi nilai". Dalam hal ini, nilai-nilai bersama disosialisasikan atau ditanamkan pada anggota partai. Dengan demikian, partai politik yang terlembaga adalah partai yang mampu membangun seperangkat nilai-nilai bersama yang seiring dengan perjalanan waktu mampu mengembangkannya dalam domain masyarakat dan dengan kalangan yang menganut nilai-nilai yang sama. Selain itu, sebagaimana yang dikaji dalam buku ini, infusi nilai ini juga mencakup penanaman nilai-nilai bersama itu oleh partai politik kepada seluruh anggotanya,

---

[105] Austin Ranney, "Candidate Selection" dalam David Butler, Howard R. Penniman dan Austin Ranney (eds.), *Democracy at the Polls*, (Washington DC: American Enterprise Institute, 1981), 75.

yang atas dasar nilai-nilai bersama itulah hubungan antara partai dan anggotanya terbangun.

Dalam konteks internal partai yang merupakan fokus dari buku ini, keberadaan komitmen ini diindikasikan dengan adanya kesungguhan untuk melaksanakan nilai-nilai bersama dan menempatkannya sebagai pedoman dalam berkegiatan dan menentukan langkah-langkah politik. Keberadaan komitmen ini juga akan menguatkan identitas kolektif dan semangat mempertahankan keberlangsungan hidup partai. Levitsky mengatakan bahwa pada sebuah partai yang terlembaga, keberlanjutan partai menjadi lebih penting daripada tujuan didirikannya partai, termasuk alasan-alasan di balik pendirian partai. Partai telah menjadi lebih dari sekadar perangkat untuk memenuhi tujuan spesifik atau target-target teknis dan telah menjadi sebuah kebutuhan serta kepuasan personal bagi kadernya.[106] Keberadaan komitmen ini juga mendorong kader memperbaiki perilakunya menurut nilai-nilai ini,[107] dengan kata lain menjadi *code of conduct*. Pada akhirnya, komitmen terhadap nilai bersama ini menjadi "*the 'receptacle' of group idealism*" ("wadah dari idealisme kelompok").[108]

Dalam perspektif Randall dan Svasand, adanya kondisi tersebut di atas, di mana anggota-anggota partai memperoleh identitas dan komitmen, merupakan aspek penting yang turut mendorong soliditas partai.[109] Di lain pihak, ketiadaan atau lemahnya peran nilai-nilai bersama akan mengarah pada sebuah keadaan saat anggota-anggota partai dapat bertindak secara amat bebas sesuai dengan kehendak dan kepentingannya sendiri. Keadaan ini berpotensi besar memicu dampak negatif, seperti kesulitan untuk membangun sikap konsisten, tersebarnya perilaku pragmatis atas dasar kepentingan diri sendiri, dan terciptanya perselisihan yang sulit dikompromikan di antara para anggota manakala terjadi konflik.

[106] Philip Selznick, *Leadership in Administration: A Sociological Interpretation,* (New York: Row, Peterson and and Company, 1957), 17.

[107] McGuire, *Perenonism without Peron: Unions, Parties and Democracy in Argentina*, 8.

[108] Selznick, *Leadership in Administration: A Sociological Interpretation*, 22.

[109] Randall dan Svasand, "Party Institutionalization in New Democracies", 13.

Agar nilai-nilai bersama itu dapat memberikan dampak yang menyeluruh terhadap partai dan anggotanya, sebuah partai politik harus membangun dan mengembangkan "aparatus ideologi". Aparatus ini terdiri dari anggota-anggota partai yang berkomitmen tinggi terhadap nilai-nilai bersama itu dan berkewajiban memelihara serta mengembangkan nilai-nilai bersama atau ideologi partai.[110] Aparatus ini merupakan bagian proses infusi nilai, yang memainkan peranan penting dalam proses kaderisasi dan sosialisasi partai politik.

Pengertian nilai-nilai bersama yang digunakan di dalam buku ini adalah sebuah kepercayaan bersama yang dapat berasal dari platform partai, ideologi, tokoh, kepentingan jangka panjang, mitos, atau sebuah perjuangan menyatukan masyarakat dan memberikan identitas. Dalam buku ini, karena kedua partai politik yang dibahas menggunakan terutama ideologi sebagai basis untuk menciptakan kepercayaan bersama dan perangkat utama untuk menyatukan orang, ideologi partai menjadi nilai-nilai bersama yang akan dianalisis secara mendalam. Ideologi itu sendiri memang tak jarang berperan dalam memberikan identitas kolektif dan mengikat masyarakat yang mendukungnya.[111]

Menurut Volkens dan Klingman, ideologi memberikan partai politik tidak hanya identitas, tetapi juga cetak biru untuk solusi alternatif terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat.[112] Sani dan Sartoni menempatkan peranan ideologi ini menjadi dua domain. Pertama, "domain identifikasi" yang terkait terutama dalam peran ideologi sebagai pemersatu atau landasan hubungan antara pemilih dan partai, termasuk hubungan antara elite, anggota partai,

[110] Arief Mudatsir Mandan, *Krisis Ideologi*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2009).

[111] Deliar Noer, "Ideologi, Politik dan Pembangunan", (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983) dalam Kamarudin, *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi: Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu 2004*, 50.

[112] Andrea Volkens dan Hans-Dieter Klingemann, "Parties, Ideologies and Issues: Stability and Change in Fifteen European Party Systems 1945–1998", dalam Kurt Richard Luther dan Ferdinand Muller-Rommel (eds.), *Political Parties in the New Europe, Political and analytical Challenges,* (Oxford: Oxford University Press, 2002), 144.

dan pemilih. Kedua, "domain kompetisi" yang berkaitan dengan ideologi sebagai penjuru atau platform dalam proses pengambilan keputusan dan preferensi kebijakan, yang akan turut menentukan manakala partai tengah berkompetisi meraih dukungan masyarakat.[113] Dengan kata lain, ideologi partai memiliki peranan baik sebagai landasan atas visi dan misi partai maupun sebagai elemen pemersatu atau identitas.

Buku ini mengambil empat unsur yang telah dijabarkan di atas sebagai unsur-unsur pelembagaan partai untuk menjelaskan fenomena perpecahan dan soliditas partai-partai politik Islam di Indonesia di era Reformasi.

B. Mengapa PKB dan PKS?

Alasan untuk memilih PKB dan PKS dikarenakan peranan kedua partai itu yang signifikan di pentas politik Indonesia, khususnya di periode awal era Reformasi. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa aspek. Presiden pertama di era Reformasi, Abdurrahman Wahid yang dikenal sebagai Gus Dur, adalah pemimpin utama dan pendiri PKB. Di lain pihak, Ketua MPR kedua, badan tertinggi dalam sistem politik Indonesia di era Reformasi, adalah Dr. Hidayat Nur Wahid yang juga Presiden Kedua PKS. Kebalikan dengan sejumlah partai politik Islam yang timbul tenggelam (*ephemeral*), kedua partai politik ini memiliki kemungkinan besar berlanjut memainkan peranan signifikan di dalam konstelasi politik Indonesia di masa depan.

Keduanya juga mewakili dua versi *mainstream* politik Islam di Indonesia. PKB cenderung didukung dan merupakan representasi komunitas muslim tradisional yang terutama tinggal di wilayah pedesaan. Sementara itu, PKS memiliki akar ideologi yang dekat dengan apa yang disebut oleh para akademisi sebagai neo-revivalisme Islam atau "fundamentalisme moderat", yang terutama didukung oleh kaum muslim muda perkotaan dan kalangan terdidik.

[113] Giacomo Sani dan Giovanni Sartori, "Polarization, Fragmentaiton and Competition in Western Democracies", dalam Hans Dualder dan Peter Mair (eds.), *Western European Party Systems. Continuity and Change,* (London: Sage, 1983), 307–340.

Kemudian, di atas itu semua, kedua partai ini dalam sepuluh tahun pertama Reformasi adalah contoh terbaik dari kegagalan dan keberhasilan pelembagaan politik, khususnya dalam kaitan dengan fenomena perpecahan dan soliditas dalam rumpun partai politik Islam. Selain itu, sebagimana yang telah disinggung di atas, kedua partai ini mewakili dua kelompok partai menengah-besar yang pernah mengalami perpecahan, PKB bahkan termasuk yang paling sering, dan partai yang tidak pernah mengalami perpecahan atau dengan kata lain mampu menjaga soliditasnya dengan baik. Dengan mengeksplorasi kedua partai ini, buku ini berupaya menjabarkan adanya korelasi antara variabel terikat, yakni perpecahan atau soliditas partai politik dan pelembagaan partai sebagai variabel bebas.

Namun, sebagai hasil penelitian yang mengambil fokus waktu sepuluh tahun pertama era Reformasi, tentu saja banyak peristiwa menarik dan relevan lain untuk dikaji terkait dengan perpecahan dalam partai-partai Islam yang terlewatkan. Pun dalam kurun waktu itu juga muncul perkembangan yang penting di masing-masing partai yang sedikit banyak terkait atau memengaruhi perkembangan upaya-upaya partai mempertahankan soliditasnya atau mencegah perpecahan.

PKB pascawafatnya Gus Dur telah menguatkan posisi Muhaimin dan kelompoknya sebagai "pewaris tunggal" PKB. Kelompok yang disebut sebagai barisan pengikut Muhaimin ini menjadi sebuah kekuatan tersendiri dalam konstelasi politik nasional dengan merebut kembali posisi sebagai partai Islam terbesar di Indonesia. Kiprah PKB dalam pemerintahan berlanjut pasca terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden RI menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono. Hal yang menarik adalah PKB Muhaimin merupakan partai yang relatif mampu menghindari perpecahan. Sementara itu, PKS mengalami berbagai peristiwa yang menguji eksistensinya. Peristiwa penangkapan Presiden Partai Luthfi Hassan Ishaq (LHI) menjadi ujian besar bagi sebuah partai kader yang selama ini dikenal kebersihannya. Banyak kalangan yang menilai partai ini makin bergerak ke arah yang

semakin pragmatis untuk tujuan-tujuan penguatan eksistensi partai atau kepentingan pribadi. Kasus LHI telah menyebabkan stagnasi perolehan suara PKS. Stagnasi itu juga diasumsikan sebagai dampak dari soliditas partai yang semakin mencair.

Di sisi lain, dalam konteks politik nasional terdapat berbagai persitiwa konflik internal yang mengarah pada perpecahan yang tidak dibahas di dalam buku ini. Konflik internal PPP pasca pelaksanaan Pilpres 2014, misalnya, yang berujung pada munculnya kepengurusan kembar partai yakni PPP versi Munas Jakarta yang dipimpin oleh Djan Faridz dan PPP versi Munas Surabaya yang dikomandoi oleh Romahurmuziy, adalah fenomena menarik yang muncul di tahun 2014 dan berlangsung hingga beberapa bulan setelahnya. Fenomena ini memperpanjang daftar konflik internal partai Islam yang tidak dapat tertanggulangi dengan baik.

Namun, persoalan pokok yang menjadi inti kajian buku ini sedikit banyak masih tetap relevan untuk melihat fenomena sejenis di masa-masa setelah tahun 2008. Hal tersebut terkait terutama dalam melihat faktor-faktor yang bersifat pelembagaan yang tidak dapat dielakkan manakala membahas penyebab dari fenomena perpecahan internal partai. Sebuah fenomena yang tampaknya selalu mengancam eksistensi partai di Indonesia, tidak saja partai Islam, tetapi juga partai yang bernapaskan kebangsaan-sekular. Oleh karena itu, buku ini setidaknya dapat dijadikan salah satu referensi atau sebuah alternatif jawaban atas fenomena di balik perpecahan partai dan di sisi lain kemampuan partai untuk mempertahankan soliditas.

BAB II
PENGALAMAN PERPECAHAN DAN SOLIDITAS PARTAI ISLAM: TINJAUAN HISTORIS

A. Era Pra Kemerdekaan

Fenomena perpecahan partai Islam bukan hal yang baru di dalam sejarah politik Indonesia. Hal ini pertama kali terjadi di Sarekat Islam (SI), yang pada awalnya merupakan sebuah organisasi dagang yang disebut Sarekat Dagang Islam (SDI). SDI didirikan pada tahun 1905 oleh Samanhoedi, seorang pengusaha muslim, untuk menyatukan kepentingan pengusaha pribumi, yang kemudian menjadi saluran politik pertama kepentingan rakyat.[1] Pada awalnya selama lebih dari satu dekade, SI, yang pada tahun 1930 bertransformasi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), menjadi medium politik untuk komunitas muslim pribumi. SI menyatukan hampir seluruh organisasi Islam termasuk Muhammadiyah, organisasi Islam modernis terbesar, dan NU, yang mewakili komunitas muslim tradisionalis, serta banyak tokoh lain dari berbagai latar belakang ideologi.[2] Di

---

[1] Tentang *Sarekat Islam lihat A.P.E. Korver, Sarekan Islam Gerakan Ratu Adil?, (Jakarta: Grafiti Press, 1985).*

[2] Seperti Agus Salim, Abdoel Moeis, Ahman Dahlan, Sukiman (modernis Islam), K.H. Wahab Chasbullah (tradisionalis Islam), H.O.S. Tjokroaminoto (sosialis Islam), Ki Hajar Dewantara (kejawen), Semaoen, Darsono (komunis), Kartosoewiryo (pendiri Darul Islam).

bawah kepemimpinan H. Oemar Said Tjokroaminoto,[3] SI menjelma menjadi organisasi massa yang pada akhirnya tidak saja mewakili kelompok-kelompok muslim dan kaum pengusaha, tetapi juga aristokrat, petani, intelektual, guru, para aktivis sosial, kaum miskin, dan bahkan kaum abangan.[4]

Perpecahan internal pertama berlangsung ketika anggota PSII yang berorientasi komunis, kerap disebut SI-Merah, keluar dari partai setelah mengalami perselisihan tajam yang tidak terpecahkan dan berlarut-larut dengan kelompok nonkomunis, yang dikenal sebagai SI-Putih. Sebagian besar simpatisan SI-Merah adalah pula anggota *Indische Social Deemocratische Vereeneging* (Perhimpunan Demokrasi Sosial Hindia/ISDV), kelompok Marxis pertama di Indonesia dan kemudian menjadi kader-kader Partai Komunis Hindia (PKH) sejak tahun 1920. Faksi komunis yang dipimpin Semaun, Alimin, Marco Kartodikromo, dan Darsono, tokoh-tokoh pimpinan SI Cabang Semarang[5] yang dikenal sebagai tokoh-tokoh komunis generasi pertama di dalam sejarah Indonesia, menghendaki SI agar menjadikan Marxisme-Leninisme sebagai dasar perjuangan. Tawaran ini tak pelak memicu penolakan masif dari sayap nonkomunis, yang melihatnya sebagai serangan terhadap ajaran Islam, yang notabene adalah dasar ideologi dan orientasi partai. Dua kelompok ini, seiring dengan berjalannya waktu, mengembangkan pemikiran dan strategi yang berbeda tentang bagaimana merespons situasi politik pada waktu itu, termasuk dalam menghadapi kebijakan pemerintah kolonial.

---

[3] Sumarno, *Perjuangan Bernegara Demokrasi H.O.S. Tjokroaminoto: Telaah Historis Pemikirannya dalam Pergerakan Nasional Sarekat Islam 1912–1934, Tesis, (Depo*k: Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sejarah, Universitas Indonesia, 2000).

[4] George McTurner Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, (Jakarta: UNS Press & Sinar Harapan, 1995), h. 85. Firman Noor,* "Menimbang Perjuangan Kebangsaan Sarekat Islam (SI) dan Relevansinya Bagi Kehidupan Politik Bangsa Saat Ini", dalam *Masyarakat Indonesia: Majalah Ilmu-Ilmu Sosial di Indonesia, XXXIV*:2, 2008, h. 44.

[5] Tentang Sarekat Islam Cabang Semarang lihat Soe Hok Gie, *Di Bawah Lentera Merah, Riwayat Sarekat Islam Semarang 1917–1920, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999).* Dewi Yuliati, *Semaoen, Pers Bumiputera dan Radikalisasi Sarekat Islam Semarang, (Semarang: Penerbit Bendera, 2000).*

Perbedaan ini kerap menciptakan perselisihan tajam di antara kader-kader SI.[6]

Namun, manuver politik faksi SI-Putih pada saat Kongres Nasional tahun 1921 mengakhiri situasi ini. Dengan dipimpin Agus Salim, Abdoel Moeis, dan Soerjopranoto, faksi non-Komunis berhasil memasukkan satu klausul ke dalam AD/ART SI, yakni larangan keanggotaan ganda bagi setiap anggota SI, yang tentu saja ditentang oleh kader-kader komunis.[7] Akibatnya, kader-kader komunis di SI harus angkat kaki karena jelas mereka masih berkepentingan untuk tetap bergabung dengan organisasi-organisasi komunis.[8] Kalangan ini kemudian mendirikan Sarekat Rakyat, yang belakangan menjadi tulang punggung pendirian PKI di banyak daerah di Indonesia.

Perpecahan kedua terkait dengan keputusan sepihak untuk menyingkirkan sejumlah tokoh-tokoh penting partai, termasuk Soekiman dan Soerjopranoto, yang dianggap melakukan penghinaan meski secara tidak langsung kepada Tjokroaminoto, pemimpin besar SI. Hal ini berawal dari dugaan adanya penyalahgunaan keuangan yang diungkap tim khusus di bawah pimpinan Soekiman, di salah satu organisasi pribumi terpenting saat itu, yaitu Persatuan Pegawai Pegadaian Hindia (PPPH). Di organisasi pribumi tersebut, Tjokroaminoto adalah anggota yang ditengarai terlibat dalam praktik penyalahgunaan tersebut. Terungkapnya kasus ini berdampak pada pemecatan Martodiredjo dari posisi pimpinan PPPH. Walaupun PPPH tidak melengserkan Tjokroaminoto, namun tindakan yang dilakukan oleh tim yang dipimpin Soekiman sangat membuatnya terhina. Dia kemudian berupaya memberikan hukuman setimpal sebagai balasan kepada mereka yang telah mempermalukannya. Untuk kepentingan ini, dia membuat opini adanya pelanggaran etika

---

[6] Safrizal Rambe, *Sarekat Islam: Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905–1942, (Jakarta: Yayasan Kebangkitan Insan Cendekia, 2010),* 111–137.

[7] Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900–1942, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1973),* 123–125.

[8] *Ibid.,* 125.

yang dilakukan oleh Soekiman dan anggota timnya. Walaupun kasus ini tidak terkait langsung dengan SI, Tjokroaminoto menuduh tim Soekiman telah melanggar prosedur internal dan etika organisasi SI.

Tjokroaminoto berdalih bahwa sebelum seorang anggota SI membuat keputusan yang akan memengaruhi SI, komite sentral seharusnya pertama-tama diberitahu dan memberikan persetujuan.[9] Menurutnya, Soekiman tidak melakukan prosedur itu sebelum mengumumkan adanya penyalahgunaan keuangan di PPPH. Komite Sentral PSII mendukung pandangan Tjokroaminoto. Sebagai akibatnya, Komite Sentral PSII memecat Soekiman setelah sempat memberikannya kesempatan untuk tetap menjadi anggota PSII apabila dia setuju meminta maaf atas tindakannya terhadap Tjokroaminoto dan membuat pengakuan itu di surat kabar, yang tentunya ditolak mentah-mentah oleh Soekiman. Kebijakan ini mengecewakan sejumlah cabang, terutama di Jawa, yang menganggap kebijakan itu tidak adil dan terlalu keras terhadap Soekiman. Sebagai respons terhadap penyingkirannya, setelah secara formal dipecat *in absentia* pada tahun 1933, dengan dukungan sejumlah cabang PSII yang tidak setuju dengan keputusan komite sentral atas pemecatan tersebut, Soekiman mendirikan partai Islam baru yang disebut Partai Islam Indonesia (Partii) di tahun yang sama.[10]

Perpecahan sayap moderat PSII dan anggota partai lainnya menyebabkan perpecahan berikutnya. Sayap moderat yang dipimpin Agus Salim, pemimpin utama partai setelah kematian Tjokroaminoto, meyakini bahwa sudah saatnya partai melakukan strategi kooperatif dalam memperjuangkan kepentingannya.[11] Mereka menganggap bahwa pilihan strategi ini masih sejalan dengan inti ajaran SI dan penting dilakukan mengingat karakter pemerintahan kolonial Belanda

---

[9] *Ibid.,* 139–140.

[10] *Ibid.,* 157.

[11] Tentang pemikiran Salim mengenai strategi kooperatif lihat Moh Roem, "Pergerakan Kesadaran dalam PSII", dalam "Pemandangan" dalam Suradi, *H. Agus Salim dan Konflik Politik dalam Sarekat Islam, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), 62.*

yang semakin keras menyebabkan cara-cara nonkooperatif menjadi kian tidak efektif.[12] Tawaran ini ditolak oleh sebagian besar anggota yang masih bersemangat mempertahankan cara-cara nonkooperatif sebagai karakteristik utama organisasi ini. Perbedaan pandangan ini diyakini pula sebagai cerminan adanya konflik pribadi antara Salim, tokoh tua dan mantan pemimpin partai, yang juga penasihat strategi kooperatif, dengan Abikusno Tjokrosujoso, pemimpin baru partai yang pada saat itu mewakili kepentingan kalangan mayoritas yang masih bersikukuh dalam menjalankan politik non-kooperatif. Ketika Komite Sentral PSII secara formal menolak usulan strategi kooperatif, kelompok moderat kemudian menciptakan faksi di dalam partai. Faksi yang kemudian disebut sebagai Barisan Penyadar PSII berdiri pada tahun 1936.[13] Sebagai bagian dari upaya Salim untuk mewujudkan kepentingannya sekaligus menantang kepemimpinan Abikusno,[14] keberadaan faksi ini menimbulkan kebingungan di antara anggota PSII. Ketika faksi Salim tak kunjung mengecil bahkan pengelompokan menjadi semakin menguat, Komite Sentral PSII memutuskan bahwa Barisan Penyadar adalah kelompok ilegal. Bersamaan dengan itu, PSII kemudian memecat Salim dan para pengikutnya.[15] Tidak lama setelah pemecatan itu, Salim dan pengikutnya mendirikan partai baru yang disebut Pergerakan Penyadar pada tahun 1937.[16]

Perpecahan berikutnya terjadi ketika Sekarmadji M. Kartosuwiryo, salah satu pemimpin partai, dengan dukungan dari delapan cabang partai di Jawa Tengah mendirikan Komite Pembela Kebenaran PSII (KPK-PSII) pada tahun 1940 sebagai respons atas pemecatan dirinya. KPK-PSII terdiri dari para pendukungnya di PSII

---

[12] *Ibid.,* 62–63.

[13] Rambe, *Sareket Islam, Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905–1942,* 259–260.

[14] Marwan Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008),* 347.

[15] Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900–1942,* 146.

[16] *Ibid.,* 148–149.

yang menganggap dirinya sebagai korban keputusan partai yang tidak adil. Para pendukung Kartosuwiryo itu adalah mereka yang meyakini cara-cara nonkooperatif untuk mewujudkan pelaksanaan gagasan dasar PSII. Di lain pihak, komite sentral PSII menganggap Kartosuwiryo sebagai tokoh yang memiliki agenda tersembunyi yang akan membawa partai ke arah yang menyimpang, dengan memperkenalkan penafsiran baru atas ideologi partai yang bernuansakan mistis dan ajaran-ajaran yang mengedepankan militansi dan radikalisme.[17] Selain itu, partai berkesimpulan bahwa pendekatan radikal yang didirikan oleh Kartosuwiryo—termasuk penolakannya atas upaya PSII bergabung dengan Gabungan Politik Indonesia (GPI), sebuah aliansi politik moderat yang berupaya mendirikan parlemen Indonesia—dan upayanya membangun apa yang disebut "Negara Islam" secara potensial akan membahayakan keberadaan PSII di hadapan pemerintah kolonial.[18]

Kasus perpecahan internal PSII mengisyaratkan kegagalan sebuah ideologi, yang dipahami demikian longgar oleh para anggotanya, dalam mengatasi keragaman latar belakang anggotanya, baik dalam hal afiliasi politik, idealisme, maupun kepentingan. Perpecahan PSII terlihat logis karena ideologi sebagai nilai pemersatu sebenarnya tidak terwujud. Situasi ini memberikan peluang bagi anggota untuk terus menganut nilai-nilai lain, menjadi loyal terhadap kelompok lain, dan menafsirkan ideologi PSII secara eksklusif. Keberadaan kelompok komunis, sayap moderat, dan pengikut Kartosuwiryo menjadi contoh dalam hal ini. Kemudian, banyak anggota partai yang memiliki keanggotaan ganda menyebabkan memburuknya situasi ini karena kesulitan untuk mempertahankan loyalitas. Keberadaan Semaun, Alimin, Darsono, dan para pengikutnya, misalnya, menjadi contoh dimungkinkannya seorang kader untuk mengikuti proses kaderisasi

[17] Tentang proses pendirian partai ini lihat Suradi, *H. Agus Salim dan Konflik Politik dalam Sarekat Islam,* 67–77.

[18] *Ibid.,* 148–149.

pada dua organisasi yang berbeda, yakni PSII dan PKH[19], dalam waktu bersamaan.

Kemudian, perpecahan juga merupakan dampak dari upaya penerapan strategi yang berbeda-beda di antara para kader partai. Perbedaan strategi antara Agus Salim (pemimpin kooperatif) dan Abikusno Tjokrosujoso (pemimpin non-kooperatif), misalnya, memainkan peranan penting dalam menciptakan perpecahan ketiga di partai ini. Rambe menyebutkan bahwa perbedaan strategi untuk menghadapi pemerintah kolonial dalam perjalanan waktu telah memicu konflik di antara kader PSII.[20] Selain itu, perpecahan PSII juga merefleksikan dampak dari sikap pemimpin karismatik yang demikian berkuasa, yang kadang memilih untuk bertindak dengan memanipulasi aturan main demi memuluskan kepentingannya. Kondisi ini semakin diperburuk dengan ketiadaan mekanisme resolusi konflik yang adil sehingga kerap menciptakan kekecewaan dan memperburuk soliditas partai. Pemecatan Soekiman dan pengikutnya yang dianggap telah menghina Tjokroaminoto dan kemudian memicu perpecahan kedua adalah contoh dari kasus ini.

B. Era Kemerdekaan (1945–1998)

Pada tahun-tahun awal era kemerdekaan (1945–1952), perpecahan muncul kembali. Partai Politik Islam Masyumi (Masyumi) menjadi partai pertama yang mengalami perpecahan partai. Pada November 1945 di Yogyakarta, tokoh-tokoh utama kalangan Islam dan beberapa organisasi penting, termasuk Muhammadiyah dan NU, dua organisasi Islam terbesar, bahu-membahu mendirikan Masyumi. Pada awalnya, partai ini diniatkan sebagai satu-satunya partai Islam yang mewakili aspirasi seluruh komunitas Islam di Indonesia. Niat ini mencerminkan

---

[19] Sebelum mendirikan PKH, sebagian besar aktivis SI-Merah juga merupakan anggota *Indische Sociaal-Democratische Vereniging (Indies Social Democratic Association atau ISDV), organisasi komunis yang didirikan oleh Henk Sneevliet.*

[20] Syafrizal Rambe, *Sarekat Islam, Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905–1942,* 248.

hubungan yang harmonis di antara komunitas Islam di tahun-tahun pertama era kemerdekaan. Situasi ini dilandasi oleh idealisme yang sama, yaitu melindungi negara ini dari penjajahan asing dan menjaga kepentingan umat Islam. Kemudian, struktur organisasi Masyumi juga memberi kontribusi untuk turut mempertahankan hubungan harmonis itu. Hal ini dikarenakan dalam struktur Masyumi duduk hampir semua tokoh-tokoh Islam dengan proporsi yang relatif seimbang. Tokoh-tokoh penting dari kelompok-kelompok tradisional, yang diwakili oleh para ulama NU, seperti hadratus Syeikh K.H. Hasyim Asyhari, K.H. Bisri Syansuri, dan K.H. Wahab Chasbullah, terutama mengisi posisi Majelis Syura yang kewajiban utamanya memberikan masukan dan berfungsi sebagai dewan penasihat partai. Adapun para politisi, profesional, dan banyak tokoh penting dari kelompok modernis masuk dalam Dewan Tanfidziah, yang merupakan badan eksekutif partai untuk melaksanakan kebijakan partai. Akan tetapi, situasi ideal ini tidak berlangsung lama.

Pada tahun 1947, sejumlah mantan pemimpin PSII keluar dari Masyumi dan menyatakan kemandiriannya. Hal ini dipicu oleh tawaran Amir Syarifuddin, sebagai formatur pemerintahan baru, yang meminta para mantan pimpinan PSII itu untuk bergabung mewakili unsur Islam di pemerintahannya. Sebelum tawaran ini dibuat, Masyumi secara formal menyatakan tidak akan bergabung dengan Amir Syarifuddin. Hal ini disebabkan unsur-unsir lain dalam koalisi pemerintahannya, yaitu PSI, Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Partai Buruh, tidak menerima keinginan Masyumi untuk memegang sejumlah posisi kementerian strategis, khususnya perdana menteri dan menteri pertahanan.[21]

Mantan pemimpin PSII, Arudji Kartawinata dan Wondoamiseno, mempertimbangkan usulan itu sebagai kesempatan untuk merevitalisasi PSII dan khususnya, posisi mereka di dalam perpolitikan

---

[21] Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaat-i-Islam (Pakistan), (Jakarrta: Paramadina, 1999), 130.*

nasional. Karena alasan-alasan tersebut, mereka menyatakan pendirian kembali PSII, sebuah partai yang independen, dan bergabung dengan koalisi.[22] Menurut Deliar Noer, situasi ini sebenarnya sejalan dengan kehendak para mantan anggota PSII di sejumlah daerah untuk mendirikan kembali partai mereka, yang pada tahun 1943 telah dibubarkan oleh pemerintah kolonial Jepang. Mereka meyakini pendirian kembali PSII akan membuat mereka lebih leluasa memperjuangkan kepentingannya, dan di atas itu semua, kembali menjadi salah satu organisasi kunci dalam konstelasi politik nasional.[23]

Menjelang Pemilu tahun 1955, perpecahan kedua terjadi lagi di Masyumi. Hal ini terjadi ketika NU, sebagai salah satu pilar utama Masyumi dan salah satu anggota istimewa[24] yang juga representasi kelompok tradisionalis, menyatakan diri keluar dari Masyumi pada tahun 1952. Inti persoalan perpecahan ini setidaknya ada tiga hal. Pertama terkait dengan perbedaan pandangan atas peranan ulama di dalam struktur organisasi partai. Perbedaan pandangan ini pada akhirnya menjadi isu ideologis bagi NU karena berkaitan dengan posisi ulama sebagai unsur paling penting dalam keyakinan[25] dan keberadaan NU.[26] Bagi kalangan NU, ulama seharusnya ditempatkan pada posisi tertinggi partai, baik sebagai penasihat maupun eksekutor, sebagaimana layaknya Dewan Syuriah NU. Kedudukan ini akan

---

[22] Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Perkembangan Politik Indonesia (1945–1965), (Mizan: Bandung, 2000),* 81.

[23] *Ibid.,* 82.

[24] Anggota Istimewa adalah sebuah status yang diberikan untuk organisasi dan bukan kepada individu yang secara formal menyatakan afiliasi politiknya terhadap Masyumi. Selama keberadaan Masyumi, ada delapan organisasi yang diberikan status ini, yaitu NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Persatuan Umat Islam, Al-Irsyad, Jam'iyatul Wasliyah, Al-ittihadiyah, dan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Lihat Mahendra, *op. cit.,* 182–183.

[25] Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967, (Yogyakarta: LKiS, 2003),* 23–24. *Hal ini juga dalam hal tertentu dianggap sebagai serangan terhadap fondasi ideologi NU yang* meyakini posisi istimewa dari para ulama.

[26] Mahrus Irsyam, *Ulama dan Partai Politik: Upaya Mengatasi Krisis, (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1984),* 84.

memberikan ulama peranan holistik dalam organisasi agar lebih dapat mengarahkan partai ke jalur yang paling tepat.

Meski demikian, di Masyumi, sebagian besar ulama, khususnya dengan latar belakang NU, ditempatkan pada Majelis Syura, sebuah badan penasihat yang hanya memainkan peran sebagai penasihat untuk dewan pimpinan pusat (DPP). Sejumlah pakar meyakini bahwa struktur organsisasi telah berubah dari yang ditetapkan pada tahun 1949. Kongres Nasional Masyumi di Palembang mentransformasi posisi Majelis Syura dari badan legislatif menjadi hanya badan penasihat, yang pada gilirannya memicu kekecewaan di antara masyarakat NU.[27] Namun, menurut Yusril Ihza Mahendra, aturan main pada posisi Majelis Syura di Masyumi tidak pernah berubah. Masyumi, menurut Mahendra, dari awal berdirinya tetap menempatkan Majelis Syura sebagai badan penasihat dan tidak pernah menempatkan badan ini dalam posisi sebagai legislatif. Posisi ini membatasi peran ulama dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kegiatan sehari-hari di partai. Kehidupan sehari-hari partai, termasuk menilai masalah-masalah strategi partai, ditentukan terutama oleh DPP yang terdiri dari para politisi dan profesional. Peran terbatas ulama, yang kebanyakan didukung sayap modernis dalam Masyumi yang menganggap pengelolaan partai sebagai sesuatu yang harus dipertahankan oleh para profesional tanpa melihat latar belakang agama, dipahami oleh NU sebagai kecenderungan yang merendahkan keberadaan ulama.[28]

Hal kedua terkait dengan kegagalan NU untuk menduduki pos menteri agama di kabinet yang baru dibentuk, yang dikenal sebagai Kabinet Wilopo (1952–1953). Bagi NU, kepentingan memperoleh posisi itu tidak hanya terkait dengan masalah memperoleh posisi

[27] Lihat, misalnya, Irsyam, *Ulama dan Politik Upaya Mengatasi Krisis,* 27. *Noer*, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Perkembangan Politik Indonesia 1945–1965,* 86. Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaat-i-Islami (Pakistan),* 125.

[28] Sejumlah pihak bahkan melabeli Masyumi sebagai "partai yang mendiskreditkan ulama", dalam Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Perkembangan Politik Indonesia, 1945–1965,* 86.

politik, tetapi juga bagian perjuangan untuk memperoleh keadilan di dalam partai. NU menganggap karena empat dari lima posisi di pos kementerian untuk Masyumi di kabinet baru diberikan untuk unsur lain, cukup adil apabila NU menuntut untuk memegang satu posisi di kabinet. Di pemerintahan sebelumnya, di mana Masyumi adalah pemimpin atau bagian koalisi, kader-kader Muhammadiyah lebih sering memperoleh lebih banyak jabatan dibandingkan kader NU.

Karena alasan ini, Wahab Chasbullah, pemimpin tertinggi NU yang juga anggota Majelis Syura Masyumi, meminta komite sentral Masyumi untuk mengakomodasi kepentingan NU sebagai organisasi Islam terbesar dan unsur penting di Masyumi.[29] Namun, pandangannya ini tampaknya tidak ditanggapi secara serius oleh partainya. Setelah kehilangan kesabaran, dia akhirnya menemui Wilopo secara pribadi untuk membahas soal posisi menteri tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan partai,[30] yang di kemudian hari disayangkan oleh banyak anggota Masyumi.[31] Masyumi akhirnya menjawab tuntutan Wahab Chasbullah dengan mengadakan pemilihan internal terbatas untuk memastikan siapa yang akan menjadi representasi Masyumi untuk posisi menteri agama. Hasilnya jauh dari harapan NU. Faqih Usman, salah satu tokoh utama Muhammadiyah, memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilihan internal.[32]

Hal ketiga adalah bertambahnya jumlah politisi NU. Dalam kondisi ketika semakin banyak warga NU yang berkecimpung dalam politik praktis, adanya media politik baru yang dapat menyalurkan hasrat para politisi baru itu menjadi penting adanya. Oleh karena

---

[29] Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967,* 109–113.

[30] *Ibid.,* 114.

[31] Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Perkembangan Politik Islam Indonesia, 1945–1965,* 92.

[32] Kandidat lain adalah Osman Raliby, Kasman Singodimedjo, Haji Ilyah Ja'cob, Ali Akbar, Zainal Abidin Ahmad, Masjkur, dan Fathurrahman (dua orang terakhir berasal dari NU). Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Perkembangan Politik Indonesia 1945–1965,* 92. *Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaat-i-Islam (Pakistan),* 135.

itu, dalam soal ini, keluarnya NU dari Masyumi dapat dilihat sebagai bagian dari menghidupkan peluang untuk mengelola organisasi politik NU secara independen dan sebagai upaya untuk memajukan posisi NU dalam konstelasi politik nasional. Sesuatu yang tidak dapat dicapai apabila NU menempati status hanya sebagai "anggota istimewa" di Masyumi.[33] Lebih dari itu, dengan kemandirian politik yang dimilikinya, NU juga dipandang akan lebih maju dalam mencapai keuntungan ekonomi dan status politik.[34] Keberadaan tokoh ulama karismatik sekaligus politis, khususnya K.H. Wahab Chasbullah, menjadi faktor pendorong yang menginspirasi sebagian besar politisi dan anggota NU tentang pentingnya organisasi politik baru yang dapat menyalurkan kepentingan-kepentingan NU.

Kepentingan eksklusif, khususnya terkait dengan upaya mempertahankan kedudukan strategis di pemerintah, telah menjadi salah satu alasan utama yang melatarbelakangi dua perpecahan di Masyumi. Selain itu, khusus terkait dengan NU, berbagai masalah tentang peranan terbatas ulama, yang pada dasarnya juga menyentuh posisi ideologis NU, juga memperburuk hubungan antara eksponen modernis dan kaum tradisionalis di tubuh Masyumi. Situasi ini mungkin terjadi karena ketiadaan infusi nilai-nilai dan nilai-nilai bersama itu sendiri. Situasi ini tidak hanya menyebabkan keberagaman tingkat pemahaman para anggota yang mengurangi rasa persatuan di antara mereka, tetapi juga pada akhirnya mendorong setiap unsur di dalam partai untuk lebih mengedepankan kepentingan kelompoknya dan mengesampingkan kepentingan partai.

Selama era ini, yang juga dikenal sebagai era Demokrasi Liberal (1945–1959), Masyumi bukanlah satu-satunya partai yang mengalami perpecahan. Pada tahun 1956, PSII "baru" juga mengalami fragmentasi. Partai ini terpecah menjadi dua kubu, yaitu PSII Abikusno Tjokrosujoso (PSII-Abikusno) dan PSII Arudji Kartawinata/Anwar

---

[33] Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaat-i-Islami (Pakistan),* 150–151.

[34] Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967,* 117–118.

Tjokroaminoto (PSII-Arudji/Anwar). Perpecahan ini diawali dengan pemecatan Tjokrosujoso, pemimpin PSII pada tahun 1930-an yang juga anak Tjokroaminoto, pada tahun 1953. Partai memecat Abikusno Tjokrosujoso karena keputusannya untuk menduduki jabatan menteri pekerjaan umum di Kabinet Ali Sastroamidjojo (1953–1955) tanpa berkonsultasi lebih dulu dan melaporkannya ke partai.

Sebagai salah satu anggota yang paling senior, dan terutama karena merasa telah banyak berbuat untuk partai, keputusan pemecatan atas dirinya jelas mengecewakan Abikusno. Pasangan Arudji, penggagas pendirian kembali PSII, dan Anwar Tjokroaminoto, saudara kandung Tjokroaminoto, kemudian memegang tampuk kepemimpinan partai.

Namun, pada tahun 1955, karena posisinya yang tidak tergantikan dalam partai, PSII mencabut hukuman Abikusno. Kenyataannya, posisi Abikusno di partai tetap kuat walaupun dia tidak aktif. Banyak kader kemudian berharap bahwa dia akan menjadi pemimpin partai di tahun berikutnya. Melihat perkembangan situasi ini, Abikusno menjadi cukup percaya diri. Dia menganggap hal ini sebagai dukungan atas dirinya untuk melakukan banyak perubahan, termasuk membentuk kepengurusan atau komite sentral baru yang berbeda dari kepengurusan sebelumnya. Pada Kongres Nasional PSII tahun 1956, seperti diprediksikan sebelumnya, Abikusno terpilih sebagai ketua formatur untuk menyusun kepengurusan partai. Dengan memanfatkan kesempatan ini, dia kemudian membentuk komite sentral yang banyak mengakomodasi kepentingannya. Para pengikut kelompok Arudji/Anwar banyak tidak diikutsertakan. Alasannya, kelompok ini menurut Abikusno dan pendukungnya merupakan "faksi anti SI" di dalam PSII.[35]

Namun belakangan, Abikusno tidak pernah dapat mewujudkan ambisinya. Manuver politik oleh para penentangnya, terutama dari para pengurus di kepengurusan sebelumnya yang khawatir atas perubahan internal yang radikal, berhasil membendung cita-cita

[35] Lembaga Sejarah Departemen Urusan UMUM PSII, *Short History of PSII, (1960),* 32.

Abikusno untuk membentuk komite baru. Menurut Abikusno, kelompok penentangnya itu telah memanipulasi dan menyabot proses pembentukan komite baru agar dapat mengamankan posisi mereka di partai.[36] Namun, menurut Kelompok Arudji/Anwar, Abikusno telah menyalahgunakan wewenang mekanisme penyusunan kepengurusan partai dengan menganggap dirinya sebagai satu-satunya formatur dan mengabaikan peranan empat anggota formatur lainnya, termasuk Arudji dan Anwar.[37] Langkah Abikusno itu tidak dapat mereka terima karena jelas melanggar aturan main partai. Pandangan inilah yang belakangan menjadi semacam pandangan resmi partai.

Masing-masing kubu kemudian menganggap dirinya sebagai kelompok yang sah dan berhak untuk mendirikan komite. Kedua komite kemudian menjalankan kegiatannya sendiri-sendiri, termasuk mengadakan konferensi nasional dan membentuk komite-komite lokal. Akan tetapi, pada tahun 1960, Presiden Soekarno sebagai sosok yang paling menentukan hidup-matinya partai saat itu, hanya mengakui keberadaan PSII-Arudji/Anwar. Hal tersebut menyebabkan PSII-Abikusno secara formal menjadi tidak sah dan karenanya tidak lama setelah itu menghentikan segenap kegiatannya.

Akhir era demokrasi liberal—yang ditandai dengan resolusi untuk melaksanakan kembali UUD 1945 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959—menandai penghentian perpecahan partai Islam selama lebih dari empat dekade. Presiden Soekarno membangun sebuah sistem politik baru yang disebut Demokrasi Terpimpin yang didukung kelompok militer. Presiden dengan dukungan militer menjadi pusat untuk hampir seluruh kegiatan politik di Indonesia.[38] Soekarno membatasi peranan partai-partai politik dan melarang banyak partai, termasuk membubarkan

---

[36] Lembaga Sejarah Departemen Urusan Umum LT PSII, "Keringkasan Sejarah (Kronologie) Syariat Islam, 10 September 1912–10 Setpember 1960", (1960), dalam Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Perkembangan Politik Indonesia 1945–1965,* 84.

[37] "Ikhtisar Kongres-Kongres Syarikat Islam", (1972), 19–20, *ibid.,* 84.

[38] Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia, (Jakarta: Sinar Harapan, 1986).*

dua partai berpengaruh, yaitu Masyumi dan PSI.[39] Tiga partai Islam lain, yaitu NU, PSII, dan Persatuan Tarbiyah Indonesia (Perti), seperti kebanyakan partai-partai lainnya yang tetap dibiarkan hidup oleh Soekarno,[40] menjadi tidak berdaya dan tidak efektif dalam menyuarakan kepentingan rakyat.

Dalam situasi ini, partai pada dasarnya tidak berperan. Afan Gaffar mendeskripsikan kehidupan perpolitikan nasional sebagai "sistem non-partai".[41] Kepentingan utama tiap partai pada masa itu adalah mempertahankan dan melindungi keberadaannya, yang berarti menjadi loyalis Sukarno. Dalam atmosfer demikian, sulit dibayangkan adanya upaya membentuk aliansi partai Islam yang kritis terhadap Soekarno. Selain itu, latar belakang afiliasi keagamaan yang berbeda—NU dan Perti untuk kaum tradisionalis dan PSII yang mewakili kaum modernis—membuat upaya membangun kepercayaan dan aliansi yang kuat di antara mereka sendiri menjadi tidak mudah dilakukan.

Selama era Demokrasi Terpimpin Soekarno (1959–1966), seluruh partai Islam mampu menghindari perpecahan internal. Kebijakan membatasi jumlah partai yang diterapkan Soekarno menjadi hal yang penting, karena meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga persatuan di antara sesama anggota. Posisi ringkih mereka di bawah

---

[39] Masyumi dan PSI dianggap sebagai musuh utama rezim baru, terutama terkait dengan penolakan keras keduanya atas model pemerintahan baru yang cenderung otoriter. Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu, Masa Demokrasi Terpimpin, 1959–1965, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996),* 61 dan 70–75. *Mahendra, op. cit.,* 51. Mengenai peristiwa seputar dibubarkannya Masyumi lihat R.Z. Leirissa, *PRRI Permesta: Strategi Membangun Indonesia tanpa Komunis, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti*, 1997).

[40] Yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Indonesia (Partindo), dan Musyawarah Rakyat Banyak (Murba).

[41] Afan Gaffar, "Sistem Kepartaian yang Hegemonik dan Terobosan Demokrasi Indonesia", dalam Amir Effendy Siregar (dkk), "Percikan Pemikiran Fisipol UGM tentang Pembangunan", (Yogyakarta: Fisipol UGM, 1990), 19, dalam Kamarudin, *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi: Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu 2004, (Jakarta: Visi Publishing, 2003),* 24.

bayang-bayang pemerintah otoriter Soekarno menyadarkan akan efek negatif perpecahan internal yang dapat berujung pada tersingkirnya partai dalam kehidupan politik. Apalagi tidak ada jaminan bahwa setiap kelompok yang berkonflik semuanya akan disetujui oleh presiden untuk tetap hidup di pentas politik, sebagaimana yang menimpa PSII-Abikusno. Dengan kata lain, faktor eksternal terutama sistem politik Indonesia pada waktu itu mendukung terciptanya soliditas partai. Adapun untuk NU, kesadaran di kalangan anggotanya untuk mempertahankan kepentingan kaum tradisionalis merupakan poin penting lain yang memberi kontribusi untuk menghindari partai dari perpecahan internal.[42]

Pada masa Orde Baru (1966–1998), perpecahan partai di dalam kubu Islam tidak terjadi, namun konflik internal dalam tubuh partai Islam berlangsung. Sistem politik baru yang didirikan pemerintahan Soeharto hanya menghendaki satu partai untuk mewakili kepentingan umat Islam. Rezim baru percaya bahwa stabilitas politik yang merupakan prasyarat mendasar bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi menghendaki kontrol yang ketat atas lembaga-lembaga politik.[43] Bagi Orde Baru, hal ini berarti memberikan ruang yang kecil bagi partai-partai politik untuk bermanuver, dengan pengecualian Golkar sebagai partai pemerintah yang menikmati akses bebas dan langsung ke masyarakat. Karena alasan ini, rezim ini tidak hanya menjadikan Pancasila sebagai ideologi tunggal untuk dianut setiap organisasi di Indonesia, tetapi juga memberikan kebijakan fusi bagi partai-partai politik pada tahun 1973 yang kemudian mereduksi jumlah partai politik dari sepuluh menjadi tiga partai.[44]

---

[42] Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967*.

[43] Mohtar Mas'oed, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966–1971, (Jakarta: LP3ES, 1989).*

[44] M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai-Partai Politik: Sebuah Potret Pasang Surut, (Jakarta: Rajawali Press, 1993).* Sedangkan untuk partai-partai non-Islam, mereka difusikan menjadi sebuah partai baru yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang terdiri dari PNI, Partai Katolik, Parkindo, IPKI, dan Murba.

Meski demikian, beberapa saat menjelang terbentuknya PPP di tahun 1973 terjadi peristiwa konflik intermal partai di tubuh PSII. Pertikaian ini melibatkan dua kubu yakni PSII yang dipimpin oleh M.CH. Ibrahim seorang kader tulen partai versus kelompok PSII yang dikomandoi pengusaha T.M. Gobel. Kelompok Ibrahim distigmakan sebagai antirezim karena dituduh tidak sepakat dengan ide fusi partai yang dicanangkan Orde Baru. Gobel, yang secara politis lebih dekat dengan rezim, memanfaatkan stigma ini untuk meminta dukungan dan restu pemerintah mendongkel Kelompok Ibrahim, yang terpilih secara sah pada Kongres Nasional ke-33 dua tahun sebelumnya. Pemerintah meresponsnya dengan mendiamkan perebutan kantor DPP PSII oleh kelompok Gobel dan bahkan mengundang Kelompok Gobel untuk bersama-sama partai-partai Islam lain menandatangani kesepakatan fusi ke dalam PPP tahun 1973. Saat itu, Anwar Tjokroaminoto sebagai Ketua PSII yang baru menjadi perwakilan partainya yang menandatangani fusi, meskipun dia sebenarnya dikalahkan oleh Ibrahim pada saat pemilihan Ketua Umum PSII di Kongres Nasional tahun 1971. Undangan ini merupakan bentuk pengakuan sepihak kepada Kelompok Gobel, pihak yang dianggap lebih sah oleh pemerintah.

Pada tahun 1973, seluruh partai politik dengan latar belakang ideologi Islam, yaitu NU, PSII, Perti, dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), dilebur menjadi sebuah partai baru, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sekali lagi, partai Islam menjadi partai transideologi, yang terdiri dari sayap Islam modernis dan tradisionalis. Dengan kebijakan ini, fragmentasi tidak mungkin terjadi.

Meski demikian, PPP, khususnya menjelang akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, mengalami konflik internal berkepanjangan. Hal ini terutama dipicu oleh persaingan antarunsur, khususnya unsur NU yang mewakili kelompok tradisionalis dan Parmusi yang mewakili kelompok modernis.[45] Kedua unsur sama-sama ingin mengembangkan pengaruhnya dalam partai dan memperoleh semaksimal mungkin

---

[45] Syamsuddin Haris, *PPP dan Politik Orde Baru, (Jakarta: Grasindo, 1991).*

jabatan-jabatan strategis dan khususnya memperoleh lebih banyak kursi di parlemen. Walaupun NU adalah unsur terbesar di PPP, namun Parmusi dalam waktu yang cukup lama mampu memimpin partai dan membuat kondisi NU kurang berpengaruh. Setelah munculnya serangkaian kebijakan yang tidak adil, yang didukung terutama oleh Parmusi, seperti yang akan dibahas pada bab selanjutnya, pada tahun 1982 NU memutuskan keluar dari PPP. Meski demikian, NU masih membolehkan anggota-anggotanya sebagai individu tetap aktif dan berkiprah dalam PPP.

Pada tahun 1985, PPP dipaksa oleh rezim Orde Baru untuk menjadikan Pancasila sebagai asas partai dan mengganti Kabah dengan Bintang sebagai simbolnya. Situasi ini mereduksi citra PPP sebagai sebuah partai Islam dan di saat yang sama memberikan Golkar peluang menjadi kompetitor serius untuk menarik banyak pemilih muslim.[46] Seiring dengan berjalannya waktu, peran PPP di kancah perpolitikan nasional cenderung kurang signifikan dan tampak semata sebagai unsur pelengkap di dalam sistem politik nasional.

C. Ringkasan

Perkembangan partai-partai Islam yang dibahas di atas menegaskan adanya sejumlah faktor yang melatarbelakangi perpecahan internal. Faktor ideologi merupakan salah satu alasan perpecahan tersebut. Hal ini termasuk perselisihan antara pengikut dua ideologi yang berbeda di dalam satu partai dan perselisihan yang terkait dengan perbedaan pemahaman dan penafsiran ideologi. Pertentangan yang demikian mendalam antara SI-Merah dan SI-Putih mewakili situasi pertama.

[46] Upaya Golkar, misalnya dilakukan dengan terus-menerus menggunakan ulama yang dekat dengan penguasa untuk mendekati para pemilih dan menyebarkan jargon dan agenda keagamaannya di dalam kampanye politik Golkar serta memberikan banyak bantuan untuk aktivitas dan pengembangan agama Islam. Tentang peranan ulama di Golkar lihat Heru Cahyono, *Peran Ulama dan Golkar, 1971–1980, (Jakarta: Sinar Harapan, 1992).*

Adapun perselisihan antara sayap moderat dan anggota PSII tentang strategi partai dapat menjadi contoh untuk kondisi yang kedua.

Kasus perpecahan partai di era pra-Reformasi menunjukkan bahwa keberadaan ideologi menjadi unsur penting yang memengaruhi hadirnya perpecahan ataupun soliditas dalam partai. Dapat disimpulkan bahwa karena ideologi sebagai suatu yang diyakini oleh sejumlah pakar memainkan peranan yang sangat mendasar dalam mengarahkan partai dan menjadi unsur utama dalam menyatukan anggota partai. Oleh karena itu, ketiadaan ideologi yang mampu berperan membawa persatuan di antara anggota secara potensial akan merusak soliditas partai.

Kemudian, perpecahan partai di era pra-Reformasi cenderung terjadi manakala partai berperan layaknya sebuah badan federasi, yang menampung kelompok-kelompok Islam dengan berbagai latar belakang pemikiran dan kepentingan politik. Hal ini terjadi untuk PSII (sebelum era Kemerdekaan) dan pada Masyumi. Mengambil pelajaran dari kasus keduanya, perpecahan partai terutama terkait dengan kesulitan untuk membangun nilai-nilai pemersatu di antara kelompok-kelompok yang ada di dalam partai. Menurut Feith, situasi ini memperlihatkan bahwa fenomena federasi telah menyebabkan keanggotaan yang mensyaratkan loyalitas tunggal dan komitmen ketat sebenarnya tidak hadir dalam kehidupan partai-partai tersebut.[47]

Setelah sejumlah unsur kritis keluar dari partai dan "purifikasi" terjadi, partai dapat bertindak secara lebih eksklusif dan mengklaim sebagai perwakilan kelompok tertentu. Dalam situasi seperti ini, soliditas cenderung terjadi. Hal ini menunjukkan manakala sebuah partai menjadi medium hanya untuk satu aliran ideologi maka kecenderung untuk terfragmentasi menjadi kecil, dan sebaliknya.

Namun, situasi ketika partai dengan satu ideologi cenderung tidak terfragmentasi itu tidak selamanya terjadi di era Reformasi. Saat ini, setiap partai Islam tidak ada lagi yang bersifat federatif.

[47] Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, (Ithaca: Cornell University Press, 1962),* 122.

Partai-partai Islam yang ada dibangun sebagai representasi satu garis politik tertentu dan sekurang-kurangnya mewakili satu komunitas utama tertentu. Namun, walaupun partai-partai tersebut bukan merupakan badan federasi, perpecahan tetap terjadi. Dengan kata lain, perpecahan juga dapat terjadi di partai-partai politik yang menaungi lebih dari satu aliran atau ideologi politik dan mewakili lebih dari satu komunitas besar umat Islam.

Ketergantungan pada tokoh besar partai menjadi alasan lain yang patut diperhitungkan sebagai penyebab perpecahan. Hubungan *patron-client* masih dominan memengaruhi budaya politik, di mana masyarakat cenderung memercayakan kepentingan politiknya pada elite, dan merupakan akar yang menyebabkan hal ini terjadi. Kenyataan bahwa kepemimpinan personal[48] ketimbang kepemimpinan prosedural masih memainkan peranan penting di partai-partai politik ini merupakan contoh yang memperlihatkan ketiadaan pelembagaan partai. Posisi istimewa patron atau tokoh karismatik tertentu dapat melangkahi mekanisme prosedural yang kemudian melahirkan kontroversi dan menjadi titik utama perselisihan dan kekecewaan. Situasi ini juga kerap memicu konflik kepentingan di antara elite, yang terlalu jauh mendominasi kehidupan partai. Hal ini terjadi dikarenakan hubungan kekuasaan di dalam partai pada waktu itu yang didominasi oleh kepentingan elite atau para tokoh. Penarikan diri PSII dari Masyumi pada tahun 1947 tidak dapat dilepaskan dari kepentingan elitenya untuk memperoleh posisi yang lebih kuat di pemerintahan. Situasi serupa pada tahun 1952 menjadi salah satu alasan yang sama bagi NU untuk meninggalkan Masyumi. Begitu pula dengan pemecatan Soekiman tahun 1933 dan perpecahan PSII tahun 1956 yang berujung pada terbentuknya kepengurusan kembar.

Selain itu, perkembangan partai politik Islam menunjukkan bahwa kompleksitas ajaran Islam memberikan peluang untuk

---

[48] Dalam hal ini, kerabat klan bapak pendiri dapat memainkan peranan penting di dalam partai. Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Perkembangan Politik Indonesia, 1945–1965,* 80.

hadirnya beragam pemahaman manakala dijadikan sebagai fondasi untuk kegiatan politik. Sejarah politik Islam menunjukkan konflik yang dalam dan berkepanjangan di antara umat Islam, yang terjadi karena pemahaman yang berbeda dalam menjalankan Islam sebagai ideologi politik atau sebagai dasar untuk membangun strategi politik. Hal tersebut juga berlaku bagi partai-partai Islam di Indonesia. Perbedaan pemahaman dalam menafsirkan ajaran Islam dan pendapat tentang strategi politik apa yang harus dikembangkan, dalam kasus PSII misalnya, telah memicu perpecahan di antara anggota-anggotanya. Dengan kata lain, penafsiran berbeda tentang Islam memberikan peluang bagi setiap muslim untuk melegitimasi munculnya pengelompokan yang pada akhirnya memainkan peranan dalam turut merusak kesatuan partai.

Kondisi ini diperburuk dengan adanya loyalitas komunal yang membutuhkan waktu cukup lama untuk dihilangkan manakala kader sebuah organisasi Islam menjadi kader sebuah partai Islam. Dalam hal ini, kader partai kerap berupaya untuk mempertahankan atau mengedepankan kepentingan organisasi sebelumnya. Sikap ini kerap menjadi penyebab utama hubungan yang tidak harmonis antara kader dengan latar belakang organisasi Islam atau afiliasi yang berbeda. Kasus perpecahan Masyumi pada tahun 1962 ketika anggota partai dari NU meninggalkan partai serta kasus konflik berkepanjangan antara anggota NU dan Parmusi di dalam PPP menunjukkan situasi ini.

Sementara itu, sistem politik sebagai faktor eksternal turut pula memainkan peranan dalam mengondisikan perpecahan atau soliditas partai. Perpecahan di dalam kubu politik Islam relatif tidak berlangsung di Indonesia di masa ketika kebijakan untuk mereduksi jumlah partai atau kebijakan memfusikan partai diterapkan oleh rezim. Sementara ketika kebijakan membebaskan partai untuk berperan seperti di era demokratis berlangsung, sebagaimana yang terjadi di masa Demokrasi Liberal, kecenderungan perpecahan jauh lebih tinggi.

Penjelasan di atas memperlihatkan berbagai faktor dan bukan hanya faktor tunggal di balik fenomena perpecahan dan soliditas. Sebagian besar faktor-faktor itu terkait langsung atau tidak dengan masalah pelembagaan. Di era Reformasi, ketika kehidupan demokrasi mengalami revitalisasi, sebagian dari faktor-faktor di atas muncul kembali dan memberikan dampak besar bagi kehidupan partai-partai pada umumnya dan partai-partai Islam pada khususnya.

BAB III
BIOGRAFI POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

A. Latar Belakang Kemunculan PKB

Pendirian PKB merefleksikan keinginan kuat kaum Nahdiyin untuk memiliki sebuah partai politik yang dapat secara komprehensif memperjuangkan kepentingan mereka. PKB adalah jawaban atas kegundahan kaum Nahdiyin yang selama beberapa dekade tidak memiliki partai politik yang betul-betul mewakili aspirasi dan kepentingan mereka. Bahkan tidak termasuk PPP, sebagai partai tempat mayoritas anggota NU menyalurkan suaranya dan NU menjadi pendukung paling kuat partai tersebut. Pernyataan dari K.H. Cholil Bisri, salah satu tokoh NU, mewakili perasaan ini.

> Kini sudah saatnya NU berbuka, setelah lebih dari 32 tahun berpuasa dari gelanggang politik yang akhirnya membuat NU tercabik-cabik … bila diibaratkan, selama ini NU laksana mendorong mobil mogok, setelah mobil jalan, sudah tidak diajak malah diludahi, dan herannya orang NU kok pada mau.[1]

Di sepanjang sejarah politik modern Indonesia, NU merupakan salah satu organisasi Islam terpenting, dengan jumlah pengikut yang ditengarai berjumlah hingga puluhan juta orang. NU adalah juga partai Islam terbesar di Indonesia, terutama sejak tahun 1960 hingga

[1] A. Effendy Choirie, *PKB, Politik Jalan Tengah NU*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2002), 174.

fusi partai-partai Islam pada tahun 1973. Selama era transformasi politik di pertengahan tahun 1960-an, sebelum berdirinya Orde Baru, NU memainkan peranan penting tidak hanya dalam membasmi kelompok komunis, yakni PKI dan organisasi-organisasi afiliasinya,[2] tetapi juga memberi kontribusi dalam melegitimasi dan mendukung keberadaan rezim baru.[3] Kontribusi ini dapat diamati dari keberadaan tokoh-tokoh utama NU, salah satunya M. Subchan Z.E. sebagai salah satu unsur pimpinan[4] Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada akhir tahun 1960-an, yang memberikan landasan normatif bagi berdirinya Orde Baru.

Pada tahun-tahun pertama Orde Baru, NU masih dapat mempertahankan keberadaannya sebagai partai politik Islam yang terkemuka. Hal ini dapat dilihat dari hasil Pemilu 1971. Dalam pemilihan umum itu, NU menjadi *runner-up* dan memperoleh persentase suara yang sama dengan Pemilu 1955 (lihat Tabel 3.1). Kemudian berdasarkan hasil Pemilu 1971, NU menjadi unsur terbesar di dalam PPP, satu-satunya partai Islam selama Orde Baru setelah dilakukannya fusi partai-partai Islam pada tahun 1973.[5]

Meskipun di tingkat praktis NU adalah partai politik terbesar kedua pada Pemilu 1971, perannya dalam dunia politik tidak sebanding dengan jumlah suara yang diperolehnya. Di tingkat partai, peranan dan keberadaan NU di PPP secara terus-menerus dimarginalisasi oleh unsur lain di partai itu, khususnya oleh kelompok Muslimin Indonesia (MI). Bahkan, meski di tahun-tahun pertama NU memperoleh tiga

---

[2] Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967*, (Yogyakarta: LK*i*S, 2003), 299–340. Lihat juga Hermawan Sulistyo, *Palu Arit di Ladang Tebu*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2006).

[3] Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967*, 341–259.

[4] Kepemimpinan MPRS (1967–1972) terdiri dari Jenderal Abdul Haris Nasution (Ketua), H.M. Subchan Z.E. (Wakil Ketua), Osa Maliki (Wakil Ketua), M. Siregar (Wakil Ketua), Brigadir Jenderal Mashudi (Wakil Ketua).

[5] Partai-partai Islam lain yang bergabung dalam fusi itu adalah Partai Muslimin Indonesia yang kemudian dikenal sebagia Muslimin Indonesia (MI), PSII atau Sarekat Islam (SI), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).

Tabel 3.1 Hasil Pemilihan Umum 1971

PARTAI	SUARA	%	KURSI
Golkar	34.348.673	62.82	236
NU	10.213.650	18.68	58
Parmusi	2.930.746	5.36	24
PNI	3.793.266	6.93	20
PSII	1.308.237	2.39	10
Parkindo	733.359	1.34	7
Partai Katolik	603.740	1.10	3
Perti	381.309	0.69	2
IPKI	338.403	0.61	0
Murba	48.123	0.08	0
Total	54.669.509	100.00	360

Sumber: www.kpu.go.id

dari empat posisi strategis di PPP, yaitu presiden partai, ketua dewan penasihat partai, dan ketua dewan legislatif, NU sebenarnya tidak dapat mengontrol kegiatan keseharian partai.

Dalam kenyataannya, peranan ketua umum DPP, badan penting lain yang dipegang unsur MI, menjadi variabel yang sangat kuat dan menentukan di PPP. Lembaga ini bahkan mampu menciptakan oligarki di dalam partai.[6] Mekanisme proses pengambilan keputusan di partai ini memberikan peluang bagi ketua umum DPP untuk dapat memutuskan sesuatu secara independen.[7] Di samping itu, kurangnya tokoh berkemauan kuat yang efektif dalam melakukan manuver politik dan kecenderungan terjadinya perpecahan di antara sesama kader NU[8] menjadi alasan lain mengapa NU cenderung kehilangan peran dan terlihat hanya mengikuti saja kepentingan unsur lain di PPP. Selain itu, dukungan politik dari rezim terhadap unsur non-NU, yang pada waktu itu cenderung bersifat kooperatif terhadap rezim,

---

[6] Syamsuddin Haris, *PPP dan Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gramedia, 1991), 76.

[7] *Ibid.,* 73–74.

[8] Tentang konflik internal NU, lihat, misalnya Mahrus Irsyam, *Ulama dan Partai Politik*: *Upaya* Mengatasi Krisis, (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1984), 83–163.

meningkatkan rasa percaya diri unsur-unsur non-NU untuk berperan besar dalam menentukan kebijakan internal partai, yang kerap sedikit banyak diwarnai pula oleh kepentingan eksklusif mereka.

Implikasi dari situasi ini adalah munculnya berbagai kebijakan internal yang memperburuk posisi NU. Salah satu kondisi paling buruk yang dialami oleh NU adalah saat tersingkirnya sejumlah tokoh utama NU dari daftar calon tetap (DCT) anggota dewan menjelang Pemilu 1982.[9] Keputusan kontroversial ini ditetapkan oleh elite PPP, khususnya Jaelani Naro sebagai Ketua Umum PPP dari unsur MI dan lingkaran dalamnya, termasuk Idham Chalid seorang tokoh NU yang cenderung pragmatis, tanpa terlebih dahulu melakukan konsultasi intensif dengan unsur lain di NU. Tindakan ini dimaksudkan tidak hanya dalam rangka memperkuat posisi unsur MI baik di partai maupun parlemen, tetapi juga untuk mereduksi konflik antara rezim dan partai, dengan mengeliminasi tokoh-tokoh kritis NU. Tujuan untuk mereduksi ketegangan dengan rezim mengindikasi mesranya hubungan antara Naro dan pemerintah Orde Baru. Situasi politik NU lebih buruk setelah Naro, pemimpin baru partai, menghapus seluruh posisi strategis di internal PPP yang diperoleh NU sebelum tahun 1984. Hal ini memperlemah posisi NU dan tokohnya hampir secara menyeluruh. NU tidak pernah lagi memiliki peluang untuk memegang posisi ketua umum PPP hingga Hamzah Haz terpilih sebagai pemimpin baru partai ini di awal era Reformasi.

Kemudian, kesepakatan tentang proporsi kursi untuk setiap unsur di badan legislatif secara terus-menerus dilanggar. Akibatnya, NU hanya memperoleh 45 kursi di Pemilu 1982 dari 58 kursi yang pada awalnya dijanjikan (lihat Tabel 3.2). Jumlah posisi penting untuk NU di badan legislatif juga berkurang. MI bahkan mengambil alih posisi Ketua Komisi VII—salah satu komisi penting di parlemen yang bertanggung jawab terhadap berbagai masalah perdagangan, keuangan, dan bank sentral—tanpa izin dari NU sebagai pihak yang harusnya memegang posisi itu berdasarkan kesepakatan internal partai

---

[9] Haris, *PPP dan Politik Orde Baru*, 69–72.

Tabel 3.2 Proporsi Kursi DPR Setiap Unsur di PPP

UNSUR	PEMILU 1971	PEMILU 1977	PEMILU 1982
NU	58	56	45
MI	24	25	34
PSII	10	14	11
Perti	2	4	4
Total	**94**	**99**	**94**

Sumber: *PPP dan Politik Orde Baru,* (Jakarta: Gramedia, 1991), h. 143.

sebelumnya. Namun, berkat dukungan kelompok pemerintah, yaitu Fraksi Karya Pembangunan (FKP) dan Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (FABRI) melalui proses *voting* untuk menentukan Ketua Komisi VII, pengambilalihan itu menjadi mungkin terjadi.[10] Pada wilayah eksekutif, posisi politik NU juga mengalami penurunan. NU bukan saja tidak mampu lagi memegang posisi Kementerian Agama, yang secara tradisional kerap kali dipegang oleh tokoh NU, tetapi juga tidak dipercayai oleh Orde Baru untuk memegang pos-pos kementerian lainnya.[11]

Berbagai keadaan ini pada akhirnya menjadi alasan kuat bagi NU untuk meninggalkan PPP. Keputusan internal untuk melakukan *Khittah* 1926 (kembali ke semangat tahun 1926) yang disepakati dalam Kongres Tahunan NU ke-27 di Situbondo memperkuat dan melegitimasikan sikap politik NU itu. Kebijakan *khittah* mendorong NU untuk berkecimpung lagi secara maksimal pada persoalan-persoalan non-politik, yakni pada masalah-masalah pembangunan kehidupan sosial, pendidikan, dan keagamaan.[12] Keputusan ini makin membawa kemunduran bagi peran politik NU. Dengan memusatkan perhatian hanya pada masalah-masalah tersebut, peranan NU sebagai sebuah unsur di PPP dan sebagai ormas Islam terbesar dalam perpolitikan nasional secara efektif berakhir. Hal ini merupakan sebuah situasi

[10] Haris, *PPP dan Politik Orde Baru*, 67–68.

[11] Salah satu alasan penting adalah kurangnya kualitas SDM NU untuk menangani berbagai masalah teknis modern dan kontemporer. H. Rozikin Daman, *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 148.

[12] *Ibid.,* 167–176. Lihat juga Kacung Marijan, *Quo Vadis NU: NU Setelah Khittah 1926*, (Surabaya: Penerbit Erlangga, 1992).

yang menyebabkan posisi tawar-menawar NU dalam politik riil melemah.

Berangkat dari latar belakang politik semacam ini, dapat dipahami jika pendirian PKB sesungguhnya berkaitan dengan upaya membangkitkan kembali peranan NU di percaturan politik. Dalam hal ini, PKB menjadi simbol kebangkitan NU di arena politik nasional. Kehadirannya ditujukan untuk memperjuangkan kepentingan dan orientasi politik NU, walaupun partai ini bukanlah satu-satunya partai yang mewakili keberadaan kaum Nahdiyin selama dekade pertama era Reformasi.

Upaya untuk menghadirkan PKB di pentas politik nasional dilakukan tidak lama setelah kejatuhan Soeharto. Kaum Nahdiyin di banyak daerah, khususnya di Jawa, mengirimkan usulan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk mendirikan sebuah partai bagi kalangan Nahdiyin.[13] Beberapa tokoh penting NU menanggapi aspirasi ini secara positif.[14] Namun, PBNU bereaksi secara hati-hati. Hal ini dikarenakan kebijakan *Khittah* 1926, yang memutuskan NU tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan politik praktis, masih merupakan pijakan dasar dari organisasi ini. K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), cucu pendiri NU K.H. Hasyim Asyari, sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidziyah PBNU, pada awalnya bahkan menolak kemungkinan PBNU untuk terlibat dalam pendirian partai politik.

Namun belakangan, PBNU tidak dapat lagi menghindar manakala tuntutan demi tuntutan kaum Nahdiyin untuk memiliki partai sendiri semakin gencar disuarakan. Akhirnya, PBNU setuju memfasilitasi pendirian partai politik dari kalangan Nahdiyin, tanpa harus berubah menjadi sebuah partai politik. Atas dasar kepentingan ini, PBNU mengadakan pertemuan pada 3 Juni 1998 yang kemudian memutuskan

---

[13] Choirie, *PKB, Politik Jalan Tengah NU*, 181–182. Lihat juga *www.dpp-pkb.or.id*.

[14] Tentang usulan pendirian partai politik, draf dari Lajnah Sebelas Rembang yang dipimpin M. Cholil Bisri dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat merupakan proposal yang paling komprehensif.

untuk membentuk Tim Lima[15] untuk menangani aspirasi pendirian partai politik. Kemudian, PBNU membentuk Tim Asistensi yang terdiri dari sembilan orang[16] yang fungsi utamanya adalah membantu Tim Lima menginventarisasi dan mengkaji ulang usulan tentang pendirian partai dan dukungan atas pendirian partai.

Pada 26–28 Juni 1998, Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan pertemuan dan membuat lima draf dokumen: (1) pemikiran dasar NU tentang reformasi politik, (2) *Mabda Siyasi* (prinsip-prinsip politik), (3) hubungan antara PBNU dan partai politik, (4) AD/ART, dan (5) naskah deklarasi. Kemudian, Tim Lima dan Tim Asistensi menyosialisasikan draf ini ke kalangan Nahdiyin dalam sejumlah forum.

Setelah Tim Lima dan Tim Asistensi menyelesaikan kewajibannya, pada 21 Juli 1998, PBNU memutuskan hari deklarasi. Pada 23 Juli 1998, bertempat di kediaman Gus Dur, pendirian PKB diumumkan. Pengumuman ini ditandatangani oleh lima ulama senior, yaitu K.H. Munasir Ali, K.H. M. Ilyas Ruchiyat, K.H. A. Muchith Muzadi, K.H. A. Mustofa Bisri, dan Gus Dur. Ribuan kaum Nahdiyin dan santri menyaksikan deklarasi ini. Sejumlah tokoh nasional, politisi, dan intelektual yang bersimpati dengan platform partai juga menghadiri acara ini.[17]

Situasi di atas menunjukkan peran penting NU dan pengikutnya dalam memfasilitasi pendirian PKB. Peranan tokoh-tokoh utama NU, terutama Gus Dur, sangatlah signifikan dan komprehensif. Arifin Junaidi, misalnya, mengatakan bahwa Gus Dur memainkan peran besar dalam berbagai hal di partai ini, termasuk dalam soal

---

[15] Makruf Amin (Rais Syariah), M. Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Prof. Dr. Said Agil Siradj, M.A. (Wakil Katib PBNU), M Rozy Munir (Ketua PBNU), Ahmad Bagja (Sekjen PBNU).

[16] H.Z. Arifin Junaidi (Wakil Sekjen PBNU), H. Muhyidin Aburusman, H.M. Fachri Tha Ma'ruf, Abdul Azis, Andi Muarly Sumrawa, Nashihin Hasan, Lukman Saifuddin, Amin Said Husni, dan Abdul Muhaimin Iskandar.

[17] Choirie, *PKB, Politik Jalan Tengah NU*, 193–200.

menentukan nama Ketua Umum Dewan Tanfidz.[18] Di tingkat lokal, pendirian dan pengembangan PKB juga difasilitasi NU. Dalam situasi ini dapat dipahami jika hubungan yang erat antara NU dan PKB menjadi tak terelakkan. Lebih dari itu, berdirinya PKB menunjukkan NU adalah sebuah ormas Islam dengan kesadaran berpolitik yang tinggi. Peranan PBNU dalam pendirian PKB mengisyaratkan tetap terpeliharanya insting politik NU dan pengikutnya.

Pada akhirnya, situasi ini memengaruhi tidak hanya struktur organisasi PKB yang sangat serupa dengan NU,[19] tetapi juga nilai, orientasi, dan budaya politik partai. Banyak fenomena di dalam partai dapat secara jelas dipahami hanya dengan mengaitkan PKB dengan budaya NU. Walau demikian, ada juga berbagai aspek partai baru ini yang tidak berasal dari budaya NU, yang bahkan sebenarnya sebagian kalangan melihat pentingnya PKB untuk berupaya juga lepas dari tradisi NU, terutama mengingat NU bukanlah sebuah partai politik.

B. Tradisi NU dan Orientasi Politik PKB

Sebagai sebuah organisasi yang difasilitasi PBNU, dipimpin tokoh-tokoh NU terkemuka, dan memperoleh dukungan kuat dari kaum Nahdiyin, PKB memiliki kecenderungan untuk mengikuti orientasi politik NU. Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi menyatakan bahwa PKB merupakan salah satu alat perjuangan NU.[20] Sementara itu, PKB mengakui bahwa keberadaannya sebenarnya merupakan sintesis[21] antara tradisi NU dan semangat reformasi.

---

[18] H.Z. Arifin Junadi, "Belajar dari Sejarah PKB", di Yenny Zanuba Wahid, A. Effendy Choirie dan M. Kholid Syeirazi (ed.), *9 Tahun PKB: Kritik dan Harapan*, (Jakarta: Panitia Nasional Harlah ke-9 PKB, 2007), 32.

[19] Choirie, *PKB, Politik Jalan Tengah NU*, 221.

[20] Hasyim Muzadi, "Membangun NU Pasca Gus Dur", (Jakarta: Grasindo, 1999), 31 di Kamarudin, *Konflik Internal PKB*, (Jakarta: Akses Publishing, 2008), 66.

[21] Dalam metafora dokumen ini digunakan "sebagai hasil perkawinan legal", di *Dokumentasi Hasil Muktamar II Partai Kebangkitan Bangsa*, *Semarang (16–19 April 2005)*, (Jakarta: DPP PKB, tanpa tahun), 17.

Keberadaan NU sendiri tidak dapat dipisahkan dari keberadaan ulama dan pesantren. NU didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya oleh ulama-ulama besar dan karismatik, yang merupakan alumni dan pemilik pesantren.[22] Keberadaan NU tidak dapat dilepaskan dari upaya merespons perkembangan yang demikian pesat pada gerakan modernisme Islam atau gerakan pembaharuan di Indonesia, seperti Muhammadiyah (secara literal dapat diartikan pengikut Muhammad) dan Persatuan Islam (Persis) di awal abad ke-20 dan terhadap situasi politik keagamaan baru di Hijaz (Arab Saudi), di mana Wahabisme menjadi aliran keagamaan yang didukung oleh keluarga Al-Saud sebagai pemiliki otoritas baru.[23] Kecenderungan gerakan-gerakan keagamaan itu dalam hal tertentu memiliki persamaan nilai, di mana pemurnian ajaran Islam (purifikasi) adalah inti keyakinannya. Keyakinan ini dalam beberapa hal bertentangan dengan kepercayaan NU yang cenderung lebih moderat terhadap keberadaan norma atau kebiasaan di luar Islam. Perkembangan kelompok-kelompok keagamaan inilah yang dikhawatirkan oleh NU akan mengancam tidak saja ajaran yang diyakininya tetapi juga pada akhirnya keberadaannya.

Para akademisi mengklasifikasi NU sebagai bagian dari gerakan Islam tradisionalis dengan sejumlah karakteristik penting yang membedakannya dengan kaum modernis. Karakteristik itu di antaranya kewajiban untuk menganut ajaran para ulama fikih yang hidup antara abad ke-7 dan abad ke-13.[24] Mereka juga meyakini bahwa pintu *ijtihad* sudah ditutup dan kewajiban umat Islam hanyalah tinggal mengikuti ajaran yang diberikan oleh ulama terkemuka abad pertengahan itu. Dalam merespons perkembangan zaman, tugas

---

[22] Sejumlah *ulama* intelektual yang menjadi bapak pendiri organisasi ini adalah Hasyim Azhari, A. Wahab Chasbullah, Bisri Syansuri, R. Asnawi, Ridwan, R. Hambali, Nachrowi, Ndoro Mustaha, Nawawi.

[23] Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967*, 29–39. Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 135–136. Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*, (Jakarta: LP3ES, 1982), 241–254.

[24] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), 1.

utama umat Islam adalah membuat penyesuaian-penyesuaian ajaran para ulama fikih dengan konteks tempat mereka tinggal. Kalangan tradisional ini juga cenderung bersikap toleran dengan nilai-nilai tradisional atau budaya lokal yang sudah berkembang di masyarakat sekitar. Kalangan NU dalam kesehariannya melakukan sejumlah tradisi non-Islam namun eksis di masyarakat, seperti, *kenduren* dan ziarah kubur, setelah sebelumnya melakukan Islamisasi atas tradisi ini atau sekurang-kurangnya melegitimasinya dengan penafsiran-penafsiran Islam.[25] Kaum modernis, di sisi lain, menganggap jenis praktik ini sebagai *bid'ah*.

Terlepas dari berbagai definisi yang dilabelkan padanya, NU sendiri mendefinisikan orientasi Islamnya sebagai pengikut *ahlus-sunnah wal jama'ah*, aliran moderat yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan empat shahabatnya. NU juga meyakini bahwa memegang seluruh atau setidaknya satu dari empat mazhab, yaitu Syafii, Hanafi, Hambali, atau Maliki, merupakan sebuah keharusan, meski kebanyakan NU mengkhususkan diri mengikuti aliran Imam Syafii. Dalam kaitan dengan tauhid, kalangan NU mengikuti ajaran Imam Abu Hasan Al-Asyari dan Imam Abu Mansur Al-Maturudi; dan di dalam masalah *tasawuf* menerapkan ajaran Imam Al-Ghazali dan Imam Abu Qosim Al-Jinaid.

Kalangan NU menempatkan *fiqh* (sistem hukum) sebagai fondasi untuk aktivitas sosial[26], termasuk dalam kehidupan politik. Mereka menggunakan hasil pemikiran atau pandangan Al-Mawardi dan Al-Ghazali, yang memberikan seperangkat pendekatan yang cenderung toleran dan fleksibel.[27] Dengan dasar pendekatan keagamaan ini, NU dikenal sebagai organisasi yang toleran dalam berhadapan dengan nilai dan budaya yang berbeda dalam lingkup sosial, dan cenderung

[25] Daman, *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, 32.

[26] Daman, *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, 88–92. M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia. Pendekatan Fikih dalam Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1998).

[27] A. Effendy Choirie, *Islam Nasionalisme: UMNO-PKB Studi Komparasi dan Diplomasi*, (Jakarta: Pensil-234, 2008), 129–134.

bersifat fleksibel saat bermanuver di wilayah politik. Mereka yang tidak sejalan dengan NU kadang-kadang mengkritisi fleksibilitas politiknya ini sebagai sikap oportunis.

Adapun pesantren[28] adalah sebuah lembaga pendidikan Islam, yang dilengkapi asrama di dalamnya, serta tempat di mana ulama (kiai) mengajarkan ilmunya kepara murid (santri). Pesantren merupakan bagian dari upaya ulama tradisionalis dan pengikutnya untuk mempertahankan dan melindungi tradisi, budaya, dan sistem pengajaran Islam yang telah diberikan oleh generasi awal ulama di Indonesia. Ada masa ketika pesantren menjadi sarana isolasi diri atau ajang pelarian (*escapism*) dari penetrasi budaya Barat yang dilakukan rezim kolonial dan dalam hal tertentu juga dari gerakan dan pandangan pembaru Islam yang dikembangkan kaum modernis.[29] Meski demikian, dalam perkembangannya banyak pesantren (seperti Pesantren Modern Gontor) telah mengadopsi metode pengajaran modern yang berasal dari dunia akademis Barat.

Pesantren tidak hanya mengajarkan santri tentang masalah-masalah agama, tetapi juga mengajarkan mereka mengenai berbagai masalah kehidupan sosial. Perluasan materi pelajaran ini pada akhirnya membuat santri menjadi lebih sadar dengan realita sosial di luar pesantren. Fungsi sosial pesantren dalam perkembangannya menjadi bagian dari fungsi nyata pesantren. Dalam hal ini, hubungan erat antara pesantren dan lingkungan sosialnya menjadi tidak terelakkan, yang dalam hal ini karisma ulama kadang-kadang juga memengaruhi kehidupan masyarakat.

Lebih dari itu, pesantren juga menciptakan budaya internal yang memengaruhi perilaku dan cara berpikir santri. Budaya pesantren yang paling penting adalah hubungan yang khas dan dekat antara ulama dan santri yang di dalam pengertian teori modern dapat

---

[28] Tentang Pesantren lihat Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai.* Sukamto*, Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1999).

[29] Mahrus Irsyam, "Memahami Hakekat Nahdlatul Ulama", *Kompas*, 22 November 1999.

digambarkan sebagai hubungan *patron-client*.[30] Dalam hubungan dua arah ini, ulama adalah *patron* atau pemimpin atau bahkan orang yang dituakan yang memberikan perlindungan bagi santri. Santri, sebagai balasan terhadap seluruh kebaikan yang dia peroleh, adalah *client* atau bimbingan atau bahkan anak yang harus menaati ulama dan sepenuhnya mendukung keberadaannya.

Fundamen utama dari hubungan ini tidak terlalu terkait dengan persoalan perlindungan fisik atau material, tetapi terkait dengan masalah-masalah spiritual di mana para santri merasa tercerahkan oleh ulama. Dalam konteks ini, penghormatan santri kepada ulama merupakan hasil gabungan antara pemenuhan kebutuhan material dan terutama spiritual. Peran utama ulama yang membedakan kelompok ini dengan organisasi Islam lainnya, khususnya dengan kelompok modernis, adalah tidak hanya karena perannya dalam mendirikan organisasi ini, tetapi juga karena otoritas tradisional dengan seperangkat hak istimewa yang diberikan masyarakat kepadanya.[31] Pesantren, dalam hal ini menurut Dhofier, menjadi "kerajaan kecil", di mana ulama merupakan sumber otoritas utama untuk hampir semua masalah.[32]

Model hubungan ini mengungkapkan posisi ulama di NU. Ulama melakukan peran sebagai sarana atau media sosialisasi nilai-nilai dan pengajaran yang secara tradisional didukung masyarakat NU dari generasi ke generasi. Kemudian, ulama dianggap sebagai penghubung penting rantai penyebaran ajaran Islam dari Nabi Muhammad hingga pengikutnya di akhir zaman. Dalam hal ini, kaum Nahdiyin juga menganggap ulama sebagai pewaris nabi dan pelanjut ajaran nabi. Seluruh keistimewaan ini memberikan ulama sumber legitimasi dan posisi yang amat penting di mata kaum Nahdiyin.[33]

---

[30] Maswardi Rauf, *Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*, (Jakarta: Direktorat Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000), 92–99.

[31] Daman, *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, 46–47.

[32] Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, 58.

[33] Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967*, 23–24. Ibnu Hajar, *Kiai di Tengah Pusaran Politik Antara Petaka dan Kuasa*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2009), 54–58.

Berkenaan dengan kehidupan organisasi yang dikelola oleh kalangan Nahdiyin, ulama menempati posisi yang sangat signifikan dan terhormat. Hubungan ulama-santri direfleksikan dengan keberadaan Dewan Syuriah tempat para ulama berada dan Dewan Tanfidziyah yang diisi terutama oleh kalangan nonulama, profesional, atau tokoh politik yang merupakan domain santri. Dalam hubungan ini, ulama di Dewan Syuriah memainkan peranan komprehensif, yakni sebagai penasihat, pengontrol, dan pengarah organisasi.

Penghormatan terhadap ulama sedemikian itu membuat kalangan Nahdiyin terbiasa dipimpin atau diarahkan oleh ulama dan sebaliknya cenderung menjadi tidak nyaman manakala peran ulama itu direduksi. Penarikan diri NU dari Masyumi pada tahun 1952, misalnya, merefleksikan sikap ini. Menurut NU, Masyumi berniat mereduksi peran ulama di dalam organisasi tersebut dengan hanya memberikan posisi sebagai penasihat daripada penentu. Situasi yang tidak dapat diterima ini menjadi salah satu alasan bagi NU untuk meninggalkan Masyumi.[34]

Meski demikian, sejarah juga mencatat bahwa sikap kalangan Nahdiyin terhadap ulama dalam kenyataannya tidak selamanya konsisten. Model *patron-client* tidak selamanya berfungsi sebagaimana yang dibayangkan. Kepentingan untuk mengamankan posisi politik atau memperoleh berbagai keuntungan politik yang lebih maksimal kerap menjadi penyebab di balik penurunan sikap patuh santri terhadap ulama, khususnya di dunia politik. Seorang peneliti hubungan NU dan politik, Mahrus Irsyam, berkesimpulan bahwa hubungan *patron-client* akan terputus apabila dilaksanakan dalam lingkungan politik.[35] Hal ini dapat terjadi karena pada kenyataannya ulama dan santri secara independen dapat menciptakan jaringan politiknya sendiri-sendiri, dengan melibatkan banyak aktor dan kelompok-kelompok politik di dalamnya. Situasi ini tidak saja memberikan sumber politik

---

[34] Thaba*, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, 162–164. Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942,* 80–82. Fealy, *ibid.,* 98–133.

[35] Irsyam, *Ulama dan Partai Politik: Upaya Mengatasi Krisis,* 7–8.

yang signifikan bagi santri untuk menjadi aktor politik penting dan independen, tetapi juga kerap dapat membuat ulama justru menjadi bergantung kepadanya dalam soal-soal politik atau setidaknya tidak dapat secara bebas mendikte kepentingan politik mereka kepada santri.

Dalam sejarah organisasi dan politik NU, situasi ini juga terkadang menciptakan perselisihan serius dan bahkan konflik di antara dua badan ini. Konflik antara Ketua Umum Dewan Syuriah Ali Maksum, yang dianggap sebagai representasi "kelompok idealis", dengan Ketua Umum Dewan Tanfidz Dr. Idham Chalid, yang dianggap sebagai perwakilan "kubu realis" dan politisi pragmatis, pada tahun 1980-an, misalnya, merefleksikan situasi ini. Kondisi semacam ini pada akhirnya menciptakan apa yang Irsyam sebut sebagai "hubungan simbiosis", sebagai alternatif dari hubungan *patron-client*. Dalam hubungan ini, kedekatan hubungan antara ulama dan santri dapat secara terus-menerus dipertahankan sejauh hubungan ini dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.[36]

Kemudian, faktor lain yang turut berkontribusi dalam pelemahan hubungan *patron-client* di NU adalah munculnya tokoh ulama baru di NU. Tokoh-tokoh baru ini, yang dipandang juga berjasa terhadap NU, kerap memberikan tantangan atas posisi tokoh-tokoh lama. Dengan segenap kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, tokoh-tokoh baru ini mampu membangun hubungan *patron-client* yang kadang-kadang cukup berhasil mereduksi loyalitas santri terhadap patron lama. Situasi semacam inilah yang melatarbelakangi terjadinya fenomena transformasi loyalitas dari patron lama ke patron baru.[37] Seiring dengan semakin berkurangnya jumlah ulama generasi awal yang demikian dihormati dan disegani oleh sebagian besar kaum Nahdiyin, fenomena persinggungan antar tokoh semacam ini mudah terjadi. Kedudukan tokoh-tokoh itu yang relatif seimbang kerap berdampak kurang menguntungkan, yakni menciptakan perkubuan,

---

[36] *Ibid,* 166.

[37] Rauf, *Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*, 109.

konflik, dan menyuburkan disloyalitas, yang semakin lama tampak pula menjadi bagian "tradisi" politik NU di era kontemporer. Sebagai institusi politik yang mewarisi tradisi dan budaya NU, berbagai kondisi di atas, termasuk masalah konflik dan disloyalitas, tak pelak akhirnya terjadi pula di PKB, yang pada akhirnya banyak memengaruhi sikap dan aktivitasnya.

Berkenaan dengan orientasi politik, NU meyakini peran ajaran Islam di dalam kehidupan politik. Politik merupakan bagian kepentingan umat Islam untuk melindungi keberadaan mereka dan memperjuangkan kebaikan bagi seluruh warga bangsa sebagai refleksi semangat *rahmatan lil alamin*. Selama keberadaannya di politik nasional selama hampir empat dekade, NU menganggap dirinya sebagai perangkat pelaksanaan nilai-nilai Islam. Berdasarkan hal ini, PKB tidak memisahkan politik dan Islam sehingga elite dan anggota partai ini menganggap PKB sebagai partai Islam yang sesungguhnya. Gus Dur mengatakan, misalnya, tidak perlu bagi PKB untuk menjadikan Islam sebagai landasan partai, yang penting adalah PKB sungguh sebuah partai Islam, karena PKB lebih memperjuangkan esensi ketimbang nama.[38] Sejalan dengan pendapat ini, Alwi Shihab menganggap walaupun sebagian pihak meragukan hal ini, PKB adalah partai yang didirikan dan dibangun berdasarkan pada kebenaran ajaran Islam.[39] Muhaimin Iskandar menambahkan bahwa PKB sebagai partai politik yang didirikan oleh *ulama* adalah partai Islam.[40]

Akan tetapi, PKB juga menganggap bahwa hal paling penting dari kehadirannya adalah terkait dengan kepentingan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, PKB meyakini bahwa keberadaannya merupakan bagian gerakan nasional dalam memperjuangkan kepentingan

---

[38] *Jawa Pos*, 29 Mei 1999.

[39] *Republika*, 30 Mei 1999.

[40] A. Muhaimin Iskandar, "PKB: Politik *Rahmatan lil Alamin*", dalam Sahar L. Hassan, Kuat Sukardiyono dan Dadi M.H. Basri (ed.), *Memilih Partai Islam: Visi, Misi dan Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 24.

seluruh rakyat Indonesia. Kenyataan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia adalah muslim menjadi landasan pembelaan bagi PKB untuk menganggap kepentingan umat Islam sebagai kepentingan nasional dan juga sebaliknya. Oleh karena itu, selain kepentingan untuk membangun moralitas Islam di dalam politik, komitmen terhadap nilai-nilai nasionalisme sangat dihargai dan menjadi unsur penting di dalam orientasi politik PKB. Dapat dipahami jika salah satu tujuan utama partai ini mencerminkan komitmen PKB kepada nasionalisme, yakni mewujudkan tujuan-tujuan kemerdekaan.[41]

Sebagai cerminan dari orientasi ini, PKB meyakini semangat pluralisme sebagai salah satu karakteristik penting Indonesia sebagai sebuah bangsa. Oleh karena itu, PKB tegak berdiri sebagai salah satu organisasi Islam dengan posisi yang sangat jelas dalam hal ini. Bagi sebagian pihak, khususnya di bawah kepemimpinan Gus Dur, PKB adalah salah satu benteng dari nasionalisme dan pluralisme. Menurut Muhaimin, PKB memiliki komitmen untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dan pluralisme, sebagai inti dari nasionalisme Indonesia dan perwujudan ajaran Islam sebagai *rahmatan lil alamiin* (rahmat bagi semua).[42] Oleh karena itu, PKB dalam AD partainya mendeklarasikan Pancasila[43] dalam semangat jiwa *ahlussunah wal jama'ah*,[44] sebagai asas partai. Dengan landasan partai sedemikian, PKB kemudian memiliki fondasi yang kukuh untuk menjadi partai berkarakter "*catch all*" yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bergabung tanpa melihat latar belakang primodial mereka. Dalam kehidupan nyata, PKB tidak ragu-ragu membangun hubungan yang baik dengan kalangan nasionalis sekuler dan nonmuslim. Banyak tokoh utama PKB yang memiliki hubungan dekat dengan kalangan minoritas.

---

[41] Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*, (Jakarta: LP3ES, 2003), 115–116.

[42] *Ibid,* 115.

[43] *Anggaran Dasar (AD) PKB 1998 Pasal 3; AD PKB Tahun 2000 Pasal 3; AD PKB 2002 Pasal 3; AD PKB 2005 Pasal 3; AD PKB 2008 Pasal 3.*

[44] *AD PKB 1998 Pasal; AD PKB 2000 Pasal 4; AD PKB 2002 Pasal 4; AD PKB 2005 Pasal 4; AD PKB 2008 Pasal 4.*

Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa PKB telah relatif dapat melembagakan orientasi politiknya, dengan menempatkannya sebagai bagian ideologi partai. Sintesis antara Islam dan nasionalisme dapat terlihat pada *Mabda Siyasi*, salah satu dokumen inti PKB. Sebagian besar anggota partai menerima dan melaksanakan pandangan, yang pada gilirannya juga membentuk perilaku politiknya. Ada pengakuan luas tentang komitmen partai terhadap pelaksanaan pluralisme sebagai refleksi perwujudan ideologi politik PKB. Menurut Ratnawati, PKB berhasil membuat orientasi ini sebagai salah satu karakteristik utamanya.[45] Dengan kata lain, PKB telah melembagakan salah satu aspek penting, yaitu nilai tentang hubungan antara agama dan politik yang mengarahkan partai ini menjadi partai Islam inklusif.

Meskipun demikian, berkaitan dengan peranan ideologi di internal partai, PKB tampak tidak membangun seperangkat nilai-nilai bersama yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjaga soliditas partai. Nilai-nilai bersama untuk membangun soliditas tersebut sulit untuk ditemui dalam dokumen-dokumen resmi partai. Demikian pula upaya untuk melakukan infusi terhadap nilai-nilai itu. Walaupun partai ini memiliki sekumpulan nilai komprehensif yang mengidentifikasi posisi politik PKB dalam konstelasi politik bangsa, namun secara internal partai ini tidak membangun dan apalagi memelihara nilai-nilai bersama atau sebuah ideologi untuk kebutuhan internalnya. Dengan kata lain, ideologi partai hanya difokuskan pada masalah-masalah eksternal dan tidak dapat digunakan sebagai *platform* untuk membangun rasa kebersamaan atau dimanfaatkan untuk mereduksi faksionalisme maupun orientasi politik yang eksklusif. Dalam situasi tertentu, orientasi nilai-nilai di PKB yang lebih bersifat keluar (*outward looking*) tidak dapat memaksa kader untuk bersikap sepenuhnya loyal terhadap partai. Akibatnya, tidak mengherankan jika kader partai dapat dengan mudah mengubah pendirian politiknya.

---

[45] Tri Ratnawati, "*Beberapa Masalah Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Alternatif Solusi*", Lili Romli (ed.), *Pelembagaan Partai Politik Pasca Orde Baru: Studi Kasus Partai Golkar, PKB, PBB, PBR, dan PDS*, (Jakarta: Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2008), 108.

C. Struktur Organisasi

Berkaitan dengan struktur organisasi, dalam banyak hal PKB mengadopsi struktur organisasi NU. Keberadaan dua badan penting dan berpengaruh di PKB, yakni Dewan Syura dan Dewan Tanfidz, sebagaimana yang diterapkan dalam NU membuktikan pengaruh ini. Kedua dewan ini ada di semua tingkat pengurus partai (dari tingkat nasional hingga desa). Di tingkat nasional, gabungan kedua dewan ini disebut Dewan Pengurus Pusat (DPP).

Dewan Syura secara resmi merupakan badan yang paling kuat dan pemegang komando tertinggi di PKB.[46] Dewan ini terutama terdiri dari para ulama dan pakar. Menurut konstitusi partai, fungsi utama Dewan Syura adalah menjaga kemurnian perjuangan partai untuk memberikan dan menyampaikan kebijakan-kebijakan umum partai, mengontrol pelaksanaan berbagai kebijakan yang dilakukan Dewan Tanfidz, dan memberikan laporan ke forum musyawarah tertinggi partai yaitu muktamar di akhir periode jabatannya.[47] Di tingkat praktis, badan ini juga dapat memveto berbagai kebijakan Dewan Tanfidz apabila kebijakan itu tidak sejalan dengan AD/ART dan semangat partai. Anggota pengurus partailah yang berhak memilih ketua umum Dewan Syura. Di atas itu semua, keberadaan dewan ini mewakili budaya NU dalam kaitan dengan penghormatan atas peran dan posisi ulama.

Dewan Tanfidz adalah badan yang melaksanakan kebijakan dan program partai. Dewan ini juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan aktivitas organisasi sehari-hari. Di dalam aktivitas sehari-hari, dewan ini dapat membuat kebijakan sebagai respons terhadap kebutuhan organisasi. Ketua umum Dewan Tanfidz dipilih oleh para peserta muktamar. Seorang kandidat ketua umum Dewan Tanfidz

---

[46] *ART PKB 1998 Pasal 17 (1); ART PKB 2000 Pasal 18 (1); ART PKB 2002 Pasal 20 (1); ART PKB 2005 Pasal 20 (1).*

[47] *ART PKB 1998 Pasal 17 (9.a), (9.b), (9.c); ART PKB 2000 Pasal 18 (10.a), (10.b), (10.c); ART PKB Article 2002 Pasal 20 (10.a), (10.b), (10.c); ART PKB 2005 Pasal 20 (9.a), (9.b), (9.c), (9.d); ART PKB Pasal 2008 Pasal 18 (10.a), (10.b).*

harus memperoleh persetujuan dari ketua umum Dewan Syura yang baru untuk dapat maju dalam proses pemilihan. Ketua umum Dewan Tanfidz dipilih untuk masa jabatan lima tahun kepemimpinan dan harus memberikan laporan dan pertanggungjawaban di forum yang sama.[48] AD/ART partai sebenarnya tidak menyusun secara rinci mekanisme pilihan untuk Dewan Syura dan Dewan Tanfidz. Tidak mengherankan jika beberapa detail proses pemilihan kerap mengalami penyesuaian dengan situasi yang berkembang.

Struktur organisasi PKB merefleksikan kekuasaan DPP yang sangat besar, khususnya Dewan Syura, dalam menentukan arahan partai. Peranan besar Dewan Syura ini dalam praktiknya menciptakan oligarki di dalam partai. Pada kenyataan seperti yang akan dibahas kemudian pada bab-bab selanjutnya, Dewan Syura kadang-kadang membuat berbagai kebijakan penting tanpa terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan unsur partai lainnya yang seharusnya dilibatkan. Menurut Notosusanto, PKB merupakan partai yang mengalami personalisasi kekuasaan dengan memberikan pimpinan partai, khususnya Gus Dur, otoritas yang demikian luas dan kompleks, yang pada akhirnya tidak dapat dikontrol secara efektif oleh anggota partai.[49] Meski demikian, di sisi lain, AD/ART partai juga memperlihatkan semangat musyawarah, sebagai salah satu dasar utama dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kaitannya dengan hal ini, sebagaimana yang akan dijelaskan lebih komprehensif di Bab V, PKB secara normatif juga mendorong semangat kolektivisme dan menghindari terjadinya kediktatoran di partai.

Di lain pihak, seperti dijelaskan sebelumnya, preseden politik di NU juga memberikan "keabsahan tradisi" khususnya kepada Dewan Tanfidz untuk bersikap kritis dan bahkan menolak keputusan yang dibuat Dewan Syura. Sikap ini muncul dikarenakan kedua badan ini dalam praktiknya dapat berjalan secara terpisah, baik demi meraih

[48] *ART PKB 2000 Pasal 19 (2); ART PKB 2002 Pasal 21 (2); ART PKB 2005 Pasal 21 (2), 21 (10.d); ART PKB 2008 Pasal 22 (2).*

[49] Smita Notosusanto, "Analisa AD/ART Partai Politik", makalah seminar, tidak diterbitkan, 3, 15 di *http://forum-politisi.org/downloads/Analisa_AD_ART_Parpol_-_Smita.pdf.*

kedudukan politik yang lebih baik atau demi mempertahankan hak dan idealisme. Kasus konflik antara Gus Dur, yang merepresentasikan keberadaan Dewan Syura, dengan Matori Abdul Jalil, Alwi Shihab, Saifullah Yusuf, dan Abdul Muhaimin Iskandar, yang secara struktural mewakili keberadaan Dewan Tanfidz, memperlihatkan keadaan ini. Situasi yang awalnya lebih bersifat personal ini belakangan juga memicu konflik antara kedua badan atau setidaknya melibatkan individu-individu lain dari dua badan tersebut.

Dalam menangani konflik internal yang terjadi, sebagaimana yang terjadi di NU,[50] PKB berulang kali menghadapi masalah. Pada kenyataannya, mekanisme resolusi konflik tidak secara sungguh-sungguh dibahas dan dikembangkan oleh partai. PKB tidak memiliki semacam badan arbitrase untuk memecahkan berbagai perselisihan atau konflik internal secara proporsional. Akibatnya, bahkan seorang ketua umum Dewan Tanfidz dapat saja dengan mudah disingkirkan atau menjadi korban sebuah keputusan yang tidak adil. Mencuatnya rasa tidak aman dan ketidakpastian menjadi sesuatu yang lazim terlihat pada kurun waktu sepuluh tahun pertama keberadaan partai ini. Perasaan semacam ini demikian tersebar dan dirasakan oleh sebagian besar anggota partai. Seorang anggota pengurus wilayah menyimpulkan:

> Selama ini di PKB tidak ada "*safety*", maksud saya tidak ada ketenangan. Dalam berpartai harus ada ketenangan. Di PKB ini, pengurus sudah bekerja baik-baik, tiba-tiba diberhentikan. Ada kekuatan otoriter, ada *like* dan *dislike*.[51]

Konflik di PKB pada akhirnya cenderung dihadapi dengan pendekatan personal, bukan dengan peraturan. Sementara untuk menyelesaikan kasus-kasus besar, PKB bahkan membutuhkan pihak ketiga untuk menyelesaikannya, yang sebenarnya tidak juga

[50] Kang Young Soon, "Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama 1984–1999", *Ikhtisar Disertasi*, (Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Politik, 2002), 31.

[51] Wawancara Tri Ratnawati dengan salah satu tokoh dalam jajaran Pimpinan DPC PKB Jombang, di Jombang 19 Juni 2008, dalam Ratnawati, "Beberapa Masalah Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Alternatif Solusi", 95.

mengakhiri rivalitas di antara kelompok-kelompok yang berkonflik. Secara umum, PKB harus melembagakan berbagai aspek di dalam partai. Masalah yang dihadapi partai ini tidak hanya terkait dengan bagaimana keputusan itu dibuat, tetapi juga bagaimana keputusan itu ditetapkan. Keadaan ini pada akhirnya menjadi salah satu alasan utama munculnya konflik internal yang tidak terpecahkan, yang pada akhirnya terwujud dalam perpecahan partai.

D. Aktivitas Politik

Di dekade pertama Reformasi, PKB adalah salah satu partai yang diperhitungkan. Posisi ketiga yang dicapai partai ini di Pemilu 1999, dengan 13 juta suara, menunjukkan kekuatan nyata partai ini. PKB memperoleh 51 kursi di parlemen yang menjadikan partai ini menjadi kelompok empat terbesar di badan legislatif.

PKB memperoleh suara terutama dari Pulau Jawa. Basis utama PKB di Pemilu 1999 dan dua pemilu berikutnya adalah masyarakat pesantren di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah. Kedua provinsi itu menyumbang lebih dari setengah kursi DPR untuk PKB (lihat Tabel 3.3). Walaupun NU juga berkembang, bahkan terbentuk tidak lama setelah pendiriannya, di sejumlah provinsi, seperti Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan,

Tabel 3.3 Tiga Provinsi Teratas Penyumbang Kursi PKB di DPR RI

Provinsi	Pemilu 1999		Pemilu 2004		Pemilu 2009	
	Kursi	%	Kursi	%	Kursi	%
Jawa Timur	24	47.1	28	53.8	12	44.4
Jawa Tengah	10	19.6	13	25.0	6	22.2
Jawa Barat	6	11.8	3	5.8	3	11.1
Lain-lain	11*	21.5	8**	15.4	6***	22.3
Total	51	100	52	100	27	100

Sumber: Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*, (Jakarta: LP3ES 2003), 122. A. Effendy Choirie, *Islam-Nasionalisme UMNO-PKB Studi Komparasi dan Diplomasi*, (Jakarta: Pensil-234, 2008), 126, http://www.kpu.go.id.

Catatan:
* : Lampung (2) Sumatera Utara (1), Riau (1), Sumatera Selatan (1), DKI Jakarta (1), DI Yogyakarta (1), Bali (1), Kalimantan Timur (1), Kalimantan Selatan (1), Sulawesi Selatan (1)
** : Banten (2), Riau (1), Sumatera Selatan (1), Lampung (1), DI Yogyakarta (1), Kalimantan Selatan (1), Papua (1).
***: Riau (1), Lampung (1), DI Yogyakarta (1), Kalimantan Timur (1), Maluku (1), Papua (1).

suara PKB di wilayah-wilayah tersebut tidaklah signifikan. Fenomena ini memperkuat tesis bahwa PKB sebenarnya hanya tumbuh pesat di Jawa[52] dan menunjukkan bahwa tidak seluruh kaum Nahdiyin menganggap PKB sebagai saluran kepentingan mereka.[53]

Hasil Pemilu 1999 menunjukkan adanya dukungan yang kuat dari ulama NU di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sejumlah ulama berpengaruh hadir di dalam kampanye-kampanye PKB untuk menyampaikan berbagai program partai dan meminta khalayak, yang terutama santri NU, untuk mendukung PKB. Situasi ini juga mengungkapkan keberadaan dan keefektifan hubungan *patron-client* di dalam perpolitikan NU. Soon mendeskripsikan fenomena ini:

> Pada waktu Pemilu 1999, kehadiran kiai dan ustad sangat memengaruhi perolehan suara PKB. Di situ ada sekitar 3,917 kiai dan 30,983 ustad. Mereka memengaruhi kaum santri dan masyarakat sekitarnya untuk memobilisasi massa pendukung, termasuk K.H. Achmad Zarkasyi, K.H. Chotib Umar, K.H. Muchtith Muzadi, K.H. Muhammad Subadar, K.H. Hamzah Achmad, K.H. Idris Marzuki, K.H. Abdullah Sahal, K.H. Abdullah Faqih, K.H. Masduki Mahfud, K.H. Hasyim Muzadi, mereka (kiai senior) turun langsung ke gelanggang kampanye PKB. Mereka bersatu untuk membela PKB dengan jalan secara kontinu mengunjungi daerah-daerah untuk memperoleh dukungan dari para santri dan massa di sekitarnya.[54]

Pada momen Pemilu Presiden 1999 yang dilakukan DPR, PKB bersama dengan partai-partai Islam lainnya yang tergabung dalam Poros Tengah[55] memenangi pemilihan dan berhasil menempatkan Gus Dur sebagai presiden pertama di era Reformasi. Poros Tengah

---

[52] Nazaruddin Sjamsuddin, "Akibat Kekuasaan", di E. Soebekti, Achmad, Nirwan Ki S. Hendrowioto (ed.), *Di Saat Ekonomi Terpuruk Partai Politik Rame-Rame Pecah Kongsi*, (Jakarta: Gria Media Prima, 2002), 190–191.

[53] Amir, Peta Islam Politik Pasca Soeharto, 121.

[54] Kang Young Soon, *Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama*, Tesis Ph.D., (Jakarta: Program Pascasarjana Jurusan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2008), 317–318.

[55] Kamarudin, *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi: Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu 2004*, (Jakarta: Visi Publishing, 2003), 124–125.

adalah sebuah faksi politik di DPR yang terdiri dari partai-partai Islam, termasuk PPP, PAN, PBB, dan PK. Faksi ini dibentuk sebagai respons terhadap dua kandidat kuat presiden, Megawati Soekarno Putri (PDIP) dan mantan Presiden B.J. Habibie (Golkar), yang menurut faksi ini tidak terlalu mendukung kepentingan umat Islam secara maksimal. Megawati dipandang mewakili kelompok sekuler dan non-Muslim, sementara Habibie mewakili kelompok rezim lama. Poros Tengah kemudian menciptakan opsi alternatif dengan mempromosikan Gus Dur sebagai kandidat presiden dari kelompok Islam. Kemenangan Gus Dur membuatnya menjadi presiden pertama dari NU dan memberikan peluang bagi kader NU untuk memperoleh berbagai posisi penting di pemerintah, termasuk pos-pos kementerian.

Akan tetapi, periode pemerintahan Presiden Gus Dur tidak berlangsung lama. Dia tersingkir sebelum masa jabatannya habis. Keputusannya untuk melakukan *reshuffle* kabinet yang tidak perlu dengan memecat sejumlah tokoh penting dari partai-partai koalisinya, termasuk M. Jusuf Kalla, Jenderal (Purn) Wiranto, dan Hamzah Haz, menimbulkan riak serius di antara dirinya dan partai-partai pendukungnya di parlemen. Sementara itu, masyarakat pada umumnya kurang puas dengan kinerja pemerintahan Gus Dur yang menurut mereka tidak cukup serius dalam menyejahterakan rakyat. Lebih dari itu, pernyataan kontrovesialnya, seperti rencana pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel dan mencabut kebijakan pelarangan ajaran Marxisme-Leninisme atau Komunisme, memperburuk hubungannya dengan berbagai pihak, organisasi, dan tokoh Islam yang sebenarnya merupakan pendukung utamanya. Gagasan bahwa pemerintah akan lebih baik tanpa Gus Dur kemudian menyebar di masyarakat dan para politisi.

Anggota parlemen dari berbagai partai termasuk eksponen Poros Tengah menggunakan kasus salah kelola anggaran di Badan Logistik (Bulog) dan penyalahgunaan hibah Sultan Brunei, yang dalam hal ini diduga melibatkan Gus Dur di dalamnya, sebagai pintu masuk menggoyang kedudukan Gus Dur. Walaupun status hukum kasus

Tabel 3.4 Hasil Pemilu 1999

NO	PARTAI POLITIK	SUARA	KURSI
1	PDIP	35.689.073	153
2	Golkar	23.741.749	120
3	PKB	13.336.982	51
4	PPP	11.329.905	58
5	PAN	7.528.956	34
6	PBB	2.049.708	13
7	PK	1.436.565	7
8	PKP	1.065.686	4
9	PNU	679.179	5
10	PDKB	550.846	5
11	Partai-partai lainnya	8.292.463	12
	TOTAL	105.786.661	462

Sumber: www.kpu.go.id

ini masih dalam proses, hampir seluruh anggota DPR, kecuali Faksi PKB (FPKB) dan Faksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (FPDKB), setuju mengajukan *impeachment* terhadap Presiden karena dinilai gagal memberikan jawaban yang memuaskan untuk berbagai pertanyaan DPR terkait dengan kasus-kasus tersebut. Sebagai respons atas pemecatan dirinya, Gus Dur kemudian membubarkan parlemen. Keputusan luar biasa dan tidak terbayangkan sebelumnya ini makin memperlemah posisinya. Mahkamah Agung menilai dan menetapkan bahwa keputusan yang dibuat Presiden Gus Dur bertentangan dengan konstitusi. Inilah pintu masuk yang sesungguhnya bagi pemecatan Gus Dur.

Sebagai respons atas perkembangan yang terjadi, DPP PKB memutuskan membekukan FPKB di parlemen sebagai protes dan menunjukkan ketidaksepakatan terhadap keputusan MPR atas Presiden Gus Dur.[56] Sebagai konsekuensi dari hal itu, FPKB tidak

[56] Setelah pemecatan Presiden Wahid, PKB membatalkan keputusannya dan kembali ke DPR dengan alasan untuk memperjuangkan kepentingan para pemilihnya.

akan menghadiri Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (SI MPR) yang secara formal akan melakukan *impeachment* terhadap Presiden. Meskipun fraksinya telah dinyatakan dibekukan, Matori Abdul Jalil, Ketua Umum Dewan Tanfidz, secara pribadi memilih menghadiri SI MPR. Dia menyatakan bahwa kehadirannya adalah dalam kapasitas sebagai salah satu pimpinan MPR. Kehadirannya juga dimaksudkan sebagai upaya mencari cara alternatif untuk menyelamatkan muka presiden.[57] Keputusan Matori ini menjadi alasan utama bagi PKB untuk memecatnya dari posisi Ketua Umum Dewan Tanfidz.

Setelah pelengseran Gus Dur dari jabatan presiden dan pemecatan Matori sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz, PKB mengalami konflik internal yang berkepanjangan. Pemecatan Matori, yang sepenuhnya ditolak oleh Matori dan para pendukungnya, pada akhirnya memicu konflik internal yang berujung pada perpecahan internal pertama di PKB. Perpecahan itu menghasilkan dua kepengurusan partai, yaitu PKB-Matori yang merupakan PKB versi Matori yang juga disebut PKB-Batu Tulis[58] dan PKB-Gus Dur/Alwi yang disebut PKB-Kuningan.[59] Akibat konflik itu, fokus partai untuk mengembangkan pelembagaan serta mempertahankan hubungan yang dekat dan baik dengan pendukungnya menjadi berantakan.

Fakta bahwa PKB masih mampu mencapai posisi ketiga di level nasional dan pertama di Provinsi Jawa Timur pada Pemilu 2004 menunjukkan keberlanjutan dukungan ulama terhadap PKB, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Hal ini juga menegaskan karisma Gus Dur masih tinggi di kalangan kaum Nahdiyin. Situasi ini menun-

---

[57] Kepemimpinan MPR 1999–2002 terdiri dari M. Amien Rais (Ketua), Ginandjar Karta Sasmita (Wakil Ketua), Kwik Kian Gie (Wakil Ketua), Husni Thamrin (Wakil Ketua), Matori Abdul Jalil (Wakil Ketua), Jusuf Amir Faisal (Wakil Ketua), Hari Sabarno (Wakil Ketua), H.A. Nazri (Wakil Ketua).

[58] Batu Tulis adalah nama jalan di Jakarta tempat keberadaan pengurus sentral versi PKB Matori.

[59] Kuningan adalah nama wilayah di Jakarta Selatan tempat keberadaan pengurus sentral PKB-Gus Dur/Alwi.

jukkan bahwa ketokohan atau karisma personal masih memainkan peranan penting di kalangan Nahdiyin dalam menentukan preferensi politik. Dengan kata lain, saat menjatuhkan pilihan politiknya, kaum Nahdiyin, khususnya mereka yang memilih PKB, sesungguhnya tidak terlalu peduli dengan masalah-masalah seperti *track record* politik, pelaksanaan program atau agenda politik, atau tingkat pelembagaan partai.

Walaupun PKB berhasil mempertahankan posisi ketiganya dalam jumlah suara, partai ini kehilangan sekitar dua juta suara pada Pemilu 2004. Di parlemen, PKB mendapatkan satu kursi tambahan, tetapi posisinya merosot dari keempat menjadi keenam. Di pemilu ini pula, PKB untuk pertama kalinya memperoleh sejumlah kursi di wilayah non-muslim, termasuk Papua. Hal ini lebih merupakan dampak dari keberadaan Gus Dur, seorang figur nasional yang secara terus-menerus memperlihatkan sikap bersahabat dan akomodatif kepada kelompok minoritas daripada karena kinerja PKB.[60] Berkaitan dengan peningkatan suara PKB yang signifikan di Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Hermawi Taslim seorang tokoh politik NTT yang juga aktivis PKB menyatakan faktor Gus Dur lebih berpengaruh daripada partai. Masyarakat memilih PKB karena Gus Dur yang memiliki komitmen kuat terhadap pluralisme dan nasionalisme.[61]

Pada tahun 2004, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan pemilihan presiden secara langsung. Gus Dur dan kolega dekatnya menganggap mekanisme baru ini sebagai kesempatan yang baik untuk kembali berkuasa. Namun, pada kenyataannya, tidak seluruh ulama berpengaruh NU mendukung pencalonannya. Menurut kelompok yang menentang pencalonan itu, selain masalah kondisi fisik,[62] posisi terbaik Gus Dur yang harus dipertahankan setelah pelengseran

---

[60] A. Effendy Choirie, "Menjadikan PKB Partai Nasional dan Terbuka", di Wahid, Choirie dan Syeirazi (ed.), *9 Tahun PKB. Kritik dan Harapan*, 190.

[61] *Ibid.*, 87.

[62] Fuad Anwar, *Melawan Gus Dur*, (Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2004), 20–24.

dirinya bukanlah menjadi presiden lagi, melainkan sebagai guru bangsa sebagaimana sebelumnya dia dikenal.[63] Posisi ini akan memberikannya banyak kesempatan untuk lebih mengembangkan kultur demokrasi bagi bangsa ini.

Pencalonan Gus Dur sendiri pada akhirnya gagal. Aturan main yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan kondisi kesehatan yang prima sebagai salah satu persyaratan seorang calon presiden dan wakil presiden untuk dapat maju dalam pilpres. Suatu syarat yang Gus Dur tidak mampu memenuhinya. Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya memenangi pemilihan presiden pertama itu. Sebagai bentuk penghormatan kepada NU, selain tentu saja agar memperoleh dukungan dari kaum Nahdiyin, Presiden SBY memberikan dua jabatan kementerian kepada PKB, yakni menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat yang dipegang oleh Alwi Shihab dan kementerian pembangunan daerah tertinggal yang dipegang Syaifullah Yusuf.

PKB dalam perkembangan selanjutnya tampak tidak belajar banyak dari kegagalan untuk mempertahankan soliditas internal. Tidak lama setelah Pemilu 2004 yang kurang memuaskan bagi PKB, konflik internal yang begitu bermasalah menjebak lagi partai ini. Kali ini yang terlibat adalah pendukung PKB-Gus Dur/Muhaimin dan PKB-Alwi/Syaifullah, yang kadang disebut sebagai PKB-Ulama atau PKB-Surabaya. Pemicu konflik adalah pemecatan Alwi dan Syaifullah, Ketua Umum Dewan Tanfidz dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz. Alasan formal yang digunakan PKB untuk memecat dua pimpinan ini adalah terkait dengan rangkap jabatan keduanya. Menurut Gus Dur, PKB dengan jelas tidak mengizinkan anggotanya memegang rangkap jabatan. Seorang anggota PKB harus memilih apakah dia akan berkhidmat di partai atau pemerintahan. Alasan pemecatan tersebut tidak dapat diterima oleh Alwi dan Syaifullah beserta para pendukungnya. Menurut mereka, tidak saja rangkap jabatan pernah

---

[63] *Gatra*, Edisi 51, Jumat 31 Oktober 2003.

dilakukan sendiri oleh Gus Dur, tetapi mekanisme yang digunakan untuk memecat Alwi dan Syaifullah juga telah menabrak aturan main.

Berbeda dari kasus Matori versus Gus Dur, konflik kedua ini melibatkan lebih banyak lagi unsur dan kelompok besar di dalam PKB dan NU. Sejumlah ulama berpengaruh, termasuk para Ulama *Khos* yang sebelumnya merupakan pendukung fanatik Gus Dur di konflik internal pertama, menyatakan dukungannya kepada Alwi-Syaifullah. Dapat dikatakan inilah momentum ketidaksepakatan Gus Dur dan sejumlah ulama berpengaruh, terutama dari Provinsi Jawa Timur, mencapai titik puncak tertingginya. Perselisihan ini juga melahirkan konflik antara PKB-Gus Dur/Muhaimin dan DPW PKB Jawa Timur. Ini jelas sesuatu yang ironis mengingat DPW PKB Jawa Timur pada kenyataannya merupakan mesin pengumpul suara terbesar bagi PKB.

Seperti yang terjadi pada perpecahan pertama, dalam konteks hukum Gus Dur memenangi konflik kedua. Gus Dur kemudian menunjuk Muhaimin sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB menggantikan Alwi Shihab. Muktamar 2005 di Semarang memperkuat posisi PKB di bawah kepemimpinan Gus Dur dan Muhaimin. Di lain pihak, pendukung PKB-Alwi yang didukung Ulama *Khos* mendirikan partai baru yaitu Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), yang bagi para pendukungnya diharapkan lebih berorientasi religius dan menghormati tradisi NU. Adapun eksponen lain pendukung PKB-Alwi lebih suka bergabung dengan partai Islam lain, seperti PPP.

Satu tahun sebelum Pemilu 2009, PKB mengalami konflik internal ketiga. Konflik kali ini melibatkan Gus Dur dan Muhaimin. Akar konflik di antara mereka adalah isu ketidakloyalan Muhaimin terhadap Gus Dur. Dalam sebuah forum terbatas, Gus Dur menyarankan agar partai segera memecat Muhaimin dari posisinya sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz. Gus Dur mengatakan, apabila hadirin yang hadir dalam forum itu tidak setuju dengan pemecatan Muhaimin, dia yang akan meninggalkan partai. Menghadapi desakan Gus Dur ini, walaupun masalah ketidakloyalan itu belum terbukti, mayoritas

hadirin setuju untuk memecat Muhaimin dari posisinya. Muhaimin jelas menolak keputusan itu, yang menurutnya didasarkan pada fakta palsu dan proses yang tidak konstitusional. Muhaimin dan pendukungnya kemudian mengadakan Musyawarah Luar Biasa (MLB) pada Februari 2008 di Ancol untuk memperkuat kepemimpinannya di PKB dan memecat sejumlah tokoh yang diidentifikasi oleh tim khususnya sebaga pihak yang bertanggung jawab di balik pertikaian internal ini. Terbentuklah kemudian kepengurusan yang dikenal sebagai PKB-Muhaimin atau PKB-Ancol.

Di lain pihak, Gus Dur dan para loyalisnya di waktu yang berdekatan juga mengadakan MLB, yang dilangsungkan di Parung, Bogor, Jawa Barat, untuk menegaskan kepemimpinan baru partai. Ali Masykur Musa akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz menggantikan Muhaimin. MLB ini melahirkan kepengurusan yang populer disebut sebagai PKB-Gus Dur atau yang disebut PKB-Parung.

Berbeda dari dua kasus sebelumnya, kali ini pengadilan memutuskan PKB-Gus Dur kalah dan sebagai konsekuensinya, pemerintah hanya mengakui keberadaan PKB-Muhaimin. Dengan pengakuan itu, PKB-Muhamin memiliki hak menjadi salah satu peserta dalam Pemilu 2009. Pada Pemilu 2009, pemilih PKB turun tajam dari 13 juta suara pada Pemilu 1999 menjadi hanya sekitar empat juta suara di Pemilu 2009. Kursi PKB di parlemen juga menurun tajam dari 52 menjadi 27 kursi. Kondisi ini menunjukkan dengan jelas dampak negatif dari perpecahan internal yang berkepanjangan.

E. Ringkasan

Kemunculan era Reformasi memberikan peluang bagi kaum Nahdiyin untuk memiliki mesin politik sendiri demi memperjuangkan agenda dan kepentingan politiknya. PKB didirikan sebagai representasi politik kaum Nahdiyin yang telah lama merindukan adanya partai yang benar-benar mewakili aspirasi mereka. Pada tahun-tahun awal terbentuknya, PKB tampak terlihat sebagai partai yang menjanjikan, yang dapat membawa situasi yang lebih baik bagi warga NU. Akan

tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, PKB tidak dapat mengambil peranan asasinya itu. Perpecahan yang terus mendera menyulitkan partai ini untuk menjalankan idealismenya. Walaupun partai ini didirikan oleh komunitas yang meyakini toleransi dan memiliki tradisinya yang unik untuk menyelesaikan konflik, PKB justru tidak mampu menyelamatkan diri dari konflik internal yang berkepanjangan. Kasus perpecahan internal yang dialami PKB sebagai partai yang meyakini demokrasi jelas memperlihatkan sebuah paradoks. Realitas internal di dalam partai menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi tidak sepenuhnya dijalankan PKB yang mengklaim diri sebagai pembela demokrasi dan perbedaan. Lebih dari itu, beberapa faktor penting yang terlibat di dalam fenomena fragmentasi internal PKB mengindikasikan dampak dari lemahnya pelembagaan partai ini. Bab-bab berikutnya akan menjelaskan latar belakang fenomena ini.

BAB IV
BIOGRAFI POLITIK
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

A. Latar Belakang Kemunculan PKS

Pada dekade pertama era Reformasi, PKS menjadi salah satu partai Islam yang cukup diperhitungkan dalam konstelasi politik tanah air. Kelompok dakwah Islam yang dikenal sebagai Jamaah Tarbiyah menjadi tulang punggung keberadaan partai ini. Setelah lebih dari 20 tahun bergerak di bawah permukaan, terutama dalam wilayah sosial dan keagamaan, momentum demokratisasi mengantar kelompok ini memasuki percaturan politik nasional pada tahun 1998 dengan membentuk partai politik. Berbeda dengan kelompok-kelompok Islam *mainstream* seperti Muhammadiyah dan NU yang lahir sejak awal abad ke-20, Jamaah Tarbiyah lahir empat dekade setelah kemerdekaan Indonesia.

Mengenai kapan persisnya kelompok ini berdiri, banyak pakar meyakini kelompok ini sudah ada di awal tahun 1980-an.[1] Hal ini

[1] Berbagai kajian komprehensif tentang latar belakang munculnya *tarbiyah* di penelitian Damanik, misalnya, menyatakan tahun-tahun 1982–1983 sebagai titik awal berkembangnya gerakan ini. Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, (Bandung: Teraju, 2002), 63–101. Penelitian lain berkesimpulan dengan arah yang sama. Lihat Aay Muhammad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera, Ideologi dan Praktis Politik Kaum Muda Kontemporer*, (Bandung: Teraju, 2004). Imdadun M. Rahmat, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, (Yogyakarta: LKiS, 2008). Yon Machmudi, *Partai Keadilan Sejahtera: Wajah Baru Islam Politik Indonesia,* (Bandung: Harakatuna Publishing, 2005).

terutama terkait dengan kehadiran sebuah generasi intelektual atau sarjana yang baru saja pulang dari pendidikan di negara-negara Timur Tengah, seperti Mesir atau Arab Saudi,[2] yang kemudian menjadi tokoh-tokoh terkemuka di balik pendirian kelompok ini. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII),[3] salah satu organisasi Islam berpengaruh yang didirikan Mohammad Natsir, mantan pemimpin dan tokoh sentral Masyumi, memiliki peran penting sebagai perantara atau penyambung bagi para sarjana dengan berbagai universitas tersebut.

Beberapa tokoh senior kalangan ini di antaranya adalah Hilmi Aminuddin, seorang figur aktivis dakwah lulusan Universitas Madinah yang menempatkan fondasi awal gerakan dan membangun jaringan pertama Jamaah Tarbiyah. Saat ini Hilmi menjabat Ketua Majelis Syura, badan terpenting di PKS. Tokoh utama yang lain adalah Abdi Sumaiti, dikenal dengan panggilan Abu Ridha, lulusan mesir yang cukup lama berkecimpung dalam DDII. Aktif menulis dan sekembalinya ke tanah air didaulat menjadi salah satu ideolog kelompok ini, Hilmi Aminuddin dan Abu Ridha mewakili generasi pertama aktivis tarbiyah yang pada tahap awal memainkan peranan sentral dalam pertumbuhan Jamaah Tarbiyah.[4]

Dalam perkembangannya, gerakan ini memunculkan generasi kedua yang terdiri atas beberapa tokoh yang di kemudian hari banyak memegang posisi penting dalam kehidupan partai. Hadirnya generasi kedua ini, termasuk almarhum Rahmat Abdullah, salah satu pendiri PKS yang sebelum dia meninggal dihormati sebagai *syaikh at tarbiyah* dan Dr. Hidayat Nur Wahid yang belakangan menjadi Presiden

[2] Di antaranya adalah lulusan Universitas Islam Madinah Al-Munawarrah, Arab Saudi; Universitas Ibnu Saud, Riyadh, Arab Saudi; Universitas Al-Azhar, Mesir.

[3] Anthony Bubalo dan Greg Fealy, *Join the Caravan? The Middle East, Islamism and Indonesia*, (Sydney: Lowy Institute for International Policy, 2005), 58–59. Lihat juga 124.

[4] Muhammad Adlin Sila, “Gerakan Salafi Sebagai Gerakan Islam Politik di Indonesia”, *Dialog,* edisi I, 2004, 41. Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera, Ideologi dan Praktis Politik Kaum Muda Kontemporer*, 131–132.

Kedua PKS dan Ketua MPR RI, memperkuat gerak langkah gerakan ini. Tokoh-tokoh generasi pertama dan kedua ini semasa melanjutkan studi mereka ke Timur Tengah banyak menjalin hubungan langsung dengan kelompok *Ikhwanul Muslimin* (IM). Peranan alumnus Timur Tengah di dalam perkembangan gerakan tarbiyah dan kemudian di dalam partai demikian penting.[5]

Meski demikian, beberapa tokoh senior yang berpengaruh dalam gerakan ini tidak semua berlatar belakang pendidikan Timur Tengah. Rahmat Abdullah, misalnya, adalah alumnus Perguruan Islam Assyafiiyah Jakarta; Dr. Nurmahmudi Ismail, mantan Ketua Umum Partai Keadilan (PK) adalah lulusan University A & M Texas; sedangkan Tifatul Sembiring, presiden kedua partai ini, adalah alumnus Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STI&K) Jakarta; begitu pula dengan Anis Matta, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PKS, lulusan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, Jakarta.

Lepas dari itu, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa tokoh utama Jamaah Tarbiyah memang memiliki hubungan yang erat dengan IM dan jaringannya selama mereka menempuh masa studi.[6] Mereka terinspirasi dengan ajaran IM melalui berbagai buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh penting IM, seperti Hasan Al-Banna, Said Qutb, atau Said Hawwa.[7] Dalam sejarahnya, salah satu orang Indonesia generasi pertama yang pernah bersentuhan langsung dan mendapat pengajaran dari IM adalah K.H. Bustami Darwis di tahun 1930-an.

Hubungan yang erat dengan IM pada akhirnya memengaruhi dan membedakan karakteristik Jamaah Tarbiyah dengan kelompok-kelompok *mainstream* lainnya, bahkan termasuk dengan DDII sebagai institusi pendukung pertamanya. Hal ini dapat dilihat misalnya dari

---

[5] Machmudi, *Partai Keadilan Sejahtera: Wajah Baru Islam Politik Indonesia*, 67.

[6] *Ibid.*, 22–24.

[7] Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia,* 95–97.

pernyataan Hilmi Aminuddin yang menyatakan, "Kelompok ini tidak berkiblat ke Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, atau kelompok-kelompok Islam lainnya".[8] Demikianlah, menjalankan pemahaman atas Islam yang terinspirasi terutama oleh ajaran Hasan Al-Banna[9] dan mengembangkan metode dakwah Ikhwanul Muslimin[10] adalah komitmen yang menjadi landasan para aktivis tarbiyah memasuki arena dakwah di Indonesia.

Dalam menjalankan pemahaman dan misinya, kelompok tarbiyah bergerak dalam sel-sel yang aktif dan terbatas. Pergerakan ini berada di domain masyarakat sipil, yang pada awal khususnya bergerak di masjid-masjid kampus. Beberapa masjid kampus yang menjadi sentra gerakan ini berada di beberapa universitas umum terkemuka, seperti di Masjid Salman di Institut Teknologi Bandung (ITB), Masjid Arief Rahman Hakim di Universitas Indonesia (UI), Masjid Al-Ghifari di Institut Pertanian Bogor (IPB), Masjid Salahuddin di Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Masjid Manarul Ilmi di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS).

Masjid-masjid kampus menjadi tempat ideal karena relatif luput dari amatan rezim dan aparatnya. Perlu dipahami bahwa rezim Orde Baru saat itu memiliki kecenderungan Islamophobia. Sejumlah kelompok dan tokoh Islam yang kritis dicurigai dan dilabel sebagai "ekstrem kanan". Dengan alasan stabilitas keamanan, rezim kerap menyebarkan aparatnya untuk memonitor tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok Islam yang sudah ditargetkan untuk membatasi dan melokalisasi aktivitas dakwah mereka. Meski demikian, rezim ini tampaknya tidak memperhitungkan masjid kampus sebagai ancaman. Rezim menganggap masjid kampus hanya sebagai tempat bagi mahasiswa untuk beribadah dan membahas masalah-masalah *ukhrowi*.

---

[8] Hilmi Aminuddin, *Strategi Da'wah Gerakan Islam*, (Jakarta: Pustakan Tarbiatuna, 2003), 153–154.

[9] *Sabili*, No. 3/IX, 1 Agustus 2001.

[10] Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia,* 98.

Oleh karena itu, masjid-masjid kampus bukanlah tempat yang harus dikontrol oleh jaringan aparat pemerintah.

Di sisi lain, kelompok tarbiyah melihat jaringan aktivis mahasiswa Islam di kampus-kampus sebagai kelompok potensial yang dapat turut menyuburkan dakwah, namun belum tergarap dengan sistematis. Jamaah Tarbiyah kemudian mengambil alih jaringan ini dan memberikan perspektif keislaman dan metode dakwah baru. Dalam perkembangannya, tidak sedikit aktivis mahasiswa dan jaringan dakwah Islam bergabung dalam gerakan ini.

Dalam perkembangannya, Jamaah Tarbiyah memperoleh respons positif dan menarik minat banyak mahasiswa. Dalam kurun waktu kurang dari satu dekade, keberadaan kelompok ini dapat dirasakan di hampir seluruh universitas terkemuka di Indonesia. Tidak mengherankan jika pada awal gerakannya kebanyakan kader yang berhasil direkrut adalah anak-anak muda berpendidikan tinggi yang masih di dalam proses mencari identitas diri. Penerimaan ini pada akhirnya melabelkan PKS sebagai partai anak muda, urban, dan terdidik. Walau demikian, PKS dalam perkembangannya juga melebarkan sayap ke komunitas-komunitas nonkampus. Lambat tetapi pasti, kelompok ini juga berkembang di komunitas Islam di wilayah pedesaan.

Selain alasan di atas, hal lain yang terkait dengan perkembangan kelompok ini di kampus adalah karena dipandang sejalan dengan *grand design* (rancangan besar) pengembangan dakwah yang diyakini oleh kalangan tarbiyah yang mencakup empat fase, yakni *mihwar tanzhimi, mihwar sya'bi, mihwar muasasi,* dan *mihwar daulah*. Pengembangan pertama terpusat pada perbaikan individu, yang dilanjutkan dengan perbaikan keluarga, disusul dengan perbaikan masyarakat, dan terakhir perbaikan pada level negara (Gambar 4.1). Atas dasar penahapan ini, di awal 1980-an, gerakan ini memusatkan aktivitasnya di kampus-kampus (*mihwar tanzhimi*) sebagai bagian pembentukan pribadi muslim yang baik. Diharapkan pribadi-pribadi ini memiliki komitmen yang kuat atas dakwah dan menjadi para aktivis dakwah yang siap menciptakan masyarakat Islam.
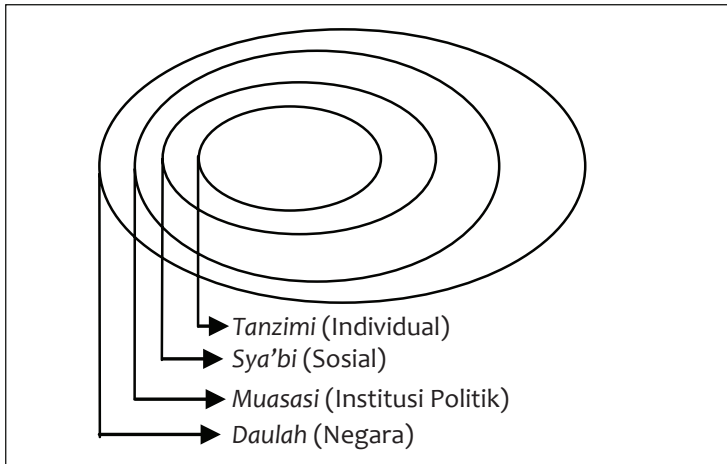
Sumber: Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani: Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera,* (Jakarta: MPP PKS, 2008), 51.

Gambar 4.1 Orbit *Dakwah* Menurut PKS

Setelah dirasa cukup berhasil melalui tahapan pertama itu, di awal tahun 1990-an yang terkait dengan fase kedua, Jamaah Tarbiyah mulai membangun keberadaannya di masyarakat, khususnya melalui pendirian berbagai institusi sosial, ekonomi, komunikasi, dan pendidikan. Sebagai realisasi ini, sejumlah aktivis kemudian mendirikan berbagai majalah (Sabili, Saksi, Ummi, dan Anida), penerbit (Gema Insani Press, Era Intermedia, Robbani Press, Al-Kautsar, Tarbiyatuna, dan Asyamil), kelompok belajar atau kajian, (Nurul Fikri dan Studi dan Informasi Dunia Islam Kontemporer), serta yayasan Islam untuk berbagai kajian Islam dan pesantren (Yayasan Haramain dan Al-Hikmah).

Di akhir tahun 1990-an, sebagai kelanjutan dari proses penahapan dakwah, gerakan ini mulai masuk dalam dunia politik sebagai fase pengembangan dakwah selanjutnya. Masuknya aktivis tarbiyah ke dunia politik merupakan sebuah respons terhadap perkembangan terkini dalam perpolitikan Indonesia. Pengalaman politik langsung pertama gerakan tarbiyah di arena politik nasional adalah pada

tahun 1998 melalui Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)[11]. Organisasi ini didirikan di bulan-bulan akhir Orde Baru dengan tujuan utama memperjuangkan aspirasi rakyat, yang berarti menumbangkan kekuasaan Soeharto dan mendorong reformasi.

Bersama dengan unsur-unsur reformasi lainnya, KAMMI akhirnya berhasil menjatuhkan Presiden Soeharto dari kekuasaannya. Jatuhnya Rezim Soeharto dianggap oleh gerakan ini sebagai akhir dari "Periode Mekkah", di mana dakwah harus dilakukan secara diam-diam, dan digantikan dengan era demokrasi yang membawa situasi yang lebih kondusif bagi dakwah. Sebagian besar aktivis tarbiyah melihat situasi ini sebagai peluang untuk memperluas gerakannya dengan muncul di arena publik dan menyebarkan dakwah secara lebih terbuka kepada seluruh umat Islam.

Opini ini memicu perdebatan, karena bagi sebagian aktivis, waktu membuka diri secara terang-terangan itu belum tiba. Mereka meyakini akhir tahun 1990-an bukanlah waktu yang tepat untuk tarbiyah memasuki dunia politik. Bagi mereka, para aktivis tarbiyah seharusnya tetap konsisten dengan skema perkembangan bertahap dakwah yang mengisyaratkan bahwa level berikutnya baru akan dimulai pada tahun 2010. Kelompok ini juga meyakini bahwa gerakan ini belum siap untuk berjuang di tingkat politik riil, khususnya karena kurangnya sumber daya manusia, jaringan politik (*political networking*), dan kapasitas finansial. Tokoh-tokoh seperti Hidayat Nur Wahid, Anis Matta, dan Ihsan Tanjung adalah bagian dari kelompok yang tidak sepakat. Karena alasan tersebut, mereka menyarankan untuk menunggu hingga seluruh unsur tarbiyah siap memasuki domain politik.[12] Sementara itu, sebagian lainnya meyakini inilah momen yang tepat bagi gerakan ini untuk berdakwah melalui politik. Mereka memandang sebuah kendaraan politik merupakan wahana yang

[11] Tentang KAMMI dan kegiatannya, lihat Andi Rahmat dan Mukhamad Najib, *Gerakan Perlawanan dari Masjid Kampus*, (Solo: Purimedia, 2001).

[12] Wawancara dengan Aus Hidayat Nur, Ketua Wilayah Dakwah II periode 2002-2005, Ketua BPDO (2010-2015), di Jakarta, 15 Oktober 2010; dengan Akmal Burhanuddin, 20 November 2005; dengan Kamarudin, 20 November 2005.

tepat bagi kader-kader dakwah untuk mendialogkan idenya dengan masyarakat dan bagian dari akselerasi pembenahan umat dan negara. Hilangnya momen ini dapat membawa kemunduran bagi gerakan.

Polling internal akhirnya dilakukan untuk melihat seberapa besar antusiasme para aktivis tarbiyah memasuki fase baru dakwah. *Polling* ini memecahkan polemik di antara kedua kubu yang berbeda pandangan. Hasil *polling* menunjukkan bahwa mayoritas kader, termasuk tokoh seperti Rahmat Abdullah, setuju dengan akselerasi ini dan siap muncul di lingkup politik melalui pendirian partai.[13]

Pilihan ini menunjukkan karakteristik gerakan ini sebagai sebuah kelompok Islam dengan kesadaran politik tinggi. Di lain pihak, hal ini juga mengilustrasikan karakteristik moderat yang dicerminkan dengan kemauan untuk bergabung dalam sistem politik berbasis non-syariah. Sikap ini membedakannya dengan kubu fundamentalisme radikal, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atau Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang cenderung menolak sistem politik yang ada apa lagi turut berkecimpung di dalamnya.[14]

Gerakan tarbiyah akhirnya mendirikan partai politik yang bernama Partai Keadilan (PK) pada 9 Agustus 1998. Deklarasi pendirian PK dilakukan di halaman Masjid Al-Azhar, Jakarta, dan disaksikan sekitar 50.000 orang; sebagian besar di antaranya para

---

[13] Dari 6.000 kuesioner yang disebarkan ke kader, 5.800 kuesioner kembali dan sekitar 68% menyatakan setuju atas pendirian partai. Sementara sisanya lebih suka mendirikan lembaga swadaya masyarakat. Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, 229.

[14] Tentang HTI lihat Yahya A.R., *Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi*, (Jakarta: HTI Press, 2006). Hizbut Tahrir Indonesia, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia* (Jakarta: HTI, 2009). Syafuan Rozi, "Potret Hizbut Tahrir Indonesia: Pro Kontra Khilafah dan Wacana Keindonesiaan", dalam Syafuan Rozi (ed.), *Nasionalisme, Demokratisasi, dan Sentimen Primordial di Indonesia: Problematika Identitas Keagamaan versus Keindonesiaan (Kasus Ormas Pendukung Khilafah Islamiyah)*, (Jakarta: LIPI Press, 2010). Tentang MMI lihat Jamhari dan Jajang Jahroni (eds.), *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004). M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2005).

aktivis Tarbiyah.[15] Ini merupakan momen ketika hampir seluruh tokoh kunci gerakan ini muncul di lingkup publik untuk pertama kalinya. PK dibangun sebagai partai dakwah yang melihat arena politik sebagai sarana untuk berdakwah agar nilai-nilai Islam dapat lebih berdampak lagi di kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Mutammimul Ula, salah satu satu pendiri PK, menjelaskan komitmen ini dengan menyatakan bahwa partai ini akan menggunakan parlemen sebagai "mimbar dakwah".[16] Atas dasar kepentingan itu, kalangan Jamaah Tarbiyah melihat bahwa partainya tidak semata berurusan dengan upaya mendapatkan jabatan-jabatan politik yang prestisius dan terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, tetapi juga sebagai perangkat pengembangan moral Islam kepada seluruh bangsa.

Pendirian semacam ini menandai hadirnya aliran politik baru di dalam pemikiran politik Islam dalam sistem politik Indonesia. Hal ini juga mengisyaratkan adanya pengaruh pemikiran politik baru dari Timur Tengah, khususnya Mesir, dalam kehidupan politik nasional. Kehadiran Jamaah Tarbiyah juga memperlihatkan peran penting jaringan global kelompok-kelompok Islam, khususnya dari negara-negara Timur Tengah yang selama beberapa dekade merupakan sumber inspirasi gerakan Islam di Indonesia. Yusuf Qardhawi, salah seorang tokoh Jamaah Tarbiyah, mengomentari upaya implementasi metode dakwah IM di PK sebagai upaya PK untuk meniru IM, yang pada akhirnya membuat kedua organisasi terlihat seperti kembar.[17]

Setelah lima tahun keberadaannya di kancah politik nasional, disebabkan oleh regulasi ambang batas suara yang mendiskualifikasi PK dari keikutsertaan untuk pemilu berikutnya, pada tahun 2003

---

[15] *Republika*, 10 Agustus 1998. Ribuan peserta deklarasi memakai terutama kemeja putih untuk pria dan jilbab putih untuk seluruh peserta perempuan dan di antaranya membawa anak-anak.

[16] Sapto Waluyo, *Kebangkitan Politik Dakwah: Konsep dan Praktik Politik Partai Keadilan Sejahtera di Masa Transisi*, (Bandung: Harakatuna Publishing, 2005), 31.

[17] Yusuf Al-Qardhawi, *Umat Islam Menyongsong Abad 21: Sebuah Catatan Akhir Abad, Evaluasi Perjalanan Umat Abad ke-20 dan Proyeksi Abad ke-21*, (Solo: Era Intermedia, 2001), 92.

PK secara resmi menyatakan diri sebagai bagian Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebagai partai baru untuk para aktivis tarbiyah, PKS yang dideklarasikan pada 20 April 2003 ini dimaksudkan sebagai kelanjutan PK dengan seluruh visi dan tujuannya beserta segenap aset yang dimilikinya.[18]

B. Fondasi Ideologi dan Orientasi Politik PKS

Doktrin dasar PKS pada dasarnya merupakan perpaduan antara keyakinan atas Islam sebagai ajaran komprehensif atau menyeluruh (*syumuliatul Islam*) dan pendekatan gradualisme atau moderatisme. Sehubungan dengan sifat Islam sebagai ajaran yang menyeluruh, kalangan tarbiyah meyakini sifat ajaran Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan setiap muslim di mana pun mereka berada.[19] Sifat ajaran Islam yang total itu digambarkan sebagai berikut:

> Islam adalah sistem hidup yang universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan umat, akhlak dan kekuasaan, kasih sayang dan keadilan, wawasan dan perundang-undangan, ilmu pengetahuan dan peradilan, materi dan kekayaan, atau kerja dan penghasilan, jihad dan dakwah, tentara dan *fikrah, aqidah* yang bersih dan ibadah yang benar. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan ajaran Islam ini secara menyeluruh bersama dengan keuniversalannya. Islam adalah sistem kehidupan yang mencakup agama, politik, negara, dan umat.[20]

---

[18] "Sejarah PK Sejahtera", *www.pk-sejahtera.org*. Lihat juga "Partai Keadilan Sejahtera Dideklarasikan Bersama Partai Keadilan", *Kompas*, 21 April 2003.

[19] Syamsul Balda, Abu Ridho dan Untung Wahono, *Politik Da'wah Partai Keadilan*, (Jakarta: DPP Keadilan, 2000), vii.

[20] Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan, *Jati Diri Partai Keadilan*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyatuna, 2002). Sudut pandang ini mencerminkan pengaruh Hasan Al-Banna yang menyatakan: "Islam itu syumuliyah mencakup ibadah, iman, negara, bangsa, akhlak, moral, lahiriah, toleransi, harga diri, budaya dan konstitusi. Anda meyakini kebenaran Islam sebagai agama dan negara, pemerintah dan masyarakat, *mushaf* dan senjata dan sebagai saksi Allah atas seluruh bangsa di atas muka bumi". Lihat pernyataan di dalam Hasan Al-Banna, *Risalah pergerakan Ikhwanul Muslimun*, Jilid 2, (Solo: Eramedia, 2001), 67. Lihat juga pernyataan serupa dalam Mahfudz Siddiq, *Pemikiran dan Manhaj Politik Ikhwanul Muslimin*, (Bekasi: Masdar Ilmu Agency, 2003), 12.

Oleh karena itu, dalam doktrin *syumuliyatul Islam*, ajaran Islam bersifat relevan dengan masalah-masalah kemasyarakatan dan mendorong umatnya untuk memiliki perhatian penuh atas masalah-masalah *ukhrawi* serta dapat dijadikan solusi bagi kehidupan umat manusia.[21] Dengan demikian, setiap muslim diwajibkan menjadikan Islam sebagai satu-satunya sumber nilai bagi kehidupan mereka. Al-Qur'an dan Hadis, yang merupakan inti ajaran Islam,[22] menurut Al-Jufri, tidak hanya memberikan peta dunia yang menyelamatkan manusia di dunia, tetapi juga peta keabadian yang menyelamatkan manusia dari azab di akhirat.[23]

Terkait dengan hal ini, PKS tidak percaya dengan doktrin sekuler yang memisahkan negara atau politik dan agama. Bagi PKS, dunia politik adalah sarana untuk melayani umat manusia sebagai bagian pelaksanaan ajaran Islam.[24] Umat Islam berkewajiban mendirikan struktur politik atau peradaban yang didasarkan pada nilai-nilai Islam agar dapat mentransformasi setiap aspek kehidupannya sesuai dengan kehendak Allah.[25] Kewajiban ini artinya terkait dengan kebutuhan adanya sebuah sistem yang dapat melindungi umat Islam dalam melaksanakan kewajibannya secara sempurna. Menurut Ridha, hanya melalui sistem Islam setiap muslim dapat melaksanakan kehidupannya sesuai dengan kehendak Allah.[26] Pendirian sistem ini

---

[21] Hurriyah, *Sistem Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera (1998–2003),* Skripsi, (Depok: Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2004), 110.

[22] Hidayat Nur Wahid, "Menerapkan Syariat Islam dalam Bidang Sosial Budaya dan Pendidikan", dalam Bukhori Yusuf dan Iman Santoso, *Penerapan Syariat Islam di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan*, (Jakarta: Globalmedia Cipta Publishing dan Pusat Konsultasi Syariah, 2004), 142.

[23] Salim Segaf Al-Jufri, "Pengantar", *ibid.,* 15.

[24] Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani: Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera*, (Jakarta: MPP PKS, 2008), 33.

[25] Anis Matta, *Menikmati Demokrasi: Strategi Dakwah Meraih Kemenangan*, (Jakarta: Pustaka Saksi, 2002), 8.

[26] Abu Ridha, *Negara dan Cita-Cita Politik,* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2004), 32.

juga memberikan kesempatan setiap muslim untuk membuktikan manfaat besar dari peradaban Islam bagi umat manusia. Warisan kehidupan Nabi Muhammad yaitu Negara Madinah membuktikan kebermanfaatan Islam di tingkat praktis,[27] yang dapat dijadikan pedoman bagi generasi Islam berikutnya dalam membangun peradaban. Dengan demikian, penciptaan peradaban Islam sebagai cermin dan konsekuensi nilai-nilai Islam merupakan salah satu tujuan berpolitik yang diyakini PKS.

Di samping itu, PKS juga menganut perspektif gradualisme. Perspektif ini menjadi landasan bagi sikap moderat partai dalam memperjuangkan keyakinan politiknya. Sejarah kenabian yang memperlihatkan upaya Nabi Muhammad dalam membentuk peradaban yang dimulai dari keluarga dan sahabat-sahabat terdekat menuju terbentuknya Negara Madinah menjadi inspirasi dari sikap gradual atau bertahap ini.[28] PKS meyakini bahwa keberhasilan Nabi dalam menegakkan sebuah peradaban Islam adalah hasil dari metode dakwah berjenjang yang mengintegrasikan upaya pembinaan menuju perubahan yang menyeluruh, dari level yang paling sederhana yakni individu hingga yang paling kompleks yakni negara. PKS meyakini bahwa "setiap usaha untuk mencoba memisahkan pencapaian politik dari prinsip ini akan menghadapi kerusakan dan bahkan dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan melawan kemanusiaan dan alam semesta. Oleh karena itu, prinsip bertahap dan proporsional harus menjadi bagian setiap tindakan secara komprehensif".[29]

Strategi gradual dengan orientasi *bottom-up* ini kemudian diturunkan ke dalam sebuah konsep yang disebut sebagai *marhalah* (pentahapan atau fase). Penahapan ini terbagi menjadi empat jen-

---

[27] Muslih Abdul Karim, "Penerapan Syariat Islam pada Masa Rasulullah SAW", di Yusuf dan Santoso, *Penerapan Syariat Islam di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan*, 23–36.

[28] Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani: Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera*, 51.

[29] "Kebijakan Dasar PK", di *Buku Anggaran Dasar Partai Keadilan*, (Depok: Dewan Pimpinan Daerah partai Keadilan Kota Depok), 41–42.

jang, yakni *mihwar tanzhimi* (jenjang individu), *mihwar sya'bi* (jenjang masyarakat), *mihwar muassasi* (jenjang kelembagaan politik), dan *mihwar daulah* (jenjang negara). Keberhasilan dakwah pada satu jenjang menjadi pertanda bagi pelaksanan proses dakwah di tahap selanjutnya. Bagi Anis Matta, berkenaan dengan kehidupan politik, konsep pentahapan ini sejatinya terkait dengan lahirnya kelompok yang militan, yang bersungguh-sungguh menciptakan kesiapan masyarakat hingga melahirkan kelompok-kelompok Islam di tingkat pengambilan kebijakan.[30] Tujuan akhir proses Islamisasi ini adalah pendirian negara atau peradaban yang didasarkan pada spirit hukum Islam. Akan tetapi, penciptaan negara (*khilafah*) tidak menghentikan proses dakwah secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan fungsi utama negara adalah menjaga kesalehan seluruh masyarakat yang secara substansi adalah tujuan dari dakwah itu sendiri. PKS meyakini bahwa tatanan Islam ideal tidak hanya berkenaan dengan terciptanya struktur politik yang dapat mengelola masalah-masalah publik dengan tepat, tetapi juga mampu mendorong ketaatan individu kepada Tuhan.[31]

Intisari makna dakwah adalah fondasi lainnya dari pengembangan sikap moderat. Bagi PKS, dakwah haruslah sejalan dengan semangat zaman. Artinya, dakwah hendaknya relevan dan proporsional dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Hilmi Aminudin mengatakan bahwa dakwah yang baik adalah dakwah yang menggunakan bahasa yang dapat dimengerti dan menghindari kesan eksklusif; dakwah inti sarinya harus fleksibel dan toleran.[32] Oleh karena itu, pelaksanaan dakwah tidak dapat bertentangan dengan situasi nyata yang ada, tetapi harus bertumpu pada konteks dan menghindari pendekatan eksklusif. Pandangan ini menjadi tolakan bagi PKS untuk mengembangkan strategi politik adaptif tanpa harus mengorbankan idealismenya, sekaligus menjadi fondasi bagi

---

[30] Ridha, *Negara dan Cita-Cita Politik*, 9–11.

[31] Balda, Ridho, dan Wahono, *Politik Da'wah Partai Keadilan*, 19.

[32] Aminuddin, *Strategi Da'wah Gerakan Islam*, 62.

PKS untuk mengedepankan cara-cara konstitusional dan menolak pendekatan revolusioner atau cara-cara radikal.

Sumber lain dari sikap moderat adalah pelaksanaan doktrin *tsawabit wa mutghayyirat*. Doktrin ini menjelaskan dua aspek ajaran Islam, yaitu *tsawabit* (aspek fundamental) dan *mutghayyirat* (aspek dinamis). *Tsawabit* berkaitan dengan masalah-masalah yang secara jelas dinyatakan dan diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Aspek ini berkaitan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah sehingga bersifat absolut dan abadi. Adapun *mutghayyirat* terkait dengan berbagai persoalan yang tidak secara komprehensif dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Secara teoritis, hal ini dikenal sebagai *furu* (masalah cabang).

PKS meyakini bahwa setiap individu muslim diperbolehkan untuk mengembangkan pendekatan kontekstual dalam menjalankan keagamaannya sebagai respons terhadap masalah *mutghayyirat,* termasuk aktivitas politik. Dalam dunia politik, bagi PKS, terdapat berbagai masalah yang dapat disesuaikan dengan ruang dan waktu agar dapat melakukan perbaikan bagi umat manusia.[33] Atas dasar pandangan ini, mengadopsi sebuah pandangan politik boleh saja dilakukan sejauh hal tersebut tidak bertentangan dengan fondasi ajaran Islam. Pandangan ini memberikan partai tersebut fleksibilitas dalam menerima konsep-konsep politik modern termasuk menggunakan demokrasi sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan politik.

Seperti apa sesungguhnya pemikiran PKS telah menarik perhatian banyak kalangan untuk membahasnya secara ilmiah. Sebagian pakar menganggap PKS sebagai representasi kelompok garis keras dan mendefinisikannya sebagai "fundamentalis",[34] "Islamis"[35] atau

---

[33] Balda, Ridho, dan Wahono, *Politik Da'wah partai Keadilan*, 75.

[34] Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, 246.

[35] Greg Barton, *Indonesia's Struggle: Jamaah Islamiyah dan the Soul of Islam*, (Sydney: NSW Press, 2004). Anies Rasyid Baswedan, "Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory", *Asian Survey*, XLIV:5, (September/Oktober 2004). Saiful Mujani dan R. William Liddle, "Indonesia's Approaching Election: Politics, Islam and Public

"Islam radikal", bahkan sebagaimana yang diyakini oleh Dhume, lebih berbahaya daripada kelompok teroris Jamaah Islamiyah.[36] Sebagian akademisi yang lain menyimpulkan PKS sebagai bagian gerakan "modernis Islam" dan menempatkannya di tingkat yang sama dengan sejumlah partai Islam, yaitu PPP dan PBB.[37] Di sisi lain, campuran antara sikap totalisme dan moderat, yang bagi sebagian pengamat dipahami sebagai gabungan antara unsur radikal dan cara-cara damai, menjadi titik tolak dalam memahami pemikiran partai ini. Terkait hal ini, sejumlah pengamat menggunakan istilah lain seperti "alternatif moderat terhadap Islamisme radikal",[38] "fundamentalisme moderat"[39] atau "Islamis-Reformis".[40] Adanya keragaman pandangan dan perbedaan pendapat ini menunjukkan kompleksitas ideologi politik PKS. Namun terlihat bahwa karakteristik pemikiran PKS tidak dapat dengan mudah dimasukkan begitu saja dalam aliran yang sama dengan partai-partai atau organisasi Islam lainnya.

Terlepas dari posisi pemikiran partai ini sesungguhnya, landasan pemikiran yang menyitensiskan antara totalitas dan kebertahapan jelas memengaruhi orientasi dan perilaku politik PKS dan kader-kadernya. Keyakinan atas peranan komprehensif Islam memotivasi para kader untuk berkomitmen membangun pribadi yang berakhlak, masyarakat yang baik, hingga peradaban yang islami. Karena komit-

---

Opinion", *Journal of Democracy*, 15:1, (Januari 2004). Bubalo dan Fealy, *Joining the Caravan? The Middle East, Islamism and Indonesia.*

[36] Sadanand Dhume, "Indonesian Democracy's Enemy Within, Radical Islamic Party Threatens Indonesia with Ballots More than Bullets", *Yale Global*, 1 Desember 2005.

[37] Mark R Woodward, "Indonesia, Islam and the Prospect for Democracy", *SAIS Review,* XXI:2, (Summer-Fall, 2001), 33–34. Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera, Ideologi dan Praktis Politik Kaum Muda Kontemporer.*

[38] Elizabeth Fuller Collins, "Islam is the Solution: *Dakwah* and Democracy in Indonesia", *http://www.classics.ohio.edu/faculty/collins/islamsolution.pdf.*

[39] Firman Noor, *Moderate Islamic Fundamentalism in Indonesia: A Study of Political Thinking and Behaviour of the Prosperous Justice Party (PKS), 1998–2005*, Tesis M.A., (Canberra: Faculty of Asian Studies, ANU, 2006).

[40] Rahmat, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen.*

men ini, mereka kerap memosisikan dirinya sebagai guru[41] yang akan membawa masyarakat ke arah yang ideal menurut Islam. Komitmen ini menyatukan para kader sekaligus membangun rasa kebersamaan di antara mereka.

Keyakinan atas kesempurnaan Islam memberikan implikasi lain, yaitu pemahaman bahwa Islam adalah solusi bagi kemanusiaan. PKS meyakini bahwa karena Islam relevan dengan seluruh dimensi kemanusiaan maka Islam secara inheren memiliki jawaban atas seluruh masalah yang dihadapi umat manusia.[42] Pemahaman ini menjadi landasan bagi PKS untuk mengambil bagian dalam kegiatan non-politik seperti aktivitas kemanusiaan dan sosial untuk memecahkan berbagai masalah praktis di masyarakat. Di tingkat praktis, keberadaan kader-kader PKS untuk membantu korban di berbagai wilayah bencana merupakan salah satu di antaranya.

Berkenaan dengan keyakinan atas konsep gradualisme, PKS menelaah kesiapan masyarakat dalam menerima format dan struktur politik Islam sebagai prasyarat utama sebelum menciptakan sebuah negara Islam. Sepanjang kesiapan ini masih belum terlihat, seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, umat Islam tidak dapat memaksakan pelaksanaan syariah Islam apalagi pendirian negara Islam. Oleh karena itu, kewajiban utama saat ini adalah memastikan bahwa spirit Islam tumbuh di masyarakat dan membantu umat Islam serta seluruh umat manusia dalam memahami kelebihan dan kebaikan ajaran-ajaran Islam.[43] PKS mengakui bahwa Indonesia sebagai produk kenyataan sosio-historis, yang memiliki berbagai tradisi, kepercayaan,

---

[41] Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani: Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera*, 53 dan h.73.

[42] Ruh Islam sebagai sebuah solusi juga dikaitkan dengan keyakinan bahwa Islam memperbaiki seluruh dimensi kehidupan dari masalah ideologi negara, politik, hukum, ekonomi, bahkan melalui sektor perbankan. Jufri, "Pengantar", 18–22.

[43] Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani: Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera*, 37.

dan etnis di dalamnya,[44] yang tentu saja membutuhkan kompleksitas penyesuaian sebelum sepenuhnya siap menerima sistem politik Islam.

Bagi PKS, yang lebih penting untuk didahulukan saat ini adalah membangun sistem politik untuk kepentingan seluruh umat manusia. Sistem, yang terlepas dari apa pun namanya, yang diisi oleh semangat menghargai keragaman, demokrasi, dan penegakan hukum[45]; dan lebih penting lagi, yang memungkinkan pelaksanaan hukum Islam bagi umat Islam, di mana tauhid menjadi fondasi kehidupan mereka.[46] Pada tahun-tahun terakhir, PKS menggunakan istilah "masyarakat madani" untuk menyebutkan sistem yang dimaksud tersebut.[47]

Pandangan ini memperlihatkan pendekatan adaptif. PKS juga makin intens dalam memberikan pengakuan atas eksistensi nasionalisme, demokrasi, dan Pancasila sebagai fondasi negara ini. Sikap ini dilembagakan dalam AD/ART dan platform partai.[48] Walaupun demikian, hal ini tidak berarti PKS meyakini nilai-nilai tersebut dengan cara yang sama dengan kalangan nasionalis-sekuler meyakininya. Sebagai sebuah partai yang meyakini pembentukan peradaban Islam, di mana pada akhirnya berarti terlaksananya Syariah Islam secara komprehensif, PKS melihat seluruh nilai tersebut sebagai nilai-nilai sementara pada satu tahap dari keseluruhan tahap menuju islamisasi yang lebih menyeluruh.[49]

---

[44] *Ibid.*, h.28. Lihat juga Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan, *Prinsip Dasar Partai Keadilan*, (Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan, 1999).

[45] Hilmi Aminuddin, "Kata Pengantar Ketua Majelis Syura", dalam Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani: Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera*, v.

[46] *Ibid.*, 34.

[47] *Ibid.*, 72.

[48] *Ibid.*, 5–76. Lihat juga di "Jati Diri Partai Keadilan", di Sahar L. Hassan, Kuat Sukardiyono dan Dadi M.H. Basri (eds.), *Memilih Partai Islam: Visi, Misi dan Persepsi*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1998), 58.

[49] Noor, *Moderate Islamic Fundamentalism in Indonesia: A Study of Political Thinking and Behaviour of the Prosperous Justice Party (PKS), 1998–2005*, 71.

Orientasi berikutnya berkaitan dengan komitmen untuk melakukan kaderisasi secara sistematis dan bertahap. Proses ini ditujukan untuk membentuk individu yang gigih dan siap untuk melaksanakan metode dakwah partai.[50] Untuk kepentingan itu, PKS melembagakan proses kaderisasi ke dalam konstitusi partai. Partai ini menyatakan, misalnya, bahwa pelaksanaan kaderisasi adalah salah satu kewajiban utama dewan pengurus di setiap level kepengurusan. Melalui Departemen Kaderisasi, PKS menerbitkan materi untuk kaderisasi, di mana materi kaderisasi Jamaah Tarbiyah menjadi rujukan utamanya.[51] Adanya kaderisasi sistematis ini memberikan kontribusi penting dalam menjaga rasa kebersamaan, semangat persaudaraan, saling memercayai, dan keyakinan atas kebenaran tujuan gerakan. Sebagaimana yang akan dijelaskan di Bab X, situasi ini pada akhirnya memainkan peranan penting dalam memperkuat kemampuan partai untuk mempertahankan soliditas dan menghindari konflik internal yang berkepanjangan.

C. Struktur Organisasi

Dalam struktur organisasi PKS, Majelis Syura (MS) merupakan badan terpenting. Sebelum tahun 2003, MS merupakan badan terpenting kedua setelah Musyawarah Nasional (Munas). Namun, mengingat Munas hanya dilangsungkan sekali setahun, akan sulit bagi partai untuk dapat memberikan respons cepat yang dibutuhkan apabila masih bertumpu pada lembaga ini. Akhirnya, partai memutuskan bahwa Munas adalah sarana atau forum dalam proses pengambilan keputusan dan bukan sebagai bagian struktur partai. Dalam anggaran partai, MS disebut sebagai *Ahlul Halii wal-Aqdi*

---

[50] Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani: Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera*, 36.

[51] Bagian terbesar buku yang digunakan dalam proses ini ditulis tokoh-tokoh terkemuka IM atau setidaknya berisi gagasan-gagasan mereka, lihat di Tim Departemen Kaderisasi PK-Sejahtera, *Manajemen Tarbiyah Anggota Pemula*, (Jakarta: DPP PKS Departemen Kaderisasi dan PT Syaamil Cipta Media, 2005).

(Majelis Permusyawaratan)[52], yang menempatkan badan ini pada posisi tertinggi. Anggota partai ini terdiri dari para pakar atau ahli yang diseleksi oleh kader inti, yakni kader yang paling mumpuni dan berada pada tingkat teratas dalam jenjang kader, melalui Pemilihan Raya untuk masa bakti lima tahun. Keberadaan MS secara substansial mencerminkan sebuah irisan antara kepentingan untuk menjaga agar organisasi ini tetap sejalan dengan kepentingan Islam dan menghadirkan sebuah badan yang aspiratif

Arti penting lembaga ini terkait dengan fungsinya sebagai penentu landasan kebijakan partai yang akan diemban selama lima tahun ke depan. MS juga menentukan figur-figur yang akan mengisi jabatan penting partai dalam lembaga-lembaga tinggi partai lainnya, termasuk posisi pimpinan dalam Majelis Pertimbangan Partai (MPP), Dewan Pengurus Partai (DPP), dan Dewan Syariah (DS), serta mereka yang akan masuk dalam Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP). Posisi Majelis Syura akhirnya lebih dari sekadar badan legislatif, mengingat lembaga ini juga menuntun proses pembuatan kebijakan dan memiliki kewajiban untuk merespons hal-hal yang dianggap penting dan segera. Lebih dari itu, karena sifatnya yang konsultatif dengan semangat kolegial, lembaga ini kerap berperan dalam penanganan konflik. Badan ini memainkan peran dalam menyelesaikan berbagai persoalan pelik yang dihadapi oleh partai, termasuk dalam soal penyikapan terhadap posisi partai dalam pemerintahan. Sebagaimana yang akan dibahas dalam bagian-bagian selanjutnya. MS juga memainkan peran untuk menentukan calon dalam pemilihan presiden dan menegaskan sikap politik partai tentang kasus-kasus yang terkait dengan situasi politik nasional.

Sementara itu, Musyawarah Majelis Syura (MMS), sebagai forum pengambilan keputusan dalam Majelis Syura, menjadi forum paling penting karena perannya dalam menetapkan kebijakan-kebijakan mendasar. MS menggelar forum ini setidaknya dua kali setahun. Setiap anggota PKS harus menaati dan melaksanakan berbagai

---

[52] *ART PK Pasal 18; AD PKS 2002 Pasal 10 dan 12; AD PKS 2005 Pasal 11.*

kebijakan yang dibuat forum ini. Forum pengambilan keputusan kedua yang penting adalah Musyawarah Nasional. Forum ini diselenggarakan untuk merespons perkembangan politik saat ini dan biasanya melibatkan berbagai unsur di luar MS. Pertemuan ini diselenggarakan sekali dalam setiap lima tahun untuk menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai, arahan kebijakan partai, rencana strategis partai, dan menilai berbagai kebijakan penting lain di tingkat nasional.

Hingga sekarang ini, Salim Segaf Al-Jufri dan Hilmi Aminuddin adalah dua tokoh yang pernah menduduki jabatan Ketua Majelis Syura.[53] Keduanya merupakan bagian generasi pertama Jamaah Tarbiyah yang dikenal sebagai *murabbi* (mentor) bagi sebagian besar kader senior Jamaah Tarbiyah PKS. Situasi ini mecerminkan adanya keterikatan dan sekaligus keberlanjutan Jamaah Tarbiyah di PKS. Posisi kedua tokoh juga menunjukkan peran penting tokoh-tokoh senior, khususnya para mentor senior dalam proses pengambilan keputusan di PKS. Hal ini menunjukkan adanya sebuah rantai komando di dalam partai ini, di mana senioritas dan kualitas keagamaan menjadi kualifikasi yang melegitimasi seseorang dapat duduk dalam posisi tertinggi di partai.

Meskipun demikian, situasi ini tidak berarti mendorong terbangunnya kehidupan otoritarian. Hal ini dikarenakan tidak saja keberadaan mereka sebenarnya juga ditentukan oleh kader-kader yang lain melalui sebuah prosedur pemilihan raya yang demokratis dan melibatkan puluhan ribu peserta (kader), tetapi secara internal juga terikat dengan aturan main yang membatasi terjadinya keputusan yang eksklusif. Kemudian, keberadaan lebih dari 50 orang anggota jelas mendorong lebih banyak pendapat, mereduksi kemungkinan munculnya kepemimpinan yang bersifat individual atau *one-man show* sehingga secara prosedural menutup terjadinya keputusan yang otoriter. Selain itu, partai ini juga memberikan mekanisme sistematis

[53] "PKS Gelar Pemilihan Raya Majelis Syura", *Media Indonesia*, 22 Februari 2010.

untuk memecat ketua umum dan anggota MS yang menunjukkan keberadaan kontrol internal atas badan ini.

Sebagai badan pekerja lembaga ini, dibentuklah Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) yang diketuai Ketua MS.[54] Badan ini beranggotakan Ketua MPP, Ketua Dewan Syariah Pusat, Presiden DPP, Sekretaris Jenderal DPP, dan Bendahara DPP. Tugas utama DPTP adalah melaksanakan berbagai kebijakan MS, merekomendasikan figur-figur yang akan mewakili partai dalam lembaga-lembaga negara dan berbagai aktivitas penting yang mewakili partai, merekomendasikan kepada DPP untuk melakukan pembekuan atas sebuah kepengurusan di level wilayah, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja MPP, DS, dan DPP. Mengingat tugas yang diembannya dan fleksibilitas yang dimilikinya, terkait dengan jumlah anggota yang hanya enam orang, keberadaan lembaga ini memainkan peran yang strategis, bahkan kerap dianggap sebagai bayangan dari keberadaan Majelis Syura. Meski demikian, secara prosedural DPTP bertanggung jawab terhadap Majelis Syura. Ini menyebabkan pada akhirnya DPTP pun tidak dapat membuat keputusan sepihak. Dalam anggaran dasar disebutkan bahwa baik Majelis Syura maupun Dewan Pimpinan Tingkat Pusat hanya ada dalam kepengurusan partai level nasional.

Lembaga tinggi lainnya adalah MPP.[55] Lembaga ini berperan layaknya sebuah lembaga kehakiman. MPP berdiri sejajar dengan DPP dan DS. Tugas utama lembaga ini adalah memberikan pertimbangan dan supervisi kepada DPP dan DS atas kebijakan yang dikeluarkannya agar tetap sejalan dengan tujuan partai dan ketetapan Majelis Syura dan Musyawarah Nasional. Lembaga ini bertanggung jawab melakukan sosialisasi pedoman partai kepada seluruh anggota sehingga terdapat sebuah keseragaman dalam menginterpretasikan kedudukan AD/ART dan kebijakan partai. MPP bertugas selama lima tahun dan bertanggung jawab kepada Majelis Syura. Arti penting

---

[54] *AD PKS 2005 Pasal 12.*

[55] *AD PK Pasal 13 dan 14; ART PK Pasal 20 dan 21; AD PKS 2002 Pasal 13; ART PKS 2002 Pasal 8 dan 9; AD PKS 2005 Pasal 13; ART PKS 2005 Pasal 15 dan 16.*

lainnya dari keberadaan badan ini adalah menghindari terjadinya penafsiran personal atau eksklusif mengenai aturan main partai.

Berkenaan dengan DSP,[56] fungsi utama badan ini adalah memberikan fatwa atas segenap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh partai berdasarkan hukum Islam. Lembaga ini menjadi tempat rujukan mengenai hal-hal yang terkait dengan hukum Islam yang harus dipatuhi oleh semua anggota partai. Selain terkait dengan hal-hal yang bersifat hukum Islam, lembaga ini berfungsi pula sebagai lembaga arbitrase atas persoalan yang menyangkut status hukum seorang anggota.[57] Sehubungan dengan itu, penyelesaian kasus pemecatan atau pemberhentian anggota diselesaikan dalam lembaga ini. Dalam praktiknya, lembaga ini, sebagaimana yang akan dibahas pada bagian selanjutnya, banyak memainkan peran dalam persoalan yang terkait dengan resolusi konflik. DSP bersifat independen dan bertanggung jawab kepada MS. Sifat independen ini diharapkan dapat menghindari masuknya kepentingan lembaga lain dan menjaga objektivitas lembaga ini dalam mengambil sebuah keputusan.

Lembaga penting kelima dalam PKS adalah DPP. Lembaga ini berperan sebagai pengelola keseharian kehidupan partai dan pelaksana bagi keputusan Majelis Syura. Meski ketua badan ini disebut sebagai Presiden Partai, DPP bukanlah lembaga tertinggi dalam pembuatan keputusan. Malah dapat dikatakan lembaga ini hanya merupakan pelaksana atas segenap kebijakan yang telah digariskan. Lembaga ini wajib memberikan laporan kegiatannya kepada MS setiap enam bulan sebagai mekanisme kontrol atas dirinya. Budaya politik PKS yang mengutamakan persaudaraan dan aturan main yang jelas menyebabkan fungsi presiden partai tidak dapat digunakan sebagai pintu masuk untuk memunculkan kebijakan alternatif atau kebijakan yang melawan Majelis Syura sebagaimana yang terjadi di

[56] *AD PK Pasal 19 dan 20; ART PK Pasal 24, 25, 26, 27 dan 28; AD PKS 2002 Pasal 14, 15 dan 16; ART PKS 2002 Pasal 10, 11, 12 dan 13; AD PKS 2005 Pasal 15; ART PKS 2005 Pasal 23, 24, 25 dan 26.*

[57] *ART PK Pasal 27 (3); ART PKS 2002 Pasal 12 (3); ART PKS 2005 Pasal 23 (2.c), Pasal 23 (2.f), Pasal 50 (d).*

beberapa partai lain. Anggaran dasar partai juga menyatakan bahwa DPP berkewajiban untuk melakukan kaderisasi dan melaksanakan metode tarbiyah.[58] Karena alasan ini, DPP berkewajiban mengawasi Departemen Kaderisasi yang memegang kewajiban spesifik sebagai koordinator kaderisasi.[59] Setiap dewan pengurus di setiap tingkat pengurus memiliki kewajiban untuk melakukan proses kaderisasi.

DPP berkewajiban pula membentuk Dewan Pengurus Partai hingga level kabupaten. Atas dasar itu secara organisasi, DPP juga memiliki wewenang untuk melakukan pembekuan kepengurusan di level yang sama. Lembaga ini juga memiliki otoritas untuk membuat rekomendasi dan melakukan pemecatan terhadap seorang anggota yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Walau demikian, dalam AD/ART partai dinyatakan bahwa setiap anggota partai memiliki hak untuk dilindungi keberadaannya secara hukum. Oleh karena itu, setiap anggota dapat melakukan banding atas keberatan yang ada, termasuk dalam soal pemecatan. Badan yang nantinya akan berperan besar dalam proses ini adalah DS. Terkait dengan pemecatan ini, beberapa kader penting dalam partai ini telah dipecat oleh partai. Hal ini menunjukkan bahwa partai sebenarnya sungguh-sungguh melaksanakan disiplin partai yang adil. Masalah pemecatan ini akan dikaji khusus dalam bagian selanjutnya.

Struktur organisasi di kepengurusan lokal berbeda dengan struktur di tingkat nasional nasional. Pengurus partai di tingkat provinsi (Dewan Pengurus Wilayah/DPW) dan tingkat kabupaten (Dewan Pengurus Daerah/DPD) hanya memiliki tiga badan yaitu MPP, DS, dan Dewan Pengurus. Sementara pada kepengurusan di tingkat kecamatan (Dewan Pengurus Cabang/DPC) dan di tingkat desa (Dewan Pengurus Ranting/DPRa) hanya terdapat Dewan Pengurus. Setiap badan di setiap tingkat kepengurusan harus membuat laporan

---

[58] *ART PK Pasal 22 (15); ART PKS 2002 Pasal 17 (3); AD PKS 2005 Pasal 22 (c).*

[59] Meski demikian, karena setiap anggota PKS juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan metode *tarbiyah* dan berperan aktif di dalam proses kaderisasi, Departemen Kaderisasi pada akhirnya cenderung menjadi badan pengawas kaderisasi.

pertanggungjawaban ke badan yang sama di tingkat yang lebih tinggi. Hal ini membuat MPP, DSP, dan DP di tingkat nasional berperan sebagai pusat pertanggungjawaban. Model kepengurusan semacam ini pada akhirnya menempatkan MS sebagai *supreme body* yang menjadi penjuru utama dalam kehidupan berpartai mulai dari level bawah hingga atas. Susunan ini memperlihatkan hubungan hierarkis antara tingkatan kepengurusan, sementara di sisi lain memperlihatkan hubungan kolegial dan kesederajatan di antara lembaga-lembaga pada level kepengurusan yang sama. Setiap tingkat pengurus berhak melakukan rapat yang akan menjadi referensi.

D. Aktivitas Politik

Kurang dari satu tahun setelah pendiriannya, PKS berpartisipasi dalam pemilu pertama di era Reformasi. Pada Pemilu 1999, PKS memperoleh 1,4 juta suara yang menjadikan partai ini sebagai partai Islam terbesar kelima di Indonesia. PKS kemudian menjadi bagian Fraksi Reformasi bersama dengan PAN[60] yang diketuai tokoh terkemuka gerakan reformasi Prof. Dr. M. Amien Rais. Keputusan untuk bergabung dengan PAN menunjukkan komitmen PKS untuk memperjuangkan agenda reformasi bersama dengan Amien Rais.

Pada pemerintahan Presiden Gus Dur, pemerintahan pertama di era Reformasi, PK menempatkan presidennya, Dr. Nurmahmudi Ismail, sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Diperolehnya posisi pembantu presiden ini merupakan simbol keberhasilan pertama gerakan tarbiah dalam perjuangannya memasuki sistem politik

[60] PKS pada awalnya menolak tawaran dari sejumlah partai gurem, yaitu *Partai Kebangkitan Ulama* (PKU), *Partai Kebangkitan Ummat* (PKU), *Partai Politik Islam Masyumi* (PPII-Masyumi), *Partai Sarekat Islam Indonesia* (PSII), dan *Partai Daulat Rakyat* (PDR), untuk membentuk semacam fraksi Islam di parlemen. Walaupun kemungkinan untuk memperoleh posisi pimpinan DPR RI melalui fraksi ini cukup terbuka karena memiliki suara paling besar dibanding partai-partai itu, namun PKS lebih suka bergabung dengan Fraksi Reformasi dengan alasan-alasan yang telah disebutkan. Partai-partai Islam ini kemudian membentuk fraksi sendiri, yaitu *Fraksi Daulah Ummat*. Noor, *Moderate Islamic Fundamentalism in Indonesia: A Study of Political Thinking and Behaviour of the Prosperous Justice Party (PKS), 1998–2005*, 96.

setelah sekian lama menjadi kelompok bawah tanah. Keinginan Nurmahmudi untuk mengelola kementerian yang dipimpinnya secara profesional dan mengurangi korupsi di salah satu kementerian yang paling korup menunjukkan pula komitmen Jamaah Tarbiyah dalam memberikan kontribusi positif terhadap pemerintahan nasional. Perilaku politik Nur Mahmudi menaikkan citra PKS sebagai partai antikorupsi. Namun, posisi Ismail tidak berlangsung lama. Dia termasuk satu dari menteri yang tersingkirkan pada *reshuffle* kabinet Gus Dur di tahun 2001. Nurmahmudi digantikan oleh Marzuki Usman, salah satu politisi kawakan yang juga teman dekat Presiden.

Berkaitan dengan gerakan antikorupsi, partai ini telah cukup banyak berperan dalam pemberantasan korupsi dan upaya menyelamatkan uang negara. Selama lima tahun pertama Reformasi, misalnya, partai ini menyelamatkan uang negara sejumlah Rp739,6 juta[61] dari penyalahgunaan, penyuapan, dan gratifikasi. Karena komitmen ini, Ricklefs, misalnya, pernah menyebut PKS sebagai harapan bagi rakyat Indonesia untuk mengakhiri korupsi dan untuk kompetensi dan moralitas yang lebih besar di dalam pemerintahan.[62] Setelah pemecatan Presiden Gus Dur, partai ini memfokuskan aktivitasnya pada perbaikan internal dan secara halus menolak bergabung dengan pemerintahan Presiden Megawati.

Selain capaian politik di atas, pada lima tahun awal Reformasi, PKS sebagai partai Islam bersikap terbuka dengan membangun koalisi strategis dengan berbagai kalangan, termasuk kelompok politik sekuler dan Kristen. Hal ini tercermin dari kerja sama yang dibangun dengan PDS, sebuah partai Kristen yang didirikan oleh aktivis gereja dan pendeta, pada pemilu lokal di Papua. Dalam melakukan hal tersebut, PKS meyakini bahwa membangun hubungan strategis, sebagai bagian dari *musyarakah* (partisipasi politik), dengan berbagai

---

[61] *Bisnis Indonesia,* 29 April 2004.

[62] M.C. Ricklefs, "Islamizing Indonesia: Religion and Politics in Singapore's Giant Neighbour", *Public Lecture* di Asian Civilisations Museum, 23 September 2004.

kelompok politik untuk melindungi kepentingan umat Islam[63] dan menunjukkan Islam sebagai solusi[64] tidak hanya dibolehkan, tetapi juga sejatinya adalah bagian dari jihad.[65]

PKS juga menunjukkan komitmennya pada masalah-masalah kemanusiaan dengan membantu menggalang dana bagi korban bencana dan mengirimkan kader-kadernya untuk membantu korban di wilayah-wilayah yang terkena bencana. Komitmen ini juga diperlihatkan dengan pendirian pos kepedulian dan aktivitas sosial.[66] Partai ini menunjukkan solidaritas dan perhatian yang cukup tinggi terhadap umat Islam di dunia, khususnya di wilayah konflik, seperti Palestina, Irak, dan Afganistan, yang kemudian diikuti dengan pengumpulan dana untuk didonasikan bagi rakyat di negara-negara tersebut. Bentuk-bentuk kepedulian dan perhatian ini menunjukkan PKS tidak membatasi keberadaannya dengan urusan kekuasaan saja atau semata sebagai mesin politik.[67] Aktivitas ini sesuai dengan doktrin *syumuliatul Islam* yang menempatkan Islam sebagai solusi bagi umat manusia. Selain itu, upaya ini terkait pula dengan upaya memberikan keteladanan bahwa kader-kader Partai Islam mampu berperan sebagai sebuah bagian dari solusi.

Pada Pemilu 2004, PKS mampu meningkatkan jumlah suara sebanyak tujuh kali lipat dari pemilu sebelumnya. PKS memperoleh suara sebanyak 8,3 juta suara atau setara dengan 45 kursi. Hasil tersebut menempatkan partai ini pada posisi enam besar dari 18 partai yang ada di DPR RI. Pencapaian politik yang signifikan ini diikuti dengan keberhasilan lain, yakni terpilihnya Dr. Hidayat Nur

---

[63] Balda, Ridho dan Wahono, *Politik Da'wah Partai Keadilan*, 135–144.

[64] Menurut Hidayat Nur Wahid, jihad mencakup sikap *muwajaha* (berperang terhadap) dan *musyarakah* (terlibat di dalamnya) agar dapat memperjuangkan gagasan-gagasan Islam. Lihat "Meneguhkan Trilogi Perjuangan", *Saksi*, No.14/VI/12 Mei 2004.

[65] *Ibid.*

[66] Noor, *Moderate Islamic Fundamentalism in Indonesia: A Study of Political Thinking and Behaviour of the Prosperous Justice Party (PKS), 1998–2005*, 112.

[67] Firman Noor, "Kegagalan Partai Politik Menarik Simpati Rakyat: Urgensi Sebuah Paradigma Baru Partai Politik", *Jurnal Politik*, (Jakarta: LIPI Press, 2007).

Wahid, presiden kedua partai ini, menjadi Ketua MPR RI, sebuah posisi yang pada waktu itu masih terhitung paling prestisius dalam sistem politik Indonesia.

Berkenaan dengan Pemilihan Presiden 2004, PKS membangun koalisi dengan PD, partai baru yang mengklaim berideologi nasionalis religius, PBB yang merupakan kelanjutan dari Masyumi, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), partai nasionalis yang didirikan oleh kelompok sempalan Partai Golkar, pada tahap kedua pemilihan tersebut. Koalisi ini mencalonkan Jenderal (Purn.) Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla sebagai kandidat Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan ini kemudian memenangi pemilu itu dengan margin yang signifikan.

Walaupun demikian, Pemilu Presiden 2004 memberikan catatan tersendiri bagi PKS. Untuk pertama kalinya, partai ini menunjukkan sebuah dinamika internal yang dapat dilihat sebagai sebuah potensi fragmentasi internal. Hal ini terkait dengan munculnya perdebatan tentang siapa kandidat presiden pada putaran pertama pilpres yang akan didukung oleh partai ini. Sebagian kalangan menginginkan Amien Rais, tokoh Islam dan mantan Pemimpin Muhammadiyah. Alasan utama pencalonan Amien Rais, tokoh reformasi dan mantan Ketua MPR ini, adalah mengingat komitmennya terhadap reformasi, pemerintahan yang bersih, dan terhadap nasib umat Islam. Sementara beberapa kalangan di partai ini memilih Jenderal Wiranto, mantan Panglima ABRI, yang dicalonkan oleh Partai Golkar. Alasan dipilihnya Wiranto terkait dengan posisi sebagai mantan orang nomor satu dalam jajaran militer yang dapat menjamin efektivitas pemerintahan dan dapat menghapuskan *image* pertentangan antara kalangan Islam dan militer. Selain itu, Wiranto juga di akar rumput lebih populer ketimbang Amien Rais. Apalagi, Golkar pada pemilu 2004 merupakan partai terbesar yang diperkirakan dapat memenangkan pertarungan pilpres.

Perdebatan ini sempat memunculkan spekulasi perpecahan internal mengingat masing-masing kubu memiliki argumentasi dan

upaya serius untuk memperjuangkannya. Walaupun kedua kubu sebenarnya mendasarkan pilihan atas kepentingan umat Islam, namun tafsiran yang menjelaskan pertarungan ini sebagai perselisihan antara "kubu idealis" yang mendukung Rais dan "kubu pragmatis" yang lebih menjagokan Wiranto tidak dapat dihindari. Meski demikian, perbedaan pandangan itu tidak berlangsung lama. Setelah dilakukan Musyawarah Majelis Syura, PKS akhirnya secara formal mendukung Rais. Rais sendiri akhirnya tidak berhasil menjadi presiden.

Di putaran kedua Pemilihan Presiden, PKS menjadi lebih solid dan memutuskan untuk mendukung SBY. Pilihan ini tidak menimbulkan perselisihan. SBY pun bersedia menandatangani kontrak politik antara dia dan PKS yang terdiri dari agenda reformasi, seperti membangun demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Kemudian, SBY yang menganggap dirinya dan partainya sebagai representasi pandangan nasionalis religius lebih dapat diterima daripada mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang secara ideologis mewakili kubu nasionalis sekuler. Sebagaimana yang banyak diprediksikan, SBY akhirnya memenangkan proses pemilihan. PKS memperoleh tiga posisi menteri di pemerintahan SBY.[68] Walaupun PKS berupaya menjadi mitra objektif dan bahkan kadang-kadang mengkritisi pemerintahan SBY, PKS adalah salah satu sekutu penting pemerintahan ini dan tetap loyal hingga akhir masa pemerintahan. Masa pemerintahan SBY ini juga menyaksikan kegagalan dan keberhasilan PKS di kancah perpolitikan lokal. Sejumlah kader, untuk pertama kali, berhasil memenangi kursi gubernur, bupati, atapun wali kota di beberapa daerah.

Pada Pemilu 2009, PKS memperoleh 8,2 juta suara dan menduduki partai keempat terbesar di parlemen (lihat Tabel 4.1). Sebelum Pemilu Presiden 2009, PKS bersama dengan PD, pemenang Pemilu 2009, dan partai-partai Islam lain, yaitu PAN, PPP, dan PKB, membangun koalisi yang mencalonkan pasangan SBY dan Prof.

---

[68] Yaitu Kementerian Pertanian (Dr. Anton Apriantono), Kementerian Perumahan (M. Yusuf Ansyari), dan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Dr. Adyaksa Dault).

Dr. Boediono, mantan Gubernur Bank Indonesia. Kemenangan pasangan SBY-Boediono ini memberikan empat jabatan menteri ke PKS di dalam kabinet, yaitu Kementerian Pertanian (Suswono), Kementerian Sosial (Salim Segaf Al-Jufri), Kementerian Riset dan Teknologi (Suharna Surapranata), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Tifatul Sembiring). Pencapaian ini menunjukkan keberlanjutan peran PKS di dalam pemerintahan nasional.

Setelah Pemilu 2004, PKS berupaya menjadi partai terbuka dan menegaskan komitmennya terhadap pluralisme. Pada tahun 2008, misalnya, PKS merayakan 100 tahun Kebangkitan Nasional. Perayaan yang sebenarnya juga memperingati kelahiran Boedi Oetomo, yang didirikan di Jakarta pada 20 Mei 1908 oleh kelompok Aristokrat Jawa, yang selama ini diakui secara nasional sebagai organisasi pertama yang memperjuangkan dan menyebarkan nasionalisme.

Keterlibatan PKS dalam peringatan ini menunjukkan tidak saja partai ini turut "merayakan" kebangsaan, sesuatu yang tidak sepenuhnya diterima kelompok Islam "sayap kanan", tetapi juga mengakui peran Boedi Oetomo, sebuah organisasi yang sebenarnya memiliki kecenderungan anti-Islam dan secara historis tidak memiliki fungsi yang signifikan dalam mengembangkan nasionalisme. Statuta organisasi ini, misalnya, menyebutkan keberadaannya sebagai alat perjuangan untuk kepentingan masyarakat Jawa dan Madura dan tidak untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam statuta Pasal 2 disebutkan bahwa keberadaan organisasi adalah "*de harmonische ontwikkeling van land en volk van Java en Madura"*. Dengan mengakui Boedi Oetomo, PKS di lain pihak tampak seolah mengecilkan peran Sarekat Islam, organisasi Islam yang berjuang untuk kepentingan seluruh pribumi sejak awal keberadaannya.

Kemudian, selama Musyawarah Nasional 2008 yang diselenggarakan di Bali, partai ini membuka wacana partai terbuka. Hal ini berarti PKS dapat menerima keberadaan unsur non-Islam untuk

Tabel 4.1 Perbandingan Hasil Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 (Sepuluh Besar Partai Politik)

Pemilu 2004				Pemilu 2009			
Parpol	Suara	%	Kursi	Parpol	Suara	%	Kursi
PG	24.480.757	21.6	127	PD	21.703.137	20.1	150
PDIP	21.026.629	18.5	109	PG	15.037.757	14.5	107
PKB	11.989.564	10.6	52	PDIP	14.600.091	14.0	95
PPP	9.248.764	8.2	58	PKS	8.206.955	7.9	57
PD	8.455.225	7.5	56	PAN	6.254.580	6.0	43
PKS	8.325.020	7.3	45	PPP	5.533.214	5.3	37
PAN	7.303.324	6.4	53	PKB	5.146.122	4.9	27
PBB	2.970.487	2.6	11	Gerindra	4.646.406	4.5	26
PBR	2.764.998	2.4	14	Hanura	3.922.870	3.8	18
PDS	2.414.254	2.1	13	PBB	1.864.752	1.8	0
Lain-lain	8.021.758	7.1	12	Lain-lain	17.183.901	16.5	0
Total	113.462.414	100.0	550	Total	104.099.785	100.0	560

Sumber: *Komisi Pemilihan Umum*

terlibat dan berpartisipasi di dalam aktivitas partai.[69] Bagi sejumlah kalangan, selama ini PKS telah mampu memperlihatkan diri sebagai partai yang bersih dan peduli,[70] dan sekaranglah saatnya menjelma menjadi institusi politik yang lebih ramah bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjadi partai terbuka diharapkan juga dapat mempercepat integrasi PKS dengan unsur-unsur nasional lainnya.[71] Meskipun demikian, setelah muncul berbagai reaksi yang mencerminkan ketidaksiapan mayoritas aktivis tarbiyah untuk menerima PKS sebagai partai terbuka, wacana ini tidak secara formal dideklarasikan.

Namun, dua tahun kemudian, tepatnya pada saat penyelenggaraan MMS 2010, PKS mendeklarasikan dirinya sebagai partai Islam

[69] Lihat R.B. Suryama M. Sastra, "Mukernas PKS 2008", dalam *images.suryama.multiply.com*

[70] Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani: Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera*, 56.

[71] *Ibid.*, 75. Sastra, "Mukernas PKS 2008".

terbuka. Menurut Hilmi Aminuddin, Ketua MS, kebijakan ini bukan sekadar strategi untuk menarik minat kalangan non-muslim untuk memenangi pemilu. Sebaliknya, kebijakan ini mencerminkan komitmen akan keterbukaan dalam politik berdasarkan semangat mengakui keberagaman sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam.[72]

Sikap moderat dan upaya untuk terbuka PKS menimbulkan bermacam respons. Di satu sisi, beberapa kalangan melihat sikap PKS itu sebagai bentuk kematangan dan kedewasaan berpolitik. Apalagi secara ideologi sikap itu ditopang oleh konsep dasar dakwah yang mensyaratkan sebuah sikap yang moderat. Sikap ini juga dianggap wajar sebagai konsekuensi logis dari sebuah keinginan untuk eksis dalam percaturan politik. Sikap PKS ini juga dinilai sebagai strategi yang normal bagi satu partai yang berupaya mencari lebih banyak suara di negara yang sebagian besar penduduknya masih asing dengan ide-ide politiknya.[73] Di sisi lain, sebagian pihak menilai sikap moderat politik PKS sebagai sebuah langkah oportunis-pragmatis yang mengorbankan agenda Islam hanya demi kemenangan politik sementara. Mereka juga melihat sikap ini menunjukkan inkonsistensi dalam melaksanakan cita-cita dasar partai.

Kesan inkonsistensi juga terlihat dalam soal merespons kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM pemerintah. Selama era pemerintahan Megawati, PKS aktif menunjukkan sikap tegas menolak kebijakan itu, yang umumnya dianggap sebagai kebijakan yang tidak ramah kepada kaum papa. Namun, sikap PKS terlihat melunak selama era Presiden SBY, ketika PKS menjadi bagian pemerintah. Walaupun secara teoretis pengurangan subsidi dibutuhkan agar dapat meningkatkan efisiensi keuangan pemerintah, bagi masyarakat akar rumput, kebijakan ini bukan sesuatu yang populer dan harusnya menjadi opsi terakhir. Sebagian besar kalangan pada waktu itu

[72] "Ketua Majelis Syura: Kami Ingin Membangun Kebersamaan dan Keseragaman", *Republika*. 22 Juni 2010.

[73] Ignacio Sanchez-Cuenca, "Party Moderation and Politician's Ideological Rigidity", dalam *Party Politics*, 10:3, 325–342. Saban Taniyici, "Transformation of Political Islam in Turkey: Islamist Welfare Party's Pro-EU Turn", dalam *Party Politics*, 9:4, 463–483.

meyakini bahwa apabila pemerintah dapat mengurangi inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara dan secara efektif mengurangi korupsi, kebijakan itu sebenarnya dapat dihindari, setidaknya untuk sementara.

Sejumlah kelompok idealis mulai tidak sabar dengan sikap politik PKS yang mereka anggap tidak sensitif. Dalam kasus BBM, sebagian di antaranya mengajukan opsi untuk meninggalkan koalisi.[74] Mereka berkeyakinan bahwa untuk menyelamatkan partai, langkah yang terbaik adalah keluar dari koalisi. Namun kenyataannya, PKS mengambil langkah untuk tetap berada dalam koalisi. Sementara itu, capaian-capaian politik di level lokal di mana PKS menjadi pemenang belum sepenuhnya memberikan hasil yang menggembirakan. Meski kemenangan PKS tidaklah mutlak, dan justru kerap menjadi musuh bersama yang menyulitkan PKS dalam menjalankan kebijakannya terutama karena sikap partai yang keras dan tidak kompromi terhadap korupsi,[75] pada umumnya masyarakat mengkritisi PKS karena kurangnya upaya untuk menciptakan reformasi yang signifikan ketika berada di tampuk kekuasaan.[76]

Seiring dengan perjalanan waktu, kritik berbagai kalangan belakangan menjadi lebih terbuka pada partai ini. Kalangan ini tidak saja berasal dari eksternal, tetapi juga kalangan internal dan bahkan beberapa di antaranya merupakan mereka yang pernah aktif dalam partai. Keberadaaan Forum Kader Peduli (FKP) dan PKS-Watch merupakan contoh kalangan pendukung partai yang kemudian menjadi kalangan pengkritik. Kalangan ini pada umumnya mengkritisi "lompatan ideologis" yang terlampau jauh dalam upaya PKS merespons perkembangan politik yang ada. Bagi mereka, PKS

---

[74] Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta dan anggota DPR RI Mashadi menjadi tokoh utama yang mendukung opsi ini. Tentang *Matta's opinion to opt out from the coalition*, lihat "Tak Ada Koalisi Tanpa Perubahan", di *Saksi*, No.6/VIII/30 November 2005, 7–9. Lihat juga "Ini Politik Bos", *Tempo*, 16 Oktober 2005.

[75] Noor, *Moderate Islamic Fundamentalism in Indonesia: A Study of Political Thinking and Behaviour of the Prosperous Justice Party (PKS), 1998–2005*, 36–37.

[76] Amir J. Piliang, "Manusia dan Politik PKS", *Media Indonesia*, 27 July 2005.

sekarang ini adalah sebuah partai yang berbeda dan telah menjadi korban kepentingan politiknya sendiri.

Meski banyak mendapatkan kritik, PKS tetap mampu mempertahankan eksistensinya dan terhindar dari perpecahan. Pun meski perbedaan pendapat tidak dapat dihindari dan kerap terjadi, PKS dapat menghindari munculnya faksionalisasi internal. Pada bagian selanjutnya akan diketengahkan mengapa PKS relatif mampu membangun soliditas internal dan menjadi salah satu partai Islam yang besar serta mampu menghindari fragmentasi meski hampir seluruh partai Islam utama mengalaminya.

E. Ringkasan

PKS merupakan partai dakwah yang berupaya memadukan gagasan universal Islam dengan cara-cara moderat di bidang politik. Dalam praktiknya, ini bukanlah sebuah tugas yang mudah. Walaupun partai ini memperoleh citra yang cukup positif, PKS juga mendapatkan banyak kritik, terutama karena strategi politiknya. Cara-cara moderat yang diyakini PKS sebagai sebuah pilihan ideologis kerap dinilai sebagian kalangan sebagai cara pragmatis yang mengorbankan idealisme demi peningkatan jumlah suara. Sebagai sebuah partai ideologis, perdebatan yang kerap membawa gesekan internal tidak dapat dihindari. Perdebatan biasanya terkait dengan tafsiran ideologi partai atas berbagai masalah yang berkembang, baik dalam tataran internal maupun eksternal. Sebenarnya perselisihan internal itu cukup berpotensi menciptakan sebuah konflik berkepanjangan dan bahkan perpecahan partai seperti yang terjadi di PSII pada periode 1930-an. Walaupun demikian, PKS masih dapat mempertahankan soliditasnya. Bab-bab berikutnya akan membahas kemampuan partai ini menjaga soliditasnya, yang membuat PKS selama dekade pertama era Reformasi menjadi partai Islam yang dapat menghindari perpecahan internal.

BAB V
KEPEMIMPINAN PERSONAL: PKB DALAM BAYANG-BAYANG TOKOH SENTRAL

> Pengelolaan partai yang jauh dari modern memberikan ruang bagi partai untuk mengabaikan aturan main dalam proses pengambilan keputusan, yang kemudian menyebabkan terjadinya pengkubuan antara kelompok yang diuntungkan oleh situasi dengan yang tidak (Ali Masykur Musa).[1]

Bab ini akan membahas salah satu unsur pelembagaan partai yaitu kepemimpinan prosedural. Kepemimpinan prosedural mensyaratkan pelaksanaan aturan main di dalam seluruh proses pengambilan keputusan. Hal ini tidak saja berarti partai harus memiliki kepedulian tentang peran aturan main dalam pembuatan keputusan, tetapi juga mengakuinya sebagai satu masalah yang penting. Dengan kata lain, kepemimpinan prosedural berarti konsistensi dalam membuat dan melaksanakan kebijakan yang didasarkan pada aturan main internal. Bab ini akan membahas proses pengambilan keputusan di PKB, aktor-aktor utama yang terlibat, pelanggaran konstitusional yang terjadi di dalam proses ini, dan dampak yang ditimbulkan.

Kasus-kasus pemecatan pimpinan partai, terutama Ketua Umum Dewan Tanfidz, akan dibahas secara mendalam untuk memberikan gambaran kondisi proses pengambilan keputusan di PKB. Melalui

---

[1] Wawancara dengan Dr. Ali Masykur Musa, Wakil Ketua Dewan Tanfidz (2005–2010) dan Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB-Gus Dur (2008–2009), di Jakarta, 19 Oktober 2010.

penjelasan atas kasus-kasus ini, hubungan antara ketiadaan kepemimpinan prosedural dengan kasus pemecatan dan sejauh mana hal itu berpengaruh pada kemunculan perpecahan akan dilihat. Hipotesis yang melandasi pembahasan bab ini adalah absennya kepemimpinan prosedural akan meningkatkan kekecewaan, mengurangi kepercayaan di antara anggota, dan mendorong resistensi sehingga pada akhirnya meningkatkan kemungkinan perpecahan.

A. Aspek Legal Formal

Proses pengambilan keputusan di PKB terdiri dari dua cara yaitu musyawarah dan pemungutan suara (*voting*).[2] Pengakuan atas cara musyawarah dan *voting* menunjukkan bahwa partai ini mendasarkan mekanisme pengambilan keputusannya dengan melibatkan banyak orang, dan bukan hanya segelintir apalagi satu orang saja. Ada beberapa forum untuk proses ini di PKB. Dari 21 forum musyawarah,[3] terdapat empat forum yang secara langsung melibatkan DPP dalam proses pengambilan keputusan, yaitu muktamar, muktamar luar biasa (MLB), musyawarah kerja nasional (mukernas), dan musyawarah pimpinan (muspim).

Muktamar adalah forum tertinggi di PKB yang mewakili kedaulatan anggota partai. Pertemuan nasional ini diselenggarakan setiap lima tahun dan dihadiri seluruh anggota DPP, perwakilan Dewan Pengurus Wilayah (DPW), dan Dewan Pengurus Cabang (DPC). Muktamar mempunyai banyak kewenangan, yaitu mengevaluasi laporan DPP, membuat dan mengubah AD/ART partai, membuat platform partai untuk periode lima tahun ke depan, memutuskan program dasar partai untuk periode lima tahun ke depan, memilih dan menetapkan ketua umum Dewan Syura, serta memilih dan memutuskan ketua umum Dewan Tanfidz.

---

[2] *AD PKB 1998 Pasal 19 (1)–(2); AD PKB 2000 Pasal 19 (1)–(2); AD PKB 2002 Pasal 19; AD PKB 2005 Pasal 20 (1)–(2); AD PKB 2008 Pasal 20 (1)–(2).*

[3] *AD PKB 2005 Pasal 19 (1); AD PKB 2008 Pasal 19 (1).*

MLB adalah sebuah forum luar biasa untuk memutuskan kebijakan yang penting sebagai respons terhadap situasi yang sangat genting dan khusus. Forum ini didasarkan pada tuntutan lebih dari setengah anggota DPC dan lebih dari setengah jumlah DPW di seluruh Indonesia. Peserta MLB sama dengan peserta muktamar. Setelah tahun 2005, anggaran rumah tangga (ART) PKB dengan tegas menyatakan salah satu kewenangan MLB adalah memecat secara permanen ketua umum Dewan Syura dan ketua umum Dewan Tanfidz; dan memilih ketua umum untuk kedua posisi tersebut.[4]

Mukernas adalah forum yang harus diselenggarakan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun. Fungsi forum ini adalah menilai pelaksanaan kebijakan, membahas kebijakan-kebijakan yang ditetapkan di muktamar, dan membahas masalah-masalah relevan lainnya. Para peserta mukernas adalah anggota DPP dan perwakilan DPW. Pengajuan sebuah kebijakan menjadi sah apabila mukernas dihadiri lebih dari setengah peserta. Muspim adalah forum yang dapat diselenggarakan kapan saja bila diperlukan, terutama untuk membahas perkembangan partai dan situasi politik nasional terkini, yang didasarkan atas usulan sekurang-kurangnya lima anggota Dewan Syura. Para peserta muspim adalah anggota DPP dan ketua DPW. Muspim dapat sah menetapkan kebijakan apabila dihadiri lebih dari setengah peserta.

Ada juga rapat pleno dan rapat gabungan DPP PKB yang berfungsi untuk mengambil keputusan strategis.[5] Rapat pleno ini harus diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan. Para peserta rapat ini adalah unsur Dewan Syura dan Dewan Tanfidz di tingkat DPP. Rapat ini adalah sebuah forum terbatas yang di dalamnya anggota Dewan Syura dan Dewan Tanfidz tingkat nasional bertemu untuk membahas berbagai perkembangan terkini. Karena forum ini sangat terbatas pesertanya, keputusan tidak dapat meng-

---

[4] *ART PKB 2005 Pasal 40 (1.b) dan 40 (1.c); ART PKB 2008 Pasal 42 (1.b) dan 42 (1.c).*

[5] *ART PKB 1998 Pasal 63 (a); ART PKB 2000 Pasal 75 (a); ART PKB 2002 Pasal 79 (1.a)–(1.b); ART PKB 2005 Pasal 83 (1.a)–(1.b). ART PKB 2008 Pasal 86 (1.a)–(1.b).*

gantikan kebijakan yang telah dinyatakan di tingkat musyawarah. Meski demikian, di tingkat praktis, pertemuan ini berperan penting dalam membuat kebijakan-kebijakan strategis dan sebagian di antaranya adalah kebijakan-kebijakan yang kontroversial atau memicu perpecahan internal.

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa setiap keputusan partai di tingkat nasional harus melibatkan DPP. Kebijakan-kebijakan yang fundamental dan mendasar menuntut keterlibatan lebih banyak anggota partai, sementara untuk kebijakan taktis dan sehari-hari dapat melibatkan kelompok terbatas, seperti di muspim. Lebih dari itu, keputusan di PKB akan memiliki status legal dan secara resmi mengikat seluruh anggota apabila ditandatangani empat unsur, yaitu Ketua Umum Dewan Syura, Sekretaris Jenderal Dewan Syura, Ketua Umum Dewan Tanfidz, dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz. Perlu dipahami bahwa anggaran dasar (AD) partai juga menegaskan bahwa DPP memegang otoritas yang luas, menangani hampir seluruh masalah, termasuk, misalnya, penegakan disiplin partai, menentukan nominasi calon anggota parlemen, dan mengurus kegiatan partai.[6] Meski demikian, sayangnya hal ini tidak diimbangi dengan keberadaan mekanisme kontrol yang efektif.[7]

Berkaitan dengan proses pengambilan keputusan, AD/ART partai juga menetapkan tata cara atau mekanisme pemecatan anggota. Menurut ART, partai dapat memecat anggota partai apabila yang bersangkutan melakukan tindakan melawan partai, misalnya, melanggar aturan partai, sengaja tidak menjalankan kewajibannya sebagai anggota partai, melanggar disiplin partai, dan melanggar kehormatan partai. Sebelum memecat seorang anggota, partai harus mengirimkan surat peringatan sebanyak tiga kali kepada anggota yang bersangkutan, dengan jeda waktu satu minggu antara satu surat dengan surat beri-

[6] Smita Notosusanto, "Analisa AD/ART Partai Politik", makalah seminar, tidak diterbitkan, 7 di *http://forum-politisi.org/downloads/Analisa_AD_ART_Parpol_-_Smita.pdf.*

[7] *Ibid.*, h.7.

kutnya.[8] Apabila anggota tersebut tidak merespons surat peringatan terakhir, partai untuk sementara waktu dapat menghentikan status keanggotaannya. Apabila setelah satu bulan anggota tidak merespons statusnya, keanggotaan partainya secara otomatis berakhir. Setiap anggota yang dipecat memiliki hak untuk melakukan pembelaan.

Selain persoalan legal formal di atas, penting juga memahami karakteristik khas PKB yang akan memengaruhi kinerja partai ini dalam memproses pengambilan keputusan. Sebagai organisasi yang dibangun dan dijalankan oleh NU dan eksponennya, pada akhirnya PKB memiliki kecenderungan mengikuti pola NU dalam memandang dan melaksanakan aturan main. Dalam konteks proses pengambilan keputusan, hal ini berarti kecenderungan untuk menjalankan aturan main secara longgar. Salah satu tradisi dalam NU adalah mengakomodasi dan melaksanakan saran ulama, terutama ulama yang senior dan dihormati, dalam memperjuangkan kepentingan NU. Dalam hal ini, kepentingan NU dan pendapat ulama menjadi agenda utama, sedangkan aturan main partai kadang-kadang terlihat sebagai unsur pelengkap. Dalam sejumlah keputusan monumental NU, seorang pemimpin dengan menggunakan forum terbatas dapat memutuskan kebijakan yang kerap bertentangan dengan AD/ART partai.

Keputusan untuk meninggalkan Masyumi pada tahun 1952 yang memengaruhi kehidupan NU khususnya dan konstelasi politik Indonesia pada umumnya, misalnya, merupakan hasil upaya A. Wahab Chasbullah, Rois Akbar (pemimpin besar) NU yang berkeinginan agar NU dapat memiliki partai politik sendiri untuk memperjuangkan agenda politiknya sendiri. Walaupun kebijakan meninggalkan Masyumi diputuskan pada Muktamar 1952 di Palembang, muktamar itu sendiri pada dasarnya menjadi alat politik Wahab Chasbullah untuk menggapai obsesinya. Hal ini dapat dilihat pada agenda utama muktamar, yaitu memutuskan "cara yang paling tepat untuk meninggalkan Masyumi" dan bukan memutuskan "apakah

---

[8] *ART PKB 1998 Pasal 11 (2); ART PKB 2000 Pasal 11 (2); ART PKB 2002 Pasal 11 (2); ART PKB 2005 Pasal 11 (2); ART PKB 2008 Pasal 11 (2).*

NU harus meninggalkan Masyumi atau tidak". Dengan kata lain, ketetapan bahwa NU harus meninggalkan Masyumi sebenarnya telah diputuskan oleh Wahab secara eksklusif, namun mengenai cara meninggalkan Masyumi, muktamarlah yang memutuskan.

Situasi serupa terjadi ketika sejumlah tokoh-tokoh terkemuka NU yang dipimpin Ketua Umum Dewan Syuriah K.H. Ali Maksum dan K.H. Asa'ad Syamsul Arifin, salah seorang generasi pertama ulama NU, bersepakat memecat Ketua Umum Dewan Tanfidziyah Dr. Idham Chalid di sebuah forum yang sangat terbatas pada tahun 1982. Keputusan ini memicu salah satu konflik internal yang serius di dalam NU. Idham Chalid pada akhirnya menyatakan bahwa berbagai upaya ulama berpengaruh itu untuk menyingkirkannya adalah ilegal dan tidak dapat diikuti karena bertentangan dengan esensi AD/ART NU.[9] Dalam hal ini, kepentingan tokoh ulama yang dihormati kadang-kadang diakui sebagai kepentingan seluruh anggota *jamiyah*. Dalam logika ini, mendukung kepentingan sang tokoh kerap diartikan sama dengan mendukung kepentingan *jamiyah*. Berkenaan dengan karakter khas tersebut, dapat dipahami jika aturan main menjadi unsur yang kurang signifikan. Mustofa Bisri secara kritis meyakini bahwa NU bukanlah merupakan entitas yang dapat dikualifikasikan telah memiliki sistem pengorganisasian yang solid.[10]

Dalam perkembangannya, ketergantungan warga NU pada tokoh karismatik di era kontemporer sampai pada titik puncaknya saat muncul tokoh bernama Abdurrahman Wahid atau populer disebut Gus Dur. Sebagai mantan Ketua Umum PBNU, inisiator PKB, dan tokoh karismatik, yang bahkan diyakini sebagai wali bagi sebagian pengikut fanatiknya, Gus Dur memiliki posisi sentral yang tidak tergantikan, yang pada akhirnya cenderung mendorong personalisasi kekuasaan di PKB. Posisi penting Gus Dur di PKB juga berkaitan

[9] Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 119. Tentang proses pemecatan Idham Chalid lihat Mahrus Irsyam, *Ulama dan Partai Politik: Upaya Mengatasi Krisis*, (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1984), 122–132.

[10] "Golkar dan PKB", dalam A. Mustofa Bisri, *Gus Dur Garis Miring PKB*, (Surabaya: MataAir Publishing, Surabaya, 2008), 38.

dengan peran historisnya di partai ini. Menurut Arifin Junaidi, Gus Dur adalah tokoh yang sangat berpengaruh menentukan banyak keputusan penting yang terkait dengan pendirian PKB, termasuk nama partai dan nama Ketua Umum Dewan Tanfidz.[11]

Berkenaan dengan ini, Ketua Umum Dewan Tanfidz hingga 2008 adalah tokoh-tokoh yang memperoleh dukungan personal dari Gus Dur untuk memenangkan jabatan tersebut. Matori Abdul Jalil, Ketua Umum Dewan Tanfidz yang pertama, adalah seorang aktivis politik berpengalaman yang diminta Gus Dur untuk memegang posisi tersebut. Walaupun pada awalnya banyak simpatisan NU dan bahkan pendiri PKB menolak keputusannya, Gus Dur tetap berkeras untuk memberikan kesempatan kepada Matori memimpin partai ini. Di Muktamar pertama PKB, pada tahun 2000, Matori terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz dengan dukungan penuh dari Gus Dur. Ketua Umum kedua Dewan Tanfidz adalah Alwi Shihab. Walaupun dia bukan anggota NU, dia menjadi tokoh populer di PKB dan memiliki hubungan yang baik dengan banyak unsur penting di partai, khususnya Gus Dur. Hubungan dekat ini memperkuat kepercayaan Gus Dur atas dirinya. Gus Dur memberikan dukungannya kepada Alwi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Ketua Umum Dewan Tanfidz pada MLB tahun 2002, dan Alwi memenangkan pemilihan itu. Muhaimin Iskandar adalah Ketua Umum Dewan Tanfidz yang berikutnya. Dia adalah keponakan Gus Dur yang sangat loyal terhadap pamannya itu. Muhaimin kerap membela dengan gigih keputusan yang dibuat Gus Dur. Dia pun mendapatkan dukungan Gus Dur untuk mencapai posisi Ketua Umum Dewan Tanfidz pada MLB tahun 2005.

Posisi Gus Dur menjadi semakin signifikan setelah menduduki jabatan Ketua Umum Dewan Syura. Gus Dur dan para pengikutnya menganggap posisi ini sebagai posisi yang sah untuk mendapatkan

---

[11] H.Z. Arifin Junaidi, "Belajar dari Sejarah PKB", dalam Yenny Zanuba Gus Dur, A. Effendy Choirie, dan M. Kholid Syeirazi (eds.), *9 Tahun PKB: Kritik dan Harapan*, (Jakarta: Panitia Nasional Harlah ke-9 PKB, 2007), 32.

perlakukan khusus dan seperangkat kewenangan dalam menentukan serta melaksanakan hampir seluruh kebijakan strategis di partai ini. Selain itu, Gus Dur sendiri menganggap dirinya sebagai patron yang harus diikuti para santri. Menurut Rokhmad:

> Gus Dur telah menganggap seluruh fungsionaris dan pengurus partai sebagai santri dan khadam (pelayan)-nya yang harus *sendika dhawu* (sepenuhnya patuh) dan selalu menuruti keinginannya setiap saat.[12]

Sikap ini sejalan dengan pendapat mayoritas kaum Nahdiyin yang menganggap dirinya sebagai tokoh karismatik yang pantas untuk diikuti. Kepemimpinan berdasarkan karisma dan hubungan *patron-client*, yang merupakan salah satu karaktersitik utama NU,[13] pada gilirannya menjadi hal yang umum terjadi dalam proses pengambilan keputusan. Namun, hal ini menjadi hambatan serius bagi PKB untuk menjalankan kepemimpinan prosedural. Sejumlah pelanggaran prosedur yang akan dibahas di bagian berikutnya dilakukan demi mempertahankan atau mengakomodasi agenda politik tokoh-tokoh yang dihormati atau kelompok yang di dalamnya berada orang-orang yang dihormati.

Akan tetapi, perlu juga diketengahkan di sini bahwa situasi ini tidak mewakili seluruh gambaran tentang PKB. Partai ini sebenarnya masih memiliki orang-orang yang berkomitmen untuk menghormati dan secara proporsional melaksanakan aturan partai. Orang-orang ini mencakup mereka yang memperjuangkan kepentingan ini sejak awal berdirinya partai dan kader-kader yang, setelah menjadi korban, mulai menyadari kelemahan sistem internal partai, khususnya ketiadaan model kepemimpinan prosedural.

---

[12] Abu Rokhmad, "PPP dan Masa Depan PKB", *Suara Merdeka*, 30 Januari 2007.

[13] Sebagian pakar menggunakan istilah hubungan *patron-client* untuk mendeskripsikan kondisi riil di NU, lihat misalnya James Scott, "Patron Client Politics and Political Change in Southeast Asia", *American Political Science Review*, 66:1, (1972), 91–113. Kang Young Soon, *Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: UI-Press, 2008). Kamarudin, *Konflik Internal PKB*, (Depok: Akses Publishing, 2008).

B. Kondisi dan Kecenderungan Penerapan Aturan Main

1. Munculnya Fenomena Inkonstitusional

Walaupun PKB sudah memiliki AD/ART untuk mengatur banyak persoalan penting, dalam proses pengambilan keputusan partai ini, yang kerap muncul adalah sebentuk fleksibilitas dan inkonsistensi pelaksanaan prosedur partai. Pelanggaran prosedur partai dalam kasus pemecatan Matori Abdul Jalil, Ketua Umum Dewan Tanfidz pertama, menandai salah satu pelanggaran paling penting terhadap prosedur partai dalam sejarah PKB.

Pemecatan itu dipicu oleh keputusan Matori untuk menghadiri Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (SI MPR) tahun 2001. Dalam sidang itu, agenda utamanya adalah melakukan *impeachment* terhadap Presiden Gus Dur karena tindakan inkonstitusional membubarkan MPR dan tuduhan korupsi. Keputusan Matori hadir dalam sidang itu mengecewakan Gus Dur, yang kemudian memerintahkan partai untuk memecatnya dari jabatan Ketua Umum Dewan Tanfidz. Usulan Gus Dur dibahas hanya oleh enam orang fungsionaris dan segera saja diterima oleh Dewan Syura. Keputusan itu dibuat pada hari yang sama dengan pembukaan SI MPR pada 21 Juli 2001. Hal ini berarti proses pemecatan Matori berlangsung kurang dari satu hari. Dua minggu kemudian, rapat pleno PKB menyetujui kebijakan itu, dan pada 14 Agustus 2001, mukernas memperkuat keputusan pemecatan Matori dari posisinya sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz.

Menurut kubu Gus Dur, keputusan ini tepat adanya karena Jalil terbukti tidak loyal terhadap partai dengan mengabaikan keputusan partai untuk tidak menghadiri SI MPR. Keputusan untuk tidak hadir itu berasal dari usulan anggota-angggota Fraksi PKB dalam sebuah pertemuan internal satu hari sebelum SI MPR diselenggarakan. Pada pertemuan itu, Matori sebenarnya menyampaikan kepada anggota fraksi agar dapat mengizinkannya menghadiri SI MPR, bukan dalam kapasitas sebagai anggota partai, melainkan sebagai salah

satu ketua MPR.[14] Matori juga menyatakan bahwa kepentingannya untuk menghadiri SI MPR terkait dengan upaya menyelamatkan wajah presiden dari *impeachment* dan menjaga hubungan baik dengan kelompok politik lainnya di parlemen.[15] Meski demikian, hingga keesokan harinya, partai tidak pernah secara formal menjawab permintaan Matori.

Selain itu, bagi kebanyakan anggota PKB, keputusan untuk memecat Matori secara spontan masuk akal karena Gus Dur adalah Ketua Umum Dewan Syura yang menunjuk Matori untuk memimpin partai, yang oleh karenanya memiliki hak untuk memecatnya secara langsung. Effendy Choirie, misalnya, mengatakan, pemecatan itu dimungkinkan karena Matori dipilih oleh Gus Dur dan bukan melalui pemilihan langsung yang melibatkan peserta muktamar.[16]

Walaupun demikian, keputusan mendadak pemecatan Matori memunculkan pertanyaan bagi sebagian kalangan lainnya, karena pada dasarnya hal ini tidak sejalan dengan ART partai. Menurut ART PKB, proses pemecatan seorang anggota dewan pengurus harus melibatkan dewan pengurus partai tempat anggota itu terdaftar. Dewan pengurus terkait merupakan institusi yang akan memberikan rekomendasi pemecatan untuk disetujui dewan pengurus partai di

---

[14] A. Effendy Choirie, *PKB Politik Jalan Tengah NU*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2002), 295. Arif Shodiq Pujiharto, "Benang Kusut Konflik PKB (1): Pintu Islah pun Kian Menutup", *www.detik.com*, 15 Januari 2002. "MLB Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta. Matori Abdul Djalil Ingin Lepas Dari Bayangan", *Kompas*, 16 Januari 2002. Mengenai susunan pimpinan MPR lihat Yana Indrawan, Aip Suherman, dan Tommy Andana (ed.), *Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Sejarah, Realita dan Dinamika*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2007), 41.

[15] Mahrus Ali dan M.F. Nurhuda Y., *Pergulatan Membela yang Benar: Biografi Matori Abdul Jalil*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), 249. Choirie, *PKB Politik Jalan Tengah NU*, 298. "MLB Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta. Matori Abdul Djalil Ingin Lepas Dari Bayangan", *Kompas*, 16 Januari 2002.

[16] Choirie, *PKB Politik Jalan Tengah NU*, 297. Wawancara dengan Tohadi, anggota PKB (1998–2005) dan Wakil Ketua DPP PKNU, di Jakarta, 6 Oktober 2010.

tingkat yang lebih tinggi.[17] Kemudian, dalam proses ini, menurut ART partai, setiap anggota dewan pengurus partai memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri atas pemecatan dirinya.[18] Persyaratan ini menunjukkan bahwa sebuah proses pemecatan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Lebih dari itu, pemecatan seorang Ketua Umum Dewan Tanfidz yang dipilih di muktamar hanya mungkin dilakukan apabila dilakukan dalam forum yang sama atau setidaknya dalam MLB. ART partai menyatakan, Ketua Umum Dewan Tanfidz yang dipilih di forum muktamar harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh keputusan dan kerjanya di forum tersebut.[19] Selain itu, dalam hal pemecatan, partai harus memberikan Ketua Umum Dewan Tanfidz, sebagaimana anggota pengurus lainnya, kesempatan untuk melakukan pembelaan atas pemecatan dirinya.

Kenyataannya, Matori tidak saja dipecat dari posisinya sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz, tetapi juga dipecat dari keanggotaan partai 15 hari setelah kehadirannya di SI MPR RI. Keputusan pemecatan dari PKB ini juga berlaku bagi anggota lain yang menolak pemecatan Matori, seperti Abdul Khaliq Ahmad dan Agus Suflihat. Keputusan pemecatan dari keanggotaan partai ini jelas melanggar AD/ART partai. Hal ini dikarenakan menurut ART partai, pemecatan seorang anggota partai dari keanggotaannya harus melalui beberapa tahap, yang setidaknya membutuhkan waktu hampir sekitar empat bulan.[20] ART partai menyatakan bahwa sebelum pemecatan, partai harus memberi peringatan secara formal kepada anggota terkait sebanyak tiga kali, yang dalam hal ini periode antara peringatan yang

---

[17] *ART PKB 1998 Pasal 11 (6); ART PKB 2000 Pasal 11 (6); ART PKB 2002 Pasal 11 (6); ART PKB 2005 Pasal 11 (6); ART PKB 2008 Pasal 11 (6).*

[18] ART PKB 1998 Pasal 11 (7); ART PKB 2000 Pasal 11 (7); ART PKB 2002 Pasal 11 (7); ART PKB 2005 Pasal 11 (7); ART PKB 2008 Pasal 11 (7).

[19] *ART PKB 2000 Pasal 19 (2); ART PKB 2002 Pasal 21 (2); ART PKB 2005 Pasal 21 (2); ART PKB 2008 Pasal 22 (2).*

[20] *ART PKB 1998 Pasal 11 (1)-(5); ART PKB 2000 Pasal 11 (1)-(5); ART PKB 2002 Pasal 11 (1)-(5); ART PKB 2005 Pasal 11 (1)-(5); ART PKB 2008 Pasal 11 (1)-(5).*

satu dan yang berikutnya berjarak satu pekan. Keanggotaan akan berakhir secara otomatis apabila anggota terkait tidak merespons pemecatan dirinya setelah tiga bulan dari peringatan terakhir.

Pada tahun 2004, tidak lama setelah kasus Matori, pelanggaran prosedural terulang kembali. Kali ini terkait dengan kasus pemecatan Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf dari jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz.

Kasus ini bermula dengan rapat terbatas yang diselenggarakan DPP PKB pada 21 September 2004 sebagai respons terhadap kemungkinan sejumlah kader PKB memegang jabatan menteri di pemerintahan yang baru terpilih. Rapat itu memutuskan bahwa agar dapat menghindari konflik kepentingan dan menjaga independensi partai, partai melarang setiap anggotanya untuk rangkap jabatan atau menduduki jabatan ganda, termasuk di pemerintahan.[21] Tidak lama setelah DPP menetapkan keputusan itu, Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf ditunjuk Presiden Yudhoyono untuk bergabung dengan kabinetnya. Alwi menduduki jabatan sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Saifullah Yusuf sebagai Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Penerimaan keduanya atas pos menteri tersebut menjadi alasan utama bagi DPP PKB memecat keduanya dari jabatannya di kepengurusan partai. Keputusan ini dikeluarkan melalui Rapat Pleno DPP PKB pada 26 Oktober 2004.[22]

Bagi Saifullah Yusuf, pemecatan semacam ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan DPP PKB kepada dirinya. Pemecatan pertama terjadi pada tahun 2003. Ini bermula ketika partai mengadakan *voting* di rapat Dewan Syura untuk memutuskan masa depannya. Dewan Syura mengadakan rapat untuk membahas temuan dari Tim Tiga beranggotakan Prof. M. Mahfud M.D., A.S. Hikam, dan K.H. Nur Iskandar Al Barsany terkait dengan beberapa isu negatif

[21] Kamarudin, *Konflik Internal PKB*, 112–113.

[22] Dinyatakan dalam putusan No. SK 01762/DPP-02/II/A.I/X/2004. Lihat juga Kamarudin, *Ibid.*, 114–115.

berkenaan dengannya.[23] Isu tersebut mencakup: (1) kegagalan untuk membangun komunikasi yang efektif di antara anggota parlemen PKB di parlemen yang menyebabkan kegagalan upaya melakukan *impeachment* terhadap Akbar Tandjung, Ketua DPR RI dari Partai Golkar. *Impeachment* itu diproyeksikan PKB sebagai balasan atas *impeachment* terhadap Gus Dur, (2) menggunakan politik uang pada MLB tahun 2002 yang memungkinkannya merebut posisi Sekretaris Jenderal, dan (3) menolak mendukung Gus Dur sebagai kandidat presiden dan mendorong Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU, sebagai wakil presiden pada Pemilu Presiden 2004.

Berdasarkan hasil kajian, Tim Tiga memutuskan bahwa kategori kesalahan Yusuf adalah pelanggaran ringan.[24] Akan tetapi, walaupun Tim Tiga mengusulkan agar rapat memberikan sekadar peringatan kepadanya, sebagian peserta, termasuk Gus Dur, mengusulkan pemecatan atas dirinya. Setelah perdebatan yang seru, seluruh peserta diminta melakukan *voting* atas dua pilihan: (1) memecat atau (2) memberi peringatan keras. Dari enam belas peserta rapat, sembilan orang memilih opsi pertama dan sisanya memilih untuk memberikan Saifullah Yusuf peringatan keras. Berdasarkan hasil tersebut, rapat memutuskan menggeser jabatan Saifullah dari Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz menjadi salah satu Ketua Dewan Tanfidz. Keputusan ini akan berlaku setelah Pemilu 2004.

Keputusan untuk memecat Saifullah dari jabatannya meski dilakukan melalui *voting*, namun secara prinsip inkonstitusional. Hal ini dikarenakan AD/ART partai telah menetapkan bahwa hanya pelanggaran berat, dan bukan ringan sebagaimana yang disimpulkan Tim Tiga, yang dapat dijadikan satu-satunya alasan untuk menyingkirkan seorang pengurus dari posisinya. Dalam hal ini, Saifullah dan pendukungnya meyakini bahwa keputusan ini tidak adil dan melang-

[23] Kamarudin, *Konflik Internal PKB*, 120–121. Lihat juga Adhie M. Massardi, "Saifullah Yusuf, Kiai, dan PKB", *Koran Tempo*, 12 September 2003. *Gatra* 21 September 2002.

[24] Menurut ketua tim, Prof. Dr. M. Mahfud M.D., kesalahan Saifullah "tidak membahayakan organisasi", lihat dalam "Reposisi Subhat Cak Iful", *Gatra*, 13 September 2003, 66.

gar aturan main. Selain itu, hanya sembilan dari 16 peserta, yang berarti kurang dari 2/3 peserta, yang setuju untuk menyingkirkan. Saifullah menolak keputusan itu karena menurut AD/ART partai, hanya keputusan yang didukung sekurang-kurangnya 2/3 peserta yang dapat ditetapkan sebagai kebijakan yang sah.

Posisi Yusuf sebagai anggota dewan pengurus sepenuhnya dicabut setelah dia bergabung dengan kabinet Presiden Yudhoyono. DPP menegaskan bahwa pemecatan Saifullah dan juga Shihab itu sah. Bagi DPP, rapat pleno memiliki otoritas legal untuk memecat keduanya sebagai anggota pengurus partai. Menurut DPP:

> Begitulah menurut AD/ART PKB yang berlaku saat itu. Pemberhentian mereka adalah sah dan legal karena telah memenuhi semua ketentuan dalam AD/ART. Proses pemberhentiannya juga berlangsung demokratis dan konstitusional karena melalui mekanisme rapat gabungan yang dikukuhkan dalam rapat pleno yang memang berhak untuk personalia dewan pengurus partai sebagaimana dipaparkan di atas. Dari sudut pandang AD/ART tidak ada lagi persoalan yang tersisa dari kasus pemberhentian Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf. Semuanya sudah jelas, sah dan konstitusional.[25]

Lebih dari itu, DPP berpendapat bahwa pemecatan ini pada dasarnya tepat dilakukan karena keduanya, Alwi dan Saifullah, telah melanggar kebijakan partai tentang larangan rangkap jabatan.[26] DPP juga berpendapat bahwa pihaknya sama sekali tidak harus memberikan peringatan bagi keduanya sebelum pemecatan, karena kategori kesalahan keduanya tidak membutuhkan hal semacam itu.[27]

Persoalannya adalah status yang dimiliki oleh Alwi adalah ketua umum yang dipilih dalam forum MLB. Dia dipilih oleh para peserta yang mewakili ribuan peserta dari seluruh Indonesia di forum tertinggi untuk proses pengambilan keputusan. Berdasarkan ART

---

[25] Lukman Edy, et al., "Kronologi Muktamar II PKB: Fakta Historis, Yuridis dan Politis", (Jakarta: DPP PKB, 2005), 29–30 dalam Kamarudin, *Konflik Internal PKB*, 116–117.

[26] *Ibid.*, 118.

[27] *Ibid.*, 117.

partai, seorang Ketua Umum Dewan Tanfidz yang diangkat dalam forum muktamar harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya dalam forum yang sama, yang selanjutnya akan ditentukan apakah dirinya dipecat atau tidak. Dengan kata lain, Alwi seharusnya diberhentikan dalam forum muktamar, di mana pada forum itu dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya. Menurut Alwi Shihab:

> Tidak bisa forum lebih rendah menganulir lebih tinggi. Kalau ada yang bilang bisa maka harus belajar AD/ART lagi. Kalau nanti Muktamar katakan saya diberhentikan dengan tidak hormat, ya silakan, saya harus terima. Tetapi kalau keputusan Muktamar dijegal pleno, harus diluruskan di muktamar.[28]

Hal ini berarti forum yang sah untuk memecat Shihab sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz adalah muktamar atau MLB, dan bukan rapat pleno. Masalah lain berkaitan dengan tidak adanya peringatan sebelum DPP memecat mereka. ART partai menyatakan, partai harus memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali sebelum pemecatan berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemecatan keanggotaan partai tidak dapat tiba-tiba dibuat.[29] Akan tetapi, DPP mengabaikan secara sadar prosedur ini. Oleh karena itu, kasus Alwi dan Saifullah menunjukkan lemahnya landasan hukum yang digunakan untuk melakukan pemecatan. Hal ini menunjukkan sekali lagi bagaimana pembuatan keputusan penting tidak didasarkan pada prosedur yang sah.

Pelanggaran prosedur partai juga terjadi pada kasus pemecatan Muhaimin Iskandar di tahun 2008. Pemecatan Muhaimin dilakukan dalam sebuah forum terbatas yang melibatkan kalangan Dewan Syura dan Dewan Tanfidz. Sebagian kalangan menyebutnya sebagai rapat pleno. Uniknya rapat tersebut, yang hanya melibatkan 30 orang, pada awalnya ditujukan hanya untuk melakukan pelepasan Prof. M.

---

[28] "DPP PKB Dinilai Langgar AD/ART", *Media Indonesia*, 15 April 2005.

[29] *ART PKB 1998 Pasal 11 (1)–(7); ART PKB 2000 Pasal 11 (1)–(7); ART PKB 2002 Pasal 11 (1)–(7); ART PKB 2005 Pasal 11 (1)–(7); ART PKB 2008 Pasal 11 (1)–(7).*

Mahfud M.D., salah seorang Ketua PKB yang telah resmi diangkat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, dan bukan ditujukan untuk mengevaluasi kinerja Ketua Umum Dewan Tanfidz.[30]

Dalam rapat yang berlangsung pada 26 Maret 2008 tersebut, setelah acara utama pelepasan selesai, Gus Dur angkat bicara dan menyatakan kekecewaannya terhadap Muhaimin yang dianggapnya sudah tidak loyal dan melakukan manuver yang arogan. Dalam kesempatan itu, Gus Dur menyatakan bahwa berdasarkan laporan yang diterimanya, Muhaimin menyatakan siap untuk menghadapi upaya apa pun yang dapat menjungkalkan dirinya dari kursi ketua umum, termasuk jika harus menghadapi MLB.[31] Pernyataan Muhaimin itu dipandang oleh Gus Dur sebagai sebuah tantangan akan keberadaan dirinya.

Muhaimin yang hadir dalam forum itu menolak tuduhan yang disampaikan padanya. Dalam forum itu, dia pun secara tegas mengatakan tidak pernah mengungkapkan pernyataan-pernyataan sebagaimana yang telah dituduhkan kepadanya. Muhaimin bahkan bersumpah dengan menyebut nama Tuhan bahwa hal itu tidak benar.[32] Walaupun Muhaimin telah menyatakan penolakan atas tuduhan itu, namun Gus Dur, sebagai Ketua Umum Dewan Syura, tampak bersikeras untuk tetap secepatnya menyingkirkan Muhaimin. Peserta rapat kemudian melakukan *voting* tertutup, hasilnya adalah 20 orang menghendaki Muhaimin untuk mundur, lima orang menghendaki diadakannya

---

[30] Lihat kesaksian Nursyahbani Katjasungkana, salah seorang Ketua DPP PKB dalam "Rapat Berlangsung Tragis dan Pilu. Muhaimin dilengserkan dari Ketua Umum PKB", *http://hariansib.com/?p=28694*, 28 Maret 2008.

[31] Gus Dur bahkan mendengar berbagai isu mengenai konspirasi yang dilakukan Muhaimin dan Partai Golkar untuk menyingkirkannya, dan menggantikannya dengan K.H. Hasyim Muzadi, Ketua PBNU. Tentang isu ini lihat "Muhaimin Iskandar: Mundur atau Dimundurkan", *Jawa Pos*, 28 Maret 2008. Ichwan Arifin, *Kiai dan Politik: Studi Kasus Perilaku Politik Kiai dalam Konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasca Muktamar II Semarang*, Tesis M.A., (Semarang: Program Pascasarjana, Univesitas Diponegoro, 2008), 112.

[32] "Rapat Berlangsung Tragis dan Pilu. Muhaimin dilengserkan dari Ketua Umum PKB", *http://hariansib.com/?p=28694*, 28 Maret 2008.

MLB, tiga orang tidak menghendaki adanya MLB, dan dua orang menyatakan abstain.[33] Pada 5 April 2008, DPP secara formal memecat Muhaimin dan menunjuk Ali Masykur Musa, Wakil Ketua Dewan Tanfidz, sebagai pejabat sementara untuk Ketua Dewan Tanfidz.[34]

Sebagai respons terhadap kebijakan itu, Muhaimin dan pendukungnya menegaskan bahwa keputusan DPP telah melanggar AD/ART partai. Hal ini dikarenakan ART partai menyatakan bahwa anggota DPP yang mendapatkan jabatannya melalui pemilihan di muktamar, sebagai forum tertinggi partai, hanya dapat dipecat dari jabatannya melalui forum MLB.[35] Ini berarti proses pemecatan akan berlangsung lama dan melibatkan banyak peserta, termasuk ratusan perwakilan dewan pengurus wilayah seluruh Indonesia. ART partai juga menyatakan bahwa pemecatan itu berlaku hanya untuk anggota yang melakukan pelanggaran berat, yang dibuktikan melalui penyelidikan internal.[36] Selain itu, DPP harus memberikan anggota tersebut peringatan dan kesempatan untuk melakukan pembelaan atas kasusnya.

Berkenaan dengan Muhaimin, DPP PKB bukan saja tidak memberikannya kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, melainkan juga tidak dapat membuktikan kesalahannya. Selain itu, rapat untuk pemecatan Iskandar, menurut Helmy Zaini, tidak mencapai kuorum karena hanya 30 dari 62 anggota DPP yang menghadiri rapat tersebut. Menurut ART partai, forum akan sah untuk menetapkan sebuah

[33] Menurut Ratnawati, tiga orang setuju dengan opsi pertama, tiga orang memilih opsi kedua, dua orang abstain, dan satu rusak. Ratnawati, "*Beberapa Masalah Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Alternatif Solusi*", 103. Versi lain mengatakan lima orang setuju dengan opsi pertama, tiga orang memilih opsi terakhir, dan dua abstain, sementara Gus Dur, Iskandar, dan Mahfud tidak memberikan suara. Lihat Taufik Al Mubarak, "Pemecatan di Tubuh PKB Bukti Superioritas Gus Dur", *Harian Aceh*, 31 Maret 2008. "Rapat Berlangsung Tragis dan Pilu. Muhaimin dilengserkan dari ketua umum PKB", *http://hariansib.com/?p=28694*, 28 Maret 2008.

[34] "Ali Masykur Pelaksana Tugas Ketum", *Kompas*, 6 April 2008.

[35] *ART PKB 2005 Pasal 22 (3); ART PKB 2008 Pasal 25 (3).*

[36] *ART PKB 1998 Pasal 19 (2); ART PKB 2000 Pasal 20 (2); ART PKB 2002 Pasal 22 (2); ART PKB 2005 Pasal 22 (2).*

keputusan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPP yang berarti dihadiri setidaknya oleh 41 orang.[37]

Beberapa pelanggaran prosedur partai juga terjadi kepada kader dan dewan pengurus di tingkat lokal. Hal ini terutama menimpa mereka yang dituduh tidak loyal atau pendukung para penentang. Menurut Anam, sepanjang tahun 2005, Muhaimin dengan dukungan Gus Dur telah melakukan pembekuan atau membentuk kepengurusan baru atas 37 DPC dan 2 DPW dan memecat sejumlah pengurus.[38] DPP kadang-kadang melakukan upaya ini dengan cara-cara otoriter, menghindari pendekatan demokratis dan prosedur partai. Anam mengatakan bahwa proses pemecatan terjadi di luar prosedur yang sudah ditentukan.

Dalam kasus pembekuan DPC dan pemecatan anggota partai di Provinsi Jawa Timur, misalnya, DPP tidak melibatkan DPW Jawa Timur. Menurut Anam, DPP tidak pernah mengundangnya sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPW Jawa Timur untuk membahas dan ambil berperan dalam proses pengambilan keputusan atas masalah ini.[39] Bagi Anam, sikap DPP itu telah melanggar ART yang menyebutkan dengan gamblang hak dan kewenangan DPW untuk mengajukan rekomendasi ke DPP tentang pembentukan DPC baru dan melegalkan struktur DPC baru.[40] Kewenangan ini juga berlaku dalam kasus pembekuan pengurus dan pemecatan anggota, yang dalam hal ini DPP harus mendapatkan rekomendasi dari DPW terlebih dahulu sebelum mengeluarkan keputusan.[41]

---

[37] "Muhaimin Iskandar: Mundur atau Dimundurkan", *Jawa Pos*, 28 Maret 2008.

[38] Hingga tahun 2008, DPP telah membekukan sekitar 14 DPW dan 67 DPC. "Muhaimin Didukung dan Muspim Kukuhkan Muktamar Semarang", *Kompas* 7 April 2008.

[39] DPW PKB Jawa Timur, *Data dan Fakta Pelanggaran AD/ART di Muktamar II Semarang*, (DPW PKB Jawa Timur, 2005), 1.

[40] *ART PKB 1998 Pasal 13 (2.b); ART PKB 2000 Pasal 13 (2.b); ART PKB 2002 Pasal 13 (2.b); ART PKB 2005 Pasal 13 (2.b); ART PKB 2008 Pasal 13 (2.b).*

[41] DPW PKB Jawa Timur, *Data dan Fakta Pelanggaran AD/ART di Muktamar II Semarang*, 1.

Beberapa kasus lain juga menunjukkan pelanggaran prosedur. Erman Hermawan dipecat dari posisinya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB. Pemecatannya semata berdasarkan pada rumor tentang upayanya untuk memanipulasi aturan main di Konferensi Garda Bangsa, salah satu *onderbouw* PKB di Banjarmasin.[42] Hingga kasus ini lama berlalu, DPP tidak pernah dapat membuktikan secara meyakinkan kesalahan Erman.

Pelanggaran aturan main juga terjadi pada kasus Abdul K. Karding. Sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPW Provinsi Jawa Tengah yang menduduki jabatan itu melalui muswilub, Karding memiliki hak untuk melaporkan kepemimpinannya ke forum yang sama. Akan tetapi, DPP mengambil alih peran muswilub dan memecatnya melalui forum rapat pleno. Tidak itu saja, DPP kemudian langsung menunjuk Yusuf Chudlori untuk menggantikan Karding. Berdasarkan aturan main partai, proses penetapan Chudlori seharusnya melibatkan DPW Provinsi Jawa Tengah. Menurut ART partai, peranan DPP sebenarnya juga hanya sebatas mengesahkan rekomendasi yang dibuat oleh DPW dan tidak secara langsung melakukan pengangkatan secara sepihak. Oleh karena itu, tindakan DPP untuk memecat Karding dan menunjuk Chudlori sebagai pengganti Karding dengan melangkahi keberadaan DPW Provinsi Jawa Tengah inkonstitusional.[43] Berbagai situasi di atas memperlihatkan sebuah "fleksibilitas" dan inkonsistensi dalam melaksanakan prosedur partai di PKB. Posisi aturan partai hanya bersifat sekunder atau sekadar menjadi pelengkap yang kerap diabaikan.

2. Melampaui Konstitusi: Peran Gus Dur

Fenomena lain di dalam pelaksanaan prosedur pengambilan keputusan adalah kecenderungan untuk bergantung pada tokoh-tokoh

---

[42] Tri Ratnawati, "Beberapa Masalah Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Alternatif Solusi" di Lili Romli (ed.), *Pelembagaan Partai Politik Pasca Orde Baru: Studi Kasus Partai Golkar, PKB, PBB, PBR dan PD*, (Jakarta: Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2008), 93.

[43] "Penunjukan Gus Yusuf Tidak Sesuai ART", *Suara Merdeka*, 4 Mei 2007.

karismatik daripada aturan main. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam satu dekade keberadaan PKB, seorang pemimpin di PKB dapat bertindak di luar prosedur partai secara bebas. Adanya kedudukan spesial dan sikap di atas prosedur seorang pemimpin ini menunjukkan salah satu dimensi dari partai yang tidak terlembaga.

Dalam kasus PKB, peranan spesial ini dimiliki oleh Gus Dur. Posisi uniknya di mata banyak kaum Nahdiyin membuatnya sangat berpengaruh dalam banyak aspek. Menurut J. Kristiadi, Gus Dur telah menjadi demikian deterministik dalam proses pengambilan keputusan. Kristiadi mengatakan:

> Gus Dur yang pancaran sinar wibawa dan pengaruhnya sangat menyilaukan bagi siapa pun yang berada di lingkungan PKB ... Hal tersebut juga menjangkau dalam proses pengambilan keputusan yang sangat tergantung pada tokoh yang dijadikan panutan warga Nahdiyin tersebut.[44]

Dominasi Gus Dur dalam forum-forum rapat tidak dapat terelakan. Khofifah Indar Parawansa mengibaratkan apabila ada sepuluh orang, termasuk Gus Dur hadir dalam satu rapat, sesungguhnya hanya ada satu orang dalam rapat itu, karena hampir dapat dipastikan bahwa hanya Gus Dur yang mendominasi rapat tersebut.[45] Dalam perkembangannya, posisi Gus Dur yang sangat istimewa menyebabkan dirinya dapat berperan layaknya konstitusi partai. Ali Masykur Musa, seorang figur yang dekat dengan Gus Dur, dengan nada satir mengatakan: "Gus Dur adalah konstitusi itu sendiri".[46]

Fenomena ini dapat terlihat pada peranan Gus Dur dalam kasus pemecatan Matori. Dalam proses pemecatan Matori, dia

---

[44] J. Kristiadi, "Pergulatan dan Tantangan PKB Memenuhi Harapan Bangsa", dalam Wahid, Choirie, and Syeirazi (eds.), *9 Tahun PKB: Kritik dan Harapan*, 128–129.

[45] Wawancara dengan Khofifah Indar Parawansa, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999–2001), Ketua Badan Pelaksana Pemenangan Pemilu PKB (2002–2005), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

[46] Wawancara dengan Dr. Ali Masykur Musa, Wakil Ketua Dewan Tanfidz (2005–2010) dan Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB-Gus Dur (2008–2009), di Jakarta, 19 Oktober 2010.

menyetujui keputusan cepat yang disampaikan Tim Enam di bawah pimpinannya sendiri,[47] yang dibentuk dengan mengatasnamakan partai untuk memecat Ketua Dewan Tanfidz. Tim ini bekerja secara eksklusif tanpa merasa perlu mempertimbangkan hak-hak Matori sebagai salah satu pimpinan partai. Pembentukan Tim Enam untuk mengakomodasi kepentingan Gus Dur ini inkonstitusional karena tidak disebutkan dalam AD/ART partai.

Selain itu, sebagai tokoh berpengaruh yang menyadari memiliki posisi khusus di mata para pengikutnya dan anggota partai, Gus Dur juga tidak pernah memberikan kesempatan untuk melakukan *islah* (rekonsiliasi atau penyelesaian konflik secara damai) dengan kubu Matori. Akibatnya, konflik berkepanjangan antara dua kubu tidak terhindarkan. Hal ini dikarenakan bagi Gus Dur, yang terpenting adalah bagaimana menyingkirkan orang yang dianggap sudah tidak loyal padanya ketimbang membangun kembali hubungan baik demi keutuhan partai.

Ketidakmampuan partai untuk melaksanakan aturan main dan prosedur partai secara sistematis dan konsisten memuluskan jalan bagi Gus Dur untuk melanjutkan peran istimewa dan manuver individualnya. Kasus pemecatan Matori menunjukkan bagaimana keinginan seorang Gus Dur hampir otomatis menjadi keinginan partai. Partai dengan segera membentuk perangkat dan kebijakan yang dapat menopang kehendak dari patron yang dijunjung tinggi itu. Dalam hal ini, itu semua dapat terjadi tidak semata karena kedudukan istimewa Gus Dur, tetapi juga karena lingkungan partai dan pelembagaan partai yang buruk, yang pada akhirnya memberikan kesempatan dan jalan untuk munculnya situasi tersebut.

Berkaitan dengan pemecatan Saifullah Yusuf, kepentingan Gus Dur juga berperan penting. Hal ini terutama berkaitan dengan upaya membalas kekecewaannya terhadap kegagalan Saifullah sebagai mediator untuk memperoleh dukungan dari PDIP, bekas partai Saifullah dan faksi terbesar di parlemen, untuk dapat menyelamatkannya dari

[47] "Melawan Sang Patron", *Koran Tempo*, 26 April 2005.

impeachment pada tahun 2001 dan melakukan balasan *impeachment* terhadap Akbar Tandjung. Gus Dur juga percaya bahwa Yusuf telah melakukan politik uang di Muktamar Semarang yang memberikannya jabatan sekretaris jenderal. Karena alasan-alasan itu, Gus Dur tidak menghendaki lagi keponakannya itu terus memegang jabatannya sekarang.

Peranan Gus Dur dalam pemecatan Saifullah terlihat saat dilakukannya *voting* pada rapat pleno tahun 2004 untuk memutuskan masa depan Yusuf di partai ini. Pada dasarnya, *voting* itu sendiri tidak perlu dilakukan karena menurut Tim Tiga kesalahan Saifullah tidaklah besar,[48] dan untuk itu merekomendasikan memberikan hukuman ringan saja. Namun sebaliknya, Gus Dur justru menyarankan dilakukannya *voting* dengan opsi-opsi yang sebetulnya pantas diberikan bagi seorang yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Pendukung Gus Dur dan unsur anti-Saifullah di partai ini menyetujui tindakan ini. Cholil Bisri, salah satu anggota Dewan Syura dan inisiator pendirian PKB, secara jujur menyatakan bahwa keputusan reposisi ini sesungguhnya sangatlah personal karena dimotivasi terutama karena ketidakpercayaan Gus Dur terhadap Saifullah.[49] Keharusan untuk mengakomodasi kepentingan Gus Dur juga memicu loyalisnya untuk melakukan manuver politik negatif. Muktamar PKB Kedua di Semarang mengilustrasikan situasi ini.

Forum yang pada awalnya diharapkan oleh banyak kader merupakan media rekonsiliasi antara Kubu Gus Dur/Muhaimin dan Kubu Alwi/Saifullah berakhir dengan kekecewaan Kubu Alwi/Saifullah yang mendalam. Forum akhirnya menjadi sekadar ajang pembenaran atas eksistensi dan kepentingan Gus Dur dan kelompoknya. Pada forum ini, kepentingan untuk menyelamatkan posisi Gus Dur memunculkan manuver-manuver yang penuh dengan berbagai

[48] Sebagai respons atas laporan itu, Gus Dur menyatakan kegusarannya dengan memukul meja tiga kali dan berteriak "Saya sudah tidak memercayai Yusuf", "Surya", 3 September 2003 dalam H. Fuad Anwar, *Melawan Gus Dur*, (Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2004), 111–112.

[49] "Jawa Pos", 30 September 2003, dalam *ibid.*, 119.

pelanggaran. Gus Dur, misalnya, dipilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Dewan Syura pada sesi pembahasan laporan dan bukan di sesi pemilihan.[50] Penggunaan sesi yang tidak tepat untuk memilih Gus Dur jelas melanggar aturan main partai. Para pendukungnya melakukan hal ini untuk menghindari kemungkinan majunya tokoh kuat, yaitu K.H. Ma'ruf Amin, mantan Ketua Umum Dewan Syura (1998–1999), sebagai alternatif dari Gus Dur di dalam sesi pemilihan. Jika itu terjadi, Ma'ruf Amin diprediksikan dapat menjadi ganjalan serius bagi Gus Dur. Pendukung Alwi-Saifullah juga pada kenyataannya memang telah memilih Amin sebagai kompetitor Gus Dur.[51]

Forum ini juga mengabaikan hak konstitusional DPW Jawa Timur dan DPW Jawa Tengah untuk memperoleh tambahan suara di muktamar karena keberhasilan kedua DPW itu memperoleh 80% suara dan kursi untuk PKB pada Pemilu 2004. Hak ini sendiri sebenarnya telah ditetapkan dalam ART partai, sebagai bentuk penghargaan terhadap dewan pengurus wilayah yang memperoleh pencapaian yang baik di pemilu. ART partai menyatakan bahwa setiap dewan pengurus di daerah memiliki hak memperoleh satu suara tambahan untuk setiap lima kursi yang mereka berikan. Namun, pendukung Gus Dur menolak memberikan suara tambahan ini. Mereka khawatir jika hak ini diberikan, Gus Dur dan Muhaimin dapat terjegal. Menurut perhitungan mereka, DPW Jawa Timur, sebagian besar DPC dari Provinsi Jawa Timur, DPW Provinsi Jawa Tengah, dan sejumlah DPC dari Jawa Tengah yang berjumlah mencapai 255 suara tambahan, akan menggunakan haknya[52] untuk melawan Gus Dur dan Muhaimin di dalam sesi pemilihan. Karena alasan ini, pendukung Gus Dur kemudian mengabaikan hak tersebut.

---

[50] Aklamasi ini dilakukan oleh DPW dan tidak melibatkan DPC, unsur lain yang memiliki hak suara di pemilu, lihat "Muktamar Dinilai Tidak Demokratis, Rekonsiliasi PKB Makin Sulit", *Kompas*, 20 April 2005.

[51] "Ma'ruf Amin Saingi Gus Dur", *Koran Tempo*, 16 April 2005.

[52] Hal ini berarti oposisi hanya membutuhkan sekitar 80 suara untuk mengamankan hasil dari ratusan DPC di seluruh Indonesia. "Kubu Saiful Ingin Muktamar Tandingan", *Koran Tempo*, 19 April 2005.

Lebih dari itu, kelompok Alwi-Saifullah juga mengamati bahwa banyak peserta muktamar kali ini yang ilegal. DPW Provinsi Jawa Timur melaporkan, misalnya, pada sesi pemilihan ketua umum Dewan Tanfidz, beberapa orang memasuki kotak suara dan mencoblos meski namanya tidak ada dalam undangan.[53] Ada juga yang ketika nama seseorang dipanggil nekat beranjak menuju kotak pencoblosan meski jelas-jelas itu bukan namanya. Pendukung Alwi-Saifullah mencurigai pendukung Gus Dur mengundang orang-orang ini untuk memenangkan Muhaimin. Sebaliknya, muktamar ini justru secara sengaja tidak mengundang Alwi Shihab sebagai tokoh penting yang memiliki hak dan kewajiban untuk melaporkan kinerjanya di forum ini.[54] Akibat berbagai pelanggaran itu, kelompok Alwi-Saifullah menganggap muktamar ini tidak sah karena dipenuhi banyak pelanggaran.[55] Sejumlah unsur termasuk ulama NU menyatakan kritik yang sama.[56]

Sementara itu, peranan signifikan Gus Dur pada kasus pemecatan Muhaimin dapat dilihat di forum yang disebut rapat pleno. Di forum itu, Gus Dur pun mengeluarkan tiga opsi bagi para peserta rapat, yakni (1) melakukan MLB, (2) tidak melakukan MLB dengan catatan dia akan mengendalikan partai sepenuhnya, atau (3) meminta Muhaimin untuk mundur.[57] Pilihan itu ditafsirkan oleh banyak kalangan sebagai "ikut Gus Dur atau Muhaimin". Salah satu tokoh NU menyatakan:

> Banyak pihak di dalam dan di luar PKB menyatakan bahwa pemaksaan untuk mundur terhadap Muhaimin itu secara hukum tidak benar. Apa

[53] DPW PKB Jawa Timur, *Data dan Fakta Pelanggaran AD/ART di Muktamar II Semarang*, p. 10. "Muktamar Dinilai Tidak Demokratis, Rekonsiliasi PKB Makin Sulit", *Kompas*, 20 April 2005. Tentang masalah ini lihat pula "Muktamar PKB tanpa Kehadiran Alwi Shihab and Saifullah Yusuf", *Kompas*, 17 April 2005.

[54] "PKB Terancam Pecah", *Suara Karya*, 18 April 2005.

[55] Mengenai pelanggaran konstitusional jalannya Muktamar lihat DPW PKB Jawa Timur, *Data dan Fakta Pelanggaran AD/ART di Muktamar II Semarang*, 8–10.

[56] Kamarudin, *Konflik Internal PKB*, 152–154.

[57] Seperti disebutkan oleh Prof. M. Mahfud M.D., dalam *http://hariansib.com/?p=28694, 28 Maret 2008*.

> pun alasannya, ketua umum yang dipilih oleh lebih dari 400 cabang di dalam muktamar tidak bisa dipaksa mundur oleh rapat gabungan. Ini adalah pandangan yang berlandaskan sistem dan hukum. Tetapi kalau kita meninjau dari aspek politik, ada perbedaan pandangan. Muslim Abdurrahman mengatakan bahwa kalau disuruh memilih antara Gus Dur dan Muhaimin, dia akan memilih Gus Dur. Katanya, kalau Muhaimin tidak mundur, Gus Dur yang akan mundur. Karena itu, hampir semua yang hadir dalam rapat gabungan itu memilih Muhaimin yang diminta untuk mengundurkan diri. Ini adalah pandangan yang berlandaskan ketokohan Gus Dur.[58]

Dari pernyataan ini terlihat bahwa pada dasarnya para kader mengakui adanya pelanggaran aturan main dalam proses pencopotan jabatan Muhaimim, namun mereka terpaksa mendiamkan demi mempertahankan Gus Dur. Mereka berpandangan bahwa reputasi nasional dan internasional yang dimiliki Gus Dur jelas lebih menjual dan mampu menjaga kebesaran partai ketimbang Muhaimin. Mereka juga melihat bahwa massa PKB di akar rumput mayoritas jelas lebih memilih Gus Dur ketimbang Muhaimin. Dikatakan oleh salah seorang pendukung Gus Dur bahwa:

> PKB tanpa Gus Dur pasti hanya sedikit pendukungnya. Karena orang mencoblos PKB sebenarnya adalah mencoblos Gus Dur … Cak Imin (Muhaimin, *pen*) itu kecil, tidak sebanding dengan kebesaran Gus Dur yang mempunyai pendukung di mana-mana.[59]

Pembahasan di atas memperlihatkan posisi spesial Gus Dur yang dapat berada di atas aturan main dalam proses pembuatan beberapa keputusan penting di PKB. Kondisi tersebut juga mencerminkan tidak adanya musyawarah sebagai formula utama dalam proses pembuatan keputusan. Menurut Parawansa, struktur pembuatan keputusan di PKB tidak didasarkan pada semangat musyawarah.

---

[58] K.H. Salahudin Gus Dur, "Membaca Konflik PKB", 9 April 2008, dalam Ratnawati, "Beberapa Masalah Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Alternatif Solusi", 103–104.

[59] *Ibid.*, 99.

Setiap pihak mengambil keputusannya sendiri-sendiri. Situasi inilah yang pada akhirnya kerap menjadi pemicu terjadinya konflik.[60]

Berbagai kasus di atas juga menunjukkan ketidakmampuan partai untuk mengontrol manuver-manuver Gus Dur. Sebagai pemimpin, Gus Dur tampaknya menyadari situasi yang menguntungkan dirinya ini, yang membuatnya cukup percaya diri untuk dapat mewujudkan setiap kehendaknya. Kurangnya pelembagaan memuluskan jalan baginya untuk mewujudkan kehendaknya dan membuat kepentingan individualnya terlihat menjadi kepentingan kolektif (partai). Kondisi ini menandai rendahnya tingkat *systemness* atau kesisteman, yang pada akhirnya memperpanjang ketergantungan partai kepada tokoh daripada kepada sistem atau aturan main partai.

C. Dampak: Menuju Perpecahan

1. Munculnya Resistensi Internal

Keputusan demi keputusan inkonstitusional pada akhirnya menimbulkan kekecewaan bagi banyak kader, yang kemudian menyebabkan munculnya perlawanan. Dalam kasus Matori, keputusan sepihak dan inkonstitusional Gus Dur dan pengikutnya menimbulkan tanda tanya besar. Bagi Matori dan pendukungnya, sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz, dirinya hanya dapat dipecat dari jabatannya melalui forum muktamar atau MLB di mana dia akan melaporkan seluruh tindakannya.[61] Oleh karena itu, forum lain selain forum muktamar atau MLB tidak sah untuk membuat keputusan apa pun atas posisinya.

Beberapa saat setelah pemecatannya, Matori melakukan sejumlah inisiatif yang menunjukkan sebuah perlawanan. Pada 30 Juli 2001, atau sembilan hari setelah pemecatan dirinya, Matori di depan media menyatakan dirinya sebagai Ketua PKB yang sah, yang

---

[60] Wawancara dengan Khofifah Indar Parawansa, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999–2001), Ketua Badan Pelaksana Pemenangan Pemilu PKB (2002–2005), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

[61] "Gamma", 14–20 November 2001, dalam Kamarudin, *Konflik Internal PKB*, 92.

akan melaporkan seluruh kegiatannya di muktamar atau di MLB.[62] Sehubungan dengan itu, dia juga menolak menghadiri forum apa pun untuk menilai kinerjanya sebagai Ketua Umum Dewan Syura. Tidak itu saja, dia pun memecat Gus Dur dari posisinya sebagai Ketua Umum Dewan Syura dan menunjuk Ibrahim Laconi sebagai pengganti sementara.[63] Pada waktu ketika Gus Dur tengah berada di puncak popularitas dan didukung hampir seluruh tokoh NU, manuver Matori untuk memecat Gus Dur itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sebagai bentuk perlawanan lainnya, dia juga berinisiatif mengonsolidasi partai dengan membangun banyak badan pelaksana di pengurus lokal. Upaya ini merupakan bagian antisipasinya terhadap kemungkinan perlawanan dari dewan pengurus lokal yang menolak untuk mengakui kedudukan dan perintahnya.[64]

Meski demikian, banyak dari manuver perlawanan Matori secara prosedural juga melanggar AD/ART partai. Keputusannya untuk memecat Gus Dur jelas tidak sah karena dia sebagai Ketua Umum Dewan Syura hanya dapat diganti melalui forum tertinggi partai, yaitu muktamar. Kemudian, tindakannya untuk membentuk badan-badan pengurus eksekutif juga tidak sesuai dengan aturan main partai, karena ART partai tidak menyebutkan dan mengatur keberadaan institusi ini.

Pada kasus Alwi dan Saifullah, kekecewaan mereka dan pendukungnya berujung juga pada perlawanan. Mereka melontarkan wacana-wacana yang mementahkan alasan pembenaran pemecatan mereka. Di berbagai forum, baik Alwi maupun Saifullah dan para pendukungnya menyatakan dengan tegas bahwa apa yang telah dilakukan Gus Dur dan para pendukungnya adalah jelas pelanggaran aturan main dan pemaksaan kehendak. Alwi berulang kali

[62] "DPP PKB Masih Beri Kesempatan Kepada Matori. Matori Masih Merasa Ketua Umum PKB", *Kompas*, 31 Juli 2001.

[63] "MLB Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta. Matori Abdul Djalil Ingin Lepas Dari Bayangan", *Kompas*, 16 Januari 2002. Choirie, *PKB Politik Jalan Tengah NU*, 300.

[64] Mohammad Muzamil, "Ke Arah Penyelesaian Konflik PKB", *Kompas*, 17 November 2001.

menyatakan forum yang lebih rendah tidak dapat menganulir forum tertinggi. Keputusan yang dibuat pada rapat pleno sama sekali tidak dapat menggantikan keputusan yang dibuat pada forum muktamar.[65] Sementara Saifullah selalu menekankan bahwa hasil *voting* tidak dapat digunakan sebagai landasan untuk memecat dirinya.[66] Oleh karena itu, hasil *voting* tidak memiliki konsekuensi hukum.[67]

Selain itu, pendukung Alwi dan Saifullah juga gencar melakukan penolakan atas gagasan larangan rangkap jabatan. Mereka berargumen bahwa salah satu tujuan utama politisi untuk masuk dalam kehidupan politik adalah memegang jabatan publik, termasuk pos-pos kementerian. Oleh karena itu, keputusan untuk melarang anggota partai rangkap jabatan itu melawan hukum alam dan di tingkat praktis menghambat peluang kader mengembangkan karier dan pengalaman mereka di bidang politik.[68]

Menurut Anam, salah satu tokoh pendukung Alwi dan Saifullah, keputusan untuk menolak jabatan ganda pada dasarnya tidak sejalan dengan semangat AD/ART partai. Dia menyatakan, AD/ART partai mendukung seluruh kader untuk mendedikasikan hidupnya di dalam atau di luar partai untuk berkiprah sebagai bagian pengabdian mereka kepada bangsa dan negara.[69] Berarti, menurut Anam, AD/ART partai memungkinkan anggota partai untuk memperoleh jabatan posisi strategis di luar partai untuk memberikan pengabdian bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan, karena alasan ini, anggota partai tidak harus melepaskan jabatannya di kepengurusan partai. Kemudian selama era kepresidenan Gus Dur, PKB tidak menganggap rangkap jabatan sebagai masalah. Kenyataannya, Gus Dur menduduki dua jabatan

---

[65] "DPP PKB Dinilai Langgar AD/ART", *Media Indonesia*, 15 April 2005.

[66] Saifullah Yusuf, "Mengapa Saya Menolak Reposisi", dalam M. Aminudin (ed.), *"Menyingkap Kemelut PKB: Kontroversi Reposisi Saifullah Yusuf",* (Jakarta: CV Mulia Sari, 2004), 13–15, dalam *Kamarudin, Konflik Internal PKB*, 106–107.

[67] Kamarudin, *Konflik Internal PKB*, 106–107.

[68] Putusan No. 274/Pdt.G/2005/PN.JAKSEL dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 16 Agustus 2005. Kamarudin, *Konflik Internal PKB*, 125.

[69] DPW PKB Jawa Timur, *Data dan Fakta Pelanggaran AD/ART di Muktamar II Semarang*, 4.

secara bersamaan, yakni sebagai Presiden dan Ketua Umum Dewan Syura. Oleh karena itu, keputusan untuk melarang setiap anggota memegang jabatan ganda tidaklah konsisten.

Perlawanan tidak hanya dalam level wacana. Kelompok Alwi dan Saifullah belakangan memerkarakan DPP PKB pimpinan Gus Dur dan Muhaimin ke pengadilan. Digunakannya forum yang tidak tepat untuk memecat mereka menjadi salah satu poin utama bagi Shihab dan pendukungnya memerkarakan DPP PKB ke pengadilan.[70] Mereka menolak saran Gus Dur dan pendukungnya agar tidak membawa masalah internal ke pengadilan. Sebagai mantan teman dekat dan anak didik Gus Dur, Alwi dan Saifullah kali ini sama sekali tidak ragu menyuarakan perlawanannya kepada Gus Dur. Keberanian membawa kasus ini ke pengadilan membuat Gus Dur menjadi semakin kecewa terhadap keduanya. Mahkamah Agung (MA) akhirnya memenangkan Alwi untuk kasus pemecatan dirinya pada tahun 2005, dengan alasan-alasan yang sama dengan yang telah berulang kali disampaikan oleh Alwi.[71]

Perlawanan juga dilakukan oleh Muhaimin dan para pendukungnya. Setelah berpikir selama beberapa hari, dia akhirnya memutuskan untuk melawan kebijakan pemecatan atas dirinya. Muhaimin menganggap keputusan sepihak itu didasari oleh informasi yang keliru, yang diembuskan oleh para pembisik yang merupakan pesaingnya di partai. Untuk itu, Muhaimin membentuk Tim Kecil beranggotakan Nursyahbani Katjasungkana, Abdul Kadir Karding, dan Helmy Faizal Zaini untuk menyelidiki siapa saja yang berhasil menghasut Gus Dur dan menimbulkan kekisruhan di PKB. Tim ini menemukan tujuh orang yang berpotensi telah memberikan informasi salah ke Gus Dur mengenai Muhaimin dan berniat buruk untuk menghancurkan PKB dari dalam. Orang-orang ini adalah

[70] Fuadi (ed.), "Tinjauan Ilmu Hukum tentang Keabsahan Kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa Pasca Mahkamah Agung", (Jakarta: Lakumham DPP PKB, 2006), 297, dalam Kamarudin, *Konflik Internal PKB*, 123.

[71] *Kompas*, 19 November 2005. Hal ini diputuskan dalam Putusan MA No.1896 K/P.dt./2005, 15 November 2005.

Sigit Haryo Wibisono (anggota Dewan Syura), Hermawi F. Taslim (Ketua Dewan Tanfidz), Zannuba Arifah Chafsoh (Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz), Ikhsan Abdullah (Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz), Artalyta Suryani (Bendahara), Aris Junaidi (Wakil Bendahara), dan Moeslim Abdurrahman (Ketua Umum Pengurus Dewan Pengurus PKB DKI Jakarta).[72]

Tidak selesai dengan pembentukan Tim Kecil, Muhaimin memutuskan untuk melawan balik dengan lebih terorganisasi. Bersama-sama teman dekat dan para simpatisannya, Muhaimin membentuk kepengurusan partai versi dirinya di seluruh Indonesia. Upaya ini berhasil dengan memuaskan. Kelompoknya mampu membentuk kepengurusan itu dengan cepat hampir di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya itu, menyadari arti penting perang pencitraan, Muhaimin dan loyalisnya secara intensif dan terencana menyerang sejumlah tokoh yang memiliki hubungan khusus dengan Gus Dur, termasuk anak perempuan Gus Dur, sebagai pengkhianat. Kubu Muhaimin menyebut mereka sebagai orang-orang yang berbahaya karena peran mereka untuk menghancurkan kesatuan partai. Muhaimin menyampaikan pesan ini secara masif ke seluruh kader PKB. Hal ini tidak saja ditujukan untuk mempertahankan posisinya, tetapi juga memberikan citra buruk pada musuh-musuhnya. Pencitraan buruk ini jelas pada akhirnya semakin memanaskan situasi.

2. Pembentukan Faksi dan Perpecahan

Dalam perkembangannya, setiap kelompok yang berkonflik berkeyakinan bahwa mereka adalah representasi PKB yang sesungguhnya. Kelompok non-Gus Dur, tidak lama setelah deklarasi perlawanan, mampu membangun dukungan dari banyak pihak termasuk pengurus lokal dan cabang di hampir seluruh Indonesia. Keberadaan dua kepengurusan kembar pun hanya tinggal menunggu waktu. Ali M.

---

[72] "Buntut Kisruh PKB, Gus Dur Bekukan 40 DPC dan DPW", *www.hariansib.com*, dalam Ratnawati, "Beberapa Masalah Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Alternatif Solusi", 104. "Ali Masykur Pelaksana Tugas Ketum", *Kompas*, 6 April 2008.

Musa berkomentar bahwa "Pengelolaan partai yang jauh dari modern memberikan ruang bagi partai untuk mengabaikan aturan main dalam proses pengambilan keputusan, yang kemudian menyebabkan terjadinya perkubuan antara kelompok yang diuntungkan oleh situasi dan yang tidak".[73]

Faksionalisasi akhirnya memberi jalan bagi penguatan konflik partai, yakni dengan masuknya konflik ke tahap formalisasi. Dalam hal ini, setiap kelompok yang berkonflik berupaya melegalkan kubunya. Untuk kepentingan itu, masing-masing pihak menyelenggarakan muktamar atau MLB sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan. Forum ini terbukti tidak dirancang untuk membangun rekonsiliasi dan mengatasi perpecahan dengan semangat *win-win solution*. Alih-alih membangun kesepahaman, setiap kelompok yang berkonflik malah menggunakan forum ini sebagai alat untuk mempertahankan keberadaannya dan menyingkirkan lawan.

Bagi kubu non-Gus Dur, MLB adalah kesempatan untuk melegalkan resistensi mereka terhadap Gus Dur sebagai guru politik mereka. Lawan-lawan Gus Dur juga menggunakan MLB sebagai forum untuk menunjukkan ada banyak persoalan dan kesalahan serius di partai ini, yang dilakukan Gus Dur dan pendukungnya. Sebaliknya, bagi kubu Gus Dur, penyelenggaraan MLB adalah sekadar sebuah konsekuensi logis dari adanya pergantian pengurus, khususnya terkait dengan keberadaan ketua umum Dewan Tanfidz dan sekretaris jenderal partai yang baru. Bagi kubu Gus Dur, ada atau tiadanya MLB tidak akan mengubah apa pun. Akan tetapi, secara politis, forum muktamar atau MLB jelas diperlukan oleh masing-masing kubu. Hal ini setidaknya untuk memperlihatkan bahwa keputusan mereka didukung oleh banyak kader hingga ke pelosok daerah atau setidaknya bukan sesuatu yang tidak populer di mata kader.

---

[73] Wawancara dengan Dr. Ali Masykur Musa, Wakil Ketua Dewan Tanfidz PKB (2005–2010) dan Ketua Umum Dewan Tanfidz "PKB-Gus Dur" (2008–2009), di Jakarta, 19 Oktober 2010.

Sebagai manifestasi atas kepentingan ini, pada 14–16 Januari 2002, Kubu Matori menyelenggarakan MLB di Jakarta guna mengesahkan posisinya dan membentuk kepengurusan, yang kemudian popler disebut sebagai PKB-Matori atau PKB-Batu Tulis. Matori menyatakan bahwa PKB di bawah kepemimpinannya akan membangun mekanisme demokratis dan mengakhiri mentalitas feodalistis. Dia menyatakan, PKB di bawah kepemimpinannya akan dikembangkan menjadi partai yang sebenar-benarnya demokratis.[74] Menurut salah satu pendirinya, PKB-Matori pada dasarnya ingin menunjukkan tidak berfungsinya aturan main partai pada PKB sebelumnya.[75] Akan tetapi, PKB-Matori gagal meyakinkan pengadilan dan kalah. Hal ini memuluskan jalan bagi PKB-Kuningan untuk memperoleh pengakuan pihak pemerintah. Sebelum Pemilu 2004, PKB-Matori berubah namanya menjadi PKD (Partai Kejayaan Demokrasi).

Di lain pihak, sebagai konsekuensi pemecatan Matori, para pendukung Gus Dur merasa perlu untuk memilih ketua umum Dewan Tanfidz yang baru agar segera membuat dan menetapkan kepengurusan baru. Untuk kepentingan itu, kubu Gus Dur melakukan MLB di Yogyakarta pada 17–19 Januari 2002. Para peserta kemudian memilih Alwi Shihab sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz dan mengukuhkan posisi Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syura untuk periode 2002–2005. Di forum itu pula, Saifullah Yusuf disetujui oleh para peserta sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz yang baru. MLB ini memperoleh dukungan penuh dari sebagian besar ulama NU, yang kemudian menyempatkan diri menghadiri forum ini. Hal ini menunjukkan dukungan kuat ulama kepada PKB versi Gus Dur dan Alwi, yang kemudian populer sebagai PKB-Kuningan.

Pada kasus Alwi dan Saifullah, pendukung kubu ini melakukan muktamar pada tahun 2005 yang disebut sebagai "Muktamar yang Benar" di Surabaya. Muktamar ini adalah alternatif Muktamar Sema-

---

[74] Nita Nawangwulan, "Muktamar PKB Matori: Menghancurkan Kultur Feodal", *detik.com*, 10 Januari 2002.

[75] Ali dan Nurhuda Y., *Pergulatan Membela yang Benar: Biografi Matori Abdul Jalil*, 289.

rang yang diselengarakan para pendukung Gus Dur. Di Muktamar Surabaya ini, pendukung Alwi dan Saifullah termasuk para Ulama *Khos* mendeklarasikan pengurus baru PKB dan menunjuk Abdurrahman Chudlori sebagai Ketua Umum Dewan Syura dan Choirul Anam sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz. PKB versi ini kerap juga disebut PKB-Ulama. Sebagian besar eksponen partai ini[76] akhirnya kemudian menjadi tokoh di balik pendirian partai baru, yaitu Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Salah satu tujuan utama pendirian partai baru ini adalah mengubah kehidupan partai kaum Nahdiyin yang terkungkung di bawah Gus Dur dan kelompoknya. Sebagai upaya untuk mencapai maksud tersebut, PKNU membentuk Dewan Mustasyar (Dewan Penasihat) sebagai badan tertinggi partai. Salah satu fungsi Dewan Penasihat adalah mengontrol kebijakan yang dibuat Ketua Umum Dewan Syura.

Upaya untuk memformalisasikan keberadaannya juga terjadi di kubu Muhaimin, yang mengadakan MLB di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta, 2–4 Mei 2008. MLB itu mengukuhkan kepemimpinan Muhaimin di PKB versinya. MLB ini juga memilih K.H. Azis Mansyur sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Syura yang baru. PKB inilah yang kerap disebut sebagai PKB-Muhaimin atau PKB-Ancol. Di lain pihak, kubu Gus Dur juga mengadakan MLB yang dilangsungkan di Pesantren Ashiriyyah Nurul Iman, Parung, Bogor, Jawa Barat, 30 April–1 Mei 2008. Forum ini memperkuat posisi Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syura dan Ali Masykur Musa sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz yang baru. PKB ini kemudian dikenal sebagai PKB-Gus Dur atau PKB-Parung. Dua PKB ini masih eksis hingga Pemilu 2009 berakhir, meskipun hanya PKB-Ancol yang berhak ambil bagian dalam Pemilu 2009.[77] Pada tahun 2011, PKB-Gus Dur

[76] Mereka di antaranya Abdullah Faqih, Ma'ruf Amin, Abdurrahman Chudlori, Idris Marzuki, A. Warson Munawwir, Muhaiminan Gunardo, Abdullah Schal, Soleh Qosim, Nurul Huda Dzajuli, Muhammad Subadar, Chairul Anam, dan Alwi Shihab.

[77] Melalui Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah akhirnya menyatakan putusan untuk memenangkan kelompok Iskandar pada 24 Juli 2008.

mengubah namanya menjadi Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN).

Setelah masing-masing membentuk kepengurusan baru sebagai salah satu hasil MLB, keberadaan pengurus ganda yang menunjukkan adanya perpecahan partai tidak dapat dihindari lagi. Situasi tersebut tidak akan terjadi apabila sejak dini partai telah berusaha sungguh-sungguh untuk konsisten menaati aturan main partai dan menghindari membuat keputusan inkonstitusional, yang belakangan terbukti menyebabkan timbulnya kekecewaan, resistensi, dan akhirnya hilangnya soliditas internal.

D. Ringkasan

Kasus-kasus di atas menunjukkan begitu mudahnya seorang Ketua Umum Dewan Tanfidz dapat kehilangan jabatannya di PKB. Hal ini pada dasarnya memperlihatkan rendahnya tingkat kepemimpinan prosedural, yang secara fundamental mengonfirmasi rendahnya tingkat kesisteman (*systemness*) di partai ini. Di lain pihak, kepemimpinan personal berperan dominan di PKB. Peran sentral Gus Dur yang demikian deterministik di partai ini tidak dapat dihindari. La Ode Ida menyebutnya sebagai bentuk personifikasi kekuasaan.[78] Gabungan tingkat kesisteman yang rendah dan munculnya model kepemimpinan personal pada akhirnya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial, yang kemudian memicu resistensi dan kerusakan serius dalam tingkat keharmonisan di internal. Seiring dengan perjalanan waktu, keutuhan partai menjadi sulit diraih. Keberadaan MLB dan terbentuknya pengurus alternatif sebagai manifestasi resistensi adalah bukti hilangnya keutuhan partai. Bahasan di atas membuktikan adanya korelasi antara pelembagaan yang lemah, yang ditandai dengan ketiadaan kepemimpinan prosedural, dan perpecahan internal partai.

---

[78] Laode Ida, "PKB dalam Jebakan 'Gus Durisme'", *Media Indonesia*, 19 April 2005.

BAB VI
KEPEMIMPINAN PROSEDURAL DI PKS: PERAN MAJELIS SYURA DAN MEKANISME MUSYAWARAH

> Di PKS, dialog yang ekstensif mendahului setiap proses pembuatan keputusan. Setiap anggota Majelis Syura memiliki ruang yang luas untuk menyatakan pendapatnya. Suatu hal yang wajar untuk melakukan *voting* apabila kesimpulan tidak dapat dicapai melalui aklamasi. (Mahfudz Siddiq)[1]

> Keputusan tentang nominasi presiden ada di domain Majelis Syura, bukan Ketua Majelis Syura. (Hilmi Aminuddin)[2]

Sebagai satu-satunya partai Islam yang mampu menghindari perpecahan, PKS memiliki sejumlah karakteristik dan kebijakan yang dapat membantu menjelaskan hal ini. Secara umum ada kepercayaan yang kuat dan relatif merata di antara anggota dan kader partai tentang pentingnya mengikuti aturan main partai. Untuk menganalisis implementasi kepemimpinan prosedural di PKS, bagian ini akan mengetengahkan dua persoalan utama, yakni 1) seberapa besar komitmen partai terhadap aturan main terkait dengan keberadaan Majelis Syura sebagai lembaga pembuat keputusan tertinggi dalam partai; dan 2) seberapa intens implementasi atau pelaksanaan musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan.

---

[1] Wawancara dengan Mahfudz Siddiq, Ketua Departemen Kaderisasi DPP PKS (2002–2005) dan Anggota DPR RI (2004–2014), di Jakarta, 27 Oktober 2010.

[2] "Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009", *Tribun Timur*, 23 Juli 2008.

Dalam perspektif pelembagaan, dua komitmen itu dapat dilihat sebagai esensi utama untuk mengukur keberadaan kepemimpinan prosedural terkait dengan fenomena soliditas partai politik. Pembahasan di dalamnya akan mencakup sejumlah topik, yaitu aspek legal-formal proses pembuatan kebijakan, situasi di balik proses pembuatan kebijakan, hadirnya spirit musyawarah, dan dampak semuanya terhadap soliditas partai.

A. Aspek Legal-Formal dan Latar Belakangnya

Di dalam proses pembuatan keputusan, PKS menetapkan musyawarah sebagai mekanisme utama yang harus dijalankan. Anggaran dasar partai menyebutkan bahwa partai menjalankan prinsip musyawarah dalam proses pembuatan keputusan.[3] Dengan prinsip ini, setiap kebijakan tidak dapat diputuskan oleh hanya satu orang atau kelompok terbatas. Prinsip ini menjadi sesuatu yang fundamental di AD/ART partai yang tidak pernah diubah, walaupun AD/ART partai sendiri telah diamandemen beberapa kali.

Prinsip musyawarah itu sendiri berasal dari konsep syura.[4] Dalam syura, ajaran Islam dan pendapat para ulama atau ahli adalah sumber utama pengambilan keputusan. Menurut Anis Matta, dalam beberapa hal, syura, yang berlandaskan norma-norma keagamaan, memiliki kekhasan yang tidak dapat disamakan begitu saja dengan demokrasi.[5] Meski demikian, dalam proses pengambilan keputusan, selain mengakui pentingnya peran ajaran-ajaran Islam sebagai pedoman dalam proses pembuatan keputusan, PKS juga memahami arti musyawarah sebagai cara untuk memelihara rasa kebersamaan dan perluasan partisipasi. Dengan demikian, walaupun PKS memiliki kecenderungan untuk mempertimbangkan pandangan dan eva-

---

[3] *AD PK Pasal 8; AD PKS 2002 Pasal 22 (1), 22 (2); AD PKS 2005 Pasal 24.*

[4] Lili Romli, "Model Pelembagaan Partai Politik di Indonesia: Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera", di Edison Muchlis M., *Reformasi Pelembagaan Partai Politik Pasca-Orde Baru di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2007), 62–63.

[5] Anis Matta, "Dakwah, Poltik dan Strategi", di *Saksi*, Nomor 11, Tahun III, 6 Maret 2001.

luasi para ahli sebagai sumber utama dalam memutuskan kebijakan daripada mendahulukan sekadar "suara orang kebanyakan", namun pelaksanaan pembuatan keputusan di partai ini tidak pula mengeliminasi aspirasi masyarakat atau dalam hal ini para kader.[6] Oleh karena itu, musyawarah yang dipahami dalam partai ini berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan untuk mengakomodasi suara khalayak (kader) dan menjalankan nilai-nilai Islam dalam pembuatan kebijakan partai.[7] Dapat juga ditambahkan bahwa komitmen terhadap musyawarah tidak hanya sejalan dengan semangat untuk melaksanakan AD/ART partai, tetapi juga sebagai bentuk upaya menghindari kepemimpinan personal.

Selain mengedepankan konsep musyawarah, PKS juga melaksanakan mekanisme aklamasi dan *voting* dalam pembuatan kebijakan.[8] Mekanisme ini digunakan terutama ketika forum pengambilan keputusan sulit menemukan kesepakatan atau *deadlock*. AD/ART PKS menegaskan bahwa partai harus menerapkan berbagai mekanisme ini, termasuk di tingkat Majelis Syura sebagai institusi tertinggi dalam pembuatan kebijakan-kebiajakan strategis.

Pada tahun 2002, partai menyatakan Majelis Syura sebagai *ahlul halli wal aqdi* partai. Sebagai konsekuensinya, badan ini memiliki peran penting dalam (1) menentukan arah tujuan partai, (2) memilih sejumlah pimpinan untuk badan-badan atau perangkat partai di tingkat nasional, dan (3) membuat kebijakan-kebijakan yang penting

---

[6] Abu Ridha menyatakan bahwa di dalam pemerintahan negara Islam khususnya di era empat Khalifah, rakyat masih memiliki peran penting karena mereka memiliki kekuasaan yang sah untuk memilih para pemimpin mereka. Lihat Abu Ridha, *Negara dan Cita-Cita Politik*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2004), 32.

[7] Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Partai Keadilan, *Panduan Pengambilan Kebijakan dalam Musyawarah Partai Keadilan*, (Jakarta: 2000), 34. Firman Noor, *Moderate Islamic Fundamentalism in Indonesia: A Study of Political Thinking and Behaviour of The Prosperous Justice Party (PKS), 1998–2005*, Tesis M.A., (Canberra: Faculty of Asian Studies, Australian National University, 2006), 88.

[8] *AD PKS 2002 Pasal 21 (1); AD PKS 2005 Pasal 24 (2).*

dan mendasar.[9] Sebelum tahun 2002, PKS menjadikan musyawarah nasional sebagai institusi tertinggi yang menjalankan sejumlah fungsi utama Majelis Syura.[10] Kemudian, partai mengubah forum ini menjadi rapat tertinggi partai yang disebut Musyawarah Majelis Syura. Sejumlah badan di dalam partai memang berhak membuat kebijakan, khususnya yang terkait dengan fungsi spesifiknya, tetapi hanya Musyawarah Majelis Syura yang memegang otoritas tentang pembahasan fungsi strategis dan fundamental partai.

Untuk mengisi keanggotaan Majelis Syura—yang secara tidak langsung akan menentukan komposisi pimpinan lembaga-lembaga tinggi partai lainnya, termasuk Presiden Partai—PKS melakukan pemilihan internal yang melibatkan kader yang telah mencapai status kader inti.[11] Untuk kepentingan ini, partai memberikan kesempatan bagi para kader inti untuk menentukan komposisi Majelis Syura secara langsung.

Walaupun Majelis Syura menjadi badan terpenting di PKS, namun AD/ART partai menjamin independensi Dewan Syariah, baik Dewan Syariah Pusat, Dewan Syariah Wilayah, maupun Dewan Syariah Daerah, dalam melaksanakan fungsinya sebagai institusi pembuat fatwa.[12] Dewan Syariah memiliki kebebasan khusus untuk memberikan saran dan mencari solusi masalah di dalam kerangka perspektif hukum Islam bagi partai dan kader. Sebagai badan arbitrase, yang akan dibahas secara lebih komprehensif dalam Bab VIII, Dewan Syariah memainkan peran sebagai badan independen untuk mendamaikan kelompok-kelompok yang berkonflik dan memecat anggota partai yang memang bersalah. Dalam hal ini, Majelis Syura akan bertindak sebagai pengawas Dewan Syariah tanpa otoritas untuk melakukan intervensi. Meski tidak dapat diintervensi oleh Majelis

---

[9] *ART PK Pasal 18; AD PKS 2002 Pasal 10 dan 12; AD PKS 2005 Pasal 11.*

[10] *AD PK Pasal 9.*

[11] *AD PKS 2002 Pasal 12 (1) dan 12 (2); AD PKS 2005 Pasal 18 (1).*

[12] *ART PKS 2005 Pasal 14 (5).*

Syura, Dewan Syariah sama dengan institusi lain, harus melaporkan aktivitasnya secara periodik dan langsung kepada Majelis Syura.[13]

Dewan Syariah juga berperan dalam hal pemecatan anggota. Partai menetapkan Dewan Syariah sebagai lembaga yang dapat difungsikan menjadi pengadilan internal partai, untuk memberikan rekomendasi apakah pemecatan itu sebaiknya dilakukan atau tidak.[14] Sebelum ditetapkan statusnya, setiap kader berhak melakukan pembelaan diri di hadapan Dewan Syariah dan untuk mendapatkan bantuan pengacara.[15] Manakala keputusan yang dibuat Dewan Syariah di tingkat provinsi atau kabupaten tidak memuaskan kader, mereka dapat meminta Dewan Syariah di tingkat lebih tinggi untuk mengambil alih kasus itu.[16] Sehubungan dengan hal ini, keputusan Dewan Syariah Pusat merupakan keputusan final dan mengikat. DPP akan menerbitkan surat pemecatan berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah, dan persetujuan Majelis Syura untuk kasus ini melibatkan anggota Majelis Syura.

Pembahasan di atas menunjukkan beberapa prinsip dalam proses pembuatan keputusan PKS. Prinsip pertama adalah musyawarah. Hal ini merupakan mekanisme utama di PKS yang harus dilaksanakan manakala partai akan membuat satu keputusan. Dengan semangat mengakui pentingnya partisipasi, partai memberikan peluang bagi kader untuk mengikuti proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua adalah posisi penting Majelis Syura sebagai institusi utama dalam proses pembuatan keputusan. Hasil keputusan lembaga ini harus diikuti oleh para kader. Ketiga adalah pengakuan adanya *power sharing* (pembagian kekuasaan), terutama dalam kaitannya dengan pembuatan fatwa, di mana Dewan Syariah memiliki inde-

---

[13] *AD PKS 2002 Pasal 12 (7); AD PKS 2005 Pasal 15 (2.a).*

[14] *ART PK Pasal 12 (3), 12 (4) dan 27 (2); ART PKS 2002 Pasal 13 (1), 13 (2); ART PKS 2005 Pasal 10 (3.b).*

[15] *ART PK Pasal 10 (3.e); ART PKS 2002 Pasal 13 (1), 13 (2); ART PKS 2005 Pasal 6 (3.b.5).*

[16] *ART PK Pasal 27 (2); ART PKS 2002 Pasal 11 (4), 12 (3); AD PKS 2005 Pasal 23 (2.c).*

pendensi dalam membuat kebijakan berdasarkan pada evaluasinya. Peranan Majelis Syura di dalam konteks ini hanya sebagai institusi yang melegitimasi keputusan Dewan Syariah.

Hingga dekade pertama keberadaannya, PKS berupaya konsisten melaksanakan aturan main dalam proses pembuatan kebijakan. Pentingnya mempertahankan aturan main partai menjadi sesuatu yang bernilai atau dihormati oleh kader-kader PKS. Kesadaran ini sejalan dengan ajaran Islam yang menyuruh umatnya untuk dapat mengelola organisasi secara profesional.[17] Menurut Kamarudin, kepercayaan bahwa Allah, para Nabi, dan orang-orang beriman akan menyaksikan setiap karya yang dilakukan seorang muslim menjadi inspirasi para kader untuk tetap profesional.[18]

Kesadaran untuk mempertahankan aturan main partai berkaitan pula dengan kesigapan partai dalam membangun *code of conduct* atau pedoman dan seperangkat kebijakan internal yang harus diikuti seluruh anggota partai. Untuk itu, partai memberikan materi pendidikan termasuk buku, modul, dan pelatihan untuk menjaga disiplin dan mempertahankan perilaku yang tepat.[19] Dapat dikatakan bahwa sejak hari-hari awal keanggotaannya, kader telah ditanamkan untuk

---

[17] Wawancara dengan Amri Yusra, M.Si., Ketua DPD PKS Depok (2002–2004), Anggota Dewan Kotamadya Depok, Jawa Barat, (2004–2009) dan Dosen Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, di Depok, 7 Oktober 2010; dengan Dr. Kamarudin, Pakar Partai Politik Islam dan Dosen Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, di Depok, 7 Oktober 2010; dan dengan Hidayat, M.M., Anggota Dewan Kabupaten Tangerang (2005–2010), di Tangerang, 21 Oktober 2010.

[18] Wawancara dengan Dr. Kamarudin, Pakar Partai Politik Islam dan Dosen Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, di Depok, 7 Oktober 2010.

[19] Buku-buku tersebut termasuk di antaranya Tim DPP Partai Keadilan Sejahtera, *Seri Manhaj Tarbiyah. Manajemen Tarbiyah Anggota Pemula* (Jakarta: DPP PK Sejahtera dan PT Syaamil Cipta Media, 2004). Majelis Pertimbangan Pusat PK Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani: Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera*, (Jakarta, 2008). Bidang Kewanitaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Rakornas Bidang Kewanitaan Partai Keadilan Sejahtera*, (Jakarta: 2001).

mengutamakan prosedur partai sebagai bagian tugas ideologinya.[20] Dengan berbagai hal tersebut, kader PKS menjadi familiar atau terbiasa dengan upaya untuk melakukan sistematisasi perjuangan. Hal ini mencakup pula pembiasaan untuk taat dan mengikuti aturan main atau kebijakan yang telah ditetapkan.[21] Salah satu dampak utama upaya ini adalah disiplin diri dan kesadaran untuk mengikuti perintah dan aturan main partai.

Kemudian, kader juga ditanamkan komitmen untuk menghargai sistem. PKS menegaskan kepada para kader tentang keutamaan bersikap konsisten mengikuti sistem dan aturan partai daripada menggantungkan diri pada orang per orang dalam pengelolaan dan pengembangan partai. Dengan ketegasan ini, kader dilatih untuk taat pada sistem. Dengan kondisi ini pula, PKS kerap mengklaim dirinya sebagai partai yang terbebas dari ketergantungan pada individu tertentu.[22]

---

[20] Wawancara dengan Untung Wahono, Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan DPP PK (2000–2003), Kepala Departemen Politics dan Pertahanan DPP PKS (2002–2005), dan Ketua MPP PKS (2010–2015), di Jakarta 27 Oktober 2010; dengan Selamat Nurdin, M.M., mantan ketua aktivis tarbiyah di Universitas Indonesia, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta (2004–2014), di Jakarta, 22 Oktober 2010.

[21] Wawancara dengan Umar Salim Basalamah, Wakil Sekretaris Jenderal PKS (2002), dan sekretaris pribadi Hidayat Nur Wahid (mantan Presiden PKS dan Ketua MPR RI), di Jakarta, 12 Oktober 2010.

[22] Satria Hadi Lubis, *Yang Nyata dari PK Sejahtera: 35 Manfaat dan Alasan Mengapa Kita Mendukung PK Sejahtera*, (Jakarta: Penerbit Misykat bekerja sama dengan LP2U, 2004), 26. Kamarudin, "Fatsoen dari Partai Keadilan", *"Majalah Saksi"*, Edisi ke-15 Tahun Ketiga, dalam Subhan Akbar, *Partai Keadilan: Faktor-Faktor Penguat Soliditas*, Skripsi, (Depok: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004), 36. Wawancara dengan Yon Mahmudi, Pengamat PKS dan Gerakan Tarbiyah di Indonesia, Dosen Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dan salah satu kader yang menandatangani deklarasi pendirian PKS, di Depok, 11 Agustus 2009; dengan Selamat Nurdin, M.M., mantan ketua aktivis tarbiyah di Universitas Indonesia, Anggota Dewan Provinsi DKI Jakarta (2004–20014), di Jakarta, 22 Oktober 2010. Wawancara dengan Amri Yusra, M.Si., Ketua DPD PKS Depok (2002–2004), Anggota Dewan Kotamadya Depok, Jawa Barat (2004–2009), dan Dosen Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, melalui telepon, 13 Desember 2009.

Menurut Sitaresmi, partai memerintahkan kader untuk konsisten mengikuti prosedur partai. Dia berkata “kita dianjurkan untuk taat pada aturan main partai, pada institusi, pada Majelis Syura”.[23] Selain itu, Sitaresmi mengatakan bahwa Hilmi Aminuddin sebagai tokoh utama partai ini meyakini bahwa keberlanjutan eksistensi sebuah partai akan bergantung pada sistem daripada individu. Partai tidak dapat bergantung pada individu tertentu, yang pada suatu saat nanti akan meninggalkan partai atau meninggal.[24]

Dalam semangat menghindari kultus individu ini, menurut Amri Yusra, kader PKS dipersilakan untuk dapat berargumentasi dengan tokoh-tokoh penting di partai, termasuk dengan seorang Hilmi Aminuddin.[25] Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tokoh-tokoh yang mendapat penghormatan dalam partai ini adalah individu yang tidak mengedepankan keseniorannya, tetapi mereka yang berupaya konsisten dengan AD/ART partai.[26] Menurut Yon Machmudi, sejumlah tokoh seperti Tifatul Sembiring atau Anis Matta, atau mereka yang dipersepsikan sebagai kelompok dominan yang dipimpin Matta, tidak memiliki *privilege* dalam proses pembuatan keputusan, karena dengan semangat menghormati sistem ini mereka sejatinya hanya dapat memengaruhi proses dan tidak menentukan hasil.[27]

---

[23] Wawancara dengan Sitaresmi S., M.Psi., Anggota Departemen Dakwah DPP PK (2000–2003), di Jakarta, 8 Oktober 2010.

[24] Wawancara dengan Sitaresmi S., M.Psi., Anggota Departemen Dakwah DPP PK (2000–2003), di Jakarta, 8 Oktober 2010.

[25] Wawancara dengan Amri Yusra, M.Si., Ketua DPD PKS Depok (2002–2004), Anggota Dewan Kotamadya Depok, Jawa Barat (2004–2009), dan Dosen Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, di Depok, 7 Oktober 2009.

[26] Wawancara dengan Subhan Akbar dengan Nur Mahmudi Ismail, presiden PK pertama, dalam Akbar, *Partai Keadilan: Faktor-Faktor Penguat Soliditas*, halaman lampiran.

[27] Wawancara dengan Dr. Yon Mahmudi, Pengamat PKS dan Gerakan Tarbiyah di Indonesia, Dosen Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dan salah satu kader yang menandatangani deklarasi pendirian PKS, di Depok, 11 Agustus 2009.

B. Situasi Pelaksanaan dan Kecenderungannya

1. Majelis Syura sebagai Badan Tertinggi

Selama dekade pertama era Reformasi, kader PKS sepakat bahwa Majelis Syura merupakan satu-satunya institusi yang sah untuk membuat regulasi dan kebijakan.[28] Kader juga secara umum meyakini bahwa Majelis Syura akan senantiasa memenuhi perannya berdasarkan prosedur.

Kasus Pemilu Presiden 2004 mengilustrasikan komitmen para kader untuk menempatkan Majelis Syura sebagai satu-satunya institusi yang sah dalam membahas dan memutuskan kebijakan-kebijakan strategis. Menjelang pelaksanaan Pilpres 2004, kader PKS terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama percaya bahwa Jenderal H. Wiranto adalah kandidat presiden terbaik bagi PKS. Kubu kedua melihat Prof. Dr. M. Amien Rais sebagai kandidat yang tepat bagi partai.[29]

Pendukung Wiranto sebagian besar adalah kader-kader muda dan tokoh partai di tingkat lokal, terutama dari Indonesia bagian timur.[30]

---

[28] Wawancara dengan Dr. Yon Mahmudi, Pengamat PKS dan Gerakan Tarbiyah di Indonesia, Dosen Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dan salah satu kader yang menandatangani deklarasi pendirian PKS, di Depok, 11 Agustus 2009; dengan Amri Yusra, M.Si., Ketua DPD PKS Depok (2002–2004), Anggota DPRD Kotamadya Depok, Jawa Barat (2004–2009), dan Dosen Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, melalui telepon, 13 Desember 2009; dengan Mahfudz Siddiq, Kepala Departemen Kaderisasi DPP PKS (2002–2005) dan Anggota DPR RI (2004–2014), di Jakarta, 27 Oktober 2010.

[29] Sapto Waluyo, *Kebangkitan Politik Dakwah: Konsep dan Praktik Politik Partai Keadilan Sejahtera di Masa Transisi*, (Bandung: Harakatuna, 2005), 210–212. Lili Romli, *Islam Yes, Partai Islam Yes*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). *Tempo*, 09, XXXIII, 26 April–02 Mei 2004. *Kompas*, 2 Juli 2004; "Menimba Pengalaman Amien", *Suara Islam*, edisi 56, 5–19 Desember 2008, 15. Dua tokoh ini menjadi kandidat yang paling dikehendaki, menyingkirkan tiga lainnya, yaitu Mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, Jenderal (Purn.) Dr. S. B. Yudhoyono, dan mantan Wakil Presiden Dr. Hamzah Haz.

[30] Wawancara dengan Aus Hidayat Nur, Kepala Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktober 2010.

Kubu yang dipimpin Sekretaris Jenderal Anis Matta[31] ini meyakini bahwa partai hendaknya harus mendukung seorang kandidat yang berpeluang besar untuk memenangi pilpres. Mereka menilai bahwa peluang Wiranto untuk memenangi pemilu presiden cukup terbuka, apalagi dia didukung Partai Golkar yang baru saja menjadi pemenang pemilu.[32] Di sisi lain, mereka melihat Amien Rais memiliki peluang yang kecil untuk menang sehingga diperkirakan akan tidak memberi keuntungan apa pun bagi partai. Sebagian dari mereka bahkan mempertanyakan komitmen Rais terhadap PKS.[33] Selain itu mereka juga menganggap bahwa Wiranto adalah tokoh yang memiliki sikap simpatik terhadap kepentingan dakwah.[34]

Pendukung Amien Rais yang dipimpin Presiden PKS Hidayat Nur Wahid menganggap tokoh reformasi itu sebagai kandidat paling ideal yang akan memberikan banyak keuntungan bagi umat Islam dibandingkan kandidat lain.[35] Amien adalah mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah dan anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang memiliki hubungan erat dengan umat Islam. Mereka juga menganggap Amien sebagai tokoh bangsa yang memiliki komitmen kuat untuk membangun pemerintahan yang bersih, mewujudkan keadilan sosial, dan mengakhiri

---

[31] Waluyo, *Kebangkitan Politik Dakwah: Kosep dan Praktik Politik Partai Keadilan Sejahtera di Masa Transisi*, 213. Tentang dukungan Matta terhadap Wiranto, lihat *Tempo*, 09, XXXIII, 26 April–02 Mei 2004. Lihat juga *Kompas*, 2 Juli 2004. Dalam kasus ini, sebagai tokoh yang terkenal dan berpengaruh, Anis Matta didukung tokoh muda termasuk Fachri Hamzah, Rama Pratama—dua tokoh sentral gerakan mahasiswa 1998—dan Dr. Zulkifliemansyah, intelektual muda.

[32] "Menimba Pengalaman Amien", *Suara Islam*, edisi 56, 5–19 Desember 2008, h.15.

[33] Waluyo, *Kebangkitan Politik Dakwah. Kosep dan Praktik Politik Partai Keadilan Sejahtera di Masa Transisi*, 253.

[34] Defy Ruspiyandi, "Menebak Arah Dukungan PKS", *Pikiran Rakyat*, 21 Juni 2004. Pendukung Wiranto juga menyatakan mantan jenderal ini didukung Golkar sebagai partai terkuat di pemilu terakhir, dengan Solahuddin Wahid, ulama dan tokoh NU, sebagai kandidat wakil presiden.

[35] Wawancara dengan Selamat Nurdin, MM, mantan ketua aktivis tarbiyah di Universitas Indonesia, Anggota Dewan Provinsi DKI Jakarta (2004–2014), di Jakarta, 22 Oktober 2010.

militerisme dalam kehidupan politik. Agenda ini sesuai dengan agenda politik PKS. Di lain pihak, mereka menganggap kandidat dengan latar belakang militer seperti Wiranto akan memberikan citra yang kurang baik bagi PKS dan gerakan dakwah.

Kedua kubu terlihat bersungguh-sungguh dengan pilihannya, tercermin dari dibangunnya pendekatan yang cukup sistematis terhadap kandidatnya masing-masing.[36] Walaupun demikian, meski dua kubu berupaya sepenuhnya memenangkan kandidat masing-masing, mereka tidak melihat komitmen ini sebagai alasan untuk meninggalkan prosedur partai. Sebagai kader partai, mereka sepakat menggunakan mekanisme partai untuk menyelesaikan masalah ini dengan menyerahkannya ke Majelis Syura. Sikap ini sejalan dengan AD/ART partai yang menyatakan bahwa Majelis Syura adalah badan yang berwenang dalam memutuskan kebijakan-kebijakan strategis,[37] termasuk nama-nama kandidat presiden dan wakil presiden yang secara resmi akan didukung partai.[38]

Sebagai respons dari perkembangan ini, Majelis Syura kemudian mengadakan musyawarah pada 29 Juni 2004. Dalam forum musyawarah itu, Majelis Syura memberikan setiap kubu kesempatan untuk menyampaikan argumen mereka. Setelah masing-masing kubu menyampaikan argumennya, Majelis Syura kemudian membuat keputusan. Keputusan itu ternyata bertentangan dengan kehendak Anis Matta atau Hilmi Aminuddin, dua tokoh penting di partai ini, yang cenderung mendukung Wiranto. Mayoritas anggota Majelis Syura justru menghendaki partai memberikan dukungan kepada Amien Rais. Atas dasar itu, PKS secara formal merekomendasikan[39]

---

[36] Wawancara dengan Selamat Nurdin, MM, mantan ketua aktivis tarbiyah di Universitas Indonesia, Anggota Dewan Provinsi DKI Jakarta (2004-20014), di Jakarta, 22 Oktober 2010.

[37] *AD PKS 2002 Pasal 12 (1.d).*

[38] *AD PKS 2005 Pasal 11 (2.l).*

[39] Tentang pembahasan komprehensif untuk merekomendasikan M. Amien Rais-Siswono Yudho Husodo sebagai kandidat Presiden-Wakil Presiden lihat R. Alex Sandi, *Sikap Politik Partai Keadilan Sejahtera terhadap Pilpres 2004 dan Pemerintahan Susilo Bambang*

kepada seluruh kader dan simpatisan PKS untuk mendukung Amien Rais pada Pemilu 2004.[40] Setelah keputusan final itu diumumkan oleh Majelis Syura, pendukung Wiranto tidak melakukan perlawanan atau membentuk faksi, tetapi berupaya untuk mewujudkan hasil keputusan tersebut.

Kasus lain yang menunjukkan komitmen kader partai terhadap kedudukan terhormat Majelis Syura adalah berkaitan dengan kebijakan untuk tetap di dalam koalisi pemerintahan Presiden SBY. Sebelum partai membuat keputusan ini, banyak kader yang sebenarnya menghendaki agar partai meninggalkan koalisi.[41] Penelitian tentang sikap kader PKS terhadap kebijakan untuk melanjutkan koalisi dengan pemerintahan Presiden SBY yang dilakukan Prabowo menunjukkan bahwa setengah responden sebenarnya menghendaki partai untuk meninggalkan koalisi. Sejumlah DPW, seperti DPW Jakarta dan DPW Yogyakarta, menyatakan pentingnya PKS meninggalkan koalisi.[42] Bagi mereka, partai harus melakukan manuver keluar dari koalisi untuk membuktikan komitmennya sebagai pembela

---

Yudhoyono. Studi Kasus Psikologi Politik Partai Dakwah, Tesis M.A., (Depok: Kajian Islam dan Psikologi, Program Kajian Islam dan Timur Tengah, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006).

[40] Tentang surat lengkap rekomendasi lihat "Rekomendasi DPP PK Sejahtera tentang Pemilihan Capres-Cawapres", dalam Waluyo, *Kebangkitan Politik Dakwah: Konsep dan Praktik Politik Partai Keadilan Sejahtera di Masa Transisi*, 368–371.

[41] Triatno Yudho Prabowo, *Pengaruh Taklim Rutin Terhadap Prilaku Politik Kader Partai Keadilan Sejahtera dalam Perspektif Teori Intergroup Relation*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2006), 48. Syihabuddin menyatakan 60% kader lebih menghendaki PKS meninggalkan koalisi, Muhammad Syihabuddin, "Majelis Syura, Alternatif 'Demokrasi Islam', dan Ketaatan Kader PKS", *http://syihabasfa.wordpress.com/2007/12/18/majelis-syura-alternatif%E2%80%9Ddemokrasiis lam%E2% 80%9D/*, 18 Desember 2007, 9.

[42] Wawancara dengan Dr. Kamarudin, Pakar Partai Politik Islam dan Dosen Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, di Depok, 7 Oktober 2010; dengan Dr. Prihandoko, Ketua DPD PKS Depok (2004–2007) di Depok, 6 Desember 2005.

kepentingan publik.[43] PKS akan dicap mengkhianati rakyat jika masih terlibat di dalam koalisi. Wacana meninggalkan partai juga terkait dengan penilaian mereka bahwa beberapa poin dalam *memorandum of understanding* antara PKS dan SBY telah dilanggar. Mereka khawatir wacana ini menjadi semakin populer manakala Sekretaris Jenderal Anis Matta membenarkan bahwa pemerintahan SBY telah melanggar kontrak politik antara dirinya dan PKS, khususnya dalam hal tidak akan mengulangi kesalahan yang dilakukan pemerintahan sebelumnya (pemerintahan Orde Baru) yang telah memberatkan kehidupan rakyat. Berdasarkan berbagai argumen, inilah waktu yang tepat bagi PKS untuk meninggalkan koalisi.[44]

Opsi politik untuk meninggalkan koalisi pemerintah menjadi salah satu wacana paling penting di dalam sejarah PKS. Opsi ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai dampak pengurangan subsidi. Bagi pemerintah, kebijakan ini tidak dapat dielakkan karena harga minyak dunia semakin tinggi dan terus beranjak naik. Dari perspektif Presiden Yudhoyono dan tim ekonominya, apabila pemerintah tetap memberikan subsidi BBM, keuangan negara akan segera ambruk.[45]

Walaupun alasan di balik kebijakan ini dapat dipahami, kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM tetap saja menimbulkan kecemasan dan ketegangan di dalam masyarakat. Selain masalah harga BBM, persoalan lain yang turut menjadi keprihatinan adalah performa tim ekonomi Presiden Yudhoyono yang masih jauh dari meyakinkan. Bagi banyak pihak, reformasi ekonomi pemerintahan Yudhoyono berjalan

---

[43] Wawancara dengan Dr. Kamarudin, Pakar Partai Politik Islam dan Dosen Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, di Depok, 7 Oktober 2010; dengan Dr. Prihandoko, Ketua DPD PKS Depok (2004–2007) di Depok, 6 Desember 2005.

[44] Tentang pendapat Matta untuk keluar dari koalisi, lihat "Tak Ada Koalisi Tanpa Perubahan", *Saksi*, No. 6/VIII/30 November 2005, 7–9.

[45] Lihat alasan di balik kebijakan dalam perspektif pemerintah dalam Dr. Dino Pati Jalal, *The Can Do Leadership. Inspiring Stories from SBY Presidency,* (Jakarta: Red and White Publishing, 2008), 49–54.

lamban. Sejumlah kebijakan pemerintah tidak kunjung memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal ini, Presiden Partai Tifatul Sembiring setuju untuk menarik menteri PKS dari Kabinet Yudhoyono.[46] Tiga menteri dari PKS bahkan telah diperingatkan oleh kolega partainya untuk bersiap meninggalkan posisinya.[47]

Meskipun demikian, tidak semua kader PKS sepakat dengan wacana untuk meninggalkan koalisi. Bagi kubu ini, walaupun setuju bahwa partai harus tetap kritis terhadap pemerintah, meninggalkan koalisi bukanlah sesuatu yang harus dilakukan selekasnya. Mereka meyakini kewajiban utama PKS sebagai mitra koalisi adalah memberikan solusi dan bukan meninggalkan koalisi. Pilihan meninggalkan koalisi adalah langkah terburu-buru yang tidak memberikan manfaat apa pun. Adanya dua pandangan ini membuat kader tampak terpecah menjadi dua kubu.

Dalam menghadapi situasi pelik ini, kader sekali lagi setuju untuk mendorong Majelis Syura menyelenggarakan Musyawarah Majelis Syura sebagai media pemecahan masalah. Walaupun pada waktu itu dorongan untuk meninggalkan koalisi terlihat lebih kuat dan bagi sejumlah kader menjadi keputusan yang benar,[48] namun partai ternyata tidak terbawa arus opini kader. PKS memilih melaksanakan mekanisme prosedural agar dapat menghindari kebijakan yang terburu-buru dan inkonstitusional.

Majelis Syura menyelenggarakan Musyawarah Majelis Syura pada 26–27 November 2005. Dalam kesempatan ini, dua opsi bertentangan tersebut dibahas. Setelah bermusyawarah secara intens, keputusan final menyatakan memenangkan pilihan untuk tetap di dalam koalisi. Agar menghindari kesalahpahaman, PKS kemudian

---

[46] Tentang sikap Tifatul Sembiring lihat "Isu Penarikan Menteri, Belum ada Pembicaraan di PKS", di *www.detik.com,* 3 Juli 2006.

[47] "PKS Tetap Dukung Yudhoyono", *Bali Post*, 28 November 2005.

[48] Syihabuddin, "Majelis Syura, Alternatif 'Demokrasi-Islam', dan Ketaatan Kader PKS".

mengadakan konferensi pers untuk menyampaikan informasi tentang posisi resminya. PKS menyatakan bahwa walaupun partai mengakui kinerja yang tidak memuaskan dari tim ekonomi pemerintahan SBY, dan karena alasan itu menganjurkan Presiden untuk melakukan pergantian kabinet,[49] PKS juga memiliki kewajiban moral untuk membantu pemerintah memecahkan masalah nasional yang tidak akan secara efektif dilakukan apabila PKS meninggalkan koalisi.[50] Oleh karena itu, keputusan untuk tetap di dalam koalisi diambil, berkaitan dengan alasan mempertahankan akses di pemerintahan demi efektivitas dalam turut memberikan solusi atas persoalan yang tengah dihadapi bangsa.

Walaupun keputusan ini tetap menimbulkan ketidakpuasan di sebagian kader, sikap partai untuk mengikuti prosedur cukup mengobati kekecewaan. Sikap partai yang menyerahkan persoalan kepada Majelis Syura, dan bukan kepada segelintir orang, juga menyiratkan pelajaran bahwa gagasan yang baik dan populer sekalipun pada akhirnya harus tetap diperjuangkan melalui cara-cara konstitusional. Selain itu, sikap ini juga menunjukkan independensi partai dalam membuat kebijakan. Kasus ini memperlihatkan kemampuan PKS mengatasi tekanan dari lingkungan politik, termasuk tekanan opini yang dikembangkan oleh berbagai pihak, maupun intervensi kepentingan individu atau kelompok tertentu saat menjalankan proses pembuatan keputusan. Otonomi ini menurut Randall dan Svasand menunjukkan telah terlembaganya sebuah partai.[51]

Berkaitan dengan kasus pemecatan kader, yang kerap menjadi masalah yang memicu perpecahan, PKS dapat melaksanakannya tanpa menimbulkan friksi atau ketegangan. Hal ini terjadi dikarenakan partai berupaya melaksanakan prosedur dalam proses pemecatan tersebut. Sehubungan dengan penegakan prosedur ini, walaupun

[49] "PKS Tetap Mendukung SBY-JK", *Republika,* 28 November 2005.

[50] "PKS Tetap Dukung Yudhoyono", *Bali Post*, 28 November 2005.

[51] Vicky Randall and Lars Svasand, "Party Institutionalisation in New Democracies", *Party Politics*, Vol. 8 Januari/1/2002, 13–14.

merupakan lembaga tertinggi partai, Majelis Syura tidak dapat mengintervensi keputusan yang telah menjadi domain kerja badan lain. Dalam kasus pengadilan internal yang merupakan domain DS, Majelis Syura tidak dapat mengintervensi lembaga tersebut dan apalagi menentukan hasilnya.

Pada kasus pemecatan Syamsul Balda, misalnya, salah satu tokoh pendiri partai, pemikir, dan anggota Majelis Syura, Dewan Syura dapat melakukan penyelidikan dengan saksama untuk mempelajari tuduhan atasnya. Tuduhan terhadap Balda itu sendiri berkenaan dengan perilakunya yang dipandang kurang sejalan dengan *code of conduct* partai. Setelah melalui proses yang cukup memakan waktu, Dewan Syariah akhirnya memutuskan memecat Syamsul. Selama proses yang panjang ini, Majelis Syura dapat menjaga objektivitasnya dan tidak memerintahkan perlakuan khusus terhadapnya walaupun dia notabene adalah salah satu anggota Majelis Syura. Ketua Majelis Syura juga tidak menggunakan posisinya untuk mendorong atau menghambat proses penyelidikan terhadap salah satu kader terkenal ini.

Dalam kasus yang lain, Dewan Syura bahkan dapat meminta pengurus DPP atau anggota Majelis Syura menjelaskan sikap atau pemikiran yang dianggap telah meresahkan kader. Hal ini terjadi, misalnya, dengan Anis Matta saat masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKS. Di hadapan anggota-anggota Dewan Syariah Pusat, Anis Matta menjelaskan alasan di balik sikapnya, khususnya terkait dengan isu-isu kebangsaan dan pluralisme, yang dianggap membingungkan dan kontrovesial oleh banyak kader.[52] Kasus yang hampir sama terjadi pada Ahmad Firman, seorang anggota Majelis Syura yang juga aktivis lawas tarbiyah. Firman diminta oleh Dewan Syariah untuk menjelaskan keputusannya membolehkan menerima keinginan non-muslim di wilayah-wilayah Indonesia bagian timur

[52] Wawancara dengan Sitaresmi S, M.Psi., Anggota Departemen Dakwah DPP PK (2000–2003), di Jakarta, 8 Oktober 2010.

yang ingin bergabung dengan partai ini.[53] Dalam kasus-kasus semacam ini, Majelis Syura membiarkan proses yang dilakukan berjalan sesuai dengan prosedur partai, di mana Dewan Syariah memiliki kewenangan mutlak untuk dapat menjalankan tugasnya, termasuk meminta keterangan dengan bebas. Pada kedua kasus itu, akhirnya Dewan Syariah membebaskan Anis Matta dan Firman dari hukuman setelah keduanya dapat menjelaskan secara meyakinkan alasan untuk melakukan manuver-manuver politiknya di depan pengadilan internal tersebut.

Akan tetapi, dalam kasus Yusuf Supendi, salah satu anggota Majelis Syura yang lain, Dewan Syariah menghukumnya dengan pemecatan. Dia dipecat dari posisinya sebagai anggota Majelis Syura pada tahun 2006 setelah menolak menjalankan sanksi yang diberikan oleh Majelis Syura. Posisi Yusuf yang cukup prestisius, yakni sebagai anggota Majelis Syura, yang juga pada saat yang bersamaan Wakil Ketua Dewan Syariah, dan salah satu tokoh pendiri partai, sama sekali tidak menolongnya untuk terbebas dari sanksi partai. Sanksi administrasi kemudian diberikan lagi kepadanya karena perilaku Supendi yang tidak pantas, terutama tersangkut korupsi keuangan dan menolak panggilan Badan Penegak Disiplin Organisasi dua kali pada bulan Juni 2007 dan Oktober 2008.[54]

Pada tahun 2009, setelah dilakukan sejumlah sidang untuk menilai sikapnya, partai akhirnya benar-benar memecat Yusuf Supendi dari partai. Tiga alasan utama pemecatannya, yaitu 1) menghindari kewajibannya sebagai anggota dewan dalam memberikan kontribusi finansial terhadap partai, 2) penolakannya untuk menjalankan sanksi partai untuk kesalahan yang dibuatnya, dan 3) ketidakloyalan, khususnya ketidakmampuannya untuk menjaga citra partai dan terus-menerus mengemukakan isu negatif terhadap para pimpinan

---

[53] Wawancara dengan Ahmad Feri Firman Yusuf, Ketua Wilayah Dakwah III (2002–2005), Anggota *Majelis Syura* PKS (2002–2010), di Jakarta, 2 November 2010.

[54] Wawancara dengan Ahmad Feri Firman Yusuf, Ketua Wilayah Dakwah III (2002–2005), Anggota *Majelis Syura* PKS (2002–2010), di Jakarta, 2 November 2010.

partai.[55] Dalam kasus ini, Hilmi Aminuddin, Ketua Majelis Syura yang memiliki hubungan personal dengan Yusuf, menolak memberikannya perlakuan istimewa.[56]

2. Musyawarah sebagai Metode Pengambilan Keputusan

Selain menghormati keberadaan Majelis Syura, sikap untuk menghargai prosedur partai juga terefleksi di dalam komitmen untuk melaksanakan musyawarah secara konsisten. Segenap kebijakan resmi partai pada dasarnya merupakan hasil musyawarah yang diselenggarakan oleh Majelis Syura dengan melibatkan seluruh anggotanya.[57] Di dalam proses pembuatan keputusan, seluruh anggota Majelis Syura yang hingga tahun 2008 berjumlah 52 orang diperlakukan secara sama. Majelis Syura tidak memberikan posisi istimewa kepada Ketua Majelis Syura atau kepada para pemegang jabatan tinggi seperti Ketua Majelis Pertimbangan Partai, Ketua Dewan Syariah Pusat, Presiden Partai, Sekretaris Jenderal, atau Bendahara Umum. Mereka tidak dapat memaksa anggota lain untuk mengikuti suara atau kepentingan mereka.[58] Hak khusus yang diberikan kepada Ketua Majelis Syura hanya berkaitan dengan proses *voting*. Hak ini berlaku

[55] *http://www.pk-sejahtera.org/content/saksi-pks-bacakan-surat-pemecatan-yusuf-supendi*

[56] Wawancara dengan Sitaresmi S, M.Psi., Anggota Departemen Dakwah DPP PK (2000–2003), di Jakarta, 8 Oktober 2010. *http://www.pk-sejahtera.org/content/saksi-pks-bacakan-surat-pemecatan-yusuf-supendi.*

[57] Wawancara dengan Dr. Yon Mahmudi, Pengamat PKS dan Gerakan Tarbiyah di Indonesia, Dosen Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dan salah satu kader yang menandatangani deklarasi pendirian PKS, di Depok, 11 Agustus 2009.

[58] Wawancara dengan Mahfudz Siddiq, Ketua Departemen Kaderisasi DPP PKS (2002–2005) dan Anggota DPR RI (2004–2014), di Jakarta, 27 Oktober 2010; dengan Musa Abdillah, Ketua Departemen Kaderisasi DPC PKS Kelapa Dua, di Jakarta, 23 Oktober 2010; dengan Sitaresmi S, M.Psi., Anggota Departemen Dakwah DPP PK (2000–2003), di Jakarta, 8 Oktober 2010; dengan Ahmad Feri Firman Yusuf, Ketua Wilayah Dakwah III (2002–2005), Anggota *Majelis Syura* PKS (2002–2010), di Jakarta, 2 November 2010; dengan Selamat Nurdin, M.M., mantan ketua aktivis tarbiyah di Universitas Indonesia, Anggota Dewan Provinsi DKI Jakarta (2004–2014), di Jakarta, 22 Oktober 2010.

di dalam situasi ketika jumlah suara untuk satu usulan kebijakan itu sama. Dalam situasi ini usulan yang didukung Ketua Majelis Syura haruslah menjadi keputusan.[59]

Kemudian, para tokoh dan senior juga tidak dapat memanfaatkan kedudukannya untuk mengeksploitasi kader-kader agar dapat memperoleh keuntungan pribadi.[60] Tokoh-tokoh ini, meski telah memberikan kontribusi penting di masa lalu dalam mengembangkan Jamaah Tarbiyah dan partai, pada umumnya menghormati AD/ART partai. Dalam posisi yang patut dihormati itu, mereka juga terbuka untuk berdialog dengan para kader biasa. Perilaku Hilmi Aminuddin merefleksikan situasi ini. Menurut sejumlah kader dan anggota Majelis Syura, Hilmi Aminuddin, dalam kapasitasnya sebagai tokoh utama gerakan tarbiyah dan Ketua Majelis Syura, tidak pernah menyulitkan kader yang ingin bertemu dengannya dan, dalam konteks pembuatan kebijakan, menghindari melandasi pilihan kebijakan atas dasar kepentingan personalnya.[61]

Menurut Mardani Ali Sera, situasi Musyawarah Majelis Syura yang dipimpin Aminuddin berjalan dengan dinamis dan intens. Setiap anggota Majelis Syura memiliki kesempatan yang luas untuk menyampaikan pandangannya atau memberikan kontribusi pemikiran.[62] Di dalam banyak kasus, Aminuddin hanya mengambil peran

---

[59] *ART PKS 2005 Pasal 13 (6).*

[60] Wawancara dengan Selamat Nurdin, M.M., mantan ketua aktivis tarbiyah di Universitas Indonesia, Anggota Dewan Provinsi DKI Jakarta (2004–2014), di Jakarta, 22 Oktober 2010.

[61] Wawancara dengan Sigit Sosiantomo, Koordinator Wilayah Jawa Timur dan Bali (2005–2009), di Jakarta, 25 Oktober 2010; dengan Ahmad Feri Firman Yusuf, Ketua Wilayah Dakwah III (2002–2005), Anggota Majelis Syura PKS (2002–2010), di Jakarta, 2 November 2010; dengan Umar Salim Basalamah, Wakil Sekretaris Jenderal PKS (2002), dan sekretaris pribadi Hidayat Nur Wahid (mantan Presiden PKS dan Ketua MPR RI), di Jakarta, 12 Oktober 2010; dengan Selamat Nurdin, M.M., mantan ketua aktivis tarbiyah di Universitas Indonesia, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta (2004–2014), di Jakarta, 22 Oktober 2010.

[62] Wawancara with Dr. Mardani Ali Sera, Wakil Ketua MPP PKS (2010–2015), di Jakarta, 6 Oktober 2010.

sebagai seorang yang mengarahkan forum atau sebagai moderator dan bukan sebagai faktor penentu yang absolut.[63] Hanya dalam kasus-kasus tertentu, khususnya ketika forum menghadapi situasi *deadlock*, dia akan berperan sebagai pihak penentu.[64] Anggota-anggota Majelis Syura, yang notabene kebanyakan adalah binaannya dan jauh lebih muda, bahkan kadang kala tidak mengikuti pendapatnya begitu saja dalam beberapa momen pembuatan kebijakan strategis di partai ini. Hal itu tidak serta merta membuat mereka yang berseberangan itu dikucilkan. Dalam hal ini, partisipasi aktif dan bebas yang menjadi karakter musyawarah tidak semata bersifat simbolis, tetapi telah dilakukan sebagaimana harusnya.

Dalam kasus Pemilu Presiden 2004, misalnya, posisi strategis Hilmi Aminuddin dan Anis Matta tidak otomatis dapat memenangkan kandidat yang didukung keduanya. Dua tokoh partai yang memperoleh kepercayaan memegang posisi strukturalnya lebih dari satu kali ini[65] tidak bisa membuat pandangan mereka dapat menjadi kebijakan partai. Kenyataannya, Wiranto gagal mendapat dukungan resmi dari PKS. Situasi ini menunjukkan adanya komitmen untuk memprioritaskan prosedur partai daripada pendapat tokoh penting di partai ini. Dengan demikian, proses pembuatan kebijakan memperlihatkan bahwa partai tidak dapat diarahkan atau didikte oleh kelompok terbatas atau segelintir orang, bahkan oleh orang-orang yang memiliki nama besar sekalipun. Terkait dengan situasi ini, Hilmi Aminuddin mengakui bahwa sebagai pemimpin tertinggi partai,

---

[63] Wawancara dengan Dr. Kamarudin, Pakar Partai Politik Islam Indonesia dan Dosen Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, di Depok, 7 Oktober 2010; dengan Amri Yusra, M.Si., Ketua DPD PKS Depok (2002–2004), Anggota DPRD Kotamadya Depok, Jawa Barat, (2004–2009) melalui telepon, 13 Desember 2009.

[64] Wawancara dengan Aus Hidayat Nur, Kepala Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktober 2010.

[65] Hilmi Aminuddin, Ketua Majelis Syura Periode 2005–2010 terpilih kembali untuk jabatan yang sama dalam forum Musyawarah Majelis Syura 2010. Anis Matta telah menduduki jabatan Sekretaris Jenderal PKS sejak 2002 dan terpilih kembali untuk posisi yang sama pada forum Musyawarah Majelis Syura 2010.

dia tidak memiliki otoritas untuk menentukan nama kandidat yang didukung untuk pemilihan presiden. Dia dengan tegas menyatakan, "keputusan tentang nominasi presiden ada di domain Majelis Syura, bukan Ketua Majelis Syura."[66]

Debat antara dua kubu dalam forum Musyawarah Majelis Syura pada 1 Juli 2004 sebelum pemilu presiden mengilustrasikan situasi saat proses pembuatan kebijakan bukanlah artifisial. Pada forum itu, setiap kubu memiliki hak untuk menyatakan posisi dan pendapatnya. Menurut *Suara Islam*, rapat ini berjalan dengan alot karena setiap kubu berupaya meyakinkan kubu lain berdasarkan temuan dan fakta yang mereka miliki.[67] Setelah masing-masing kubu tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah, mereka setuju melakukan *voting*. Hasilnya adalah mayoritas anggota Majelis Syura menghendaki partai untuk mendukung Amien Rais.[68] Menurut Hidayat Nur Wahid, 70% dari 44 peserta menghendaki tokoh reformasi itu menjadi presiden.[69]

Kasus BBM juga menunjukkan fenomena yang sama. Dalam kasus tersebut, tokoh-tokoh penting partai seperti Presiden Partai Tifatul Sembiring dan Sekretaris Jenderal Anis Matta menghendaki agar PKS menolak pengurangan subsidi dan keluar dari koalisi. Keduanya kerap menyampaikan pernyataan itu dalam forum-forum publik. Namun, secara internal, wacana itu tidak bisa menjadi rujukan dan tetap saja harus juga mengikuti prosedur partai. Pada praktiknya, keduanya tidak dapat memaksakan pendapat mereka menjadi kebijakan partai, walaupun pada saat itu sulit dipungkiri pandangannya cukup dapat dipahami. Tidak sedikit kader yang kecewa dengan kinerja pemerintah mendukung gagasan mereka. Namun, memang keinginan untuk keluar dari kabinet tidak bulat disuarakan oleh

---

[66] "Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009", *Tribun Timur*, 23 Juli 2008.

[67] "Menimba Pengalaman Amien", *Suara Islam*, edisi 56, 5–19 Desember 2008, 15.

[68] *Gatra*, 2 Juli 2004.

[69] Sandi, *Sikap Politik Partai Keadilan Sejahtera terhadap Pilpres 2004 dan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono: Studi Kasus Psikologi Politik Partai Dakwah*, 122. "Menimba Pengalaman Amien", *Suara Islam*, Edisi 56, 5–19 Desember 2008, 15.

seluruh kader. Beberapa kader cenderung bersikap hati-hati dan menghindari sikap reaksioner yang tidak pada tempatnya.

Untuk merespons perkembangan ini, partai kemudian menyelenggarakan Musyawarah Majelis Syura. Situasi Musyawarah Majelis Syura itu seperti biasa digambarkan sebagai sangat alot. Disebutkan bahwa:

> Rapat untuk memutuskan kebijakan itu sangatlah alot. Rapat ini pada awalnya dijadwalkan dari pukul 10.00 hingga pukul 16.00. Akan tetapi, hingga pukul 17.00 WIB belum ada tanda-tanda menunjukkan bahwa rapat ini akan berakhir. Bahkan, hingga satu jam berikutnya, informasi tentang posisi partai mengenai keberlanjutan di koalisi itu belum juga ada.[70]

Situasi ini memperlihatkan keseriusan para peserta dalam melakukan perdebatan. Setiap kubu memiliki kekuatan yang hampir sama, di mana kekuatan argumentasi menjadi lebih menentukan ketimbang posisi struktural. Kenyataannya memang posisi struktural tidak selalu berpengaruh, sebab tidak setiap opsi yang didukung oleh mereka yang memiliki posisi penting, termasuk presiden partai atau sekretaris jenderal partai, akan dengan sendirinya menjadi suara partai. Terbukti kemudian opsi untuk tetap dalam koalisi dalam pemerintahan mendapat dukungan lebih besar. Situasi ini sekali lagi menunjukkan bahwa kepemimpinan prosedural dalam partai ini eksis, di mana musyawarah lebih diprioritaskan ketimbang aspirasi populer atau popularitas tokoh.

Pelaksanaan musyawarah juga tercermin pada pelibatan kader dalam proses pembuatan kebijakan strategis. Hal ini dapat dilihat dalam proses penyeleksian individu yang akan mewakili partai dalam kancah pemilu. Proses penetapan kadidat untuk anggota parlemen tingkat lokal (DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota) atau kepala pemerintahan akan bergantung pada masukan atau evaluasi dari kader-kader lokal. Karena alasan ini, partai membuka peluang bagi kader untuk berpartisipasi di dalam proses.

---

[70] "PKS Tetap Dukung Yudhoyono", *Bali Post*, 28 November 2005.

Dalam kasus Pemilukada Wali Kota Depok tahun 2005, misalnya, DPD Depok memberikan kesempatan kepada kader inti atau koordinator wilayah (korwil), yang mengoordinasi partai di tingkat desa, berpartisipasi dalam evaluasi dan penentuan kandidat Wali Kota Depok. Ratusan kader inti terlibat dalam penyeleksian sepuluh orang dari ratusan orang kandidat. Hasil seleksi (sepuluh nama) kemudian disampaikan dan disosialiasikan DPD Depok kepada korwil untuk dievaluasi.[71]

Pandangan dan komentar para korwil akan menentukan *ranking* setiap kandidat. Hasil proses ini selanjutnya dikembalikan dan dievaluasi oleh DPD Depok, di sebuah forum yang disebut sebagai Syura DPD yang melibatkan seluruh pengurus. Hasilnya adalah matriks kualitas setiap nama yang kemudian menjadi ukuran utama menentukan siapa yang akan menjadi kandidat Wali Kota Depok yang mewakili PKS (lihat lampiran). Dalam proses ini, fungsi utama Syura DPD hanya membuat kriteria dan memberikan skor berdasarkan pada nilai setiap kandidat yang dievaluasi atau dinilai oleh ratusan kader inti dan para korwil. Oleh karena itu, kandidat yang akhirnya dimajukan adalah figur yang di mata mayoritas kader partai, dan bukan segelintir elite, memang patut dan layak. Mekanisme ini, menurut Amri Yusra, membuktikan adanya sistem partisipatif riil dan kebebasan berekspresi yang menunjukkan keberadaan demokrasi internal di partai ini.[72]

Pelibatan kader juga berlangsung pada saat pemilihan presiden. Partai menyelenggarakan proses seleksi nasional untuk menampung aspirasi dari kader tentang kandidat mana yang akan diusulkan PKS menjadi presiden. Agar mencapai hasil yang komprehensif, PKS

---

[71] Wawancara dengan Kemal A. Stamboel, Ketua Dewan Pakar PKS and Anggota DPR RI (2009–2014), di Paris, 14 Desember 2009.

[72] Wawancara Amri Yusra dengan Muhammad Said, Staf Departemen Kaderisasi DPP PKS, Selasa 22 Desember 2005 di Depok, di Amri Yusra, *Mekanisme Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah: Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera dalam Pilkada Depok 2005*, Tesis M.A., (Jakarta: Program Pascasarjana, Jurusan Ilmu Politik Universitas Indonesia), 101.

melakukan jajak pendapat internal yang hasilkan akan menjadi dasar bagi Majelis Syura untuk membuat keputusan di forum Musyawarah Majelis Syura. PKS, misalnya, melakukan Jaring Capres Emas untuk mencari individu-individu yang paling dikehendaki oleh mata kader dan simpatisan untuk mewakili partai saat menyongsong Pemilu Presiden 2004.

Untuk maksud tersebut, DPP membuat kriteria seorang presiden yang ideal. Kriteria itu di antaranya mencakup bersungguh-sungguh melindungi *wong cilik*, kesediaan bekerja sama dengan setiap unsur bangsa, dan penerimaan dari komunitas internasional. Kemudian, partai meminta secara langsung pandangan kader dan simpatisan dengan menyediakan formulir yang diorganisasi seluruh DPW. Dalam proses ini, partai memberikan kesempatan kepada kader untuk mengajukan nama-nama kandidat presiden yang layak dipilih. Dari *polling* ini kemudian muncul sejumlah nama, termasuk tokoh dari luar partai, seperti M. Amien Rais, Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), Din Syamsuddin, Wiranto, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah satu pekan, nama-nama ini kemudian diproses di DPP berdasarkan kriteria di atas. Kemudian, DPP akan bertanya ke masing-masing individu yang masuk seleksi berkenaan dengan kesediaan mereka mewakili PKS dalam pemilu presiden.

Menjelang Pemilihan Presiden 2004, *polling* internal PKS menyebutkan Hidayat Nur Wahid sebagai tokoh paling populer menjadi calon presiden berikutnya.[73] Namun, karena partai saat itu hanya memperoleh 7,4% suara, PKS memutuskan tidak mengusulkan calon dari kadernya sendiri. Keputusan ini didasarkan pada kesepakatan internal yang diputuskan Musyawarah Majelis Syura pada Januari 2004. Kesepakatan itu menyatakan bahwa komitmen untuk mengusulkan kader sebagai kandidat presiden dari internal partai akan dilakukan apabila partai dapat meraih 20% suara di Pemilu Legislatif 2004. Kemudian, partai akan mempertimbangkan bergabung dengan

[73] "Kriteria Capres 2004 dari Partai Keadilan Sejahtera", *www.pks-jaksel.or.id*, 14 April 2004. "Kriteria Capres 2004 dari Partai Keadilan Sejahtera", *Kompas*, 1 April 2004.

pemerintah apabila partai dapat mencapai sekurang-kurangnya 3% suara.[74] Oleh karena itu, walaupun mantan Presiden Partai Hidayat Nur Wahid adalah tokoh yang paling dikehendaki sebagai presiden,[75] pada akhirnya partai memilih Amien Rais sebagai kandidat presiden dari PKS pada Pemilu Presiden 2004.

Selain penentuan kandidat presiden, seleksi internal untuk menentukan kepemimpinan partai juga menunjukkan adanya keterlibatan yang signifikan dari para kader. Seperti disebutkan di AD/ART partai, pemilihan anggota Majelis Syura melibatkan seluruh kader inti.[76] Di dalam perkembangannya, AD/ART partai juga menyebutkan pedoman untuk proses ini.

Langkah pertama di dalam proses ini adalah membentuk panitia pemilihan yang dilakukan oleh DPTP, yang akan memilih 1.000 kader ahli dari seluruh Indonesia. Seleksi dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam AD partai, seperti telah menjadi anggota partai sekurang-kurangnya lima tahun dan memiliki pengalaman di dalam kepengurusan partai, baik struktural maupun fungsional.[77] Dari tahap ini, kemudian panitia pemilihan menetapkan ratusan kandidat yang berhak dipilih sebagai anggota Majelis Syura. Sekitar 30.000 kader inti selanjutnya memilih para kandidat ini sebagai anggota Majelis Syura.[78]

Anggota baru Majelis Syura yang terpilih kemudian menyelenggarakan rapat internal memilih sejumlah pakar untuk menjadi anggota khusus Majelis Syura. Anggota Majelis Syura juga melakukan pemilihan internal untuk memilih Ketua Majelis Syura. Dalam

---

[74] *Bayan DPP Partai Keadilan Sejahtera No. 02/BYN/DPP-PKS/VII/1425 tentang Sikap Politik Mendukung Pasangan SBY-JK pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua.*

[75] "Menimba Pengalaman Amien", *Suara Islam*, Edisi 56, 5–19 Desember 2008, 15.

[76] *AD PKS 2002 Pasal 11 (2); AD PKS 2005 Pasal 8 (1).*

[77] *AD PK Pasal 15; ART PKS 2002 Pasal 6 (1); ART PKS 2005 Pasal 7(1).*

[78] "Pemira Majelis Syura PKS: Cara Unik PKS Memilih Pemimpin", *http://www.pks.or.id/v2/main.php?op=isi&id=111*.

Tabel 6.1 Hasil Pemilihan Ketua Majelis Syur, pada MMS II Tahun 2005

Kandidat	Suara
K.H. Hilmi Aminuddin	29
K.H. Dr. Salim Segaf Al Jufri	12
K.H. Dr. Surahman Hidayat	8
K.H. Abdul Hasib	1

Sumber: *http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/h/hilmiaminuddin/index.shtml*

proses ini, setiap anggota Majelis Syura memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Musyawarah Majelis Syura yang diselenggarakan pada 26–29 Mei 2005 di Jakarta, misalnya, memilih K.H. Hilmi Aminuddin sebagai Ketua Majelis Syura untuk masa bakti lima tahun. Dia terpilih melalui mekanisme *voting* tertutup dan meraih 29 dari 50 suara. (Lihat Tabel 6.1).

Hasil ini menunjukkan bahwa walaupun Hilmi Aminuddin kadang-kadang dipersepsikan sebagai *godfather* di Jamaah Tarbiyah dan PKS, sebanyak 21 anggota Majelis Syura atau 42% dari total anggota Majelis Syura tidak memilihnya. Situasi ini memperlihatkan dengan sendirinya sejauh mana kebebasan berekspresi di partai ini. Demokrasi internal, yang didukung oleh aturan main partai, muncul secara konkret di dalam kehidupan partai. Seperti dikatakan seorang kader, "Saya pikir situasi internal di PKS sangatlah demokratis. Kita dapat melihatnya dari suksesi pemimpin partai dari tingkat nasional ke tingkat lokal".[79]

C. Dampak Terhadap Partai: Pemeliharaan Soliditas

1. Terbangunnya Rasa Saling Percaya

Konsistensi di dalam pelaksanaan aturan main, pembuatan kebijakan, dan distribusi kewenangan memungkinkan partai mencegah munculnya ketidakpercayaan dan menumbuhkan keyakinan akan

[79] Romli, *"Model Pelembagaan Partai Politik di Indonesia: Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera"*, 64.

dilaksanakannya aturan main dengan saksama. Dalam jangka panjang, situasi ini pada akhirnya mereduksi potensi konflik internal. Prihandoko percaya bahwa konflik dapat dihindari karena partai dapat mempertahankan konsistensinya dalam melaksanakan prosedur partai selama ini.[80] Dia menyatakan, ada dua hal penting di mata kader PKS yang berkaitan dengan proses pembuatan keputusan, yaitu (1) keputusan harus didasarkan pada prosedur dan (2) sejalan dengan ideologi partai. Partai akan menghadapi potensi kekacauan yang besar apabila tidak mampu membuktikan komitmennya dalam menjalankan prosedur dan ideologi partai ketika melakukan pembuatan kebijakan.[81]

Sejumlah pandangan kritis meyakini adanya kecenderungan otoritarian partai ini, dengan mengungkapkan kedudukan superior seorang Hilmi Aminudin sebagai Ketua Majelis Syura dan Anis Matta sebagai Sekretaris Jenderal. Bagi kalangan kritis tersebut, peran Anis Matta sangat berpengaruh di partai, khususnya di dalam proses pembuatan kebijakan. Tidak ada ruang bagi elite lain, apalagi kader biasa untuk mengambil partisipasi signifikan di partai. Mereka bahkan berkeyakinan bahwa PKS sebenarnya berada di genggaman tangan kedua tokoh tersebut.

Walau demikian, bagi kebanyakan kader, posisi penting Anis Matta dalam proses pembuatan kebijakan itu adalah sesuatu yang wajar. Hal ini terutama terkait dengan kemampuannya untuk meyakinkan anggota Majelis Syura lainnya.[82] Kebanyakan kader tidak melihat hal ini sebagai hasil manipulasi, karena pendapat Anis Matta tentang sebuah kebijakan strategis harus dibahas terlebih dahulu oleh semua anggota Majelis Syura sebelum ditetapkan, atau

---

[80] Wawancara dengan Dr. Prihandoko, Ketua DPD PKS Depok (2004–2007) di Depok, 5 Oktober 2010.

[81] Wawancara dengan Dr. Prihandoko, Ketua DPD PKS Depok (2004–2007) di Depok, 5 Oktober 2010.

[82] Wawancara dengan Aus Hidayat Nur, Kepala Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktober 2010; dengan Dr. Prihandoko, Ketua DPD PKS Depok (2004–2007) di Depok, 5 Oktober 2010.

pada kasus-kasus yang membutuhkan respons cepat dilaporkan pertanggungjawabannya di hadapan Majelis Syura. Dengan kata lain, keputusan partai sejatinya adalah keputusan yang bersifat kolektif. Pandangan inilah yang diyakini oleh kebanyakan kader. Berkaitan dengan situasi ini, Prihandoko berkata "akan ada eksodus masif apabila Anis atau Ustad Hilmi mengambil kebijakan yang tidak sejalan dengan prinsip partai."[83]

Lebih dari itu, dengan secara berkala menggunakan mekanisme Musyawarah Majelis Syura, lembaga tertinggi partai ini mampu menjaga kehormatannya di mata kader, yang pada gilirannya memberikan jalan bagi terjaganya kehormatan partai itu sendiri. Kader-kader partai menyaksikan konsistensi badan ini dalam penegakan aturan main partai, termasuk memperlakukan seluruh anggota Majelis Syura secara sama. Partai memang masih memberikan ruang khusus terhadap para pemimpinnya termasuk di dalam proses pembuatan kebijakan. Akan tetapi, pada umumnya, *privilege* itu masih dapat dipahami dan dilakukan pada situasi-situasi yang dianggap mendesak.

Dalam atmosfer seperti itu, kader meyakini bahwa partai tidak akan secara gegabah mengambil tindakan sepihak atau inkonstitusional, yang dapat membahayakan masa depan partai itu sendiri. Yusra menyatakan bahwa karena kader-kader merasa yakin bahwa partai dan elite yang ada di Majelis Syura akan menggunakan mekanisme partai secara konsisten, mereka menjadi merasa nyaman.[84] Sejalan dengan pendapat itu, Umar Basalamah menyatakan bahwa di PKS, kader merasa nyaman karena tidak ada satu pun pihak yang dapat memperlakukan mereka secara tidak adil, termasuk para elite.[85]

---

[83] Wawancara dengan Dr. Prihandoko, Ketua DPD PKS Depok (2004–2007) di Depok, 5 Oktober 2010.

[84] Wawancara dengan Amri Yusra, M.Si., Ketua DPD PKS Depok (2002–2004), Anggota DPRD Kotamadya Depok, Jawa Barat (2004–2009), dan Dosen Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, di Depok, 7 Oktober 2010.

[85] Wawancara dengan Umar Salim Basalamah, Wakil Sekretaris Jenderal PKS (2002), dan sekretaris pribadi Hidayat Nur Wahid (mantan Presiden PKS dan Ketua MPR RI),

Sementara Mustofa menyatakan bahwa konsistensi menjalankan mekanisme partai telah memelihara kepercayaan kader di tingkat akar rumput bahwa mereka akan diperlakukan secara adil dan sama apabila sesuatu menimpa mereka.[86] Oleh karena itu, dapat ditarik benang merah di sini bahwa membangun kepercayaan di partai tidak hanya hasil dari kaderisasi yang sistematis, yang akan dibahas lebih lanjut di Bab X, tetapi juga sebagai konsekuensi konsistensi dalam menjalankan aturan main partai.

Selain memunculkan kepercayaan, konsistensi untuk melaksanakan prosedur dalam proses pembuatan keputusan juga menimbulkan rasa puas bagi kader. Hal ini terutama berkaitan dengan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka, yang tidak hanya berkaitan dengan hak untuk membela diri di pengadilan internal, tetapi juga turut berperan dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini terlihat, misalnya, dari peluang untuk berbicara, mempertahankan pendapat, dan bahkan mewarnai kebijakan partai dengan ikut dalam pemilihan internal dalam proses penyeleksian kandidat anggota Majelis Syura, serta memiliki peluang didengar di musyawarah tingkat lokal. Semua hal itu membuat kader merasa keberadaannya dihargai.

Walaupun kadang-kadang partai tidak melaksanakan pendapat mereka, yang menyebabkan sebagian kader menjadi sangat kecewa, namun sebagian besar kader dapat memahaminya. Bagi mereka, setidaknya partai telah memberikan kader-kader peluang untuk menyampaikan pendapatnya. Peluang untuk terlibat dan memengaruhi kebijakan partai di tingkat lokal bahkan lebih luas lagi. Hal ini dimungkinkan karena mereka memiliki akses yang lebih langsung ke berbagai aktivitas partai sehari-hari, termasuk di dalam proses pembuatan kebijakan.[87] Kesempatan di atas telah meyakinkan kader PKS bahwa partai tidak meninggalkan dan meremehkan mereka.

---

di Jakarta, 12 Oktober 2010.

[86] Wawancara dengan Mustofa, kader PKS dan mantan wartawan Majalah Profetik, di Depok, 7 Oktober 2010.

[87] Wawancara dengan Musa Abdillah, Ketua Departemen Kaderisasi DPC PKS Kelapa Dua, di Jakarta, 23 Oktober 2010.

Kemudian, dengan adanya kesempatan yang sama untuk ikut di dalam proses pemilihan internal, bagi Anis Matta, setiap kader pada dasarnya memiliki tanggung jawab yang sama. Mereka tidak dapat menyalahkan kader lain apabila partai menghadapi masalah karena kesalahan pemimpin yang telah sama-sama mereka sepakati untuk dipilih.[88] Kemudian, mekanisme ini membangun pula rasa memiliki di antara para kader. Menurut Anis Matta, mekanisme ini ditujukan untuk membangun demokrasi internal yang melibatkan seluruh kader sehingga kader menjadi merasa memiliki partai.[89]

Selain itu, proses ini juga secara fundamental merupakan sarana untuk mengontrol kualitas pemimpin. Mereka yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap partai kemungkinan besar tersingkir. Hanya mereka yang mampu dan teruji saja yang dapat secara kontinu menjadi bagian dari kepemimpinan partai ini. Dengan kata lain, tersingkirnya tokoh-tokoh populer tertentu dari kepemimpinan partai sebenarnya mengindikasikan pula seberapa besar kualitas kontribusi mereka kepada partai ini. Secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan musyawarah, yang tercermin salah satunya dengan adanya pemilihan internal, membuat kader merasa terkoneksi dengan Majelis Syura dan kepengurusan partai, yang pada akhirnya akan memberi kontribusi terhadap pemeliharaan stabilitas internal.[90]

2. Terbangunnya Keutuhan Partai

Adanya kepercayaan kader atas pimpinan partai menyebabkan upaya-upaya melawan partai dan elite atau menciptakan konflik di antara kader menjadi sulit dilakukan. Adanya kepercayaan membuat lontaran berbagai isu negatif sulit memicu kader untuk melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan soliditas partai. Bahkan ketika muncul potensi konflik, hal ini tidak secara otomatis memicu kader

[88] "PKS Gelar Pemilihan Raya Majelis Syura", *Media Indonesia*, 22 Februari 2010.

[89] "PKS Gelar Pemilihan Raya Majelis Syura", *Media Indonesia*, 22 Februari 2010.

[90] Syihabuddin, "Majelis Syura, Alternatif 'Demokrasi Islam', dan Ketaatan Kader PKS", 7.

mengambil jarak atau tindakan yang tidak perlu.[91] Pada umumnya, ketika potensi konflik terjadi, kader akan melaporkannya hampir secara otomatis ke pihak partai, dengan sebuah keyakinan bahwa partai akan menanganinya secara proporsional.[92] Dalam atmosfer ini, proses mereduksi potensi konflik menjadi lebih mudah.

Situasi ini dapat dilihat dalam kasus pembuatan kebijakan nasional. Hampir seluruh kasus berakhir tanpa adanya faksionalisasi yang signifikan dan permanen yang menghentikan berkembangnya potensi destruktif. Dalam kasus Pemilu Presiden 2004, setelah keputusan final dinyatakan oleh Majelis Syura, silang pendapat tentang kandidat presiden berakhir. Tokoh sekaliber Anis Matta yang walaupun pada awalnya mendukung Wiranto, namun ketika partai memutuskan memberikan rekomendasi kepada Amien Rais, dia tidak mencari-cari alasan untuk menolak perintah partai yang sudah diputuskan secara prosedural. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika potensi faksionalisme internal pada akhirnya pupus, begitu pula dengan potensi konflik pasca ditetapkannya rekomendasi Majelis Syura terkait dengan Pilpres 2004.

Situasi serupa berlangsung dalam kasus BBM. Walaupun ketegangan di antara kader sangatlah tinggi, khususnya sebelum keputusan dibuat, secara bertahap ketegangan mereda setelah partai melalui Musyawarah Majelis Syura memutuskan bahwa partai tetap di dalam koalisi pemerintah. Pada kasus BBM yang memicu reaksi mempertanyakan posisi PKS di dalam koalisi pemerintah, banyak kader sebenarnya berubah pikiran. Adanya kepercayaan terhadap pemimpin mendorong kader untuk mendukung keputusan tetap di dalam koalisi.[93] Adanya rasa percaya yang diikuti dengan sosialisasi

---

[91] Wawancara dengan Musa Abdillah, Ketua Departemen Kaderisasi DPC PKS Kelapa Dua, di Jakarta, 23 Oktober 2010

[92] Wawancara dengan Nooryanto, Ketua Departemen Kaderisasi DPD PKS Bekasi, di Bekasi, 7 November 2010.

[93] Prabowo, *Pengaruh Taklim Rutin Terhadap Prilaku Politik Kader Partai Keadilan Sejahtera dalam Perspektif Teori Intergroup Relation*, 47–49.

sistematis[94] berhasil mengurangi asumsi negatif terhadap partai dan anggota lainnya. Dengan mampu menjaga kepercayaan kader, partai sejauh ini dapat menghindari berkembangnnya ketidakpercayaan yang dapat membahayakan keutuhan partai. Di ujung itu semua, perpecahan partai dapat dihindari PKS.

Kasus pemecatan juga menunjukkan hal yang sama. Hingga tahun 2008, berbeda dengan sejumlah partai lainnya, kasus pemecatan di PKS tidak memicu polemik internal berkepanjangan. Walaupun dalam kasus tertentu sejumlah pihak mengkritisi cara partai mengambil keputusan, hal ini tidak mengganggu kesatuan internal. Dalam kasus-kasus ini, kader pada umumnya menganggap bahwa proses yang diambil partai masih sejalan dengan AD/ART partai, berlangsung melalui pendekatan prosedural, dan memiliki justifikasi hukum. Karena alasan ini, setelah partai menetapkan pemecatan kader, PKS dapat menghindari eskalasi konflik dan mempertahankan stabilitas internal.

Akan tetapi, pada tahun 2011, Yusuf Supendi yang dipecat partai pada tahun 2009 memperkarakan PKS ke pengadilan. Fenomena ini unik dan terjadi pertama kali di dalam sejarah partai. Dia menuduh sejumlah elite partai melakukan pelanggaran prosedur partai saat memecatnya. Partai jelas menolak tuduhan itu. Menurut partai, seluruh proses pemecatan telah mengikuti prosedur partai, termasuk melibatkan unsur Dewan Syariah Pusat sebagai badan otoritatif di dalam proses tersebut.[95] Kemudian, PKS membuat pernyataan yang menegaskan bahwa partai berdasarkan Surat Keputusan No. SK.DPP. No.115/skep/dpp-pks/1430 secara resmi telah memecatnya pada tahun 2009.[96] Kemudian, Presiden PKS Luthfi H. Ishaaq mengatakan bahwa PKS akan mengungkapkan proses itu secara lengkap di

---

[94] Seperti disebut Tifatul Sembiring bahwa setelah pertemuan itu berakhir, anggota Majelis Syura pergi ke konstituen mereka di banyak daerah untuk menyosialisasikan kebijakan itu dan menjelaskan alasan di balik keputusan itu, "PKS Tetap Mendukung SBY-JK", *Republika*, 28 November 2005.

[95] *http://pkspiyungan.blogspot.com/2011/03/sikap-resmi-pks-atas-tuduhan-mantan.html.*

[96] *http://pkspiyungan.blogspot.com/2011/03/sikap-resmi-pks-atas-tuduhan-mantan.html.*

pengadilan.[97] Pada bulan Februri 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Supendi dan menyatakan pemecatannya legal dan sesuai dengan prosedur partai.[98]

Selain itu, manuver Yusuf Supendi untuk melawan pimpinan PKS tidak banyak menarik perhatian dan dukungan kader. Sebagian orang percaya bahwa situasi ini merupakan cerminan dari banyaknya kader yang tidak kritis, yang dibentuk oleh PKS sebagai hasil indoktrinasi yang sistematis. Akan tetapi, fenomena ini sebenarnya merupakan indikasi bahwa tidak ada pelanggaran prosedur yang signifikan terjadi di dalam kasus pemecatannya. Seperti yang disebutkan Prihandoko, sebagian besar kader PKS adalah pribadi yang kritis dengan latar pendidikan tinggi. Di lain pihak, mereka akan bereaksi apabila melihat ada keganjilan di dalam pelaksanaan prosedur partai. Di lain pihak, mereka tidak mudah menerima informasi tanpa melakukan verifikasi.[99] Walaupun bagi sebagian kalangan kasus Yusuf Supendi dapat dianggap sebagai gejala kurang sempurnanya implementasi prosedur di PKS, pandangan semacam ini masih dapat diperdebatkan, mengingat keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menolak adanya kesalahan prosedur dalam proses pemecatannya. Lebih dari itu, kasus unik Yusuf Supendi juga tidak dapat digunakan sebagai temuan untuk menggeneralisasi situasi riil di dalam partai.

D. RINGKASAN

Kebijakan untuk secara konsisten memprioritaskan Majelis Syura dalam proses pembuatan kebijakan adalah salah satu karakteristik PKS. Meski demikian, hal ini tidak membuat posisi institusi tersebut dapat berada di atas aturan main partai. Fenomena personalisasi

---

[97] "PKS Siap Layani Yusuf Supendi Lewat Jalur Hukum", *Republika*, 2 Mei 2011.

[98] *http://nasional.kompas.com/read/2012/02/14/13081586/Gugatan.Yusuf.Supendi.kepada.10.Petinggi. PKS.Ditolak. http://www.antaranews.com/berita/297312/gugatan-yusuf-supendi-ke-pks-ditolak*

[99] Wawancara dengan Dr. Prihandoko, Ketua DPD PKS Depok (2004–2007) di Depok, 5 Oktober 2010.

kekuasaan, misalnya, tidak terjadi. Kenyataannya, dalam kurun waktu satu dekade keberadaan PKS, Majelis Syura dan anggotanya menghormati otoritas institusi lain dan melakukan delegasi kekuasaan. Hal tersebut mencerminkan adanya komitmen untuk mengedepankan prosedur. Komitmen untuk melaksanakan kepemimpinan prosedural juga tercermin dari sikap memprioritaskan musyawarah. Situasi ini sejalan dengan komitmen partai untuk membangun partai berbasis menghormati sistem daripada secara membabi-buta mengikuti kehendak pimpinan. Oleh karena itu, PKS tidak mengakui tokoh spesial yang dapat menikmati perlakuan istimewa yang berlebihan. Perlakuan hormat terhadap tokoh-tokoh senior dan pendiri partai secara umum masih dalam batas-batas kewajaran dan dapat diterima baik dalam kepatutan budaya maupun logika.

Adanya komitmen ini, walaupun tidak sepenuhnya sempurna, telah menyelamatkan partai dari konfrontasi internal. Sejumlah keberatan bahkan penolakan memang tidak dapat dihindari. Namun, hal ini tidak mendorong kader untuk menggunakan momen tersebut untuk membentuk sebuah faksi. Ini menunjukkan bahwa keputusan partai pada umumnya dapat dipahami dan dapat diterima bagi sebagian besar kader, atau setidaknya bukanlah sesuatu yang sepenuhnya bertentangan dengan aturan main partai. Situasi ini akan bersifat kontra-produktif apabila partai secara sengaja menuju ke arah yang berbeda dalam memahami dan menjalankan AD/ART partai. Anggota partai yang secara terus-menerus didorong oleh partai untuk menghargai sistem internal akan sangat memperhatikan dan kritis dengan masalah ini.[100] Dengan demikian, adanya konsistensi dalam pelaksanaan aturan main telah menjaga kepercayaan kader terhadap partai, elite, dan anggota lainnya yang pada akhirnya menjadi salah satu modal penting bagi PKS dalam menjaga soliditas partainya.

---

[100] Wawancara dengan dengan Dr. Prihandoko, Ketua DPD PKS Depok (2004–2007) di Depok, 5 Oktober 2010; dengan Mustofa, kader PKS dan mantan wartawan Majalah Profetik, di Depok, 7 Oktober 2010.

BAB VII
KETIADAAN MEKANISME RESOLUSI KONFLIK DAN INSTITUSI YANG MUMPUNI DI PKB

> Saya yakin betul akan tidak terwujud perpecahan jika ada badan (Badan Kehormatan) ini (Agus Suflihat)[1]

Bab ini dan bab berikutnya akan mengetengahkan persoalan seputar peran *Conflict Resolution Mechanism* (Mekanisme Resolusi Konflik/ CRM) dan dampaknya bagi soliditas partai. Untuk tujuan tersebut, bab ini akan membahas sejumlah aspek, yaitu bagaimana kondisi CRM di masing-masing partai, seperti apakah situasi internal partai dengan ada atau tiadanya CRM dan dampak situasi yang muncul terhadap soliditas partai. Bab ini dan bab berikutnya menempatkan keberadaan CRM sebagai bagian dari upaya partai untuk mengelola pencegahan dan penghentian konflik. Berkenaan dengan hal itu maka problematika seputar pencegahan konflik, terkait dengan upaya sebelum terjadinya konflik dan penghentian konflik, terkait dengan upaya setelah konflik terjadi adalah pokok bahasan utama dalam bab ini dan bab selanjutnya.

Bab ini akan menunjukkan bagaimana ketidakmampuan PKB dalam menciptakan dan melembagakan CRM telah menyurutkan kemampuan partai ini untuk mempertahankan soliditas atau menghindari perpecahan. Kegagalan PKB dalam menginstitusionalisasikan atau melembagakan CRM pada akhirnya memberi dampak terhadap

---

[1] Wawancara dengan Agus Suflihat, Ketua Dewan Tanfidz PKB (1998–2001) dan Ketua Dewan Tanfidz PKB (1998–2001), melalui telepon, Jakarta-Bandung, 11 Oktober 2010.

ketidaktepatan respons atas potensi konflik dan kegagalan melokalisir konflik sehingga mengurangi kemampuan partai untuk menghindari perpecahan.

A. Tidak adanya Mekanisme Resolusi Konflik (CRM)

Salah satu hal penting yang tampak diabaikan oleh para pendiri PKB dalam konteks mekanisme pengelolaan konflik adalah tidak diaturnya persoalan itu dalam aturan main partai. Konstitusi PKB yang digunakan partai pada kurun waktu 1998–2005 tidak menyebutkan satu pasal pun mengenai hal-hal yang secara langsung terkait dengan mekanisme ini. Aturan main yang berlaku di PKB hanya mengetengahkan beberapa persoalan yang secara tidak langsung terkait dengan pencegahaan konflik, yakni pertama, mengenai tata cara dan media yang dapat digunakan oleh seorang kader untuk membela diri manakala mengalami pemecatan dan kedua, persoalan yang terkait dengan syarat pemberhentian sementara seorang anggota personalia Dewan Pengurus Pusat (DPP).

Terkait dengan tata cara pembelaan diri, disebutkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) partai bahwa anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap dapat membela diri dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada forum permusyawaratan tertinggi di lingkungannya dan/atau dewan pengurus yang lebih tinggi.[2] Dalam kasus yang melibatkan DPP, ART partai menyatakan bahwa pemecatan sementara hanya dapat dilakukan di forum Rapat Pleno DPP. Keputusan yang nantinya dibuat harus didasarkan alasan-alasan yang kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan dengan AD/ART Partai, putusan forum-forum permusyawaratan partai, dan peraturan partai.[3]

---

[2] *ART PKB 1998 Pasal 11 (7); ART PKB 2000 Pasal 11 (7); ART PKB 2002 Pasal 11 (7); ART PKB 2005 Pasal 11 (7); ART PKB 2008 Pasal 11 (7).*

[3] *ART PKB 1998 Pasal 19 (2); ART PKB 2000 Pasal 20 (2); ART PKB 2002 Pasal 22 (2); ART PKB 2005 Pasal 22 (2).*

Baru pada tahun 2005, PKB dalam konstitusinya, selain menyebutkan dua persoalan di atas tersebut, mulai mencantumkan badan kelengkapan partai yang disebut sebagai Badan Kehormatan (BK), yang berfungsi kurang lebih sebagai lembaga arbitrase internal. Disebutkan dalam Bab 33 (tentang Perangkat Partai Lainnya) pasal (2) bahwa "Dewan Pengurus Partai membentuk Badan Kehormatan untuk melakukan arbitrase".[4] Meski tidak hanya menyangkut persoalan konflik, badan ini tampaknya dapat berpotensi untuk menjadi media yang dapat digunakan untuk persoalan-persoalan yang terkait dengan resolusi konflik. Dapat dikatakan ini merupakan sebuah langkah yang progresif dalam partai ini.[5]

Namun, meski telah jelas menyebutkan bahwa DPP akan membentuk Badan Kehormatan untuk melakukan fungsi arbitrase, konstitusi partai tidak menjelaskan lebih lanjut perihal tugas spesifik yang diemban oleh badan tersebut. Dengan demikian, secara legal, badan ini tidak memiliki kejelasan tentang soal apa saja yang menjadi wewenangnya dan bagaimana menjalankan wewenang tersebut secara detail. AD/ART juga tidak menjelaskan siapa saja yang berhak menduduki jabatan tersebut dan proses seleksinya. Meskipun jelas akan bertanggung jawab kepada partai, namun seberapa besar kewenangan yang dimilikinya tidak juga teruraikan dengan jelas. AD/ART juga tidak menyebutkan apakah badan ini akan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya atau tidak. Oleh karena itu, keberadaan badan ini, sejak didirikannya, lebih tampak sekadar sebagai "pelengkap DPP" yang tidak akan banyak memiliki peran penting. Situasi ini menyebabkan konstitusi PKB secara substansi tidak juga banyak perubahan, terutama terkait dengan persoalan konflik. Situasi ini terus berlangsung hingga perpecahan ketiga dialami oleh partai ini.

Di sisi lain, baik setelah dibentuknya Badan Kehormatan maupun sebelumnya, pada umumnya anggota PKB memahami forum mukta-

---

[4] *AD/ART PKB 2005 Pasal 33 (2).*

[5] Wawancara dengan Muamir M. Syam, Ketua PKB (2005–2010), di Jakarta, 20 Oktober 2010; dengan Ida Fauziyah, Anggota DPR RI FPKB (2010–2015), di Jakarta, 14 Oktober 2010.

mar, termasuk MLB dan Dewan Syura, sebagai perangkat-perangkat formal partai yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik internal. Forum muktamar atau MLB merupakan forum tertinggi yang dapat menentukan banyak keputusan kunci dan dijadikan media legitimasi untuk mendudukkan sebuah perdebatan serta memutuskan pandangan yang terbaik bagi semua. Idealnya dalam pandangan kader PKB, manakala terjadi sebuah perdebatan atau konflik yang disebabkan oleh kebijakan partai, peserta muktamirin yang akan memutuskan apakah kebijakan itu dapat diterima atau tidak. Cara pandang semacam ini di kemudian hari disuarakan nyaris secara otomatis oleh pihak-pihak yang tengah bertikai, mengenai peran muktamar yang akan dijadikan media dalam penyelesaian konflik.[6]

Sementara itu, Dewan Syura relevansinya dengan CRM terutama karena posisi strategisnya sebagai institusi paling tinggi di PKB dan posisi ulama-ulama di dalam badan ini, yang membuatnya memiliki kapasitas memberikan arahan dan saran terhadap masalah-masalah resolusi konflik. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Kacung Marijan, pengamat politik PKB dan NU, partai mengharapkan bahwa para kiai sepuh yang ada dalam Dewan Syura mampu menyelesaikan persoalan itu.[7] Sejalan dengan pendapat ini, menurut Zainal Arifin Junaidi dan Agus Suflihat, Dewan Syura adalah badan yang pada dasarnya diharapkan mampu memecahkan berbagai masalah yang terkait dengan konflik di dalam partai.[8]

Namun, kedua perangkat partai itu, Muktamar/MLB dan Dewan Syura, tidak secara ekspilist diserahkan tugas untuk menyelesaikan konflik. Apa yang dibayangkan mungkin terjadi dan sebenarnya lebih

[6] Cara berpikir ini misalnya menjadi salah satu fondasi bagi kader untuk menolak kebijakan pemecatan Ketua Dewan Tanfidz yang dilakukan melalui forum terbatas.

[7] Wawancara dengan Prof. Dr. Kacung Marijan, Pengamat Kebijakan NU dan mantan anggota Tim Asistensi Usulan Pendirian PKB (versi Rembang), di Jakarta, 26 November 2010.

[8] Wawancara dengan H.Z. Arifin Junaidi, Sekretaris Jenderal Dewan Syura PKB (2002–2005) dan Ketua Dewan Syura PKB (2005–2010), di Jakarta, 28 Oktober 2010; Agus Suflihat, Ketua Dewan Tanfidz PKB (1998–2001) dan Ketua Dewan Tanfidz PKB-Jalil, melalui telepon, Bandung–Jakarta, 11 Oktober 2010.

pada asumsi-asumsi berdasarkan kewenangan umum yang dimiliki oleh kedua lembaga itu.

Lebih dari itu dilihat dari efektivitas dan kesegeraan serta lingkup konflik yang beragam, penyelenggaraan muktamar jelas bukan jawaban yang tepat bagi penyelesaian konflik yang membutuhkan penanganan segera. Dan tidak semua konflik pada kenyataannya dapat diselesaikan dengan proporsional dalam muktamar. Sebaliknya, Dewan Syura karena tidak secara spesifik memiliki fungsi CRM, juga tidak memiliki perangkat dan orang-orang yang benar-benar mumpuni, profesional, dan kredibel untuk menjalani fungsi penyelesaian konflik, khususnya ketika berhadapan dengan masalah-masalah administratif yudisial. Dewan Syura memang tidak dirancang untuk dapat menangani masalah seperti itu, terlihat misalnya tidak ada prasyarat keanggotaan yang relevan dengan persoalan penyelesaian konflik. Pada kenyataannya pula, Dewan Syura dalam beberapa episode konflik menjadi pihak yang justru turut terlibat dan berperan dalam memunculkan konflik itu. Posisi Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syura yang kerap mewakili lembaga ini secara personal membuat objektivitas lembaga ini sulit untuk diharapkan muncul, mengingat peran dirinya di dalam beberapa konflik dalam tubuh PKB. Sementara itu, anggota Dewan Syura yang lain cenderung menjadi pengikut kepentingan Gus Dur.

Menurut Kacung Maridjan dalam atmosfer euforia politik di tahun 1998, warga NU memang tidak membayangkan bahwa partai yang dibentuknya nantinya akan sarat dengan konflik.[9] Adanya bayangan sedemikian menyebabkan keberadaan perangkat CRM atau setidaknya badan yang akan menangani konflik memang belum dirasa penting. Apabila ada konflik, hal itu diyakini dapat dengan mudah diselesaikan oleh para kiai sepuh yang ada di dalamnya, yang secara

---

[9] Wawancara dengan Prof. Dr. Kacung Marijan, Pengamat Kebijakan NU dan mantan anggota Tim Asistensi Usulan Pendirian PKB (versi Rembang), di Jakarta, 26 November 2010.

tradisional memang biasanya berperan dalam penyelesaian konflik dengan caranya yang khas NU.[10]

Pengabaian mekanisme legal seperti CRM ini juga didukung oleh situasi di mana banyak kaum Nahdiyin pada waktu itu termasuk PBNU sebagai institusi formal tertinggi NU memproyeksikan PKB sebagai institusi kolektif yang memperjuangkan kepentingan mereka. Pandangan semacam itu tampak dapat dibenarkan. PKB di awal pembentukannya memang terlihat memiliki potensi yang memadai untuk menjadi sebuah institusi politik yang solid karena memperjuangkan sebuah agenda yang sama. Keberadaan kiai sepuh dan pimpinan tokoh-tokoh NU karismatik utama yang dihormati oleh komunitas NU, termasuk Gus Dur, turut pula menebalkan rasa optimisme itu.[11] Hal ini terutama terkait dengan pola hubungan *patron-client* antara kiai dan santri yang masih cukup berperan dalam komunitas ini, mengingat para kiai itu merupakan patron bagi banyak anggota NU di seluruh tanah air.

Namun, kemudian terlihat bahwa asumsi kesolidan yang dibayangkan itu tidak terjadi. Tiga tahun setelah terbentuk, partai ini mengalami konflik yang demikian besar dan tidak dapat tertanggulangi. Euforia poltik dan itikad baik tampaknya menguburkan kalkulasi rasional yang responsif terhadap berbagai kemungkinan terburuk, termasuk potensi internal konflik.

Dalam perkembangannya, partai ini tidak juga memperlihatkan sebuah perkembangan berarti dalam menciptakan aturan main yang

---

[10] Wawancara dengan Prof. Dr. Kacung Marijan, Pengamat Kebijakan NU dan mantan anggota Tim Asistensi Usulan Pendirian PKB (versi Rembang), di Jakarta, 26 November 2010; dengan Abdul Khalik Ahmad, Sekretaris FPKB DPR RI (1999–2001) dan Sekretaris Jenderal PKB-Jalil (2000–2005), di Jakarta, 11 Oktober 2010.

[11] Wawancara dengan Muamir M. Syam, Ketua PKB (2005–2010), di Jakarta, 20 Oktober 2010; dengan H.Z. Arifin Junaidi, Sekretaris Jenderal Dewan Syura PKB (2002–2005) dan Ketua Dewan Syura PKB (2005–2010), di Jakarta, 28 Oktober 2010; dengan Prof. Dr. Kacung Marijan, Pengamat Kebijakan NU dan mantan Anggota Tim Asistensi Usulan Pendirian PKB (versi Rembang), di Jakarta, 26 November 2010; dengan Abdul Khalik Ahmad, Sekretaris FPKB DPR RI (1999–2001) dan Sekretaris Jenderal PKB-Jalil (2000–2005), di Jakarta, 11 Oktober 2010.

lebih konkret untuk mengatasi persoalan konflik internal. Mengenai hal ini, beberapa kalangan kemudian melihat hal ini sebagai dampak dari fokus partai yang tidak tertuju pada pembenahan internal.[12] Mereka memandang bahwa di awal berdirinya, PKB telah disibukkan oleh upaya-upaya mempertahankan eksistensi Presiden Gus Dur. Setelahnya, muncul serial konflik internal yang telah demikian besar memakan waktu dan energi, yang menyebabkan upaya-upaya itu kembali tidak tertanggulangi.[13] Pandangan apologetik ini mengesampingkan sebuah kenyataan bahwa kesadaran akan pentingnya CRM di benak kebanyakan kader sebenarnya terus berkembang dari waktu ke waktu, yang seharusnya tersalurkan dengan baik oleh partai.[14] Oleh karena itu, apabila partai dengan sungguh-sungguh akan melakukan upaya menguatkan CRM, tentu sambutan para kader pun sebenarnya akan baik. Di samping itu, dalam kurun waktu satu dekade, kesempatan untuk mengonkretkan CRM sebenarnya cukup terbuka.

Terlepas dari itu, ketiadaan CRM dalam PKB juga tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa PKB berdiri di atas tradisi NU yang demikian dominan. Situasi ini merupakan hal fundamental yang patut mendapat perhatian. Dalam hal ini, apa yang telah menjadi tradisi dalam NU cenderung pula menjadi tradisi dalam PKB, termasuk dalam soal bagaimana PKB dan mayoritas kadernya

---

[12] Wawancara dengan Ahmad Shodiq Noor, Sekretaris Jenderal DPW PKB DKI Jakarta, di Jakarta, 3 November 2010; dengan Abdul Khalik Ahmad, Sekretaris Fraksi PKB DPR RI (1999–2001) dan Sekretaris Jenderal PKB-Versi Jalil (2000–2005), di Jakarta, 11 Oktober 2010; dengan Marinah Hardy, Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB NTB (2002–2005), di Jakarta, 28 Oktober 2010.

[13] Wawancara dengan Ahmad Shodiq Noor, Sekretaris Jenderal DPW PKB Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta, 3 November 2010; dengan Abdul Khalik Ahmad, Sekretaris Fraksi PKB DPR RI (1999–2001) dan Sekretaris Jendereal PKB-Jalil (2000–2005), di Jakarta, 11 Oktober 2010; dengan Marinah Hardy, Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Provinsi Nusa Tenggara Barat (2002–2005), di Jakarta, 28 Oktober 2010; dengan Muamir M. Syam, Ketua PKB (2005–2010), di Jakarta.

[14] Wawancara dengan Anas Nashikin, Sekertaris Jenderal Garda Bangsa, di Jakarta, 26 Oktober 2010.

mengelola konflik. Aspek ini tampak sulit dibaikan dalam memahami cara pandang kalangan pendukung PKB yang utamanya adalah orang-orang Nahdiyin. Bagi kalangan ini, konflik internal bukanlah sebuah hal yang dapat dihindari, namun bukan pula sesuatu yang tidak tertanggulangi. Sejarah NU memang banyak diwarnai oleh konflik-konflik internal,[15] yang membuat kalangan ini memiliki pandangan dan kepercayaan diri tersendiri mengenai konflik dan cara penyelesaiannya.

Namun, dalam menghadapi pelbagai konflik tersebut, dan hal ini tampaknya akan pula berdampak di PKB, masalah penyelesaian konflik tidak diatur secara komprehensif dalam NU, begitu pula pada saat NU menjadi partai politik. NU tidak mengelola CRM secara komprehensif karena ormas dalam kurun waktu yang cukup lama ini tidak mengembangkan prosedur legal untuk mengatasi masalah semacam itu. Pada umumnya, tradisi organisasional NU cenderung menghindari regulasi yang ketat dan memercayai pendekatan personal. Menurut Soon, di dalam kehidupan organisasi, NU cenderung mengutamakan tradisi dan figur daripada sistem atau manajemen formal.[16] Akibatnya, ketika menghadapi konflik internal, organisasi ini menjalankan pendekatan informal atau tradisi daripada menggunakan aspek legal formal seperti AD/ART partai.

Sejumlah metode digunakan oleh NU untuk mengatasi konflik internal. Pertama, konflik dalam tubuh Jamiyah NU pada umumnya diselesaikan melalui sebuah pendekatan personal dengan mengedepankan budaya ke-NU-an, seperti islah. Dalam mekanisme ini, pihak yang berkonflik saling mengunjungi dan bertatap muka secara informal dan berbicara dari hati ke hati mengenai persoalan yang tengah dihadapi. Rekonsiliasi di antara Subchan Z.E., tokoh politik utama NU di awal Orde Baru, dan K.H. Bisri Syansuri, salah satu

[15] Mahrus Irsyam, *Ulama dan Partai Politik: Upaya Mengatasi Krisis*, (Jakarta: Yayasan Perkhidamatan, 1984). Kang Young Soon, *Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: UI-Press, 2008).

[16] Kang Young Soon, *Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama*, Disertasi, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008), 400.

tokoh pendiri NU, misalnya, berlangsung setelah Subchan meminta islah dengan Bisri Syansuri di pesantren Bisri Syansuri.[17]

Kedua, secara tradisi NU juga kerap mengandalkan sebuah mekanisme informal yang melibatkan pihak ketiga (*third party*) untuk melakukan mediasi dalam rangka penyelesaian konflik. Peran pihak ketiga ini biasanya dilakukan oleh kiai sepuh yang ditokohkan dan dihormati oleh pihak-pihak yang berkonflik. Kasus islah antara Gus Dur dan pamannya Yusuf Hasyim, yang telah berkonflik selama beberapa waktu, diselesaikan melalui perantara K.H. Abdullah Faqih, tokoh utama kelompok kiai yang dituakan (*khos*), adalah contoh mekanisme ini. Situasi ini menunjukkan bahwa keutamaan senioritas berdasarkan kepakaran di bidang keagamaan yang berperan dalam resolusi konflik. Selain itu, menurut Choirul Anam, di masa lalu NU sebenarnya telah melembagakan tradisi mediasi ini dengan adanya semacam badan arbitrase yang disebut *Islahu Dzatilbain* yang terdiri dari ulama untuk melindungi NU dari konflik berkepanjangan. Akan tetapi, NU sama sekali tidak pernah menggunakan institusi ini setelah banyak ulama senior NU yang menjadi pilar institusi ini meninggal.[18]

Metode ketiga adalah dengan menarik diri. Atau yang disebut oleh Hirscham sebagai mekanisme *exit*. Mekanisme ini mencakup dua model, yakni (1) secara pasti mengakhiri hubungan dengan pihak lawan (*muffaraqah*), yaitu dengan membuat sebuah pernyataan dan (2) meninggalkan organisasi. Model ini dilakukan jika level kekecewaan atau ketersinggungan pihak yang berkonflik sudah demikian tinggi dan tidak mungkin mampu diselesaikan. Keputusan K.H. Asa'ad Syamsul Arifin, salah satu tokoh NU generasi pertama, untuk melakukan *muffaraqah* kepada Gus Dur merupakan contoh

[17] Wawancara dengan Choirul Anam, Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Provinsi Jawa Timur (1998–2005) dan Ketua Dewan Tanfidz PKB-Alwi (2005–2007), di Jakarta, 13 Oktober 2010.

[18] Fenomena ini menunjukkan bahwa peran figur atau tokoh lebih penting ketimbang sistem di NU. Wawancara dengan Choirul Anam, Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Provinsi Jawa Timur (1998–2005) dan Ketua Dewan Tanfidz PKB-Alwi (2005–2007), di Jakarta, 13 Oktober 2010.

mekanisme pertama. Sementara itu, kasus meninggalkan NU seperti yang dilakukan Achmad Syaichu, anak angkat Wahab Chasbullah, salah satu bapak pendiri NU, adalah contoh kasus keluar dari organisasi. Setelah merasa dicurangi oleh Idham Chalid di dalam pemilihan untuk jabatan Ketua Umum Dewan Tanfizdiyah, Syaichu meninggalkan NU dan mendirikan *Ittihadul Muballighin*.[19]

Cara keempat adalah dengan memanfaatkan forum muktamar. Peran muktamar itu sendiri menjadi penting dalam penyelesaian konflik terutama terkait dengan penentuan kubu mana yang akan menang, yang akan mendapat legitimasi pembenaran meski secara substansial tidak terkait persoalan penyelesaian konflik itu sendiri. Beberapa konflik besar diselesaikan dalam forum ini termasuk perseteruan antara K.H. Idham Chalid dan Subhan Z.E., dua tokoh penting yang berbeda pendapat tentang masa depan NU (pada tahun 1970-an) atau konflik antara Kubu Cipete, kubu yang berorientasi politik di bawah pimpinan Idham Chalid, dan kubu Situbondo, kubu yang berorientasi budaya di bawah pimpinan Asad Syamsul Arifin dan Gus Dur (pada tahun 1982). Namun karena tidak bersifat rekonsi-liatif, forum ini tidak menyebabkan konflik benar-benar berakhir.[20]

Beberapa model penyelesaian konflik dalam perkembangannya hadir dalam berbagai bentuk, yang kadang menyiratkan pertautan di antara keempatnya. Namun secara umum, berbagai pendekatan yang secara fundamental bersifat personal dan informal itu tidak diwadahi secara legal ataupun dituntun dalam aturan main di dalam NU itu sendiri. Dalam konteks pelembagaan, tampak hanya mekanisme muktamar yang memiliki keterkaitan dengan penyelesaian konflik.

Meski memiliki kelemahan dari sisi prosedural, berkali-kali pula NU dengan mekanisme informal itu mampu menyelesaikan berbagai konflik internalnya. NU tidak pernah menjadi terbelah secara formal dan permanen. Inilah yang kemudian menyebabkan warga NU tampak cukup percaya diri dengan perangkat informal

[19] Soon, *Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama*, 131.

[20] *Ibid.*, 244–252.

penyelesaian konflik yang dimilikinya. Paradigma lama yang dianut oleh komunitas NU yang meyakini bahwa konflik dalam komunitas NU akan surut dengan sendirinya, dalam semangat kebersamaan sebagai sebuah jamiyah, tetap digunakan hingga kini.

Kondisi dalam NU inilah yang kemudian turut terbawa atau terwariskan ke dalam PKB. Model penyelesaian konflik yang beragam, namun tidak melembaga ini menjadi sebuah 'fenomena ikutan' yang menjadi salah satu karakteristik partai ini. Semangat penyelesaian informal model NU ini mewarnai upaya-upaya partai dalam menyelesaikan konflik. Berbagai anjuran-anjuran informal—seperti melakukan islah ataupun memanfaatkan pihak ketiga—dikemukakan oleh beberapa kalangan berpengaruh dalam NU sebagai masukan dan anjuran atas konflik yang tengah terjadi. Sikap untuk menarik diri pun menjadi momentum untuk memisahkan diri menemukan presedennya dalam tradisi NU. Secara umum, tradisi untuk tidak melembagakan CRM pun akhirnya menjadi sesuatu yang tak terelakkan dalam PKB.

Meskipun demikian, PKB tetap mewarisi tradisi yang ada dalam NU, model penyelesaian informal itu juga belakangan tidak berjalan dengan baik. Kasus-kasus penting yang terkait dengan konflik menunjukkan bahwa partai ini perlu memiliki mekanisme formal dalam resolusi konflik, termasuk institusi otoritatif yang secara langsung bertanggung jawab atas penyelesaian konflik.

B. Dinamika Internal

1. Respons yang Tidak Tepat terhadap Potensi Konflik

Dengan tidak adanya mekanisme atau badan yang otoritatif dalam persoalan CRM, dengan tugas spesifik yang jelas dan orang-orang yang berkompeten, partai tidak memiliki instrumen formal yang dapat secara legal memaksa setiap kelompok yang berkonflik untuk bertemu dan membuat keputusan yang adil dan mengikat bagi semua pihak. Menurut Arifin Junaidi, penyelesaian konflik internal di PKB

sulit dicapai karena tidak adanya institusi yang secara legal bermain sebagai penafsir tunggal dalam memahami pelaksanaan AD/ART partai.[21]

Manakala sebuah perdebatan pandangan yang cukup krusial dan berpotensi memunculkan konflik hadir, perbedaan pandangan itu cenderung mengalami pembiaran. Pihak yang memiliki pandangan berbeda tidak segera direspons dengan proporsional oleh partai. Hal ini menyebabkan beragam perbedaan pandangan yang pada akhirnya cenderung tidak tersalurkan secara legal-formal. Begitu pula dengan pihak-pihak yang dirugikan atau mereka yang menolak kebijakan yang dikeluarkan oleh partai, mereka merasa tidak memiliki pegangan karena tidak ada media yang efektif untuk memperjuangkan kepentingannya dalam partai. Pihak yang memiliki pandangan berbeda, pada akhirnya, merasa tetap yakin bahwa pandangannya berhak untuk diperjuangkan dan dilaksanakan.

Ketika Matori Abdul Jalil meyakini kehadirannya di Sidang Istimewa MPR RI tahun 2001 sebagai tindakan politik legal yang tetap sejalan dengan kepentingan partai dan bahkan sebagai bagian upaya untuk membela Presiden Gus Dur,[22] misalnya, dia cenderung menjadi seorang penafsir tunggal atas aturan dan kebijakan partainya. Hal ini karena ia tidak melihat institusi apapun di PKB yang dapat menyuarakan pendapatnya dan mendorong partai untuk mempertimbangkan pandangannya itu untuk dijadikan pertimbangan serius sebelum memutuskan nasib dirinya dalam partai. Sebaliknya, partai (dengan penafsirannya) langsung mengabaikan pendapat Matori dan

---

[21] Wawancara dengan H.Z. Arifin Junaidi, Sekretaris Jenderal Dewan Syura PKB (2002–2005) dan Ketua Dewan Syura PKB (2005–2010), di Jakarta, 28 Oktober 2010.

[22] Tentang pendapat Matori lihat *Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa*, dipaparkan di Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa, Jakarta, Hotel Borobudur, 14–16 Januari 2002, 17–19. A. Effendy Choirie, *PKB, Politik Jalan Tengah NU: Eksperimentasi Pemikiran Islam Inklusif dan Gerakan Kebangsaan Pasca Kembali ke Khitah 1926*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2002), 294–295, 298. Wawancara dengan Abdul Khalik Ahmad, Sekretaris FPKB DPR RI (1999–2001) dan Sekretaris Jenderal PKB-Jalil (2000–2005), di Jakarta, 11 Oktober 2010.

menganggap pendapat itu kurang tepat serta segera menindak yang dianggap pantas untuk Matori atas tindakan (atau tafsiran) yang dilakukannya. Tidak itu saja, dalam membela sebuah penafsiran, sebagian besar elite partai cenderung beramai-ramai menekan Matori, baik langsung maupun tidak langsung, agar menerima pandangan partai. Tak jarang mereka mencap Matori sebagai oportunis yang teramat pantas untuk dihukum.[23]

Begitu pula manakala ada perbedaan pandangan dalam menafsirkan masalah rangkap jabatan pada tahun 2004. Bagi para pendukung pandangan itu, larangan rangkap jabatan sudah jelas dan tuntas. Dilihat dari banyak aspek, hal itu dapat dipahami, secara rasional maupun etika. Namun bagi beberapa kalangan, termasuk Alwi Shihab, kebijakan semacam itu jelas bertentangan dengan kebijakan dasar partai tentang hak kader untuk memberikan kontribusi positif melalui berbagai peran atau jabatan yang mereka emban, termasuk melalui jabatan menteri.[24]

Perbedaan penafsiran juga muncul dalam soal mekanisme pemecatan Alwi dan juga Saifullah. Bagi Gus Dur dan pendukungnya, etika dan kesepakatan bersamalah yang menjadi rujukan atau landasan pemecatan itu. Oleh karena itu, pemecatan Alwi dan Saifullah adalah sah karena keduanya telah melakukan pelanggaran etika dan menabrak kesepakatan bersama. Namun bagi kubu Alwi, mekanisme pemecatan itu harus bertumpu pada aspek legal-formal. Dengan demikian, mekanisme pemecatan seorang kader harus sejalan dengan aturan main, yang manakala dilanggar, hal itu berarti melegalkan sebuah kesewenang-wenangan. Argumentasi atas dasar penafsiran semacam inilah yang menjadi salah satu alasan Alwi untuk membela diri.[25]

---

[23] Choirie, *PKB Politik Jalan Tengah NU:. Eksperimentasi Pemikiran Islam Inklusif dan Gerakan Kebangsaan Pasca Kembali ke Khitah 1926*, 296–297.

[24] DPW PKB Jawa Timur, *Data dan Fakta Pelanggaran AD/ART di Muktamar II Semarang*, (DPW PKB Jawa Timur, 2005), h.4–5.

[25] Kamarudin, *Konflik Internal PKB*, (Jakarta: Akses Publishing, 2008), h.125.

Ketiadaan CRM juga menyebabkan partai tidak memiliki kapasitas merespons keberatan Alwi dan pendukungnya itu secara konstitusional. Partai malah terus mendorong secara informal agar Alwi mengundurkan diri dari posisinya. Dengan kata lain, partai tidak saja memiliki penafsiran yang berbeda, namun juga tidak memberikan peluang kepada Alwi dan mereka yang menolak larangan rangkap jabatan untuk menyampaikan pendapatnya. Hal inilah yang justru menyebabkan Alwi dan para pendukungnya pun akhirnya tetap bersikukuh pada pendiriannya.

Muhaimin Iskandar juga menghadapi situasi serupa. Bagi partai, siapa pun kader yang terindikasi telah tidak loyal dan melakukan sebuah tindakan tidak pantas, berhak untuk ditindak. Artinya, partai berhak melakukan tindakan yang dianggap perlu dengan segera. Hal ini tidak lain adalah untuk menyelamatkan partai. Apalagi ketidakloyalan itu dilakukan kepada Gus Dur, sosok yang dihormati dan paling berpengaruh terhadap kehidupan partai. Atas dasar itu, hal yang terpenting adalah menyelamatkan Gus Dur dan PKB dari sebuah konspirasi, apa pun caranya.

Namun, persoalannya bagi Muhaimin dan para pendukungnya adalah tidak saja partai telah gagal membuktikan tuduhan ketidakloyalannya itu, yang terpenting adalah cara partai melakukan pemecatan atas diri Muhaimin. Kenyataannya, partai tidak memberikan kesempatan kepada Muhaimin untuk membela diri terkait dengan tuduhan konspirasi untuk menjatuhkan Gus Dur.[26] Partai, khususnya Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syura, justru terus-menerus mengabaikan hak-hak Muhaimin dan tidak berniat untuk memberi penilaian yang seimbang.

Dalam kasus-kasus itu tidak ditemukan sebuah langkah sungguh-sungguh untuk segera meredam konflik dengan paradigma bersedia saling mendengarkan dan berorientasi *win-win solution*. Akibatnya, kalangan yang dirugikan tidak melihat itikad baik dari DPP, yang

[26] Wawancara dengan Zannubah Ariffah Wahid, Sekretaris Jenderal PKB-Gus Dur, di Jakarta, 20 Oktober 2010.

dengan berbagai alasan, juga tidak merasa memiliki kewajiban konstitusional untuk memenuhi aspirasi mereka. Pada akhirnya, Matori, Alwi/Saifullah, dan Muhaimim tidak berhenti untuk mencari keadilan melalui berbagai cara yang dipandang mungkin.

Tidak adanya CRM juga membuat partai tidak memiliki forum dan mekanisme standar untuk menangani potensi konflik dan konflik itu sendiri. Ketiadaan tersebut belakangan memberikan peluang bagi elite untuk dapat bersikap tidak konsisten atau bahkan memanipulasi aturan main dalam merespons potensi konflik, dengan membentuk berbagai forum-forum untuk membenarkan apa yang dilakukannya. Kadang-kadang forum ini dibentuk secara tiba-tiba, didasarkan semata pada saran sejumlah orang atau tokoh berpengaruh seperti Gus Dur.

Pembentukan forum itu sendiri kerap ditujukan sebagai media untuk mengukuhkan keputusan yang telah secara sepihak dibuat, ketimbang sebagai sebuah forum dialog yang jernih dan sehat. Kenyataannya, tidak ada diskusi yang memadai dalam forum-forum itu. Dalam kasus Alwi Shihab-Saifullah Yusuf, misalnya, partai membahas dan memutuskan masa depan mereka di rapat pleno tanpa kehadiran orang-orang tersebut. Di kasus Muhaimin, partai secara cepat menyelenggarakan forum terbatas dan tidak terjadwal untuk membahas isu berkenaan dengan dirinya. Hasil forum terbatas ini kemudian menjadi keputusan resmi partai. Matori bahkan mengalami nasib yang lebih tragis karena tidak ada forum diskusi sama sekali. Gus Dur dan pendukungnya memecat Matori secara instan dan sepihak di istana negara, ketika pada waktu yang bersamaan Matori tengah menghadiri SI MPR tahun 2001. Dalam perkembangannya, forum-forum yang digunakan secara serampangan untuk menyelesaikan konflik itu tidak hanya melahirkan kebijakan-kebijakan kontroversial, tetapi juga menjadi salah satu sumber masalah yang terus dipertanyakan oleh kader-kader yang telah diperlakukan secara tidak adil.

Sementara itu, sebagai pihak yang diharapkan dapat membantu, Dewan Syura dan DPP pada umumnya sering kali tidak meres-

pons secara wajar perkembangan konflik yang ada itu. DPP kerap melakukan sikap defensif dengan memberikan respons seadanya tanpa argumen dan penjelasan yang seimbang dan komprehensif atas keberatan terhadap sebuah keputusan kontroversial atau atas berkembangnya sebuah potensi konflik. Di beberapa kasus penting termasuk kasus pemecatan Matori, Alwi/Saifullah, dan Muhaimin, DPP hanya menyatakan keputusan itu sudah sesuai dengan AD/ART partai dan disetujui mayoritas peserta rapat melalui medium legal dan oleh karena itu tidak dapat disanggah.[27]

Berbagai kondisi di atas diperburuk dengan adanya semacam sikap *prejudice* dalam melihat persoalan dengan menganggap mereka yang menyampaikan kritik atau keberatan sebagai inferior, minoritas, atau pinggiran. Beberapa pernyataan Gus Dur secara implisit menggambarkan situasi ini dengan mengatakan bahwa dirinya dan kelompoknya adalah 'polisi', sedangkan yang melakukan kritik atau oposisi terhadap dirinya adalah 'maling',[28] pengkhianat,[29] atau pembohong.[30] Tidak ada alasan polisi dapat bernegosiasi dengan penjahat. Karena persepsi semacam inilah negosiasi menjadi sesuatu yang sulit dilakukan. Tidak itu saja, dengan sikap ini, Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syura cenderung mengecilkan eksistensi mereka yang dianggap berbeda atau kritis. DPP tidak menganggap mereka sebagai mitra atau teman yang pantas diperlakukan dengan baik, tetapi sebagai rival atau bahkan musuh. Dengan kata lain, partai cenderung mengabaikan suara kritis, dan tidak melihatnya sebagai sesuatu yang pantas untuk diperhatikan dengan semestinya. Di sini

---

[27] Tentang Shihab dan Saifullah lihat pernyataan yang dibuat Muhaimin Iskandar di "Sepucuk Somasi Menjelang Muktamar PKB", *Koran Tempo*, 12 April 2005; Helmy Faisal Zaini yang mewakili kepengurusan Muktamar PKB-Gus Dur di "Konflik PKB Kian Terbuka", *Kompas*, 28 Maret 2005; Prof. Mahfud M.D., Ketua Dewan Tanfidz, di "Sepucuk Somasi Menjelang Muktamar PKB", *Koran Tempo*, 12 April 2005.

[28] Wawancara dengan Zannuba Ariffah "Yenny" Wahid, Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz PKB Gus Dur (2008–2010), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

[29] Kamarudin, *Konflik Internal PKB*, 103.

[30] *Ibid.*, 174.

terlihat tidak adanya CRM yang memadai untuk menghilangkan objektivitas dan sikap menghargai dalam melihat perbedaan yang ada, sedangkan hal yang dipertimbangkan adalah siapa yang mengatakan dan bukan apa yang dikatakan.

Dengan kondisi seperti ini, cukup sulit mengharapkan pihak-pihak yang berseberangan akan dengan mudah mendapatkan haknya. Akibatnya memang kerap terjadi bahwa pembuatan kebijakan yang menentukan nasib seseorang pun cenderung tidak menaruh perhatian bahkan mengabaikan aspek-aspek keadilan komprehensif. Sebaliknya, bagi yang berkeberatan, mereka akan benar-benar disingkirkan tanpa harus mendapat pertimbangan-pertimbangan selanjutnya yang memungkinkan mereka direhabilitasi.

Menurut Kamarudin, dalam hal ini dapat dipahami apabila banyak tokoh penting di partai yang aspirasinya diabaikan begitu saja menjadi sangat kecewa.[31] Mereka berupaya membuktikan pernyataan secara baik-baik, tetapi partai tidak memberikan respons positif. Kamarudin menyatakan dapat memahami apabila orang seperti Alwi Shihab yang memiliki perhatian mendalam untuk memodernisasi partai, menjadi sangat marah dengan partainya karena dia melihat partai dikelola secara gegabah tanpa mempertimbangkan pihak lain. Kamarudin mengatakan kemudian:

> Jadi, kekesalan dan kegeraman seorang Alwi Shihab itu bisa dipahami karena dia melihat *loh kok* ini sepertinya seenaknya sendiri saja. Ini kan sebuah lembaga atau partai politik dengan massa banyak yang katanya ingin menjadi partai modern, namun dikelola seperti ini.[32]

Kondisi inilah yang menyebabkan munculnya akumulasi kekecewan dan membesarnya potensi konflik. Situasi di mana kader

---

[31] Wawancara dengan Dr. Kamarudin, Pakar Partai Politik Islam, Dosen Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, di Depok, 7 Oktober 2010.

[32] Wawancara dengan Dr. Kamarudin, Pakar Partai Politik Islam, Dosen Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, di Depok, 7 Oktober 2010.

tidak dapat dengan mudah menyalurkan kekecewaan dan aspirasinya khususnya tentang keadilan dikeluhkan Khofifah Parawansa,[33] dengan mengatakan situasi ini karena tidak adanya saluran konflik atau 'kanalisasi konflik' yang merupakan ruang yang memadai untuk pengelolaan konflik rasional yang di dalamnya setiap pihak memiliki hak yang sama di dalam partai.[34] Situasi ini pada akhirnya memicu banyak kader, seperti diprediksikan oleh Hirschman, yang meninggalkan partai.

2. Kesulitan untuk Melokalisasi Konflik

Masalah lain yang merupakan akibat dari absennya CRM adalah ketidakmampuan untuk melokalisasi konflik. Adanya CRM sebenarnya mampu menumbuhkan kemampuan partai untuk melokalisasi sebuah potensi konflik agar tidak menjalar ke mana-mana. Namun, tidak adanya badan otoritatif yang efektif menyebabkan banyak kader dapat membangun opini dan akhirnya dukungan. Artinya, ketiadaan CRM menyebabkan terjadinya semacam 'penyebaran otoritas', di mana terbuka peluang bagi siapapun untuk tidak saja bebas melakukan penafsiran aturan main, namun juga pada akhirnya memutuskan dan menjalankan apa yang dianggapnya benar, baik dalam soal mengelola maupun mengakhiri konflik. Dalam hal ini, suatu yang lazim apabila kader yang tidak puas kemudian berupaya melegitimasi keyakinannya dan menyebarkan keyakinan itu secara masif.

Setelah sebuah penafsiran bertumbukan, yang dalam kasus PKB benang merahnya adalah antara mereka yang mengedepankan hak-

---

[33] Wawancara dengan Khofifah Indar Parawansa, Menteri Negara Pemberdayaa Perempuan (1999–2001), Ketua Badan Pelaksana Pemenangan Pemilu PKB (2002–2005), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

[34] Wawancara dengan Khofifah Indar Parawansa, Menteri Negara Pemberdayaa Perempuan (1999–2001), Ketua Badan Pelaksana Pemenangan Pemilu PKB (2002–2005), di Jakarta, 20 Oktober 2010; dengan Dr. Kamarudin, Pakar Partai Politik Islam, Dosen Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, di Depok, 7 Oktober 2010.

hak istimewa Ketua Umum Dewan Syura[35] mereka yang tegas pada aturan main,[36] kelompok-kelompok yang bertikai akan mencari cara agar pandangannya dapat dibenarkan dan mendapat dukungan. Setiap kelompok akhirnya mengembangkan sendiri apa yang dianggapnya benar dan perlu dilakukan. Akibatnya, masing-masing pihak yang berkonflik tidak hanya memiliki pemahaman dan penafsirannya sendiri tentang satu masalah, melainkan juga terlibat dalam soal memecahkan masalah berdasarkan kepentingannya.

Meskipun otoritas seperti itu secara normatif menyempit pada badan-badan formal partai terutama Dewan Syura, rapat gabungan ataupun musyawarah, termasuk MLB, namun sekali lagi mengingat tidak diberikannya sebuah legitimasi konstitusional kepada pihak manapun dalam partai, peran badan-badan itu sendiri tidak berdiri kokoh dalam menjawab soal-soal itu. Di sinilah timbul peluang bagi setiap kelompok atau individu tertentu untuk memainkan peran dalam penyelesaian konflik berdasarkan pandangannya sendiri. Berbagai pihak dalam partai, terutama jajaran pimpinan, merasa berhak untuk menafsirkan posisi dan keberpihakannya manakala memiliki urusan dalam konflik. Keputusan yang diambil pun pada akhirnya menjadi personal karena tidak diputuskan oleh lembaga yang berwenang.

Perkembangan berikutnya yang terjadi adalah karena tidak adanya otoritas yang memiliki hak untuk mengontrol. Setiap kelompok yang berkonflik menganggap mereka tidak hanya berhak untuk menafsirkan, tetapi juga berhak untuk menyampaikan penafsiran itu ke seluruh anggota partai. Setiap kelompok hendak memperluas eksistensinya hingga pada level bersikeras untuk membentuk pengu-

---

[35] Pendapat ini biasanya lazim bagi pendukung Wahid setelah proses pemecatan Ketua Dewan Tanfidz. Choirie, *PKB Politik Jalan Tengah NU: Eksperimentasi Pemikiran Islam Inklusif dan Gerakan Kebangsaan Pasca Kembali ke Khitah 1926*, 297.

[36] Lihat misalnya pendapat Mahrus Ali dan M.F. Nurhuda Y. (eds.), *Pergulatan Membela yang Benar: Biografi Matori Abdul Djalil*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), 270. DPW PKB Jawa Timur, *Data dan Fakta Pelanggaran AD/ART di Muktamar II Semarang*, 5.

rus di seluruh wilayah agar dapat mempertahankan kepentingannya. Dalam hal ini, setiap kelompok mengungkapkan berbagai isu untuk mendiskreditkan lawannya dan membangun pandangannya sendiri.

Kalangan yang dirugikan akan mengangkat persoalan mengenai cara penanganan yang sewenang-wenang dan tidak pula dicarikan jalan keluar yang rasional. Muncul kemudian wacana bahwa partai tidak lagi bekerja demi kebaikan bersama, namun demi kebaikan kelompok tertentu saja. Kelompok non-Wahid, misalnya, acapkali menyampaikan informasi tentang penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Tidak itu saja, kalangan ini juga memunculkan isu tentang adanya kelompok *inner circle* yang disebut pembisik. Setiap pemimpin partai yang dipecat, yaitu Matori, Alwi, dan Muhaimim memiliki versi sendiri tentang pembisik. Mereka menyatakan orang yang berbeda sebagai pembisik,[37] tetapi mereka menggunakan isu ini sebagai salah satu poin untuk memengaruhi orang lain. Mereka menyerang pembisik sebagai kelompok eksklusif yang memberikan informasi palsu dan sudah dimanipulasi kepada pimpinan, dan berujung pada pembuatan banyak kebijakan yang tidak adil dan salah.[38]

---

[37] Bagi Matori, sosok seperti Alwi Shihab dan Z. Arifin Junaidi adalah para pembisik. Untuk pendapat Matori tentang keberadaan kelompok pembisik ini, lihat misalnya, Ali dan Nurhuda Y. (eds.), *Pergulatan Membela yang Benar: Biografi Matori Abdul Djalil*, 279, 287. Kelompok Alwi menganggap Effendy Choirie dan Muhaimin Iskandar sebagai pembisik di balik sikap negatif Gus Dur terhadap para ulama yang pro-Shihab. Lihat DPW PKB Jawa Timur, *Data dan Fakta Pelanggaran AD/ART di Muktamar II 'Semarang*, 5–6. Sebaliknya, bagi Muhaimin, ada 10 orang 'pembisik' termasuk Zannuba Wahid (anak perempuan Wahid), Sigid Haryo Wibisono (anggota Dewan Syura), Artalita Suryani (bendahara umum), Aris Junaidi (Bendahara), Hermawi Taslim (anggota Dewan Tanfidz), Ikhsan Abdullah (wakil sekretaris jenderal), dan Moeslim Abdurrahman (anggota DPP). Lihat: *http://www.inilah.com/berita/politik/2008/04/05/21476/investigasi-pkb-tunjuk-10-nama/*

[38] "Investigasi PKB Tunjuk 10 Nama", *http://www.inilah.com/berita/politik/2008/04/05/21476/investigasi-pkb-tunjuk-10-nama/*. PKB Muhaimin juga menyebut orang-orang ini sebagai "orang luar" yang menginfiltrasi partai melalui mekanisme inkonstitusional lihat "Laporan Pertanggungawaban Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa 2005–2008. Menyelamatkan Partai dan Konsolidasi Politik Menjelang 2009 dalam Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa", *Laporan Lengkap Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa*, Hotel Mercure Ancol, Jakarta 2–4 May 2008. Wawancara

Di lain pihak, DPP atau kelompok Gus Dur kerap mengangkat isu tentang keharusan menyingkirkan unsur-unsur partai yang tidak dapat lagi dipercaya, yang kerap menggunakan kekuatan eksternal untuk merusak partai dari dalam.[39] Akibatnya, perang wacana untuk memperburuk citra lawan menjadi biasa terjadi di PKB selama dekade pertama keberadaannya. Karena tidak adanya badan arbitrase, aktivitas kampanye hitam ini terus-menerus berlangsung dan pada akhirnya membuat kader memiliki penafsiran sendiri dan memberikan dukungan ke salah satu dari dua kelompok yang berkonflik.[40]

Karena intensitas persaingan yang cenderung semakin meninggi, pada akhirnya, perpecahan di antara elite dan kader tidak dapat dihindari dan menyebar hingga tingkat lokal. Di tingkat lokal, setiap kelompok mampu membuat jaringan kepengurusan tidak lama setelah kebijakan kontroversial dibuat DPP. Sekitar satu pekan setelah pemecatan, misalnya, ada setidaknya 15 Ketua DPW yang kemudian mendirikan "Kaukus 15" untuk membela penolakan Muhaimin atas putusan DPP.[41] Mereka juga mendukung Muhaimin mengambil tindakan yang perlu demi menyelamatkan partai dari instabilitas sebagai akibat munculnya pemecatan dan pembekuan yang tidak adil yang dilakukan kelompok Gus Dur di banyak daerah. Di lain pihak, 32 DPW yang diwakili oleh para jajaran pimpinannya mendeklarasikan dukungan mereka terhadap pemecatan Muhaimin.[42] Keterlibatan

---

dengan Andi M. Ramly, Ketua Dewan Tanfidz (2002–2010), Sekretaris Dewan Syura PKB-Muhaimin (2008–2010) dan penulis *"Mabda' Siyasi PKB"*, di Jakarta, 15 Oktober 2010.

[39] Wawancara dengan Zannuba Ariffah "Yenny" Wahid, Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz PKB-Gus Dur (2008–2010), di Jakarta, 20 Oktober 2010. Lihat juga misalnya, Pendapat Gus Dur tentang posisi Presiden Yudhoyono sebagai "bos" Alwi Shihab, *Dokumentasi Hasil Muktamar II Partai Kebangkitan Bangsa, Semarang,* 16–19 April (Jakarta: DPP PKB, 2005), 14. Wawancara dengan Muamir M. Syam, Ketua PKB (2005–2010), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

[40] Wawancara dengan Anas Nashikin, Sekretaris Jenderal Garda Bangsa, salah satu *onderbouw* PKB, di Jakarta, 26 Oktober 2010.

[41] "Konflik PKB Diyakini Tidak Akan Pengaruhi Konstituen", *Kompas*, 2 April 2008.

[42] "Ali Masykur Pelaksana Tugas Ketum", *Kompas*, 6 April 2008.

anggota PKB di tingkat lokal menunjukkan ketidakmampuan partai untuk membatasi dan melokalisasi potensi konflik dan konflik itu sendiri. Konflik pun menjadi meluas ke mana-mana.

C. Dampak: Berkembangnya Perpecahan

Dari situasi di atas dapat dipahami bahwa jika potensi konflik yang tidak tersalurkan terjadi dan menjadi tidak tertanggulangi secara sistemik, hal tersebut cenderung menimbulkan dampak lanjutan yakni pengubuan. Situasi ini merupakan lahan terciptanya perpecahan yang dimulai dengan adanya fenomena penguatan pengubuan.

1. Penguatan Faksi

Berlarut-larutnya penyelesaian dan adanya perluasan dukungan dan eskalasi konflik menyebabkan kubu-kubu itu pun mengalami penguatan dan bukan sebaliknya. Jika di awal konflik pengubuan hanya melibatkan segelintir orang dalam sebuah kelompok atau faksi-faksi tertentu di level pusat, menjelang perpecahan, kekuatan-kekuatan kecil itu telah menjelma menjadi sebuah kelompok besar yang pendukungnya eksis hampir di seluruh tanah air. Pengubuan itu sendiri merupakan formalisasi dari sebentuk sudut pandang yang berbeda dalam menghadapi sebuah persoalan kontroversial.

Pengubuan ini kemudian tidak ditujukan untuk sekadar mempertahankan eksistensi saja, namun menghancurkan pihak lawan. Masing-masing pihak yang bertikai merasa bahwa kelompoknya adalah kekuatan alternatif yang sah berdasarkan sebuah idealisme yang ingin dikembangkan, yang diyakini hanya akan terwujud jika pihak lawan dapat disingkirkan. Untuk tujuan itu, masing-masing kelompok berupaya membangun kelompoknya menjadi sebuah institusi yang solid dan masif. Pendekatan dan manuver yang kemudian dilakukan layaknya sebuah persaingan memperebutkan kemenangan dalam pemilu. Masing-masing pihak mendekati seluruh cabang dan melakukan konsolidasi. Mereka juga membentuk banyak pengurus baru dan merekrut kader baru dalam wilayah yang kuat dari lawan-

nya.[43] Selain itu, untuk memastikan kelompok itu steril dari lawan, setiap kelompok tidak ragu memecat kader yang bertentangan. Fenomena pemecatan menjadi sangat lazim pada level ini.[44]

Dari situasi di atas dapat dilihat bahwa setelah masing-masing faksi terbentuk, prioritas pertama adalah membentuk kepengurusan selengkap mungkin agar terlihat adanya dukungan yang diberikan kepada kelompoknya. Khofifah melihat bahwa dalam situasi semacam ini, semangat kebersamaan telah semakin menipis. Dia melihat bahwa masing-masing pihak merasa penting untuk berada di depan sebagai pemimpin, dengan mengorbankan semangat kolektif.[45]

Langkah berikutnya setelah sebuah faksi secara informal berdiri adalah menyelenggarakan muktamar atau MLB untuk melegitimasi dan memperkuat keberadaannya. Muktamar/MLB sepintas tampak menjadi solusi bagi pertikaian yang ada di antara mereka. Namun, sejatinya, 'solusi' yang diharapkan itu akan terlihat jauh dari makna rekonsiliasi. Segera terlihat bahwa muktamar yang digelar oleh masing-masing kubu ditujukan bukan untuk mencarikan jalan keluar agar kepentingan masing-masing pihak dapat terakomodasi, melainkan sekadar memantapkan kubu yang sudah mereka bangun. Akibatnya, kepentingan untuk mencari rekonsiliasi bukan agenda utama muktamar. Walaupun setiap kelompok mengundang kelompok lawan untuk menghadiri muktamar, hal ini hanyalah hiasan bibir

---

[43] Wawancara dengan Ahmad Shodiq Noor, Sekretaris Jenderal DPW PKB DKI Jakarta, di Jakarta, 3 November 2010; dengan Marinah Hardy, Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Provinsi Nusa Tenggara Barat (2002–2005), di Jakarta, 28 Oktober 2010; dengan K.H. Damanhuri, Ketua Dewan Syura DPD PKB Kota madya Depok (2002–2004), Anggota DPRD Kota madya Depok (2004–2009), di Depok, 31 Oktober 2010.

[44] Wawancara dengan Choirul Anam, Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Provinsi Jawa Timur (1998–2005) dan Ketua Dewan Tanfidz PKB-Alwi (2005–2007), di Jakarta, 13 Oktober 2010; dengan Anas Nashikin, Sekretaris Jenderal Garda Bangsa, salah satu *onderbouw* PKB, di Jakarta, 26 Oktober 2010; dengan Muamir M. Syam, Ketua PKB (2005–2010), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

[45] Wawancara dengan Khofifah Indar Parawansa, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999–2001), Ketua Badan Pelaksana Pemenangan Pemilu PKB (2002–2005), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

semata. Semangat ajakan ini tidak lain adalah untuk mendapatkan pengakuan dari pihak lawan dan melegitimasi eksistensi diri.

Agenda dan arah muktamar pun telah dibentuk oleh panitia agar dapat secara efektif membahas agenda-agenda eksklusif kelompok, terutama melegalisasi pimpinan partai dan keberadaan mereka. Muktamar 2005 di Semarang, misalnya, memperlihatkan bagaimana kelompok pro-Gus Dur, sebagai panitia, memanipulasi agenda dan kondisi muktamar agar dapat menjadi medium untuk melegalisasi kepemimpinan Gus Dur dan Muhaimin meskipun beberapa eksponen dari kelompok lawan juga hadir.[46] Untuk menyukseskan kepentingannya, banyak kader dari pihak lawan termasuk Alwi sendiri tersingkir atau tidak dapat hadir dalam forum tersebut. Di forum ini juga, hak konstitusional DPW Jawa Timur dan DPW Jawa Tengah yang diketahui sebagai sekutu kuat Alwi untuk mendapat hak suara tambahan dihapuskan. Bahkan mereka disingkirkan agar dapat mengurangi peluang kandidat lawan untuk menang dalam forum tersebut. Manuver semacam ini memicu kemarahan dan kekecewaan kelompok Alwi Shihab yang kemudian bertekad membuat Muktamar tandingan.

Di lain pihak, Muktamar Surabaya tahun 2005 yang diselenggarakan kubu Alwi sebagai alternatif dari Muktamar Semarang tahun 2005 juga melakukan hal yang serupa. Muktamar ini hanya dihadiri oleh pendukung Alwi. Mereka hadir dengan semangat untuk menentang keberadaan PKB-Gus Dur/Muhaimin dan meresmikan kepengurusan PKB-Alwi. Situasi yang sama juga terjadi pada Muktamar PKB-Matori pada tahun 2002, yang diselenggarakan oleh para pendukung Matori untuk melegalisasi kepemimpinannya dan secara sepihak memecat Gus Dur.[47] Pada muktamar itu, Matori mengkritisi situasi internal PKB yang penuh dengan nuansa oligarki. Untuk itu,

---

[46] DPW PKB Jawa Timur, *Data dan Fakta Pelanggaran AD/ART di Muktamar II Semarang*, 7–10.

[47] Abdul Khaliq Ahmad, "Pergumulan Politik Sang Pemberani", dalam Ali dan Nurhuda Y. (ed.), *Pergulatan Membela yang Benar: Biografi Matori Abdul Djalil*, 393–394.

dia menegaskan urgensi untuk melahirkan kepemimpinan demokratis di PKB sebagai antitesis atas kecenderungan kepemimpinan oligarki di PKB sebelumnya.[48]

Situasi serupa juga terjadi di MLB-Parung tahun 2008 yang diselenggarakan PKB-Gus Dur. Agenda utama muktamar ini hanyalah mengukuhkan posisi Gus Dur dan melegalisasi pemecatan Muhaimin. Oleh karena itu, para peserta tidak memberikan ruang sedikit pun untuk rekonsiliasi dan menganggap MLB ini satu-satunya forum yang sah dalam mengambil keputusan strategis PKB.

Uniknya, situasi serupa juga terjadi di MLB-Ancol tahun 2008. Forum ini dihadiri hanya oleh pendukung Muhaimin dan dimaksudkan sebagai medium untuk mengukuhkan kedudukan Muhaimin sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz yang sah sekaligus sebagai forum yang melegalkan eksistensi PKB-Muhaimin. Secara aklamasi, peserta menolak Laporan Pertanggungjawaban Lima Tahun Ketua Umum Dewan Syura,[49] walaupun Gus Dur sebagai pimpinan Dewan Syura dan hampir seluruh anggota Dewan Syura[50] tidak menghadiri MLB ini. Penolakan laporan itu menandai kepentingan kubu ini untuk menyingkirkan Gus Dur dari posisinya.

Hal yang menarik tentang MLB ini adalah walaupun semangat forum ini adalah menentang seluruh keputusan penting yang dibuat Gus Dur termasuk pemecatan Muhaimin, MLB memutuskan

---

[48] Lihat *Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa*, dipaparkan dalam Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa, Jakarta, Hotel Borobudur, 14–16 Januari 2002. Lihat juga *Ibid.*, 281.

[49] Putusan No. 5/MLB/PKB/V/2008 tentang Penolakan Laporan Pertangungjawaban Ketua Umum Dewan Syura PKB Periode 2005–2010.

[50] Di antara 24 anggota Dewan Syura, hanya Prof. Dr. Cecep Syarifudin yang mengakui hadir di MLB-Ancol. Pengakuan itu pun dianggap Zannuba Wahid sebagai kebohongan. Wawancara dengan Zannuba Ariffah "Yenny" Wahid, Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz PKB-Gus Dur (2008–2010), di Jakarta, 20 Oktober 2010

membuat tim konsultasi[51] yang terdiri dari tujuh ulama,[52] agar dapat bertemu dengan Gus Dur di Kantor Pusat PBNU pada 3 Mei 2008 untuk menawarkan jalan damai dalam penyelesaian perselisihan.[53] Seperti diperkirakan sebelumnya, Gus Dur menolak tawaran tersebut.

Situasi ini menunjukkan bahwa dalam satu dekade keberadaan PKB, kebanyakan muktamar dan MLB berperan sebagai forum eksklusif untuk memuluskan agenda sepihak satu kelompok, yang kadang-kadang memanipulasi proses yang dibuat dan menghindari upaya untuk mencari resolusi konflik. Dengan kata lain, muktamar atau MLB adalah benteng terakhir proses panjang satu kelompok untuk membangun eksistensinya dan menyingkirkan pihak lawan secara resmi. Dapat dipahami kemudian jika spirit melegalkan sebuah kelompok menjadi suatu hal yang memotivasi setiap kelompok untuk melakukan muktamar atau MLB dan bukan rekonsiliasi. Sayangnya, karena AD/ART partai tidak secara jelas mengatur masalah ini, tidak ada satu institusi pun yang dapat secara legal menghentikan setiap kelompok untuk mengadakan muktamar atau MLB. Kegagalan membangun CRM untuk berperan sebagai media penyelesaian resolusi konflik menyebabkan muktamar atau MLB menjelma menjadi perangkat politik untuk mengubur lawan sekaligus mengukuhkan eksistensi kelompok.

2. Hilangnya Dialog Konstruktif: Afirmasi Perpecahan

Dampak berikutnya setelah penguatan faksionalisasi adalah dialog konstruktif yang hilang. Sebelum Muktamar atau MLB, sebagian

[51] Putusan No. 3/MLB/PKB/V/2008 tentang Tim Utusan Muktamar Luar Biasa untuk Penyelesaian Perselisihan Politik PKB melalui Musyawarah.

[52] Ketujuh ulama itu adalah Abdul Azis Mansyur, Syakir Chubaib, Abdussalam Mujib, Muqorrobin, Lukman Hakim, Mas Yazid Bustomi, dan Nidzom Tolhah.

[53] Lihat "Berita Acara tentang Upaya Penyelesaian Perselisihan Politik Partai Kebangkitan Bangsa oleh Tim Utusan Muktamar Luar Biasa untuk Upaya Penyelesaian Perselisihan Politik PKB melalui Mekanisme Musyawarah", di Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, *Laporan Lengkap Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa*, Hotel Mercure Ancol, Jakarta 2–4 Mei 2008.

kalangan kerap masih menyuarakan dan mendorong setiap kelompok yang berkonflik untuk melakukan rekonsiliasi.[54] Mereka tetap berharap bahwa akan ada dialog yang konstruktif di antara pihak-pihak yang bertikai. Sebenarnya setelah Muktamar atau MLB pun, tetap ada sejumlah pihak yang masih menyuarakan rekonsiliasi.[55] Orang-orang seperti Andi M. Ramly Sunrawa, mantan Ketua Dewan Tanfidz PKB-Gus Dur dan penulis Mabda' Siyasi, misalnya, mendorong seluruh anggota PKB untuk melakukan rekonsiliasi memecahkan masalah ini. Setelah Muktamar Semarang tahun 2005, misalnya, dia menyatakan bahwa setiap kelompok harus sabar dan memajukan kepentingan partai sebagai prioritas utama agar dapat memecahkan situasi ini.

Akan tetapi, banyak pihak segera menyadari bahwa harapan ini tidak dapat diwujudkan. Setelah Muktamar atau MLB, suasana konfrontasi cenderung meningkat. Proses untuk mempertemukan pihak-pihak yang terkait pun menjadi semakin tidak mudah, bahkan nyaris tidak mungkin. Masing-masing yang bertikai cenderung merasa paling berhak mengundang pihak lain dalam forum yang dibuatnya, dengan mengatasnamakan sebagai pihak yang sah. Setiap pihak juga cenderung mengabaikan undangan pihak lawan, kerap dengan sembari mempertanyakan atau mengkritisi masalah legalitas undangan itu, termasuk status hukum forum yang digunakan, agenda pembahasan, atau posisi legal pihak inisiator.

Matori, misalnya, menganggap dirinya tidak berkewajiban memenuhi undangan kelompok Gus Dur untuk membahas posisinya di

---

[54] Yusuf Hasim, salah satu tokoh senior NU yang juga anak Hasyim Asyhari, salah satu pendiri NU, misalnya, menyatakan keharusan *islah* sekitar tiga pekan sebelum Muktamar tahun 2005. "Pak Ud Sarankan DPP PKB Islah dengan Shihab", *Media Indonesia*, 28 Maret 2005. "Jateng Minta Posisi Shihab Dikembalikan", *Republika*, 22 Maret 2005. Semangat serupa juga dinyatakan Khofifah Indar Parawansa yang menyarankan setiap kelompok yang berkonflik untuk melakukan pertemuan dalam suasana kekeluargaan dan salah satu tokoh ulama sebagai mediator. "Persoalan Internal PKB Sebaiknya Libatkan Kiai", *Media Indonesia*, 29 Maret 2005.

[55] "Kubu yang Tak Puas Dianjurkan Islah", *Republika*, 23 April 2005.

partai. Karena bagi Matori, dirinyalah pemimpin yang sah, yang sudah seharusnya menyelenggarakan forum untuk memutuskan berbagai masalah, termasuk masalah kepemimpinan partai.[56] Dengan cara berpikir yang tidak jauh berbeda, kelompok Alwi, Muhaimin, dan Gus Dur sendiri, juga melakukan hal yang sama. Di samping itu, setiap kelompok yang berkonflik juga merasa ragu atas motivasi atau niat di balik undangan pihak lawannya. Para pendukung Matori menganggap tidak ada gunanya menghadiri rapat yang diselenggarakan pihak lawan karena bisa jadi Gus Dur dan pendukungnya akan menggunakan forum rapat itu sebagai ajang peradilan sepihak.[57] Tampak di sini Matori telah hilang kepercayaan pada berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dianggapnya mendukung Gus Dur. Fenomena semacam ini, sekali lagi juga terjadi dengan Alwi, Muhaimin, dan Gus Dur.

Dalam perkembangannya, setiap kelompok secara canggung kerap menyuarakan islah dengan menegaskan kemungkinan membuka peluang dialog. Namun, pernyataan-pernyataan ini dan semacamnya tidak pernah memiliki konsekuensi apa pun karena syarat-syarat yang sulit untuk dipenuhi agar islah itu dapat terlaksana. Kenyataannya, isyarat untuk islah selalu diikuti dengan tawaran persyaratan yang sulit dipenuhi. Pada umumnya tidak pernah ada kesungguhan untuk mengadakan islah karena pada dasarnya tidak ada keinginan untuk membangun rekonsiliasi di mana setiap pihak rela untuk mengorbankan tuntutannya demi kepentingan bersama.

Pada kasus Matori, Gus Dur menyaratkan tiga hal agar islah dapat terjadi, yakni mengakui PKB-Alwi, membubarkan PKB-Matori, dan tidak meminta jabatan apa pun manakala setuju berada dalam PKB-Alwi.[58] Syarat-syarat islah sedemikian tentu saja sulit untuk di-

---

[56] Wawancara dengan Abdul Khalik Ahmad, Sekretaris Fraksi PKB DPR RI (1999–2001) dan Sekretaris Jenderal PKB-Jalil (2000–2005), di Jakarta, 11 Oktober 2010.

[57] Wawancara dengan Abdul Khalik Ahmad, Sekretaris Fraksi PKB DPR RI (1999–2001) dan Sekretaris Jenderal PKB-Jalil (2000–2005), di Jakarta, 11 Oktober 2010.

[58] "Tiga syarat Abdurrahman Wahid untuk Berdamai dengan Jalil", *Kompas*, 21 *Juni* 2002.

wujudkan oleh kubu Matori. Di lain pihak, Matori dan kelompoknya menegaskan pendirian awalnya bahwa islah hanya dapat diwujudkan apabila kelompok Gus Dur bersedia mengakui kepemimpinan Matori dan membubarkan keberadaan kelompok Gus Dur.[59] Dengan situasi seperti itu, beberapa pertemuan informal yang mereka lakukan, termasuk di Singapura,[60] tidak membawa banyak hasil.

Sementara itu, upaya islah juga dilakukan oleh ulama pendukung Alwi terhadap Gus Dur. Upaya untuk menggandeng ulama sepuh dalam menyelesaikan persoalan ini juga telah diupayakan terutama oleh kubu Alwi. Pada awalnya upaya tersebut terlihat menjanjikan dan tampak akan membawa hasil dengan dilangsungkannya pertemuan antara Gus Dur dan perwakilan Kiai Langitan yang membela Alwi dan Saifullah.[61] Namun, hasil pertemuan itu ternyata tidak diindahkan oleh Gus Dur, yang kemudian menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan ulama.

Setelah itu, tidak satu pun pertemuan pernah dilakukan lagi. Hubungan yang dilakukan hanya sebatas imbauan kepada DPP oleh Kiai Langitan, namun upaya itu juga tidak mendapat respons yang layak. Gus Dur bahkan mengambil manuver yang lebih progresif dengan membentuk forum Majelis Silaturahmi Ulama Rakyat (Masura) untuk menunjukkan posisi kritis terhadap ulama-ulama *khos,* yang menurutnya didorong oleh kepentingan elite politik tertentu daripada murni para ulama sendiri.[62]

---

[59] Wawancara dengan Abdul Khalik Ahmad, Sekretaris Fraksi PKB DPR RI (1999–2001) dan Sekretaris Jenderal PKB-Jalil (2000–2005), di Jakarta, 11 Oktober 2010.

[60] "Wahid dan Jalil Bertemu di Singapura", *Kompas*, 25 Agustus 2002.

[61] "Gus Dur Enggak Mau Mendengar", *Tempo*, 2 Oktober 2005.

[62] Tentang informasi latar belakang pendirian dan aktivitas Masura lihat missalnya "Tujuh Ribu Kiai Kampung Ngaji bersama Wahid", *newsletter www.dpp-pkb.org*, edisi pertama, Maret 2007, 8–9. "Wahid: Kiai Harus Senantiasa Bersama Rakyat", *newsletter www.dpppkb.org*, edisi pertama, Maret 2007, 8–9. "Masura Jawa Timur. Kiai Kampung Padati Masjid Sunan Ampel", *newsletter www.dpp-pkb.org*, edisi kedua, Mei 2007, 5. "Masura Jawa Tengah. Kaum Muslimin Harus Juga Mengetahui Makna Al-Qur'an", *newsletter www.dpp-pkb.org*, edisi kedua, Mei 2007, 5.

Hal yang menarik adalah setelah PKB hasil MLB-Surabaya terbentuk, giliran para Kiai *Khos* yang menghindari beberapa pertemuan yang diupayakan oleh pihak Gus Dur.[63] Abdullah Faqih, misalnya, menolak undangan untuk mempertemukan dirinya dan Gus Dur guna membahas kemungkinan islah. Bahkan dia menolak menemui Gus Dur, saat Gus Dur berupaya mengunjunginya di rumah sakit.[64] Belakangan, kelompok Kiai Langitan dalam kapasitas sebagai pendukung Alwi juga membuat persyaratan islah, yang pada dasarnya sukar untuk dilakukan oleh kelompok Gus Dur. Sebagaimana yang disampaikan oleh K.H. Abdurrahman Chudlori, Ketua Dewan Syura PKB-Surabaya, islah mungkin dilakukan jika pihak Gus Dur memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya mengakui kekalahannya dalam proses hukum, dan Gus Dur harus mengikuti keputusan-keputusan PKB hasil Muktamar Surabaya.[65]

Selepas pertarungan Gus Dur dengan para ulama sepuh, yang berujung pada penarikan diri para ulama atas segala sesuatu yang terkait dengan Gus Dur, tidak ada lagi ulama terpandang yang dapat menjadi acuan apalagi dihomati oleh Gus Dur. Meskipun beberapa sesepuh partai, seperti K.H. Mustofa Bisri (Gus Mus) dan K.H. Muchit Muzadi menunjukkan rasa keprihatinannya, mereka bukanlah pihak yang didengar Gus Dur secara sungguh-sungguh dalam soal-soal politik dan apalagi konflik.

Pada kasus Muhaimin, ulama tidak banyak berperan. Hanya sebagian kecil ulama yang masih terlibat yang diutus untuk menemui Gus Dur membahas kemungkinan islah, yang kemudian ditolak. Dalam kasus Muhaimin, sikap Gus Dur semakin keras. Gus Dur dan kelompoknya menutup rapat-rapat islah dengan mengatakan Muhaimin sebagai maling yang tidak bisa diajak islah. Bagi Gus Dur, islah adalah sebuah cara untuk mencari jalan tengah di antara dua

[63] "Tidak Mudah Islah", 19 December 2005, *http://ip52-214.cbn.net.id/id/arsip/2005/12/19/NAS/mbm.20051219.NAS117560.id.html*

[64] *Ibid.*

[65] *Ibid.*

kelompok pada tingkat yang sama. Polisi dan pencuri tentu tidak dapat melakukan islah, mengomentari sikapnya terhadap Muhaimin.[66] Di sini tampak Gus Dur amat memercayai berita-berita negatif, yang tidak dikonfirmasi secara proporsional, seputar keponakannya itu. Kekecewaannya semakin mendalam karena Muhaimin berani melaksanakan MLB yang memecat dirinya sebagai Ketua Umum Dewan Syura. Sikap Muhaimin ini dianggap keterlaluan, apalagi melihat *track record* politiknya yang banyak dibesarkan oleh Gus Dur.[67] Di sisi lain, sikap Muhaimin pun tidak kalah kerasnya. Dia tidak saja menyingkirkan sang paman, namun dengan bersunguh-sungguh pula membersihkan kalangan yang dianggap menjadi pendukung pamannya, termasuk Yenny Wahid, putri kandung Gus Dur.

Sikap keras pihak-pihak yang berkonflik berlanjut dengan munculnya kebijakan untuk saling pecat dan saling membekukan yang tidak proporsional. Kadang-kadang kebijakan ini dilakukan secara inkonstitusional dengan melibatkan hanya sejumlah pihak dalam forum terbatas.[68] Hal ini menyebabkan makin meluasnya ketersinggungan dan sikap bermusuhan.

Sikap itu kemudian mewujud dengan sikap saling menyalahkan dan menuduh kelompok lawan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas berbagai masalah yang selama ini timbul dalam partai. Sejumlah pihak percaya apabila setiap kelompok dapat mengurangi sikap kerasnya, masalah ini sebenarnya dapat diselesaikan. Namun, di sini tampak jelas bahwa ketiadaan saluran komunikasi yang baik akibat absennya CRM memainkan peran penting dalam memunculkan situasi yang tidak menguntungkan itu. Situasi di atas menunjukkan kebutuhan partai atas mekanisme yang lebih sistematis dan otoritatif dalam mengatasi konflik, yang tidak hanya dapat

---

[66] Wawancara dengan Zannuba Ariffah "Yenny" Wahid, Sekretaris Jenderal *Dewan Tanfidz* PKB-Gus Dur (2008–2010), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

[67] Wawancara dengan Zannuba Ariffah "Yenny" Wahid, Sekretaris Jenderal *Dewan Tanfidz* PKB-Gus Dur (2008–2010), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

[68] "Jelang Muktamar PKB, Pembekuan DPW Marak", *Media Indonesia*, 5 April 2005.

mengatasi konflik secara proporsional, tetapi juga mencegah partai terlibat dalam perseteruan yang berkepanjangan dan tidak produktif antara kader-kadernya.

3. 'Resolusi' Pihak Ketiga: Penguatan Perpecahan

Dalam kondisi seperti ini pilihan untuk menggunakan pihak ketiga, yakni pengadilan menjadi sesuatu yang tidak terelakkan. Adanya ketidakpercayaan (*distrust*) yang demikian besar dan keyakinan bahwa DPP Gus Dur tidak akan mengubah keputusan sedikit pun serta kemungkinan kekalahan telak yang tidak terhindarkan jika mengikuti saran-saran untuk melakukan rekonsiliasi, menyebabkan berbagai kalangan yang melawannya memilih untuk menggunakan langkah-langkah yang melibatkan pengadilan. Cara-cara ini diambil karena memang sulit menemukan media netral yang dipandang objektif dan mumpuni di antara kedua belah pihak. Apalagi atmosfer rekonsiliasi itu sendiri juga tidak muncul secara memadai.

Matori melayangkan gugatan kepada Gus Dur dan Alwi ke Pengadilan Jakarta Selatan pada 4 Juli 2002, atau hampir setahun setelah dirinya dipecat dari kedudukannya sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB. Matori menuntut agar keputusan pemecatannya dibatalkan dan meminta PKB-Gus Dur/Alwi dibekukan.[69] Setelah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi menolak tuntutannya, Matori naik banding ke Mahkamah Agung (MA) dan mendapatkan keputusan yang sama.[70] Akan tetapi, sebelum MA menyatakan putusannya, Matori dan pengacaranya mengajukan tuntutan kedua ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.[71] Hal yang menarik adalah walaupun menggunakan bahan gugatan yang sama dan hanya menambahkan satu nama, yaitu H.Z. Arifin Junaidi sebagai tertuduh, kali ini Pengadian Negeri

---

[69] "Jalil Minta Pengadilan Status Quo kan PKB Wahid", *Koran Tempo*, 5 Juli 2002.

[70] Ahmad, "Pergumulan Politik Sang Pemberani", 396–397.

[71] "Kubu Jalil Ajukan Gugatan Baru", *Pelita*, 5 Oktober 2002.

Jakarta Selatan menerima tuntutan Jalil. Keputusan pengadilan ini memancing kemarahan Gus Dur dan kelompoknya.[72]

Pendukung Matori menganggap putusan kedua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai isyarat mutlak bahwa pemecatan Matori tidak sah menurut kacamata hukum dan sebagai bentuk dukungan legal atas keberadaan mereka.[73] Mereka menggunakan putusan ini sebagai alat untuk mempertahankan eksistensinya dan meningkatkan keyakinan mereka bahwa mereka benar. Menyusul 'kemenangan' yang diraihnya, Matori kemudian meminta Gus Dur dan para pendukungnya untuk dapat menghormati keputusan ini. Dia kemudian menawarkan rekonsiliasi dan menyatakan bahwa dirinya masih murid Gus Dur.[74] Namun, semua hal itu dimentahkan oleh keputusan MA yang membatalkan kemenangannya karena memandang Matori mengajukan materi pengadilan yang sama dan sudah diputuskan. MA memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengkaji ulang dan membatalkan putusan keduanya. Setelah akhirnya MA memenangkan Gus Dur, kelompok Matori terlihat menurunkan konfrontasinya terhadap Gus Dur walaupun mereka tidak sepenuhnya mengakhirinya. Bagi pendukungnya, hal ini merupakan bagian sikap Matori dalam menghormati putusan pengadilan.[75]

Sementara itu, pihak Alwi dan Saifullah dengan alasan yang hampir sama mengajukan gugatan ke Gus Dur pada 11 April 2005, setelah mendapat restu dari Kiai Langitan.[76] Setelah enam bulan dari pemecatan mereka berdua pada 27 Oktober 2004 atau sekitar 18 bulan untuk kasus reposisi Saifullah dan setelah melalui beberapa upaya

---

[72] "Pemecatan Jalil Tidak Sah. Wahid Dkk Dihukum Rp. 12,8 Miliar", *http://www.tokoh-indonesia.com/berita/berita/2003/02/gusdur_Jalil.shtml.*

[73] *Ibid.*

[74] *Ibid.*

[75] Wawancara dengan Abdul Khalik Ahmad, Sekretaris Fraksi PKB DPR RI (1999–2001) dan Sekretaris Jenderal PKB-Jalil (2000–2005), di Jakarta, 11 Oktober 2010.

[76] Tentang alasan di balik seruan ini lihat "Shihab and Saifullah akan Gugat DPP PKB", *Suara Karya*, 28 Maret 2005.

islah, baik Alwi maupun Saifullah serta kelompok pendukungnya sampai pada kesimpulan bahwa persoalan ini memang tidak dapat diselesaikan secara internal.

Sama halnya dengan kasus Matori, kasus ini pun akhirnya sampai pada level MA. Pada level MA, keputusan yang diberikan cukup ambigu, di satu sisi, MA menyatakan bahwa pemecatan Alwi dan Saifullah melalui Rapat Pleno melawan hukum. Hal tersebut menjadi landasan bagi kelompok Alwi untuk tetap menyatakan diri mereka sebagai kelompok yang sah. Namun di sisi lain, MA menolak keinginan Alwi dan Saifullah agar dirinya dikembalikan pada posisinya semula sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz dan Sekjen PKB. Hal ini berarti MA tidak mengizinkan keduanya memegang kembali jabatan mereka sebelumnya. Keputusan inilah yang menjadi pegangan bagi kelompok Gus Dur untuk tetap menyingkirkan Alwi dan kelompoknya dalam kepengurusan PKB yang baru.

Keputusan MA menjadi juga membingungkan karena mengimbau agar kedua pihak melakukan islah.[77] Menurut MA, keputusan terbaik untuk memecahkan masalah konflik internal ini terletak di partai itu sendiri. Dengan keputusan ambigu semacam ini, setiap kelompok pada akhirnya merasa berhak berdiri atas nama PKB. Kedua kelompok masih tetap pada keyakinannya sebagai satu-satunya kelompok yang sah untuk menggunakan simbol, nama, dan seluruh aset PKB.

Sampai dua tahun kemudian, tidak satu kelompok pun mau mengalah. Kelompok-kelompok yang berkonflik ini tetap mempertahankan diri dalam suasana antagonisme. Namun, pada November 2006, ulama pendukung Alwi memutuskan untuk membentuk partai baru yang bernama Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Alasan ideologis dibentuknya partai ini adalah agar lebih memperjuangkan kepentingan NU dan Ulama, di samping agar partai

---

[77] Harifin A. Tumpa, salah satu hakim Mahkamah Agung, berkata bahwa pada akhirnya MA percaya bahwa "keputusan berada di tangan mereka (kelompok yang berkonflik)", *Republika*, 19 November 2005.

ini memiliki waktu yang cukup untuk menghadapi Pemilu 2009. Untuk mengantisipasi terjadinya situasi yang sama di PKB, PKNU mendirikan Dewan Muhtasyar (Dewan Penasihat) yang terdiri dari sejumlah ulama senior sebagai badan tertinggi di partai.[78] Salah satu fungsi dewan ini adalah sebagai badan arbitrase untuk menangani konflik yang terjadi di partai.[79] Dengan dibentuknya PKNU, konflik dianggap berakhir meskipun dalam konteks hukum belum benar-benar tuntas.

Sebagai orang yang berpengalaman menangani konflik internal yang melibatkan Gus Dur, Muhaimin agaknya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang harus dia lakukan. Sama dengan yang lain, persoalan yang ada tidak dapat diselesaikan secara internal. Pengalaman mengarahkannya untuk mengambil keputusan yang cepat dengan menggugat Gus Dur, pada tanggal 14 April 2008. Hanya dalam waktu sekitar 18 hari setelah dirinya disingkirkan oleh Gus Dur, Muhaimin melayangkan surat gugatan ke Pengadilan Jakarta Selatan dalam upaya mencari keadilan atas kebijakan yang merugikannya.[80] Sama halnya dengan dua kasus terdahulu, keputusan ini harus diselesaikan pada level MA. Dan kembali MA membuat keputusan yang ditafsirkan secara berbeda oleh keduanya. Alih-alih menjadi keputusan rekonsiliatif, keputusan MA menjadi alasan pembenaran bagi kedua kelompok yang bertikai untuk tetap eksis.

MA menyatakan bahwa PKB-Parung (sebagai hasil MLB Parung) dan PKB-Ancol (sebagai hasil MLB Ancol) yang tidak dihadiri seluruh anggota pengurus nasional yang mewakili Dewan Syura dan Dewan Tanfidz adalah inkonstitusional dan dengan demikian ilegal. Menurut MA, berdasarkan hal ini, kedua kubu harus kembali ke pengurus sebelumnya yang didirikan setelah Muktamar Semarang tahun 2005. Dalam hal ini, Gus Dur menduduki jabatan Ketua

---

[78] *AD PKNU Pasal 17 (1).*

[79] *ART PKNU Pasal 21 (16.c).*

[80] Danu Kusworo, "Jalan Panjang Konflik PKB", *Kompas*, 19 Juli 2008.

Umum Dewan Syura dan Muhaimin sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz.[81]

Keputusan MA yang mengembalikan kepengurusan yang sah berdasarkan Mukatamar Semarang 2005 itu seharusnya merupakan pintu ke arah rekonsiliasi. Akan tetapi, alih-alih menggunakan keputusan pengadilan ini sebagai alat untuk memediasi konflik, setiap kelompok justru menggunakan keputusan ini sebagai pembenaran atas pendiriannya. Bagi Gus Dur dan kelompoknya, keputusan MA menegaskan bahwa PKB yang sah adalah PKB yang dipimpin Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syura. Dengan kata lain, PKB yang dipimpin anggota lain adalah ilegal.

Di lain pihak, opini ini berlaku juga untuk Muhaimin. Kubunya merasa bahwa MA telah mendukung eksistensinya dengan mengakui Muhaimin sebagai satu-satunya Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB yang sah. Mereka juga menganggap putusan MA sebagai verifikasi atas tidak sahnya di mata hukum keputusan pemecatan dirinya. Dengan berbagai situasi di atas, terlihat kembali bahwa pencarian kebenaran hingga level pengadilan sebenarnya lebih sebagai sebuah upaya untuk membenarkan posisi yang sudah diambil, ketimbang untuk mencari sebuah solusi yang bersifat rekonsiliasi.

Lebih dari itu, kasus-kasus di atas memperlihatkan bahwa peran pihak ketiga tidak selalu memberikan hasil yang memuaskan. Proses pengadilan, terutama di luar Matori, justru selalu memberikan peluang bagi masing-masing untuk terus mempertahankan keberadaannya. Kegagalan peran pihak ketiga ini mungkin terjadi, mengingat keputusan yang diambil cenderung membuka celah bagi pihak yang bertikai untuk tetap eksis. Keputusan yang bersifat ambigu kerap menjadi sumber persoalan yang lain. Kegagalan seperti ini telah diprediksi oleh Ho-Wong Jeong pengamat CRM.[82] Dia juga mengatakan:

---

[81] "Kasasi Wahid Ditolak", *Kompas*, 18 Juli 2008.

[82] Ho-Won Jeong, *Conflict Management and Resolution: An Introduction*, (New York: Routledge, 2010), 14.

> Walaupun putusan pengadilan dianggap final, kadang-kadang hal ini terus menciptakan ketegangan ketika salah satu pihak yang berkonflik enggan menerima putusan pengadilan tersebut.[83]

Selain itu, keputusan pihak ketiga kerap kurang sensitif karena kurangnya pemahaman yang komprehensif atas budaya internal sebuah kelompok. Keputusan yang kerap 'bebas nilai' juga sering tidak dapat dipahami oleh kalangan yang telah merasa dilukai emosi kulturalnya. Para kiai sepuh yang kecewa dengan perilaku Gus Dur, yang dipandang tidak lagi sejalan dengan tradisi NU, tentu tidak dapat memahami situasi di mana mereka harus tetap mendukung Gus Dur dan mengakui kemenangannya. Hal inilah yang menurut Jong, membuat keputusan yang dilandasi oleh fakta dan hukum tidak selalu menjadi "*suitable means to sort out emotional problems or incompatible values*".[84]

Penggunaan pihak ketiga merupakan simbol dari ketidakpercayaan di antara mereka yang bertikai dan menandai puncak pertarungan di antara keduanya. Pihak ketiga pun memang pada akhirnya bukan ditujukan untuk menyelamatkan keutuhan partai, melainkan justru sebagai upaya pelegalan atas keberadaan mereka sekaligus penghancuran pihak lawan dalam konteks hukum. Dalam kasus PKB terlihat bahwa dengan diserahkannya persoalan kepada pihak ketiga maka benar-benar berakhirlah upaya untuk mempersatukan kedua pihak.

D. Ringkasan

Kehadiran institusi seperti badan kehormatan bukan sebuah jaminan atas tegaknya resolusi konflik yang dapat menangani seluruh masalah dengan segera. Di banyak kasus, faktor-faktor lain turut memberi kontribusi terhadap meluasnya konflik yang bahkan memperburuk potensi perpecahan internal. Akan tetapi, keberadaan badan semacam

[83] *Ibid.*

[84] *Ibid.*

itu, sebagai salah satu bentuk CRM, setidaknya akan membawa peluang lebih besar bagi setiap partai untuk meningkatkan kemampuannya dalam merelokasi dan menangani potensi konflik sejak fase awalnya. Setiap kader dapat dengan bebas dan aman mengekspresikan pendapatnya, yang di dalam jangka panjang akan membantu partai menghindari akumulasi kekecewaan.

Selain itu, keberadaan badan kehormatan sebagai badan otoritatif ini akan membantu partai untuk memelihara perilaku kader agar sesuai dengan *code of conduct* dalam menghadapi perselisihan dan memastikan bahwa setiap elemen dalam partai tidak dapat menggunakan segala cara untuk memperjuangkan kepentingannya. Pembahasan di atas mengonfirmasi pandangan bahwa dengan tidak adanya badan semacam ini, PKB tidak hanya gagal dalam menangani eskalasi konflik, tetapi juga tidak mampu menghindari terjadinya perpecahan internal.

BAB VIII
EKSISTENSI MEKANISME RESOLUSI KONFLIK DI PKS: PERAN TRIUMVIRAT DAN MAJELIS SYURA

> Dengan adanya mekanisme pengadilan internal (di PKS), soliditas dan kehormatan partai dapat dipertahankan (Mahfudz Siddiq).[1]

Bab ini akan membahas kondisi *Conflict Resolution Mechanism* (Mekanisme Resolusi Konflik/CRM) di PKS. Selama dekade pertama eksistensinya, PKS relatif mampu mengelola CRM melalui keberadaan unsur-unsur CRM dan konsistensi selama pelaksanaannya. Hal ini memungkinkan partai untuk dapat mendeteksi potensi konflik dan melokalisasikannya sejak dini. Walaupun PKS masih menghadapi berbagai kesulitan, partai ini pada umumnya mampu mereduksi potensi faksionalisasi di partai, yang pada gilirannya menjadikan situasi internal partai kondusif bagi pemeliharaan soliditas partai.

A. Elemen-Elemen CRM

Dalam PKS, terdapat beberapa badan-badan yang karena fungsi dan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam AD/ART, baik memiliki keterkaitan langsung maupun tidak dalam konteks pencegahan ataupun penyelesaian konflik. Lembaga-lembaga tersebut memainkan peran arbitrase, pengadilan internal, dan institusi islah, baik secara

---

[1] Wawancara dengan Mahfudz Siddiq, Ketua Departemen Kaderisasi DPP PKS (2002–2005) dan Anggota DPR RI (2004–2014), di Jakarta, 27 Oktober 2010.

formal maupun informal, tempat keputusan-keputusan penting yang dapat mengakhiri konflik dapat dihasilkan segera. Pembahasan lembaga-lembaga yang terkait dengan terbangunnya situasi tersebut amat penting dibahas karena hampir sepuluh tahun keberadaannya tidak ditemukan konflik serius dalam partai ini. Kemampuan ini sendiri merupakan salah satu indikator dari keberhasilan terbangunnya CRM, yakni kemampaun mengidentifikasi konflik dan mencegahnya untuk berkembang.

1. Dewan Syariah sebagai Institusi Utama

Dewan Syariah merupakan institusi utama yang memainkan peran konstitusional dalam pencegahan dan penyelesaian konflik. Hal ini terkait dengan salah satu fungsi partai ini sebagai lembaga peradilan,[2] yang dalam perkembangannya merangkap pula sebagai lembaga arbritrase dan lembaga islah (pada tingkat kabupaten/kota).[3] Tiga fungsi utama ini menjadikan Dewan Syariah (DS) sebagai elemen yang tak terelakkan dalam urusan resolusi konflik dan masalah-masalah terkait lainnya. Dewan Syariah itu sendiri memiliki hierarki yang terdiri dari tiga tingkat pengurus,[4] yaitu Dewan Syariah Pusat di tingkat nasional, Dewan Syariah Wilayah di tingkat provinsi, dan Dewan Syariah Daerah di tingkat kabupaten/kota.

Dewan Syariah Pusat berperan penting karena kewenangannya sebagai institusi pembuatan keputusan final. Dewan Syariah di setiap level harus memberikan laporan kepada Dewan Syariah pada satu level yang lebih tinggi. Putusan Dewan Syariah harus disampaikan ke Majelis Syura sebagai badan tertinggi di PKS. Dewan Syariah harus pula memberikan rekomendasi ke Majelis Syura untuk kemudian ditindaklanjuti. Sifat penindaklanjutan itu bersifat formalitas karena pada prinsipnya rekomendasi itu harus dilaksanakan. Dalam aturan

[2] *ART PK Pasal 27 (3); ART PKS 2002 Pasal 12 (3).*

[3] *ART PKS 2005 Pasal 23 (2.c), Pasal 23 (2.f), Pasal 5 (d).*

[4] *ART PK Pasal 22; AD PKS 2002 Pasal 15 and 16; AD PKS 2005 Pasal 15 (1.a), (1.b), (1.c); ART PKS 2005 Pasal 23.*

main, DS di level bawah, Dewan Syariah Wilayah dan Dewan Syariah Daerah, bertanggung jawab langsung kepada Dewan Syariah Pusat. Peran DS di level lokal diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan sejenis di level lokal sehingga keputusan dapat lebih bersifat responsif dan segera.[5]

Dewan Syariah memiliki *privilege* sebagai badan independen. Walaupun partai memiliki Majelis Syura sebagai lembaga tertinggi dan Dewan Pimpinan Tertinggi Partai (DPTP) sebagai badan supervisi, tidak satu pun institusi di PKS yang dapat mengintervensi Dewan Syariah dalam proses pembuatan keputusannya.[6] Dewan Syariah Pusat memiliki posisi yang sederajat dengan lembaga tinggi lainnya di partai, seperti Majelis Pertimbangan Partai (MPP) dan Dewan Pengurus Pusat (DPP). Secara konstitusional disebutkan bahwa badan ini harus diisi oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya, yang diharuskan memiliki seperangkat keahlian sebagai syarat untuk dapat menjadi anggota DS, termasuk pemahaman yang dalam tentang syariat Islam dan hukum nasional.[7] Persyaratan mengenai pemahaman atas syariat dan hukum itu relevan karena badan ini akan menangani berbagai masalah yang terkait dengan persoalan konseptual dan hukum. Dapat terlihat bahwa untuk menjadi anggota DS, keahlian khusus lebih penting daripada latar belakang politik.

Pada awalnya, DS menangani hampir seluruh masalah. Akan tetapi, setelah berdirinya Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) pada tahun 2005, institusi ini memiliki mitra atau badan pendukung ketika menjalankan fungsinya, khususnya tentang masalah-masalah yang melibatkan kader yang melakukan kesalahan dan pelanggaran disiplin. Namun, bidang tugas Dewan Syariah sebagai pengadilan internal, badan arbitrase, dan institusi islah masih mencakup ber-

---

[5] Wawancara dengan Mahfudz Siddiq, Ketua Departemen Kaderisasi DPP PKS (2002–2005) dan Anggota DPR RI (2004–2014), di Jakarta, 27 Oktober 2010.

[6] *ART PKS 2005 Pasal 14 (5)*. Wawancara dengan Aus Hidayat Nur, Ketua Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktober 2010.

[7] *ART PK Pasal 23; ART PKS 2002 Pasal 10 (5),(6); ART PKS 2005 Pasal 25 (1.d), (1.e), (2.d), (2.e); Pasal 35 (2.a.4), (2.b.4); Pasal 48 (2.a.3), (3.a.3).*

bagai masalah yang cukup kompleks dari masalah personal, seperti perceraian, pelanggaran etika, utang piutang, pemaknaan ajaran keagamaan, hingga persoalan yang terkait dengan aturan main partai, seperti pelanggaran AD/ART.

Baik dalam fungsi peradilan maupun sebagai lembaga arbitrase internal, badan ini juga menjadi media bagi diputuskannya nasib seorang kader. Begitu pula jika ada konflik antarsesama kader ataupun antara kader dan partai, Dewan Syariah menjadi media penyelesaian yang bersifat arbiter. Adapun sebagai lembaga islah pada level kabupaten, lembaga ini secara normatif diharapkan dapat berfungsi sebagai juru damai pada level itu sehingga potensi perbedaan pandangan dan konflik dapat diselesaikan pada level itu.

2. Beberapa Institusi Penopang

Selain Dewan Syariah, partai pun memiliki badan-badan yang memiliki hubungan langsung dengan masalah pencegahan dan peyelesaian konflik. Keberadaan badan-badan di luar Dewan Syariah, sebagai institusi penopang, diakui pada umumnya oleh kader partai sebagai bagian dari penyelesaian konflik internal partai.[8] Sebagai sebuah upaya mencegah terjadinya eskalasi konflik, badan-badan tersebut merupakan elemen normatif dan tradisi partai yang terlembagakan

---

[8] Wawancara dengan Aus Hidayat Nur, Ketua Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi DPP PKS, di Jakarta, 15 Oktober 2010; dengan Hidayat, M.M., Anggota DPRD Tangerang, di Tangerang, 21 Oktober 2010; dengan Mustofa, Kader PKS Jakarta Utara, mantan wartawan Majalah Profetik, di Depok, 7 Oktober 2010; dengan Selamat Nurdin, M.M., mantan pimpinan aktivis tarbiyah di Universitas Indonesia, anggota DPRD DKI Jakarta (2004–2014), di Jakarta, 22 Oktober 2010; dengan Amri Yusra, M.Si., Ketua DPD PKS Depok (2002–2004), anggota Parlemen Depok, Jawa Barat (2004–2009), dan Dosen di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, di Depok, 7 Oktober 2010; dengan Sitaresmi S., M.Psi., anggota Departemen Dakwah DPP PK (2000–2003), di Jakarta, 8 Oktober 2010; dengan Umar Salim Basalamah, Wakil Sekretaris Jenderal PKS (2002) dan sekretaris pribadi Hidayat Nur Wahid (mantan Presiden PKS dan Ketua MPR RI), di Jakarta, 12 Oktober 2010.

yang dapat digunakan oleh partai sebagai bagian dari pendeteksi potensi dan pencegahan konflik internal partai.

Majelis Syura adalah unsur pendukung dalam penanganan dan resolusi konflik, khususnya di tingkat proses pembuatan kebijakan yang melibatkan elite partai di tingkat nasional. Sebagai badan tertinggi dengan tugas konstitusional untuk membahas dan mengambil keputusan atas berbagai kebijakan nasional dan pedoman politik,[9] perannya terutama berkaitan dengan penyaluran kepentingan yang berbeda, termasuk perbedaan pandangan dan tempat perbedaan itu dicarikan jalan keluarnya. Majelis Syura juga memiliki peran badan arbitrase untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah termasuk perselisihan internal di tingkat elite. Peran ini dapat dilakukan mengingat kedudukan kader-kader senior dan terkemuka di dalamnya. Sebagai badan konsultatif yang berisikan figur-figur terpilih, Majelis Syura berkesempatan untuk menjadi sebuah forum yang tepat untuk membuat keputusan final yang dapat mengakhiri perbedaan pandangan atau perselisihan.

Institusi penopang lain adalah BPDO.[10] Badan ini dirancang sebagai bagian dari pengawasan kepada kader, khususnya memonitor disiplin kader dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.[11] BPDO

---

[9] *ART PK Pasal 18; AD PKS 2002 Pasal 12 (1.d), ART PKS 2002 Pasal 7 (5), (6), (9); AD PKS 2005 Pasal 11 (2.c), (2.l).*

[10] Badan ini didirikan tahun 2005 sebagai salah satu institusi di lembaga tinggi partai. Namun pada tahun 2010, badan ini menjadi salah satu departemen di DPP yang dipimpin Aus Hidayat Nur, salah seorang tokoh senior di gerakan tarbiyah. Lutfi Hasan Ishaaq yang kemudian menjadi Presiden PKS keempat adalah pimpinan pertama institusi ini.

[11] Wawancara dengan Aus Hidayat Nur, Ketua Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktober 2010; dengan Hidayat, M.M., anggota DPRD Kabupaten Tangerang (2005–2010), di Tangerang, 21 Oktober 2010; dengan Mustofa, kader PKS dan mantan wartawan *Majalah Profetik*, di Depok, 7 Oktober 2010; dengan Selamat Nurdin, M.M., mantan pimpinan aktivis tarbiyah di Universitas Indonesia, Anggota DPRD DKI Jakarta (2004–20014), di Jakarta, 22 Oktober 2010; dengan Amri Yusra, M.Si., Ketua DPD PKS Depok (2002–2004), anggota DPRD Kota Madya Depok, Jawa Barat, (2004–2009), dan Dosen di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, di Depok, 7 Oktober 2010; dengan Sitaresmi S., M.Psi., anggota Departemen Dakwah DPP PK (2000–2003), di

diisi oleh kader-kader senior yang kualifikasinya sudah cukup tinggi. Walaupun nama badan ini tidak dinyatakan secara gamblang di AD/ART partai, kehadiran dan tugasnya relevan, yakni sebagai institusi yang melakukan peradilan, khususnya yang terkait dengan masalah disipliner[12] dan sebagai badan yang memberikan rekomendasi terhadap Majelis Syura sebelum kader dipecat.[13] Oleh karena itu, berkaitan dengan mandat AD/ART partai, tujuan utama pendirian BPDO adalah meningkatkan kemampuan partai dalam penegakan disiplin dan membuat rekomendasi ke Majelis Syura tentang berbagai tindakan yang harus diambil partai berkaitan dengan masalah-masalah disiplin kepartaian.[14] BPDO juga memiliki fungsi arbitrase yang di dalamnya mencakup kewenangan untuk memutuskan penyelesaian konflik kepentingan atau pemikiran antarsesama kader, atau antara kader dan partai, yang berpotensi merusak partai.[15]

BPDO tidak dapat dilepaskan sebagai bagian dari upaya pencegahan eskalasi konflik, mengingat adanya fungsi investigasi sebagai bagian dari fungsi peradilan yang menjadi wewenangnya. Dengan memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi, sebagai bagian dari fungsi peradilan dan arbitrasenya, BPDO memiliki kesempatan untuk mengetahui inti sebuah persoalan sejak tahap awal. Fungsi investigasi itu nantinya dapat ditemui pokok-pokok persoalan yang melatarbelakangi sebuah masalah yang muncul, baik kader pada

Jakarta, 8 Oktober 2010; dengan Umar Salim Basalamah, Wakil Sekretaris Jenderal PKS (2002), dan sekretaris pribadi Hidayat Nur Wahid (mantan Presiden PKS dan Ketua MPR RI), di Jakarta, 12 Oktober 2010.

[12] *ART PKS 2005 Pasal 6 (3 b. 5).*

[13] *ART PKS 2005 Pasal 10 (3 b).*

[14] Wawancara dengan Aus Hidayat Nur, Ketua Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktober 2010; dengan Ahmad Feri Firman Yusuf, Ketua Wilayah Dakwah III (2002–2005), Anggota Majelis Syura PKS (2002–2010), di Jakarta, 2 November 2010.

[15] Wawancara dengan Aus Hidayat Nur, Ketua Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktober 2010; dengan Ahmad Feri Firman Yusuf, Ketua Wilayah Dakwah III (2002–2005), Anggota Majelis Syura PKS (2002–2010), di Jakarta, 2 November 2010.

khususnya maupun partai pada umumnya sehingga partai dapat memutuskan kadar hukuman yang pantas diberikan kepada kader yang melakukan pelanggaran, mulai dari teguran, penurunan jenjang, hingga dikeluarkan.[16]

Di sisi lain, dari proses investigasi itu segenap bentuk fitnah, baik kepada sesama anggota atau kepada partai maupun kecurangan personal yang dapat merendahkan kepercayaan kepada partai dapat ditemui dan direspons secara proporsional. Dengan kata lain, investigasi yang dilakukan BPDO diharapkan akan melindungi partai dari informasi yang keliru atau fitnah, yang secara potensial dapat menurunkan kepercayaan dan membahayakan kesatuan dan persatuan partai.[17]

Selain elemen-elemen di atas, partai juga memiliki institusi lain yang berperan secara informal dalam resolusi konflik, yaitu *halaqah* atau kadang-kadang disebut sebagai *liqo* yang secara literal berarti pertemuan.[18] Di dalam perkembangannya, institusi ini juga dikenal sebagai unit pembinaan.[19] *Halaqah* dibentuk sebagai media pertemuan untuk mentransmisi gagasan partai ke seluruh kader melalui materi pendidikan yang dibuat partai secara sistematis.

---

[16] Wawancara dengan Aus Hidayat Nur, Ketua Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktober 2010; dengan Selamat Nurdin, M.M., mantan pemimpin aktivis tarbiyah di Universitas Indonesia, Anggota DPRD DKI Jakarta (2004–2014), di Jakarta, 22 Oktober 2010; dengan Sitaresmi S., M.Psi., anggota Departemen Dakwah DPP PK (2000–2003), di Jakarta, 8 Oktober 2010; dengan Umar Salim Basalamah, Wakil Sekretaris Jenderal PKS (2002), dan sekretaris pribadi Hidayat Nur Wahid (mantan Presiden PKS dan Ketua MPR RI), di Jakarta, 12 Oktober 2010; dengan Ahmad Feri Firman Yusuf, Ketua Wilayah Dakwah III (2002–2005), anggota Majelis Syura PKS (2002–2010), di Jakarta, 2 November 2010.

[17] Wawancara dengan Aus Hidayat Nur, Ketua Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktober 2010; dengan Selamat Nurdin, M.M., mantan pemimpin aktivis tarbiyah di Universitas Indonesia, anggota DPRD DKI Jakarta (2004–2014), di Jakarta, 22 Oktober 2010.

[18] Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, (Bandung: Teraju, 2002), h.125.

[19] Hurriyah, *Sistem Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera (1998–2003),* Skripsi, (Depok: Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2004).

Tujuan utama pertemuan ini adalah membangun pemahaman dan penyikapan yang sama atas ideologi partai. Kader diharapkan hadir sekurang-kurangnya sekali setiap dua pekan dalam sebuah *halaqah* yang berlangsung 2–3 jam. *Halaqah* dihadiri peserta (*mutarabbi*),[20] tidak lebih dari 12 kader, dengan satu orang senior sebagai pengawas atau guru (*murabbi*).[21] Semangat untuk saling mengenal satu dengan lainnya (*ta'aruf*), memahami satu dengan lainnya (*tafahum*), dan membantu satu dengan lainnya (*tafakul*) adalah hal-hal yang ditekankan dan disebarluaskan kepada para peserta di *halaqah*.[22] Bagi PKS, sebagai partai kader, *halaqah* merupakan salah satu pilar utama di partai karena fungsinya sebagai media kaderisasi. PKS membuat konsep *halaqah* berdasarkan pada gagasan dan metode yang telah dikembangkan *Ikhwanul Muslimin* Mesir.

AD/ART partai menyebutkan bahwa setiap kepengurusan partai wajib melakukan dan mengevaluasi *halaqah* sebagai unit pembinaan kader.[23] Pelaksanaan kewajiban ini dilakukan di bawah pengawasan menyeluruh Badan Kaderisasi yang ada di setiap tingkat dewan pengurus (dari cabang hingga tingkat pusat). Oleh karena itu, di dalam konteks struktural, *halaqah* adalah unsur dari dewan pengurus. Sebagai partai kader, *halaqah* merupakan ujung tombak bagi pencetakan kader partai, yang keberadaannya merupakan keharusan bagi partai. Meskipun fungsi utama konstitusionalnya adalah pembinaan kader, dengan peran dan fungsi yang dimilikinya itu keberadaanya turut berperan mencegah terjadinya konflik.

---

[20] Partai berharap tidak lama setelah mengikuti *halaqah*, *mutarabbi* dapat pula berperan sebagai *murabbi* dan memiliki *halaqah* agar dapat mengembangkan kader baru. *Murabbi* yang nantinya memutuskan apakah *mutarabbi* dapat membentuk *halaqah* atau belum. Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, 126.

[21] Tim Departemen Kaderisasi PK Sejahtera, *Manajemen Tarbiyah Anggota Pemula*, (Jakarta: DPP PK Sejahtera and PT Syaamil Cipta Media, 2004), 28.

[22] *Ibid.*, 128–129.

[23] *ART PK Pasal 22 (15); ART PKS 2002 Pasal 17 (3); AD PKS 2005 Pasal 14 (3.b), ART PKS 2005 Pasal 22 (c), Pasal 34 (c), Pasal 47 (c), Pasal 56 (h), Pasal 59 (h).*

Sebelumnya *halaqah* merupakan sesuatu yang diwajibkan kepada seluruh kader, pada akhirnya turut mewarnai kehidupan kader. Digambarkan oleh Dr. Prihandoko bahwa

> *Halaqah* menjadi tempat untuk mengekspresikan harapan, kegelisahan, dan keinginan. Tempat membicarakan banyak hal. Tempat membersihkan diri. Tempat berdiskusi. Tempat menyerap informasi. Dan tempat mengevaluasi perjalanan hidup dan sebagainya. Tempat wadah kader untuk menjadikannya sebagai bagian penting dari kehidupannya.[24]

Entitas ini meningkatkan hubungan personal antara sesama kader dan menguatkan tradisi saling menasihati dan mengingatkan.[25] *Halaqah* juga menjadi forum diskusi yang membicarakan berbagai persoalan, termasuk masalah personal, politik, dan situasi terakhir di partai.[26] Adanya semangat persaudaraan dan saling berbagi pada akhirnya mendorong peserta *halaqah* untuk saling mencari titik temu ketimbang mencari perbedaan-perbedaan di antara mereka dan mengurangi orientasi menang sendiri. Sejumlah masalah berat dapat dipecahkan melalui *halaqah* yang akhirnya dapat mengurangi ketegangan antarkader atau antara kader dan partai.[27]

Kemudian, terkait dengan konflik, *halaqah* juga merupakan ajang mengembangkan nilai-nilai yang dapat meredam potensi konflik, seperti berpikir positif dan memercayai para pemimpin, menghindari konflik yang tidak perlu, dan menjaga semangat persaudaraan Islam. Dalam hal ini, proses *character building* di dalam *halaqah* memberikan

---

[24] Wawancara dengan Dr. Prihandoko, Ketua DPD PKS Depok (2004–2007) di Depok, 5 Oktober 2010.

[25] Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, 128–129. Wawancara dengan Dr. Prihandoko, Ketua DPD PKS Depok (2004–2007) di Depok, 5 Oktober 2010.

[26] Wawancara dengan Dr. Prihandoko, Ketua DPD PKS Depok (2004–2007) di Depok, 5 Oktober 2010; dengan Kemal A. Stamboel, Ketua Dewan Pakar PKS dan anggota DPR RI FPKS (2009–2014), di Jakarta, 8 Oktober 2010; dengan Hidayat, M.M., anggota DPRD Kabupaten Tangerang (2005–2010), di Tangerang, 21 Oktober 2010.

[27] Wawancara dengan Dr. Prihandoko, Ketua DPD PKS Depok (2004–2007) di Depok, 5 Oktober 2010.

dampak tidak langsung terhadap resolusi konflik. Pelembagaan tradisi ini relatif terkait dengan CRM, mengingat keberlangsungan *halaqah* pada akhirnya cukup mendukung partai dalam melakukan peredaman konflik sejak unit terkecil.

Selain aspek praktis, seperti pencegahan dan resolusi konflik, pembentukan institusi-institusi CRM ini berkaitan pula dengan upaya untuk melindungi kader partai sebagai aset nyata organisasi dari tindakan yang dapat membahayakan mereka dan melindungi partai dari berbagai dampak negatif. Menurut Yon Mahmudi, sejak awal PKS telah menyadari pentingnya mengembangkan badan-badan yang berfungsi melindungi kader dari tindakan yang tidak adil dan sepihak dari kader lain atau partai.[28] Kemudian, melalui berbagai badan di atas, partai dapat menjaga citra dan reputasi baik karena adanya badan-badan ini memungkinkan PKS menghindari kesalahan merekomendasi orang yang tidak kompeten untuk duduk dalam sebuah jabatan publik.[29]

Menurut Mahfudz Siddiq, salah satu hal terpenting dari keberadaan lembaga-lembaga ini adalah agar partai dapat memiliki mekanisme konflik yang responsif, yang dapat menyelesaikan konflik secara menyeluruh sehingga tidak menjadi konflik terbuka. Dengan adanya badan ini, menurutnya, "secara internal soliditas partai dapat terjaga".[30] Menurut Aus Hidayat Nur, badan-badan ini penting karena pada akhirnya dapat pula mencegah partai dari terjadinya 'pembang-

[28] Wawancara dengan Dr. Yon Mahmudi, Pengamat PKS dan Gerakan Tarbiyah di Indonesia, Dosen di Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dan salah satu kader yang menandatangani deklarasi pendirian PKS, di Depok, 6 Oktober 2010.

[29] Wawancara dengan Dr. Yon Mahmudi, Pengamat PKS dan Gerakan Tarbiyah di Indonesia, Dosen di Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dan salah satu kader yang menandatangani deklarasi pendirian PKS, di Depok, 6 Oktober 2010.

[30] Wawancara dengan Mahfudz Siddiq, Ketua Departemen Kaderisasi DPP PKS (2002–2005) dan anggota DPR RI (2004–2014), di Jakarta, 27 Oktober 2010.

kangan masif' yang dapat merusak keutuhan.[31] Dari pandangan ini terlihat bahwa selain alasan praktis, kesadaran yang dilandasi oleh pandangan filosofis untuk menjaga keutuhan partai merupakan salah satu alasan mengapa PKS membentuk badan-badan peradilan itu sejak awal berdirinya.

B. Implementasi dan Kondisi Pelaksanaan CRM

Keberadaan badan-badan itu tidak saja ada dalam konteks normatif. PKS menjalankan penyelesaian konflik internal yang melibatkan badan-badan itu. Partai ini memiliki polanya sendiri di dalam resolusi konflik. Secara umum, terdapat dua tahap penyelesaian konflik yang melibatkan seluruh institusi yang telah disebutkan. Kedua tahapan ini menjadi pola umum dan menghasilkan semacam *code of conduct* bagi partai dalam memecahkan konflik internal dan masalah-masalah terkait lainnya.

1. Pencegahan Konflik Tahap Pertama

Tahap pertama penanganan konflik biasanya berlangsung di tingkat *halaqah*.[32] Dengan peran yang dimilikinya itu, *halaqah* berperan sebagai media pertama yang memantau potensi konflik dan melakukan peredaman, sebelum tindakan-tindakan yang lebih formal diambil

---

[31] Wawancara dengan Aus Hidayat Nur, Ketua Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktober 2010.

[32] Wawancara dengan Kemal A. Stamboel, Ketua Dewan Pakar DPP PKS dan anggota DPR RI FPKS (2009–2014), di Jakarta, 8 Oktober 2010; dengan Hidayat, M.M., anggota DPRD Kabupaten Tangerang (2005–2010), di Tangerang, 21 Oktober 2010; dengan Mustofa, kader PKS dan mantan wartawan Majalah Profetik, di Depok, 7 Oktober 2010; dengan Amri Yusra, M.Si., Ketua DPD PKS Depok (2002–2004), anggota Dewan Kota madya Depok, Jawa Barat, (2004–2009), dan Dosen di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, di Depok, 7 Oktober 2010; dengan Sitaresmi S., M.Psi., anggota Departemen Dakwah DPP PK (2000–2003), di Jakarta, 8 Oktober 2010; dengan Dr. Prihandoko, Ketua DPD PKS Depok (2004–2007) di Depok, 5 Oktober 2010; dengan Mahfudz Siddiq, Ketua Departemen Kaderisasi DPP PKS (2002–2005) dan anggota DPR RI (2004–2014), di Jakarta, 27 Oktober 2010.

terhadap seorang kader. Sebagaimana yang disampaikan oleh Selamat Nurdin:

> Kalau ada konflik maka itu diaspirasikan di dalam unit-unit pembinaan *(halaqah)*. Jika tidak puas, disalurkan ke dalam struktur, misalnya ke DPW. Tidak puas juga, disalurkan ke dalam DPP. Bahkan jika dirasa sulit beradaptasi, dikasih kesempatan untuk non-aktif. Tapi kalau sudah bersifat merusak, ada BPDO.[33]

Hal ini dibenarkan oleh Aus Hidayat Nur yang mengatakan bahwa peran *halaqah* merupakan yang paling pertama dalam resolusi konflik.[34] Di *halaqah*, peran *murabbi* menjadi penting dalam proses resolusi konflik, terutama dalam menangkap kegelisahan dan ketidakpuasan *mutarabbi*,[35] mendeteksi pertanda paling awal potensi konflik, dan mencari solusi yang tepat. Apabila ada konflik antarkader, hal itu merupakan kewajiban *murabbi* untuk menghentikannya. Untuk kepentingan ini, kerap seorang *murabbi* memanggil pihak ketiga untuk membantunya. Berdasarkan pengalamannya sebagai seorang *mutarabbi*, Mahmudi berkata suatu yang lazim bagi *murabbi* untuk mengundang seseorang untuk membantu memecahkan perselisihan dan bahkan kekecewaan kader.[36]

Halaqah pun kerap menjadi media untuk mengukur sejauh mana kesungguhan seorang kader dalam memperjuangkan kepentingan partai, termasuk soal motivasi dan kejujuran kader dalam menjalankan fungsinya itu. Sehubungan dengan itu, *halaqah* kerap

---

[33] Wawancara dengan Selamat Nurdin, M.M., mantan pemimpin aktivis tarbiyah di Universitas Indonesia, anggota Dewan Provinsi DKI Jakarta (2004–2014), di Jakarta, 22 Oktober 2010.

[34] Wawancara dengan Aus Hidayat Nur, Ketua Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktober 2010.

[35] Wawancara dengan Mustofa, kader PKS dan mantan wartawan Majalah Profetik, di Depok, 7 Oktober 2010.

[36] Wawancara dengan Dr. Yon Mahmudi, Pengamat PKS dan Gerakan Tarbiyah di Indonesia, Dosen di Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dan salah satu kader yang menandatangani deklarasi pendirian PKS, di Depok, 6 Oktober 2010.

melakukan fungsi evaluasi, semacam pengadilan kecil atau bahkan merekomendasikan agar seseorang diinvestigasi lebih lanjut karena persoalan yang dihadapinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kemal Stamboel, saran pemecatan tak jarang berasal dari sesama anggota partai.[37]

Di lain pihak, peran resolusi konflik dalam *halaqah* juga terkait dengan keberadaan kader lainnya. Hal ini karena seluruh peserta *halaqah* memiliki kewajiban moral untuk saling mencurahkan isi hati, mendengar, dan mengingatkan. Dari kegiatan ini, tak jarang kelompok menjadi media yang dapat melakukan fungsi pembendungan konflik sejak dini. Secara umum, dalam *halaqah* ini berbagai hal didiskusikan dan dicarikan titik temu, termasuk persoalan pribadi dan partai. Dalam hal ini, karena *halaqah* juga bagian untuk institusi yang bekerja dalam penjaga ideologi seperti dibahas terutama di Bab XII. Oleh karena itu, kemampuan penanganan konflik di PKS memiliki hubungan dengan eksistensi nilai-nilai bersama yang diisi dengan semangat kesatuan dan persatuan, kolektivisme, dan solidaritas yang dikembangkan melalui *halaqah*.

Lebih dari itu, *halaqah* juga menjadi media pelindung kader dari berbagai informasi yang menyesatkan atau fitnah. Hal ini pada gilirannya juga melindungi partai dari hal yang sama. Anggota-anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi, misalnya, menggunakan *halaqah* sebagai media untuk saling mengingatkan akan potensi fitnah terkait dengan kegiatan politik parlemen yang mereka jalani, yang bisa saja akhirnya menghancurkan citra dan keutuhan partai.[38] Dalam kedudukan *halaqah* seperti ini, partai memiliki filter untuk pencegahan terjadinya pelanggaran etika yang dapat memicu ketegangan, baik antara sesama anggota dewan, kader, maupun antara anggota dewan dan kader dengan partai.

---

[37] Wawancara dengan Kemal A. Stamboel, Ketua Dewan Pakar PKS dan anggota DPR RI FPKS (2009–2014), di Jakarta, 8 Oktober 2010.

[38] Wawancara dengan Nooryanto, Ketua Departemen Kaderisasi Bekasi DPD PKS, di Bekasi, 7 November 2010.

Pelembagaan tradisi seperti saling mengingatkan di *halaqah*, sebagaimana yang telah digambarkan di atas, memiliki kaitan erat dengan makna resolusi konflik. Peran praktis semacam ini dalam kenyataannya pun berkelindan dengan peran transformasi dan pemeliharaan nilai-nilai bersama yang ada dalam *halaqah*. Tugas untuk memelihara kelangsungan ideologi dalam *halaqah* pada akhirnya juga efektif dalam pencegahan konflik yang berkelanjutan. Pada akhirnya, pencegahan konflik dalam PKS tidak dapat terlepas dari transmisi nilai-nilai ideologi yang dikembangkan dalam *halaqah*, dalam semangat tarbiyah (kekeluargaan). Dengan kata lain, karakter kader yang mengutamakan kepentingan bersama dan keengganan untuk berkonflik terbangun melalui *halaqah* ini. Hal tersebut kemudian terbukti cukup efektif dalam membantu partai menghindari eskalasi konflik sejak dini.

2. Mekanisme Pencegahan Konflik Selanjutnya

Namun, tentu saja tidak semua persoalan dapat diselesaikan pada level *halaqah*. Bobot pelanggaran yang dilakukan, level perbedaan pandangan yang tidak terjembatani, tingkat perasaan telah diperlakukan tidak adil, hingga potensi kerusakan yang ditimbulkan menjadi hal-hal yang pada umumnya menyebabkan perlunya elemen-elemen pelembagaan yang lebih formal dan otoritatif untuk menyelesaikannya. Jika partai menilai bahwa *halaqah* bukanlah tempat yang tepat untuk menyelesaikan sebuah potensi atau konflik itu sendiri, peran penyelesaian konflik akan disalurkan ke lembaga-lembaga seperti Dewan Syariah, BPDO, atau bahkan Majelis Syura.

Dewan Syariah akan menjalankan fungsinya sebagai badan peradilan manakala mendapatkan permintaan penyelesaian sebuah kasus dari DPP, untuk kasus-kasus umum, ataupun dari Majelis Syura, manakala terkait dengan pimpinan-pimpinan partai. Sebuah kasus biasanya akan pertama kali direspons pada level daerah atau Dewan Syariah Daerah sebelum masuk ke Dewan Syariah Pusat. Namun, yang umum terjadi adalah sebelum sebuah kasus dibawa ke Dewan

Syariah Pusat, Dewan Syariah Wilayah atau Dewan Syariah Daerah sebagai institusi resolusi konflik di level lokal berupaya menangani kasus itu terlebih dahulu. Dalam sejumlah kasus, Dewan Syariah Wilayah atau Dewan Syariah Daerah bertindak setelah pengurus partai di level lokal (DPW atau DPD) melimpahkan kasus-kasus yang sulit diselesaikan kepada mereka.

Di forum Dewan Syariah agar dapat memahami latar belakang sebuah kasus dan untuk dapat membangun argumentasi yang solid sebelum membuat kesimpulan, proses dialog dilakukan dengan pihak-pihak terkait yang intinya menanyakan alasan-alasan di balik persoalan yang muncul.[39] Setelah mendengarkan masing-masing pihak, Dewan Syariah akan memutuskan persoalan sesuai dengan aturan main yang berlaku dan juga hukum Islam. Dalam proses peradilan ini, partai berupaya bersikap seimbang dengan memperkenankan kader untuk mendapatkan pendampingan atau pembela dalam membela dirinya.

Kasus Syamsul Balda, Wakil Presiden PKS (1998–2002), dapat memberikan gambaran tentang proses ini. Setelah mendapatkan permintaan dari DPP untuk menyelesaikan persoalannya, Dewan Syariah Pusat mengundang Syamsul untuk memberikan keterangan dan membela diri atas tuduhan telah melakukan sebuah tindakan kurang patut.[40] DPP melaporkan ini agar kasusnya tidak segera merembet dan membesar. Dewan Syariah Pusat dalam forum resmi kemudian menanyakan latar belakang persoalan yang muncul kepada Syamsul. Setelah melalui proses tanya jawab yang intens, Dewan

---

[39] Wawancara dengan Aus Hidayat Nur, Ketua Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktober 2010; dengan Selamat Nurdin, M.M., mantan pemimpin aktivis tarbiyah di Universitas Indonesia, anggota Dewan Provinsi DKI Jakarta (2004–2014), di Jakarta, 22 Oktober 2010; dengan Sitaresmi S., M.Psi., anggota Departemen Dakwah DPP PK (2000–2003), di Jakarta, 8 Oktober 2010; dengan Umar Salim Basalamah, Wakil Sekretaris Jenderal PKS (2002), dan sekretaris pribadi Hidayat Nur Wahid (mantan Presiden PKS dan Ketua MPR RI), di Jakarta, 12 Oktober 2010; dengan Ahmad Feri Firman Yusuf, Ketua Wilayah Dakwah III (2002–2005), anggota Majelis Syura PKS (2002–2010), di Jakarta, 2 November 2010.

[40] Wawancara dengan Sitaresmi S., M.Psi., anggota Departemen Dakwah DPP PK (2000–2003), di Jakarta, 8 Oktober 2010.

Syariah Pusat dengan pertimbangan *syar'i* kemudian menyarankan Syamsul untuk melakukan beberapa aktivitas sebagai bentuk hukuman atas tindakan yang kurang patut itu. Namun, Syamsul tidak bersedia menerima saran itu. Atas kesepakatan bersama, partai kemudian memutuskan untuk memecat Syamsul dengan alasan tidak patuh atas keputusan partai.[41] Syamsul pun menerima keputusan ini sebagai konsekuensi penolakan dirinya untuk mematuhi keputusan partai. Kasus ini menjadi pelajaran bagi kader bahwa Dewan Syariah Pusat dalam melaksanakan tugas tidak memandang latar belakang jabatan seorang kader. Kasus Syamsul ini, yang secara substansi bersifat urusan personal, memperlihatkan juga luasnya masalah yang harus ditangani Dewan Syariah Pusat.

Situasi serupa juga berlangsung dalam kasus Yusuf Supendi, anggota Dewan Syariah Pusat, pendiri partai dan satu di antara tokoh-tokoh utama Jamaah Tarbiyah. Setelah proses panjang pengadilan internal yang diselenggarakan Dewan Syariah Pusat, Majelis Syura kemudian menetapkan pemecatan dirinya dari partai berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Pusat. Alasan utama pemecatan itu adalah kekerasan sikap Yusuf Supendi agar partai memecat Ketua Majelis Syura Hilmi Aminudin dan Sekjen Anis Matta, yang dianggapnya telah melakukan pelanggaran aturan main dan merugikan partai.[42] Yusuf menuduh Hilmi melakukan pelanggaran AD/ART partai karena menerima tawaran sebagai Ketua Majelis Syura PKS selama tiga periode, yang menurut Yusuf di luar batas kepatutan. Yusuf menggunakan penafsiran personalnya untuk membuktikan argumennya. Sementara itu, kepada Anis Matta, dia menuduhnya memiliki kepentingan untuk membawa partai ini ke agendanya

---

[41] Wawancara dengan Sitaresmi S.M.Psi., anggota Departemen Dakwah DPP PK (2000–2003), di Jakarta, 8 Oktober 2010.

[42] Wawancara dengan K.H. Yusuf Supendi, Lc. anggota DSP PKS (2000–2005) dan Anggota DPR RI (2004–2009), di Jakarta, 3 November 2010.

sendiri. Sayangnya, semua tuduhan itu tidak dilandasi bukti-bukti yang memadai.[43]

Selain itu, ada persoalan-persoalan lain yang menyebabkan Yusuf dipandang layak untuk dipecat. Hal ini didasarkan pada sikapnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPR RI dari PKS untuk menyerahkan kontribusi finansial ke partai. Alasan lainnya adalah penolakannya untuk menerima hukuman partai sebagai konsekuensi atas berbagai kesalahan yang dibuatnya, termasuk kesalahan tidak bersedia membayar sejumlah utang kepada pihak ketiga.[44]

Bagi sebagian pihak, pemecatan Yusuf ini menunjukkan adanya situasi antikritik atau otoriter di dalam partai. Hal ini mengingat Yusuf adalah sedikit figur yang berani mengekspresikan sikap kritis dan penentangannya pada para pimpinan partai. Sebuah sikap yang sebenarnya tidak lazim di gerakan tarbiyah. Namun, bagi sebagian besar kader, pemecatannya dapat diterima karena dilakukan dalam sebuah proses yang tepat atau konstitusional. Bagi kebanyakan kader, proses tersebut bukanlah ajang untuk unjuk kuasa karena ada sebuah mekanisme yang harus dipatuhi oleh para pelaksananya.

Di tingkat lokal, kasus Saleh Matapermana memperlihatkan proses serupa. Pemecatan kepadanya dilakukan karena Saleh melakukan tindakan melawan kebijakan partai dengan membuat kebijakan personal untuk mendukung Badrul Kamal, *incumbent* walikota, dan juga mencalonkan diri sebagai wakil walikota untuk Badrul. Padahal, partai telah memutuskan untuk mendukung Dr. Nurmahmudi Ismail, Presiden PK Periode 1998–2000.[45] Menghadapi situasi ini, partai melakukan pendekatan personal menanyakan kebijakan itu dan meminta agar Saleh menarik keputusannya. Saleh ternyata bersikukuh

---

[43] Wawancara dengan Sitaresmi S, M.Psi., anggota Departemen Dakwah DPP PK (2000–2003), di Jakarta, 8 Oktober 2010.

[44] *http://www.pk-sejahtera.org/content/saksi-pks-bacakan-surat-pemecatan-yusuf-supendi*

[45] Amri Yusra, *Mekanisme Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah: Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera dalam Pilkada Depok 2005*, Tesis, (Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2006), 140.

untuk tetap mendukung Badrul Kamal. Karena sikapnya ini, DPD Depok meminta Dewan Syariah Daerah untuk dapat menyelesaikan persoalan ini. Saleh kemudian dihadapkan pada Dewan Syariah Daerah untuk mempertanggungjawabkan sikapnya. Setelah tidak juga ada perubahan sikap, DPD Kota Depok memberikan surat peringatan hingga tiga kali. Namun karena tetap diabaikan, DPD meminta fatwa Dewan Syariah Wilayah Jawa Barat untuk memutuskan persoalan ini. Setelah melakukan investigasi, Dewan Syariah Wilayah akhirnya mengeluarkan rekomendasi pemecatan terhadap Saleh Matapermana.[46]

Dari situasi di atas dapat terlihat bahwa proses pelaksanaan peradilan di PKS melibatkan Dewan Syariah sebagai badan yang memiliki otoritas sah untuk melakukannya. Dapat terlihat pula peran terbatas, baik Majelis Syura, presiden partai, maupun pimpinan tinggi partai lainnya dalam proses peradilan. Secara umum, situasi ini tidak saja mampu menutup celah perdebatan yang dapat menyebabkan persoalan menjadi berlarut-larut karena dilakukan oleh sebuah lembaga yang otoritatif dan disiapkan untuk menangani peradilan internal, namun menimbulkan pula rasa percaya kader partai, bahwa partai telah berperilaku secara konstitusional. Atmosfer ini pada akhirnya menjadi kondisi yang kondusif untuk hadirnya resolusi konflik sejak dini.

Selain sebagai media peradilan, Dewan Syariah juga berperan sebagai media islah. Dewan Syariah memiliki peran khusus untuk mempertemukan perbedaan pendapat yang ada di antara kader. Dalam hal ini, tentu saja Dewan Syariah harus mendengarkan pandangan-pandangan yang berbeda itu. Selain mendengar, menurut Ahmad Firman, dalam forum islah itu, Dewan Syariah akan menetapkan apa saja yang harus dilakukan oleh pihak tertentu agar islah dapat dilakukan. Pihak yang dinyatakan bersalah harus bersedia menjalani hukuman, termasuk misalnya sekadar mengakui kesalahannya. Di sisi

[46] Wawancara dengan Dr. Prihandoko, Ketua DPD PKS Depok (2004–2007) di Depok, 5 Oktober 2010.

lain, pihak yang benar harus bersedia memafkan dan menyatakan dengan ikhlas berakhirnya konflik di antara mereka.[47]

Selain Dewan Syariah, BPDO juga memiliki tugas peradilan yang situasinya sedikit banyak sama dengan Dewan Syariah. Setelah tahun 2005, setiap kader yang telah dianggap melakukan tindakan indisipliner dalam menjalankan kewajibannya ataupun menjalankan putusan partai dihadapkan pada badan ini.[48] BPDO bekerja berdasarkan pengaduan yang disampaikan oleh Majelis Syura atau dewan pengurus partai di semua level.

Mekanisme yang berlangsung di badan ini adalah sebagai berikut. Setelah menerima laporan dari Majelis Syura atau dewan pengurus, atas kasus yang melibatkan seorang kader karena sebuah kasus indisipliner dan masalah-masalah terkait lainnya, BPDO akan menyelenggarakan sebuah pertemuan resmi yang melibatkan BPDO, pengadu, dan kader yang teradu atau tertuduh. Pertemuan ini pada prinsipnya adalah untuk mengonfirmasi semua informasi dan temuan, termasuk tuduhan-tuduhan adanya pelanggaran. Melalui pertemuan ini, BPDO akan memastikan bahwa berbagai tuduhan itu benar adanya, termasuk alasan-alasan di balik terjadinya pelanggaran. Setelah segalanya menjadi jelas, BPDO akan memutuskan status kader tertuduh itu dan memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Dalam hal ini, BDPO berperan sebagai *arbitrator* yang memutuskan masa depan kader.

---

[47] Wawancara dengan Ahmad Feri Firman Yusuf, Ketua Wilayah Dakwah III (2002–2005), anggota Majelis Syura PKS (2002–2010), di Jakarta, 2 November 2010

[48] Wawancara dengan Aus Hidayat Nur, Ketua Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktober 2010; dengan Selamat Nurdin, M.M., mantan pemimpin aktivis tarbiyah di Universitas Indonesia, anggota Dewan Provinsi DKI Jakarta (2004–20014), di Jakarta, 22 Oktober 2010; dengan Sitaresmi S., M.Psi., anggota Departemen Dakwah DPP PK (2000–2003), di Jakarta, 8 Oktober 2010; dengan Umar Salim Basalamah, Wakil Sekretaris Jenderal PKS (2002), dan sekretaris pribadi Hidayat Nur Wahid (mantan Presiden PKS dan Ketua MPR RI), di Jakarta, 12 Oktober 2010; dengan Ahmad Feri Firman Yusuf, Ketua Wilayah Dakwah III (2002–2005), anggota Majelis Syura PKS (2002–2010), di Jakarta, 2 November 2010.

Persoalan yang dihadapi oleh BPDO cukup beragam, mulai dari soal pelanggaran komitmen terhadap aturan main partai hingga pelanggaran komitmen dalam persoalan jabatan publik. BPDO kerap menjatuhkan sanksi pada kader yang memberikan dukungan politik yang sifatnya melanggar ketetapan partai, atau mereka yang kemudian terbukti melanggar perjanjian politik yang telah dibuatnya dengan partai.[49]

Kasus pemecatan Alwi Sahlan dapat memberikan ilustrasi atas peran BPDO ini. Sahlan adalah seorang kader ahli yang juga tokoh publik lokal terkenal. Namanya mencuat ketika dia menentang kebijakan partai dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan. Sahlan yang saat itu menduduki posisi sebagai Wakil Wali kota Banjarmasin mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Kalimatan Selatan di pilkada. Menurut Aus Hidayat Nur, Ketua BPDO yang menyidangkan kasusnya, Sahlan berpendapat bahwa sebagai kader senior yang telah membantu pendirian PKS di Provinsi Kalimantan Selatan, dia pantas dipromosikan partai untuk memegang jabatan gubernur. Dengan kata lain, ini merupakan sebuah kompensasi yang lumrah bagi seorang kader sepertinya. Namun, partai memiliki perhitungan tersendiri. Partai tidak hanya menolak argumen senioritas sebagai landasan untuk menduduki sebuah jabatan, tetapi juga tidak begitu terkesan dengan kinerjanya sebagai Wakil Wali kota Banjarmasin. Atas dasar itulah, PKS kemudian memutuskan memilih tokoh lain untuk dicalonkan di dalam pilkada tersebut karena menurut partai, performa orang itu jauh lebih mumpuni dan menjanjikan.

Akan tetapi, Sahlan tetap bersikukuh untuk maju di pilkada tersebut. Dia mengabaikan berbagai pendekatan dari DPW yang berupaya memberi pengertian kepadanya. Sahlan juga mengabaikan

---

[49] Wawancara dengan Aus Hidayat Nur, Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi DPP PKS, di Jakarta, 15 Oktober 2010; dengan Sitaresmi, anggota Badan Kaderisasi DPP PKS, di Jakarta, 8 Oktober 2010; dengan Ahmad Feri Firman, anggota Majelis Syura PKS (2002–2010), di Jakarta, 2 November 2010.

upaya informal Presiden PKS Tifatul Sembiring yang telah mengajaknya bertukar pikiran untuk mengikuti kebijakan partai.[50]

Terkait dengan sikap keras ini, partai memerintahkan BPDO untuk menangani kasus Sahlan.[51] Setelah mengadakan sejumlah pertemuan untuk mengonfrontasi temuan dan tuduhan, BPDO kemudian memutuskan meminta Sahlan untuk keluar dari partai. Keputusan ini diambil karena dirinya terbukti tidak lagi dapat taat dengan kebijakan partai. Sahlan pun menyetujui keputusan ini.[52] Dalam kasus Sahlan ini, peran BPDO tidak hanya menghentikan masalah dengan segera dan menghilangkan potensi terjadinya klik atau faksionalisasi internal, tetapi juga membantu partai menjaga kepercayaan kader dengan mencegah adanya nuansa favoritisme terkait dengan alasan senioritas dan telah berbuat banyak.

Secara umum peran BPDO di dalam pengelolaan konflik serupa dengan Dewan Syariah, yaitu mencegah partai dari eskalasi potensi konflik yang disebabkan, baik karena perlakuan tidak adil maupun rendahnya kepercayaan pada partai. Fungsi pencegahan dilakukan dengan melakukan investigasi dan mengundang anggota yang terlibat untuk membahas sebuah kasus secara komprehensif sebelum membuat kesimpulan. Keberadaan kedua badan itu juga untuk menghindari keputusan pemecatan secara mendadak. Dengan keberadaan unsur-unsur sedemikian dalam partai, para kader meyakini bahwa diri mereka terlindungi dari ancaman keputusan sepihak.

Menurut Umar Basalamah, tidak ada keputusan secara sepihak tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.[53] Di dalam mekanisme ini,

---

[50] "Sanksi Alwi tergantung DPP PKS", *http://sijaka.wordpress.com/2010/02/12/sanksi-alwitergantung-dpp-pks/*.

[51] Wawancara dengan Aus Hidayat Nur, Ketua Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktober 2010.

[52] Wawancara dengan Aus Hidayat Nur, Ketua Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktober 2010.

[53] Wawancara dengan Umar Salim Basalamah, Wakil Sekretaris Jenderal PKS (2002), dan sekretaris pribadi Hidayat Nur Wahid (mantan Presiden PKS dan Ketua MPR RI), di Jakarta, 12 Oktober 2010.

kader menurut AD/ART juga harus mendapatkan perlindungan dari keputusan sepihak Dewan Syariah. Hal ini berarti memberikan kesempatan bagi partai dan kader untuk didengar dan untuk mendapatkan pendapat atau masukan. Menurut Mahmudi, hak pembelaan diri secara komprehensif "telah dipahami oleh kader secara meluas".[54]

3. Kasus Khusus: Pencegahan Konflik di Tingkat Nasional

Sementara itu, untuk menangani potensi konflik dalam proses pembuatan kebijakan di level nasional, lembaga yang memiliki kewenangan adalah Majelis Syura. Dalam persoalan ini, Majelis Syura menerapkan sebuah mekanisme yang diperuntukkan bagi terciptanya keputusan atas dasar kesepakatan bersama. Dengan kata lain, partai melalui Majelis Syura memberikan kesempatan yang proporsional bagi semua pihak untuk didengarkan pendapatnya. Hal ini agar kesan diskriminatif dan sewenang-wenang dapat dihindari dalam proses tersebut. Untuk itu, tidak jarang proses pengambilan keputusan dalam forum-forum Musyawarah Majelis Syura menjadi demikian alot. Dalam beberapa kasus, *voting* menjadi tak terelakkan.

Mengingat hakikat CRM adalah mencari sebuah *win-win solution* atas dasar kepentingan bersama, mekanisme musyawarah adalah contoh bagi penerapan CRM untuk menjembatani perbedaan pandangan. Beberapa kasus sepanjang satu dekade keberadaan partai ini memperlihatkan peran Majelis Syura dalam menjembatani perbedaan, memutuskan kebijakan yang dapat diterima seluruh pihak, dan mengakhiri potensi konflik di tubuh partai.

Pada kasus Pemilihan Presiden 2004, persoalan tentang siapa kandidat yang terbaik untuk partai adalah sumber utama potensi konflik. Ada dua kubu di sini, yakni pendukung Amien Rais dan

---

[54] Wawancara dengan Dr. Yon Mahmudi, Pengamat PKS dan Gerakan Tarbiyah di Indonesia, Dosen di Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dan salah satu kader yang menandatangani deklarasi pendirian PKS, di Depok, 6 Oktober 2010.

Wiranto. Mereka yang menolak Amien beralasan bahwa meski dirinya adalah sosok yang populer di kalangan kelompok Islam, namun secara umum prospek keterpilihannya tidak cerah.[55] Sementara itu, bagi yang mendukung, mereka melihat peran besar Amien dalam proses reformasi di samping posisinya sebagai salah satu tokoh Islam.[56] Perbedaan pandangan ini diselesaikan dengan sebuah proses musyawarah yang panjang selama sekitar dua hari.[57] Panjangnya waktu menunjukkan adanya sebuah kesempatan yang luas bagi peserta rapat untuk menyampaikan pandangan dan argumentasinya. Setelah melalui dialog panjang, forum MMS akhirnya memutuskan bahwa partai mendukung Amien Rais sebagai kandidat presiden. Keputusan itu diambil melalui *voting* karena tidak ditemukannya kata mufakat.

Dalam kasus pengurangan subsidi BBM, sejumlah elite Jakarta termasuk Sekretaris Jenderal Anis Matta,[58] dengan didukung sejumlah pengurus lokal, mengajukan opsi untuk meninggalkan koalisi. Opsi ini diajukan sejalan dengan sentimen negatif terhadap pihak pemerintah yang dianggap tidak sensitif lagi terhadap aspirasi rakyat. Opsi ini juga dikaitkan dengan kegagalan pemerintah untuk memenuhi janjinya kepada PKS. Perlu diketahui bahwa sebelum sepakat bergabung dengan koalisi, Presiden Yudhoyono setuju untuk melaksanakan lima poin agar mendapatkan dukungan PKS. Poin kesepakatan itu adalah (1) membangun pemerintahan yang bersih, peduli, dan profesional, (2) melindungi keberadaan Negara Kesatuan Republik

---

[55] Wawancara dengan Ahmad Feri Firman Yusuf, Ketua Wilayah Dakwah III (2002–2005), anggota Majelis Syura PKS (2002–2010), di Jakarta, 2 November 2010; Wawancara dengan Aus Hidayat Nur, Ketua Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktober 2010.

[56] Wawancara dengan Ahmad Feri Firman Yusuf, Ketua Wilayah Dakwah III (2002–2005), anggota Majelis Syura PKS (2002–2010), di Jakarta, 2 November 2010; Wawancara dengan Aus Hidayat Nur, Ketua Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktober 2010.

[57] Wawancara dengan Mahfudz Siddiq, Ketua Departemen Kaderisasi DPP PKS (2002–2005) dan anggota DPR RI (2004–2014), di Jakarta, 27 Oktober 2010.

[58] Tentang pendapat Matta tentang opsi keluar koalisi lihat "Tak Ada Koalisi Tanpa Perubahan", *Saksi*, No. 6/VIII/30 November 2005, 7–9.

Indonesia dari intervensi asing, (3) menghindari pendirian negara militer, (4) melakukan penegakan hukum dan HAM, (5) mendukung perjuangan Kemerdekaan Palestina, dan 6) tidak akan membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Mereka yang menolak kelanjutan koalisi dengan Yudhoyono membangun argumennya dengan merujuk poin pertama, mengenai kebijakan BBM pemerintah yang telah bertentangan dengan janji untuk membangun pemerintahan yang peduli.

Namun, sejumlah kader lain menentang gagasan ini. Bagi mereka keputusan untuk mengurangi subsidi BBM, sebagai alasan keluar dari koalisi, secara rasional tidak dapat dihindari oleh pemerintah mengingat situasi finansial nasional. Tetap diberikannya subsidi akan memicu kebangkrutan negara. Selain itu, kubu ini berkeyakinan bahwa meninggalkan pemerintah di dalam situasi ini bukanlah keputusan yang bijak dan pada gilirannya akan juga membatasi ruang partai untuk melanjutkan memberikan kontribusi signifikan terhadap negara dan masyarakat. Oleh karena itu, tindakan yang harus diambil oleh PKS adalah meningkatkan kualitas koalisi dan bukan meninggalkannya.[59]

Perbedaan pandangan ini sempat mengguncang kader-kader di akar rumput dan meningkatkan potensi konflik. Namun, partai melalui MS bergerak cepat untuk merespons perkembangan yang tidak menguntungkan ini. Menyadari bahwa persoalan ini terkait dengan sebuah kebijakan strategis yang bersifat nasional yang merupakan domain kewenangannya, Majelis Syura kembali melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan. Dan setelah melalui mekanisme konsultasi yang berlangsung cukup panjang, akhirnya Majelis Syura memutuskan untuk tetap berada di dalam koalisi.[60] Hasil keputusan itu disosialisasikan melalui seluruh jaringan, dan segenap ketegangan dan perselisihan itu pun berakhir.

---

[59] *http://www.suaramerdeka.com/harian/0511/28/nas03.htm*

[60] *http://www.suaramerdeka.com/harian/0511/28/nas03.htm*

Majelis Syura juga berperan dalam menengahi perdebatan seputar wacana partai terbuka. Lembaga ini berperan terutama mengurangi potensi konflik dengan menunda implementasinya dan memandangnya sekadar sebagai sebuah wacana.[61] Walaupun wacana ini dianggap oleh sejumlah figur di partai ini sebagai sesuatu yang tak terelakkan, terutama guna mendapatkan dukungan rakyat yang lebih luas, partai melihat bahwa bagi sejumlah kader, gagasan itu masih terlalu kontroversial untuk dilaksanakan.[62] Hadirnya wacana ini sendiri merupakan salah satu masalah yang paling rumit di dalam sejarah partai.

Sejumlah kader menganggap hal ini sebagai sesuatu yang berpotensi mereduksi karakter PKS sebagai sebuah partai Islam. Di sisi lain, sejumlah kader tidak melihatnya sebagai sebuah persoalan bagi jati diri partai. Menurut kelompok ini, Islam bukanlah agama eksklusif yang melarang umatnya untuk berpikir terbuka (*open-minded*) dan melakukan hubungan inklusif dengan kelompok lain.[63] Apalagi dakwah sendiri menghendaki sikap *open-minded* dalam upaya penyebarluasannya. Perbedaan pandangan yang cukup prinsipil ini telah menimbulkan kembali ketegangan dan kegelisahan di antara kader. Namun sekali lagi, Majelis Syura segera mengambil peran dalam upaya meredam ketegangan sekaligus menempatkan persoalan ini pada kedudukan yang tepat. Setelah melakukan kajian yang lebih mendalam, Majelis Syura memutuskan untuk membahas lagi wacana ini hingga mayoritas kader memiliki perspektif yang sama

---

[61] Lihat *Bayan PKS*, 6 Februari 2008.

[62] Wawancara dengan Amri Yusra, M.Si., Ketua DPD PKS Depok (2002–2004), anggota Dewan Kota Madya Depok, Jawa Barat, (2004–2009), dan Dosen di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, di Depok, melalui telepon 13 Desember 2009.

[63] Lihat *www.munaspks2010.org*. Lihat wawancara R. Ferdian Andi R. dengan Ketua MS Hilmi Aminuddin dalam "Partai Terbuka Bukan Strategi PKS", *www.inilah.com*. Wawancara dengan Dr. Yon Mahmudi, Pengamat PKS dan Gerakan Tarbiyah di Indonesia, Dosen di Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dan salah satu kader yang menandatangani deklarasi pendirian PKS, di Depok, 6 Oktober 2010.

Sumber: AD/ART PKS dan Wawancara
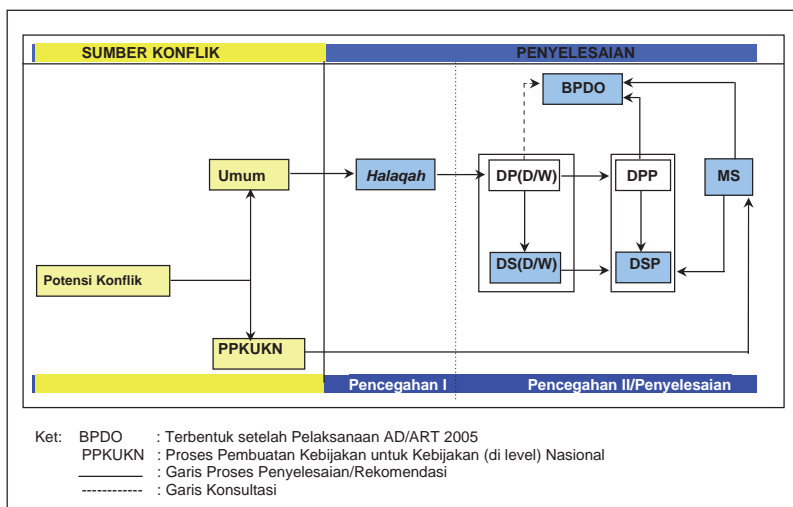
Gambar 8.1 Mekanisme Resolusi Konflik PKS

dan hal tersebut telah menyelamatkan partai dari perselisihan yang berkepanjangan.[64]

Beberapa kasus di atas menunjukkan bahwa semua institusi itu bergerak secara simultan dalam menjaga partai dari berkembangnya potensi konflik. Dewan Syariah, BPDO, dan *halaqah* menjadi semacam triumvirat[65] yang menyelesaikan persoalan terkait dengan konflik dan penyelesaiannya. Adapun Majelis Syura karena sifat kelembagaannya yang lebih terkait dengan proses penetapan kebijakan eksternal partai dan bergerak pada level elite maka peran yang dimainkannya lebih pada kasus-kasus besar tertentu, terutama dalam penetapan kebijakan partai dalam merespons perkembangan politik nasional. Kasus-kasus di atas juga menunjukkan bahwa aspirasi setiap pihak

[64] Akan tetapi, dalam Forum Musyawarah Nasional tahun 2010 yang diselenggarakan di Jakarta, PKS memutuskan melaksanakan gagasan partai Islam terbuka. Lihat dalam *http://munaspks.info/*

[65] Wawancara dengan Sitaresmi S.,M.Psi., anggota Departemen *Dakwah* DPP PK (2000–2003), di Jakarta, 8 Oktober 2010.

yang berbeda pandangan diberi kesempatan sama untuk disuarakan dan dimusyawarahkan melalui unsur-unsur CRM sehingga potensi konflik dapat dihindari sejak dini. Hal ini sejalan dengan pandangan James H. Laue yang mengatakan:

> Ketika mekanisme resolusi konflik bekerja dengan baik, seluruh pihak memiliki keterwakilan yang memadai di forum dan dapat menciptakan *win-win solution* … memberi kontribusi terhadap kemampuan sistem untuk menyelesaikan konflik-konflik lain manakala timbul ke permukaan.[66]

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa segala sesuatu telah berjalan baik. Pada kenyataannya, partai tidak dapat sepenuhnya berhasil membangun sikap yang benar-benar profesional. Berlarut-larutnya penyelesaian kasus Yusuf Supendi, misalnya, merupakan sebuah contoh kegagalan peradilan internal untuk sepenuhnya dapat bersikap independen atau impersonal. Proses panjang di dalam memutuskan masa depan Yusuf Supendi terutama disebabkan hubungannya yang sangat dekat dengan Hilmi Aminuddin. Selain itu, fakta bahwa dia adalah tokoh senior di Jamaah Tarbiyah dengan posisi terakhir sebagai anggota Dewan Syariah Pusat. Menurut salah satu anggota Majelis Syura, kasus Yusuf Supendi adalah satu kasus yang rumit yang menunjukkan ketidakmampuan Dewan Syariah Pusat untuk dapat benar-benar menjalankan perannya secara normal.[67] Walaupun partai pada akhirnya memecat Yusuf terutama karena sikap kerasnya atas keharusan pemecatan Hilmi Aminuddin dan Anis Matta dari partai, kasus ini memperlihatkan bahwa kecanggungan tidak sepenuhnya dapat dihindari.

---

[66] James H. Laue, "The Emergence and Institutionalisation of Third-party Roles in Conflict", dalam John Burton and Frank Dukes, *Conflict: Readings in Management and Resolution*, (Hampshire: Macmillan, 1990), 258.

[67] Wawancara dengan Ahmad Feri Firman Yusuf, Ketua Wilayah Dakwah III (2002–2005), anggota Majelis Syura PKS (2002–2010), di Jakarta, 2 November 2010.

C. Situasi Internal

Terbentuknya jaring pengaman bagi potensi konflik menjadi salah satu hasil signifikan dari bekerjanya elemen-elemen CRM. Dengan kata lain, kemampuan untuk mereduksi potensi konflik adalah hasil dari kemampuan partai mendeteksi potensi konflik dan melokalisasinya sejak dini, melalui perangkat-perangkat seperti *halaqah*, Dewan Syariah, dan BPDO serta Majelis Syura. Pembahasan di bawah ini akan mengkaji berbagai dampak yang ditimbulkan dari bekerjanya elemen-elemen CRM di tubuh partai.

1. Kemampuan untuk Mendeteksi dan Merespons Potensi Konflik

Peran penting lembaga-lembaga itu bagi PKS adalah menghadirkan kemampuan untuk melakukan deteksi potensi konflik sejak dini. Kemampuan mendeteksi ini terkait dengan kenyataan begitu dekatnya keberadaan elemen-elemen CRM itu—baik elemen utama Dewan Syariah maupun elemen penunjang BPDO dan *halaqah*—dengan hampir seluruh persoalan kehidupan keseharian partai dan kader. Situasi *omnipresent* itu terlihat baik, dalam masalah yang bersifat individu maupun masalah organisasi, soal hubungan dalam keluarga dan masalah finansial hingga perbedaan pandangan dan perdebatan strategi, masalah pemecatan hingga masalah pembuatan kebijakan nasional, masalah akhlak, hingga masalah komitmen dan disiplin kader. Dengan cakupan yang cukup luas itu, hampir semua masalah yang terkait dengan masalah potensi konflik dan konflik itu sendiri menjadi mungkin untuk terbahas dan pada akhirnya mendapatkan saluran dan kanalisasi penyelesaiannya. Dapat dikatakan dengan bekerjanya lembaga-lembaga tersebut, partai memiliki 'radar organisasional' yang dapat diandalkan.

Selain dari daya jangkau persoalan yang dicakupnya, kewenangan dan karakteristik yang dimiliki oleh lembaga-lembaga itu menyebabkan PKS dapat memantau perkembangan konflik sejak masa embrionya untuk kemudian melakukan respons secara tepat. Keberadaan *halaqah* sebagai institusi yang harus dilakoni oleh kader menjadi medium

pertama yang memainkan peran CRM. Unit terkecil ini merupakan institusi yang dapat merasakan denyut nadi perkembangan pemikiran dan sikap para kader secara langsung.

Jaring-jaring komunikasi yang terbangun di antara guru dan murid atau sesama kader telah menyebabkan tersalurkannya berbagai ekspresi dan perasaan seorang kader, termasuk kekecewaan ataupun harapan yang dimiliki sehingga jaring-jaring partai secara tidak langsung dapat menangkap kegelisahan yang ada.

Dari karakteristik dan kewenangan *halaqah* sebagai sarana pembinaan secara intensif kepada kader, institusi ini menjadi sarana yang cukup efektif untuk membahas dan mendeteksi potensi konflik. Jika potensi konflik atau perpecahan itu merujuk pada seorang kader, *halaqah* dapat menjadi media pertama yang menyelesaikannya, baik secara langsung maupun mengusulkan untuk membawa penyelesaiannya kepada lembaga-lembaga formal, seperti Dewan Syariah atau BPDO.

Jika pada level *halaqah* potensi konflik dapat diselesaikan secara kekeluargaan, pada level Dewan Syariah potensi konflik itu telah jauh lebih besar, serius, dan bersifat formal. Pada level formal ini, Dewan Syariah menjadi alat pendeteksi dini atas potensi konflik, baik di antara sesama kader maupun antara kader dan elite partai. Kemampuan mendeteksi ini terkait dengan keberadaannya di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Dengan persebaran ini, partai memiliki kemampuan untuk meraba dan merasakan denyut perkembangan potensi konflik yang luas.

Adanya Dewan Syariah hingga level daerah membantu partai dalam memperoleh sketsa atau gambaran tentang persoalan-persoalan yang berpotensi menyulutkan konflik, melalui laporan rutin yang diberikan oleh lembaga-lembaga itu. Sejauh ini memang tidak terdapat potensi konflik yang sempat mengubah sebuah kebijakan dasar partai secara drastis. Namun, pada level kepengurusan lokal, terdapat kebijakan yang dikembangkan sebagai respons dan bagian dari penanggulangan potensi konflik. Di Kabupaten Tangerang

misalnya, setelah dipahami potensi konflik atau keresahan internal disebabkan kesulitan ekonomi, partai memutuskan untuk membantu meringankan persoalan itu dengan memberikan fasilitas yang menunjang perekonomian seorang kader.[68]

Dalam konteks BPDO meskipun tidak berkaitan langsung, lembaga ini dapat pula memperkuat upaya mendapatkan gambaran situasi yang ada. Hal ini karena pada kenyataannya, BPDO juga kerap menjadi tempat pengaduan informal pada soal-soal tertentu dan menjadi tempat konsultasi pengurus partai di level lokal dalam menyelesaikan sebuah persoalan.[69] BPDO dapat memainkan peran pelengkap dalam mendeteksi perkembangan konflik. Lebih dari itu, otoritasnya memungkinkan pula BPDO mendeteksi pihak-pihak yang dapat dirasakan membahayakan kelangsungan partai sehingga dapat mengambil langkah tindak lanjut untuk memupus potensi perkembangan konflik.

Berbagai situasi di atas jelas membantu dalam proses CRM yang menuntut pemahaman akan akar persoalan dan sebuah respons yang cepat untuk menghindari eskalasi.[70] Semangat untuk mau mendengar menjadi poin lain. Menurut Hidayat, dengan didengarkannya keluhan maka persoalan yang terkait dengan potensi konflik dan pencarian solusinya pun telah mulai terbahas sehingga penyelesaian konflik dapat dianggap sudah selesai setengahnya.[71] Situasi ini sejalan dengan makna pencegahan konflik, di mana perasaan bahwa dirinya telah didengar merupakan suatu hal yang kondusif bagi pencegahan terjadinya eskalasi konflik.

---

[68] Wawancara dengan Hidayat, M.M., anggota DPRD Kabupaten Tangerang (2005–2010), di Tangerang, 21 Oktober 2010.

[69] Wawancara dengan Aus Hidayat Nur, Ketua Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktober 2010.

[70] Hugh Mial, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse (eds.), *Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts,* (Cambridge: Polity Press-Blackwell Publishers Ltd, 1999), h.21.

[71] Wawancara dengan Hidayat, M.M., anggota DPRD Kabupaten Tangerang (2005–2010), di Tangerang, 21 Oktober 2010.

Peran lembaga arbiter, peradilan, dan islah yang dijalankan oleh lembaga-lembaga ini sangat membantu partai untuk melakukan pemantauan yang pada akhirnya pula memiliki kesempatan untuk memformulasikan penyelesaian dengan lebih dini untuk mencegah perluasan potensi konflik secara komprehensif dan berkeadilan. Lebih dari itu dengan adanya deteksi dini yang terpenting adalah menyebabkan respons partai dapat pula dirasakan dengan segera. Kanalisasi persoalan potensi konflik, sebagai salah satu titik krusial penyelesaian konflik, relatif berjalan sehingga potensi konflik tereduksi pada titik aman. Kegagalan sebuah organisasi dalam merespons perkembangan potensi konflik biasanya disebabkan ketidakmampuan dalam melakukan deteksi dini potensi konflik. Konflik menjadi terus tersuburkan dan membesar hingga lebih sulit ditanggulangi.

2. Kemampuan untuk Melokalisasi Konflik

Adanya badan-badan peradilan dengan wilayah dan level kerja yang beragam menyebabkan partai pada akhirnya memiliki jaring-jaring penyelesaian potensi konflik yang relatif lebih lengkap dan beragam. Spesialisasi dan spesifikasi, dalam sebuah gugus aturan main dan kesadaran yang sama dan terstandardisasi, memberikan peluang besar bagi upaya lokalisasi konflik secara lebih efektif dan terbuka. Keragaman itu terutama disebabkan oleh pembagian tugas lembaga-lembaga yang mencakup persoalan tema atau isu konflik (aspek horizontal) dan wilayah kerja (vertikal).

Pada aspek horizontal, hal itu dapat terlihat dalam konteks penanganan konflik di level lanjutan yang meliputi pembagian penanganan yang bersifat (1) moralitas, etika, dan hal-hal lain yang terkait dengan soal syariat yang ditangani oleh Dewan Syariah, (2) hal-hal yang bersifat kedisiplinan dan kepatuhan menjalankan perintah partai (terutama setelah AD/ART 2005 diberlakukan) yang ditangani oleh BPDO, dan (3) masalah yang terkait dengan proses pembuatan kebijakan nasional, yang merupakan wilayah kewenangan Majelis Syura. Dari ketiga segmen pembagian ini, masing-masing

potensi konflik dapat ditempatkan pada duduk persoalannya untuk kemudian mendapatkan perlakuan yang sepadan dan dibutuhkan.

Pembagian tugas semacam itu yang dipahami oleh seluruh elemen partai juga tidak saja menyebabkan pengambilan kebijakan menjadi lebih tepat sasaran, namun juga akhirnya membebaskan partai dari ketergantungan pada sebuah badan ataupun pada seseorang. Atas dasar inilah, tidak ditemukan adanya tokoh sentral atau kelompok tertentu yang dapat memutuskan semua persoalan konflik sendirian dan sepihak.

Sementara itu, dalam soal pembagian tugas vertikal, yang semakin tampak nyata dengan adanya AD/ART 2005, hal ini dapat dilihat dari adanya kepengurusan Dewan Syariah hingga level kabupaten. Adanya pembagian ini memungkinkan sebuah potensi konflik ditangani segera pada gugus atau level di mana konflik itu terjadi. Berkembangnya Dewan Syariah, dari hanya dua Dewan Syariah Pusat dan Dewan Syariah Wilayah menjadi tiga dengan adanya Dewan Syariah Daerah pada tahun 2005, menunjukkan keinginan partai untuk lebih responsif dalam menghadapi potensi konflik dan dapat memadamkan potensi itu sesegera mungkin pada level lokal.

Kemampuan partai untuk memfungsikan peran Dewan Syariah hingga pada level lokal membantu partai menghindari 'penyebaran otoritas' yang liar, yang dapat menetapkan berbagai alternatif keputusan dan menyebabkan kebingungan. Sifat pemberian tugas kepada Dewan Syariah lokal berupa pendelegasian resmi dalam sebuah pengawasan yang tersentralisasi. Selain itu, adanya pendelegasian fungsi hingga level Dewan Syariah Wilayah dan Dewan Syariah Daerah tidak saja membantu Dewan Syariah Pusat dalam menjalankan tugas sebagai sebuah institusi peradilan secara lebih cepat, namun juga yang terpenting membantu melokalisasi potensi konflik.

Adanya wilayah-wilayah penyelesaian dengan badan-badan yang relevan menyebabkan potensi konflik mengalami isolasi dengan baik dan sulit untuk membesar. Adanya respons dan penanganan yang segera oleh badan yang kompeten dan sesuai akan mencegah

terjadinya penguatan 'solidaritas destruktif' dalam tubuh partai. Dalam kondisi ini potensi konflik dapat segera mendapatkan respons, segenap kegelisahan dan keraguan dapat tertangani dengan lebih efektif dan tidak mengalami pembiaran yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan tertentu untuk merusak kesolidan partai. Penanganan segera soal Yusuf Supendi, Saleh Matapermana, Alwi Sahlan, atau mereka yang tidak puas akan kebijakan partai di level lokal menyebabkan potensi konflik dapat segera terlokalisasi di sebuah wilayah saja. Kasus itu tidak meluas sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk membuat kelompok separatis atau solidaritas dalam tubuh partai.

Fenomena Forum Kader Peduli (FKP) memang memperlihatkan adanya sebuah dinamika penguatan solidaritas perlawanan yang mendapat dukungan. Kelompok yang dipimpin secara informal oleh sejumlah mantan tokoh terkemuka Jamaah Tarbiyah dan partai seperti Mashadi memang cukup menarik perhatian sejumlah kader terutama dari Provinsi Jakarta.

Dalam menghadapi FKP, PKS pada umumnya tidak mengembangkan perlakuan atau kebijakan khusus. Bahkan PKS melihat keberadaan komunitas ini sebagai bagian otokritik agar lebih konsisten di dalam perjuangan atas idealisme partai.[72] Dari sana, potensi konflik kemudian dilokalisasi semata sebagai perbedaan pendapat. Pada akhirnya, kehadiran FKP tidak menciptakan situasi yang luar biasa apalagi konflik berkepanjangan. Partai dapat mengontrol situasi ini dan kader-kader partai tetap dapat secara personal membangun hubungan baik dengan simpatisan FKP.

D. Dampak: Terpeliharanya Soliditas Partai

Dalam perjalanan partai ini, adanya kekecewaan yang mendalam tidak dengan mudahnya mendorong kader untuk melakukan tindakan destruktif, dengan misalnya mengundang pihak ketiga atau

[72] Wawancara dengan Dr. Prihandoko, Ketua DPD PKS Depok (2004–2007) di Depok, 5 Oktober 2010.

pengadilan untuk mengintervensi upaya penyelesaian konflik internal. Kasus Yusuf Supendi menjadi salah satu bentuk pengecualian. Itu pun dia lakukan setelah sebuah proses yang cukup panjang dan terlaksana manakala statusnya bukan lagi kader partai.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa bagi sebagian besar kader, keputusan-keputusan partai sebenarnya dapat dipahami dan dapat diterima atau setidaknya bukan sesuatu yang sepenuhnya bertentangan dengan aturan main partai. Dalam atmosfer seperti ini, partai dapat menjaga otonomi atau kemandiriannya dalam membuat berbagai keputusan, termasuk yang terkait dengan upaya-upaya pencegahan dan penyelesaian konflik. Partai dapat menghindari diterapkannya keputusan kontroversial dari pihak ketiga yang justru dapat memicu munculnya kontroversi baru atau dapat memperpanjang konflik.

Hal lain yang menyebabkan PKS mampu membangun soliditasnya adalah karena peradilan internal dan badan arbitrase tidak dibangun dan dijalankan untuk melindungi orang atau kelompok tertentu. Berbagai institusi itu dibuat sejalan dengan kepentingan partai untuk dapat menghentikan eskalasi konflik sejak dini dan bukan melayani kepentingan elite. Fungsi CRM yang pada umumnya dijalankan secara efektif memupuk rasa percaya kader atas keandalan sistem yang ada di partai ini. Kepercayaan ini misalnya tecermin dari tidak adanya upaya-upaya mencari mekanisme alternatif untuk menggantikan yang telah ada. Sebaliknya, bagi sebagian besar kader, konsistensi elemen-elemen CRM dalam mengemban tugasnya cukup terlihat nyata di partai.[73] Meski tidak seutuhnya sempurna, Dewan

[73] Wawancara dengan Dr. Mardani Ali Sera, Wakil Ketua MPP PKS (2010–2015), di Jakarta, 6 Oktober 2010; dengan Dr. Prihandoko, Ketua DPD PKS Depok (2004–2007) di Depok, 5 Oktober 2010; dengan Hidayat, M.M., anggota DPRD Kabupaten Tangerang (2005–2010), di Tangerang, 21 Oktober 2010; Wawancara dengan Mahfudz Siddiq, Ketua Departemen Kaderisasi DPP PKS (2002–2005) dan anggota DPR RI (2004–2014), di Jakarta, 27 Oktober 2010; Wawancara dengan Mustofa, kader PKS dan mantan wartawan Majalah Profetik, di Depok, 7 Oktober 2010; dengan Nooryanto, Ketua Departemen Kaderisasi Bekasi DPD PKS, di Bekasi, 7 November 2010; dengan Selamat Nurdin, M.M., mantan pemimpin aktivis tarbiyah di Universitas Indonesia, anggota Dewan Provinsi DKI Jakarta (2004–2014), di Jakarta, 22 Oktober 2010; dengan Untung

Syariah, BPDO, dan Majelis Syura pada umumnya dianggap dapat melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa pandang bulu. Kondisi ini pada akhirnya turut membangun persepsi positif dan rasa percaya kader terhadap perangkat-perangkat partai. Umar Basalamah mengatakan:

> Situasi ini menjaga kepercayaan di antara kader bahwa pemimpin partai atau anggota lain tidak akan memperlakukan mereka secara tidak adil, yang pada akhirnya membantu partai menghindari friksi internal.[74]

Walaupun sejumlah pihak berkeyakinan bahwa di PKS pelaksanaan sistem dilakukan dengan tidak konsisten dan diberlakukan hanya kepada kader di tingkat akar rumput atau mereka yang kritis,[75] mayoritas kader tidak melihat hal itu. Kebanyakan kader masih meyakini bahwa lembaga-lembaga itu tidak ditujukan untuk tujuan yang menyimpang, membela semata kepentingan eksklusif atau personal, apalagi untuk menyingkirkan orang-orang kritis.[76]

Pada kenyataannya pula, selama dekade pertama keberadaannya, Dewan Syariah telah menghukum sejumlah elite partai termasuk Syamsul Balda, wakil presiden pertama partai, dan Yusuf Supendi, salah satu aktivis senior dari generasi awal Jamaah Tarbiyah dan anggota DPR. Dewan Syariah juga telah memanggil sejumlah elite, termasuk Anis Matta, seorang tokoh populer yang juga sekretaris

---

Wahono, Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan DPP PK (2000–2003), Ketua Departemen Politik dan Pertahanan DPP PKS (2002–2005), dan Ketua MPP PKS (2010–2015), di Jakarta 27 Oktober 2010.

[74] Wawancara dengan Umar Salim Basalamah, Wakil Sekretaris Jenderal PKS (2002), dan sekretaris pribadi Hidayat Nur Wahid (mantan Presiden PKS dan Ketua MPR RI), di Jakarta, 12 Oktober 2010.

[75] Wawancara dengan K.H. Yusuf Supendi, Lc., anggota DSP PKS (2000–2005) dan anggota DPR RI FPKS (2004–2009), di Jakarta, 3 November 2010.

[76] Wawancara dengan Dr. Prihandoko, Ketua DPD PKS Depok (2004–2007) di Depok, 5 Oktober 2010; dengan Mustofa, kader PKS dan mantan wartawan Majalah Profetik, di Depok, 7 Oktober 2010; dengan Dr. Yon Mahmudi, Pengamat PKS dan Gerakan Tarbiyah di Indonesia, Dosen di Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dan salah satu kader yang menandatangani deklarasi pendirian PKS, di Depok, 6 Oktober 2010.

jenderal partai untuk menjelaskan perilaku atau pemikirannya yang dianggap tidak sejalan dengan idealisme partai.[77]

Menurut Nurdin, faktanya adalah dengan kehadiran institusi-institusi ini, elite tetap saja tidak dapat memanfaatkannya untuk mengambil keuntungan dari kader.[78] Sejumlah kader kritis yang dianggap secara kolektif dapat membahayakan citra dan kesatuan partai tersingkir dengan menggunakan mekanisme atau prosedur yang berlaku dan dapat diterima oleh kebanyakan kader. Dengan kata lain, partai melalui elemen-elemen CRM memberikan kader fasilitas untuk dilindungi dari diskriminasi sehingga menciptakan kepercayaan dan kepastian.

Lebih dari itu, sulit berkembangnya faksionalisasi juga menjadi mungkin karena partai mampu mendeteksi dan menyingkirkan potensi itu sejak dini. Dalam hal ini, *halaqah* sebagai ujung tombak pembinaan kader memainkan peranan penting. Dengan kemampuannya untuk memengaruhi kader melalui pertemuan intensif dan pendekatan personal, unsur CRM ini memainkan peran sebagai 'filter konflik', sekaligus sebagai pengingat kader tentang pentingnya memegang dan menjaga rasa kebersamaan. Partai juga dapat melokalisasi berbagai isu negatif yang memiliki potensi memicu reaksi yang besar dan membahayakan soliditas partai. Manakala potensi konflik muncul, kader akan melaporkan atau menyampaikannya ke partai melalui *murabbi* atau secara langsung ke struktur partai dengan keyakinan bahwa partai akan menanganinya secara benar.

---

[77] Wawancara dengan Dr. Yon Mahmudi, Pengamat PKS dan Gerakan Tarbiyah di Indonesia, Dosen di Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dan salah satu kader yang menandatangani deklarasi pendirian PKS, di Depok, 6 Oktober 2010; dengan Sitaresmi S., M.Psi., anggota Departemen Dakwah DPP PK (2000–2003), di Jakarta, 8 Oktober 2010; dengan Ahmad Feri Firman Yusuf, Ketua Wilayah Dakwah III (2002–2005), Anggota Majelis Syura PKS (2002–2010), di Jakarta, 2 November 2010.

[78] Wawancara dengan Selamat Nurdin, M.M., mantan pemimpin aktivis tarbiyah di Universitas Indonesia, anggota Dewan Provinsi DKI Jakarta (2004–2014), di Jakarta, 22 Oktober 2010.

Kemudian, kemampuan untuk mereduksi potensi faksionalisasi juga berkaitan dengan fungsi *halaqah* sebagai medium untuk menjelaskan dan menyosialisasikan pertimbangan-pertimbangan, baik ideologis maupun strategis, di balik satu keputusan atau kebijakan. Melalui fungsi ini, partai dapat memberikan penjelasan dan pertimbangan logis kepada kader tentang alasan di balik tindakan dan kebijakannya sehingga dapat mengurangi kecurigaan dan keberatan. Ketegangan antara kader dan partai atau sesama kader terkait dengan isu BBM, misalnya, dapat dikurangi saat *halaqah* memainkan peranannya. Kehadiran dan kerja-kerja *halaqah* di hampir seluruh wilayah di Indonesia pada akhirnya turut membatasi kemungkinan faksionalisasi dan menjaga soliditas partai. Dengan minimnya kemungkinan faksionalisasi permanen terkait dengan rendahnya kecenderungan resistensi, sedikit pula kemungkinan perpecahan terjadi di partai ini.

Hal lain yang turut meniadakan kemungkinan perpecahan internal adalah adanya peluang yang cukup bermakna bagi kader untuk menyuarakan pendapat dan untuk didengar oleh partai. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Hirschman tentang peran kesempatan bersuara di dalam turut menjaga loyalitas. Dewan Syariah, BPDO, Majelis Syura, dan terutama *halaqah* di tingkat praktis, menjadi saluran bagi kader untuk menyuarakan pendapat dan kepentingannya, termasuk menjelaskan keberpihakannya.

Walaupun tidak semuanya berjalan dengan mulus, partai secara umum memberikan akses yang memadai bagi seluruh kader untuk didengar, baik melalui forum resmi maupun informal. Diakomodasinya pendapat kader untuk mendukung Amien Rais meskipun berbeda pandangan dengan beberapa elite utama partai adalah contoh dari situasi ini. Kemudian, munculnya opini atau pandangan sejumlah kader agar PKS meninggalkan koalisi pada tahun 2005, telah mendorong elite dan partai untuk melakukan Musyawarah Majelis Syura, sebagai media resmi mendengar pandangan dan aspirasi kader. Dengan diberikannya kader kesempatan untuk bersuara dan didengar,

perbedaan pandangan yang pelik tidak serta merta mengarah pada faksionalisasi.

Menurut Siddiq, institusionalisasi syura di PKS yang dilaksanakan sebagai unsur CRM dan seluruh proses pembuatan kebijakan menunjukkan model kepemimpinan kolektif di partai ini. Di dalamnya, mekanisme demokratis menjadi suatu yang lazim ketika memutuskan satu kebijakan. Dia menekankan, "Tidak ada kebijakan selain sudah melalui penyerapan seluruh ide dari banyak orang."[79] Dengan situasi ini, dia menyatakan soliditas partai menjadi kuat karena tidak ada kebijakan yang didominasi oleh pikiran satu orang.[80]

E. Ringkasan

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa AD/ART partai telah menyebutkan sejumlah institusi yang relevan dengan upaya menegakkan CRM. Badan-badan ini memiliki otoritas seperti badan rekonsiliasi untuk melakukan pengadilan internal dan investigasi atau sebagai medium untuk mencari resolusi atas perbedaan pandangan. Lembaga-lembaga CRM ini tidak diciptakan untuk menghabisi perbedaan, melainkan untuk meluruskan persepsi kader dan mencari titik penyesuaian yang ada, mengingat perbedaan itu dipandang sebagai sesuatu yang wajar terjadi dalam partai. Bagi PKS, perbedaan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari,[81] khususnya di partai seperti PKS di mana sebagian besar kader berasal dari kelas menengah dan memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi.[82]

---

[79] Wawancara dengan Mahfudz Siddiq, Ketua Departemen Kaderisasi DPP PKS (2002–2005) dan anggota DPR RI (2004–2014), di Jakarta, 27 Oktober 2010.

[80] Wawancara dengan Mahfudz Siddiq, Ketua Departemen Kaderisasi DPP PKS (2002–2005) dan anggota DPR RI (2004–2014), di Jakarta, 27 Oktober 2010.

[81] PKS tidak Monolitik, *http://www.kompas.com/read/xml/2008/12/17/14544853/pks.tidak.monolitik*.

[82] Wawancara dengan Dr. Prihandoko, Ketua DPD PKS Depok (2004–2007) di Depok, 5 Oktober 2010. Lihat juga "Tifatul: PKS itu Solid", *http://politik.vivanews.com/news/read/58449-tifatul_pks_itu_soli.d*

Partai juga memiliki pola standar dalam penanganan pencegahan konflik dan resolusinya. Kehadiran badan-badan ini dan mekanisme standarnya pada akhirnya membuat partai memiliki pedoman dan referensi otoritatif dalam penanganan konflik walaupun berbagai kelemahan tetap ada. Dengan pedoman ini, PKS mampu mendeteksi potensi konflik dan meresponsnya sejak dini. Sejumlah peristiwa krusial dan rumit yang memiliki kecenderungan untuk melahirkan konflik internal tidak menyebabkan munculnya perselisihan yang berkepanjangan dan meningkatkan konflik. Demikianlah, pembahasan di atas menunjukkan peranan mendasar CRM sebagai salah satu indikator institusionalisasi partai yang berkaitan dengan kerja elemen-elemennya dalam membangun kemampuan partai untuk menjaga soliditasnya.

BAB IX
KADERISASI PKB: FENOMENA KETIDAKMANDIRIAN

> Karena kita tidak melakukan hal tersebut (proses kaderisasi) secara sistematis maka kekacauan mudah tumbuh di partai ini. (A. Muhaimin Iskandar)[1]

> Bagaimana mungkin ada sebuah partai yang ketua Dewan Syariah ayahnya, ketua Dewan Tanfidz keponakannya, dan Sekjen anaknya. Atas dasar itulah saya tidak mau bergabung lagi dengan partai yang dilandasi oleh genetika ini. (Khofifah Parawansa)[2]

Bab ini membahas kaderisasi sistematis dan hubungannya dengan perpecahan di PKB. Kaderisasi sistematis yang dimaksud dalam bab ini dan bab berikutnya terkait dengan kehadiran *training* (pelatihan) yang sistematis dan bertahap, evaluasi kader yang sistematis serta rekrutmen yang sistematis dalam merekrut anggota dan mengisi jabatan.

---

[1] Wawancara dengan Abdul Muhaimin Iskandar, Sekretaris Jenderal PKB (2000–2002), Ketua Dewan Tanfidz (2002–2005), Ketua Dewan Tanfidz (2005–2013), dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di Jakarta, 13 Oktober 2010.

[2] Wawancara dengan Khofifah Indar Parawansa, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999–2001), Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu PKB (2002–2005), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

Sebuah pengaderan yang baik adalah yang memberikan pemahaman dan orientasi tentang hal-hal mendasar, seperti ideologi, visi dan misi, manajemen partai, aturan main, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Persoalan kaderisasi harus dengan gamblang tertulis dalam AD/ART atau dokumen resmi partai dan disebarluaskan kepada seluruh anggota. Partai harus memiliki parameter yang jelas dan mudah untuk dipahami seluruh kader. Kemudian, konsistensi dan keberlanjutan di dalam pelaksanaannya merupakan prasyarat kaderisasi sistematis agar dapat menjaga kualitas proses rekrutmen dan regenerasi.

Setidaknya ada tiga arti penting kaderisasi. Pertama, menghindari pemahaman ataupun tafsiran eksklusif dan sepihak terhadap aturan main, ideologi, atau nilai-nilai partai. Dengan demikian, kesalahpahaman dapat dihindari, termasuk mencegah elite-elite partai melakukan manipulasi berkenaan dengan hal-hal itu. Kedua, mengikis peran elemen-elemen eksternal dalam proses pembinaan kader dan menumbuhkan loyalitas kader terhadap partai. Ketiga, menumbuhkan kesadaraan akan meritokrasi, karena kader yang baik dan berhasil adalah mereka yang bekerja secara disiplin dan bersungguh-sungguh. Dengan hal tersebut, kader akan dievaluasi dan mendapatkan promosi berdasarkan kinerjanya.

Pembahasan berikut ini mengulas kondisi kaderisasi di PKB dan implikasinya terhadap soliditas partai. Untuk maksud tersebut, pembahasan akan mencakup empat bahasan, yaitu (1) aspek legal formal kaderisasi yang membahas aturan main terkait dengan kaderisasi, (2) aspek pelaksanaan yang mengetengahkan upaya dan kegagalan partai dalam melaksanakan kaderisasi yang sistematis, (3) berbagai kecenderungan yang ditimbulkan kepada partai akibat ketiadaan kaderisasi yang sistematis, dan (4) dampak kecenderungan-kecenderungan itu terhadap keutuhan partai.

A. Aspek Legal Formal Kaderisasi

Dalam AD/ART PKB yang digunakan sebelum tahun 2008, isu kaderisasi tidak secara langsung dinyatakan. Partai juga tidak secara gamblang mendefinisikan nama badan atau institusi yang harus menangani masalah ini. Namun, setelah tahun 2008 atau satu dekade setelah pendirian partai, AD/ART partai baru yang dibuat PKB Muhaimin mulai menyebutkan persoalan kaderisasi dan masalah-masalah terkaitnya. ART PKB Pasal 87 menyebutkan tiga hal, yaitu (1) rekrutmen anggota dan pengurus partai dilakukan melalui sistem kaderisasi yang berjenjang, terstruktur, dan sistematis, (2) kaderisasi menjadi syarat mutlak bagi setiap anggota dan pengurus partai yang hendak mendapat promosi jabatan strategis di internal partai atau pemerintahan, (3) kaderisasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kinerja dewan pengurus partai sesuai tingkatannya.[3] Pasal ini menjelaskan bahwa partai harus melakukan dan memelihara proses kaderisasi.

Sebelum tahun 2008, proses kaderisasi dianggap sebagai bagian tugas atau tanggung jawab DPP. Institusi kaderisasi di bawah supervisi DPP menangani masalah ini. Walaupun AD/ART partai tidak secara jelas menyebutkan atau menyelenggarakan kaderisasi, partai membuat sejumlah dokumen atau buku pedoman yang membahas makna, tujuan, dan model kaderisasi partai.[4] Dokumen ini juga membahas

---

[3] *ART PKB 2008 Pasal 87 (1), 87 (2) dan 87 (3).*

[4] *Menumbuhkan Kader Bangsa. Investasi Politik Bersama Rakyat. Kosepsi Dasar dan Metodologi Sistem Kaderisasi Partai Kebangkitan Bangsa*, (Jakarta: DPP PKB, 2000). *Menjadi Politisi Negarawan. Modul Pelatihan dan Orientasi Politik DPC-DPW PKB Modul Orientasi Ideologi DPP PKB*, (Jakarta: DPP PKB, 2000). *Menggerakan Roda Partai dan Perubahan Sosial di Tingkat Basis. Modul Pendidikan Dasar Politik Tingkat Anak Cabang Sistem Kaderisasi Partai Kebangkitan Bangsa*, (Jakarta: DPP PKB, 2000). Mufid A. Busyaeri, *Menjadi Politisi Organiser Masyarakat. Panduan Pendidikan Kader Basis Partai Kebangkitan Bangsa,* (Jakarta: Lembaga Kaderisasi dan Pendidikan Politik, 2003). M. Hanif Dakhiri, Eman Hermawan, dan Marwan Ja'far (eds.), *Workshop Penguatan Sistem dan Manajemen Partai. Menyongsong Pemilu 2009,* (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, 2007). "Sistem Kaderisasi PKB", dalam *Dokumen Muktamar I PKB: Membangun Persaudaraan Sejati antar Manusia sebagai Esensi Rekonsisliasi Nasional*, (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat PKB, 2000), 123–133.

rekrutmen untuk posisi publik, termasuk menjadi anggota dewan. Di dalam perspektif PKB, seperti yang disebutkan di Dokumen *Muktamar* PKB pertama pada tahun 2008, kaderisasi adalah

> Totalitas upaya pembelajaran yang dilakukan secara terarah, terencana, sistemik, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi, sikap, harkat dan martabat, wawasan serta kecakapan insan PKB agar menjadi manusia yang takwa, beradab, cerdik, terampil, loyal, berani, mampu, dan gigih menjalani partai dan mencapai tujuannya.[5]

Tujuan kaderisasi adalah "agar tumbuh komitmen/militansi, loyalitas serta dedikasi kader terhadap partai."[6] Tujuan pengaderan di PKB secara umum tidak saja untuk membentuk kader yang loyal, memahami visi partai, berkomitmen pada ideologi, dan memiliki kecakapan dalam mengelola organisasi, namun juga berwawasan luas, berakhlak, dan bekomitmen untuk turut berperan dalam kehidupan masyarakat.[7] Selain itu, PKB juga menyadari bahwa keberhasilan kaderisasi akan mendukung pencapaian pelaksanaan fungsi dan program partai, termasuk memberikan kontribusi positif terhadap negara.[8] Partai juga menyadari bahwa rekrutmen yang jujur dan transparan akan mencegah partai dari konflik internal.[9]

Sebagai konsekuensi dari komitmen itu, PKB melakukan kegiatan pelatihan (*training*) yang diharapkan berjalan secara berkala dan

---

[5] "Sistem Kaderisasi PKB", dalam *Dokumen Muktamar I PKB: Membangun Persaudaraan Sejati antar Manusia sebagai Esensi Rekonsisliasi Nasional*, 126. *Menumbuhkan Kader Bangsa. Investasi Politik Bersama Rakyat. Kosepsi Dasar dan Metodologi Sistem Kaderisasi Partai Kebangkitan Bangsa*, (Jakarta: DPP PKB, 2000), h.27.

[6] "Sistem Kaderisasi PKB", dalam *Dokumen Muktamar I PKB: Membangun Persaudaraan Sejati antar Manusia sebagai Esensi Rekonsisliasi Nasional*, 123.

[7] "Sistem Kaderisasi PKB", dalam *Dokumen Muktamar I PKB: Membangun Persaudaraan Sejati antar Manusia sebagai Esensi Rekonsisliasi Nasional,* 125–127. *Menumbuhkan Kader Bangsa. Investasi Politik Bersama Rakyat. Kosepsi Dasar dan Metodologi Sistem Kaderisasi Partai Kebangkitan Bangsa*, 56–65.

[8] "Sistem Kaderisasi PKB", dalam *Dokumen Muktamar I PKB: Membangun Persaudaraan Sejati antar Manusia sebagai Esensi Rekonsisliasi Nasional*, 131.

[9] "Rekrutmen Caleg", dalam *PKB dalam Pemilu 2004*, (Jakarta: DPP PKB), 71.

termonitor dengan baik. PKB juga memiliki konsep penjenjangan kaderisasi atau Pengaderan Formal Dasar yang meliputi tiga jenis,[10] yakni (1) Pelatihan Tingkat Dasar (PTD), yang ditujukan bagi seluruh calon anggota. Forum ini juga sebagai wahana pengenalan kepada PKB dan sosialisasi ideologi dan nilai-nilai. (2) Pelatihan Tingkat Lanjutan (PTL), yang ditujukan bagi kader yang telah mengikuti PTD. Forum ini ditujukan agar kader memiliki militansi dan komitmen moral serta kemampuan praktis untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. (3) Pelatihan Tingkat Tinggi (PTT). Diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, kader PKB dapat berperan sebagai seorang pekerja sosial dan politisi dengan basis ideologi yang jelas. Selain itu, ada pula Pengaderan Formal Kejuruan yang meliputi berbagai macam pelatihan praktis, seperti pelatihan demokrasi, pelatihan advokasi buruh, petani, dan nelayan, pelatihan layanan kesehatan masyarakat, pelatihan sistem legislatif, pelatihan humas, hingga pelatihan teknik lobi.[11]

PKB juga menegaskan pentingnya proses kaderisasi untuk diperhitungkan sebagai bagian pembahasan seleksi anggota dewan atau anggota legislatif (aleg). Untuk merekrut seorang anggota legislatif, partai membentuk panitia seleksi yang disebut Tim Rekrutmen atau Tim Majelis Penetapan Calon Anggota Legislatif (Mantap), yang terdiri dari Ketua Umum Dewan Syura, Sekretaris Dewan Syura, Ketua Umum Dewan Tanfidz, Sekjen Partai, dan Perwakilan Perempuan. Tim ini ada di masing-masing level pemilihan, yakni di Dewan Pengurus Cabang (DPC/Kabupaten atau Kota), Dewan Pengurus Wilayah (DPW/Provinsi), dan Dewan Pengurus Pusat (DPP) serta bertugas menyeleksi mereka yang melamar untuk menjadi aleg dari PKB. Hasil seleksi ini menjadi dasar untuk menyusun daftar bakal calon. Daftar ini kemudian disampaikan ke masyarakat untuk mendapatkan penilaian dan masukan.

---

[10] "Sistem Kaderisasi PKB", dalam *Dokumen Muktamar I PKB: Membangun Persaudaraan Sejati antar Manusia sebagai Esensi Rekonsisliasi Nasional*, 129–130.

[11] *Ibid.*, 130–131.

Setelah proses ini dilalui, tim kemudian melakukan penilaian akhir sebelum membuat Daftar Calon Sementara (DCS). DCS kemudian diserahkan kepada DPP PKB untuk diklarifikasi. Setelah DPP melakukan pemeriksaan, DCS kemudian disahkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) dan diberikan kepada masing-masing dewan pengurus partai untuk diserahkan kepada masing-masing KPU. Dalam proses seleksi, tim mendasarkan diri pada sejumlah kriteria penilaian yang di antaranya terdiri dari senioritas, loyalitas, akhlak, pengalaman, ketokohan, latar belakang pendidikan, dan pengetahuan dasar berpolitik. Seseorang dengan nilai tertinggi akan berhak menduduki nomor caleg pertama, begitu selanjutnya sehingga tersusun sebuah daftar caleg.[12]

Berkenaan dengan rekrutmen anggota dewan, PKB menyatakan bahwa hasil kaderisasi menjadi salah satu kriteria utama. Dalam hal ini, secara ideal hanya kader yang lolos kaderisasi yang dapat menjadi wakil partai di parlemen. Situasi ini juga menunjukkan bahwa kaderisasi bukan sesuatu yang sia-sia untuk pengembangan karier kader. Namun, partai juga membuka peluang bagi tokoh masyarakat dan profesional untuk menjadi wakil PKB di dalam pemilu dan menduduki posisi anggota dewan mewakili partai ini.[13] Hal ini terutama terkait dengan kebutuhan untuk mendapatkan seorang anggota legislatif yang cakap di bidangnya. Partai menyadari bahwa tidak semua kadernya memiliki pemahaman dan kemampuan yang cukup dalam soal-soal yang terkait dengan masalah pembuatan kebijakan di badan legislatif.[14] Partai juga menyadari bahwa ada

---

[12] "Rekrutmen Caleg", dalam *PKB dalam Pemilu 2004*, 75–81. Wawancara Moch. Nurhasim dengan salah satu Ketua DPC PKB di Sampang, Desember 2003, dalam Moch. Nurhasim, "Pengaruh dan Kekuatan Kiai dalam Rekrutmen Politik: Kasus Kabupaten Sampang dan Pasuruan", dalam Syamsuddin Haris (ed.), *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*, (Jakarta: Gramedia, LIPI dan IMD, 2005), 62.

[13] "Rekrutmen Caleg", dalam *PKB dalam Pemilu 2004*, 73.

[14] *Ibid.*, 71–72.

banyak individu di luar partai yang pantas menjadi anggota dewan ketika mereka mampu untuk membela kepentingan rakyat.

Dari aspek normatif, terlihat bahwa PKB telah memberikan semacam garis besar bagi pelaksanaan kaderisasi kepada para kadernya. Dari aspek normatif itu juga tersirat bahwa persoalan menciptakan kesatuan pemahaman akan visi dan misi partai, loyalitas, dan militansi serta komitmen ideologis menjadi isu-isu krusial di dalamnya. Dengan kata lain, PKB menyadari bahwa kegagalan atas kaderisasi sebenarnya secara tidak langsung akan berimplikasi pada kegagalan partai dalam membentuk kesamaan visi dan penguatan loyalitas. Bahkan PKB menyadari bahwa keberhasilan kaderisasi akan membawa dampak positif bagi partai dalam menjalankan fungsinya, program serta memberikan sumbangan bagi negara,[15] dan pola rekrutmen yang baik akan dapat membuat partai terhindar dari konflik sesama kader.[16]

B. Pelaksanaan

1. Inkonsistensi dalam Pelaksanaan Kaderisasi

Meskipun partai telah memiliki konsep dan metode kaderisasi, pelaksanaan kaderisasi di PKB selama dekade pertama Era Reformasi tidak sejalan dengan metodenya sendiri. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana pembinaan kader dan rekrutmen dilaksanakan, media atau forum yang digunakan, dan level kontinuitas pelaksanaan. Pelaksanaan kaderisasi formal kerap berjalan beriringan dengan 'kaderisasi informal' atau kaderisasi secara tidak langsung. Pada tahun-tahun awal berdirinya partai, peran institusi-institusi pengaderan NU menjadi media yang amat penting dalam pelaksanaan kaderisasi di PKB.

Kader NU yang bergabung dengan PKB dan telah melewati proses kaderisasi di NU dapat secara otomatis mentransformasikan status atau jenjang kariernya di NU itu menjadi kader partai dengan status dan jenjang yang sama di PKB. PKB menganggap individu

[15] "Sistem Kaderisasi", 131.

[16] "Rekrutmen Caleg", 71.

yang mengikuti kaderisasi NU atau menjadi kader NU sebagai individu yang telah memahami esensi dan tujuan kaderisasi PKB. Dengan demikian, dia dapat memperoleh status sebagai kader partai. Di tahun-tahun pertama keberadaan partai, mayoritas pengurus PKB adalah kader atau mantan kader NU dan mereka dapat mencapai posisinya di partai itu tanpa melewati kaderisasi atau seleksi berjenjang. Hal ini terus-menerus terjadi hingga dekade pertama keberadaan PKB.[17] Sekretaris Jenderal PKB-Gus Dur, Zannuba Wahid (Yenny) mengakui bahwa:

> Kaderisasi PKB sebenarnya berasal dari kaderisasi-kaderisasi yang berjalan pada *onderbouw* NU. Jenjangnya IPNU, PMII, Anshor, baru NU. Jadi, institusi pengaderan itu jelas.[18]

Menurut Yenny, dengan situasi seperti ini, partai pada dasarnya tidak memiliki kontrol yang mandiri terhadap pelaksanaan kaderisasi dan aspek-aspek yang ada di dalamnya. Partai tidak melakukan pembinaan sendiri dan sebagai akibatnya tidak dapat menjamin kualitas kader karena hanya menerima kader NU yang dianggap sudah jadi.[19]

PKB tampak nyaman dengan situasi ini dan tidak berupaya sungguh-sungguh untuk melepaskan diri dari model kaderisasi semacam itu. Mayoritas anggota dewan pengurus partai dan kader menganggap situasi ini telah sejalan dengan aspirasi kaum Nahdiyin yang menghendaki sebuah partai yang memberikan posisi strategis bagi kaum Nahdiyin di partai agar dapat menjamin keberlanjutan perjuangan kepentingan NU. Kemudian, situasi ini juga didukung

---

[17] Wawancara dengan Muamir M. Syam, Ketua PKB (2005–2010), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

[18] Wawancara dengan Zannuba Ariffah "Yenny" Wahid, Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz PKB-Gus Dur (2008–2010), di Jakarta, 20 Oktober 2010. Lihat juga Nurhasim, "Pengaruh dan Kekuatan Kiai dalam Rekrutmen Politik: Kasus Kabupaten Sampang dan Pasuruan", 50.

[19] Wawancara dengan Zannuba Ariffah "Yenny" Wahid, Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz PKB-Gus Dur (2008–2010), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

oleh tidak adanya peran konstitusional partai dalam hal ini. AD/ART partai sebenarnya tidak memiliki kekuasaan untuk mewajibkan pelaksanaan proses kaderisasi yang benar karena hingga tahun 2008, partai tidak secara spesifik mengatur proses ini.

Di lain pihak, situasi ini juga mengungkapkan peluang hubungan *patron-client* sebagai salah satu karakteristik utama hubungan internal NU di proses ini. Posisi khusus ulama atau elite NU memberikan tokoh ini kesempatan untuk memengaruhi pelaksanaan proses kaderisasi. Partai pada kenyataannya memang cenderung mengandalkan tokoh-tokoh informal ini untuk melakukan pengaderan.[20] Kebetulan juga, instrumen dan konsep kaderisasi ini tidak dapat dilaksanakan secara benar karena ketergantungan pada ulama daripada sistem partai. Sayangnya, hal tersebut kadang dilakukan sebatas pemahaman dan kemampuan masing-masing tokoh. Para tokoh ini kerap menjalankan kaderisasi berdasarkan persepsi dan kapasitasnya sendiri, ketimbang menggunakan modul dan kurikulum baku, yang dapat dikontrol dan dievaluasi partai dan perangkatnya.[21] Kaderisasi akhirnya berjalan dengan cair dan tidak seragam karena bergantung pada individu daripada sistem. Kaderisasi partai pun akhirnya menjadi tidak efektif, tidak saja karena tidak terstandardisasi, namun juga karena kuatnya budaya *ewuh pakewuh* yang menyebabkan makna kaderisasi sebagai sarana evaluasi objektif seorang kader menjadi hilang. Situasi tersebut akhirnya tetap menyuburkan budaya *patron-client* dan ketergantungan PKB secara struktural kepada NU.

Partai juga tidak dapat membuat forum formal, reguler, dan layak untuk melaksanakan kaderisasi. Selama dekade pertama Era Reformasi, kaderisasi PKB berlangsung dalam forum-forum informal. Di tingkat lokal, kaderisasi PKB bergantung pada aktivitas NU, khususnya aktivitas yang terkait dengan peringatan hari-hari besar

---

[20] Wawancara dengan Zannuba Ariffah "Yenny" Wahid, Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz PKB-Gus Dur (2008–2010), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

[21] Wawancara dengan Khatibul Umam Wiranu, Wakil Sekretaris Jenderal PKB (1999–2005) dan anggota DPR RI (1998–2004), di Depok, 17 Oktober 2010.

Islam. Pada kesempatan ini, agenda kegiatan politik partai disisipkan untuk disampaikan kepada para santri atau undangan, yang biasa pula merupakan kader atau simpatisan PKB. Kegiatan itu kerap menjadi ajang penyampaian pesan-pesan politik dan sarana pengingat akan jati diri PKB sebagai satu-satunya partai yang akan memperjuangkan kepentingan kaum Nahdiyin. Tak jarang pesan-pesan itu disampaikan langsung oleh para kiai atau ulama yang menjadi tuan rumah kegiatan.

Walaupun dewan pengurus di tingkat lokal menyelenggarakan kaderisasi sekurang-kurangnya sekali atau dua kali, pada umumnya mereka bergantung pada kalender kegiatan NU yang kadang-kadang merupakan satu-satunya kesempatan untuk pelaksanaan kaderisasi bagi dewan pengurus di wilayah lainnya. Marinah Hardy, misalnya, mengakui bahwa selama lima tahun kepemimpinanya di DPW PKB Provinsi Nusa Tenggara Barat, dia hanya sempat melakukan kaderisasi kurang dari empat kali. Itu pun semuanya menggunakan peringatan keagamaan sebagai mediumnya.[22] Menurut K.H. Damanhuri, Ketua Dewan Syura DPD PKB Kota madya Depok (2002–2004), partainya sebenarnya tidak pernah melakukan sebuah kaderisasi yang sistematis dan terstruktur. Dia berkata, "sebuah kaderisasi yang terstruktur tidak pernah berlangsung di PKB dari awal hingga sekarang, tidak pernah."[23]

Selain adanya masalah dengan forum untuk melangsungkan kaderisasi, keberlanjutan kaderisasi adalah masalah signifikan lainnya. Kontinuitas kaderisasi di partai ini relatif tidak terpelihara dengan baik. Kaderisasi memang tampak coba untuk dibangun, terutama di era kepemimpinan Matori, yang menurut Abdul K. Ahmad memiliki komitmen kuat untuk melakukan pembinaan.[24] Namun, komitmen ini

---

[22] Wawancara dengan Marinah Hardy, Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Provinsi Nusa Tenggara Barat (2002–2005), di Jakarta, 28 Oktober 2010.

[23] Wawancara dengan K.H. Damanhuri, Ketua Dewan Syura DPD PKB Kota madya Depok (2002–2004), anggota DPRD Kota madya Depok (2004–2009), di Depok, 31 Oktober 2010.

[24] Wawancara dengan Abdul Khalik Ahmad, Sekretaris Fraksi PKB DPR RI (1999–2001) dan Sekretaris Jenderal PKB-Jalil (2000–2005), di Jakarta, 11 Oktober 2010.

menjadi berantakan seiring dengan dipecatnya Matori dari partai. Ali Masykur Musa mengatakan pasca-Mukatamar Yogyakarta 2001, yang memformalkan kejatuhan Matori, kaderisasi melambat.[25] Meskipun demikian, Ali Masykur juga mengatakan bahwa jauh sebelumnya, kaderisasi memang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini menurutnya disebabkan fokus perhatian partai habis tercurah untuk soal-soal eksternal, seperti pemilu 1999 dan penyelamatan Gus Dur dari *impeachment* 2001.[26] Di level lokal, kondisi kaderisasi memang cukup memprihatinkan. Kaderisasi menjadi sesuatu yang menjadi antara ada dan tiada. Menurut Hardy:

> Kaderisasi tidak dilakukan secara rutin. Partai di tingkat nasional melakukan program seperti pendidikan, pelatihan, dan penugasan, tetapi dengan berjalannya waktu, proses ini hilang secara perlahan-lahan.[27]

Sejumlah kader, termasuk Hardy, percaya bahwa di tingkat lokal kesulitan finansial menjadi salah satu penyebab situasi ini.[28] Kondisi keuangan partai yang tidak terurus dengan baik turut menopang ketidaklancaran pelaksanaan kegiatan ini. Situasi ini kerap dipersulit dengan tantangan letak geografis yang tidak ramah. Akibatnya, untuk sebuah kepengurusan yang memiliki wilayah kepengurusan yang terdiri dari banyak pulau atau berada di pedalaman yang membutuhkan sarana dukungan transportasi yang mahal, melakukan kaderisasi rutin menjadi sesuatu yang tidak terbayangkan.[29]

---

[25] Wawancara dengan Dr. Ali Masykur Musa, Wakil Ketua Dewan Tanfidz PKB (2005–2010) dan Ketua Dewan Tanfidz PKB-Versi Parung (2008–2009), di Jakarta, 19 Oktober 2010.

[26] Wawancara dengan Dr. Ali Masykur Musa, Wakil Ketua Dewan Tanfidz PKB (2005–2010) dan Ketua Dewan Tanfidz PKB-Versi Parung (2008–2009), di Jakarta, 19 Oktober 2010.

[27] Wawancara dengan Marinah Hardy, Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Provinsi Nusa Tenggara Barat (2002–2005), di Jakarta, 28 Oktober 2010.

[28] Wawancara dengan Marinah Hardy, Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Provinsi Nusa Tenggara Barat (2002–2005), di Jakarta, 28 Oktober 2010.

[29] Wawancara dengan Marinah Hardy, Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Provinsi Nusa Tenggara Barat (2002–2005), di Jakarta, 28 Oktober 2010; dengan K.H. Damanhuri,

Selain persoalan-persoalan di atas, seiring dengan perjalanan waktu, kaderisasi secara substantif semakin mengarah pada hal-hal di luar kepentingan pembinaan. Kaderisasi tampak semakin kehilangan objektivitasnya dan cenderung melayani kepentingan satu kelompok tertentu. Hermawan Sulistyo melihat bahwa kaderisasi PKB akhirnya menjadi ajang penguatan faksionalisasi dalam tubuh partai. Menurut Hermawan:

> Jika diperbandingkan, forum-forum pendidikan dan pelatihan kader partai tampak marak justru ketika PKB baru berdiri. Militansi jelas sekali kelihatan dari para kader awal PKB. Tetap dalam perjalanannya, diakui atau tidak, pendidikan internal bagi kader partai semakin tampak eksklusif, dan bahkan tersirat sebagai ajang penguatan faksionalisme di dalam tubuh PKB sendiri.[30]

Dalam situasi seperti inilah sebenarnya pembinaan kader yang komprehensif menjadi sesuatu yang gagal diraih. Mengingat akhirnya motif kaderisasi tercampur dengan motif memperkuat kelompok tertentu dengan tujuan-tujuan praktis atau sekadar eksis. Dalam situasi ini, menurut pengamat politik Joseph B. Kristadi:

> Partai sebagai media pendidikan politik juga gagal karena praktik-praktik politik di dalam partai tidak memberikan pendidikan yang ideal bagi kadernya, sesuai dengan prinsip-prinsip sebuah parpol.[31]

Ketua Dewan Syura DPD PKB Kota madya Depok (2002–2004), anggota DPRD Kota madya Depok (2004–2009), di Depok, 31 Oktober 2010. Tri Ratnawati, "Beberapa Masalah Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Alternatif Solusi" dalam Lili Romli (ed.), *Pelembagaan Partai Politik Pasca Orde Baru: Studi Kasus Partai Golkar, PKB, PBB, PBR dan PD*, (Jakarta: Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2008), 101–103.

[30] Hermawan Sulistyo, "PKB Masa Kini dan Masa Datang", dalam Yenny Zanuba Wahid, A. Effendy Choirie, dan M. Kholid Syeirazi (eds.), *9 Tahun PKB: Kritik dan Harapan*, (Jakarta: Panitia Nasional Harlah ke-9 PKB, 2007), 94.

[31] J. Kristadi, "Pergulatan dan Tantangan PKB Memenuhi Harapan Bangsa", *ibid.*, 129.

2. Rekrutmen Partai dan Subjektivitas

Dalam kondisi ideal, kaderisasi merupakan unsur penting yang memainkan bagian yang signifikan di dalam proses rekrutmen untuk posisi jabatan internal atau publik. Akan tetapi di PKB, rekrutmen partai tidak ditentukan secara langsung melalui hasil kaderisasi. Sejumlah fenomena di dalam posisi internal PKB tentang rekrutmen menunjukkan tidak adanya rekrutmen sistematif dan objektif.

Pertama, munculnya fenomena rekrutmen secara parsial yang didasarkan oleh landasan garis keturunan dan nepotisme. Di dalam hal ini, seseorang yang merupakan saudara ulama karismatik akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menduduki jabatan strategis di partai, bahkan walaupun dia sebenarnya tidak pernah terlibat di dalam proses kaderisasi. Di tingkat nasional, kasus Yenny, anak perempuan Gus Dur yang dapat mencapai posisi strategis sebagai wakil sekretaris jenderal dan kemudian sekretaris jenderal dalam waktu singkat tanpa memiliki pengalaman yang memadai di dalam proses kaderisasi, merupakan contoh kasus ini. Kasus Saifullah Yusuf, keponakan Gus Dur, juga menunjukkan pola serupa. Saifullah Yusuf yang merupakan mantan anggota dan anggota dewan dari PDIP (1998–2001), di MLB 2001 dapat menjadi salah satu kandidat ketua Dewan Tanfidz walaupun dia tidak pernah mengikuti kaderisasi partai dan mengundurkan diri dari keanggotaan PDIP dua pekan sebelum MLB. Pada kesempatan ini, Saifullah yang menjadi anggota PKB selama satu pekan pada akhirnya berhasil menjadi sekretaris jenderal baru PKB.

Kondisi serupa juga berlangsung di tingkat lokal ketika sejumlah saudara ulama berpengaruh atau bapak pendiri NU dapat dengan mudah menjadi elite partai. Sejumlah cucu dan saudara dekat almarhum Bisri Syamsuri, salah satu pendiri NU, misalnya, menduduki posisi strategis di sejumlah dewan pengurus daerah termasuk di Jombang dan Jakarta.[32]

---

[32] Wawancara dengan Khofifah Indar Parawansa, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999–2001), Ketua Badan Pelaksana Pemenangan Pemilu PKB (2002–

Musa percaya bahwa keturunan atau peran kolegial masih sangat penting di partai ini. Dia berkesimpulan dengan menyindir adanya tiga 'N' di partai ini, "Di PKB ada *nisab* (harta) atau *nasab* (keturunan) yang dibutuhkan untuk memperoleh *nasib* baik."[33] Lebih lanjut dia berkata:

> Salah satu masalah dari kaderisasi adalah keberadaan ulama itu sendiri. Di satu sisi kaderisasi berjalan, pelatihan kader, sekolah kader. Tapi pola rekrutmen menjadi tidak berjalan baik karena ada hambatan psikologis terkait dengan budaya hierarkis darah biru.[34]

Kedua, selain darah biru, partai juga menghadapi masalah serius dengan sikap elite NU dalam mempromosikan kolega atau teman dekat mereka di dalam proses rekrutmen. Hal ini kadang-kadang mengabaikan proses kaderisasi berjenjang.[35] Pola rekrutmen berdasarkan pada kolusi elite merupakan fenomena yang lazim terjadi di partai ini. Di awal-awal keberadaan PKB, model rekrutmen ini lazim dipahami sebagai 'prosedur normal' karena kaderisasi masih di dalam proses awal. Namun, hingga bergulirnya waktu, situasi ini tidak kunjung surut. Pada level nasional, fenomena ini mencapai puncaknya pasca-Muktamar Semarang Tahun 2005 ketika elite-elite partai, termasuk Gus Dur, memplot nama-nama asing di kalangan Nahdiyin untuk memegang sejumlah posisi strategis di PKB. Tokoh-tokoh ini termasuk di antaranya Artalyta Suryani, Sigid Haryo Wibisono, dan Muslim Abdurrahman.

Artalyta Suryani, yang tercatat dalam kepengurusan partai sebagai bendahara, adalah seorang pengusaha terkemuka di Indonesia yang

---

2005), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

[33] Wawancara dengan Dr. Ali Masykur Musa, Wakil Ketua Dewan Tanfidz PKB (2005–2010) dan Ketua Dewan Tanfidz PKB-Versi Parung (2008–2009), di Jakarta, 19 Oktober 2010.

[34] Wawancara dengan Dr. Ali Masykur Musa, Wakil Ketua Dewan Tanfidz PKB (2005–2010) dan Ketua Dewan Tanfidz PKB-Versi Parung (2008–2009), di Jakarta, 19 Oktober 2010.

[35] Wawancara dengan Muamir M. Syam, Ketua PKB (2005–2010), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

merupakan pemilik sejumlah perusahaan berskala besar di Jakarta dan Lampung. Dia diperkenalkan Bendahara Umum PKB Aris Junaidi ke Gus Dur untuk memegang posisi bendahara umum pada kepengurusan baru PKB. Walaupun Gus Dur tidak mengenalnya, dia menyetujui rekomendasi Junaidi untuk memplot Suryani, sosok yang asing atau tidak dikenal bagi sebagian besar kader, agar menduduki posisi strategis di PKB.[36]

Sementara itu, Sigid adalah kader Partai Golkar yang langsung masuk dalam jajaran DPP PKB. Konon dia disiapkan untuk memegang salah satu posisi anggota Dewan Syura PKB Periode 2005–2010. Jabatannya di partai itu diperoleh berdasarkan rekomendasi Yenny Wahid dan disetujui Gus Dur. Akan tetapi, menurut Yenny, Muhaimin adalah sosok yang memperkenalkan dan merekomendasikan Sigid ke ayahnya. Banyak kader yakin bahwa Sigid sebenarnya masih anggota Partai Golkar saat bergabung dengan PKB.[37]

Adapun Muslim Abdurrahman adalah anggota Muhammadiyah, organisasi Islam modernis, yang juga teman dekat Gus Dur. Sebagai tokoh terkemuka NU dan Muhammadiyah, Gus Dur dan Muslim Abdurrahman memiliki visi yang sama dan menganut perspektif liberal terhadap Islam yang memperkuat hubungan keduanya. Walaupun dia bukan kader NU dan tidak pernah ikut dalam proses kaderisasi PKB, hubungan dekatnya dengan Gus Dur memuluskan jalan Muslim Abdurrahman untuk menjabat sebagai salah satu ketua DPW PKB Provinsi DKI Jakarta.

Pada tingkat lokal, situasi sejenis juga hadir. Saran atau rekomendasi para kiai atau tokoh kunci NU lebih dominan dan didengar

[36] Tentang proses Artalyta Suryani sebagai bendahara partai lihat "Akhir Kisah sang Bendahara", *Tempo*, 23 Maret 2008, 28.

[37] Wawancara dengan Zannuba Ariffah "Yenny" Wahid, Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz PKB-Gus Dur (2008–2010), di Jakarta, 20 Oktober 2010; dengan Andi M. Ramly, Ketua Dewan Tanfidz (2002–2010), Sekretaris Dewan Syura PKB-Muhaimin (2008–2010) dan penulis *"Mabda' Siyasi PKB"*, di Jakarta, 15 Oktober 2010; dengan Ahmad Shodiq Noor, Sekretaris Jenderal DKI Jakarta DPW PKB, di Jakarta, 3 November 2010.

dalam proses rekrutmen ketimbang hasil diskusi atau evaluasi internal. Para tokoh tersebut biasanya meminta pengurus partai untuk mempertimbangkan santri, kolega, atau anggota keluarganya untuk dapat ditempatkan pada posisi-posisi strategis di kepengurusan partai. Hal itu biasanya dilakukan bila sang kiai menolak terlibat langsung dalam kepengurusan dan hanya bersedia menitipkan seseorang yang dapat dianggap mewakili dirinya dalam partai.[38] Para tokoh itu akan mendekati sosok penting dalam partai, biasanya sang ketua, untuk mengakomodasi kepentingannya. Nurhasim percaya bahwa PKB tidak memiliki tahap-tahap kaderisasi yang dapat digunakan sebagai parameter jenjang karier dan dalam formasi struktur partai. Nurhasim menyatakan:

> Dengan tidak adanya jenjang pengaderan, boleh jadi seseorang yang meskipun baru masuk dalam partai akan dapat duduk sebagai pengurus inti partai, bila yang bersangkutan dekat dengan Ketua Partai.[39]

Ketiga, selain faktor darah biru dan rekomendasi orang kuat, PKB juga melakukan model rekrutmen atas dasar *track record* (latar belakang) NU. Dalam hal ini, seseorang dengan latar belakang NU, terutama memiliki pengalaman di NU sebagai anggota dewan pengurus, akan memiliki peluang lebih baik untuk memegang jabatan strategis di PKB. Partai yang jelas mengklaim sebagai partai terbuka tidak hanya bagi kaum Nahdiyin, dalam situasi ini menunjukkan sikap inkonsistensi. Dalam hal ini, PKB kadang-kadang tidak menggunakan parameter yang jelas dan objektif ketika menyeleksi seseorang untuk memegang jabatan penting. Kemudian, latar belakang kandidat menjadi prioritas utama daripada kapasitasnya. Di tingkat nasional, sejumlah tokoh kunci PBNU menjadi anggota DPP PKB hampir secara otomatis. Sejumlah tokoh penting di PBNU seperti Ma'ruf Amien, Ahmad Baja, dan H.Z. Arifin, memegang posisi penting

---

[38] Wawancara dengan Muamir M. Syam, Ketua PKB (2005–2010), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

[39] Nurhasim, "Pengaruh dan Kekuatan Kiai dalam Rekrutmen Politik. Kasus Kabupaten Sampang dan Pasuruan", 49.

di PKB sebagai Ketua Dewan Syura, Ketua Dewan Syura, dan Sekretaris Dewan Syura. Di dalam perkembangannya, PKB secara terus-menerus mempraktikkan pola rekrutmen seperti ini.

Di tingkat lokal, pola rekrutmen ini juga berjalan. Banyak pimpinan PKB dapat memperoleh posisi penting di PKB karena posisi berpengaruh mereka di NU. Hardy, misalnya, Sekretaris Jenderal DPW NU NTB yang kemudian memegang posisi penting di DPW PKB NTB sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz. Dia dapat mencapai posisi strategisnya di PKB hanya karena posisinya sebelumnya di NU. Damanhuri, seorang ulama karismatik dan pemilik pesantren di Depok, adalah anggota Dewan Syuriah di DPC NU Depok. Walaupun dia bergabung dengan PPP di Era Soeharto dan tidak begitu aktif ketika pendirian PKB di Depok pada tahun 2004, namun karena posisinya di masyarakat NU, dia terpilih menjadi Ketua Dewan Syura DPC PKB Depok.

Masuknya para pengurus NU ke dalam struktur partai dipandang sebagai sebuah kewajaran. Aspek historis dan kesamaan aspirasi kerap menjadi pembenaran akan hal itu. Di sisi lain, fenomena di atas juga dilandasi kepentingan agar kepentingan NU dapat tetap terpelihara di partai ini. Selain itu, agar orang-orang yang selama ini telah mengorbankan dirinya untuk kepentingan NU dan menjadi simbol NU dapat menduduki jabatan-jabatan strategis di level nasional di kemudian hari.[40] Namun, dengan adanya situasi seperti ini, upaya untuk membuat PKB menjadi partai terbuka menjadi terhalang, mengingat peluang untuk elemen-elemen non-NU tidaklah besar untuk banyak berkiprah di dalam partai ini.

Meskipun demikian, tidak semua elite partai tidak melalui tahapan kaderisasi. PKB pun memang mengenal pola rekrutmen melalui kaderisasi, namun jumlahnya tidak banyak. Di level nasional, hampir tidak terlihat mereka yang terekrut karena telah mengikuti

[40] Wawancara dengan K.H. Damanhuri, Ketua Dewan Syura DPD PKB Kota madya Depok (2002–2004), anggota DPRD Kota madya Depok (2004–2009), di Depok, 31 Oktober 2010.

sebuah tahapan kaderisasi yang memadai. Beberapa kalangan melihat Imam Nachrawi sebagai seorang tokoh yang muncul tanpa dukungan siapa-siapa meskipun memang kiprahnya di *onderbouw* NU sudah cukup lama. Imam menunjukkan dirinya sebagai tokoh yang berjuang dari bawah.[41] Di level daerah, kaderisasi memang telah memberikan peluang bagi seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, namun dibandingkan dengan mereka yang mendapatkan *privilege*, jumlahnya tidaklah terlalu banyak. Di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur atau Papua, orang-orang dengan tanpa latar belakang NU sesungguhnya dapat memimpin. Namun, proporsi wilayah ini terbatas dibandingkan dengan jumlah kepengurusan PKB di seluruh Indonesia yang terpusat di wilayah basis NU, terutama di Jawa, dengan peran latar belakang NU dan aspek keturunan masih memainkan peranan penting.

Dalam situasi rekrutmen yang lebih mengutamakan semangat kekeluargaan, kekerabatan, kedekatan, dan latar belakang keormasan itu, semangat meritokrasi dan objektivitas jelas sulit untuk diwujudkan. Sebaliknya, yang terjadi justru nuansa nepotisme yang kental. Dengan situasi ini, sejumlah elite menyadari bahwa partai sebenarnya masih menghadapi situasi yang sangat rumit dalam upayanya melakukan kaderisasi. Muhaimin Iskandar, misalnya, mengakui bahwa hampir satu dekade setelah pendiriannya, kaderisasi PKB masih belum sistematis dan belum pada jalurnya.[42] Partai gagal mengabaikan peran ulama NU dan jaringannya, termasuk kepengurusan NU dan pesantren, di dalam proses kaderisasi dan rekrutmen. Posisi istimewa ulama kadang-kadang menjadi sangat berpengaruh di proses ini. Situasi ini tampak sesuai dengan pendapat Angelo Panebianco tentang

---

[41] Nachrawi menyatakan bahwa keberadaannya menunjukkan kaderisasi di PKB tidak sepenuhnya sia-sia. Wawancara dengan Imam Nachrawi, Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Provinsi Jawa Timur (2005–2007) dan anggota DPR RI (2009–2014), di Jakarta, 25 Oktober 2010.

[42] A. Muhaimin Iskandar, "Fundamental Politik Partai Kerja Modern: PKB Lima Tahun ke Depan", dalam A. Muhaimin Iskandar, *Melampaui Demokrasi Merawat Bangsa dengan Visi Ulama. Refleksi Sewindu Partai Kebangkitan Bangsa*, (Jogjakarta: Klik.R, 2006), 57–58.

salah satu karakteristik sebuah partai yang lemah pelembagaannya. Menurut Panebianco:

> *In weakly institutionalised parties, on the other hand, few "careers" of this type exist; there is greater discontinuity at all levels; and while there are few "conventional" careers, in the strict sense, there are many rapid careers involving immediate entry to the middle-high ranks … In weakly institutionalized organizations, on the other hand, there is a "horizontal integration" of elites: people enter the party at high levels from the outside environments in which they already occupy positions.*[43]

Mereka dapat relatif mudah mencapai posisi strategis di PKB hanya karena latar belakang NU, khususnya sebagai anggota dewan pengurus NU. Oleh karena itu, PKB sebenarnya mengalami fenomena 'integrasi horizontal'. Seseorang yang menjadi elite di NU atau bahkan hanya anak ulama NU dapat dengan mudah menjadi orang penting di PKB tanpa melewati proses kaderisasi yang objektif dan ketat.[44] Dengan kata lain, mereka dapat menduduki posisi penting di PKB karena status dan aktivitas di luar partai ini.

Situasi hampir sama terjadi pada rekrutmen jabatan publik, dalam hal ini pada soal pengisian anggota legislatif. Peran tokoh partai dan ulama kerap menentukan komposisi daftar calon anggota legislatif. Awalnya, PKB berupaya konsisten menjalankan mekanisme pencalonan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh partai. Namun dalam perkembangannya, tokoh-tokoh sentral partai termasuk Gus Dur memainkan peran lebih menentukan dalam proses ini ketimbang mekanisme yang telah digariskan partai. Tohadi, mantan pengurus

---

[43] Angelo Panebianco, *Political Parties: Organization and Power*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 61–63.

[44] Wawancara dengan Muhammad Tohadi, anggota PKB (1998–2005) dan Wakil Ketua PKNU DPP, di Jakarta, 6 Oktober 2010; dengan Dr. Ali Masykur Musa, Wakil Ketua Dewan Tanfidz PKB (2005–2010) dan Ketua Dewan Tanfidz PKB-Versi Parung (2008–2009), di Jakarta, 19 Oktober 2010; dengan Khofifah Indar Parawansa, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999–2001), Ketua Badan Pelaksana Pemenangan Pemilu PKB (2002–2005), di Jakarta, 20 Oktober 2010; dengan Choirul Anam, Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Provinsi Jawa (1998–2005) dan Ketua Dewan Tanfidz "PKB-Alwi" (2005–2007), di Jakarta, 13 Oktober 2010.

PKB, melihat bahwa segenap mekanisme dan persyaratan itu menjadi terbengkalai mengingat pada akhirnya kata akhir yang menentukan berada di tangan Dewan Syura, yang kerap dalam membuat keputusan mengabaikan masukan yang telah dibuat tim seleksi kandidat.[45]

Sebagai orang yang turut melakukan seleksi kandidat, Tohadi merasa apa yang dilakukannya dan tim seleksi menjadi sia-sia belaka.[46] Beberapa nama yang lolos seleksi tiba-tiba harus digantikan oleh tokoh-tokoh yang kurang layak, namun sejalan dengan kehendak Ketua Umum Dewan Syura. Situasi ini jelas pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan, terutama bagi mereka yang bercita-cita menjalankan sistem meritrokrasi.[47] Menurut Kristadi, peran tokoh sentral dalam penyusunan daftar calon legislatif tidak melalui sebuah mekanisme yang transparan. Dia mengatakan bahwa "Proses rekrutmen (di PKB) tidak dilakukan secara demokratis, melainkan didasarkan pada kedekatan yang bersangkutan dengan tokoh sentral."[48]

Pada level lokal, situasi yang sama juga ditemukan. Tokoh sentral di level lokal menjelma menjadi tokoh yang disegani, bahkan ditakuti dalam proses rekrutmen. Kalau pun dia tidak mengatakan sesuatu, keberadaannya saja telah cukup memengaruhi keputusan panitia seleksi caleg. Nurhasim mengatakan:

> Kesan "takut" bagi setiap kadernya untuk menolak keputusan partai yang diambil oleh pengurus yang juga seorang kiai masih tampak menonjol … Gejala di atas juga menguatkan asumsi bahwa faktor primordial dan hubungan yang bersifat *patron-client* turut pula memengaruhi model rekrutmen dalam PKB ....[49]

---

[45] Wawancara dengan Muhammad Tohadi, anggota PKB (1998–2005) dan Wakil Ketua PKNU DPP, di Jakarta, 6 Oktober 2010.

[46] Wawancara dengan Muhammad Tohadi, anggota PKB (1998–2005) dan Wakil Ketua PKNU DPP, di Jakarta, 6 Oktober 2010.

[47] Wawancara dengan Muhammad Tohadi, anggota PKB (1998–2005) dan Wakil Ketua PKNU DPP, di Jakarta, 6 Oktober 2010.

[48] Kristadi, "Pergulatan dan Tantangan PKB Memenuhi Harapan Bangsa", 129.

[49] Nurhasim, "Pengaruh dan Kekuatan Kiai dalam Rekrutmen Politik: Kasus Kabupaten Sampang dan Pasuruan", 66–67.

Di level lokal, nominasi caleg harus dikonsultasikan kepada pihak NU dan beberapa kiai karismatik ataupun tokoh NU. Di Pasuruan misalnya, situasi ini telah demikian berkembang dan dianggap sebagai sesuatu yang *taken for granted*.[50]

Hasil penelitian di wilayah Kabupaten Sampang memperlihatkan pola perekrutan yang tidak berbeda jauh dengan situasi nasional pada umumnya, di mana unsur kiai NU menjadi pertimbangan utama dalam pencalegan. Hasilnya adalah enam strata caleg, di mana strata teratas atau pertama adalah mereka yang berpeluang paling besar menduduki jabatan legislatif. Keenam strata itu adalah (1) kiai NU yang juga pengurus partai di level kabupaten, (2) kiai NU yang juga tokoh masyarakat di level kabupaten namun tidak menjadi pengurus partai, (3) pengurus partai non-kiai di level kabupaten, (4) kiai sekaligus pengurus partai di level kecamatan, (5) pengurus partai non-kiai di level kecamatan, dan (6) warga NU, yang bukan kiai dan bukan pengurus.[51] Dari strata itu terlihat bagaimana seorang kiai yang tidak menjadi anggota, pengurus, apalagi mengikuti kaderisasi dapat mengalahkan mereka yang telah memiliki status sebagai anggota partai namun sekadar menjadi warga NU.

C. Munculnya Dukungan atas Perpecahan

Kurangnya pembangunan kaderisasi sistematis menyebabkan tiga kecenderungan di partai, yang pada akhirnya memudahkan munculnya proses perpecahan. Tiga kecenderungan ini meliputi (1) kegagalan untuk menjaga pemahaman bersama tentang aturan main partai, (2) pelemahan *esprit de corps* atau penurunan rasa kebersamaan, dan (3) kegagalan untuk menjaga rasa hormat kader terhadap aturan main partai.

[50] *Ibid.*, 39.

[51] *Ibid.*, 55.

1. Kegagalan Menjaga Pemahaman yang Sama atas Aturan Main

Ketidakberlanjutan kaderisasi yang menunjukkan tidak adanya kaderisasi yang sistematis memberikan keragaman dan tidak lengkapnya transfer pengetahuan nilai dan aturan main partai ke seluruh kader. Kondisi ini mengarah ke munculnya multitafsir atas aturan main dan nilai-nilai partai.

Kondisi ini tidak saja berpotensi menyuburkan kader-kader yang hanya peduli pada keberlangsungan karier politiknya dan mengambil keuntungan pribadi dari partai, namun juga menyebabkan partai kehilangan soliditasnya. Khatibul Wiranu, mantan Sekretaris Jenderal PKB, berkeyakinan bahwa kaderisasi yang benar sejatinya akan membawa pada munculnya penafsiran yang setara dan solid di antara kader. Dia berkata, "Apabila kaderisasi berjalan baik di PKB, saya pikir perbedaan dalam memahami aturan main partai akan menurun."[52] Akan tetapi, situasi yang ada di PKB, menurutnya, bukanlah contoh dari apa yang diasumsikan itu.[53] Kacung Marijan melihat bahwa kaderisasi yang tidak sistematis telah memperlemah sosialisasi ideologis yang pada akhirnya memperlemah pemahaman kader PKB atas esensi ideologi partai.[54] Sejalan dengan pendapat ini, Khatibul mengakui bahwa kegagalan dalam menciptakan kaderisasi sistematis telah mendorong kader untuk mencari pengertian ideologi partai sendiri-sendiri, yang dengan berjalannya waktu memberikan peluang untuk penafsiran yang berbeda atas masalah ini di antara mereka.[55]

---

[52] Wawancara dengan Khatibul Umam Wiranu, Wakil Sekretaris Jenderal PKB (1999–2005) dan anggota DPR RI (1998–2004), di Depok, 17 Oktober 2010.

[53] Wawancara dengan Khatibul Umam Wiranu, Wakil Sekretaris Jenderal PKB (1999–2005) dan anggota DPR RI (1998–2004), di Depok, 17 Oktober 2010.

[54] Wawancara dengan Prof. Dr. Kacung Marijan, Pengamat Kebijakan NU dan mantan anggota Tim Asistensi Usulan Pendirian PKB (versi Rembang), di Jakarta, 26 November 2010.

[55] Wawancara dengan Khatibul Umam Wiranu, Wakil Sekretaris Jenderal PKB (1999–2005) dan anggota DPR RI (1998–2004), di Depok, 17 Oktober 2010.

Pada level nasional, yang kemudian menyebar di level lokal, debat tentang proporsi peran Ketua Umum Dewan Syura dalam proses pemecatan Ketua Umum Dewan Tanfidz, misalnya, menjadi perdebatan yang tidak kunjung selesai. Walaupun AD/ART partai menyebutkan sejumlah kewenangan Ketua Umum Dewan Syura, pemahaman yang sama tentang hal ini tidak terjadi di antara kader. Sejumlah kader percaya dan mengintepretasikan bahwa Dewan Syura berhak untuk memecat Ketua Umum Dewan Tanfidz. Oleh karena itu, pemecatan dapat dilakukan tidak hanya pada forum Muktamar, dengan syarat bahwa Ketua Umum Dewan Syura menyetujuinya.

Di lain pihak, tidak sedikit kader berkeyakinan bahwa Muktamar atau MLB adalah satu-satunya forum yang sah untuk memecat Ketua Umum Dewan Tanfidz. Hal ini mengingat bahwa sesorang yang memegang tampuk Ketua Umum Dewan Tanfidz merupakan hasil kesepakatan muktamar yang hanya dapat diberhentikan pada forum yang sama atau setara. Dalam perjalanannya, tidak ada satu tafsiran tunggal yang kokoh untuk digunakan sebagai referensi yang ditransmisikan atau disosialisasikan partai ke seluruh kader.[56] Hingga satu dekade keberadaan PKB, persoalan ini selalu menjadi sumber polemik, bahkan perpecahan.

Perbedaan juga terjadi berkaitan dengan pemahaman ideologi partai, khususnya tentang pelaksanaan pluralisme sebagai salah satu nilai penting di partai ini. Sejumlah pihak berkeyakinan bahwa partai harus melaksanakan 'pluralisme terbatas' dengan memberikan peluang lebih besar bagi anggota NU dan ajaran *ahlussunnah wal jama'ah* untuk berkembang. Kubu ini percaya bahwa partai harus menjadi pelindung atas perkembangan ajaran dan kepentingan kaum Nahdiyin. Mereka juga menghendaki agar PKB lebih mengutamakan hak kaum Nahdiyin untuk terlibat di dalam struktur dan aktivitas partai.[57] Sebagian dari kalangan ini memandang dengan curiga dan

---

[56] Wawancara dengan H.Z. Arifin Junaidi, Sekretaris Jenderal Dewan Syura PKB (2002–2005) dan Ketua Dewan Syura PKB (2005–2010), di Jakarta, 28 Oktober 2010.

[57] Choirie, "Menjadikan PKB Partai Nasional dan Terbuka", 196.

khawatir bila partai nantinya akan dimanfaatkan oleh kalangan non-NU untuk mengusung agenda politiknya dengan mengatasnamakan pluralisme. Jika ini terjadi, bukan tidak mungkin partai ini akan sepenuhnya menjadi partai sekuler ketimbang partai berdasarkan nilai-nilai Islam.[58] Mereka bahkan telah melihat kecenderungan PKB saat ini yang tampak semakin menjauh dari idealisme *ahlussunnah wal jama'ah* yang sesungguhnya.[59]

Di lain pihak, banyak anggota percaya bahwa PKB harus memperlakukan seluruh warga Indonesia secara sama dan sederajat. Kalangan ini menginginkan partai benar-benar melaksanakan ide pluralisme dengan sepenuh hati dan diterapkan secara konsisten. Mereka melihat bahwa partai harus memberikan peluang yang sama dalam banyak hal, termasuk untuk aktif di partai, baik terhadap anggota NU maupun mereka yang non-NU, bahkan nonmuslim.[60] Lebih dari itu, partai juga harus sepenuhnya menjadi pelindung kelompok minoritas.[61] Pertarungan pandangan antara mereka yang mencoba konsisten dengan keterbukaan dan nilai-nilai 'politik liberal' dengan mereka yang menjaga kesetiaan tradisional terhadap kedudukan ulama, kaum Nahdiyin, dan nilai-nilai *ahlussunnah wal jama'ah* kerap mencuat ke permukaan, yang dalam momen-momen tertentu menjadi salah satu persoalan yang memicu terjadinya pengkubuan.

---

[58] Wawancara dengan Marinah Hardy, Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Provinsi Nusa Tenggara Barat (2002–2005), di Jakarta, 28 Oktober 2010; dengan Muhammad Tohadi, Anggota PKB (1998–2005) dan Wakil Ketua PKNU DPP, di Jakarta, 6 Oktober 2010.

[59] Wawancara dengan Marinah Hardy, Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Provinsi Nusa Tenggara Barat (2002–2005), di Jakarta, 28 Oktober 2010; dengan Muhammad Tohadi, anggota PKB (1998–2005) dan Wakil Ketua PKNU DPP, di Jakarta, 6 Oktober; dengan Choirul Anam, Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Provinsi Jawa (1998–2005) dan Ketua Dewan Tanfidz "PKB-Alwi" (2005–2007), di Jakarta, 13 Oktober 2010.

[60] Choirie, "Menjadikan PKB Partai Nasional dan Terbuka", 196–197.

[61] Wawancara dengan Andi M. Ramly, Ketua Dewan Tanfidz (2002–2010), Sekretaris Dewan Syura PKB-Muhaimin (2008–2010) dan penulis *"Mabda' Siyasi PKB"*, di Jakarta, 15 Oktober 2010; dengan Ahmad Shodiq Noor, Sekretaris Jenderal DPW PKB DKI Jakarta, di Jakarta, 3 November 2010.

Gradasi pemahaman dan penafsiran mengenai aturan main, visi, dan misi partai, pada gilirannya menyulitkan terciptanya sebuah pola interaksi yang dilandasi oleh rasa kebersamaan. Kader pun pada akhirnya mudah terombang-ambing untuk mengikuti salah satu versi penafsiran. Situasi ini pada akhirnya menjadi salah satu pemicu terhadap tiga konflik besar yang mengarah ke perpecahan internal. Dalam hal ini, Kristiadi berkesimpulan bahwa selama hampir satu dekade keberadaannya, perbedaan penafsiran telah menimbulkan konflik besar di partai ini.[62]

2. Pelemahan *Esprit de Corps*

Karena proses kaderisasi bertumpu pada berbagai institusi, terutama pesantren dan sub-kelompok NU, kader secara esensial menjadi tersebar di banyak patron tanpa kontrol efektif dari perangkat partai. Dalam hal ini, partai tidak dapat menumbuhkan dan memelihara *esprit de corps* karena kader cenderung terikat dengan salah satu institusi atau patron tertentu. Partai sama sekali tidak dapat memotong ikatan khas antara kiai dan santri yang berjalan dengan efektif ini.[63] Selain itu, banyak pula kader, yang juga santri, yang lebih memilih mengikuti ulama atau patron mereka ketimbang partai.[64] Kerap kali mereka lebih mengormati dan mendengar pernyataan atau perintah ulama atau patron mereka daripada pernyataan atau perintah partai. Akibatnya, kader tidak memiliki kesadaran untuk membangun rasa kebersamaan dengan sesama anggota partai lainnya atau merasa berkewajiban untuk mengutamakan kesatuan dan persatuan partai.

Dalam nuansa seperti ini, tidak mengherankan jika keputusan seorang patron menjadi semacam fatwa yang diikuti dengan tulus

[62] Kristiadi, "Pergulatan dan Tantangan PKB Memenuhi Harapan Bangsa", 127.

[63] Wawancara dengan Yahya Cholil Staquf, Waki Sekretaris Jenderal PKB (1998–2005) dan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid (2001), di Rembang, 11 November 2010.

[64] Wawancara dengan Anas Nashikin, Sekretaris Jeneral *Garda Bangsa*, salah satu *onderbouw* PKB, di Jakarta, 26 Oktober 2010. Ramlan Surbakti, "Tingkat Pelembagaan Partai Politik", *Kompas*, 6 Januari 2003.

oleh kader-kadernya. Keputusan K.H. Fawaid Syamsul Arifin, ulama karismatik dari Situbondo, untuk meninggalkan partai yang kemudian diikuti dengan keluarnya ribuan kader dari PKB pada tahun 2003, misalnya, menunjukkan fenomena ini. Staquf melihat loyalitas santri terhadap Kiai Arifin sebagai patron adalah alasan utama bagi santri untuk mengikuti manuver politiknya.[65] Keputusan Arifin, yang pernah menjabat Sekretaris Dewan Syura DPC PKB Situbondo, berdampak pada kehilangan suara yang signifikan bagi PKB pada pemilu 2004 untuk wilayah Situbondo.[66]

Kemudian, di dalam situasi ini, sangatlah mungkin kader di PKB mengikuti 'patron langsung' mereka dalam isu tertentu tanpa berupaya memahami situasi sebenarnya. Kader akan mengikuti ulama mereka tanpa membantah, bahkan walaupun mereka harus bertarung dengan kader lainnya.[67] Khofifah Parawansa menjelaskan situasi ini sebagai kesiapan untuk meniadakan satu dengan yang lainnya.[68] Menurutnya, mereka ini bahkan kadang-kadang memperlihatkan loyalitas dengan memperlakukan lawan patron mereka sebagai musuh daripada sebagai teman hanya karena perbedaan pendapat.[69] Adanya loyalitas ini menunjukkan bahwa peran ulama atau patron kader PKB dalam hal tertentu masih signifikan, dan rasa terikat dengan ulama yang mereka hormati tidak dapat dengan mudah diganti oleh partai.[70]

---

[65] Wawancara dengan Yahya Cholil Staquf, Waki Sekretaris Jenderal PKB (1998–2005) dan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid (2001), di Rembang, 11 November 2010.

[66] "Menakar Ancaman Partai Sempalan", *Gatra*, 28 Mei 2008, h.89.

[67] "Makin Panas Menjelang Muktamar PKB", *www.tempointeraktif.com*, 23 September 2005.

[68] Wawancara dengan Khofifah Indar Parawansa, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999–2001), Ketua Badan Pelaksana Pemenangan Pemilu PKB (2002–2005), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

[69] Wawancara dengan Khofifah Indar Parawansa, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999–2001), Ketua Badan Pelaksana Pemenangan Pemilu PKB (2002–2005), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

[70] Wawancara dengan Khatibul Umam Wiranu, Wakil Sekretaris Jenderal PKB (1999–2005) dan anggota DPR RI (1998–2004), di Depok, 17 Oktober 2010.

Situasi ini diperparah dengan kenyataan bahwa partai juga menjadi medium untuk menegakkan kekuasaan kelompok dan saluran transaksi kekuasaan antara elite di PKB dan NU serta para pengikut mereka. Dalam hal ini, nepotisme menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi karena peran simbiosis mutualisme antaraktor daripada proses kaderisasi di dalam proses rekrutmen. Menurut Koirudin, di tingkat lokal elite NU masih menjadi kekuatan riil.[71] Jenis hubungan ini mempertahankan loyalitas santri sebagai kader partai terhadap ulama mereka sebagai patron. Oleh karena itu, kader cenderung melihat kepada kelompok atau elite yang memberikan mereka keuntungan nyata, seperti sumber utama kekuasaan yang sah, dan memberikan mereka loyalitas daripada hanya pada partai dengan akibat bahwa loyalitas ganda ini tidak dapat secara efektif dihindari.

Banyak kader partai, khususnya di level senior dan elite, memiliki keyakinan yang mendalam bahwa cerita keberhasilan mereka di bidang politik tidak berkaitan dengan partai, melainkan karena posisi penting mereka di NU atau masyarakat. Situasi ini, menurut Khatibul Wiranu, memperkuat rasa independensi di antara sebagian besar ulama atau elite lokal terhadap partai. Pada akhirnya, partai tidak dapat sepenuhnya mengarahkan dan mengontrol pandangan atau aktivitas politik mereka.[72] Yahya Staquf menyatakan bahwa salah satu konsekuensinya adalah apabila mereka merasa tidak cocok lagi dengan Jakarta (DPP PKB), mereka akan dengan mudah meninggalkan partai.[73] Situasi ini dapat terjadi karena "partai terdiri dari sejumlah kantong-kantong yang independen. Hal ini seperti *puzzle* yang di dalamnya setiap bagian relatif sudah mapan dan berdiri

[71] Koirudin, *Menuju Partai Advokasi*, 185.

[72] Wawancara dengan Khatibul Umam Wiranu, Wakil Sekretaris Jenderal PKB (1999–2005) dan anggota DPR RI (1998–2004), di Depok, 17 Oktober 2010.

[73] Wawancara dengan Yahya Cholil Staquf, Waki Sekretaris Jenderal PKB (1998–2005) dan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid (2001), di Rembang, 11 November 2010.

sendiri."[74] Dan tidak adanya kaderisasi sistematis telah menyuburkan dan memuluskan situasi ini daripada merusaknya.

3. Tersingkirnya Aturan Main

Tidak adanya kaderisasi sistematis juga menyebabkan partai kehilangan kemampuannya untuk mengelola disiplin kader atas aturan main partai. Partai tidak dapat menghindari kenyataan bahwa banyak kader telah mengabaikan aturan main partai. Menurut Khatibul Wiranu:

> Dengan berjalannya waktu, disiplin administratif di dalam partai telah hilang. Anggota dewan pengurus partai cenderung mengedepankan pendekatan subjektif daripada konsisten dengan AD/ART partai.[75]

Dia yakin bahwa tidak adanya kaderisasi sistematis telah mengedepankan pendekatan personal di dalam pengelolaan partai karena pada dasarnya anggota partai tidak lagi menghormati aturan internal partai.[76] Nepotisme, misalnya, menjadi fenomena umum di dalam proses pengisian posisi strategis di dalam partai di seluruh tingkat kepengurusan. Khofifah menyatakan bahwa fondasi dasar struktur partai masih ditentukan terutama oleh kedekatan atas dasar hubungan kekerabatan daripada pencapaian objektif.[77] Dia mengakui bahwa "PKB adalah partai yang memasukkan aspek keluarga dalam struktur kepengurusannya paling banyak di Indonesa tanpa proses bertahap."[78]

---

[74] Wawancara dengan Yahya Cholil Staquf, Waki Sekretaris Jenderal PKB (1998–2005) dan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid (2001), di Rembang, 11 November 2010.

[75] Wawancara dengan Khatibul Umam Wiranu, Wakil Sekretaris Jenderal PKB (1999–2005) dan anggota DPR RI (1998–2004), di Depok, 17 Oktober 2010.

[76] Wawancara dengan Khatibul Umam Wiranu, Wakil Sekretaris Jenderal PKB (1999–2005) dan anggota DPR RI (1998–2004), di Depok, 17 Oktober 2010.

[77] Wawancara dengan Khofifah Indar Parawansa, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999–2001), Ketua Badan Pelaksana Pemenangan Pemilu PKB (2002–2005), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

[78] Wawancara dengan Khofifah Indar Parawansa, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999–2001), Ketua Badan Pelaksana Pemenangan Pemilu PKB (2002–2005), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

Kemudian, keberadaan wajah-wajah baru di struktur DPP PKB yang hanya karena kedekatan mereka dengan sejumlah tokoh penting partai menunjukkan aspek lain kegagalan *merit system*. Kehadiran orang-orang seperti Sigid, Artalyta, dan Muslim Abdurrahman adalah contoh situasi ini, ketika orang-orang yang tidak dikenal di PKB, terutama kader di tingkat menengah dan akar rumput, dapat memegang sejumlah posisi strategis di partai ini.

Di lain pihak, sangatlah mudah pula partai memecat anggotanya walaupun tidak ada bukti pendukungnya. Banyak kader yang akhirnya juga merasa tidak nyaman karena posisi mereka dapat dengan mudah hilang karena penilaian subjektif.[79] Lambat laun banyak kader yang yang tidak yakin bahwa pencapaian di dalam kaderisasi dan peristiwa formal lain akan membawa implikasi positif terhadap perkembangan karier mereka.[80] Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Sulawesi Tengah Samsudin Pay mengatakan bahwa situasi ini membuat PKB tidak dapat memberikan jaminan karier politik bagi kadernya, termasuk dirinya sendiri.[81]

Selain itu, kader biasa yang telah mengabdi kepada partai akhirnya berpikir bahwa situasi di partai ini tidaklah menguntungkan mereka karena mereka kerap harus memberikan jalan kepada orang-orang darah biru dan kolega mereka untuk memimpin dan orang-orang itu menganggap situasi ini sebagai hal yang normal.[82] Suasana ini memberikan dampak serius bagi kader yang memiliki peluang untuk mencapai jenjang yang lebih tinggi dalam perkembangan karier mereka. Menurut Choirie:

---

[79] Ratnawati, "Beberapa Masalah Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Alternatif Solusi", 94–95.

[80] Wawancara dengan Ahmad Shodiq Noor, Sekretaris Jenderal DPW PKB DKI Jakarta, di Jakarta, 3 November 2010.

[81] M. Hernowo dan M. Zaid Wahyudi, "Konflik PKB. MLB dan Ketidakpastian Karier Politik", *Kompas*, 9 Mei 2008.

[82] Wawancara dengan Muhammad Tohadi, anggota PKB (1998–2005) dan Waki Ketua PKNU DPP, di Jakarta, 6 Oktober 2010.

> Tradisi menghormati 'Gus', semacam 'kasta tertinggi' dan 'ras utama' di dalam kepengurusan NU dengan seluruh *privilege* mereka, kadang-kadang melumpuhkan sistem kaderisasi yang berdasarkan pada *meritocracy spirit* dan dengan demikian menghambat kader-kader 'NU biasa' untuk memperoleh mobilitas vertikal.[83]

Situasi ini juga menghambat motivasi kader untuk sungguh-sungguh menjalankan kewajiban mereka di partai dan mengikuti aturan main karena *fairness* bukan merupakan ukuran penting untuk perkembangan karier.

Pada akhirnya, situasi ini membuat sebagian besar kader tidak semangat dan tidak menghormati sistem yang ada di partai.[84] Di lain pihak, situasi ini justru mendukung kebebasan bertindak di antara kader demi menjamin kepentingan mereka, termasuk melindungi kepentingan patron politik mereka. Situasi ini juga mendorong mereka membangun hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh berdasarkan kepentingan eksklusif.[85] Hal tersebut pada umumnya mengajarkan kader untuk loyal dengan tokoh yang dapat memberikan keuntungan kepada mereka, daripada loyal dan konsisten mengikuti sistem. Inilah pilihan yang rasional agar dapat selamat di partai ini.

Akibatnya, tidak ada *merit system* dan penghargaan atas aturan main yang terkait dengan rekrutmen partai. Kader tidak melihat korelasi yang kuat antara mengikuti proses kaderisasi dan mencapai posisi yang lebih baik di partai. Hal ini membuat mereka merasa bebas untuk menerima permintaan dari kelompok yang berkonflik untuk memegang posisi strategis di partai. Terbangunlah semacam prinsip bahwa mereka akan mengikuti sebuah manuver politik, sejauh

---

[83] Choirie, "Menjadikan PKB Partai Nasional dan Terbuka", 204.

[84] Wawancara dengan Dr. A. Effendy Choirie, anggota DPR RI FPKB (1998–2011) dan Ketua Dewan Tanfidz PKB-Versi Parung (2008–2009), di Jakarta, 19 Oktober 2010.

[85] Wawancara dengan Prof. Dr. Kacung Marijan, Pengamat Kebijakan NU dan mantan anggota Tim Asistensi Usulan Pendirian PKB (versi Rembang), di Jakarta, 26 November 2010; dengan Khatibul Umam Wiranu, Wakil Sekretaris Jenderal PKB (1999–2005) dan anggota DPR RI (1998–2004), di Depok, 17 Oktober 2010.

dapat membawa keuntungan signifikan.[86] Kemudian menjadi suatu yang lazim apabila pendukung kelompok yang berkonflik dapat dengan mudah meminta sejumlah kader untuk bergabung dan kader menerima permintaan tersebut.[87]

D. Dampak Kecenderungan di Atas terhadap Partai

Ketiga kecenderungan di atas, yakni (1) perbedaan pandangan tentang aturan main, (2) loyalitas ganda, dan (3) tidak berjalannya *merit system* memberikan kontribusi yang besar bagi setidaknya tiga hal penting yang menopang terciptanya perpecahan.

1. Ketidaksepahaman yang Menguat

Pertama, ketidaksepahaman yang berkelanjutan. Situasi tersebut menyebabkan jika ada sebuah perbedaan pandangan yang mengarah pada konflik, tiap-tiap pihak pada akhirnya tetap berpegang pada persepsi yang dimilikinya. Dalam konflik yang berujung pada perpecahan, baik pendukung Gus Dur maupun pendukung ketiga Ketua Umum Dewan Tanfidz yang dipecat meyakini bahwa apa yang dilakukannya adalah tepat. Setiap kelompok menyampaikan pernyataan-pernyataan kepada publik bahwa langkah yang diambil telah tepat, baik dalam soal yang terkait dengan prosedur maupun alasan yang terkait dengan idealisme. Menurut Kamarudin, persoalan konflik yang berkepanjangan dan perpecahan internal menjadi amat mungkin muncul karena sejak dini, masing-masing telah memiliki pandangan yang berbeda.[88]

---

[86] Wawancara dengan Prof. Dr. Kacung Marijan, Pengamat Kebijakan NU dan mantan anggota Tim Asistensi Usulan Pendirian PKB (versi Rembang), di Jakarta, 26 November 2010; dengan Anas Nashikin, Sekretaris Jenderal Garda Bangsa, salah satu *onderbouw* PKB, di Jakarta, 26 Okober 2010; dengan H.Z. Arifin Junaidi, Sekretaris Jenderal Dewan Syura PKB (2002–2005) dan Ketua Dewan Syura PKB (2005–2010), di Jakarta, 28 Oktober 2010.

[87] Wawancara dengan Zannuba Ariffah "Yenny" Wahid, Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz PKB-Gus Dur (2008–2010), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

[88] Kamarudin, *Konflik Internal PKB*, (Depok: Akses Publishing, 2008), 236–238.

Sikap keras untuk mempertahankan pandangan yang berbeda dan dilandasi oleh persepsi yang berbeda, menjadi unsur krusial yang menyulitkan kelompok yang berbeda pandangan itu untuk menyatu. Di sisi lain, kompromi menjadi sulit dicapai juga karena perbedaan pandangan di antara mereka berbeda secara diametrikal. Kader-kader PKB dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak mudah dikompromikan dan cenderung saling meniadakan.

Dalam soal forum apa yang harusnya digunakan untuk memecat seorang Ketua Umum Dewan Tanfidz, misalnya, pilihan untuk memecat adalah melalui media muktamar yang melibatkan banyak orang. Namun menurut pandangan mendasar kalangan pendukung Ketua Umum Dewan Tanfidz yang dipecat, menjadi sebuah 'antitesa' atas pilihan yang membolehkan hal itu dilakukan dalam forum terbatas yang hanya melibatkan segelintir orang, yang menjadi pegangan kelompok Gus Dur. Keterlibatan orang banyak versus keterlibatan elite menjadi situasi yang sulit untuk dicarikan jalan tengahnya. Begitu pula dengan wajib tidaknya seseorang itu diberikan surat peringatan sebelum pemecatan. Setiap kelompok memiliki perbedaan penafsiran. Bagi pendukung Ketua Umum Dewan Tanfidz hal itu merupakan keharusan konstitusional, sedangkan bagi yang lain bukan sebuah keharusan.

Dalam satu dekade keberadaan PKB, persoalan media dan prosedur pemecatan menjadi sumber konflik yang tidak terselesaikan mengingat persoalan itulah yang selalu dikemukakan hingga terbentuknya kepengurusan ganda dan upaya menyelesaikan hal itu di level pengadilan. Media formal penyelesaian perbedaan pandangan pun menjadi tidak bermanfaat karena keputusan terletak pada sekelompok orang dan figur, bukan pada aturan main. Selain memang partai tidak memiliki sebuah standar baku untuk menyelesaikan konflik, ada tradisi untuk menempatkan penafsiran elite menjadi penafsiran kelompok. Loyalitas kepada figur, terutama Gus Dur, mengalahkan objektivitas para pengikutnya untuk melakukan penafsiran yang adil atas sebuah aturan main.

Dalam PKB, hal ini tidak hanya terjadi pada kader-kader junior yang memiliki tingkat independensi lemah dalam hal menafsirkan aturan main, namun juga terjadi pada sebagian kader senior, bahkan para elite. Penafsiran Gus Dur untuk memecat Matori melalui forum terbatas, misalnya, dibenarkan oleh banyak tokoh intelektual termasuk Effendy Choirie. Sementara itu, pemecatan atas Saifullah Yusuf atas dasar penafsiran 2/3 anggota rapat pleno dan bukan 2/3 peserta rapat, sebagaimana yang tertera pada konstitusi partai, dibenarkan oleh H.Z. Junaidi, seorang tokoh senior gerakan yang turut menyusun AD/ART. Begitu pula dengan pemecatan atas Muhaimin yang tidak pada tempatnya mendapatkan dukungan dari tokoh nasional sekaliber Ali Masykur atau Yenny Wahid.

Sementara pada level kader yang lebih rendah, kedekatan kepada elite, baik karena landasan kultural maupun ketergantungan karier dan upaya meraih keuntungan nepotisme, menyebabkan penafsiran elite kerap dengan mudahnya menjadi penafsiran kelompok. Dalam praktiknya, peran kiai masih bersikap determinan bagi kader-kader PKB di pelosok daerah, yang menyebabkan mereka cenderung membela pandangan dan penafsiran figur yang dihormati ketimbang melakukan pengkajian secara kritis dan objektif. Kepatuhan kepada ulama atau elite sedemikian telah membawa partai pada kesulitan untuk mencapai kompromi dan cenderung pada pengerasan sikap. Dalam situasi seperti ini, islah menjadi sulit untuk dilakukan karena saat sebuah keberpihakan telah ditetapkan oleh *patron*, para *client* cenderung mengikutinya.

Dalam atmosfer seperti ini, dapat dipahami jika perbedaan pandangan mengenai aturan main tidak dapat dengan mudah dikompromikan dan malah cenderung memicu konflik berkepanjangan yang berujung pada formalisasi perbedaan yang menandai perpecahan.

2. Tersebarnya Semangat Permusuhan

Di lain pihak, kurang adanya *esprit de corps* juga menjadi masalah karena tidak adanya upaya menjaga kesatuan internal. Kader cenderung mudah tersebar dalam kelompok-kelompok karena mereka cenderung mengikuti salah satu patron atau institusi tertentu. Tidak adanya *esprit de corps* menimbulkan kebencian di antara pendukung setiap kelompok yang berkonflik. Kader menganggap teman mereka di kelompok berlawanan sebagai musuh yang harus disingkirkan. Tidak adanya *esprit de corps*, di lain pihak, menyebabkan setiap kelompok yang berkonflik cenderung memaksakan pendapat mereka satu dengan lainnya dan tidak mau membangun persepsi bersama.

Loyalitas mereka terhadap ulama tertentu memainkan peran signifikan. Di sini, kader menjadi semacam target yang mudah dimobilisasi untuk mendukung salah satu kelompok yang sedang berkonflik. Adanya ribuan kader yang juga sebenarnya santri dari ulama tertentu di MLB menunjukkan keinginan mereka untuk mendukung dan membela kelompok yang didukung patron mereka. Setiap kelompok yang berkonflik mengeksploitasi hal ini untuk memperoleh dukungan di dalam pembentukan kepengurusan partai dan MLB.

Tidak adanya *esprit de corps* telah memelihara pula eksistensi 'hegemoni lokal'[89] terhadap kader PKB yang tidak dapat dengan mudah digantikan partai. Dalam menghadapi konflik internal, akibatnya, kader yang juga pengikut para ulama pada waktu bersamaan dapat diperintahkan untuk mendukung kepentingan patron, termasuk mendukung salah satu kelompok yang berkonflik untuk membentuk kepengurusan. Kader ini dapat dengan mudah dimotivasi untuk mengikuti instruksi ulama mereka tanpa bertanya sama sekali.

Menurut Staquf, kader di tingkat akar rumput mudah dimotivasi untuk mendukung salah satu kelompok apabila patron mereka atau

[89] Wawancara dengan Yahya Cholil Staquf, Wakil Sekretaris Jenderal PKB (1998–2005) dan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid (2001), di Rembang, 11 November 2010.

tokoh yang dihormati berada di dalam kelompok tersebut.[90] Dengan menggunakan kata seperti 'atas nama Gus Dur', kubu Gus Dur dapat dengan mudah memotivasi kader untuk bertindak. Hal ini terjadi di kelompok lain. Staquf berkeyakinan bahwa dengan berjalannya waktu, setiap kelompok yang berkonflik menggunakan situasi ini untuk membangun keberadaan mereka, termasuk membentuk kepengurusan sebelum MLB.[91] Di lain pihak, dengan memanfaatkan situasi ini pula, sejumlah ulama karismatik termasuk mereka yang bergabung dengan Kelompok Kiai Langitan telah memotivasi santri dan orang-orang yang mendukung kubu mereka.[92]

Sikap di atas pada akhirnya menghambat upaya untuk mencari solusi objektif kepada seluruh pihak karena keputusan elite atau tokoh terkemuka menjadi fatwa yang harus diikuti seluruh kader dan individu yang merasa dekat atau menghormati tokoh tersebut. Di lain pihak, kader berkeyakinan bahwa mereka di jalan yang benar karena tindakan mereka didukung tokoh-tokoh terhormat. Menurut Latif, ketergantungan pada tokoh ulama dalam kaderisasi pada akhirnya memperlemah kompetensi organisasi di dalam pengelolaan kebencian dan konflik melalui prosedur yang terlembaga.[93] Di dalam situasi ini, kompromi menjadi sulit dilakukan karena kepentingan tokoh karismatik menjadi dominan daripada mekanisme resolusi konflik yang objektif. Sulitnya kompromi ini menandai terciptanya perpecahan.

---

[90] Wawancara dengan Yahya Cholil Staquf, Wakil Sekretaris Jenderal PKB (1998–2005) dan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid (2001), di Rembang, 11 November 2010.

[91] Wawancara dengan Yahya Cholil Staquf, Wakil Sekretaris Jenderal PKB (1998–2005) dan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid (2001), di Rembang, 11 November 2010.

[92] "Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Masa Bakti 2002–2005", dalam *Membangun Demokrasi Berbasis Tradisi: Ketetapan-Ketetapan Muktamar II Partai Kebangkitan Bangsa*, Tanggal 1–2 Oktober 2005 di Surabaya, 6.

[93] Yudi Latif, "Transformasi PKB: Dari Jaringan Kultural ke Jaringan Fungsional", dalam *9 Tahun PKB. Kritik dan Harapan*, 148.

3. Akselerasi Pengkubuan dan Formalisasi Perpecahan

Dua situasi di atas makin diperburuk atau diperkuat dengan kecenderungan pengelompokan dan pengerasan faksi yang cepat. Kaderisasi yang tidak berjalan dengan baik menopang pengelompokan yang demikian cepat dari tiap-tiap pihak yang terkait. Keberadaan pengelompokan yang cepat ini cenderung mempercepat terjadinya perpecahan ketimbang menyurutkannya. Hal ini terutama terkait dengan persoalan mendapatkan semacam legitimasi bahwa keberadaan mereka sah adanya.

Dalam satu dekade keberadaan PKB, kelompok yang bertarung selalu berkepentingan untuk segera mendapatkan dukungan dari level bawah, baik secara legal maupun tidak. Praktik ini diakui oleh Muhaimin dengan mengatakan bahwa:

> Konflik yang terjadi pada tataran elite partai selalu didorong menjadi konflik horizontal yang melibatkan simpul-simpul kader di level bawah, bahkan tidak jarang diarahkan untuk melibatkan konstituen secara langsung.[94]

Ketiadaan *merit system* menyebabkan aturan main mengenai rekrutmen tidak dihormati. Akibatnya, setiap pihak dapat dengan relatif mudah membentuk kepengurusan hingga ke level bawah. Dalam soal pembentukan kepengurusan, Tabel 9.1 memperlihatkan bagaimana tia-tiap pihak yang bertikai dalam sebuah episode konflik dapat mewujudkan kepengurusan hingga ke level kabupaten dengan jumlah kepengurusan yang hampir sama.

Dengan tidak adanya penghormatan terhadap sistem partai, hal ini memudahkan terciptanya kelompok pendukung dari masing-masing kelompok yang berkonflik termasuk ratusan kepengurusan partai di tingkat lokal. Di tahun 2002, setiap kubu mampu membangun kepengurusan di seluruh provinsi dalam waktu yang hampir bersamaan. Dalam MLB yang berlangsung hampir berdekatan,

[94] Muhaimin Muhaimin, "Sambutan Ketua Dewan Tanfidz PKB", dalam M. Hanif Dakhiri, Eman Hermawan dan Marwan Ja'far (eds.), *Workshop Penguatan Sistem dan Manajemen Partai. Menyongsong Pemilu 2009*, (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, 2007), 7.

Tabel 9.1 Pelaksanaan Muktamar/MLB PKB (2002-2008)

Tempat	Waktu	Penyelenggara	DPW	DPC
Jakarta	14-16 January 2002	PKB-Matori	29	317
Yogyakarta	17-19 January 2002	PKB-Gus Dur/Alwi	29	330
Semarang	16-19 April 2005	PKB-Gus Dur/Muhaimin	33	463
Surabaya	1-2 October 2005	PKB-Alwi	31	350
Parung (Bogor)	29 April-1 May 2008	PKB-Gus Dur	30	396
Jakarta	2-4 May 2008	PKB-Muhaimin	32	429

Sumber: *www.inilah.com, www.gatra.com*

kedua kelompok mampu menghadirkan 29 delegasi yang mewakili pengurus di level provinsi. MLB PKB-Matori menunjukkan bahwa partai ini memiliki kepengurusan hingga 317 DPC. Kepengurusan yang terbentuk itu mendapat pujian dari banyak kalangan sebagai bentuk kemampuan Matori melakukan konsolidasi kepengurusan. Padahal saat itu, menurut pandangan umum, hampir seluruh PKB di seluruh Indonesia masih setia pada Gus Dur dan jajaran ulama sepuh yang saat itu masih berada dalam satu barisan dengan Gus Dur.

Situasi yang sama juga terjadi pada tahun 2005. Tiap-tiap kubu dapat membentuk sebuah kepengurusan lengkap di banyak daerah dalam waktu sekejap. Kelompok Alwi dapat membentuk kepengurusan di 31 provinsi dan 350 kabupaten/kota dan mengklaim sebagai kepengurusan yang sah hanya dalam waktu enam bulan saja. Sebuah situasi yang amat cepat mengingat secara normatif diperlukan sebuah proses kaderisasi panjang yang harus dilalui untuk melakukan rekrutmen politik. Situasi itu terulang pada tahun 2008, dalam kasus yang terkait dengan pertarungan kubu PKB-Gus Dur dan PKB-Muhaimin ini. Kelompok Muhaimin bahkan dapat melebihi Gus Dur dalam jumlah kepengurusan di level kabupaten/Kota. Jika Gus Dur hanya dapat eksis di 30 provinsi dan 396 kabupaten/kota, Muhaimin mampu membuat kepengurusan di 32 provinsi dan 429 kabupaten/kota. Melihat kenyataan mudahnya Muhaimin membentuk kepengurusan, lawan politiknya beraksi dengan menyatakan bahwa Muhaimin telah melakukan manipulasi.

Adanya kelompok yang dengan cepat terbentuk cenderung merusak situasi karena hal ini meningkatkan keyakinan setiap kelompok bahwa jumlah besar orang yang terorganisasi telah memberikan dukungan kepada mereka. Adanya muktamar yang dihadiri seluruh kepengurusan partai dan ribuan kader dari seluruh Indonesia memotivasi setiap kelompok yang berkonflik untuk mencapai tujuannya.[95] Mereka juga berkeyakinan bahwa kader mendukung mereka dan mereka sudah berada di jalan yang benar untuk memperjuangkan kebenaran dan melanjutkan tujuan partai.[96] Situasi ini pada akhirnya membuat kompromi menjadi lebih sulit lagi untuk dicapai. Daripada mencapai resolusi konflik, kelompok yang berkonflik lebih suka melegalisasi kehadiran mereka melalui MLB.

Berkaitan dengan kemampuan setiap kelompok yang berkonflik dalam mendapatkan kepengurusan dari seluruh Indonesia untuk menghadiri setiap muktamar atau MLB, sejumlah kader percaya bahwa hal ini merupakan hasil rekayasa atau kebijakan manipulatif yang dilakukan oleh sejumlah pengurus lokal, sebagai respons atas undangan untuk menghadiri muktamar atau MLB dari kedua kelompok yang berkonflik.[97] Mereka percaya bahwa sejumlah elite kunci di kepengurusan lokal sepakat untuk mengirim utusan menghadiri setiap muktamar dan MLB. Kemudian, elite ini memerintahkan anggota pengurusan yang berbeda untuk hadir di setiap muktamar atau MLB itu. Mereka berharap bahwa dengan melakukan manuver tersebut, keberadaan kepengurusan mereka akan aman, tidak masalah siapa yang akan memenangi konflik.

[95] *Dokumentasi Hasil Muktamar II Partai Kebangkitan Bangsa, Semarang , 16–19 April* (Jakarta: DPP PKB, 2005).

[96] Lihat misalnya *Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa*, dipaparkan dalam Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa, Jakarta, Hotel Borobudur, 14–16 Januari 2002, 29.

[97] Wawancara dengan H.Z. Arifin Junaidi, Sekretaris Jenderal Dewan Syura PKB (2002–2005) dan Ketua Dewan Syura PKB (2005–2010), di Jakarta, 28 Oktober 2010; dengan Ahmad Shodiq Noor, Sekretaris Jenderal DPW PKB DKI Jakarta, di Jakarta, 3 November 2010; dengan Anas Nashikin, Sekretaris Jenderal Garda Bangsa, salah satu *onderbouw* PKB, di Jakarta, 26 Oktober 2010.

Terlepas dari itu, hadirnya kepengurusan kembar dalam waktu bersamaan memperlihatkan puncak dari carut marutnya kaderisasi dan rekrutmen partai di PKB. Tiap-tiap pihak tidak segan untuk memberikan kesempatan pada anggota baru atau bahkan orang-orang yang tidak dikenal sekalipun untuk dapat masuk ke dalam jajaran pengurus partai. Kesempatan itu tentu saja bersifat tidak legal. Masing-masing pihak pun akhirnya melakukan tuduhan bahwa kalangan yang berseberangan telah melakukan pelanggaran dalam persoalan rekrutmen partai. Kalangan pendukung Gus Dur, misalnya, menuduh bahwa kader-kader yang hadir dalam MLB Matori ada yang beberapa waktu sebelum pelaksanaan MLB masih menjadi kader partai lain. Bahkan mereka melihat ada kader partai lain yang masuk dalam kepengursan PKB-Matori.[98] Hal ini ditolak oleh Sekjen PKB-Matori Ahmad Khalik yang menyatakan bahwa seluruh peserta yang hadir dalam MLB PKB-Matori berasal dari kepengurusan yang sah.

Dalam kasus Muhaimin, situasi yang terjadi juga tidak jauh berbeda. Kelompok Gus Dur menuduh mereka yang hadir dalam MLB tidak memiliki surat keputusan pengangkatan yang legal. Menurut Yenny Wahid:

> MLB Ancol tidak sah karena dihadiri oleh pengurus wilayah dan cabang yang tidak sah. Pengurus sah yang hadir dalam MLB Ancol itu hanya kurang dari 5%, 95% itu jadi-jadian. Orang-orang yang hadir itu ditunjuk (tidak dipilih), dan diberikan SK saat itu juga. SK itu hanya untuk setahun dan ditandatangani hanya oleh Muhaimin dan Lukman Eddy. Padahal SK harus ditandatangani oleh 4 orang. Seperti SK yang kita berikan.[99]

Namun sebenarnya, dengan alur argumentasi yang sama yang terkandung dalam pernyataan di atas, kelompok PKB-Gus Dur juga sebenarnya tidak seutuhnya sah. Hal ini mengingat keanggotaan

---

[98] Lihat catatan kaki dalam A. Effendy Choirie, *PKB Politik Jalan Tengah NU*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2002), 300.

[99] Wawancara dengan Zannuba Ariffah "Yenny" Wahid, Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz PKB-Gus Dur (2008–2010), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

mereka tidak mendapat legitimasi dari Muhaimin sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz dan Lukman Edy sebagai Sekjen Partai.

Adanya kepengurusan kembar ini juga dimungkinkan karena kegagalan kaderisasi menyebabkan banyak kader atau simpatisan yang tidak terdeteksi kualitasnya dengan baik sehingga masing-masing kader dapat mengklaim dirinya sebagai anggota yang sah dan kapabel dalam sebuah kepengurusan. Secara umum, partai ini tidak memiliki database keanggotaan dan juga kepengurusan yang benar-benar dapat diandalkan. Situasi ini memberi peluang seseorang dengan latar belakang yang tidak mumpuni dapat dengan tiba-tiba menduduki sebuah jabatan dan mewakili kepengurusan sebuah wilayah karena kedekatan dengan orang tertentu.

Kelompok Alwi mengklaim pelanggaran proses penyusunan kepengurusan di daerah banyak dilakukan oleh kubu Gus Dur. Situasi ini bukan tidak mungkin terjadi mengingat ada beberapa daerah kepengurusan yang sah memang setia kepada Alwi seperti DPW Jawa Timur. Dalam situasi seperti ini, tidak menutup kemungkinan mekanisme menunjuk orang untuk menduduki jabatan tertentu terjadi. Sementara itu, bagi kubu Alwi, arahan dan petunjuk kiai, dan bukan aturan main kaderisasi, menjadi pendorong mobilisasi dan pembentukan kepengurusan yang mewakili PKB-Alwi. Terlepas dari itu, masing-masing pihak melakukan pembekuan dan pemecatan atas mereka yang diindikasikan sebagai pendukung lawan. Di sisi lain, mereka pun banyak menghidupkan kembali kepengurusan yang dibekukan oleh pihak lawan. Pihak-pihak inilah yang kemudian diberi peluang untuk menyusun kepengurusannya berdasarkan keberpihakan dan bukan atas dasar objektivitas pengaderan. Dengan kata lain, pengelompokan yang cepat ini berpeluang besar terbuka karena adanya tradisi untuk tidak menjalankan mekanisme kaderisasi dan rekrutmen secara sungguh-sungguh.

Lebih dari itu, dengan berdirinya kepengurusan yang lengkap, setiap pihak dapat mengklaim dirinya sebagai pihak yang mendapat dukungan hingga seluruh pelosok negeri. Kepengurusan lengkap ini

menyebabkan masing-masing kelompok merasa sah untuk mewakili partai. Terbentuknya kelompok-kelompok dengan mudah di dalam partai yang berusaha saling menjatuhkan dan meniadakan itu, sebagai dampak dari ketidakdisiplinan kaderisasi dan rekrutmen partai sehingga upaya mempertahankan keutuhan partai menjadi sia-sia. Adanya perbedaan persepsi, tumbuhnya sikap saling meniadakan, dan mudahnya terbentuk kepengurusan ganda dalam upaya saling mempertahankan eksistensi dan menyerang merupakan hal penting yang pada akhirnya menyebabkan perpecahan partai menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan oleh PKB.

E. Ringkasan

Kaderisasi sistematis merupakan kunci untuk pengembangan loyalitas, sinkronisasi persepsi, dan *meritocracy*. Tidak adanya kaderisasi sistematis selama dekade pertama keberadaannya menggagalkan PKB membangun persepsi bersama dan soliditas. Selain itu, perbedaan dalam menafsirkan AD/ART partai menyebabkan partai ini juga gagal memelihara loyalitas kader. Keberlanjutan hubungan *patron-client* di dalam pengembangan kader tidak dapat secara efektif dihentikan. Hal ini tidak saja mengurangi *esprit de coprs* internal, namun juga menjadi katalis atas munculnya semangat perpecahan.

Kemudian, PKB juga jauh dari berhasil dalam membangun *meritocracy* yang memicu kekecewaan, dan pada akhirnya pengabaian aturan main partai. Semua hal ini pada akhirnya berperan sebagai fondasi bagi munculnya konflik internal, resistensi, dan faksionalisasi yang tidak hanya memuluskan jalan untuk penurunan rasa kebersamaan dan munculnya ketegangan di antara kelompok-kelompok yang bertentangan, tetapi pada akhirnya juga perpecahan. Keberadaan MLB sebagai medium untuk melegalkan restorasi kepengurusan merupakan puncak dari kegagalan rekonsiliasi dan menandai ambruknya keutuhan partai. Akhirnya, kasus PKB secara umum menunjukkan dengan gamblang adanya korelasi antara ketiadaan kaderisasi dan kemunculan perpecahan.

BAB X
KADERISASI SISTEMATIS PKS

> "Kami percaya bahwa kaderisasi yang solid merupakan prasyarat paling penting soliditas organisasi." (Mahfudz Siddiq)[1]

Bab ini membahas upaya PKS untuk melaksanakan kaderisasi secara sistematis dan mengaitkan upaya tersebut dengan kemampuan partai ini mempertahankan soliditas internalnya. Dalam kasus PKS, kaderisasi sistematis, sebagai bagian dari pelembagaan partai, memiliki peranan penting dalam membantu partai untuk membangun soliditas PKS. Bagian awal bab ini akan membahas aspek legal formal dari proses kaderisasi, yakni AD/ART partai dan aturan main partai lainnya, untuk menunjukkan kompleksitas dan koherensi proses pengaderan di PKS. Bahasan berikutnya adalah menganalisis implementasi kaderisasi di PKS yang secara umum menunjukkan komitmen partai ini untuk melakukan kaderisasi dan rekrutmen. Bagian berikutnya membahas sejumlah kecenderungan yang kemudian muncul sebagai dampak dari adanya kaderisasi yang sistematis. Adapun bagian terakhir bab ini akan membahas berbagai dampak kecenderungan tersebut atas kemampuan PKS dalam memelihara soliditas partai.

[1] Wawancara dengan Mahfudz Siddiq, Ketua Departemen Kaderisasi DPP PKS (2002–2005) dan anggota DPR RI (2004–2014), di Jakarta, 27 Oktober 2010.

A. Situasi Legal Formal

Sebagai sebuah partai yang memahami arti penting kaderisasi, PKS menyadari perlunya sebuah aturan main yang menopang pelaksanaan kaderisasi. Hal ini tecermin dari AD/ART yang menginstruksikan partai untuk membangun pengembangan kader atau kaderisasi di setiap tingkat kepengurusan partai, mulai dari DPP di tingkat nasional hingga Dewan Pengurus Ranting (DPRa) sebagai struktur partai terendah. ART PK dan ART PKS 2002 menyatakan bahwa salah satu kewajiban utama DPP adalah mempersiapkan kader, yang pada ART PKS 2005 kata 'mempersiapkan kader' diubah menjadi kaderisasi.[2] Dengan perubahan itu, kedudukan kaderisasi secara formal menjadi lebih kuat dari sebelumnya. AD/ART sejak 2005 juga dengan jelas menyatakan bahwa "mengadakan kaderisasi bagi anggota partai sebagai kewajiban yang harus dilakukan setiap tingkat kepengurusan".[3] ART PKS 2005 menyatakan pula bahwa setiap DPRa harus memiliki Bidang Unit Pembinaan Kader yang salah satu tugas utamanya adalah menjadi pelaksana kaderisasi.[4]

Tujuan kaderisasi PKS adalah melahirkan individu yang memiliki kepribadian dan kesadaran Islami yang kuat serta memiliki komitmen untuk mewujudkan visi dan nilai Islam di dalam kehidupan.[5] Dalam hal ini, kaderisasi dianggap sebagai proses untuk membentuk kepribadian Islami (*takwin asy syakhsyiyyah al Islamiyah*) yang pada gilirannya akan menjadi landasan tegaknya sebuah peradaban.[6] PKS meyakini bahwa sebuah peradaban membutuhkan orang-orang berkomitmen tinggi dengan militansi yang kuat. Pandangan ini menunjukkan bahwa

---

[2] *ART PK Pasal 20; ART PKS 2002 Pasal 17.*

[3] *ART PKS 2005 Pasal 22 (c), 34 (c), 47 (c), 56 (h), and 59 (h).*

[4] *ART PKS 2005 Pasal 57 (1.d.1).*

[5] Hurriyah, *Sistem Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera (1998–2003)*, Skripsi, (Depok: Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2004), 232.

[6] Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani: Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera*, (Jakarta: MPP PKS, 2008), 36.

kaderisasi merupakan bagian dari upaya menciptakan individu yang berkomitmen mengembangkan peradaban Islam. Dengan kata lain, komitmen ideologi, yakni membangun peradaban Islam adalah alasan utama untuk melakukan kaderisasi di PKS.[7]

Selain itu, kaderisasi didedikasikan pula untuk mencetak individu-individu yang siap untuk melaksanakan dakwah.[8] Proses ini pada akhirnya terkait dengan kewajiban setiap kader untuk menjaga keyakinan dan perilaku yang benar, memperkuat persaudaraan dan senantiasa saling menasihati.[9]

Lebih dari itu, bagi PKS, kader-kader partai merupakan aset strategis, yakni sebagai salah satu kunci sukses dalam pengembangan dakwah dan upaya membangkitkan kembali umat Islam. Pendapat ini dalam hal tertentu menjadi salah satu aspek penting yang membedakan partai ini dengan beberapa gerakan Islam lainnya karena pandangan ini menunjukkan pentingnya membangun individu (kader) sebelum membangun sistem Islam atau syariat. Di sejumlah gerakan Islam, termasuk misalnya Hizbut Tahrir, pendirian sistem Islam menjadi tujuan utama yang harus diprioritaskan. Mereka berkeyakinan bahwa pengembangan individu secara otomatis akan mengikuti keberhasilan penegakan syariat di tingkat negara atau konstitusi negara.

Menurut Mahfudz Siddiq, kader adalah rahasia kebangkitan umat Islam, di mana kekuatan atau kelemahan umat Islam dapat diukur dari seberapa besar mereka dapat mencetak kader dengan karakteristik mujahid.[10] Partai berharap bahwa melalui kegiatan ini, kader dapat

---

[7] Hurriyah, *Sistem Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera* (1998–2003), 212.

[8] *Ibid.*, 36. Firman Noor, *Moderate Islamic Fundamentalism in Indonesia: A Study of Political Thinking and Behaviour of the Prosperous Justice Party (PKS), 1998–2005*, Tesis, (Canberra: Faculty of Asian Studies, ANU, 2006), 32.

[9] Satria Hadi Lubis, *Yang Nyata dari PK Sejahtera: 35 Manfaat dan Alasan Mengapa Kita Mendukung PK Sejahtera*, (Jakarta: Misykat Publication in Partnership with LP2U, 2004), 26.

[10] Wawancara dengan Mahfudz Siddiq, di *http://keadilan.or.id/pk/Pasal.php?sid=933*, di Aay Muhammad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera, Ideologi dan Praktis Politik Kaum Muda Kontemporer*, (Bandung: Teraju, 2004), 219.

memperdalam pemahaman mereka atas ideologi dan nilai-nilai partai, memperkuat cara pandang dan kemampuan mengelola partai serta memperkuat kesadaran untuk membentuk soliditas.[11] Oleh karena itu, selain menjadi sarana untuk memperkuat manajemen organisasi, kaderisasi dirancang pula untuk memperoleh kader-kader berkualitas dan jajaran pemimpin partai yang mumpuni.[12]

Kaderisasi PKS memiliki dua fungsi utama, yaitu melakukan pengembangan kualitas kader dan sebagai basis rekrutmen untuk mengisi posisi internal partai dan anggota parlemen. Pelaksanaan fungsi ini dilakukan dengan terbuka di seluruh infrastruktur dan lembaga-lembaga partai.[13] Partai menyadari bahwa kekuatan utama partai bergantung pada pertumbuhan kader, baik dalam aspek kualitas maupun kuantitas.[14]

Sebagai bagian dari pelaksanaan komitmen partai atas kaderisasi, PKS mengembangkan metode pengembangan kader yang selektif. Menurut AD/ART partai, ada enam tingkat kaderisasi, yaitu (1) anggota pemula, (2) anggota muda, (3) anggota madya, (4) anggota dewasa, (5) anggota ahli, dan (6) anggota purna (lihat Tabel 10.1). PKS menyebut anggota pemula dan anggota muda sebagai kader pendukung dan empat level kader berikutnya sebagai kader inti. PKS juga menetapkan bahwa ada pula anggota kehormatan. Anggota kehormatan adalah orang yang secara signifikan memberi kontribusi terhadap partai walaupun mereka tidak selalu kader partai. Kepengurusan khusus terdiri dari anggota MS yang memilih orang-orang yang pantas untuk menduduki jenis keanggotaan ini.[15]

---

[11] *Ibid.*, 223–226.

[12] Mahfudz Siddiq, "Normalkan Piramida Kader: Seri Siyasah Tarbiyah", di *Saksi*, No. 17, VI, 23 Juni 2004.

[13] Departemen Kaderisasi Partai Keadilan, "Manhaj Kaderisasi Anggota Partai Keadilan", dokumen khusus, tidak diterbitkan, di Hurriyah, *Sistem Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera (1998–2003)*, 144.

[14] Mahfudz Siddiq, "Posisi Tarbiyah dalam Dakwah Partai Keadilan Sejahtera", *Saksi*, No. 20, IV, 4 Agustus 2004.

[15] *ART PK Pasal 8*.

Tabel 10.1 Tingkat Keanggotaan PKS

Jenis Anggota	Keterangan
Pemula	Kader yang memenuhi persyaratan sebagai anggota partai dan terdaftar di DPC setelah mengikuti TOP
Muda	Kader yang terdaftar di DPD sebagai anggota yang sudah mengikuti Training Dasar Pertama (TD-I)
Madya	Kder yang terdaftar di DPD sebagai anggota partai yang sudah mengikuti Training Dasar Kedua (TD-II)
Dewasa	Kader yang terdaftar di DPW sebagai anggota partai yang sudah mengikuti pelatihan di tingkat dewasa
Ahli	Kader yang terdaftar di DPP sebagai anggota partai yang sudah mengikuti training di tingkat lebih tinggi
Purna	Kader yang terdaftar di DPP sebagai anggota partai yang telah mengikuti pelatihan di tingkat ahli
Kehormatan	Individu yang telah memberikan jasa yang luar biasa terhadap partai dan diperkuat oleh MPP

Sumber: *ART PK Pasal 8*

Agar dapat memegang jabatan yang lebih tinggi, atau secara formal meningkat jenjang keanggotaannya, seorang kader harus mengikuti dan melewati sejumlah tahapan-tahapan pelatihan dan kegiatan. AD/ART partai menyatakan bahwa setiap kader harus mengikuti dan lulus program pengembangan partai, pendidikan, dan pelatihan partai.[16] Seperti untuk kandidat anggota, partai mewajibkan mereka untuk mengikuti Training Orientasi Partai (TOP) yang diselenggarakan setiap tiga bulan untuk menaikkan statusnya menjadi anggota pemula. Anggota pemula harus mengikuti Training Dasar Pertama (TDI-I), untuk mencapai tingkat muda. Anggota muda harus mengikuti Training Dasar Kedua (TD-II) untuk menyandang status madya. Anggota madya mengikuti Training Dewasa Partai Satu (TL-I) yang digunakan sebagai dasar untuk evaluasi dan seleksi kader madya untuk menjadi anggota dewasa.

TL-II adalah tingkat training dewasa dan seleksi untuk anggota dewasa untuk naik statusnya menjadi anggota ahli. Untuk anggota

[16] *ART PKS 2005 Pasal 5 (2).*

ahli, PKS melakukan Training Manajemen dan Kepemimpinan Sosial (TMKS) yang digunakan sebagai basis evaluasi dan seleksi anggota ahli untuk naik statusnya menjadi anggota purna. Kandidat anggota kehormatan menjalani proses yang dilakukan partai yang disebut Analisis Kemampuan dan Integritas Kepribadian (AKIP). Partai menginvestigasi dan menganalisis latar belakang, sikap pribadi, dan potensi politik mereka. Partai juga melakukan Orientasi Partai dan Tokoh (OPT) untuk kandidat kehormatan sebagai jenis katalis untuk memperkenalkan partai.

Selain pelatihan-pelatihan dan pelbagai kursus di atas ini, wajib bagi kader untuk mengikuti kegiatan formal partai lainnya, yaitu (1) Training Rutin Partai (TRP) yang diselenggarakan per bulan, (2) Training Rutin Kader (TRK) yang dilakukan sekurang-kurangnya sekali sepekan, (3) Pelatihan-Pelatihan Kepartaian (PPK) yang diselenggarakan setiap waktu bila dibutuhkan, (4) Kajian Ilmu Sosial dan Politik (KISP) yang dilakukan kader sekurang-kurangnya sekali di setiap level keanggotaannya, dan (5) Kegiatan Internal Anggota (KIA).[17] Bagi anggota pemula yang lulus proses evaluasi TOP maka partai memperkenalkan mereka untuk mengikuti kegiatan *halaqah* dan mekanismenya. Di dalamnya di tingkat praktis, *halaqah* adalah institusi utama proses kaderisasi PKS. *Halaqah* melaksanakan sejumlah kegiatan informal termasuk *daurah* (kajian intensif), *rihlah* (kegiatan fisik), *mabit* (kegiatan bermalam untuk meningkatkan kapasitas spiritual), mengikuti seminar, dan membaca buku sebagai bagian kaderisasi.[18]

Berbagai kegiatan ini, sebagai bagian tradisi Jamaah Tarbiyah, merupakan kegiatan pendukung yang harus diikuti para kader. Tradisi ini didasarkan pada konsep kaderisasi yang terkait kuat dengan atau bagian sejarah pengembangan PKS sebagai kelanjutan model kaderisasi Jamaah Tarbiyah yang dikembangkan kelompok ini sejak tahun 1980-an. Transformasi gerakan ini menjadi sebuah partai

---

[17] Hurriyah, *Sistem Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera* (1998–2003), 179–187.

[18] *Ibid.*, 187–200.

tidak mengubah karakteristik model kaderisasi Jamaah Tarbiyah yang terutama diinspirasi oleh Ikhwan Muslimin (IM) Mesir.[19]

Pada program pelatihan dan kegiatan di atas, partai melaksanakan kurikulum yang dibuat Departemen Kaderisasi PKS yang mencakup berbagai mata pelajaran seperti pengetahuan dasar Islam, dakwah, pengetahuan sosial, kemampuan administrasi, dan teknis.[20] Dalam kaitan dengan rekrutmen posisi-posisi jabatan internal, PKS menggunakan hasil kaderisasi sebagai pedoman. AD/ART partai menyebutkan status minimal/terendah yang harus dimiliki seorang kader untuk dapat memegang sebuah posisi strategis di partai ini (Lihat Tabel 10.2). Hal ini menunjukkan bahwa status kader memainkan peran penting dalam proses rekrutmen dan menunjukkan bahwa hanya kader senior dan berkualitas saja yang dapat memegang posisi penting dan strategis di partai ini.

PKS melakukan pemilihan internal untuk menunjuk anggota Majelis Syura.[21] Seluruh kader inti memiliki hak untuk memilih.[22] Akan tetapi, hanya anggota yang merupakan anggota ahli selama sekurang-kurangnya 5 tahun berhak menjadi anggota Majelis Syura. Anggota Majelis Syura memutuskan posisi penting lain di partai seperti anggota MPP, Presiden Partai, anggota DS. Namun, untuk mengisi posisi strategis di kepengurusan lokal, seperti Ketua DPW, DPC dan DPRa, partai menyelenggarakan pemilihan internal yang melibatkan kader utama di masing-masing tingkat kepengurusan.[23]

---

[19] Wawancara dengan Mahfudz Siddiq, Ketua Departemen Kaderisasi DPP PKS (2002–2005) dan anggota DPR RI (2004–2014), di Jakarta, 27 Oktober 2010. Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, (Bandung: Teraju, 2002), 109–125.

[20] Departemen Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera, *Manajemen Tarbiyah Anggota Pemula*, (Bandung: Penerbit Asy-Syaamil, 2004), 22–23.

[21] *AD PK Pasal 11; AD PKS 2002 Pasal 2; ART PKS 2005 Pasal 8 (1).*

[22] *AD PKS 2002 Pasal 2; ART PKS 2005 Pasal 8 (1).*

[23] *ART PKS 2005 Pasal 30 (5), 42 (5), 53 (3), 57 (2).*

Proses rekrutmen anggota dewan terdiri dari lima tahap.[24] Tahap pertama adalah proses *screening*. Di tahap ini, partai mengevaluasi integritas pribadi kandidat termasuk catatan keberhasilan dan produktivitasnya. Tahap kedua adalah proses evaluasi atas kemampuan dan pengetahuan politik kandidat yang diikuti kemudian dengan tahap ketiga, yaitu proses penilaian seperangkat kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang anggota dewan. Mereka yang lulus tahap ini kemudian mengikuti tahap keempat, yang akan melibatkan sebuah tim kecil yang kerap disebut 'tim proyeksi', yang akan menelaah prospek seorang kandidat. Apabila tim ini menilai bahwa partai masih membutuhkan seorang kandidat agar tetap berada di kepengurusan partai, kandidat tersebut tidak dapat mengikuti tahap berikutnya. Tahap terakhir adalah pemilihan yang dalam hal ini seluruh kader berpartisipasi. Hanya kader yang memperoleh suara tertinggi dapat mewakili partai di pemilu nasional. Pada umumnya, mekanisme rekrutmen PKS membuka peluang bagi setiap kader untuk dipilih berdasarkan pada kemampuannya yang diakui kader lain (pemilihan) yang tidak hanya dari elite partai (seleksi).

B. Pelaksanaan

1. Kaderisasi: *Halaqah* dan Pemeliharaan Kualitas Kader

DPP PKS melalui Departemen Kaderisasi menyediakan seperangkat kurikulum dan pedoman praktis pelaksanaan kaderisasi dan mengomunikasikannya ke seluruh departemen kaderisasi di Indonesia. Menurut Presiden PKS (2005–2010) Tifatul Sembiring, setiap kader harus mengikuti program dan kegiatan yang telah ditetapkan.[25] Dari berbagai kegiatan yang harus diikuti kader, salah

---

[24] "Dokumentasi untuk Kandidat Anggota Dewan, Dhawabith, Tawazun, Tanzhimi dalam Proyeksi Keanggotaan Legislatif (2003)", tidak diterbitkan, di Furkon, Partai Keadilan Sejahtera, *Ideologi dan Praktis Politik Kaum Muda Kontemporer*, 216–217. Lihat juga wawancara Aay Muhammad Furkon dengan Anis Matta, di *ibid.*, 212.

[25] Wawancara dengan Tifatul Sembiring, Presiden PKS (2005–2008), dalam "PKS Masih Seperti yang Dulu", *Koran Seputar Indonesia*, 10 Desember 2007.

Tabel 10.2 Tingkat Keanggotan untuk Memegang Posisi Partai Tingkat Naisonal, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

JABATAN	TINGKATAN ANGGOTA	LAMA TINGKATAN ANGGOTA TERAKHIR (Minimal Jumlah Tahun)
TINGKAT NASIONAL		
Ketua MS	Ahli	10
Anggota MS	Ahli	5
Ketua dan Sekretaris MPP	Ahli	5
Ketua Komisi MPP	Ahli	1
Presiden, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara DPP	Ahli	5
Posisi dan Anggota DPP Lainnya	Ahli	1
Ketua DSP dan Sekretaris DSP	Ahli	5
Ketua *Lajnah* dan Anggota DSP	Ahli	1
TINGKAT PROVINSI		
Ketua MPW, Sekretaris MPW, dan Ketua-Ketua di Komisi-Komisi MPW	Ahli	1
Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, ketua Pengembangan danWakil Kaderisasi	Ahli	1
Ketua DSW dan Sekretaris DSW	Ahli	1
Ketua Departemen, Wakil Sekretaris Jenderal, dan Wakil Sekretaris Bendahara	Dewasa	2
Posisi dan Anggota DPW Lainnya	Dewasa	1
Anggota MPW	Dewasa	2
Ketua *Lajnah* DSW	Dewasa	2
Posisi Lain di DSW	Dewasa	1
TINGKAT KABUPATEN/KOTA		
Ketua MPP, Sekretaris MPP, dan Ketua-Ketua Komisi-Komisi MPD	Dewasa	2
Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua Pengembangan, dan Wakil Kaderisasi	Dewasa	2
Ketua Departemen, Wakil Sekretaris Jenderal, dan Wakil Bendahara Umum	Dewasa	1
Ketua *Lajnah* DSD	Dewasa	1
Ketua DSD dan Sekretaris DSD	Dewasa	2
Posisi dan Anggota DPD Lainnya	Madia	2
Posisi DSD Lainnya	Madia	2

Sumber: *ART PKS 2005*

satunya adalah *halaqah* (kadang-kadang secara formal disebut sebagai TRK). Pada *training* wajib mingguan ini, yang dihadiri maksimal 12 kader, kader disosialisasikan dan ditanamkan seperangkat nilai-nilai yang dianut oleh gerakan tarbiyah sekaligus diinstruksikan untuk melakukan berbagai aktivitas berdasarkan kurikulum dan pedoman partai yang pelaksanaannya dibimbing oleh seorang *murabbi*. *Halaqah* mengembangkan kegiatan-kegiatan[26] yang akarnya ada pada Jamaah Tarbiyah. Konsep pembinaan kader ini dibentuk para aktivis tarbiyah sebagai keberlanjutan model *halaqah* sebelum pendirian PKS pada tahun 1998.

Partai berupaya menjaga keberlanjutan *halaqah* sebagai salah satu institusi pengaderan yang penting. Departemen Kaderisasi di setiap kepengurusan lokal harus menjamin keberlanjutan *halaqah*. Untuk tujuan ini, partai mewajibkan kader untuk mengadakan pertemuan sekali sepekan. Akan tetapi, di daerah dengan jumlah kader sangat sedikit dan menghadapi tantangan geografis, seperti di sejumlah daerah terpencil di Papua dan Maluku, partai melonggarkan frekuensi pertemuan. Partai mengizinkan kader di daerah tersebut untuk membuat kesepakatan sendiri berkenaan waktu pertemuan *halaqah*. Walaupun ada pengecualian, pada prinsipnya kelanjutan *halaqah* adalah keharusan.[27] Kadang-kadang kader di tingkat kabupaten/kota harus pula membantu pelaksanaan *halaqah* di tingkat desa, untuk memastikan keberlangsungannya dan proses kaderisasi pada umumnya.[28] Komitmen yang tinggi untuk melaksanakan pertemuan

---

[26] Wawancara dengan Hurriyah M.A., Pengamat Kaderisasi PKS dan Dosen Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, di Depok, 29 Oktober 2010.

[27] Wawancara dengan Untung Wahono, Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan DPP PK (2000–2003), Kepala Departemen Politik dan Pertahanan DPP PKS (2002–2005), dan Ketua MPP PKS (2010–2015), di Jakarta 27 Oktober 2010; dengan Mahfudz Siddiq, Ketua Departemen Kaderisasi DPP PKS (2002–2005) dan anggota DPR RI (2004–2014), di Jakarta, 27 Oktober 2010.

[28] Wawancara dengan Musa Abdillah, Ketua Departemen Kaderisasi DPC PKS Kelapa Dua, di Jakarta, 23 Oktober 2010. Wawancara dengan Nooryanto, Ketua Departemen Kaderisasi Bekasi DPD PKS, di Bekasi, 7 November 2010.

mingguan ini menjadi ciri khas partai ini, yang membedakan PKS dengan partai-partai Islam lainnya di Indonesia.[29]

Halaqah memberikan pula informasi dan penjelasan kepada kader berkenaan dengan berbagai keputusan atau kebijakan partai termasuk berbagai alasan di balik kebijakan-kebijakan tersebut. Partai memberikan kesempatan bagi kader untuk menanyakan dan memperoleh informasi resmi terkait dengan berbagai kebijakan partai.[30] Melalui *murabbi*, partai mengomunikasikan pilihan-pilihan politik yang diambil dengan tujuan agar kader-kader partai dapat memahami dan memiliki pilihan-pilihan politik yang sama. Dalam hal ini, *halaqah* berperan sebagai sarana sosialisasi dan klarifikasi pilihan-pilihan politik partai.[31]

Materi lainnya yang dibahas dalam *halaqah* berkaitan dengan pemantapan ideologi, termasuk visi dan misi dakwah. Dalam materi ini pula, *murabbi* mengingatkan kader tentang *code of conduct* partai termasuk konsep loyalitas dan kepercayaan kepada partai dan para pemimpinnya.[32] Kemudian, partai juga memberikan materi untuk pengembangan individual sebagai bagian dari upaya untuk membantu

---

[29] Wawancara dengan Hurriyah M.A., Pengamat Kaderisasi PKS dan Dosen di Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, di Depok, 29 Oktober 2010.

[30] Wawancara dengan Dr. Yon Mahmudi, Pengamat PKS dan Gerakan Tarbiyah di Indonesia, Dosen di Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dan salah satu kader yang menandatangani deklarasi pendirian PKS, di Depok, 6 Oktober 2010.

[31] Wawancara dengan Umar Salim Basalamah, Wakil Sekretaris Jenderal PKS (2002), dan sekretaris pribadi Hidayat Nur Wahid (mantan Presiden PKS dan Ketua MPR RI), di Jakarta, 12 Oktober 2010; dengan Musa Abdillah, Ketua Departemen Kaderisasi DPC PKS Kelapa Dua, di Jakarta, 23 Oktober 2010; dengan Akmal Burhanuddin, mantan aktivis tarbiyah dan mahasiswa di Mesir yang bergabung dengan PKS setelah menyelesaikan kuliahnya, di Jakarta, 24 Oktober 2010; dengan Nooryanto, Ketua Departemen Kaderisasi Bekasi DPD PKS, di Bekasi, 7 November 2010; dengan Hidayat, M.M., anggota DPRD Kabupaten Tangerang (2005–2010), di Tangerang, 21 Oktober 2010.

[32] Wawancara dengan Mustofa, kader PKS dan mantan wartawan Majalah Profetik, di Depok, 7 Oktober 2010.

kader memperbaiki karakter dan perilakunya agar dapat menjadi kader berkualitas. Bagian akhir kegiatan ini berkaitan dengan upaya meningkatkan semangat persaudaraan dan kebersamaan. Setiap kader diminta berbagi pengetahuan, pengalaman, aspirasi, dan bahkan kesulitan yang mereka hadapi tidak hanya terkait dengan masalah-masalah partai tetapi juga masalah-masalah pribadi. Melalui kegiatan ini, diharapkan hubungan antarkader akan menjadi lebih kuat.[33] Dari substansi kegiatan di atas dapat dilihat bahwa *halaqah* memainkan peran tidak hanya sebagai institusi politik, tetapi juga sebagai medium untuk meningkatkan semangat persaudaraan, yang bahkan menyentuh berbagai aspek personal setiap kader. Menurut Tifatul Sembiring, *halaqah* adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak pendirian partai oleh setiap kepengurusan partai di seluruh Indonesia untuk menjaga militansi dan semangat kader.[34]

Meskipun telah berupaya menjalankan program kaderisasi secara konsisten, partai kerap mendapatkan sejumlah kritik. Sebagian pihak, misalnya, mengatakan bahwa walaupun *halaqah* merupakan sebuah institusi partai, pelajaran dan agenda agama mendominasi pembahasan di institusi ini sehingga cenderung mengurangi kualitas pemahaman dan kemampuan kader di bidang politik.[35] Dalam perkembangannya pula, tidak sedikit *halaqah* yang lebih banyak mengakomodasi kepentingan dan urusan kader sehingga pada akhirnya bersikap

[33] Wawancara dengan Musa Abdillah, Ketua Departemen Kaderisasi DPC PKS Kelapa Dua, di Jakarta, 23 Oktober 2010; dengan Akmal Burhanuddin, mantan aktivis tarbiyah dan mahasiswa di Mesir yang bergabung dengan PKS setelah menyelesaikan kuliahnya, di Jakarta, 24 Oktober 2010; dengan Nooryanto, Ketua Departemen Kaderisasi Bekasi DPD PKS, di Bekasi, 7 November 2010; dengan Hidayat, M.M., anggota DPRD Kabupaten Tangerang (2005–2010), di Tangerang, 21 Oktober 2010. "Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring: Tarbiyah, Menjaga Moral dan Semangat Berpartai", *Kompas*, 25 Juni 2005.

[34] "Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring: Tarbiyah, Menjaga Moral dan Semangat Berpartai", *Kompas*, 25 Juni 2005.

[35] Hurriyah, *Sistem Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera (1998–2003)*, 237. Wawancara dengan Hurriyah M.A., Pengamat Kaderisasi PKS dan Dosen di Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, di Depok, 29 Oktober 2010.

longgar terhadap kurikulum dan materi yang telah ditetapkan oleh partai. Saat ini bahkan ditengarai beberapa *halaqah* semakin meredup seiring dengan kontrol partai yang mulai tidak seketat sebelumnya.

Terlepas dari itu, partai melalui institusi kaderisasi tetap berupaya mengontrol dan mengevaluasi keberadaan *halaqah* termasuk materi yang disampaikan *murabbi*. Agar dapat mempertahankan kualitas kader, partai membuat evaluasi kader di *halaqah*. Setiap *halaqah* melalui *murabbi*[36] melaporkan perkembangan kadernya ke Departemen Kaderisasi. Dalam hal ini, *murabbi* memiliki catatan evaluasi khusus atau formulir tentang kegiatan kader. Catatan ini melaporkan kemajuan kader di dalam kualitas dan komitmen keagamaan mereka terhadap kegiatan partai, yang harus dilaporkan secara periodik sekurang-kurangnya sekali sebulan.[37] PKS mengadakan forum evaluasi partai, seperti *taqwim*. Dalam hal ini, semangat kejujuran, objektivitas, keseimbangan, dan akurasi menjadi esensi evaluasi.[38] Di sejumlah wilayah, hasil evaluasi ini dikumpulkan dan dicatat di dalam 'buku laporan'.[39] Kemudian, seluruh cabang partai melaporkan

---

[36] Mereka yang dipilih untuk memegang Ketua Departemen Kaderisasi biasanya *murabbi* yang paling dihormati di wilayah kepengurusan. *Murabbi* adalah kader terbaik yang dipercaya partai untuk membawa misi PKS sebagai perangkat partai. Di dalam konteks hierarki, *murabbi* di tingkat bawah, misalnya, di tingkat DPRa adalah *mutarabbi* dari *murabbi* di tingkat lebih tinggi, misalnya, DPC.

[37] Wawancara dengan Musa Abdillah, Ketua Departemen Kaderisasi DPC PKS Kelapa Dua, di Jakarta, 23 Oktober 2010; dengan Akmal Burhanuddin, mantan aktivis tarbiyah dan mahasiswa di Mesir yang bergabung dengan PKS setelah menyelesaikan kuliahnya, di Jakarta, 24 Oktober 2010; dengan Nooryanto, Ketua Departemen Kaderisasi Bekasi DPD PKS, di Bekasi, 7 November 2010; dengan Umar Salim Basalamah, Wakil Sekretaris Jenderal PKS (2002), dan sekretaris pribadi Hidayat Nur Wahid (mantan Presiden PKS dan Ketua MPR RI), di Jakarta, 12 Oktober 2010. Hurriyah, *Sistem Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera* (1998–2003), 206–207.

[38] Departemen Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera, *Manajemen Tarbiyah Anggota Pemula*, (Bandung: Penerbit Asy-Syaamil, 2004), 64.

[39] Wawancara dengan Nooryanto, Ketua Departemen Kaderisasi Bekasi DPD PKS, di Bekasi, 7 November 2010.

evaluasi mereka ke DPP. Di sanalah seluruh informasi dan data dikumpulkan.[40]

Bentuk evaluasi menjadikan *halaqah* berperan layaknya sekolah. Di dalamnya, *halaqah* memiliki kewajiban untuk membuat laporan periodik tentang kemajuan siswa atau kader.[41] Dengan adanya evaluasi sistematis ini, partai pada akhirnya mampu menyupervisi seluruh perkembangan kader, termasuk kapasitas kader untuk menyerap berbagai materi bahasan kaderisasi melalui *murabbi* sebagai perangkat partai.

Di dalam situasi transparan semacam ini, aturan main partai disampaikan secara terbuka, dan kader memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan karier. Masa depan kader di PKS ditentukan terutama dari kerja keras mereka sendiri dan bukan hubungan dekat mereka dengan elite. Namun, menurut Anis Matta pengembangan karier bukanlah hal utama yang memotivasi kader aktif di *halaqah,* melainkan kepentingan perbaikan kualitas pribadi mereka.[42]

Berkenaan dengan *training* formal partai lainnya, seperti TOP, TD I-II, TL I-II, dan TKSM, intensitas pelaksanaan program-program pelatihan ini cenderung dinamis, sejalan dengan pertumbuhan jumlah kader partai.[43] Dalam program-program ini, partai mengumpulkan kader-kader pilihan di sebuah tempat selama satu atau dua hari dan melatih mereka mengenai sejumlah pokok bahasan berdasarkan

---

[40] Wawancara dengan Umar Salim Basalamah, Wakil Sekretaris Jenderal PKS (2002), dan sekretaris pribadi Hidayat Nur Wahid (mantan Presiden PKS dan Ketua MPR RI), di Jakarta, 12 Oktober 2010; dengan Musa Abdillah, Ketua Departemen Kaderisasi DPC PKS Kelapa Dua, di Jakarta, 23 Oktober 2010.

[41] Wawancara dengan Selamat Nurdin, M.M., mantan pemimpin aktivis tarbiyah di Universitas Indonesia, Anggota Dewan Provinsi DKI Jakarta (2004–2014), di Jakarta, 22 Oktober 2010.

[42] Wawancara Aay Muhammad Furkon dengan Anis Matta, di Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera, Ideologi dan Praktis Politik Kaum Muda Kontemporer*, 212.

[43] Wawancara Musyaffa A. Rahim, Kepala Departemen Kaderisasi DPP PKS (2010–2015) dengan Hurriyah di Hurriyah, *Sistem Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera (1998–2003)*, 210.

pada kurikulum standar partai.[44] Sebagai alat pendidikan, program pelatihan juga menjadi basis untuk mengevaluasi pemahaman kader atas kurikulum partai. Kemudian, tingkat keanggotaan kader juga ditentukan di dalam proses ini. Di dalamnya, saran *murabbi* sebagai tokoh yang secara langsung melakukan supervisi kader memainkan peranan penting.

2. Rekrutmen: Menemukan Kader yang Tepat

Status keanggotaan menjadi pedoman utama bagi partai di dalam proses rekrutmen jabatan internal maupun publik.[45] Kader baru dengan tingkat keanggotaan yang belum memadai atau rendah tidak dapat memegang jabatan strategis di PKS. Hingga lebih dari satu dekade keberadaannya, PKS berupaya konsisten di dalam pelaksanaan mekanisme ini. Berkenaan dengan komposisi anggota Majelis Syura, misalnya, rekrutmen diputuskan melalui pemilihan internal.[46] Partai menjaga kontrol internal untuk menjaga kualitas anggota Majelis Syura secara objektif. Keberadaan pemilihan internal ini memberikan peluang bagi kader-kader yang memiliki reputasi baik untuk terpilih. Para kandidat sama sekali tidak dapat bergantung pada hubungan kedekatan dengan petinggi partai; melainkan harus membuktikan kualitas mereka di hadapan kader-kader yang lain sehingga memang patut untuk dipilih.

---

[44] Wawancara dengan Musa Abdillah, Ketua Departemen Kaderisasi DPC PKS Kelapa Dua, di Jakarta, 23 Oktober 2010.

[45] Departemen Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera, "Sekilas tentang Sistem Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera", tidak diterbitkan, (Jakarta, 2004), di Hurriyah, *Sistem Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera (1998–2003)*, 205.

[46] Partai memutuskan satu hari khusus untuk menyelenggarakan pemilihan. Pada saat itu, kader yang memenuhi syarat harus mengikutinya. Wawancara dengan Mustofa, kader PKS dan mantan wartawan Majalah Profetik di Depok, 7 Oktober 2010. Tentang situasi terakhir tentang hal ini lihat "Pemira Majelis Syura PKS: Cara Unik PKS Memilih Pemimpin", di *http://www.pks.or.id/v2/main.php?op=isi&id=111*. "Ratusan Kader PKS Datangi TPS Pilih Majelis Syura", di *http://www.riaumandiri.net/rm/index.php?option=com_content&view=Pasal&id=183:ratusan-kaderpks-datangi-tps-pilih-majelis-syura-&catid=37:politik-a-keamanan&Itemid=55*

Di tingkat lokal, pemilihan pimpinan partai dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama-tama, dibentuklah tim kecil yang terdiri dari senior dan *murabbi* yang bertugas untuk memonitor kader yang berpotensi memegang posisi strategis di kepengurusan lokal partai. *Murabbi* sebagai orang yang bertanggung jawab atas proses *monitoring* tersebut dapat memberi saran kepada tim tentang kualitas kader-kader binaannya.[47] Kemudian, tim kecil membahas pendapat tersebut dan mengecek laporan mingguan kader untuk mengevaluasi tingkat kualitas kader. Setelah diawali oleh sebuah pembahasan yang bersifat informal, rapat kecil yang terdiri dari para kader senior, perwakilan departemen kaderisasi, dan *murabbi* diselenggarakan untuk menyeleksi dan mendaftar nama-nama calon kader potensial. Partai kemudian menyebarkan daftar nama-nama kader yang telah terseleksi itu ke seluruh kader, yang diikuti dengan pemilihan internal untuk memilih kader yang paling pantas untuk memimpin partai.[48] Hasil pemilihan internal ini akan menjadi salah satu poin penting bagi keterpilihan seorang kandidat. Kemudian, para pimpinan dan kader senior menyelenggarakan rapat sekali lagi untuk menentukan komposisi kepengurusan partai dengan menggunakan hasil pemilihan internal sebagai salah satu patokan. Melalui mekanisme seperti ini, peluang untuk terpilihnya kader terbaik sebagai pimpinan partai amat mungkin terjadi karena hanya kader-kader berkualitas saja, baik menurut kebanyakan kader maupun tim kecil, yang dapat menjadi kandidat dalam pemilihan. Secara umum, figur-figur yang memegang posisi strategis seperti di MPP, DPP, dan DPS adalah kader-kader unggulan dengan tingkat komitmen dan kemampuan yang tinggi.

Situasi serupa juga berlangsung di dalam proses rekrutmen caleg. Dalam memutuskan kader mana yang akan mewakili partai di pemilihan umum, PKS membuat sejumlah tahapan evaluasi untuk

---

[47] Wawancara dengan Musa Abdillah, Ketua Departemen Kaderisasi DPC PKS Kelapa Dua, di Jakarta, 23 Oktober 2010.

[48] Wawancara dengan Musa Abdillah, Ketua Departemen Kaderisasi DPC PKS Kelapa Dua, di Jakarta, 23 Oktober 2010.

menelaah secara mendalam kemampuan politik dan kepribadian kandidat, yang akhirnya akan menentukan kelayakan mereka.[49] Partai juga menyelenggarakan pemilihan internal sebagai proses untuk memutuskan siapa saja yang dapat menjadi caleg.[50] Melalui proses transparan yang melibatkan banyak kader, partai dapat menghindari kecenderungan kolusi dan nepotisme. Hal ini karena elite partai bukanlah satu-satunya pihak yang terlibat dan menentukan proses rekrutmen, melainkan juga ribuan kader inti yang harus pula dipertimbangkan aspirasi dan pendapatnya.

Selain mengusulkan kadernya sendiri sebagai calon anggota parlemen, partai juga membuka peluang pihak luar terutama pakar atau tokoh masyarakat untuk dapat mewakili PKS di badan legislatif. Untuk jenis rekrutmen ini, partai akan membentuk sebuah tim yang memonitor dan mengecek kualitas kepribadian dan komitmen keislamanan tokoh yang berpotensi sebagai kandidat anggota dewan.[51] Setelah pembahasan formal untuk memutuskan nama-nama kandidat yang layak untuk menjadi caleg PKS, partai kemudian akan membangun pendekatan personal terhadap kandidat-kandidat tersebut untuk meyakinkan mereka agar bersedia menjadi caleg PKS dan membuat kesepakatan antara partai dan para kandidat caleg itu. Bagi kandidat yang pada akhirnya berhasil terpilih dalam pemilu, partai akan meminta mereka untuk bergabung pada gerakan dakwah tarbiyah atau sekurang-kurangnya memberi kontribusi terhadap agenda dan kegiatan partai termasuk mengikuti *halaqah*.[52]

---

[49] Wawancara dengan Hidayat, M.M., anggota DPRD Kabupaten Tangerang (2005–2010), di Tangerang, 21 Oktober 2010. Wawancara Aay Muhammad Furkon dengan Anis Matta, di Aay Muhammad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera, Ideologi dan Praktis Politik Kaum Muda Kontemporer*, (Bandung: Teraju, 2004), 216–218.

[50] "Caleg PKS Ditentukan Melalui Pemilu Internal", *Republika*, 30 Desember 2003.

[51] Wawancara dengan Mahfudz Siddiq, Ketua Departemen Kaderisasi DPP PKS (2002–2005) dan anggota DPR RI (2004–2014), di Jakarta, 27 Oktober 2010; dengan Hidayat, M.M., anggota DPRD Kabupaten Tangerang (2005–2010), di Tangerang, 21 Oktober 2010.

[52] Wawancara dengan Mahfudz Siddiq, Ketua Departemen Kaderisasi DPP PKS (2002–2005) dan anggota DPR RI (2004–2014), di Jakarta, 27 Oktober 2010; dengan

C. Kecenderungan Dukungan Internal untuk Soliditas Partai

1. Terpeliharanya Pemahaman yang Sama

Pelaksanaan kaderisasi, sebagai media strategis untuk memperkenalkan aturan main partai, pada akhirnya turut memberikan dampak positif bagi kehidupan internal partai. Kaderisasi sistematis menyokong terbentuknya pemahaman dan persepsi yang sama atas sistem internal partai, termasuk AD/ART partai, yang mampu mencegah munculnya kesenjangan atau ketimpangan pemahaman atas persoalan-persoalan tersebut, baik di level sesama kader atau antara kader dan elite partai. Partai juga menerbitkan sejumlah buku berkaitan dengan kaderisasi. Hal ini memungkinkan kader dan mereka yang tertarik dengan kaderisasi PKS dapat secara benar memahami seluruh proses kaderisasi partai ini. Melalui Departemen Kaderisasi, PKS juga menerbitkan bahan ajaran kaderisasi untuk kader dan masyarakat.[53] Bahan ini terutama menjelaskan konsep, tujuan, dan kurikulum kaderisasi. Dengan menyediakan buku-buku semacam ini, PKS sebenarnya berupaya menolak salah paham atas proses kaderisasinya, tetapi juga menunjukkan kesiapannya dalam pengelolaan kaderisasi sistematis.

Kaderisasi sisitematis juga membangun persepsi yang sama tentang fungsi dan wewenang perangkat-perangkat atau badan-badan yang ada dalam partai. Berkenaan dengan soal penanganan

---

Hidayat, M.M., anggota DPRD Kabupaten Tangerang (2005–2010), di Tangerang, 21 Oktober 2010; dengan Aus Hidayat Nur, Kepala Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktober 2010.

[53] Beberapa bahan itu di antaranya: Tim Departemen Kaderisasi PK-Sejahtera, *Manajemen Tarbiyah Anggota Pemula*, (Jakarta: DPP PKS Departemen Kaderisasi dan PT Syaamil Cipta Media, 2005). Tim Departemen Kaderisasi PKS, *Profil Kader Partai Keadilan Sejahtera*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2004). Majelis Pertimbangan Pusat PK Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani. Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera*, (Jakarta, 2008). Bidang Kewanitaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Rakornas Bidang Kewanitaan Partai Keadilan Sejahtera*, (Jakarta: 2001). Dr. Ahmad Satori *et al.*, *Al Taujihat Ri'ayah Ma'nawiyah Kader PKS Sejahtera*, (Jakarta: Departemen Kaderisasi DPP PKS, 2003).

perselisihan internal atau menciptakan resolusi konflik, misalnya, para kader akan merujuk kepada Dewan Syariah sebagai institusi utama yang bertanggung jawab atas persoalan tersebut. Kader PKS pada umumnya tidak akan membawa persoalan konflik ke badan lain di partai, atau apalagi ke institusi eksternal untuk mencari solusi.[54] Pada tahun 2011, Yusuf Supendi membuat pengecualian, dengan menyeret sepuluh senior partai termasuk Hilmi Aminuddin dan Anis Matta ke pengadilan atas tuduhan perlakuan tak pantas partai terhadap dirinya. Akan tetapi, partai sebenarnya telah memecatnya pada tahun 2009. Oleh karena itu, status resmi Yusuf Supendi bukan lagi kader PKS ketika melakukan *legal action*. Dapat dikatakan kasus Yusuf Supendi sebagai sebuah anomali dalam partai ini.

Sementara itu, dalam soal proses pembuatan kebijakan, kader berkeyakinan bahwa proses ini harus didasarkan pada mekanisme konsultasi yang melibatkan banyak pihak, dan bukanlah hasil sebuah keputusan individual. Untuk memutuskan sebuah kebijakan strategis di tingkat nasional, misalnya, para kader memahami bahwa MS merupakan institusi utama yang memutuskan dan hal itu dilakukan secara kolektif.

Selain memungkinkan kesatuan di dalam memahami aturan main partai, kader juga berbagi pemahaman yang sama atas ideologi mereka. Internalisasi ideologi dan nilai partai secara intensif telah menjaga kesadaraan ideologi kader. Kader misalnya memiliki pemahaman yang relatif sama atas gagasan tentang 'perangkat dakwah' atau peran mereka sebagai 'tentara dakwah' yang memiliki komitmen untuk membangun kepentingan Islam dan bukan kepentingan personal melalui kehidupan politik.[55] Hal ini terefleksi dengan tidak adanya

---

[54] "Alasan Yusuf Supendi Laporkan Petinggi PKS ke KPK", *Republika*, 21 Maret 2011. "Pemecatan Bikin Istri Stroke. Yusuf Supendi Gugat 10 Petinggi PKS 42,7 Miliar", *Republika*, 2 Mei 2011. Lihat juga "Sikap Resmi PKS atas Tuduhan Mantan Kader", *pkspiyungan.blogspot.com*, 18 Maret 2011.

[55] Wawancara dengan Amri Yusra, M.Si., Ketua DPD PKS Depok (2002–2004), anggota Dewan Kota madya Depok, Jawa Barat, (2004–2009), dan Dosen di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, di Depok,

perubahan ataupun keinginan untuk mengubah dasar dan tujuan partai selama kurun waktu satu dekade pertama keberadaan PKS. Mengomentari situasi ini, Mardani Ali Sera melihatnya sebagai hasil dari pemahaman ideologis yang sama di antara kader-kader partai.[56]

Berbagai kesamaan cara pandang tersebut pada akhirnya mendorong kader menyadari akan peran aturan main dan ideologi partai dalam kegiatan mereka sehari-hari. Situasi ini di satu sisi mampu mengurangi kemungkinan terjadinya penafsiran sepihak oleh elite partai tentang berbagai masalah.[57]

Meskipun demikian, perbedaan pandangan antarkader kemungkinan besar tetap terjadi karena tujuan kaderisasi memang tidak dirancang untuk menciptakan kesamaan penuh atau total di tingkat strategi pelaksanaan kebijakan. Partai pun memberikan peluang bagi kader untuk mengembangkan kreativitas mereka dan menyadari bahwa homogenitas yang tinggi justru akan membawa kerugian bagi kader untuk melaksanakan berbagai kebijakan secara benar. Hal ini karena di tingkat praktis, kader akan menghadapi konteks dan situasi yang sangat beragam dan plural. Oleh karena itu, peluang adanya penafsiran dan pemahaman yang berbeda untuk mencapai tujuan sebuah kebijakan di antara kader masih terbuka dan kadang-kadang menjadi perdebatan antarkader. Akan tetapi, selama dekade pertama keberadaannya, perbedaan antarkader tentang strategi itu atau bahkan ideologi sebenarnya jarang terjadi.

---

7 Oktober 2010; dengan Musa Abdillah, Ketua Departemen Kaderisasi DPC PKS Kelapa Dua, di Jakarta, 23 Oktober 2010; dengan Sitaresmi S., M.Psi., anggota Departemen Dakwah DPP PK (2000–2003), di Jakarta, 8 Oktober 2010; dengan Hidayat, M.M., anggota DPRD Kabupaten Tangerang (2005–2010), di Tangerang, 21 Oktober 2010.

[56] Wawancara dengan Dr. Mardani Ali Sera, Wakil Ketua MPP DPP PKS (2010–2015), di Jakarta, 6 Oktober 2010.

[57]. Wawancara dengan Dr. Prihandoko, Ketua DPD PKS Depok (2004–2007) di Depok, 5 Oktober 2010. Wawancara dengan Dr. Mardani Ali Sera, Wakil Ketua MPP PKS (2010–2015), di Jakarta, 6 Oktober 2010.

Di lain pihak, dengan kesadaran ini kader tidak akan mudah termakan oleh hasutan, baik dari pihak eksternal maupun internal, dengan menggunakan penafsiran aturan main atau ideologi tertentu, untuk saling menyerang sesama kader. Kader tidak dapat digerakkan dengan mudah untuk menentang atau menyimpang dari keputusan partai atau komitmen mereka terhadap ideologi partai.

2. Loyalitas yang Relatif Terjaga

Keberadaan kaderisasi sistematis juga menanamkan rasa loyalitas kepada kader. Melalui *halaqah* dan berbagai pelatihan lainnya, upaya pembangunan dan pengembangan loyalitas dilakukan secara bertahap. Loyalitas terhadap partai didasarkan pada sebuah kepercayaan bahwa fungsi partai guna mewujudkan idealisme Islam dan bukan dibaktikan untuk kepentingan kelompok atau tokoh tertentu. Musa Abdillah menyatakan bahwa partai menyampaikan kepada kader bahwa partai adalah sarana untuk mewujudkan impian keagamaan mereka.[58]

Code of conduct untuk menaati pemimpin-pemimpin partai (*qiyadah*) menjadi instrumen lain yang dikembangkan dalam PKS untuk mendukung penguatan monoloyalitas para kader. Untuk itu, partai mengembangkan tradisi untuk menganggap keputusan pemimpin sebagai kebijakan yang terbaik bagi semua kader karena pemimpin adalah kader terbaik yang memiliki pengetahuan dan komitmen yang jauh lebih unggul. Keputusan yang dibuat elite menjadi semacam fatwa yang harus dilaksanakan oleh seluruh kader. Sehubungan dengan hal ini, Tifatul Sembiring menyatakan bahwa kenikmatan menjadi seorang kader partai tidak akan ada tanpa ketaatan.[59]

Di banyak partai yang sudah maju, kader cenderung untuk menempatkan elite dan partai sebagai pembuat keputusan utama

---

[58] Wawancara dengan Musa Abdillah, Ketua Departemen Kaderisasi DPC PKS Kelapa Dua, di Jakarta, 23 Oktober 2010.

[59] Lihat di Nur Hasan Zaidi, "Resepsi PKS", *Republika*, 30 Juli 2005.

yang harus diikuti. Hal ini menutup kemungkinan terjadinya loyalitas ganda di partai karena partai mampu menjaga posisinya sebagai satu-satunya institusi otoritatif pembuat kebijakan atau keputusan yang harus dihormati para kader. Selama dekade pertama keberadaan partai, situasi ini memungkinkan PKS untuk terus memelihara rantai komando dalam hal disiplin partai. Di lain pihak, situasi ini diimbangi pula oleh sikap elite untuk menghormati posisinya, dengan terus berupaya bersikap konsisten atas prosedur dan ideologi partai. Kontrol internal, baik di antara sesama elite maupun antara elite dan kader melalui *halaqah* membantu para pimpinan partai untuk dapat memenuhi komitmen ini.

Oleh karena itu, walaupun *murabbi* memainkan peranan penting di dalam proses kaderisasi, hal itu tidak menggoda mereka untuk bertindak melampaui prosedur partai. *Murabbi* menyadari bahwa kehadiran mereka hanyalah wakil atau perangkat partai untuk mengontrol dan mengevaluasi kader secara terus-menerus.[60] Mereka tidak menganggap diri mereka sebagai pihak yang dapat menghindari standar dan aturan partai. Di sisi lain, kader juga tidak menganggap *murabbi* sebagai individu spesial yang dapat bergerak secara mandiri, melainkan sebagai bagian dari sistem partai. Agar dapat memastikan hubungan yang sehat antara kader dan *murabbi* dan menghindari ketergantungan yang mendalam di antara mereka, partai kadang-kadang melakukan rotasi dengan memindahkan seorang *murabbi* ke *halaqah* lainnya.[61]

Selain itu, rekrutmen partai yang didasarkan pada proses objektif pada akhirnya menguatkan rasa ketergantungan kader pada sistem dan partai daripada kepada individu. Kader yakin bahwa performa individual mereka akan lebih berpengaruh dalam menentukan

---

[60] Di konteks hierarki, *murabbi* di tingkat paling rendah adalah *mutarabbi* dari tingkat lebih tinggi yang harus mengikuti dan melaksanakan tugas dan instruksi *murabbi* mereka.

[61] Wawancara dengan Dr. Yon Mahmudi, Pengamat PKS dan Gerakan Tarbiyah di Indonesia, Dosen Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dan salah satu kader yang menandatangani deklarasi pendirian PKS, di Depok, 6 Oktober 2010.

promosi kariernya di partai ketimbang kedekatan eksklusif dengan elite. Kader merasa bahwa mereka seharusnya tidak bergantung pada tokoh tertentu, melainkan pada mekanisme objektif. *Merit system* telah membantu partai untuk mengembangkan profesionalisme dan mengurangi subjektivitas elite dalam menentukan karier seseorang. Hal ini pada akhirnya memperkuat kerja kader untuk berorientasi dan loyal hanya kepada partai saja.

3. Pemeliharaan Kepercayaan terhadap Pemimpin

Kecenderungan penting lain dari kaderisasi yang intensif adalah pengembangan *tsiqoh* (kepercayaan) terhadap partai dan para pemimpinnya. Melalui pertemuan mingguan *halaqah*, sikap ini secara bertahap dibangun melalui *murabbi* sampai pada tingkat di mana kader tidak ragu lagi untuk saling berbagi masalah personal mereka dengan *murabbi* dan kader lain.[62]

Kader-kader PKS pada umumnya menganggap *murabbi* yang sejatinya merupakan bagian perangkat partai lebih dari sekadar guru, tetapi juga kadang-kadang seperti seorang sahabat, saudara, atau bahkan orangtua. Sikap menghargai *murabbi* ini menunjukkan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemimpin. Lebih dari itu, *halaqah* juga meningkatkan semangat persaudaraan antarsesame kader dan memperkuat semangat kepercayaan satu dengan lainnya. Presiden PKS Hidayat Nur Wahid (2001–2005) berkata:

> Di partai ini ada kaderisasi, baik formal maupun individual. Ada pemahaman bersama di antara kader sehingga kita harus menjadi individu yang baik dan profesional. Di *halaqah*, hal ini memungkinkan kader bertemu, saling menasihati, dan memperkuat satu dengan lainnya.[63]

---

[62] Wawancara dengan Hurriyah M.A., Pengamat Kaderisasi PKS dan Dosen di Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, di Depok, 29 Oktober 2010; dengan Noviyanti Utaminingsing, kader PKS, di Jakarta, 9 Oktober 2010.

[63] "Kompas", 25 November 2002, di Lubis, *Yang Nyata dari PK Sejahtera*, 26.

Dalam nuansa semacam ini dapat dipahami jika *halaqah* pada akhirnya tidak hanya memperkuat hubungan antara elite dan kader, tetapi juga memelihara hubungan antarkader dengan memberikan semangat persaudaraan. Kader cenderung mencari titik temu dan kebersamaan daripada perbedaan dan permusuhan dengan anggota partai lainnya.[64] Dengan adanya semangat ini, pengembangan kepercayaan di dalam partai menjadi lebih mudah.

Kemudian, melalui proses rekrutmen yang sistematis, kader belajar untuk membangun komitmen yang baik dan kerja keras. Keduanya menjadi cara utama untuk mendapatkan posisi dan level yang lebih baik di partai. Terbangunlah kemudian persepsi di mata kader bahwa hanya orang-orang terbaik yang dapat memimpin partai tanpa melihat latar belakang mereka, yang di dalam jangka panjang memberi kontribusi untuk menjembatani kepercayaan di dalam sistem partai.

Kasus Anis Matta, Sekretaris Jenderal PKS selama tiga periode, memperlihatkan nilai ini. Walaupun dia bukan bagian dari generasi pertama atau kedua gerakan tarbiah ini,[65] atau yang juga dikenal sebagai kader baru,[66] dia mencapai salah satu posisi paling prestisius di partai. Sejumlah kalangan melihat hal ini semata sebagai hasil hubungan personal yang demikian erat dengan Hilmi Aminuddin, salah satu pemimpin dan bapak pendiri gerakan tarbiah. Akan tetapi, banyak pula kader yang menganggap Anis pantas menduduki posisi tersebut karena kemampuan dan komitmen besarnya terhadap partai.[67] Prihandoko mengatakan walaupun dia mengaku tidak selalu

---

[64] Wawancara dengan K.H. Yusuf Supendi, Lc., anggota DSP PKS (2000–2005) dan anggota DPR RI FPKS (2004–2009), di Jakarta, 3 November 2010.

[65] Wawancara dengan Selamat Nurdin, M.M., mantan ketua aktivis tarbiyah di Universitas Indonesia, Anggota Dewan Provinsi DKI Jakarta (2004–2014), di Jakarta, 22 Oktober 2010.

[66] Wawancara dengan Aus Hidayat Nur, Kepala Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktober 2010.

[67] Wawancara dengan K.H. Yusuf Supendi, Lc., anggota DSP PKS (2000–2005) dan Anggota DPR RI FPKS (2004–2009), di Jakarta, 3 November 2010.

sejalan dengan pendapat Anis Matta, dia menganggap Anis Matta sebagai salah satu kader terbaik PKS yang pantas menjadi salah satu elite partai.[68] Sejalan dengan opini ini, Aus Hidayat Nur, salah satu kader senior Jamaah Tarbiyah menyatakan bahwa meski dia kader baru, Anis Matta adalah seorang kader yang pintar dengan visi yang brilian, idealisme yang kuat, dan kontribusi yang signifikan bagi PKS.[69] Karena alasan-alasan ini, dapat dipahami pula jika anggota Majelis Syura setuju untuk memilih Anis Matta untuk duduk sebagai sekretaris jenderal. Dengan kata lain, fenomena Anis Matta merupakan indikasi kehadiran *merit system* di partai ini.

Rekrutmen dengan tahapan-tahapan di dalamnya, beserta evaluasi dari elite termasuk pendapat *murabbi* dan pemilihan internal yang melibatkan banyak kader, adalah pola rekrutmen yang khas di PKS. Keberadaanya tidak saja turut menjaga objektivitas, di mana kedekatan dengan elite tidak berperan penting, namun juga turut menjaga keberadaan *merit system* yang memuaskan rasa keadilan kader dan membuatnya merasa nyaman.[70] Hal ini juga pada akhirnya turut menjaga kepercayaan atas sistem dan memelihara rasa hormat mereka terhadap pimpinan dan partai.[71]

D. Dampak Kecenderungan di Atas terhadap Soliditas Partai

Situasi di atas pada akhirnya berperan penting dalam memperkuat kemampuan partai untuk menghindari konflik internal dan menjaga soliditas. Walaupun selama dekade pertama keberadaan partai ini

---

[68] Wawancara dengan Dr. Prihandoko, Ketua DPD PKS Depok (2004–2007) di Depok, 5 Oktober 2010.

[69] Wawancara dengan Aus Hidayat Nur, Kepala Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktober 2010.

[70] Wawancara dengan Selamat Nurdin, M.M., mantan pemimpin aktivis tarbiyah di Universitas Indonesia, anggota Dewan Provinsi DKI Jakarta (2004–2014), di Jakarta, 22 Oktober 2010; dengan Mustofa, kader PKS dan mantan wartawan Majalah Profetik, di Depok, 7 Oktober 2010.

[71] Wawancara dengan Dr. Mardani Ali Sera, Wakil Ketua MPP PKS (2010–2015), di Jakarta, 6 Oktober 2010.

perselisihan internal tidak sepenuhnya dapat dihindari dan sebagian di antaranya bahkan memiliki potensi memicu perpecahan, PKS masih dapat mempertahankan soliditasnya.

Pada sejumlah kasus penting, adanya kaderisasi sistemik telah menyelamatkan partai dari konflik berkepanjangan. Perselisihan yang sengit untuk menentukan kandidat presiden pada Pemilu Presiden 2004 tidak dapat menjadi titik masuk terjadinya perpecahan internal. Perselisihan ini berakhir manakala kader-kader pada akhirnya bersepakat untuk merekomendasikan simpatisan dan kader partai untuk mendukung Amien Rais sebagai presiden berikutnya.[72] Situasi ini dapat dicapai karena kader-kader memiliki persepsi dan komitmen yang sama atas mekanisme dan forum pengambilan keputusan yang harus dilaksanakan, yang dalam hal ini juga sesuai dengan AD/ART partai. Mereka menghindari tindakan sepihak dan sepenuhnya menyerahkan masalah ini ke tangan Majelis Syura. Oleh karena itu, partai mampu menghindari pengambilan keputusan secara sepihak dan sekaligus menjawab isu adanya pelanggaran atau tindakan inkonstitusional dalam proses ini. Potensi resistensi kader pun dapat dihindari.[73]

Kemudian, komitmen yang kuat untuk menjaga loyalitas membawa kader untuk senantiasa menghormati hasil Majelis Syura. Meskipun mereka memiliki peluang untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas, ketika pemimpin-pemimpin partai telah memutuskan satu kebijakan, para kader harus mengikuti sepenuhnya. *Code of conduct* ini terlihat dalam kasus Pemilu Presiden 2004. Seluruh kader menerima keputusan pemimpin partai untuk mendukung Amien Rais. Bahkan Anis Matta, pendukung Wiranto, setuju untuk mengikuti sepenuhnya keputusan itu. Para kader dapat memahami keputusan ini walaupun di dalam hati mereka tidak sepakat.

---

[72] "PKS Resmi Dukung Amien-Siswanto", Republika, 1 July 2004.

[73] Wawancara dengan Dr. Prihandoko, Ketua DPD PKS Depok (2004–2007) di Depok, 5 Oktober 2010.

Kader-kader yang berselisih tetap memercayai satu sama lain bahkan kerap tanpa melihat bahwa mereka memiliki dua opsi yang berbeda. Keberpihakan mereka tetap dilandasi oleh kepentingan dan komitmen utama yang serupa, yakni terwujudnya keberhasilan perjuangan dakwah.[74] Mereka tidak melihat bahwa opsi ini dirancang untuk memfasilitasi kepentingan individu atau kelompok. Kesadaran untuk meyakini bahwa mereka masih berbagi kepentingan ideologi yang sama memudahkan partai untuk membangun rekonsiliasi dengan mudah antara kubu pro-Writanto dan kubu pro-Amien.

Pada tahun 2005, muncul dua pandangan yang kontradiktif tentang kebijakan yang seharusnya diambil partai dalam merespons kebijakan kontroversial dan tidak populer dari Pemerintahan Presiden Yudhoyono untuk mengurangi subsidi BBM. Kebijakan tersebut telah memicu protes masif di seluruh negeri dan menciptakan ketegangan di antara para kader. Sejumlah kader percaya bahwa meninggalkan koalisi adalah cara terbaik untuk menyelamatkan wajah partai.[75] Di lain pihak, sejumlah kader menghendaki partai untuk tetap melanjutkan koalisi karena mereka menganggap keberadaan

---

[74] Wawancara dengan Ahmad Feri Firman Yusuf, Ketua Wilayah Dakwah III (2002–2005), anggota Majelis Syura PKS (2002–2010), di Jakarta, 2 November 2010; dengan Sigit Sosiantomo, Koordinator Wilayah Jawa Timur dan Bali PKS (2005–2009), di Jakarta, 25 Oktober 2010; dengan Aus Hidayat Nur, Kepala Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktober 2010. Lihat juga "PKS Resmi Dukung Amien-Siswanto", Republika, 1 Juli 2004. "Menimba Pengalaman Amien. Amien Rais Mengaku Pernah Dibohongi PKS dalam Pemilu Presiden 2004", *Suara Islam*, Edisi 56, 5–19 Desember 2008.

[75] Menurut Kamarudin dan Prihandoko, sekurang-kurangnya ada dua DWP (di DKI Jakarta, DI Yogyakarta) dan satu DPD PKS (di Solo) yang menghendaki PKS meninggalkan koalisi pemerintah. Wawancara dengan Dr. Kamarudin, Pakar Partai Politik Islam dan Dosen di Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, di Depok, 30 November 2010; dengan Dr. Prihandoko, Ketua DPD PKS Depok (2004–2007) di Depok, 6 Desember 2005. Tentang pendapat Matta untuk memilih keluar dari koalisi, lihat "Tak Ada Koalisi Tanpa Perubahan", *Saksi*, No. 6/VIII/30 November 2005, 7–9. "Ini Politik Bos", *Tempo*, 16 Oktober 2005.

partai dalam koalisi adalah cara yang efektif bagi PKS untuk dapat memengaruhi kebijakan pemerintah saat ini dan di masa depan.[76]

Adanya perbedaan pandangan ini, yang di beberapa wilayah telah menimbulkan ketegangan, tetap pada akhirnya tidak menyebabkan perselisihan atau konflik berkepanjangan. Sikap yang kuat untuk memercayai pemimpin partai, yang akhirnya memutuskan PKS tetap sebagai bagian koalisi, membantu partai menghindari perselisihan internal yang berkepanjangan. Kader-kader di seluruh Indonesia berupaya memahami keputusan itu dan mengikuti keputusan partai tanpa terkecuali. Di sini peran *halaqah* sebagai medium kaderisasi yang juga berperan penting di dalam sosialisasi keputusan partai, berhasil meyakinkan kader untuk memahami dan mendukung pilihan partai.

Murabbi dengan bantuan kader-kader yang setuju dengan kebijakan partai ini melalui media *halaqah* berhasil meyakinkan kader lain tentang sisi-sisi positif bagi partai jika PKS tetap berada di pihak pemerintah.[77] Menurut Nooryanto, dalam menghadapi situasi sulit ini, kaderisasi yang memadai mampu menjembatani salah paham di antara elite dan kader yang dapat melahirkan konflik yang serius.[78] Sejalan dengan pendapat ini, Trianto Prabowo berkeyakinan bahwa kesadaran untuk menaati pemimpin atau keputusan partai (setelah partai memutuskan untuk tetap di dalam koalisi) dan tetap menjaga kesatuan dan persatuan merupakan salah satu hasil kaderisasi yang sistematis, khususnya keberadaan *halaqah*.[79]

Situasi ini juga didukung oleh komitmen untuk menjaga loyalitas kepada partai. Walaupun kasus ini menimbulkan beda pendapat

---

[76] Wawancara dengan Mahfudz Siddiq, Ketua Departemen Kaderisasi DPP PKS (2002–2005) dan anggota DPR RI (2004–2014), di Jakarta, 27 Oktober 2010.

[77] Wawancara dengan Mahfudz Siddiq, Ketua Departemen Kaderisasi DPP PKS (2002–2005) dan anggota DPR RI (2004–2014), di Jakarta, 27 Oktober 2010.

[78] Wawancara dengan Nooryanto, Ketua Departemen Kaderisasi Bekasi DPD PKS, di Bekasi, 7 November 2010.

[79] Triatno Yudho Prabowo, *Pengaruh Taklim Rutin terhadap Prilaku Politik Kader Partai Keadilan Sejahtera dalam Perspektif Teori Intergroup Relation*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2006).

antara elite dan kader, tetapi hal ini tidak menjadi titik masuk terjadinya faksionalisme. Perbedaan pendapat secara umum dianggap sebagai sebuah hal yang wajar. Kekecewaan sejumlah kader tidak mengarahkan mereka untuk menentang keputusan itu secara terorganisasi atau menyebabkan faksi atau kubu alternatif. Beberapa elite atau kader kritis, yang cenderung menentang sikap partai untuk tetap dalam koalisi, juga tidak dapat meyakinkan sebagian besar kader untuk mengikuti pandangan mereka.

Pada tahun 2008, partai menghadapi sekali lagi perbedaan pandangan yang serius di antara para kadernya. Hal ini dipicu setelah sejumlah tokoh penting partai mengumumkan gagasan PKS sebagai 'partai Islam terbuka'. Gagasan ini memberikan peluang kepada nonmuslim untuk menjadi anggota partai dan bahkan menjadi pengurus partai. Gagasan ini muncul pertama kali sebagai respons terhadap perkembangan di sejumlah wilayah dengan mayoritas penduduk nonmuslim, seperti di Papua. Di wilayah tersebut, kalangan nonmuslim kerap mengajukan diri untuk dapat menjadi anggota PKS.[80] Karena intensitas permintaan yang semakin tinggi, beberapa kalangan berupaya mencari jalan keluar sebagai respons atas fenomena tersebut. Sejumlah pimpinan dan kader, terutama mereka di DPP dan elite di tingkat DPW, berkeyakinan bahwa gagasan ini dapat dipahami dan pada dasarnya tidak melanggar prinsip dakwah.[81] Namun, bagi sebagian besar lainnya, gagasan ini masih belum dapat diterima, bahkan sebaliknya menimbulkan kegamangan.[82]

---

[80] Cahyadi Takariawan, "Anggota PKS Non-Muslim di Papua", di Helvy Tiana Rosa, Izzatul Jannah, dkk., *Bukan di Negeri Dongeng Kisah Nyata Para Pejuang Keadilan*, (Jakarta: Penerbit Syaamil, 2003), 124–126. Wawancara dengan Ahmad Feri Firman Yusuf, Ketua Wilayah Dakwah III (2002–2005), anggota Majelis Syura PKS (2002–2010), di Jakarta, 2 November 2010.

[81] Wawancara dengan Ahmad Feri Firman Yusuf, Ketua Wilayah Dakwah III (2002–2005), anggota Majelis Syura PKS (2002–2010), di Jakarta, 2 November 2010.

[82] Wawancara dengan Amri Yusra, M.Si., Ketua DPD PKS Depok (2002–2004), anggota Dewan Kota madya Depok, Jawa Barat, (2004–2009), dan Dosen Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, di Depok, 7 Oktober 2010.

Walaupun gagasan ini tak pelak memicu perselisihan internal, hal ini sekali lagi tidak mendorong partai terjerumus ke dalam perpecahan. Kaderisasi sistematis yang menyebabkan terbangunnya persepsi yang sama atas aturan main partai yang berlaku, telah mendorong kader untuk konsisten mengedepankan mekanisme partai daripada mengikuti pendapat individual dalam menyelesaikan perselisihan ini. Sejak dini para kader telah berkeyakinan bahwa untuk mendudukkan dan merespons dengan tepat gagasan PKS sebagai partai Islam terbuka itu harus dibahas oleh Majelis Syura. Keputusan apapun yang nantinya diambil adalah keputusan otoritatif yang mengikat seluruh kader.

Kemudian, di kasus yang rumit ini, kepercayaan pada partai tecermin dari keinginan kader-kader untuk mendengar alasan para pemimpin mengeluarkan gagasan itu. Sebagian besar kader berinisiatif bertanya kepada elite tentang isu tersebut. Kader juga menggunakan *halaqah* sebagai medium untuk mengonfirmasi dan menjelaskan perkembangan isu ini.[83] Sejumlah kepengurusan lokal bahkan mengundang elite partai yang kompeten untuk menjelaskan isu ini agar terhindar dari salah persepsi dan respons kolektif yang tidak produktif terhadap gagasan ini. DPD PKS Bekasi, misalnya, mengadakan pembahasan dengan sejumlah pimpinan partai untuk memberikan penjelasan komprehensif tentang gagasan partai terbuka.[84] Langkah-langkah semacam ini tentu saja tidak akan diambil manakala kepercayaan pada partai telah lenyap. Dengan adanya pemahaman ini, kader tidak dapat dipengaruhi dengan mudah melalui rumor negatif yang berkaitan dengan gagasan itu. Kader juga tidak mengambil langkah inkonstitusional atau 'luar biasa' untuk merespons gagasan tentang partai terbuka itu. Di ujung itu semua, partai memahami masalah utama dari gagasan ini dan meresponsnya

[83] Wawancara dengan Musa Abdillah, Ketua Departemen Kaderisasi DPC PKS Kelapa Dua, di Jakarta, 23 Oktober 2010; dengan Nooryanto, Ketua Departemen Kaderisasi Bekasi DPD PKS, di Bekasi, 7 November 2010.

[84] Wawancara dengan Nooryanto, Ketua Departemen Kaderisasi Bekasi DPD PKS, di Bekasi, 7 November 2010.

secara lebih bijak dengan menunggu kesiapan kader untuk menerima gagasan ini.[85]

Kasus lain yang ditangkap oleh publik dalam kurun waktu dekade pertama keberadaan partai ini adalah gejala 'faksionalisasi' di PKS. Beberapa kalangan kemudian membangun opini dan teori tentang 'faksionalisasi' PKS,[86] bahkan perpecahan, dengan menunjukkan adanya dua faksi kontradiktif yang disebut sebagai 'kelompok keadilan' dan 'kelompok kesejahteraan'.[87] Mereka menganggap kelompok pertama sebagai faksi yang lebih idealis dengan kecenderungan puritan dalam mencapai tujuan partai, sedangkan 'kelompok kesejahteraan' sebagai kelompok dengan kecenderungan pragmatis dengan tendensi moderasi dalam mengupayakan terwujudnya kepentingan partai. Jenis pengelompokan ini muncul, khususnya setelah Pemilu Presiden 2004, ketika dua pendapat berbeda tentang kandidat presiden terjadi di antara kader partai.

Meski diklaim telah muncul pengelompokan di atas, PKS dan sebagian besar anggotanya tidak pernah secara formal mengklaim kehadiran pengelompokan itu.[88] Tifatul Sembiring yang menolak adanya faksi di PKS menyatakan, "Tidak ada kelompok A atau B.

---

[85] Gagasan partai terbuka pada akhirnya secara formal diputuskan partai hampir dua tahun kemudian pada 2010 setelah seluruh anggota Majelis Syura mendukungnya.

[86] Arief Munandar, *Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004*, Disertasi Ph.D., tidak diterbitkan, (Depok: Program Pascasarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2011).

[87] Tentang pembahasan ini lihat misalnya "Sabit Kembar di Simpang Jalan", Monitor, Edisi ke-37, Tahun I/11–17 Maret 2009. Wawancara dengan Mahfudz Siddiq, Ketua Departemen Kaderisasi DPP PKS (2002–2005) dan anggota DPR RI (2004–2014), di Jakarta, 27 Oktober 2010.

[88] Sejumlah pengamat berkeyakinan bahwa perselisihan internal dan faksi memang ada. Kajian yang dilakukan Munandar, misalnya, menunjukkan pengetahuan sejumlah kader tentang faksi di internal partai. Akan tetapi, pada umumnya, kader PKS dan mayoritas pihak yang diwawancarai melihat perbedaan itu sebagai suatu yang normal dan seharusnya tidak mengarah ke faksi permanen atau bahkan perpecahan internal. Lihat Munandar, *Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004*.

Tidak ada faksi, baik Faksi Keadilan maupun Faksi Kesejahteraan".[89] Sejalan dengan pendapat ini, Hidayat Nur Wahid Presiden PKS (2002–2005) berkata bahwa faksi muda dan tua atau faksi kesejahteraan dan keadilan tidak ada di partai ini. Dia berkesimpulan, "PKS itu satu. Tidak ada faksi di dalamnya".[90]

Sejumlah anggota memang mengakui adanya perbedaan atau keragaman dalam membangun dan menjalankan strategi atau manuver politik, namun mereka tidak melihat hal ini sebagai pertanda terbangunnya sebuah faksi. Selamat Nurdin, misalnya, mengakui bahwa 'faksionalisasi' dalam hal cara berpikir atau berstrategi kerap muncul, tetapi itu tidak kemudian terejawantahkan dalam pembentukan kelompok-kelompok.[91] Faksionalisasi akan jelas terlihat sebagaimana terjadi di sejumlah partai Inggris manakala kelompok-kelompok di dalam partai itu secara tegas dan gamblang mendeklarasikan eksistensi kelompoknya dan menyatakan adanya perbedaan antara kelompok mereka dengan kelompok lainnya di dalam partai.[92] Kenyataannya, hingga kini, tidak ada sebuah kelompok pun yang secara nyata atau tegas menyatakan dirinya sebagai kelompok yang berbeda di dalam partai, yang memiliki visi dan tujuan yang berbeda dari anggota lainnya, termasuk dalam masalah-masalah mendasar seperti tafsiran ideologi yang berbeda.

Pengelompokan di antara kader PKS cenderung bersifat temporal dan fleksibel. Hal ini muncul terutama dipicu oleh respons atas sebuah isu yang tengah berkembang. Seorang kader dengan kader lainnya dapat saja berada di kelompok yang berbeda pada isu Wiranto versus Amien Rais pada tahun 2004, namun ada dalam kubu yang sama pada kasus BBM dan keberlanjutan koalisi de-

[89] "Tifatul: Tidak ada Konflik Internal di PKS", *Republika*, 24 Maret 2011.

[90] "Hidayat Nur Wahid: Tidak ada Faksi di PKS", 22 Maret 2011.

[91] Wawancara dengan Selamat Nurdin, M.M., mantan ketua aktivis tarbiyah di Universitas Indonesia, anggota Dewan Provinsi DKI Jakarta (2004–2014), di Jakarta, 22 Oktober 2010.

[92] Moshe Maor, *Political Parties, and Party Systems, Comparative Approaches and the British Experience*, (London: Routledge, 1997), 55–162.

ngan pemerintahan Yudhoyono pada tahun 2005. Situasi ini terjadi dengan Anis Matta, yang kerap disebut sebagai representasi 'faksi kesejahteraan', versus Mashadi, salah satu tokoh utama yang disebut 'faksi keadilan'. Keduanya bertolak belakang pada isu pencalonan presiden, namun bersatu dalam kasus BBM.

Pada umumnya, situasi di PKS lebih dekat dengan fenomena tendensi (perbedaan kecenderungan)[93] ketimbang pembentukan faksi. Berbeda dengan faksi, tendensi bersifat cair dan pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk membentuk kelompok-kelompok yang terpisah di dalam partai. Dalam situasi manakala kecenderungan munculnya tendensi jauh lebih kuat daripada faksionalisasi, partai memiliki peluang yang lebih besar untuk mempertahankan soliditasnya.

Selama dekade pertama keberadaan PKS, ada sejumlah figur kritis yang cenderung mengeluarkan berbagai pendekatan dan pendapat yang berbeda, seperti Mashadi, Yusuf Supendi, Daud Rasyid, atau Abdhi Sumaiti (Abu Ridha). Akan tetapi, mereka tidak dapat mengembangkan pendapatnya di partai atau memperoleh dukungan masif dari kader-kader. Kehadiran mereka tampak pada akhirnya hanya mewakili kepentingan individual atau kelompok kritis tertentu. Sampai saat ini pun mereka tidak dapat menginisiasi lahirnya faksi di PKS. Pada akhirnya, mereka cenderung berperan sebagai 'anggota yang tidak aktif', seperti Sumaiti, atau memilih untuk meninggalkan atau dipecat partai seperti Rasyid, Mashadi, dan Supendi. Meskipun demikian, pandangan-pandangan kritis mereka terhadap PKS tidak sepenuhnya sia-sia. Pandangan dan sikap mereka telah memicu sebuah kesadaran di antara banyak kader tentang cara yang sepatutnya dilakukan PKS sebagai sebuah partai dakwah saat melakukan manuver politiknya.

Kesulitan mereka untuk memperoleh dukungan mayoritas kader merupakan bukti kedewasaan kader dalam menghadapi berbagai perbedaan dan rumor. Kaderisasi sistematis telah membangun ke-

[93] Lihat pembahasasn tentang perbedaan faksi dan kecenderungan di R. Rose, 'Parties, Factions and Tendencies in Britain', *Political Studies*, 12:1, 33–46.

sadaran di antara kader untuk mengembangkan konsultasi intensif dengan perangkat partai melalui *murabbi*, departemen kaderisasi atau institusi lain, ketimbang pada rumor sebelum mengambil tindakan tertentu.[94] Oleh karena itu, pada umumnya kader tidak dapat dipengaruhi dengan mudah oleh pihak ketiga yang berniat menanamkan pengaruh atau gerakannya di dalam partai. Dalam suasana ini, PKS akhirnya mampu membangun resistensi yang efektif terhadap berbagai intervensi atau pengaruh berbahaya yang dapat menghancurkan kesatuan dan persatuan partai.

Lebih dari itu, keberadaan semangat persaudaraan dan loyalitas sebagai hasil kaderisasi sistematis telah mendorong kader untuk menjaga kesatuan di antara mereka sendiri layaknya sebuah keluarga. Pada umumnya, kader cenderung bersikap menghentikan konflik dan bersatu kembali segera mungkin. Perbedaan di dalam memahami dan mengusulkan opsi politik tidak menyebabkan mereka menghentikan interaksi dengan partai atau anggota lainnya.[95] Ketika menghadapi ketidaksepakatan dengan kebijakan partai, kader cenderung tetap berupaya memahami alasan di balik itu dan menjaga kebersamaan dengan perangkat partai.[96] Sikap *tsiqoh* yang terbangun melalui *halaqah* menjadi perangkat yang efektif untuk menjaga kepercayaan dan membendung potensi konflik dengan pimpinan-pimpinan partai. Dalam situasi ini, adalah sesuatu yang lazim di PKS ketika kader tetap mengikuti keputusan partai meskipun tidak sepakat sepenuhnya

---

[94] Wawancara dengan Musa Abdillah, Ketua Departemen Kaderisasi DPC PKS Kelapa Dua, di Jakarta, 23 Oktober 2010; dengan Nooryanto, Ketua Departemen Kaderisasi Bekasi DPD PKS, di Bekasi, 7 November 2010; dengan Aus Hidayat Nur, Kepala Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktober 2010; dengan Selamat Nurdin, M.M., mantan pemimpin aktivis tarbiyah di Universitas Indonesia, anggota Dewan Provinsi DKI Jakarta (2004–2014), di Jakarta, 22 Oktober 2010; dengan Mustofa, kader PKS dan mantan wartawan Majalah Profetik, di Depok, 7 Oktober 2010.

[95] Prabowo, *Pengaruh Taklim Rutin terhadap Prilaku Politik Kader Partai Keadilan Sejahtera dalam Perspektif Teori Intergroup Relation*.

[96] *Ibid*.

dengan keputusan.[97] Sementara itu, mereka yang merasa tidak dapat lagi sejalan dengan partai umumnya akan meninggalkan partai dengan cara baik-baik.[98]

Terdapat sejumlah kader yang menjadi sangat kritis dan menunjukkan resistensi terbuka terutama terhadap elite partai. Sebagian mereka juga menciptakan semacam "kelompok perlawanan" yang disebut FKP. Bagi mereka, PKS telah melanggar idealisme dan tujuan utama dakwah dengan tidak hanya mengambil kebijakan yang pragmatis dan berbahaya, tetapi juga meninggalkan kewajiban utamanya sebagai perangkat dakwah dengan membiarkan partai sebagai mesin politik yang hanya mencari kekuasaan dan posisi publik.[99]

Akan tetapi, gerakan resistensi ini tidak pernah menjadi arus utama (*mainstream*) di PKS. Bahkan di Provinsi DKI Jakarta, sebagai pusat gerakan FKP, forum ini hanya menarik sekitar 5% dari total kader.[100] Di luar DKI Jakarta, persentase pendukung FKP jauh lebih rendah. Di Kabupaten Bekasi, misalnya, FKP hanya dapat

---

[97] Muhammad Syihabuddin, "Majelis Syura, Alternatif "Demokrasi Islam", dan Ketaatan Kader PKS", http://syihabasfa.wordpress.com/2007/12/18/majelis-syura-alternatif-%E2%80%9Ddemokrasi islam%E2%80%9D/. Wawancara dengan Hidayat, M.M., anggota DPRD Kabupaten Tangerang (2005–2010), di Tangerang, 21 Oktober 2010; dengan Dr. Prihandoko, Ketua DPD PKS Depok (2004–2007) di Depok, 5 Oktober 2010.

[98] Wawancara dengan Hurriyah M.A., Pengamat Kaderisasi PKS dan Dosen Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, di Depok, 29 Oktober 2010.

[99] Wawancara dengan Hurriyah M.A., Pengamat Kaderisasi PKS dan Dosen Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, di Depok, 29 Oktober 2010; dengan K.H. Yusuf Supendi, Lc., Anggota DSP PKS (2000–2005) anggota DPR RI FPKS (2004–2009), di Jakarta, 3 November 2010.

[100] Wawancara dengan Umar Salim Basalamah, Wakil Sekretaris Jenderal PKS (2002), dan sekretaris pribadi Hidayat Nur Wahid (mantan Presiden PKS dan Ketua MPR RI), di Jakarta, 12 Oktober 2010; dengan Musa Abdillah, Ketua Departemen Kaderisasi DPC PKS Kelapa Dua, di Jakarta, 23 Oktober 2010.

menarik 4–5 kader dari sekitar 10.000 kader.[101] Di Tangerang, jumlah eksponen kelompok ini tidaklah signifikan. Mereka "dapat dihitung dengan jari" menurut Hidayat.[102] Di luar Pulau Jawa, pendukung gerakan ini hampir tidak ada.[103]

Walaupun berhasil secara signifikan dalam mengatasi faksionalisasi internal dan meredam perkembangan kelompok kritis dengan kecenderungan memberontak, kondisi-kondisi di atas juga membuktikan kaderisasi PKS tidaklah sempurna. Munculnya resistensi menunjukkan perbedaan pemahaman antara partai dan kader tidak sepenuhnya dapat terjembatani melalui kaderisasi. Kaderisasi juga tampak belum seutuhnya berhasil dalam meyakinkan kader bahwa dinamika politik di luar partai menghendaki penyesuaian-penyesuaian, termasuk moderasi pemikiran dan sikap agar dapat lebih terintegrasi dengan masyarakat dan realitas kontekstualnya.

Lepas dari kelemahan itu, kehadiran kaderisasi sistematis secara umum telah memberikan jaring pengaman bagi PKS berupa berkembangnya komitmen ideologi yang kuat, loyalitas terhadap partai yang tinggi, terpeliharanya rasa persaudaraan, dan hadirnya pemahaman atas nilai-nilai, tradisi, dan sistem partai yang sama. Adanya hal-hal tersebut memungkinkan PKS hingga kini dapat menghindari perpecahan internal ataupun perpecahan.

E. Ringkasan

Kaderisasi sistematis yang berkaitan dengan pelembagaan proses pengembangan dan rekrutmen kader merupakan salah satu unsur krusial dalam penciptaan soliditas partai. Pembahasan di atas

[101] Wawancara dengan Nooryanto, Ketua Departemen Kaderisasi Bekasi DPD PKS, di Bekasi, 7 November 2010.

[102] Wawancara dengan Hidayat, M.M., anggota DPRD Kabupaten Tangerang (2005–2010), di Tangerang, 21 Oktober 2010.

[103] Wawancara dengan Umar Salim Basalamah, Wakil Sekretaris Jenderal PKS (2002), dan sekretaris pribadi Hidayat Nur Wahid (mantan Presiden PKS dan Ketua MPR RI), di Jakarta, 12 Oktober 2010; dengan Aus Hidayat Nur, Kepala Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktober 2010.

menjelaskan bagaimana situasi kaderisasi sistematis di PKS yang merupakan bagian kehidupan partai telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan monoloyalitas, kepercayaan, dan kesatuan di dalam memahami ideologi dan aturan main partai. Modal dasar ini memungkinkan PKS untuk menghindari perbedaan persepsi yang tajam, munculnya pengelompokan yang antagonistik serta pelanggaran aturan main dan visi yang dapat menimbulkan kekecewaan dan resistensi. Dengan kemampuan ini, selama dekade pertama keberadaannya, PKS dapat mempertahankan keutuhannya.

BAB XI
LEMAHNYA KOMITMEN TERHADAP NILAI-NILAI BERSAMA DI PKB

> Sebenarnya tidak ada ideologi di PKB ... satu hal yang menyatukan kader adalah ulama atau patron ... membuat 'fenomena federalisme' menjadi tidak dapat dihindari di partai ini. (Yahya Staquf)[1]

> Saya tidak menangkap bahwa ideologi itu menjadi sesuatu yang dijadikan dasar secara fundamental untuk menuntun perilaku politik teman-teman di PKB. (Khofifah Indar Parawansa)[2]

Bab XI dan Bab XII membahas korelasi antara komitmen atas nilai-nilai bersama sebagai salah satu unsur pelembagaan, dengan fenomena perpecahan dan soliditas partai. Bab XI menganalisis peran terbatas nilai-nilai bersama di PKB dan dampak yang ditimbulkan berupa kesulitan partai ini dalam menjaga soliditas partai. Di lain pihak, Bab XII membahas penghargaan atas nilai-nilai bersama di PKS dan perannya di dalam menjaga soliditas partai. Pembahasan di kedua bab menjelaskan peran nilai-nilai bersama di dalam ideologi

---

[1] Wawancara dengan Yahya Cholil Staquf, Wakil Sekretaris Jenderal PKB (1998–2005) dan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Gus Dur (2001), di Rembang, 11 November 2010.

[2] Wawancara dengan Khofifah Indar Parawansa, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999–2001), Ketua Badan Pelaksana Pemenangan Pemilu PKB (2002–2005), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

partai terhadap pengembangan identitas, *code of conduct* serta penyeragaman pemikiran dan tindakan kader.

Persoalan seputar ini kerap disebut sebagai proses ‘infusi nilai’, yakni proses pemasukan dan penyebaran nilai-nilai di luar persoalan yang bersifat teknis,[3] yang pada akhirnya memberikan tidak hanya komitmen dan *sense of taken for granted*, tetapi juga pedoman bagi kader untuk bertindak secara koheren berdasarkan kepentingan partai. Dalam hal ini, kader akan melihat partai tidak sekadar sebagai alat yang dapat dibuang sewaktu-waktu, tetapi sebagai bagian dari "kepuasan personal yang amat bernilai".

Untuk keperluan itu, pembahasan akan mencakup kajian atas empat hal. Pertama, mengenai apa yang menjadi potensi nilai-nilai bersama dari masing-masing partai. Dalam hal ini akan diketengahkan karakteristik nilai-nilai bersama, terutama terkait dengan tingkat kedalaman peran yang ada dan sejauh mana hal itu menjadi identitas yang mutlak dari masing-masing partai. Kedua, akan dikaji mengenai pola atau model atau media infusi itu sendiri. Hal ini penting untuk dikaji karena terkait dengan sejauh mana nilai-nilai ditransformasi dalam tubuh partai dan potensi dampak yang ditimbulkan. Ketiga, akan diketengahkan dampak dari eksistensi nilai-nilai itu dan pelaksanaan infusi dalam partai. Dari sini dapat terlihat bahwa partai yang mempunyai nilai-nilai yang kuat dan infusi yang baik akan memiliki situasi kepartaian yang berbeda dibandingkan partai yang tidak memiliki nilai-nilai yang kukuh dan infusi yang memadai. Pembahasan keempat akan melihat korelasi antara keberadaan nilai-nilai bersama dan situasi soliditas dan perpecahan partai.

---

[3] Philip Selznick, *Leadership in Administration: A Sociological Interpretation*, (New York: Row, Peterson and Company, 1957), 17.

A. Nilai-Nilai Bersama dan Infusi Nilai di PKB

1. Nasionalisme, Aswaja, dan Keterbatasannya

AD/ART PKB menyatakan dasar partai adalah Pancasila,[4] yang juga adalah dasar negara Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen PKB terhadap negara kebangsaan dan bukan negara keagamaan atau negara Islam. Partai ini juga menyatakan bahwa salah satu karakteristik utama partai ini adalah kebangsaan.[5] Kebangsaan atau nasionalisme di dalam konteks ini berkaitan dengan kesadaran untuk mengakui Indonesia sebagai sebuah bangsa yang disatukan dengan kesamaan sejarah dan kehendak rakyat tanpa melihat latar belakang suku dan agama, menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat di dalam semangat kebersamaan dan kemanusiaan.[6] Bagi PKB, Indonesia sebagai negara plural adalah sebuah realitas kehendak Tuhan yang tidak dapat dinafikan oleh umat Islam.

Karakteristik negara yang memberikan kesempatan yang luas sekaligus melindungi umat Islam untuk dapat melaksanakan agama mereka dengan bebas dan pengakuan atas Ketuhanan (Tuhan Yang Maha Esa) yang dinyatakan dengan tegas sebagai pilar pertama dari ideologi nasional Indonesia Pancasila, menurut PKB menegaskan

[4] *AD PKB 1998 Pasal 3; AD PKB 2000 Pasal 3; AD PKB 2002 Pasal 3; AD PKB 2005 Pasal 3; AD PKB 2008 Pasal 3.*

[5] *AD PKB 1998 Pasal 5; AD PKB 2000 Pasal 5; AD PKB 2002 Pasal 5; AD PKB 2005 Pasal 5; AD PKB 2008 Pasal 5.*

[6] Tentang konsep nasionalisme, lihat Ernest Gellner, *Nations and Nationalism*, (Oxford: Basil Blackwell, 1983). Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, (London: Verso Editions and NLB, 1983). Montserrat Guibernau dan John Rex (eds.), *The Ethnicity Reader: Nationalism, Multiculturalism and Migrations*, (Cambridge: Polity Press, 1997). Tentang nasionalisme Indonesia lihat George McTurner Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, (Jakarta: UNS Press & Sinar Harapan, 1995). Akira Nagazumi, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908–1918*, (Jakarta: Grafitipers, 1989). Taufik Abdullah, *Nasionalisme dan Sejarah*, (Jakarta: Satya Historika, 2001). A. Sartono Kartodirdjo (et al.), *Negara dan Nasionalisme Indonesia: Integrasi, Disintegrasi dan Suksesi*, (Jakarta: Pusat Studi dan Dokumentasi Sejarah Indonesia, Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma dan Gramedia Widiasarana Indonesia, 1995). Firman Noor (ed.), *Nasionalisme, Demokratisasi dan Identitas Primordialisme di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2007).

bahwa esensi negara ini sejalan dengan semangat ajaran Islam, yaitu Tauhid (keesaan Tuhan). Oleh karena itu, walaupun Indonesia bukan sebuah negara Islam, keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa dan Pancasila telah final adanya.[7] Tidak itu saja, bagi PKB, rasa nasionalisme adalah fondasi perjuangan bagi partai yang harus ditegakkan selamanya. Berkenaan dengan hal ini, PKB meyakini pula bahwa bangsa ini tidak akan mencapai tujuannya apabila rakyat mengabaikan semangat kebangsaan.[8]

Dengan menginsafi makna kebangsaan dan menggunakannya sebagai salah satu fondasi partai, tidak berarti PKB mengabaikan nilai-nilai Islam dalam membangun dan mencapai tujuannya. Sebaliknya, partai ini memiliki perhatian besar terhadap pelaksanaan dan penegakan Islam di dalam semangat nilai-nilai *Ahlussunnah wal Jamaah* (Aswaja) dalam kehidupan politik. AD PKB Pasal 4 menyatakan:

> Prinsip perjuangan partai adalah pengabdian kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan, dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai *Ahlul Sunnah wal Jamaah* (Aswaja).[9]

Islam dengan sudut pandang dan nilai-nilai atau spirit Aswaja adalah identitas utama NU.[10] Sejarah menunjukkan bahwa pendirian NU, terutama dimotivasi oleh kepentingan untuk mempertahankan

---

[7] A. Effendy Choirie, *Islam-Nasionalisme, UMNO-PKB, Studi Komparasi dan Diplomasi*, (Jakarta: Pensil 234, 2008), 26–27. Pembahasan tentang hubungan NU dan Nasionalisme lihat Eimar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila*, (Yogyakarta: LKiS, 2010). Faisal Ismail, "Komitmen NU terhadap Perjuangan Bangsa", di Faisal Ismail, *NU, Gusdurisme dan Politik Kiai*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), 3–10.

[8] DPP PKB, "Membangun Politik Rahmatan Lil'Alamin: Hasil-Hasil Musyawarah Kerja Nasional I PKB dan Silaturahmi Alim Ulama" (Jakarta: DPP PKB, 1999), 132, di Choirie, *Islam-Nasionalisme, UMNO-PKB, Studi Komparasi dan Diplomasi*, 129.

[9] *AD PKB 1998 Pasal 4; AD PKB 2000 Pasal 4; AD PKB 2002 Pasal 4; AD PKB 2005 Pasal 4; AD PKB 2008 Pasal 4*.

[10] Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, (Solo: PT Duta Aksara Mulia, 2010), xvii.

ajaran Aswaja.[11] Aswaja secara harfiah berarti kelompok umat Islam yang memahami dan mempraktikkan ajaran Islam (berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah) dengan mengikuti jalan, aturan, metode, atau tradisi yang dibangun oleh generasi awal umat Islam (sahabat dan *tabiin*) hingga generasi-generasi selanjutnya, dengan perantara para ulama. Di dalam konteks dunia Islam, Aswaja atau kadang-kadang juga disebut sebagai Sunni, dibangun oleh para ulama Islam seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi.[12] Aliran Islam ini mengakui peran utama syariah, selain pertimbangan-pertimbangan rasional, di mana syariat memiliki posisi lebih superior ketimbang rasionalitas dalam menjawab problematika dan dalam upaya melaksanakan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan umatnya. Kaum Sunni ini juga mengakui keberadaan empat sahabat utama Nabi Muhammad saw., yaitu Abu Bakar as-Shiddiq, Umar Ibn al-Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin Islam dan mengikuti ajaran serta kebiasaan mereka.

Di dalam konteks Indonesia, walaupun sebagian besar umat Islam itu Sunni, NU kadang-kadang mengklaim dirinya sebagai representasi nyata Aswaja. Seiring dengan perjalanan waktu, NU membangun pemahamannya sendiri tentang Aswaja, dengan menekankan pentingnya mengikuti setidaknya satu dari empat mazhab yang dikembangkan para imam abad pertengahan, yaitu Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali.[13] Sebagai pelaksanaan pemahaman itu, NU kemudian menjadi perintis umat Islam di Indonesia yang menyarankan umat Islam mengikuti satu mazhab. AD/ART NU menyatakan bahwa salah satu tujuan utama pendirian organisasi itu adalah mengabdikan dirinya pada salah satu dari empat

---

[11] *Ibid.*, 19, 38. Kacung Marijan, *Quo Vadis NU: NU setelah Khittah 1926*, (Surabaya: Penerbit Erlangga, 1992), Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967*, (Yogyakarta: LKiS, 2003).

[12] Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-Orang NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 7.

[13] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), 149. Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, 146.

mazhab itu.[14] Pada kenyataannya, walaupun menerima seluruh umat Islam dengan mazhab berbeda untuk bergabung dengan NU, tetapi hampir seluruh anggota NU sebenarnya pengikut Imam Syafi'i. Dengan demikian, makna "berdasarkan nilai-nilai Aswaja" di AD/ART partai berarti amat dekat dengan 'kepentingan NU' itu sendiri. Oleh karenanya, amat jelas bahwa keberadaan Aswaja sebagai salah satu unsur utama di dalam ideologi dan visi PKB menunjukkan pengaruh NU di dalam partai ini.

Di dalam kehidupan politik, karakteristik Aswaja cenderung berarti moderasi, penghormatan atas pluralisme, dan prioritas pada stabilitas politik.[15] Para penganut Aswaja menganggap karakteristik moderat sebagai sebuah sikap yang tepat untuk memperoleh tujuan secara damai. Dalam hal ini, Aswaja cenderung mengikuti alur atau sistem politik yang ada dan menolak dengan tegas ekstremisme. Karakteristik Aswaja untuk menghormati konteks sosial dan budaya merupakan dasar organisasi ini untuk menerima Indonesia sebagai sebuah bangsa plural. Oleh karena itu, Aswaja dan nasionalisme adalah nilai yang mendukung satu sama lain.

Dalam konteks PKB, nilai-nilai kebangsaan itu tecermin dalam visi dan misi partai yang termaktub dalam ideologi "kebangsaan dalam semangat Islam aswaja", atau "nilai-nilai keaswajaan dalam semangat kebangsaan". Menurut Kacung Marijan, keputusan warga NU untuk menerima Pancasila menjadi inspirasi dimasukkannya nilai-nilai kebangsaan dalam tubuh PKB. Menurutnya, ideologi PKB pada dasarnya merupakan sintesis antara nasionalisme dan semangat Aswaja.[16] Dua nilai pokok yang ditopang oleh tradisi pesantren ini merupakan saka guru yang tidak dapat dilepaskan dalam ideologi politik yang diyakini oleh para warga NU. Effendy Choirie, salah satu

[14] "Anggaran Dasar NU 1926, Pasal 2", di "Lampiran", *ibid.*, 12.

[15] Choirie, *Islam-Nasionalisme, UMNO-PKB, Studi Komparasi dan Diplomasi*, 144.

[16] Wawancara dengan Prof. Dr. Kacung Marijan, Pengamat Kebijakan NU dan mantan anggota Tim Asistensi Usulan Pendirian PKB (versi Rembang), di Jakarta, 26 November 2010.

kader senior, berkesimpulan bahwa nasionalisme dan Aswaja adalah 'identitas ganda' PKB.[17] Dalam hal ini, kedua nilai menjadi nilai-nilai bersama yang diakui partai dan anggotanya. Inilah nilai-nilai bersama yang mengikat para kader di partai ini.

Namun, ideologi yang meleburkan atau memadukan nilai-nilai agama (Islam) dan nasionalisme (keindonesiaan) tidaklah menjadi milik eksklusif kalangan tradisonalis, warga NU, dan PKB. Kenyataannya, mayoritas organisasi masyarakat dan partai politik Islam di Indonesia, termasuk yang menganut aliran modernisme Islam pun mengakui hubungan yang tidak terelakkan antara Islam dan nasionalisme. Dalam lingkup kelompok tradisionalis, sejumlah partai Islam bernafaskan tradisionalis, seperti Partai kebangkitan Ummat (PKU), Partai Nahdlatul Ummat (PNU), Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (Partai SUNI), dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) menganut ideologi dan idealisme yang sama dengan PKB.[18]

Situasi ini menyebabkan dalam titik tertentu munculnya semacam relativisme identitas, yang pada akhirnya menjadi landasan kebebasan berpihak dan bertingkah laku bagi warga NU dalam menjalankan dan menyalurkan aspirasi politik kebangsaannya itu. Oleh karena itu, dapat dipahami warga Nahdiyin bahwa norma kebangsaan dalam praktiknya dapat diterapkan pada banyak aktivitas dan organisasi, yang tidak harus di PKB. Situasi inilah yang turut menjawab mengapa PKB yang dilahirkan oleh PBNU tidak dapat dengan sendirinya menarik hati seluruh warga Nahdiyin di Indonesia. Bahkan dalam masa krisis keyakinan dan kepercayaan, sebagaimana yang terjadi di PKB sendiri, mudah sekali menyebabkan seorang kader 'pindah ke lain hati'. Apalagi sebagaimana yang dikatakan oleh Yahya Staquf,

---

[17] Choirie, *Islam-Nasionalisme, UMNO-PKB, Studi Komparasi dan Diplomasi*, 147.

[18] Tentang ideologi Partai SUNI, PNU, dan PKU lihat Tim Penelitian dan Pengembangan Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas), 385–387, 441–443, 529–532. Tentang Ideologi PKNU, lihat AD PKNU Pasal 3 dan Pasal 4.

persoalan kebangsaan dalam tafsir keagamaan sudah final bagi seluruh partai Islam sehingga tidak identik dengan satu partai saja.[19]

Kemudian, walaupun Aswaja adalah nilai yang berperan penting di PKB, khususnya sebagai identitas atau karakter utama yang ditonjolkan oleh partai ini sebagai konsekuensi ke-NU-annya, tetapi nilai ini menjadi abstrak dan tampak kurang relevan di dalam aktivitas partai sehari-hari. Nilai ini tidak dapat dijadikan sebuah patokan dalam banyak kegiatan partai terutama dalam konteks internal. Kondisi serupa juga berlaku dalam konteks nasionalisme. Nilai ini memang dapat melandasi pemikiran atau aktivitas yang berkaitan dengan masalah keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa. Namun, dalam soal-soal yang berkaitan dengan pengorganisasian partai dan urusan internal lainya, nilai ini menjadi demikian relatif.

Posisi abstrak nilai-nilai tersebut di PKB, pada akhirnya membuka kesempatan hadirnya fenomena 'tanpa nilai' di dalam kehidupan internal partai. Dengan kata lain, walaupun PKB memiliki ideologi dan visi yang jelas tentang hubungan antara negara dan agama, termasuk masalah-masalah yang terkait dengan pluralisme dan demokrasi, semua hal itu menjadi terbatas jika terkait dengan kegiatan keseharian partai, termasuk dalam soal menjadi sebuah *code of conduct* bagi perilaku kader. Ali Masykur Musa, Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB-Gus Dur (2008–2009), menjelaskan masalah utama yang terkait dengan nilai-nilai bersama atau ideologi di PKB adalah ketimpangan antara peranan ideologi sebagai pedoman untuk masalah-masalah eksternal dan masalah-masalah internal. Dia berkata, "Dalam soal ini PKB dipandang kuat keluar, namun tidak mampu mewujudkan sebuah solidaritas di antara sesama kadernya".[20] Singkatnya, ideologi

---

[19] Wawancara dengan Yahya Cholil Staquf, Wakil Sekretaris Jenderal PKB (1998–2005) dan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Gus Dur (2001), di Rembang, 11 November 2010.

[20] Wawancara dengan Dr. Ali Masykur Musa, Wakil Ketua Dewan Tanfidz PKB (2005–2010) dan Ketua Dewan Tanfidz PKB-Versi Parung (2008–2009), di Jakarta, 19 Oktober 2010.

sebagai nilai-nilai bersama partai menjadi demikian abstrak dan umum.

2. Terbatasnya Upaya Pengembangan Nilai-Nilai Bersama

Masalah keabstrakan atau keumuman (*generality*) nilai-nilai bersama sebenarnya merupakan salah satu persoalan yang dapat dengan tepat ditangani oleh partai ini. Namun, hingga dekade pertama keberadaan PKB, aktivitas terkait dengan upaya untuk lebih menyederhanakan dan membumikan nilai-nilai bersama sangatlah terbatas. Berbagai kajian komprehensif yang membahas persoalan ini di tingkat organisasi internal termasuk pembahasan tentang relevansi nilai-nilai bersama terhadap pengembangan *code of conduct* dan pengelolaan organisasi serta perilaku kader juga tidak mudah ditemukan.

Sejumlah forum yang mengkaji nilai-nilai bersama memang diselenggarakan, terutama selama tahun-tahun pertama keberadaan PKB. Pada tahun 1999, misalnya, PKB membahas *Mabda' Siyasi*. Hasil pembahasan ini dituliskan dalam buku yang berjudul "Garis Perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa" yang menjadi platform partai, terutama membahas visi dan misi partai dan masalah-masalah yang terkait dengan reformasi politik dan demokrasi di Indonesia secara umum.[21] Namun, forum semacam itu kemudian terlihat lebih difokuskan pada upaya menjelaskan posisi ideologi PKB dalam kaitannya dengan kelompok lain, Negara, dan kebijakan umum partai.[22] Dengan orientasi 'keluar' ini, standar dan evaluasi komprehensif untuk pelaksanaan nilai-nilai untuk masalah internal belum terlihat.

---

[21] "Laporan Pelaksanaan Kebijakan-Kebijakan DPP PKB Masa Bakti 1998–2000" di *Dokumen Muktamar I PKB: Membangun Persaudaraan Sejati Antar Manusia sebagai Esensi Rekonsiliasi Nasional*, (Jakarta: DPP PKB, 200), 27.

[22] Lihat misalnya pembahasan tentang peranan ideologi PKB di Choirie, *"Menjadikan PKB Partai Nasonal dan Terbuka"*, 193–209. Wawancara dengan Andi M. Ramly, Ketua Dewan Tanfidz (2002–2010), Sekretaris Dewan Syura PKB-Muhaimin (2008–2010) dan penulis *Mabda Siyasi PKB*, di Jakarta, 15 Oktober 2010.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam satu dekade pertama keberadaannya, PKB lebih memfokuskan pengkajian ideologinya termasuk norma-norma yang dianutnya dalam wilayah pembuatan kebijakan (*domain of policy*), ketimbang perekat identitas (*domain of identity*). Kegiatan-kegiatan kepartaian yang didedikasikan untuk menafsirkan ideologi dalam konteks internal, terutama yang dilakukan oleh Dewan Syura sebagai badan yang secara konstitusional berwenang memberikan bimbingan dan pengembangan atas norma-norma kepartaian, lebih mengarah pada soal-soal yang berorientasi keluar (*outward oriented).*

Sebagain besar kader meyakini bahwa hal ini terjadi karena sejak kehadirannya, PKB telah dipaksa untuk berkecimpung dalam soal-soal yang bersifat keluar sehingga tidak ada waktu yang memadai untuk menangani dan mengelola masalah nilai-nilai bersama dalam konteks internal.[23] Tidak lama setelah pendiriannya, PKB harus menghadapi pemilihan umum. Hal ini mendorong partai untuk mencurahkan sebagian besar aktivitasnya untuk memenangkan pemilihan umum ketimbang pada pengembangan organisasi internalnya. Setelah Pemilu 1999, orientasi politik PKB fokus terutama pada masalah-masalah melindungi posisi Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari manuver politik lawan-lawannya.[24] Oleh karena itu, perhatian partai

[23] Wawancara dengan Abdul Khalik Ahmad, Sekretaris Fraksi PKB DPR RI (1999–2001) dan Sekretaris Jenderal PKB-Jalil (2000–2005), di Jakarta, 11 Oktober 2010; dengan Agus Suflihat, Ketua Dewan Tanfidz PKB (1998–2001) dan Ketua Dewan Tanfidz PKB (1998–2001), melalui telepon, Jakarta-Bandung, 11 Oktober 2010; dengan Prof. Dr. Kacung Marijan, Pengamat Kebijakan NU dan mantan anggota Tim Asistensi Usulan Pendirian PKB (versi Rembang), di Jakarta, 26 November 2010. Lihat juga pengakuan partai tentang pemilihan umum sebagai fokus utama aktivitas partai selama dua tahun pertama dalam Ketua Dewan Syura DPP PKB, "Pidato Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Masa Bakti 1998–2000" di *Dokumen Muktamar I PKB: Membangun Persaudaraan Sejati Antar Manusia Sebagai Esensi Rekonsiliasi Nasional*, (Jakarta: DPP PKB, 2000), 18.

[24] Wawancara dengan Dr. Ali Masykur Musa, Wakil Ketua Dewan Tanfidz PKB (2005–2010) dan Ketua Dewan Tanfidz PKB-Versi Parung (2008–2009), di Jakarta, 19 Oktober 2010; dengan Abdul Khalik Ahmad, Sekretaris Fraksi PKB DPR RI (1999–2001) dan Sekretaris Jenderal PKB-Jalil (2000–2005), di Jakarta, 11 Oktober 2010;

sepenuhnya terkait dengan upaya membela dan mendukung gerakan politik Presiden Gus Dur. Setelah kejatuhan Presiden Gus Dur, serangkaian konflik internal telah menghabiskan energi dan waktu partai untuk menghadapi konflik daripada memperluas cakupan peran nilai-nilai bersama.[25]

Di dalam perkembangannya, partai berupaya memperbaiki situasi ini dengan membuat sejumlah modul yang berkaitan dengan ideologi partai.[26] Partai juga menyelenggarakan satu forum pada tahun 2007 yang dikenal sebagai Rapat Kerja Penguatan Sistem dan Pengelolaan Partai Menghadapi Pemilu 2009. Di forum ini, partai membahas latar belakang pendirian NU, Dinasti Hasyimiah (dalam hal ini Gus Dur merupakan bagian di dalamnya), dan *Mabda' Siyasi* sebagai nilai-nilai dari platform partai yang harus dipegang oleh seluruh kader di dalam kegiatan politik mereka sehari-hari.[27] Sekali

---

dengan Agus Suflihat, Ketua Dewan Tanfidz PKB (1998–2001) dan Ketua Dewan Tanfidz PKB (1998–2001), melalui telepon, Jakarta-Bandung, 11 Oktober 2010.

[25] Wawancara dengan Prof. Dr. Kacung Marijan, Pengamat Kebijakan NU dan mantan anggota Tim Asistensi Usulan Pendirian PKB (versi Rembang), di Jakarta, 26 November 2010; dengan Muhammad Tohadi, anggota PKB (1998–2005) dan Waki Ketua PKNU DPP, di Jakarta, 6 Oktober 2010; dengan Agus Suflihat, Ketua Dewan Tanfidz PKB (1998–2001) dan Ketua Dewan Tanfidz PKB (1998–2001), melalui telepon, Jakarta-Bandung, 11 Oktober 2010.

[26] Lihat *Menumbuhkan Kader Bangsa, Investasi Politik Bersama Rakyat, Konsepsi Dasar dan Metodologi Sistem Kaderisasi Partai Kebangkitan Bangsa*, (Jakarta: DPP PKB, 2000). *Menjadi Politisi Negarawan. Modul Pelatihan dan Orientasi Politik DPC-DPW PKB Modul Orientasi Ideologi DPP PKB,* (Jakarta: DPP PKB, 2000). Mufid A. Busyaeri, *Menggerakkan Roda Partai dan Perubahan Sosial di Tingkat Basis. Modul Pendidikan Dasar Politik Tingkat Anak Cabang Sistem Kaderisasi Partai Kebangkitan Bangsa*, (Jakarta: DPP PKB, 2000). *Menjadi Politisi Organiser Masyarakat. Panduan Pendidikan Kader Basis Partai Kebangkitan Bangsa*, (Jakarta: Lembaga Kaderisasi dan Pendidikan Politik, 2003). Andi Muawaiyah Ramly (ed.), *Saya Bekerja Maka PKB Menang. Modul Pelatihan Kader Penggerak Partai untuk Pemenangan Pemilu 2009*, (Jakarta: DPP PKB, 2008). M. Hanif Dakhiri, Eman Hermawan dan Marwan Ja'far, *Workshop Penguatan Sistem dan Manajemen Partai Menyongsong Pemilu 2009*, (Jakarta: DPP PKB, 2007).

[27] Ahsanul Minan and Sulthonul Huda, *Workshop Penguatan Sistem dan Manajemen Partai. Menyongsong Pemilu 2009*, (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, 2007), 50–57.

lagi, esensi dari unsur-unsur yang dibahas adalah eksplorasi semangat Aswaja dan nasionalisme dalam hubungannya dengan pengembangan pedoman politik PKB untuk menghadapi masalah-masalah politik nasional. Upaya partai ini pada akhirnya tidak sepenuhnya menjadi sebuah diskusi yang komprehensif untuk menyederhanakan nilai-nilai bersama agar dapat diterapkan dalam urusan internal dan kehidupan keseharian kader. Di sisi lain, berbagai upaya ini tidak diikuti dengan diskusi mengenai penciptaan dan pengembangan institusi atau aturan main partai yang dapat menjaga keberlanjutan nilai-nilai bersama dan mendorong komitmen kuat dalam pelaksanaannya secara konsisten.

Selain orentasi yang bersifat *outward looking,* ketiadaan badan yang berwenang untuk menelaah persoalan ini secara langsung membuat partai tidak memiliki rujukan atas pengembangannya. Kondisi ini beriringan dengan lemahnya peran kaderisasi, sebagaimana yang dibahas pada Bab IX, sebagai salah satu medium yang secara normatif dapat menjalankan infusi nilai-nilai bersama. Berbagai pelatihan kaderisasi dan materi-materi kaderisasi relatif tidak memberikan banyak porsi bagi pengembangan norma-norma dan pembangunan *code of conduct* atas norma-norma itu. Forum kaderisasi, tempat infusi nilai-nilai menjadi salah satu fungsinya, dalam praktiknya lebih difokuskan pada persoalan pemenangan pemilu atau pilkada, atau pada persoalan peningkatan pemahaman kebangsaan dan bagaimana mengimplementasikan hal itu dalam konteks hubungan partai dengan kalangan lain di luar partai (eksternal).[28]

Proporsi pengajaran dan pelatihan tentang infusi nilai di forum khusus ini menjadi terbatas bila dibandingkan dengan pembahasan tentang masalah eksternal. Dalam kenyataannya pula, persoalan ideologisasi internal ini tidak berlangsung secara kontinu dan konsisten.[29] Tidak ditemukan jadwal dan pentahapan sistematik, misalnya,

[28] Wawancara dengan Andi M. Ramly, Ketua Dewan Tanfidz (2002–2010), Sekretaris Dewan Syura PKB-Muhaimin (2008–2010), dan penulis "Mabda Siyasi PKB", di Jakarta, 15 Oktober 2010.

[29] Wawancara dengan H.Z Arifin Junaidi, Sekretaris Dewan Suro DPP PKB (2002–2005) dan Ketua Dewan Syura DPP PKB (2005–2010), di Jakarta, 28 Oktober 2008.

yang terkait dengan pemantapan ideologisasi dalam konteks internal dalam partai ini. Begitu pula kajian mengenai turunan-turunan dari norma-norma itu untuk mengatur tingkah organisasi dan anggota partai tidak tergarap secara sistematis dan berkesadaran.[30] Beberapa pemimpin wilayah dan daerah partai mengakui bahwa proses kaderisasi, sebagaimana yang akan pula dibahas pada bagian lain, kurang berjalan sebagaimana mestinya.[31] Masalah finansial menjadi salah satu alasan paling penting di balik situasi ini karena partai pada umumnya masih kurang memformulasi pencarian dana dan kurang disiplin dalam pengumpulan kontribusi anggotanya.[32] Hal ini pada akhirnya turut memengaruhi standardisasi dan penilaian aktivitas partai, termasuk di dalamnya infusi nilai-nilai itu.

Di lain pihak, partai dan elite pada akhirnya cenderung melakukan proses ini secara individual melalui pendekatan perorangan.[33] Hal ini secara praktis berarti menggunakan banyak *onderbouw* NU sebagai

---

[30] Wawancara dengan Marinah Hardy, Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Provinsi Nusa Tenggara Barat (2002–2005), di Jakarta, 28 Oktober 2010; dengan Damanhuri, Ketua Dewan Syura DPD PKB Kota madya Depok (2002–2004), anggota DPRD Kota madya Depok (2004–2009), di Depok, 31 Oktober 2010.

[31] Wawancara dengan Abdul Muhaimin Iskandar, Sekretaris Jenderal PKB (2000–2002), Ketua Dewan Tanfidz (2002–2005), Ketua Dewan Tanfidz (2005–2013), dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di Jakarta, 13 Oktober 2010, dengan Khatibul Umam Wiranu, Wakil Sekretaris Jenderal PKB (1999–2005) dan anggota DPR RI (1998–2004), di Depok, 17 Oktober 2010; dengan H.Z. Arifin Junaidi, Sekretaris Jenderal Dewan Syura PKB (2002–2005) dan ketua Dewan Syura PKB (2005–2010), di Jakarta, 28 Oktober 2010; dengan Marinah Hardy, Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Provinsi Nusa Tenggara Barat (2002–2005), di Jakarta, 28 Oktober 2010; dengan Damanhuri, Ketua Dewan Syura Kota madya DPD PKB Kota madya Depok (2002–2004), anggota DPRD Kota madya Depok (2004–2009), di Depok, 31 Oktober 2010.

[32] Wawancara dengan Marinah Hardy, Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Provinsi Nusa Tenggara Barat (2002–2005), di Jakarta, 28 Oktober 2010; dengan Damanhuri, Ketua Dewan Syura DPD PKB Kota madya Depok (2002–2004), anggota DPRD Kota madya Depok (2004–2009), di Depok, 31 Oktober 2010.

[33] J. Kristiadi, "Pergulatan dan Tantangan PKB Memenuhi Harapan Bangsa", dalam Yenny Zanuba Gus Dur, A. Effendy Choirie, and M. Kholid Syeirazi (eds.), *9 Tahun PKB, Kritik dan Harapan*, (Jakarta: Panitia Nasional Harlah ke-9 PKB, 2007), 130.

penyuplai utama untuk kader partai.[34] Dalam hal ini, PKB menganggap dan memperlakukan kader yang memiliki latar belakang anggota NU, termasuk *onderbouw* NU seperti Gerakan Pemuda Anshor dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai orang yang telah paham norma atau nilai-nilai bersama partai. Asumsi di balik sikap ini kemungkinan besar berkaitan dengan 'homogenitas' antara NU dan PKB. Dalam hal ini, kedua organisasi ini dianggap dengan sendirinya memiliki nilai-nilai bersama yang serupa.

Asumsi ini mengabaikan kenyataan bahwa ada perbedaan signifikan antara NU sebagai organisasi sosio-keagamaan dan PKB sebagai mesin politik.[35] Di NU, motivasi utama seseorang untuk bergabung adalah melayani masyarakat melalui pendekatan non-kekuasaan seperti pendekatan keagamaan, sosial, dan kebudayaan. Sebaliknya, di PKB para anggota dimotivasi untuk menjadi seseorang yang dapat menduduki kekuasaan dan menggunakannya untuk mencapai tujuan. Di dalam dua dunia yang berbeda itu, setiap organisasi dengan sendirinya akan mengembangkan tradisinya sendiri agar dapat memenuhi tujuannya masing-masing. Dalam hal ini, tradisi pelayanan atas dasar pendekatan non-kekuasaan tentu saja akan berbeda dengan tradisi mencapai tujuan melalui jalur kekuasaan.

Seiring dengan berjalannya waktu, situasi absennya kaderisasi menciptakan masalah baru. Banyak sekali pelaku yang terlibat di dalam proses ini, khususnya para ulama dalam kapasitasnya sebagai

---

[34] Wawancara dengan Zannuba Ariffah "Yenny" Gus Dur, Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz PKB-Gus Dur (2008–2010), di Jakarta, 20 Oktober 2010; dengan Marinah Hardy, Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Provinsi Nusa Tenggara Barat (2002–2005), di Jakarta, 28 Oktober 2010; dengan Damanhuri, Ketua Dewan Syura DPD PKB Kotamadya Depok (2002–2004), anggota DPRD Kotamadya Depok (2004–2009), di Depok, 31 Oktober 2010; dengan Khofifah Indar Parawansa, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999–2001), Ketua Badan Pelaksana Pemenangan Pemilu PKB (2002–2005), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

[35] Wawancara dengan Zannuba Ariffah "Yenny" Gus Dur, Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz PKB-Gus Dur (2008–2010), di Jakarta, 20 Oktober 2010; dengan Khofifah Indar Parawansa, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999–2001), Ketua Badan Pelaksana Pemenangan Pemilu PKB (2002–2005), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

pemimpin NU dan pemilik pesantren. Kebanyakan dari mereka yang menyatakan diri sebagai orang NU dan PKB merasa paham dan berhak untuk menafsirkan nilai-nilai itu berdasarkan pandangannya. Akibatnya, mereka berperan sebagai penggerak utama dalam menyampaikan dan menyosialisasikan ideologi partai kepada para santri mereka dan masyarakat.[36] Hasil penelitian Soon menunjukkan peran besar ulama yang jumlahnya ribuan turut aktif memperkenalkan partai ke khalayak, termasuk memengaruhi preferensi politik publik.[37] Para ulama itu kerap juga bertindak sebagai mediator dalam memberikan pemahaman tentang nilai-nilai bersama yang ada dalam partai. Kenyataan ini menunjukkan bahwa partai bukan satu-satunya institusi yang melakukan infusi nilai. Keberadaan banyak elemen mandiri yang mengembangkan infusi memberikan kesan PKB sebagai 'partai federatif', sebagaimana yang dikatakan oleh Yahya C. Staquf, menjadi tidak terhindari.

Sayangnya, infusi nilai yang diberikan tidak secara langsung melalui partai itu tidak dapat menjamin loyalitas kepada partai, mengingat kader atau anggota masih lebih melihat sosok ulama sebagai figur perantara yang memberikan banyak pengertian dan pemahaman. Kaitannya dengan nilai-nilai bersama itu adalah tidak adanya ikatan langsung berdasarkan keyakinan nilai yang sama antara partai dan mereka yang direkrut melalui perantara atau penyuplai. Di dalam perkembangannya, situasi ini menyulitkan PKB dalam membangun loyalitas langsung kepada partai.

Selain itu, persoalan lain yang ditimbulkan adalah terkait dengan keberagaman tingkat pemahaman ulama dalam memahami nilai-nilai bersama partai. Hal ini terkait terutama pada tingkat kematangan dan pengalaman pribadi ulama tersebut dan lingkungan khas tempat

---

[36] Wawancara dengan Yahya Cholil Staquf, Wakil Sekretaris Jenderal PKB (1998–2005) dan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Gus Dur (2001), di Rembang, 11 November 2010.

[37] Kang Young Soon, *Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama*, Disertasi, (Jakarta: Program Pascasarjana, Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2008), 317–318.

dia tinggal. Di samping itu, dalam sepuluh tahun pertama, partai tidak menyediakan standardisasi yang memadai dalam soal infusi ini. Akibatnya, dapat dibayangkan keragaman kualitas pemahaman atas nilai-nilai bersama itu. Dalam perkembangannya, semakin jarang ulama atau pelaku sosialisasi nilai-nilai bersama yang mumpuni. Menurut Khatibul Wiranu, jumlah anggota atau perangkat partai yang memiliki keterampilan yang tinggi dalam melaksanakan infusi nilai berkurang secara terus-menerus, khususnya setelah konflik internal 2005, ketika banyak ulama besar di PKB termasuk Ma'ruf Amin, Ketua Umum Dewan Syura pertama (1999–2000), meninggalkan partai dan mendirikan partai baru.[38]

Kemudian, proses infusi nilai secara bertahap menjadi inkonsisten karena tidak ada konsep yang jelas dan pelatihan yang proporsional atau kontrol yang komprehensif sehingga dapat mendorong ulama dan perangkat partai untuk konsisten dalam melaksanakannya. Upaya penanaman nilai dan pembenahan perilaku kader seringkali bersifat garis besar saja dan tidak berjalan kontinu. Proses pelaksanaan dan penilaian infusi nilai termasuk pengembangan pemahaman nilai-nilai bersama pun menjadi kurang sistematis. Oleh karena itu, pada umumnya kader tidak memiliki perangkat yang memadai untuk memahami dan memiliki visi yang sama terhadap ideologi partai.

Infusi ideologi atau nilai-nilai bersama ini menjadi semakin tersendat karena masalah kepercayaan yang semakin menurun. Konflik yang berkepanjangan tampak menjadi alasan mempertanyakan relevansi nilai-nilai bersama dalam tubuh partai seperti PKB. Di sisi lain, partai praktis belum banyak membawa manfaat bagi warga NU ataupun kader PKB. Menurut Damanhuri, partai menjadi semakin kurang menarik terutama disebabkan oleh konflik internal dan minimnya kontribusi terhadap kehidupan mereka, anggota NU lebih memilih untuk mengembangkan nilai-nilai bersama di dalam

[38] Wawancara dengan Khatibul Umam Wiranu, Wakil Sekretaris Jenderal PKB (1999–2005) dan Anggota DPR RI (1998–2004), di Depok, 17 Oktober 2010.

konteks masalah sosio keagamaan (di dalam NU) daripada di dalam perpolitikan (di PKB).[39]

B. Hilangnya Komitmen Atas Dasar Nilai-Nilai Bersama

Dua situasi di atas, yakni masalah ideologi atau nilai-nilai bersama yang masih bersifat umum dan kondisi infusi yang tidak proporsional menyebabkan dua persoalan bagi partai. Pertama, munculnya peran terbatas dari ideologi atau nilai-nilai bersama yang mendorong munculnya 'pegangan alternatif' bagi kader dalam kiprahnya di partai. Situasi ini pada gilirannya menjadi lahan yang subur bagi munculnya sikap pragmatis. Kedua, hilangnya nilai-nilai yang mampu berperan sebagai pengikat kesadaran dan perilaku di antara para kader, yang cenderung menyuburkan kebebasan bertindak dan menyulitkan terciptanya loyalitas. Kondisi ini menyebabkan kader melihat partai hanya sebagai alat kepentingan sesaat.

1. Tokoh Berpengaruh sebagai Kekuatan Pendorong

Ketika partai tidak dapat membangun dan mengembangkan nilai-nilai bersamanya secara sistematis, kader partai menjadi memiliki banyak pilihan untuk menganut dan melaksanakan nilai-nilai atau kepentingan lain yang dianggapnya tepat. Dalam kasus PKB, membela kepentingan eksklusif seorang tokoh, yang biasanya adalah tokoh karismatik atau panutan, menjadi sebuah nilai yang jauh lebih bermakna ketimbang ideologi partai.

Hal ini dapat dipahami karena sementara ideologi partai dirasa tidak praktis, peran para ulama demikian terasa dan ada dalam nyaris seluruh aspek kehidupan kader, yang notabene kebanyakan adalah para santri. Ulama menjadi kekuatan pendorong (*driving force*) yang menentukan sikap dan pemikiran kader PKB, yang di sisi lain justru menurunkan peran dan keberadaan partai. Pengakuan atas peran

[39] Wawancara dengan Damanhuri, Ketua Dewan Syura (Kota madya) DPD PKB Kota madya Depok (2002–2004), anggota DPRD Kota madya Depok (2004–2009), di Depok, 31 Oktober 2010.

ulama tetap kuat dalam kehidupan di kalangan komunitas santri pendukung PKB. Mengenai hal ini Choirul Anam, Ketua PKB Jawa Timur, misalnya, menyatakan bahwa apabila seseorang berkata bahwa PKB di masa depan tidak membutuhkan ulama, ini merupakan pendapat yang ahistoris dan tidak masuk akal.[40]

Peran tokoh ulama pada akhirnya mengikis ketergantungan kader terhadap partai. Kader terlihat lebih bersemangat mengikuti dan membela kiprah patron terdekatnya, daripada partai apalagi ideologi atau nilai-nilai bersamanya. 'Loyalitas ganda' menemukan tempatnya di PKB dan memengaruhi situasi internal partai dalam waktu yang cukup panjang. Keberadaan dan kiprah sejumlah tokoh ulama karismatik yang memiliki posisi terhomat merupakan fenomena yang lazim di PKB. Di tingkat nasional, Gus Dur dan para Kiai *Khos* dapat memobilisasi kader dan mendorong mereka untuk membela dan melaksanakan kepentingan politik mereka. Tokoh-tokoh ini memainkan peran penting selama konflik yang terjadi antara Gus Dur dan Alwi Shihab. Mereka pula yang turut menentukan arah dan 'bobot' konflik yang terjadi.[41] Di konflik tersebut, pendapat mereka cenderung menjadi pendapat kader yang menghormatinya, nyaris secara otomatis.

Di tingkat lokal, sejumlah tokoh karismatik PKB dapat menentukan perilaku politik kader dan bahkan memengaruhi hasil pemilihan. Di Kabupaten Situbondo, salah satu kantong politik PKB terkuat di Provinsi Jawa Timur, keberadaan seorang tokoh karismatik, yaitu K.H. Fawaid Syamsul Arifin membenarkan hal tersebut. Dengan karismanya, Arifin yang berpindah partai dari PPP ke PKB dapat menggiring ribuan suara untuk PKB pada Pemilu 1999. Hal ini membuat PPP, partai pesaing terdekat PKB di wilayah itu, kehilangan seluruh kursinya dan menderita kekalahan telak untuk pertama

[40] Choirul Anam, "PKB tanpa Kiyai, A-Historis", di *Membangun Demokrasi Berbasis Tradisi: Ketetapan-Ketetapan Muktamar II Partai Kebangkitan Bangsa Tanggal 1–2 Oktober 2005 di Surabaya*, (Jakarta, DPP PKB, 2005), 6.

[41] Kamarudin, *Konflik Internal PKB*, (Depok: Akses Publishing, 2008), 245.

kalinya sejak tahun 1977. Namun, pada Pemilu 2004, Arifin, yang kali ini kembali masuk PPP setelah PKB memecat dirinya pada tahun 2003,[42] dapat memberikan suara yang signifikan ke PPP dan meningkatkan jumlah kursinya di parlemen lokal dari nol menjadi 12 kursi.[43]

Situasi semacam itu membuktikan bahwa partai bukan sesuatu yang berharga di mata kader-kadernya. Sikap biasa saja manakala partai yang didukungnya kalah mengindikasikan lemahnya infusi nilai dan lemahnya pelembagaan di partai itu. Menurut Selznick, hanya pada partai yang anggotanya merasa resah atau susah saat sesuatu yang negatif terjadi dengan partainyalah pelembagaan ini menunjukkan eksistensinya.[44] Di samping itu, situasi ini juga menunjukkan kuatnya hubungan *patron-client* di partai ini, yang menyebabkan kader cenderung untuk mengikuti ulama daripada ideologi partai. Sebuah situasi yang menurut Surbakti mengindikasikan lemahnya pelembagaan partai.[45]

Lebih dari itu, loyalitas tinggi terhadap seorang tokoh atau suatu kelompok mereduksi semangat kebersamaan di dalam partai. Loyalitas semacam itu membuat ketaatan terhadap tokoh atau kelompok yang dipimpinnya menjadi semacam *code of conduct* yang menentukan masa depan kader. Situasi ini pada akhirnya membuat kader membela dengan gigih patron dan kelompoknya untuk membinasakan kelompok lain. Fenomena membinasakan satu dengan lainnya terjadi selama dekade pertama keberadaan PKB, yang kerap dilakukan dengan mengesampingkan cara-cara demokratis dan prosedural,[46]

---

[42] "Episode Pisah Ranjang PKB", *www.majalah.tempointeraktif.com*, 24 November 2003.

[43] "Adu Kuat Dua Poros Kiai", Gatra, No. 36, 16 Juli 2009. "Pemilu Presiden 2009", Gatra, No. 36, 16 Juli 2009. Wawancara dengan Yahya Cholil Staquf, Wakil Sekretaris Jenderal PKB (1998–2005) dan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Gus Dur (2001), di Rembang, 11 November 2010.

[44] Selznick, *Leadership in Administration: A Sociological Interpretation*, 19.

[45] Ramlan Surbakti, "Tingkat Pelembagaan Partai Politik", *Kompas*, 6 Januari 2003.

[46] *Kompas*, 7 April 2008, "Muhaimin Didukung, Muspim Kukuhkan Muktamar Semarang". Tri Ratnawati, "Beberapa Masalah Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan

untuk melanggengkan kekuasaan dan memelihara posisi sebagai patron.[47] Akibat sikap saling menghabisi kelompok lain, pembekuan kepengurusan menjadi hal yang biasa sehingga beberapa pihak kemudian memelesetkan singkatan PKB sebagai Partai Kulkas Besar (PKB) karena banyaknya kepengurusan lokal yang 'dibekukan' atau dihentikan oleh partai.[48]

Di PKB, komitmen terhadap kepentingan tokoh dan bukan nilai-nilai bersama juga membuat para santri sebagai murid para ulama dapat saja menentang ulama lain yang dianggap sebagai musuh bersama oleh ulama atau kelompok mereka. Bagi sebagian pihak, hal ini menunjukkan degradasi budaya santri, khususnya budaya NU.[49] Pemecatan sejumlah ulama berpengaruh di tingkat nasional dan lokal oleh pengikut Gus Dur menunjukkan fenomena ini. Kelompok Gus Dur-Muhaimin, misalnya, tidak ragu menyingkirkan ulama yang memiliki sudut pandang yang berbeda tanpa melalui peradilan yang adil. Hal ini terjadi, misalnya, terhadap ulama senior K.H. Warson Munawir, tokoh ulama di Yogyakarta yang juga Ketua Dewan Syura DPW PKB Yogyakarta.[50]

Selain itu, tak jarang ulama mendapat serangan berupa kritik yang tajam dari kader partai sendiri. Effendy Choirie, misalnya, mengkritisi

---

Alternatif Solusi", dalam Lili Romli (ed.), *Pelembagaan Partai Politik Pasca Orde Baru Studi Kasus Partai Golkar, PKB, PBB, PBR dan PD*, (Jakarta: Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2008).

[47] DPW PKB Jawa Timur, *Data dan Fakta Pelanggaran AD/ART di Muktamar II Semarang,* (DPW PKB Jawa Timur, 2005), 1.

[48] "Sering Bekukan Pengurus, PKB Dijuluki "Partai Kulkas Besar", *www.detik.com*, 29 April 2008. Forum Kiai Kebangkitan (FK2), "PKB Bertanya Kader Menjawab Disertai Hujjah Siyasiyyah Wa Syar'iyyah", (Semarang: 2008), 13, dalam Ratnawati, *"Beberapa Masalah Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Alternatif Solusi"*, 92.

[49] Akan tetapi, situasi ini sebenarnya bukan hal baru di dalam perilaku politik NU, seperti kajian Irsyam pada tahun 1980-an yang menunjukkan situasi serupa. Dalam hal ini, walaupun pada umumnya ulama masih dihormati santri atau politisi, tetapi mereka dapat ditentang. Mahrus Irsyam, *Ulama dan Partai Politik. Upaya Mengatasi Krisis*, (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1984).

[50] DPW PKB Jawa Timur, *Data dan Fakta Pelanggaran AD/ART di Muktamar II Semarang*, 3.

ulama yang berkumpul di Forum Langitan meskipun beberapa orang di antaranya adalah gurunya, dengan menyebut mereka sebagai alat politik kelompok anti-Gus Dur. Dengan komentarnya itu, Effendy tampak tidak mengindahkan ketulusan dan komitmen ulama-ulama dalam Forum Langitan untuk membantu partai, dan menganggap mereka sekadar korban manipulasi politik oleh sejumlah tokoh yang tidak bertanggung jawab yang berada di kubu Alwi Shihab.[51] Di lain pihak, semangat kelompok anti-Gus Dur untuk menyingkirkan Gus Dur dari partai, termasuk mereka yang menganggap dirinya sebagai murid Gus Dur, menunjukkan situasi serupa.

Fenomena ini menunjukkan sikap tak segan untuk menyingkirkan satu dengan yang lainnya manakala mereka tidak lagi dapat mencapai kesepakatan. Pihak lawan dilihat sebagai musuh yang memiliki agenda dan kepentingan absolut yang berbeda. Bentuk pertarungan *zero sum game* cenderung terjadi. Menanggapi situasi ini Parawansa berkata:

> Lebih dari itu, yang membuat saya tidak merasa *at home* adalah kawan-kawan diposisikan sebagai lawan. Harusnya meski ada *conflict of interest* sebisa mungkin tetap merangkul dan bergandengan tangan. Tidak saling membuang. Yang terjadi adalah saling membuang.[52]

2. Partai sebagai Alat yang Mudah Tergantikan

Masalah lain adalah sikap kader yang cenderung menganggap perjuangan politik sebagai masalah 'bebas nilai'. Ali Masykur Musa mengatakan bahwa, "Pada akhirnya, ideologi hanya dimanfaatkan secara terbatas, namun tidak dalam konteks *power sharing*".[53] Hal ini mendorong kader untuk melakukan penafsiran bebas atas ideologi,

---

[51] *Ibid*, 5–6.

[52] Wawancara dengan Khofifah Indar Parawansa, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999–2001), Ketua Badan Pelaksana Pemenangan Pemilu PKB (2002–2005), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

[53] Wawancara dengan Dr. Ali Masykur Musa, Wakil Ketua Dewan Tanfidz PKB (2005–2010) dan Ketua Dewan Tanfidz PKB-Versi Parung (2008–2009), di Jakarta, 19 Oktober 2010.

sekaligus untuk membenarkan tindakannya. Bagi sebagian kader, nilai-nilai bersama atau ideologi sebenarnya tidaklah relevan.[54] Hal ini karena nilai-nilai bersama tidak dapat berfungsi sebagai variabel penentu yang dapat memengaruhi, menyatukan, dan mengelola persepsi dan perilaku kader ketika menghadapi situasi politik. Parawansa meyakini bahwa manakala kader PKB sudah menghadapi kehidupan politik riil, mereka memasukkan ideologi ke kantong mereka.[55] Lebih lanjut dia mengatakan:

> Saya tidak menangkap bahwa ideologi itu menjadi sesuatu yang dijadikan dasar secara fundamental untuk menuntun perilaku politik teman-teman di PKB. [56]

Dengan situasi ini, hubungan antarkader akhirnya bersifat mendahulukan kepentingan diri sendiri. Partai dalam hal ini hanya menjadi sekadar alat yang dapat dengan mudahnya ditinggalkan, dengan hubungan antarkader di dalamnya terjalin atas dasar prinsip demi 'keuntungan bersama' dan bukan nilai-nilai bersama. Hal ini terlihat, misalnya, dari manuver politik K.H. Dimyati Rais, Ketua Dewan Syura PKB-Matori (2002–2005). Pada tahun 2005, atau lima tahun kemudian, dia mengalihkan posisi politiknya dari pelindung Matori menjadi pendukung Alwi, lawan Matori, dan karenanya diganjar posisi anggota Dewan Syura PKB-Alwi.[57] Namun, pada

---

[54] Wawancara dengan Yahya Cholil Staquf, Waki Sekretaris Jenderal PKB (1998–2005) dan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Gus Dur (2001), di Rembang, 11 November 2010; dengan Damanhuri, Ketua Dewan Syura DPD PKB Kota madya Depok (2002–2004), anggota DPRD Depok (2004–2009), di Depok, 31 Oktober 2010.

[55] Wawancara dengan Khofifah Indar Parawansa, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999–2001), Ketua Badan Pelaksana Pemenangan Pemilu PKB (2002–2005), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

[56] Wawancara dengan Khofifah Indar Parawansa, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999–2001), Ketua Badan Pelaksana Pemenangan Pemilu PKB (2002–2005), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

[57] Tentang posisi Rais yang baru ini, lihat "Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Masa Bakti 2002–2005", di *Membangun Demokrasi Berbasis Tradisi: Ketetapan-Ketetapan Muktamar II Partai Kebangkitan Bangsa Tanggal 1–2 Oktober 2005 di Surabaya*, (Jakarta, DPP PKB, 2005), 74.

tahun 2008 setelah Muhaimin berseteru dengan Gus Dur dan mendirikan partai alternatif, Dimyati Rais, ulama karismatik dari Kaliwungu ini, bergabung dengan Muhaimin, yang notabene adalah salah satu figur penting di PKB yang menentang Alwi dan Matori. Di kubu Muhaimin, dia menjadi salah satu kandidat untuk menduduki posisi Ketua Dewan Syura.[58] Sikap untuk bergabung dengan tiga kubu yang berbeda di satu dekade awal Reformasi mencerminkan kecenderungan fleksibilitas yang tinggi.

Ali M. Musa, Ketua Dewan Tanfidz PKB Gus Dur (2008–2009) memperlihatkan sikap serupa dengan Dimyati, saat dirinya pada tahun 2009 bersedia untuk taat pada Muhaimin, yang merupakan 'musuh bersama' partai yang dia pimpin. Artinya sebagai orang yang diangkat dalam forum MLB PKB Parung untuk menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz, Ali justru akhirnya mengakui kepemimpinan Muhaimin yang terpilih dalam MLB PKB-Ancol. Sebagian kalangan meyakini bahwa sikap ini adalah kompensasi politik atas dukungan penuh Muhaimin kepadanya untuk dapat duduk menjadi salah satu pejabat teras di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).[59] Sementara itu, A. Effendy Choirie, salah satu pendukung garis keras Gus Dur dan anggota DPP PKB Gus Dur, menunjukkan isyarat yang hampir sama. Pada tahun 2009, dia sepakat dengan kelompok Muhaimin untuk dapat bekerja saja di bawah bendera PKB-Muhaimin sebelum Pemilu 2009. Atas kesepakatan itu, PKB Muhaimin memberikannya kesempatan untuk mengikuti Pemilu 2009. Tanpa kesempatan ini, tidak mungkin seseorang dapat masuk dalam daftar caleg PKB. Effendy Choirie akhirnya menjadi anggota

---

[58] "Berita Acara Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa", dalam Laporan Lengkap Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa. Hotel Mercure Ancol, Jakarta, 2–4 Mei 2008, (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, 2008).

[59] Wawancara dengan Andi M. Ramly, Ketua Dewan Tanfidz (2002–2010), Sekretaris Dewan Syura PKB-Muhaimin (2008–2010) dan penulis *"Mabda' Siyasi PKB"*, di Jakarta, 15 Oktober 2010.

parlemen (2009–2014) yang mewakili kubu Muhaimin.[60] Belakangan, Choirie kerap melakukan pembelaan diri bahwa dirinya terpilih karena dukungan rakyat dan bukan karena dekat dengan Kelompok Muhaimin.

Setelah Pemilu 2009, hubungan antara Muhaimin dan sekutu utamanya dalam melawan Gus Dur, Lukman Edy, yang belakangan tetap memegang posisi Sekretaris Jenderal PKB, menjadi semakin buruk. Sebagian orang berkeyakinan bahwa hubungan antara kedua pihak itu telah berada pada situasi saling menutup diri atau tidak mau lagi berbicara satu sama lainnya. Hal ini terjadi setelah Muhaimin justru merekomendasikan salah satu teman dekatnya, Hilmy Faisal, ke Presiden Yudhoyono untuk memegang jabatan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Muhaimin tidak merekomendasikan Lukman Edy yang sebelumnya memegang posisi tersebut. Keretakan di antara keduanya menjadi tak terelakkan. Menanggapi fenomena ini, Yenny Gus Dur mengatakan bahwa sepanjang pemimpin sebuah kelompok itu dapat memenuhi kebutuhan pengikutnya, soliditas kelompok itu akan tetap bertahan. Akan tetapi, situasi ini akan berbeda apabila pemimpin kelompok itu tidak dapat secara terus-menerus memenuhi kepentingan pengikutnya.[61]

Sehubungan dengan ini, Parawansa berkeyakinan bahwa nilai-nilai bersama bukan basis utama yang memotivasi kader dalam menentukan perilaku mereka.[62] Seiring dengan waktu, nilai-nilai bersama cenderung semakin kehilangan relevansinya di dalam kehidupan sehari-hari partai dan kader. Hal ini mendorong perilaku

---

[60] "Daftar Lewat Muhaimin, Gus Dur Pecat Effendy Choirie dan Ikhsan Abdullah", *www.antaranews.com*, 17 Agustus 2008. Wawancara dengan Andi M. Ramly, Ketua Dewan Tanfidz (2002–2010), Sekretaris Dewan Syura PKB-Muhaimin (2008–2010) dan penulis *"Mabda' Siyasi PKB"*, di Jakarta, 15 Oktober 2010.

[61] Wawancara dengan Zannuba Ariffah "Yenny" Gus Dur, Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz PKB-Gus Dur (2008–2010), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

[62] Wawancara dengan Khofifah Indar Parawansa, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999–2001), Ketua Badan Pelaksana Pemenangan Pemilu PKB (2002–2005), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

mementingkan diri sendiri dan menganggap partai sebagai apa yang Selznick sebut sebagai *expandable tool* dan pada akhirnya menurunkan semangat kebersamaan.

C. Dampak: Dari Membela Kepentingan Pemimpin Menuju Perpecahan

1. Kepentingan Pemimpin sebagai Sumber Legitimasi Utama

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa partai tidak dapat mempertahankan ideologi sebagai landasan bersikap kader-kadernya. Kesadaran untuk mempertahankan kepentingan pemimpin atau elite partai menjadi lebih penting daripada kepentingan untuk berkhidmat pada ideologi. Kasus-kasus pemecatan ratusan kader yang mencerminkan kepentingan eksklusif elite tertentu ditopang oleh kesediaan kader-kader untuk turut berjuang bersama mempertahankan apa yang dianggap layak itu.

Pemecatan tiba-tiba Matori, misalnya, dilandasi oleh kepentingan seorang Gus Dur untuk menyingkirkannya dari partai terkait dengan keputusan Matori untuk menghadiri SI MPR RI pada tahun 2001. Di sini dapat terlihat bahwa masalah loyalitas adalah isu utama di balik pemecatan Matori. Terkait dengan nilai-nilai bersama, hal yang menarik adalah Matori sebenarnya membuat kalkulasi yang bersifat ideologis di balik keputusannya menghadiri Sidang Istimewa MPR. Dia menyatakan bahwa kehadirannya di SI MPR 2001 juga terutama mencegah meluasnya pengaruh dari apa yang disebutnya sebagai 'kelompok fundamentalis' di parlemen, yang berupaya mendorong agenda Islam yang tidak saja dapat merongrong spirit Aswaja NU, namun pula dapat membahayakan keberadaan negara bangsa melalui pemecatan Presiden Gus Dur.[63] Timbullah semacam paradoks. Matori yang berani menunjukkan sikap beralaskan sebuah perspektif

---

[63] "Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa", presented in Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa, Jakarta, Hotel Borobudur, 14–16 January 2002, (DPW PKB Popinsi Bengkulu, 2002), 18.

ideologis tersingkir, sedangkan partai justru mempertahankan kader-kader yang menunjukkan komitmen besar untuk bersikap loyal pada Gus Dur.

Sementara itu, kasus pemecatan Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf menunjukkan pula absennya 'nilai-nilai bersama' yang tecermin kemudian pada ringkihnya pola hubungan antara sesama kader dan kuatnya dominasi tokoh-tokoh dalam kehidupan partai. Walaupun kepentingan menjunjung kesepakatan internal yang melarang rangkap jabatan menjadi alasan formal pemecatan, faktor kepentingan Gus Dur menyingkirkan kedua orang yang dianggap membangkang padanya itu tidak dapat diabaikan. Sekali lagi, masalah ketidakloyalan terhadap Gus Dur, dan bukan persoalan pelanggaran komitmen atas nilai-nilai bersama, yang menjadi isu utama. Sekali lagi, kader terpecah untuk mendukung masing-masing patronnya, apakah Gus Dur atau para Kiai *Khos*.

Adapun pada kasus Muhaimin, isu tentang indikasi arogansi dan ketidakloyalan Muhaimin kepada Gus Dur juga menjadi dasar kebijakan pemecatan atas dirinya. Rapat pleno yang dilangsungkan secara tiba-tiba demi mengakomodasi kegusaran sang patron, akhirnya memutuskan secara sepihak pemecatan Muhaimin. Kebijakan untuk memutuskan masa depan kader sekali lagi tidak ditentukan oleh seberapa besar komitmen mereka untuk memperjuangkan dan menjaga nilai-nilai bersama, melainkan loyalitas kepada pemimpin. Kasus ini juga semakin menguatkan citra Gus Dur sebagai elemen kunci yang memengaruhi situasi di partai ini daripada nilai-nilai bersama partai.

Kemudian, tidak adanya nilai-nilai bersama yang terstandardisasi memungkinkan adanya kebebasan relatif, terutama bagi elite, untuk melakukan tindakan apapun yang dianggap penting. Tidak ada *code of conduct* yang dapat mencegah manuver politik tokoh dan menghalangi dukungan atasnya. Akibatnya, Gus Dur dan tokoh-tokoh yang berkonflik dengannya, sama-sama memiliki kebebasan dalam membuat penafsiran atas suatu masalah.

Keputusan Matori untuk menghadiri SI MPR tahun 2001 dengan mengabaikan perintah partai menunjukkan kebebasan bertindak seorang kader dalam PKB. Tidak ada nilai-nilai bersama yang dapat menghentikan manuver politik pribadinya itu. Matori jelas lebih mengikuti perhitungan-perhitungan personalnya daripada *code of conduct* yang dapat memperingatkannya untuk lebih bersikap sesuai dengan kehendak mayoritas kader.[64]

Sementara itu, keputusan Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf, sebagai unsur pemimpin Dewan Tanfidz, untuk bergabung dalam Kabinet Presiden Yudhoyono tanpa izin dari Dewan Syura menunjukkan juga kebebasan menentukan pilihan dan lebih dari itu, membuktikan adanya perbedaan *code of condact* di antara elite partai. Kubu mereka berdua memiliki persepsi yang berbeda dengan kubu Gus Dur tentang konsep rangkap jabatan. Kenyataannya, perbedaan persepsi ini juga sebenarnya mengidikasikan belum selesainya nilai-nilai bersama yang harusnya menjadi patokan pembuatan sebuah kebijakan strategis. Namun, lebih dari itu, situasi yang memanas itu sebenarnya sejak dini dapat dihindari jika terdapat *code of conduct* berdasarkan nilai-nilai bersama yang berlaku dan ditaati oleh seluruh anggota partai.

Tidak adanya nilai-nilai bersama juga mendorong setiap kelompok yang berkonflik untuk bersikukuh membela kepentingan kelompok, yang pada dasarnya berkelindan dengan kepentingan patron, yang menyebabakan mereka sulit untuk berkompromi. Mereka bahkan tidak merasa canggung untuk membuat pernyataan bernada menyerang atau menjelekkan di media massa. Kelompok non-Gus Dur biasanya mengangkat isu salah kelola, ketidakadilan, dan kecenderungan otoritarian yang dilakukan Gus Dur dan pengikutnya. Mereka juga

---

[64] Sri Indarini, "Dia, Elang yang Terbang Sendirian", dalam Mahrus Ali and M.F. Nurhuda Y., *Pergulatan Membela yang Benar. Biografi Politik Matori Abdul Jalil*, (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2008), 361.

mengembangkan opini PKB sebagai sebuah partai keluarga besar atau partai yang dikelola secara genetis.[65]

Di lain pihak, kelompok Gus Dur mengangkat isu kecenderungan 'pragmatis' atau oportunis yang akut dari lawan-lawannya, sembari mempersepsikan kelompoknya sebagai kalangan idealis yang memperjuangkan kepentingan partai. Gus Dur dan pendukungnya juga kerap mengembangkan opini akan adanya kepentingan dan peran kekuatan di luar partai di balik kekisruhan internal.[66] Karena alasan ini, mereka kadang-kadang menyebut lawannya sebagai 'alat kekuatan asing'. Mereka juga kerap mengingatkan publik tentang jasa besar Gus Dur dalam melambungkan karier para pemimpin pihak lawan, seperti Matori, Alwi, dan Muhaimin. Maksud dari penyampaian pesan ini adalah jelas untuk mempersepsikan mereka yang menentang Gus Dur sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih atau bahkan pengkhianat.

Khususnya untuk Muhaimin, pendukung Gus Dur kerap menyerang sikapnya sebagai 'pengkhianat tulen' karena statusnya sebagai keponakan Gus Dur yang dilindungi dan bahkan hidup dengan keluarga Gus Dur selama bertahun-tahun, berbuah penentangan bahkan pemecatan kepada pamannya itu. Beberapa kalangan percaya inilah yang menjadi alasan bagi Shinta Nuriah, istri Gus Dur, memerintahkan Yenny anak perempuannya agar menghindari setiap kemungkinan mengadakan pertemuan dengan Muhaimin untuk membahas rekonsiliasi.[67]

---

[65] Ratnawati, "Beberapa Masalah Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Alternatif Solusi", 95. Wawancara dengan Khofifah Indar Parawansa, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999–2001), Ketua Badan Pelaksana Pemenangan Pemilu PKB (2002–2005), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

[66] Wawancara dengan Zannuba Ariffah "Yenny" Gus Dur, Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz PKB-Gus Dur (2008–2010), di Jakarta, 20 Oktober 2010; dengan Muamir M. Syam, Ketua PKB (2005–2010), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

[67] Wawancara dengan Ahmad Shodiq Noor, Sekretaris Jenderal DPW PKB DKI Jakarta, di Jakarta, 3 November 2010.

Ketika semangat kekeluargaan dan kebersamaan telah cenderung berkurang tajam dan pengabdian kader tertuju pada kelompok atau patronnya, soliditas partai menjadi hal yang musykil. Terbukti kemudian setiap kelompok yang berkonflik lebih suka mengadakan MLB sebagai medium untuk memecahkan masalah mereka.

2. Pembentukan Kelompok Instrumentalis dengan Ketiadaan Nilai-Nilai Bersama

Selain memberikan peluang kepada para pemimpin untuk mewujudkan kepentingannya, kurangnya komitmen dengan nilai bersama memungkinkan dibangunnya kesepakatan politik berdasarkan sesuatu yang menyimpang dari nilai-nilai bersama, atau dengan kata lain dilandasi oleh kepentingan yang murni pragmatis. Ideologi atau nilai-nilai bersama yang tidak diturunkan pada tingkat yang lebih praktis menyebabkan kader tidak memiliki parameter untuk dapat membuat penilaian yang komprehensif atas hal yang patut dilakukan atau tidak. Termasuk manakala dia dihadapkan pada sebuah tawaran politik yang menggiurkan. Kader tidak termotivasi untuk melakukan penelaahan yang mendalam mengenai apakah tawaran elite dan penerimaan mereka telah sesuai dengan ideologi atau nilai-nilai bersama partai.

Di sisi lain, bagi kader yang belum terbiasa menentukan pilihannya secara independen, pilihan patron menjadi penjuru kepentingan mereka. Ketergantungan pada patron ini kerap dimanfaatkan oleh pihak yang berkonflik sebagai peluang untuk menyebarkan pengaruh dan memperkuat kubu mereka. Sementara itu, untuk patron sendiri, pilihan-pilihan politik mereka dilandaskan pada beragam hal. Namun, dalam situasi ketika nilai bersama sebagai sebuah patokan berpolitik absen, pilihan-pilihan atas dasar perhitungan pribadi kerap lebih didahulukan.

Ketergantungan pada patron dan absennya nilai-nilai bersama memberikan peluang bagi Matori untuk memperoleh dukungan

secara cepat dari kader dan santri. Kehadiran K.H. Dimyati Rois, salah satu ulama NU senior dan berpengaruh dari Salatiga, Jawa Tengah dan K.H. Maksum Jauhari,[68] pada MLB Jakarta adalah sumber vital bagi kubu Matori untuk mengesahkan ke-NU-an partai pimpinannya. Matori mengatakan bahwa kehadiran kader partai, yang juga adalah kebanyakan para santri, yang datang dari berbagai wilayah menunjukkan dukungan langsung atau tidak langsung ulama kepadanya. Menurut Matori, seorang santri tidak dapat hadir tanpa izin kiainya.[69]

Situasi serupa juga terjadi di PKB Alwi. Dukungan dari ulama karismatik yang berkumpul di Forum Langitan, misalnya, mendorong mobilisasi kader dan santri yang demikian cepat. Berkumpulnya ribuan santri, khususnya murid-murid Kiai Langitan di MLB yang diselenggarakan pendukung Shihab, menunjukkan hubungan yang kuat antara ulama dan muridnya. Choirul Anam sebagai panitia MLB berkata, setelah K.H. Abdul Faqih, salah satu ulama yang paling dihormati di Forum Langitan, memberikan izinnya untuk mengadakan MLB, seluruh pendukung dan santri memperlihatkan dukungannya dengan berbondong-bondong menghadiri MLB, termasuk anggota kepengurusan dari 350 DPC dan 31 DPW.[70]

Sebaliknya, untuk Kubu Muhaimin, kehadiran K.H. Yusuf Chudlori dan K.H. Abdul Azis Mansyur—dua ulama karismatik dari Jawa Tengah dan Jawa Timur—memainkan peranan penting bagi pengukuhan kelompok ini. Kehadiran mereka diharapkan mampu melegitimasi kepemimpinan Muhaimin di mata para santri dan kader PKB. Secara simbolis, kehadiran Yusuf Chudlori di kelompok ini juga menjadi amat penting karena ayahnya, K.H. Chudlori Tegal Rejo,

---

[68] "Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa", dipaparkan di Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa, Jakarta, Hotel Borobudur, 14–16 Januari 2002.

[69] "Megawati Tidak Hadiri MLB Matori", *Kompas*, 15 Januari 2002.

[70] "Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Masa Bakti 2002–2005", di *Membangun Demokrasi Berbasis Tradisi: Ketetapan-Ketetapan Muktamar II Partai Kebangkitan Bangsa Tanggal 1–2 Oktober 2005* di Surabaya, 6.

diakui sendiri oleh Gus Dur sebagai salah satu gurunya.[71] Dengan dukungan ulama berpengaruh ini, Muhaimin ingin menunjukkan adanya dukungan dari ulama besar dan memang terbukti berhasil menyelenggarakan MLB di Jakarta untuk mengamankan posisinya di partai.

Di lain pihak, keberadaan kubu Gus Dur juga bergantung pada Gus Dur sendiri sebagai seorang tokoh yang bahkan kerap disetarakan dengan wali. Kehadiran Gus Dur tampak sebagai 'kartu As' yang menumbuhkan rasa percaya diri dan kebenaran di antara para pendukungnya. Mereka pun tak segan untuk membela mati-matian kepentingan tokoh yang dihormati itu. MLB Semarang 2005 menjadi salah satu ajang pembuktiannya. Pada kesempatan ini, mereka secara ketat melindungi agenda penting, yaitu memilih Muhaimin sebagai pemimpin baru Dewan Tanfidz dan menjaga posisi Gus Dur di Dewan Syura. Berbagai upaya dilakukan termasuk langkah-langkah yang bernuansakan pelanggaran aturan main.[72] Situasi tersebut bahkan membuat marah dan mengecewakan banyak tokoh senior partai, termasuk Prof. M. Mahfud M.D. dan Khofifah Indar Parawansa, yang akhirnya memilih meninggalkan partai.[73]

Situasi di atas memberikan pelajaran bahwa manakala menghadapi situasi konflik di mana setiap kubu membutuhkan dukungan yang besar, elite partai cenderung untuk membangun hubungan yang intens dengan para patron, yang dalam hal ini biasanya kiai-kiai dengan nama besar. Sikap membentuk pengelompokan instrumentalis yang

---

[71] Gus Dur mengakui K.H. Chudlori bersama dengan K.H. Ali Maksum dan K.H. Abdul Fattah Hasyim sebagai guru paling berpengaruh dalam hidupnya. Lihat pernyataan ini dalam Abdurrahman Wahid, "Sambutan Pembukaan Muktamar Luar Biasa PKB di Yogyakarta 17–19 Januari 2002", dalam Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, *AD/ART Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa*, (Jakarta: Sekretariat DPP PKB, 2002), XII.

[72] DPW PKB Jawa Timur, *Data dan Fakta Pelanggaran AD/ART di Muktamar II Semarang*, 9.

[73] Wawancara dengan Khofifah Indar Parawansa, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999–2001), Ketua Badan Pelaksana Pemenangan Pemilu PKB (2002–2005), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

dilandasi oleh kepentingan utama mendukung legalitas hukum dan budaya sebuah kepengurusan menunjukkan rendahnya kedudukan nilai-nilai bersama di mata elite dan kader partai pada umumnya.

Kemudian, situasi ini juga menunjukkan bahwa setiap ulama atau kelompok ulama memiliki perhitungan dan kepentingan politik mereka sendiri yang tidak hanya beragam, tetapi juga tidak mudah untuk disatukan. Independensi ulama dalam membuat kebijakan mereka sama sekali tidak hilang meskipun mereka telah bergabung dengan partai. Hak istimewa ini, yang teradopsi dari tradisi NU, bahkan akhirnya turut mewarnai kebijakan dan situasi internal partai.

Situasi ini belakangan menimbulkan kritik bagi para ulama yang terjun dalam kegiatan politik. Bahkan tidak sedikit yang menuduh mereka telah mempertajam konflik internal di PKB dan mendorong terciptanya perpecahan.[74] Kajian di atas memperlihatkan bahwa akar masalah yang sesungguhnya bukanlah semata terletak pada perilaku para ulama itu sendiri, melainkan karena tidak adanya nilai-nilai bersama dan *code of conduct* yang dapat secara efektif mengontrol perilaku mereka.

3. Keberlanjutan Konflik dan Kegagalan Upaya untuk Bersatu

Sikap kader PKB setelah MLB berlangsung juga menunjukkan tidak adanya komitmen atas nilai-nilai bersama. Mereka menutup kemungkinan terjadinya *islah*, dengan misalnya memberikan tawaran-tawaran yang sulit dipenuhi oleh pihak lawan. Alih-alih tetap berupaya membangun komunikasi yang sehat, mereka lebih suka menggunakan pihak ketiga yaitu pengadilan sebagai arbiter untuk memutuskan masa depan partai. Hal ini menunjukkan tidak adanya keinginan untuk

[74] Ibnu Hajar, *Kiai di Tengah Pusaran Politik: Antara Petaka dan Kuasa*, (Jogjakarta: IRCISoD, 2009). Tentang Konflik Ulama NU di bidang politik, lihat, Ichwan Arifin, *Kiai dan Politik: Studi Kasus Perilaku Politik Kiyai dalam Konflik Pasca Muktamar II Semarang*, Tesis, (Semarang: Program Ilmu Politik, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, 2008).

saling memelihara, yang dalam kacamata Selznick, mengindikasikan tidak bekerjanya infusi nilai.[75]

Baik kubu Gus Dur maupun penentangnya justru sama-sama menghendaki agar pihak lawannya dibubarkan melalui pengadilan sebagai syarat rekonsiliasi. Terlihat bahwa semangat yang terbangun di masing-masing kubu adalah mendiskreditkan kelompok lain. Setelah pengadilan mencapai keputusannya pun tidak terlihat langkah strategis yang menunjukkan adanya semangat atau itikad rekonsiliasi.

Setiap kelompok tetap menjadi kelompok yang terpisah dengan keyakinan dan agenda mereka sendiri-sendiri. Kelompok Gus Dur secara konsisten tidak memiliki kesungguhan untuk mengundang kader yang tidak loyal agar kembali ke partai dan enggan mengakui keberadaan mereka yang berseberangan itu. Di sisi lain, kelompok-kelompok yang melawan Gus Dur dan sebagian besar pengikutnya, tidak pernah mau mengakui 'kesalahan' mereka apalagi mengakui eksistensi kelompok Gus Dur.

Demikianlah, setelah pihak ketiga memutuskan kelompok mana yang sah secara hukum, kubu lain dengan mudahnya berkomitmen membentuk partai baru. Matori, misalnya, akhirnya memilih mendirikan partai baru, yaitu PKD sebelum Pemilu 2004. Partai ini terutama didirikan untuk mengakomodasi dan membangun nilai demokratis dan nasionalisme. Alwi Shihab dan Forum Kiai Langitan juga mengambil tindakan serupa. Mereka mendirikan PKNU pada tahun 2006, yang salah satu tujuannya adalah mendirikan partai dengan nilai-nilai Aswaja sepenuhnya. Sementara itu, Gus Dur dan para pengikutnya, belakangan membentuk Partai Kebangkitan Bangsa Nusantara (PKBN), setelah kalah oleh Kubu Matori di pengadilan.

Selain itu, sejumlah kader penting mengambil langkah berbeda. Mereka lebih suka bergabung dengan partai-partai lain untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Mereka itu di antaranya Muhammad A.S. Hikam (mantan Ketua Dewan Tanfidz yang ber-

---

[75] Selznick, *Leadership in Administration: A Sociological Interpretation*, 20–22.

gabung dengan Partai Hanura pada tahun 2008), Khatibul Umam Wiranu (mantan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz yang bergabung dengan Partai Demokrat pada tahun 2008) dan Rieke Dyah Pitaloka (mantan Ketua Dewan Tanfidz yang bergabung dengan PDIP pada tahun 2007).

Menurut Steven Levitsky, sebuah partai yang terlembaga adalah partai yang dapat mempertahankan dan menjaga keberadaannya selama situasi sulit. Infusi nilai-nilai mendorong kader untuk berkomitmen dan mendedikasikan hidupnya terhadap keberlanjutan kehidupan partai. Dengan menggunakan *Partido Justicialista* (Partai Keadilan) yang didirikan pada tahun 1947 oleh Juan Peron sebagai studi kasus, dia mengamati bahwa bahkan ketika Peron meninggal, partai ini masih ada dan menjadi partai penting di Argentina walaupun sejumlah penyesuaian internal tidak dapat dihindari. Komitmen kader masih tinggi, seperti semangat untuk mengamankan kehidupan partai. Dalam hal ini, partai telah 'bernilai karena keberadaanya' (*valued for itself*) di mata para anggotanya.[76]

Akan tetapi, kasus PKB menunjukkan situasi berbeda. Kadernya sendiri telah tidak saja mencabik-cabik keutuhan partai, namun pula dengan tidak canggung membentuk partai baru yang merepresentasikan nilai-nilai yang berbeda. Pendirian partai-partai baru di dalam waktu yang relatif singkat dan tindakan keluar dari partai yang dilakukan sejumlah kader menunjukkan rendahnya komitmen untuk menjaga keberlanjutan partai.

D. Ringkasan

PKB kemungkinan besar dapat menghindari perpecahan apabila partai ini secara tepat dapat mengembangkan dan menyederhanakan nilai-nilai bersamanya sejak dini dan melakukan infusi yang intens atas nilai-nilai itu ke seluruh jaringan partai. Situasi ini akan membantu partai untuk membangun lingkungan yang kondusif bagi pem-

[76] Steven Levitsky, "Institutionalisation and Peronism: The Case, The Concept and the Case for Unpacking the Concept", *Party Politics*, 4:1, 82.

bangunan idealisme dan rasa hormat kader terhadap norma-norma yang berlaku di partai. Kasus PKB menunjukkan bahwa tidak terbentuknya lingkungan tersebut berkontribusi terhadap absen atau tereduksinya rasa kebersamaan dan memprovokasi lahirnya pragmatisme serta faksionalisme. Hal ini pada akhirnya menjerumuskan partai ke dalam situasi yang rumit, yang berujung pada terciptanya perpecahan internal yang akut. Penjelasan di atas memperlihatkan hubungan antara kegagalan untuk mengembangkan komitmen terhadap nilai-nilai bersama, sebagai satu indikator pelembagaan partai, dengan munculnya perpecahan partai.

BAB XII
DAKWAH DAN KOMITMEN TERHADAP NILAI-NILAI BERSAMA DI PKS

> Nilai Islam yang menjadi ideologi adalah pedoman atau *code of conduct* dalam membangun hubungan dan interaksi ... cara kader PKS berbicara dan berpikir tentang Islam di Depok (Jawa Barat), di Aceh, di Irian (Papua) kurang lebih sama (Amri Yusra).[1]

Bab ini membahas keberadaan nilai bersama (*shared value*) dan proses infusi dalam tubuh PKS. Kedua hal itu berada dalam kedudukan yang relatif berbeda dengan yang ada dalam PKB. Dalam kasus PKS, komitmen untuk "menegakkan dan menyebarkan dakwah" menjadi nilai bersama yang berperan tidak saja dalam pemberian identitas, namun telah memiliki karakteristik dan dipahami sebagai sesuatu yang akhirnya turut mengatur perilaku dan cara berpikir kader. Nilai-nilai bersama ini ditransformasikan melalui sebuah mekanisme standar yang cukup dapat menjaga terpeliharanya pemahaman dan pemeliharaan nilai-nilai itu, setidaknya dalam konteks adanya keseragaman untuk memahami nilai-nilai itu. Dengan situasi seperti itu, partai memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mencegah hal-hal yang dapat berpotensi merusak keutuhan partai.

[1] Wawancara dengan Amri Yusra, M.Si., Ketua DPD PKS Depok (2002–2004), anggota DPRD Kota Depok, Jawa Barat, (2004–2009), dan Dosen di Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, di Depok, 7 Oktober 2010.

Terkait dengan hal itu, bab ini mencakup tiga topik bahasan sejalan dengan topik yang dibahas pada bab sebelumnya. Pertama, penulis menganalisis esensi dakwah sebagai nilai bersama partai dan situasi pemeliharaan nilai bersama di PKS. Kedua, situasi komitmen nilai bersama di partai ini dan tingkat 'infusi nilai' akan dibahas. Ketiga adalah bahasan tentang kemampuan untuk menghindari perpecahan sebagai hasil kondisi di atas.

A. Keberadaan Nilai Bersama

1. Perjuangan Dakwah sebagai Nilai Sentral

PKS sejak awal kehadirannya dalam wujud Partai Keadilan (PK) secara konsisten menyatakan diri sebagai 'Partai Dakwah'[2]. Sebagai partai dakwah, PKS menjadikan perjuangan dakwah sebagai *central value* dalam gerak langkah kehidupan partai dan para kadernya. Partai ini meyakini bahwa keberadaan partai merupakan bagian upaya dakwah.[3] Pembukaan AD/ART partai ini menyatakan bahwa partai dibentuk untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah.[4]

Tujuan utama dakwah adalah menciptakan peradaban yang dibangun atas semangat menghormati moralitas, aturan hukum, dan kedaulatan rakyat yang di dalamnya rakyat berperan penting dalam membangun dan mengontrol pemerintahan. Menurut Anis Matta, peradaban Islam adalah bagian misi dakwah yang pada dasarnya adalah

> Merekonstruksi pemikiran dan kepribadian manusia muslim agar berpikir, merasa, dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah Swt atau dengan referensi Islam. Kemudian membawa manusia muslim baru itu ke dalam kehidupan nyata, dengan kesadaran barunya, untuk menata ulang seluruh kehidupan sektor masyarakatnya agar hidup dengan budaya, sistem,

[2] *AD PK Pasal 6; AD PKS 2002 Pasal 2 (2)*. Lihat juga *Sekilas Partai Keadilan*, (Jakarta: Sekretariat DPP Partai Keadilan, 1998), 21–22.

[3] Aay Muhammad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera, Ideologi dan Praktis Politik Kaum Muda Kontemporer*, (Bandung: Teraju, 2004), 185.

[4] *Mukadimah AD PKS Tahun 2005*.

hukum, dan institusi yang seluruhnya jelmaan kehendak-kehendak Allah Swt.[5]

Untuk menempuh tujuan itu, PKS mengembangkan beberapa nilai pokok yang wajib diemban oleh partai dan kader dalam meraih cita-cita membentuk masyarakat berperadaban itu. Nilai utama pertama adalah keyakinan bahwa keberadaan mereka adalah sebagai alat perjuangan dakwah untuk meraih rida Tuhan. Dengan semangat menjadi 'perangkat dakwah', kepentingan pribadi atau individual menjadi sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, semua aktivitas itu diabdikan untuk kepentingan penegakan nilai-nilai keislaman di mana pun mereka berada. Implikasi logisnya adalah mereka bersedia meninggalkan kepentingan pribadi demi penegakan nilai-nilai keislaman itu.[6] Sikap mencari rida Tuhan ini menjadi sesuatu ajaran yang menumbuhkan militansi dan semangat keislaman. Dalam spirit 'alat' dakwah yang semata mencari rida Tuhan itu, bahkan sebagian menyebutnya sebagai *jundi* (prajurit), kepentingan pribadi menjadi sesuatu yang harus disingkirkan.

Sebagian besar kader menganggap diri mereka sebagai bagian institusi yang memiliki komitmen yang kuat untuk memegang tujuan keagamaan ini. 'Mewujudkan tujuan dakwah' adalah sebuah *common language* yang dipahami secara kolektif dan menjadi pengikat para kader. Walaupun di dalam perkembangannya sejumlah kecil kader gagal menjalani kewajiban ini, misalnya, terjebak dalam gaya hidup

---

[5] Anis Matta, *Menikmati Demokrasi Strategi Dakwah Meraih Kemenangan*, (Jakarta: Pustaka Saksi, 2002), 8.

[6] Wawancara dengan Amri Yusra, M.Si., Ketua DPD PKS Depok (2002–2004), anggota Parlemen Kota madya Depok, Jawa Barat, (2004–2009) dan Dosen di Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, di Depok, 7 Oktober 2010; Wawancara dengan Aus Hidayat Nur, Ketua Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktober 2010; dengan Hidayat, M.M., Anggota Parlemen Kabupaten Tangerang (2005–2010), di Tangerang, 21 Oktober 2010; dengan Dr. Yon Mahmudi, Pengamat PKS dan Gerakan Tarbiyah, Dosen di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia dan salah satu kader yang menandatangani deklarasi pendirian PKS, di Depok, 6 Oktober 2010.

duniawi, kegagalan ini tidak menghapus semangat kader-kader lain untuk tetap menjunjung komitmen ini. Hal ini melahirkan soliditas dalam pengertian bahwa kader menjunjung tinggi semangat dakwah yang relatif sama. Menurut Kemal Stamboel, kecenderungan inilah yang membuat partai ini relatif bersih dari kepentingan-kepentingan yang bermotif kepentingan sesaat yang dapat merusak jati diri partai ataupun intervensi dari luar.[7]

Kemudian, sebagai sebuah kelompok dakwah yang berpolitik, PKS menekankan pentingnya semangat kebersamaan atau berjemaah dalam sebuah gerakan (*harakah*) untuk meraih cita-cita yang telah digariskan. Norma yang dikembangkan oleh partai adalah semangat untuk 'hidup dalam jemaah' yang diyakini sebagai syarat dalam meraih keberhasilan perjuangan Islam. Dalam dokumentasi resmi partai, dikatakan bahwa jemaah memiliki kedudukan yang istimewa karena perannya sebagai elemen pengikat umat, yang manakala putus maka akan menjadi penyebab terbengkalainya semua agenda penegakan Islam.[8] Bagi PKS, dakwah adalah sesuatu yang akan dilakukan dengan semangat berjemaah.[9]

Dokumen partai juga menyebutkan tentang sebagian ajaran Islam yang mengingatkan adanya korelasi antara lemahnya jemaah dan friksi internal yang dapat menyebabkan kemunduran.[10] Dikatakan oleh Mahfudz Siddiq bahwa di PKS ditekankan sebuah norma bahwa, "Tidak mungkin menegakkan Islam dan kebenaran dalam masyarakat itu kalau tidak dilakukan secara berjemaah, berorganisasi".[11] Dan lebih dari itu, nilai lebih atau 'berkah Tuhan' sebuah perjuangan

[7] Wawancara dengan Kemal A. Stamboel, Kepala Badan Penasihat dan Dewan Pakar PKS, anggota Parlemen (2009–2014), di Jakarta, 8 Oktober 2010.

[8] Syamsul Balda, Abu Ridho, Untung Wahono, *Politik Da'wah Partai Keadilan*, (Jakarta: DPP Partai Keadilan, 2000), 22.

[9] Tim Departemen Kaderisasi PKS, *Profil Kader Partai Keadilan Sejahtera*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2004), 107.

[10] Balda, Ridho, Wahono, *Politik Da'wah Partai Keadilan*, 29.

[11] Wawancara dengan Mahfudz Siddiq, Kepala Departemen Kaderisasi DPP PKS (2002–2005) dan anggota Parlemen (2004–2014), di Jakarta, 27 Oktober 2010.

penegakan nilai-nilai keislaman itu ada dalam kelompok yang solid.[12] Untuk itu, sikap kebersamaan dan persaudaraan menjadi nilai yang ditumbuhkan oleh partai kepada para kader.

Dalam nuansa sebagai 'alat dakwah' itu muncul pula berbagai nilai dan tradisi berorganisasi yang dikedepankan oleh partai ini, yang jika dirangkum akan menjadi nilai-nilai ketaatan terhadap pimpinan (*qiyadah*).[13] PKS juga berkeyakinan bahwa hanya melalui ketaatan yang paripurna tujuan dakwah dapat dicapai. Dalam hal ini, keputusan yang dibuat elite menjadi semacam fatwa yang harus dilaksanakan seluruh kader.

Ketaatan menjadi pilar penting yang menumbuhkan hubungan erat antara pemimpin atau elite dan kader atau anggota biasa. Kader di tingkat yang lebih tinggi justru dituntut memiliki tingkat ketaatan yang juga lebih tinggi terhadap pemimpin, sebagai bagian dari komitmen terhadap partai.[14] Ketaatan ini di tingkat praktis memudahkan partai untuk memobilisasi kadernya dalam merespons perkembangan yang ada dan juga untuk memenuhi tugas atau kewajiban. Hal inilah yang menjadi alasan utama di balik kemampuan PKS untuk membuat sejumlah penyesuaian-penyesuaian penting sebagai respons terhadap situasi politik terkini.

Budaya taat ini mengacu pada ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa': 59 yang berbunyi: "*Athiúllah wa 'athiul rasul wa ulil amri minkum",* yang artinya "taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta pemimpin di antara kamu".[15] Kalimat "pemimpin di antara kamu" kadang diterjemahkan PKS sebagai pemimpin partai. Dalam rangka

---

[12] Wawancara dengan Nooryanto, Ketua Departemen Kaderisasi Bekasi DPD PKS, di Bekasi, 7 November 2010.

[13] Ali Said Damanik, *Fenomen Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, (Bandung: Teraju, 2002), 117.

[14] *Ibid*, 117.

[15] Wawancara dengan Dr. Yon Mahmudi, Pengamat PKS dan Gerakan Tarbiyah, Dosen di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia dan salah satu kader yang menandatangani deklarasi pendirian PKS, di Depok, 6 Oktober 2010.

memperkuat dan menghayati makna menaati pemimpin partai, PKS menerbitkan berbagai bacaan dan bahan pelatihan untuk kader, terutama di seputar topik "*Qiyadah wal Jundiyah*".

Namun, nilai ketaatan yang ditumbuhkan bukanlah ketaatan yang buta. Sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada para kader mengenai mana yang harus didahulukan antara ketaatan dan aturan main, dijawab dengan beragam jawaban yang mengerucut pada sebuah kesimpulan bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan, bahkan bagi mereka, ketaatan itu hanya ada sejauh itu sesuai dengan sistem atau aturan main yang ada.[16]

Seorang pemimpin pada akhirnya hanya dapat efektif ditaati jika dia tidak terkait dengan maksiat, tetap sejalan dengan idealisme, dan tidak menabrak aturan main. Perintah ketaatan ini harus dilaksanakan selama pemimpin tersebut memerintah kepada kebaikan, dan tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Seperti dikatakan oleh Mushthafa Masyhur, "Ketaatan kepada Amir dan pemimpinnya dalam hal yang tidak *ma'shiyat*, adalah dipandang sebagai taat setia kepada Allah".[17] Atas dasar ini, ketaatan tidak dapat dibelokkan untuk membuat sebuah ketaatan buta pada individu, melainkan pada sistem yang berlaku. Dengan demikian, ketaatan dalam PKS

---

[16] Wawancara dengan Untung Wahono, Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan DPP PK (2000–2003), Kepala Departemen Politik dan Pertahanan DPP PKS (2002–2005) dan Ketua MPP PKS (2010–2015), di Jakarta, 27 Oktober 2000; dengan Sitaresmi S., M.Psi., anggota Departemen Dakwah PK DPP (2000–2003), di Jakarta, 8 Oktober 2010; dengan Aus Hidayat Nur, Ketua Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktober 2010; dengan Sigit Sosiantomo, Koordinator Wilayah Jawa Timur dan Bali PKS (2005–2009), di Jakarta, 25 Oktober 2010; dengan Ahmad Feri Firman Yusuf, Ketua Wilayah Dakwah III (2002–2005), anggota Majelis Syura PKS (2002–2010), di Jakarta, 2 November 2010; dengan Dr. Yon Mahmudi, Pengamat PKS dan Gerakan Tarbiyah, Dosen di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia dan salah satu kader yang menandatangani deklarasi pendirian PKS, di Depok, 6 Oktober 2010; dengan Mustofa, kader PKS dan mantan wartawan Majalah Profetikdi Depok, 7 Oktober 2010.

[17] Mushthafa Masyhur, *Al Qiyadah Wal Jundiah* (Jakarta: Al Ishlahy Press, Tanpa Tahun), 90.

pada hakikatnya tidak *taqlid* karena bersifat dua arah dan dengan persyaratan khusus.[18]

Di samping itu, PKS memahami bahwa inti dakwah menghendaki proses bertahap dan melalui kaidah-kaidah moderat. Dengan kata lain, dakwah mengenal paham gradualisme dan moderatisme. Para aktivis dan institusi dakwah tidak dapat mengabaikan konteks tempat dakwah berkembang.[19] Kedua konsep itu kemudian menjadi semacam nilai 'inti dakwah' khas PKS. Nilai ini secara naluriah menjadi landasan berpikir dan bertindak partai ini serta mengatur pilihan-pilihan kebijakan dan langkah-langkah politik yang dikedepankan. Cerminan dari sikap gradual ini adalah tawaran-tawaran kebijakan yang mengindahkan konteks dan kesiapan umat Islam. Hingga pilihan kebijakan-kebijakan yang dipandang 'terlalu islamis' dan belum saatnya dihindari oleh partai ini. Di sisi lain, dalam konteks internal partai, pembinaan berjenjang kader mencerminkan komitmen mereka untuk menciptakan sekelompok aktor politik secara bertahap. Moderatisme menjadi konsep penting dalam dakwah PKS. Sikap sedemikian juga membedakan partai ini dari gerakan Islam baru lainnya di Indonesia yang cenderung berlebihan dalam melakukan dakwah dengan menyatakan misalnya, pelaksanaan *Syariah* Islam secepat mungkin dan tinggalkan apabila masyarakat tidak siap.[20]

Salah satu cerminan dari nilai-nilai tersebut adalah partai cenderung untuk menghindari pembahasan apalagi perdebatan tentang

---

[18] Wawancara dengan Sitaresmi S., M.Psi., anggota Departemen Dakwah PK DPP (2000–2003), di Jakarta, 8 Oktober 2010.

[19] *AD/RT Masa Bhakti 2000–2005*, (Depok, DPD Partai Keadilan). Hilmi Aminuddin, *Strategi Dakwah Gerakan Islam*, (Jakarta: Pustakan Tarbiatuna, 2003), 62

[20] M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2005). Anthony Bubalo dan Greg Fealy, *Joining the Caravan? The Middle East, Islamism and Indonesia*, (Alexandria: Lowy Institute for International Policy, 2005). Muhammad Iqbal Ahnaf, "MMI dan HTI; The Image of The Others", di A. Maftuh Abegebriel, A Yani Abeveiro, SR-Ins Team, *Negara Tuhan. The Thematic Encyclopaedia*, (Jakarta: SR-Ins Publishing). Firman Noor, *Moderate Islamic Fundamentalism in Indonesia: A Study of Political Thinking and Behaviour of the Prosperous Justice Party (PKS), 1998–2005*, Tesis, (Canberra: Faculty of Asian Studies, ANU, 2006).

masalah-masalah sensitif seperti ideologi negara atau masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antara agama dan negara. PKS lebih memilih aktif mengkaji atau terlibat dalam masalah-masalah 'praktis', seperti pemberantasan korupsi dan meningkatkan kemakmuran rakyat melalui program-program sosial dan kemanusiaan, atau membantu penguatan masyarakat sipil.[21] Bagi PKS, umat Islam akan dengan sendirinya menuntut pelaksanaan ajaran Islam secara lebih komprehensif, termasuk sebagai dasar negara, apabila mereka sudah benar-benar melihat dan merasakan keunggulan Islam di tingkat praktis. Sikap dan pandangan PKS di atas menjadi identitas partai ini di dalam kehidupan politik Indonesia kontemporer, yang menjadi penjuru dalam menentukan sikap, tindakan dan kebijakan politiknya.[22]

Dari pembahasan di atas dapat dilihat bahwa perjuangan menegakkan dan menyebarkan *dakwah* sebagai nilai bersama diturunkan menjadi beberapa nilai yang menjadi karakter partai ini, seperti bersedia menjadi alat atau 'tentara' Allah Swt, senantiasa hidup di dalam kelompok atau kolektivisme, menjaga ketaatan, dan cenderung bersikap moderat. Bagian berikut ini akan mengkaji kondisi dan keberadaan nilai-nilai itu dalam partai, perannya dalam banyak aspek termasuk soal hubungan eksternal dan internal serta dampaknya bagi partai.

2. Pemeliharaan Nilai-Nilai Bersama

Dalam upaya mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai bersama PKS mengembangkan infusi ideologi. *Halaqah* pada level kader

---

[21] Yon Machmudi, *Partai Keadilan Sejahtera, Wajah Baru Islam Politik Indonesia*, (Bandung: Harakatuna Publishing, 2005). "PKS Pledges to help civil society flourish", *The Jakarta Post*, 6 Juni 2005.

[22] Damanik, *Fenomen Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia.* Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera, Ideologi dan Praktis Politik Kaum Muda Kontemporer.* Bubalo and Fealy, *Joining the Caravan? The Middle East, Islamism and Indonesia.* Elizabeth Fuller Collins, "Islam is the Solution, Dakwah and Democracy in Indonesia", di *http://www.classics.ohio.edu/faculty/collins/islamsolution.pdf.*

biasa atau *usrah* pada level elite partai atau juga kerap secara formal disebut sebagai Taklim Rutin Mingguan (TRM) menjadi salah satu media terpenting dari infusi ideologi ini. Dalam *halaqah*, nilai-nilai itu diperkenalkan, dipelihara, dikembangkan, dan diimplementasikan oleh seluruh kader di bawah pengawasan para *murabbi* (guru) yang berperan sebagai aparatus ideologi itu sendiri. Suasana *halaqah* yang terbatas, berkisar 5–12 kader, memungkinkan transfer idealisme dan juga kontrol pelaksanaannya menjadi lebih intensif.

Proses ini tidak terhenti walaupun kader telah memegang posisi publik yang penting, seperti anggota parlemen, gubernur, menteri, atau puncak tertinggi kepemimpinan partai. Bahkan seorang Ketua MS pun memiliki dan berinteraksi dengan *halaqah*-nya.[23] Dalam kondisi ini, standardisasi nilai-nilai itu menjadi relatif terjaga dan terpelihara dengan relatif baik di semua level kader, meski jelas tidak sempurna.

Untuk menunjang kegiatan infusi ini partai melakukan standardisasi dan sistematisasi atas materi-materi yang dikembangkan dalam kegiatan itu. Materi dan kegiatan yang dilakukan dalam *halaqah* ini pun merujuk pada nilai-nilai yang ada atau merupakan implementasi dari nilai-nilai itu. Materi mengenai ketaatan, terutama tema mengenai *qiyadah wal jundiyah*, pentingnya kebersamaan, dan politik dakwah merupakan materi-materi politik yang harus dikuasai selain materi-materi tentang akhlak atau pun akidah islamiah yang standar dikembangkan dalam sebuah kelompok pengkajian Islam. Materi tentang peningkatan kualitas diri secara personal tidak luput dari perhatian pembinaan.[24] PKS telah menerbitkan sejumlah buku yang membahas *halaqah,* baik untuk mengomunikasi kepada masyarakat umum tentang esensi proses ini maupun memberikan pedoman atas

---

[23] Wawancara dengan Selamat Nurdin, M.M., mantan pemimpin aktivis *tarbiyah* di Universitas Indonesia, anggota DPRD DKI Jakarta (2004–2014), di Jakarta, 22 Oktober 2010.

[24] Tim Departemen Kaderisasi PKS, *Profil Kader Partai Keadilan Sejahtera*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2004).

proses dan topik termasuk bahan yang harus dibahas dalam proses ini oleh seluruh kader.[25]

Dalam *halaqah* ini ada tugas dan evaluasi yang dilakukan secara serius[26] dengan pengawasan kegiatan yang ketat[27] dan penjejangan kualitas kader. Terdapat berbagai kegiatan satu bulanan, enam bulanan, hingga satu tahunan, yang pada umumnya bermaterikan pengingatan dan penguatan akan nilai-nilai bersama dan pemeliharaan semangat berpartai.[28] Partai juga melakukan evaluasi atas kader.[29] Hasil evaluasi ini kemudian dilaporkan secara regular oleh *murabbi*

---

[25] Tim Departemen Kaderisasi DPP PK Sejahtera, *Manajemen Tarbiyah Anggota Pemula*, (Jakarta: DPP PK Sejahtera dan PT Syaamil Cipta Media, 2004). Tim Departemen Kaderisasi PKS, *Profil Kader Partai Keadilan Sejahtera*. H. Hilmi Aminuddin, *Strategi Dakwah Gerakan Islam*, Serial Fiqud Da'wah, (Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 2003). Departemen Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera, *Manhaj Kaderisasi Anggota Partai Keadilan*, tidak diterbitkan, (Jakarta: Departemen Kaderisasi Partai Keadilan Sejaktera). Departemen Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera, *Sekilas tentang Sistem Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera*, tidak diterbitkan, (Jakarta: Departemen Kaderisasi Partai Keadilan Sejaktera, 2004). DPP Partai Keadilan, *Risalah Am Jamahiri 1423, Seri Dokumentasi Partai*, (Jakarta: DPP Partai Keadilan). Ahmad Satori (et al.). *Taujihat Ri'ayah Ma'nawiyah Kader PK Sejahtera*, (Jakarta: Departemen Kaderisasi DPP Partai Keadilan Sejahtera, 2003). Tim Bidang PSDM PK Sejahtera, *Mobilitas Kader Da'wah: Arah Kebijakan Da'wah dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia*, tidak diterbitkan, (Jakarta: DPP Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta, 2003). Tim Kerja Penyusunan Kurikulum, *Satuan Acara Pembelajaran Tarbiyah Islamiyah: Buku 1*, tidak diterbitkan. Tim Kerja Penyusunan Kurikulum, *Satuan Acara Pembelajaran Tarbiyah Islamiyah: Buku 2*, tidak diterbitkan. Tim Kerja Penyusunan Kurikulum, *Satuan Acara Pembelajaran Tarbiyah Islamiyah: Buku 3*, tidak diterbitkan.

[26] Wawancara dengan Selamat Nurdin, M.M., mantan pemimpin aktivis *tarbiyah* di Universitas Indonesia, Anggota DPRD DKI Jakarta (2004–2014), di Jakarta, 22 Oktober 2010.

[27] Wawancara dengan Nooryanto, Ketua Bidang Kaderisasi DPD Bekasi, di Bekasi, 7 November 2010.

[28] Wawancara dengan Nooryanto, Ketua Bidang Kaderisasi DPD Bekasi, di Bekasi, 7 November 2010.

[29] Wawancara dengan Selamat Nurdin, M.M., mantan pemimpin aktivis *tarbiyah* di Universitas Indonesia, anggota DPRD DKI Jakarta (2004–2014), di Jakarta, 22 Oktober 2010. Di sejumlah daerah proses ini dilakukan secara ketat, seperti di Bekasi salah satu kantong PKS. Di daerah ini, pengurus lokal secara ketat mengontrol kualitas kader dalam aktivitas keagamaan, termasuk menghafal Al-Qur'an dan komitmen untuk bergabung dengan aktivitas politik partai, memicu kader lebih fokus pada kewajiban

ke Badan Pembinaan Kader (BPK) sebagai institusi formal di partai yang menangani dan mengawasi *halaqah*. Partai menggunakan laporan ini sebagai salah satu rujukan dalam mengevaluasi dan menentukan masa depan kader.

Kemudian, agar dapat meningkatkan komitmen kader terhadap nilai bersama, partai juga membentuk BPDO. Sebagai badan yang bertanggung jawab dalam masalah disiplin, BPDO juga memiliki peran sebagai instrumen untuk mengontrol komitmen kader dalam melaksanakan misi partai termasuk nilai-nilai bersama. Untuk itu, BPDO berwenang memanggil dan mengevaluasi seorang kader yang dirasa oleh sebagian kader lainnya atau partai telah menurun komitmennya dalam menegakkan nilai-nilai bersama, terutama saat melakukan tugasnya. BPDO meyakini bahwa berbagai masalah yang terkait dengan inkonsistensi seorang kader dalam menegakkan nilai bersama itu berkorelasi dengan inkonsistensi kader tersebut dalam mengikuti *halaqah*.[30] Pandangan ini menegaskan pengakuan BPDO tentang arti penting infusi nilai-nilai bersama melalui aktivitas *halaqah* dalam turut menjaga konsistensi sikap dan perilaku kader.

Situasi di atas menunjukkan bahwa upaya untuk memelihara nilai bersama di PKS bukanlah sesuatu hal yang dilaksanakan secara serampangan tanpa sebuah perencanaan yang sistematis dan komitmen yang kuat. Melalui jaringan *halaqah* sebagai ujung tombang pelaksanaan, partai telah berupaya mengembangkan sebuah koordinasi pelaksanaan infusi nilai-nilai bersama secara terpusat dan terkoordinasi. Bagi kalangan yang bersikap kritis, *halaqah* telah memberikan sebuah penyeragaman di antara sesama kader, di mana penyeragaman itu telah relatif melemahkan kebebasan kader dan semangat demokrasi dalam partai ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Masdar Hilmy:

---

moral, dan kewajiban sebagai anggota partai. Wawancara dengan Nooryanto, Ketua Departemen Kaderisasi DPD PKS Bekasi, di Bekasi, 7 November 2010.

[30] Wawancara dengan Aus Hidayat Nur, Kepala Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktobber 2010.

> *The lack of autonomy among PKS activist is to a large degree also inspired by the cell system (usroh) inhertited from the tarbiyah method, which relies heavily on collective action.*[31]

Akan tetapi, bagi sebagian pengamat lainnya, situasi ini menunjukkan efektivitas sebuah pemeliharaan nilai-nilai bersama di PKS karena partai dapat memastikan transformasi nilai bersama ke seluruh kadernya. Dalam penelitiannya tentang perilaku tujuh partai politik besar di Indonesia kontemporer, Ignas Kleden berkesimpulan bahwa PKS merupakan salah satu partai di Indonesia yang berhasil mengembangkan sistem nilainya.[32] Dalam menyikapi tentang adanya soliditas di partai ini Kleden menyimpulkan:

> Sebuah sistem nilai yang kuat yang dihayati bersama oleh kadernya dapat menciptakan ikatan di antara fungsionaris partai, suatu hal yang dibutuhkan untuk mencegah perpecahan dan faksionalisasi.[33]

Menurut Randall, situasi yang terjadi ini menunjukkan adanya sebuah pelembagaan atas "sistem nilai atau budayanya sendiri".

B. Situasi Internal: Eksistensi Komitmen Kolektif

Di PKS, perwujudan dari keberadaan nilai-nilai bersama secara garis besar berada dalam dua aras, yakni aras organisasi (partai) dan aras individu (kader). Terkait dengan hal yang pertama, infusi nilai-nilai bersama digunakan sebagai pedoman utama bagi kegiatan sehari-hari partai. Nilai terpenting dari hal ini adalah upaya partai untuk mengembangkan dan mengedepankan idealisme partai di berbagai aspek kehidupan partai dan anggota-anggotanya. Sementara itu,

---

[31] Masdar Hilmy, *Islamism and Democracy in Indonesia Piety and Pragmatism*, (Singapore: Institute of South East Asia Studies, 2010), 254.

[32] Ignas Kleden, *Partai Politik Indonesia: Dari Mesin Partai hingga Volunterisme Politik (Refleksi wakil Tujuh Partai Politik Indonesia 2008*), (Jakarta: Komunitas Indonesia untuk Demokrasi, 2009), 22.

[33] Ignas Kleden, *Partai Politik Indonesia: Dari Mesin Partai hingga Volunterisme Politik (Refleksi wakil Tujuh Partai Politik Indonesia 2008*), (Jakarta: Komunitas Indonesia untuk Demokrasi, 2009), 22.

pada aras kader, adalah nilai bersama sebagai landasan membangun semangat berjemaah, yang mendorong tiap individu untuk senantiasa memelihara dan menghargai keutuhan partai. Bagian berikut ini membahas kedua aspek tersebut dan dampaknya bagi partai.

1. Partai sebagai 'Wadah' Idealisme Kelompok

Menurut Selznick, salah satu indikasi partai yang terlembaga adalah ketika institusi atau partai itu telah menjadi *the receptacle of group idealism* (wadah idealisme kelompok).[34] PKS dalam banyak hal memenuhi situasi ini. Pelaksanaan infusi nilai-nilai bersama di partai, dalam satu dekade keberadaannya, telah relatif mampu memelihara komitmen partai dan kader terhadap ideologinya.

Pelembagaan ideologi dapat dilihat dari platform partai yang secara umum menyiratkan adanya keinginan partai ini untuk membentuk sebuah tatanan yang lebih baik dan berperadaban, atas dasar-dasar keyakinan agama sebagai tujuan akhir dari dakwah itu sendiri. Platform partai itu sendiri dipahami PKS sebagai:

> Sekumpulan nilai, harapan, dan capaian konseptual dari hasil interaksi dan internalisasi institusi dakwah terhadap sejarah panjang dan pengalaman dirinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan platform masing-masing kader sebagai da'i dapat memahami bagaimana gerak langkah, sikap, dan arah institusi dakwah.[35]

Platform inilah yang kemudian menjadi landasan dasar bagi partai untuk menjadi rujukan pembuatan kebijakan. Kebijakan partai diupayakan sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang dipenuhi oleh nilai-nilai dakwah, dengan memberikan contoh dan solusi konkret bagi perbaikan kehidupan manusia, ketimbang semata sebagai

---

[34] Philip Selznick, *Leadership in Administration: A Sociological Interpretation*, (New York: Row, Peterson and Company, 1957), 22.

[35] Majelis Pertimbangan Pusat PK Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani, Falsafah Perjuangan Dasar, Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera*, (Jakarta: MPP PKS, 2008), iv.

sebuah gerakan keagamaan yang tergiur untuk mendirikan tatanan pemerintahan Islam secara revolusioner.

Menurut Hilmi Aminuddin, platform adalah dokumen yang menyatukan dan mengarahkan seluruh aktivitas dakwah, yang pada akhirnya dakwah itu sendiri seharusnya dapat turut mewarnai kehidupan masyarakat dan negara.[36] Lebih lanjut dikatakan oleh Suharna Surapranata bahwa platform PKS, sebagai sebuah tuntunan kebijakan partai dan tuntutan kader dalam bertingkah laku atau dalam proses pengusulan kebijakan, merupakan cerminan dari karateristik partai dakwah yang tidak hanya disibukkan oleh kerja-kerja kekuasaan lima tahunan, namun juga kerja-kerja kultural dalam pembangunan umat dan peradaban.[37] Sehubungan dengan itu, platform partai dapat dipahami sebagai sekumpulan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh kader, dengan kepentingan menegakkan nilai-nilai dan dakwah Islam sebagai fokus utamanya. Dalam hal ini terlihat bahwa dakwah menjadi tuntunan dasar bagi penciptaan platform partai.

Seperangkat kewajiban yang diembankan oleh kader partai berintikan upaya mengembangkan nilai-nilai keislaman dan upaya peningkatan kualitas dakwah. Hal itu juga terlihat dari 'sumpah kader' dalam AD/ART partai yang menyaratkan ketaatan akan nilai-nilai dakwah dan kesediaan untuk menegakkan nilai-nilai Islam.[38] Menurut Ahmad Firman, ada tiga inti dari janji kader, yakni janji (1) untuk menegakkan syariat Islam, (2) untuk memenuhi syarat dan kewajiban seorang anggota termasuk di dalamnya taat pada pimpinan secara konsisten, (3) untuk mewujudkan tujuan-tujuan dakwah.[39]

PKS menempatkan komitmen ideologis ini pada suatu posisi utama yang bersifat determinan bagi kelangsungan kader. Dalam

---

[36] *Ibid.*, iii.

[37] *Ibid.*, xiii.

[38] ART PKS 2005 Pasal 6.

[39] Wawancara dengan Ahmad Feri Firman Yusuf, Kepala Wilayah Dakwah III (2002–2005), anggota Majelis Syura PKS (2002–2010), di Jakarta, 2 November 2010.

hal ini, ‘senioritas’ atau pengakuan kematangan seorang kader yang membawanya pada jenjang yang lebih tinggi tidak terkait dengan berapa lama dia telah mengikuti kaderisasi.[40] Artinya, komitmen dan pemahaman yang kuat tidak dilihat melulu dari seberapa lama dia berada dalam barisan, melainkan pada seberapa besar komitmen ideologis itu ditunjukkan. Komitmen ini kemudian diformalkan dalam janji atau sumpah kader kepada partai yang semakin tinggi tuntutan ideologisnya seiring dengan semakin tingginya status atau jenjang karier dalam partai. Bagi kader, situasi ini adalah sesuatu yang normal dan dapat diterima. Mereka mengakui bahwa sebagai partai yang didorong oleh motivasi ideologis, kualitas pemahaman ideologi harus menjadi parameter keputusan dan hal ini termasuk dalam soal menentukan masa depan kader.

Situasi semacam ini menyebabkan mereka yang berada pada struktur elite partai, yakni pada level Majelis Syura, sebagai cerminan kepemimpinan tertinggi dalam partai, memperoleh kedudukan yang terhormat di mata para kader. Tidak semata karena posisi yang diembannya, namun lebih karena kader paham bahwa untuk mendapatkan posisi itu, sederet kualifikasi di atas rata-rata perlu dimiliki seorang anggota MS. Uniknya dalam PKS, kualifikasi itu relatif terlihat dan terkontrol serta terpelihara oleh kader-kader karena interaksi mereka yang intens. Sebagai konsekuensinya, orang tidak dapat serta merta mengklaim secara sepihak dirinya atau diri seseorang memang lebih baik dan mempertahankan klaim itu secara terus-menerus.

Proses pemilihan anggota Majelis Syura secara fundamental pada akhirnya adalah sekadar ‘pengukuhan pengakuan’ seluruh kader inti, kader di level tinggi, atas kader-kader yang memiliki ketinggian komitmen ideologis. Dengan demikian, apa pun yang nantinya

---

[40] Wawancara dengan Dr. Yon Mahmudi, Pengamat PKS dan Gerakan Tarbiyah, Dosen di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia dan salah satu kader yang menandatangani deklarasi pendirian PKS, di Depok, 6 Oktober 2010; dengan Selamat Nurdin, M.M., mantan pemimpin aktivis *tarbiyah* di Universitas Indonesia, anggota DPRD DKI Jakarta (2004–2014), di Jakarta, 22 Oktober 2010.

dilakukan oleh mereka, tetap diyakini oleh seluruh kader sebagai sebuah kebijakan yang berangkat dari dan untuk pengembangan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh partai. Inilah yang menyebabkan kedudukan elite di mata sebagian besar kader menjadi terhormat. Hal ini memperlihatkan juga penguasaan dan komitmen terhadap nilai-nilai itu pada akhirnya menjadi indikator di level mana seorang kader dianggap patut untuk berkiprah. Dengan kata lain, di samping kemampuan-kemampuan yang bersifat teknis dan strategis, komitmen ideologi menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam menentukan masa depan karier seorang kader. Pada kenyataannya, kader yang berhak untuk memilih memiliki informasi yang memadai dan memiliki hak untuk menilai kandidat-kandidat anggota Majelis Syura maka hanya kader-kader terbaik saja di setiap provinsi dari seluruh Indonesia yang berpotensi untuk terpilih.[41]

Kemudian, kesadaran untuk mencari rida Allah sebagai bagian komitmen ideologi membangun semangat untuk menghindari sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Kader memiliki kesadaran bahwa perhitungan dan kalkulasi politik harus didedikasikan demi kejayaan partai sebagai alat dakwah dan bukan kejayaan dirinya.[42] Sikap untuk tulus atau ikhlas berjuang menjadi etos kerja. Dalam hal ini, partai juga mengingatkan kader agar senantiasa ikhlas dalam berjuang dan menginsafinya sebagai bagian dari upaya untuk mencari rida Allah.[43] Pentingnya keikhlasan digambarkan oleh Tifatul Sembiring:

---

[41] Wawancara dengan Dr. Yon Mahmudi, Pengamat PKS dan Gerakan Tarbiyah, Dosen di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia dan salah satu kader yang menandatangani deklarasi pendirian PKS, di Depok, 6 Oktober 2010.

[42] Wawancara dengan Aus Hidayat Nur, Kepala Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktobber 2010; dengan Musa Abdillah, Ketua Departemen Kaderisasi DPC PKS Kelapa Dua, di Jakarta, 23 Oktober 2010; dengan Dr. Kamarudin, Pakar Partai Politik Islam dan Dosen di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, di Depok, 7 Oktober 2010.

[43] Wawancara dengan Aus Hidayat Nur, Ketua Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktobber 2010.

> Kenikmatan menjadi kader partai tidak akan ada tanpa loyalitas, kenikmatan loyalitas tidak akan ada tanpa ketaatan, kenikmatan ketaatan tidak akan ada tanpa pengorbanan, dan kenikmatan pengorbanan tidak akan ada tanpa keikhlasan.[44]

Pengedepanan sikap ikhlas ini juga menyebabkan diskusi soal jabatan di luar forum-forum yang tepat untuk membahasnya menjadi hal yang tabu di PKS.[45] Manakala partai menangkap gejala sikap ambisius seorang kader untuk mendapatkan satu jabatan atau posisi, hal itu justru akan berdampak kontra-produktif bagi perkembangan karier kader tersebut.[46] Situasi ini juga mendorong kader-kader PKS untuk menghindari pembahasan mengenai posisinya di partai. Di partai ini yang lebih kerap muncul adalah semangat untuk menyorongkan atau mempromosikan orang lain ketimbang dirinya untuk memegang posisi penting di partai. Sulit terlihat, misalnya, upaya *kasak-kusuk* mencari jabatan di partai ini. Malah bagi kebanyakan kader, memegang posisi pelengkap atau pendukung lebih disukai ketimbang memegang posisi kunci di partai.[47]

Di beberapa kasus tertentu, memang partai mengambil pendekatan pragmatis, misalnya, dengan memberikan bantuan terhadap kehidupan kader yang memang sangat membutuhkan atau mendukung usaha kader melalui bantuan keuangan sehingga kader dapat memperoleh standar hidup minimal.[48] Namun, hal ini dilakukan secara ketat dan terbatas. Pada umumnya, partai tetap hendak

---

[44] Lihat di Nur Hasan Zaidi, “Resepsi PKS”, *Republika*, 30 Juli 2005.

[45] Wawancara dengan Sitaresmi S., M.Psi., anggota Departemen Dakwah PK DPP (2000–2003), di Jakarta, 8 Oktober 2010.

[46] Wawancara dengan Sitaresmi S., M.Psi., anggota Departemen Dakwah PK DPP (2000–2003), di Jakarta, 8 Oktober 2010.

[47] Hampir seluruh pihak yang diwawancarai menunjukkan sikap ini. Penulis juga merasakan sikap ini ketika menghadiri dan mengamati pertemuan tahunan tingkat lokal untuk memilih pemimpin baru di “Musyawarah Daerah III DPD PKS: Depok”, di Sawangan, Depok, Jawa Barat, 28 November 2010.

[48] Wawancara dengan Hidayat, M.M., Anggota DPRD Kabupaten Tangerang (2005–2010), di Tangerang, 21 Oktober 2010.

mengembangkan hubungan ideologis antara elite dan kader. Di sini bahasa dan kepentingan yang mengikat adalah ideologi, bukan materi.

Pengaruh peran penting ideologi dan nilai-nilai bersama itu juga terlihat dari upaya partai menjelaskan latar belakang atau alasan diambilnya sebuah kebijakan politik. Di samping alasan-alasan rasional-strategis yang harus ada, konsistensi antara kebijakan itu dan nilai-nilai bersama atau ideologi menjadi hal yang amat diperhatikan kader. Kadang, kader akan merasa puas jika dari penjelasan yang diberikan terlihat adanya konsistensi atau setidaknya tidak ada perbedaan yang demikian jauh antara aspek normatif (ideologis) dan fakta (pelaksanaan ideologi).[49] Ketika kader terlihat demikian gelisah, partai melalui *murabbi* akan mengedepankan pendekatan ideologis dan menekankan pesan bahwa ini semua adalah "demi kepentingan dakwah dan keberlanjutan pelaksanaan nilai-nilai Islam".

Walaupun tampak terlihat naif untuk sepenuhnya percaya bahwa komitmen ideologis merupakan faktor penting yang memotivasi elite atau partai untuk bertindak, dalam kasus PKS dapat terlihat bahwa partai tidak mudah untuk dapat menyimpang atau meninggalkan diri dari ideologinya manakala melakukan manuver politik atau membuat kebijakan. Partai pada akhirnya harus mampu memberikan 'rasionalisasi' yang membenarkan kebijakan yang diambilnya, yang pada dasarnya tidak lain adalah serangkaian pertimbangan-pertimbangan ideologis.[50] Sepanjang rasionalisasi itu bersifat logis dan masih sejalan dengan idealisme partai, kader yang melihat dirinya sebagai alat perjuangan (dakwah) akan sepenuhnya menaati dan melaksanakannya. Menurut Prihandoko, situasi akan tidak menguntungkan bagi partai atau sangat kontra-produktif, terutama terkait dengan pemeliharaan rasa percaya, jika partai gagal melakukannya.[51] Kondisi semacam ini

[49] Wawancara dengan Dr. Prihandoko, Ketua DPP PKS Depok (2004–2007) di Depok, 5 Oktober 2010.

[50] Wawancara dengan Sigit Sosiantomo, Koordinator Wilayah Jawa Timur dan Bali PKS (2005–2009), di Jakarta, 25 Oktober 2010.

[51] Wawancara dengan Dr. Prihandoko, Ketua DPP PKS Depok (2004–2007) di Depok, 5 Oktober 2010.

pada gilirannya membuat perilaku pragmatis atau mementingkan diri sendiri menjadi sulit untuk berkembang di partai ini.

Selain itu, kondisi di atas menunjukkan bahwa hubungan antara partai dan kader relatif telah terbebas dari ikatan yang bersifat material, mengingat ideologi atau nilai bersama telah menjadi sesuatu yang memotivasi dan menggerakkan kader-kader untuk bergabung atau tetap di dalam partai. Di sini posisi partai bagi kader telah lebih dari sekadar "organisasi dengan sejumlah tugas yang harus dikerjakan", melainkan telah menjadi bagian dari kehidupan personalnya. Partai bukanlah sekadar alat yang dapat dengan mudah dicampakkan. Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, menurut Randall, Svasand, dan Surbakti, ketika ideologi atau nilai bersama menjadi rujukan terpenting dalam partai, hal itu menunjukkan eksistensi dimensi pelembagaan di partai tersebut.

Namun, seiring dengan perjalanan waktu, ada beberapa perkembangan menarik di PKS. Beberapa fenomena baru muncul di partai ini. Banyak kader saat ini, misalnya, yang cenderung lebih ekspresif di dalam menyampaikan pendapat dan kritiknya terhadap pemimpin partai. Bahkan mulai ada kader yang berani mengkritik tajam melalui surat kabar tentang cara pemimpin partai menangani isu-isu nasional.[52] Di masa lalu, sikap ini menjadi sesuatu yang tidak biasa atau sulit terjadi. Kemudian, sejumlah kader saat ini juga cenderung kurang memiliki komitmen untuk mengikuti instruksi partai. Mereka menjadi terbiasa mencari alasan untuk menghindari tugas. Di salah satu daerah di Jakarta Timur, hal ini telah memicu pengurus partai setempat untuk bersikap tegas dengan meminta kader-kader memperbaharui lagi komitmennya dengan menyebarkan

[52] Sapto Waluyo, salah satu kader yang mengkritik perilaku politik pemimpin partai yang kadang-kadang membingungkan anggota dengan memberikan pendapat berbeda tentang kasus-kasus sensitif termasuk pembentukan koalisi dengan Presiden Yudhoyono sebelum Pemilu Presiden 2009. Lihat pendapatnya di Sapto Waluyo, "Komunikasi Politik PKS", di *Republika*, 1 Mei 2009.

pernyataan kesediaan mengikuti instruksi partai yang ditandatangani oleh kader itu sendiri.[53]

Sebagian pihak meyakini bahwa 'fenomena ketidaktaatan' itu terkait terutama dengan efek kejenuhan setelah bertahun-tahun terlibat dalam kegiatan politik praktis. Pihak lain berkeyakinan bahwa fenomena ini adalah akibat dari *murabbi* yang kurang memberikan inspirasi, yang pada akhirnya menurunkan komitmen kader terhadap partai.[54] Bagi sebagian pihak, hal ini semata merupakan cerminan kurangnya komitmen untuk terus menerus aktif di *halaqah*.[55]

Walaupun fenomena semacam ini secara umum tidak mengganggu keberadaan partai dan terjadi dalam proporsi yang kecil, dalam perkembangannya PKS memang tampak menghadapi kesulitan dalam mengontrol kadernya. Sebuah kenyataan pula bahwa kegiatan-kegiatan partai ini terlihat semakin kurang semarak atau meredup.

Lepas dari itu, selain kenyataan negatif ini, PKS merupakan partai yang relatif masih mampu mengontrol spirit anti-pragmatisme dan mempertahankan nilai-nilai bersama di sebagian besar kadernya, yang pada akhirnya melindungi partai dari perilaku mementingkan diri sendiri dan orientasi eksklusif. Situasi internal ini menjadi modal penting untuk pengembangan soliditas partai.

2. Keberadaan Spirit Kolektivisme

Situasi lain yang muncul dalam PKS adalah kesadaran untuk berjemaah. Kesadaran untuk memperkuat barisan dan adanya nilai lebih jika memperjuangkan sesuatu secara bersama menjadi sesuatu

---

[53] Wawancara dengan Umar Salim Basalamah, Wakil Sekretaris Jenderal PKS (2002), dan sekretaris pribadi Hidayat Nur Wahid (mantan Presiden PKS dan Ketua MPR RI), di Jakarta, 12 Oktober 2010.

[54] Wawancara dengan Akmal Burhanuddin, mantan aktivis tarbiyah dan mahasiswa di Mesir yang bergabung dengan PKS setelah menyelesaikan studinya, di Jakarta, 24 Oktober 2010.

[55] Wawancara dengan Aus Hidayat Nur, Ketua Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktober 2010.

yang prinsipil. Dalam hal ini, seorang kader menyatakan bahwa kader disadarkan bahwa rida Tuhan itu ada dalam kelompok yang berjuang demi kepentingan dakwah. Menjadi bagian dari jemaah yang memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan kepentingan Islam memunculkan sebuah kepuasan tersendiri. Situasi ini dikondisikan dengan baik melalui media *halaqah* dan berbagai kegiatan partai, dengan segenap metode dan aktivitas tarbiyah, yang menumbuhkan rasa ketergantungan untuk selalu berada dalam kelompok.

Kesadaran berjemaah ini menuntut kader mendahulukan kepentingan jemaah atau partai ketimbang dirinya. Semangat pengorbanan direfleksikan, misalnya, dengan tetap turut serta dalam kegiatan partai di situasi yang sulit,[56] ikhlas memberikan bantuan keuangan untuk aktivitas partai,[57] dan bahkan menyabung nyawa membantu partai dalam penyelenggaraan sebuah kegiatan penting.[58] Di Aceh, misalnya, seorang kader yang sedang hamil bersedia bergabung dengan kegiatan partai di sebuah kampung terpencil yang berlokasi sekitar 70 km dari rumahnya. Dia pergi sendirian ke lokasi kegiatan partai dengan mengendarai motor.[59]

Semangat untuk mementingkan jemaah ini juga menimbulkan perasaan untuk bekerja demi kebanggaan jemaah. Sitaresmi menjelaskan bahwa kader akan merasa puas jika dia mampu berkontribusi bagi kebesaran partai dengan prestasi yang diraihnya, meski di luar persoalan politik. Kemampuan untuk membagi prestasi

---

[56] Solikhin Abu Izzudin, *Quantum Tarbiyah*, (Solo: Bina Insani, 2006). Wawancara dengan Kemal A. Stamboel, Kepala Badan Penasihat dan Dewan Pakar PKS, anggota Parlemen (2009–2014), di Jakarta, 8 Oktober 2010.

[57] Wawancara dengan Dr. Yon Mahmudi, Pengamat PKS dan Gerakan Tarbiyah, Dosen Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia dan salah satu kader yang menandatangani deklarasi pendirian PKS, di Depok, 6 Oktober 2010; dengan Kemal A. Stamboel, Kepala Badan Penasihat dan Dewan Pakar PKS, Anggota Parlemen (2009–2014), di Jakarta, 8 Oktober 2010.

[58] Wawancara dengan Hidayat, M.M., anggota DPRD Kabupaten Tangerang (2005–2010), di Tangerang, 21 Oktober 2010.

[59] "Mereka yang Bergelimang Darah Demi Dakwah", in *http://pks-jakarta.or.id/opini/item/67-mereka-yang-bergelimang-darah-demi-dakwah*.

dan kesenangan kepada partai, jelas Sitaresmi, merupakan sebuah kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri yang dirasakan oleh kader.[60] Dia mencontohkan, misalnya, keberhasilan di dunia akademis akan pula didedikasikan untuk partai, dengan harapan pencapaian itu akan meningkatkan prestise partai di mata masyarakat. Dia menegaskan bahwa hal inilah yang membuat kader merasa seperti di rumah sendiri karena semangat menjaga kebersamaan, di mana rasa bangga akan sesuatu dirasakan oleh seluruh kader dan seluruh kebaikan yang ada menjadi kebaikan kolektif.[61]

Sebaliknya, kader akan kecewa dan menolaknya apabila mereka merusak atau memperburuk citra positif partai. Di kasus lain, kader lebih suka meninggalkan partai setelah melakukan sesuatu yang tidak berkenan seperti pergi ke tempat pijat.[62] Menurut kader itu, hal ini karena secara potensial akan memberikan citra buruk terhadap partai walaupun partai belum memutuskan masa depannya.[63] Di Provinsi Jambi, Zulhalmi Al Hamidi, seorang kader memilih untuk meninggalkan partai, setelah media lokal menyebut namanya sebagai salah satu orang yang datang ke sebuah panti pijat di kampungnya. Walaupun bukan sebuah kejahatan, adanya kesan negatif di mata masyarakat terhadap panti pijat sebagai tempat yang kadang digunakan untuk menutupi prostitusi ilegal mendorong Al Hamidi untuk keluar dari partai untuk menyelamatkan wajah partai.[64] Partai menerima keputusannya. Hal yang menarik adalah panti pijat yang dikunjunginya pun sebenarnya legal dan tidak melakukan praktik

[60] Wawancara dengan Sitaresmi S., M.Psi., anggota Departemen Dakwah DPP PK (2000–2003), di Jakarta, 8 Oktober 2010.

[61] Wawancara dengan Sitaresmi S., M.Psi., anggota Departemen Dakwah DPP PK (2000–2003), di Jakarta, 8 Oktober 2010.

[62] "Kader PKS Jambi Tertangkap di Panti Pijat", *www.antaranews.com*

[63] Wawancara dengan Sitaresmi S., M.Psi., Anggota Departemen Dakwah DPP PK (2000–2003), di Jakarta, 8 Oktober 2010.

[64] *http://www.inilah.com/read/detail/81234/anggota-dprd-pks-pijat-mundur/*

prostitusi.[65] Bentuk sikap ini hanya mungkin apabila kader memilki rasa kepemilikan yang mendalam terhadap partai atau apa yang Huntington sebut sebagai "berharga untuk keberadaanya" (*value for itself*), yang menunjukkan eksistensi pelembagaan.[66]

Hal lain yang juga terjadi adalah kesediaan untuk mengorbankan rasionalitas pribadi manakala berhadapan dengan rasionalitas partai atau pemimpin. Sikap ini berangkat dari ditanamkannya nilai ketaatan dan kepercayaan kepada para kader dengan cukup sistematis. Sikap taat ini bahkan mengakui bahwa pemikiran seorang kader tidak cukup komprehensif dan luas dibandingkan dengan pemikiran partai dan para *qiyadah* sehingga adalah wajar jika pemikiran mereka itu harus disingkirkan dan ditiadakan. Kalau pun masih meyakini pemikiran itu, kader dengan tanggap akan menempatkannya sebagai sesuatu yang bersifat personal, dan tidak berupaya menyebarkannya kepada pihak lain. Kebanyakan kader cenderung akan sekadar *ngedumel*, namun tetap melakukan apa yang telah diputuskan oleh partai dan para pemimpin. Pernyataan dari Sumiyanto, kader partai, merepresentasikan hal ini, "Saya kecewa, tetapi sebagai kader saya harus menaati keputusan itu."[67]

Nilai kolegialisme ini juga memberikan dampak terhadap proses pembuatan keputusan. Di PKS, keputusan yang dibuat pada umum-nya merupakan hasil dari proses konsultasi atau musyawarah yang merefleksikan semangat berjemaah. Dalam forum-forum musyawarah itu, berbagai masalah dibahas bersama atau secara kolegial. Para peserta terdorong untuk mampu meyakinkan anggota lain dengan memberikan argumen yang jelas. Keberadaan tokoh yang dihormati, biasanya didapuk untuk memegang posisi sebagai ketua forum, dan tidak menjadi penghalang bagi anggota Majelis Syura lainnya,

[65] Wawancara dengan Sitaresmi S., M.Psi., Anggota Departemen Dakwah DPP PK (2000–2003), di Jakarta, 8 Oktober 2010.

[66] Samuel Huntington, *Political Order in Changing Society*, (New Haven: Yale Univerity Press, 1968), 12–15.

[67] Muhammad Syihabuddin, "Majelis Syura, Alternatif 'Demokrasi-Islam', dan Keta-atan Kader PKS", *www.syihabasfa.wordpress.com*, 18 Desember 2007.

termasuk bahkan kader-kader muda, untuk berbicara menyampaikan gagasan-gagasan.[68]

Selain itu, adanya semangat untuk bersama jemaah melahirkan rasa ketergantungan untuk selalu di dalamnya. Kader merasa berada dalam sebuah komunitas yang disatukan oleh keyakinan atau nilai-nilai yang sama. Kader merasa bebas untuk menyampaikan argumen dan diperlakukan sebagai saudara ketimbang sebagai musuh. Hubungan antarkader menjadi layaknya sebuah keluarga yang dapat saling memahami, membagi, dan memberikan solusi. Dalam nuansa ini partai telah menjelma menjadi apa yang disebut oleh Selznick sebagai perangkat atau alat 'kepuasan personal' yang menandai telah terlembaganya partai tersebut.[69] Situasi ini pada akhirnya membantu partai dalam membangun identitas bersama dan juga pada akhirnya mendukung proses resolusi konflik.

Akan tetapi, seiring dengan perjalanan waktu, situasi ini tidak berdampak sama kepada seluruh kader. Sebagian kader lebih suka keluar dari jemaah dan hanya menjadi pendukung atau simpatisan partai karena mereka menganggap dirinya sudah tidak cocok di domain dan kegiatan politik.[70] Sejumlah kader yang kecewa bahkan memutuskan untuk sepenuhnya meninggalkan partai, yang sebagian kecil di antaranya menjadi sangat kritis kepada partai.[71] Meskipun demikian, secara umum partai masih mampu berperan sebagai institusi yang memenuhi kepuasan personal dan idealisme kolektif.

---

[68] Wawancara dengan Sigit Sosiantomo, *Regional Coordinator for East Java and Bali of PKS (2005–2009)*, di Jakarta, 25 Oktober 2010; dengan Dr. Yon Mahmudi, Pengamat PKS dan Gerakan Tarbiyah, Dosen di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia dan salah satu kader yang menandatangani deklarasi pendirian PKS, di Depok, 6 Oktober 2010; dengan Ahmad Feri Firman Yusuf, Kepala Wilayah Dakwah III (2002–2005), Anggota Majelis Syura PKS (2002–2010), di Jakarta, 2 November 2010.

[69] Selznick, *Leadership in Administration: A sociological Interpretation*, 17.

[70] Wawancara dengan Noviyanti Utaminingsing, kader PKS, di Jakarta, 9 Oktober 2010.

[71] Wawancara dengan Hurriyah MA, kaderisasi PKS, Pengamat dan Dosen di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, di Depok, 29 Oktober 2010.

Hal ini menyebabkan semangat kebersamaan atau komitmen kolektif yang turut menjaga soliditas partai tetap dapat relatif terpelihara. Bagian berikut ini membahas secara lebih dalam dampak situasi di atas terhadap partai.

C. Terjaganya Soliditas Internal

Adanya semangat kebersamaan atau komitmen kolektif terhadap nilai bersama menghasilkan dua hal penting yang akhirnya berperan bagi tetap terjaganya soliditas partai. Pertama adalah terpupuknya keyakinan pada kader bahwa partai merupakan alat mewujudkan idealisme. Meskipun masih tampak kelemahan di beberapa aspek, kader masih percaya bahwa mereka berada di dalam wahana politik yang benar untuk mencapai nilai-nilai bersama yakni mewujudkan tujuan-tujuan dakwah. Keyakinan bahwa nilai-nilai bersama masih menjadi tujuan partai yang pada akhirnya menyebabkan upaya-upaya untuk menawarkan ideologi alternatif atau keuntungan material tidak mudah menarik perhatian kader. Hal ini juga melindungi partai dari rongrongan tokoh atau kelompok yang bermaksud mengambil alih kepemimpinan atas nama memperbaiki situasi internal partai. Dengan kata lain, upaya untuk membuat terciptanya kubu alternatif di dalam PKS tidak mudah diwujudkan.

Kedua, komitmen kolektif atas dasar kesamaan nilai-nilai bersama mendorong kader untuk lebih mendahulukan harmoni partai, ketimbang ambisi pribadi. Komitmen ini menjadi alasan bagi sebagian besar kader PKS untuk tetap di dalam kelompok (jemaah), atau setidaknya menghindari melakukan sesuatu yang dapat membahayakan kesatuan jemaah. Keberadaan komitmen ini mencegah kader mengambil keputusan yang gegabah ketika merespons sebuah situasi sulit, yang berpotensi mengguncang soliditas partai. Di sebagian besar kasus, sepanjang kader tidak melihat ada bukti yang menunjukkan pelanggaran nyata atas nilai bersama atau ideologi, mereka cenderung akan melihatnya sebagai sesuatu yang (masih) dapat diterima.

Kedua hal di atas tampak terlihat dalam beberapa kasus sensitif. Dalam beberapa kasus sensitif, adanya situasi ini menyebabkan pertarungan atau perdebatan menjadi sebatas persoalan penentuan cara yang dianggap terbaik. Hal ini menyebabkan potensi konflik itu sendiri tereduksi pada domain pembuatan kebijakan saja, yakni pada wilayah strategi dan bukan masalah pokok yang bersifat ideologis. Persoalan strategi itu sendiri dipandang sebagai 'persoalan cabang' (*furu'*) atau persoalan pilihan-pilihan cara yang diyakini hanya masalah model penerapan atau implementasi keyakinan ideologi dan konsep perjuangan, yang pada persoalan ideologi dipandang telah selesai. Mardani Ali Sera mengaitkan situasi ini dengan "memilih sarana atau kendaraan terbaik setelah menyepakati kemana akan pergi."[72] Apalagi pada prinsipnya, kader percaya bahwa semua itu pada akhirnya demi kebaikan bersama. Hal ini juga ditopang dengan mekanisme musyawarah dan juga *voting* yang menyebabkan ada penyaluran ekspresi formal bagi para kader. Dengan kuatnya keyakinan kolektivisme dan demi perjuangan dakwah maka berbagai alternatif yang bersifat teknis dan strategis itu bukan kendala yang berarti dalam menjaga soliditas partai.

Di berbagai kasus pelik yang berpotensi memunculkan perpecahan dalam partai ini, perbedaan pada level strategilah sesungguhnya yang kerap menjadi pemicu perbedaan dan pertentangan. Sementara itu, persoalan mendasar yakni kemaslahatan dakwah sebagai nilai utama tetap tidak terganggu. Di samping itu, karena kebijakan itu diputuskan secara prosedural, ditambah dengan adanya rasa percaya, dan rasionalisasi ideologis "untuk kepentingan dakwah" menyebabkan potensi konflik dalam pembuatan kebijakan relatif teredam. Hal ini tentu pada gilirannya cukup memudahkan proses penyelesaian konflik. Jalinan kepentingan ideologis dan peran infusi ideologi inilah yang dapat turut meredam potensi konflik pada beberapa momen cukup genting yang dihadapi oleh partai ini.

---

[72] Wawancara dengan Dr. Mardani Ali Sera, Wakil Ketua MPP PKS (2010–2015), di Jakarta, 6 Oktober 2010.

Pada Pilpres 2004, misalnya, perbedaan pandangan antarkader disebabkan oleh perbedaan dalam melihat objek figur capres dalam kemaslahatan dakwah. Amien Rais bagi sebagian kalangan dipandang strategis karena nilai jualnya sebagai tokoh reformasi dan tokoh Islam terkemuka. Sebagai pemimpin agama, Rais akan memberikan peluang yang signifikan dan akses kepada PKS untuk meningkatkan gerakan *dakwah*-nya sebagai konsesi dukungannya.[73] Bagi kalangan ini, Wiranto tidak strategis dilihat dari citra politiknya sebagai orang Golkar dan tokoh militer yang belum terbebas seutuhnya dari masalah pelanggaran HAM.

Akan tetapi, bagi pendukung Wiranto, terutama kalangan pengurus wilayah, Amien Rais tidak strategis karena 'nilai jual'-nya tidak tinggi. Mereka menganggap Rais hanya populer di antara kaum Islam modernis, kelompok intelektual, dan profesional di wilayah perkotaan. Representasi mereka sangatlah terbatas. Pendukung Wiranto yang terutama adalah pemimpin partai di tingkat lokal menganggap popularitas Wiranto lebih baik daripada Rais di tingkat akar rumput atau wilayah terpencil.[74] Kemudian, dengan dukungan dari Partai Golkar, sebagai pemenang Pemilihan Legislatif 2004, Wiranto terlihat memiliki situasi yang lebih menjanjikan. Oleh karena itu, bagi mereka sangat bernilai bagi dakwah apabila PKS mendukung kandidat yang akan memiliki potensi yang lebih baik untuk memenangi pemilihan umum. Kemudian, mereka juga melihat Wiranto sebagai tokoh yang cukup bersimpati terhadap gerakan dakwah,[75] setidaknya tidak memiliki *track record* yang buruk terhadap perkembangan dakwah Islam.

---

[73] R. Alex Sandi, *Sikap Politik Partai Keadilan Sejahtera terhadap Pilpres 2004 dan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono: Studi Kasus Psikologi Politik Partai Dakwah*, Tesis, (Depok: Kajian dan Psikologi Islam, Kajian Timur Tengah dan Islam, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2006), 120–121.

[74] Wawancara dengan Aus Hidayat Nur, Kepala Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktober 2010; dengan Ahmad Feri Firman Yusuf, Kepala Wilayah Dakwah III (2002–2005), anggota Majelis Syura PKS (2002–2010), di Jakarta, 2 November 2010.

[75] Defy Ruspiyandi, "Menebak Arah Dukungan PKS", *Pikiran Rakyat*, 21 Juni 2004.

Kasus di atas menunjukkan bahwa keberlanjutan prospek dakwah adalah isu utama yang dipegang setiap kelompok. Di balik perbedaan pilihan, mereka tetap berbagi tujuan, kepentingan, dan cita-cita yang sama, yakni menyokong perkembangan dakwah. Kepentingan fundamental atas nilai bersama inilah yang mendorong mereka untuk mempertahankan hubungan baik dan mencari resolusi terhadap perbedaan itu. Kenyataan membuktikan bahwa akhirnya, seluruh kader yang mendukung Wiranto dapat menerima keputusan partai yang merekomendasikan Amien Rais sebagai capers pada Pilpres 2004. Di hadapan media, pihak-pihak yang berseberangan terlihat bersatu pada saat pengumuman capres yang direkomendasikan PKS.

Dalam kasus BBM, kasus rumit lainnya, komitmen untuk menjaga kesatuan partai menjadi unsur penting. Dalam hal ini, kesediaan untuk menyampingkan kepentingan personal menjadi salah satu alasan utama bagi sebagian besar kader untuk menerima keputusan pemimpin partai untuk tetap berada di dalam kabinet Presiden Yudhoyono. Walaupun banyak kader mengekspresikan kekecewaan mereka dengan keputusan kontroversial pemerintah memotong subsidi BBM sebelum partai mengambil keputusan,[76] sebagian besar kader pada akhirnya dapat menerima kebijakan partai untuk tetap berada di dalam koalisi. Hal ini tidak saja karena pemerintah sepakat untuk memberikan kompensasi kepada rakyat atas kenaikan harga BBM seperti yang dituntut partai, namun juga karena pemimpin partai yang notabene pemimpin jemaah telah memutuskan tentang kebijakan itu.

Berkenaan dengan hal ini, bagi Trianto Prabowo, kemampuan untuk mencari dan menjaga tujuan akhir sebagai basis semangat kebersamaan dan dalam hal tertentu sikap untuk memercayai pemimpin menjadi faktor utama yang memengaruhi kader menerima keputusan

---

[76] Orang-orang ini termasuk Sekretaris Jenderal Anis Matta dan Mashadi, dua DPW (di DKI Jakarta, DI Yogyakarta) dan satu DPD PKS (di Solo). "Tak Ada Koalisi Tanpa Perubahan", di *Saksi*, No. 6/VIII/30 November 2005, 7–9. "Ini Politik Bos", *Tempo*, 16 Oktober 2005.

untuk tetap di koalisi.[77] Banyak di antara kader yang pada awalnya tidak sepakat dengan keputusan ini akhirnya berubah pikiran dan setuju mendukung kebijakan partai. Menurut Prabowo, sekitar 73% kader yang tadinya menolak berbalik menyatakan mendukung dan sisanya tetap berpendirian untuk menolak, namun menyatakan tetap setia dan menerima keputusan partai.[78] Bagi yang tetap bersikeras menolak kebijakan partai, keputusan itu disimpan sebagai keputusan individual, dan tetap menghormati nilai-nilai bersama dalam partai. Sementara itu, sikap mereka yang beralih menjadi mendukung kebijakan partai dilandasi keyakinan bahwa pilihan yang ditetapkan oleh pemimpin adalah pilihan terbaik, mengingat kapasitas keilmuan dan komitmen yang mereka miliki.[79] Di sini terlihat bahwa nilai-nilai ketaatan dan kebersamaan yang tumbuh dan berkembang menjadi katup pengaman dari terciptanya disharmoni dan perpecahan partai.

Pada kasus yang terkait dengan partai terbuka di tahun 2008, nilai-nilai bersama beroperasi pada level kesediaan untuk menerima arahan mengenai perkembangan level dakwah yang tengah dialami oleh partai dewasa ini. Dalam hal ini, dakwah telah dipahami oleh elite partai dengan jauh lebih kontekstual dan disesuaikan dengan perkembangan medan dakwah yang semakin menuntut moderasi dan keterbukaan. Para *qiyadah* kemudian melakukan rasionalisasi kebijakan politik itu dengan berupaya meyakinkan makna dakwah sebagai sesuatu hal yang terkait dengan kerja-kerja yang inklusif. Tuntutan untuk meraih dukungan politik, demi teraihnya jabatan publik sebagai salah satu syarat agar pada gilirannya dapat menopang dakwah, juga dikemukakan oleh mereka.

Walaupun pemimpin berupaya merasionalisasi kebijakan mereka, tetapi potensi ketidaksepakatan masih tinggi. Ini terjadi karena

---

[77] Triatno Yudho Prabowo, *Pengaruh Taklim Rutin terhadap Perilaku Politik Kader Partai Keadilan Sejahtera dalam Perspektif Teori Intergroup Relation*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2006).

[78] *Ibid.*, 49.

[79] *Ibid.*, 54, 60, dan 69.

banyak kader belum memiliki pemahaman yang sama. Bagi kader yang menentang hal ini, keputusan itu merupakan 'lompatan besar' yang bahkan mengindikasikan kegagalan partai untuk menjaga karakteristiknya.[80] Mereka juga berasumsi bahwa keputusan ini adalah simbol pragmatisme. Idealisme partai dikorbankan hanya untuk memperoleh lebih banyak dukungan atau kursi. Sebagian kader yang cenderung menolak ide partai Islam terbuka melihat kebijakan itu sebagai hal yang sulit untuk dilakukan.

Di lain pihak, mereka yang mendukung ide keterbukaan ini percaya bahwa partai membutuhkan kebijakan baru agar lebih diterima di masyarakat Indonesia yang pluralis dan pada akhirnya dapat memberi pengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai tidak dapat berpengaruh apabila tidak diterima oleh masyarakat. Bagi mereka, kebijakan untuk lebih inklusif bukan sesuatu yang bertentangan dengan esensi dakwah.[81] Bahkan menurut mereka, karakteristik dakwah yang baik adalah bersifat fleksibel agar memperoleh perhatian rakyat dan juga dalam hal menyampaikan pesan.

Akan tetapi, perbedaan pendapat antarkader tidak mengarah pada perpecahan. Semangat ketaatan mencegah partai dari konflik yang serius. Walaupun pada kasus ini potensi adanya perdebatan panjang antarpendukung sangatlah terbuka dan adanya komitmen terhadap kesatuan partai atau keutuhan jemaah menyebabkan PKS dapat mempertahankan soliditas partai. Situasi ini secara konstan dapat dipertahankan hingga partai akhirnya benar-benar menjelmakan diri menjadi partai Islam terbuka. Setelah partai memutuskan

---

[80] Wawancara dengan K.H. Yusuf Supendi, Lc., anggota DSP PKS (2000–2005) dan anggota Parlemen (2004–2009), di Jakarta, 3 November 2010.

[81] Wawancara dengan Amri Yusra, M.Si., Ketua DPD PKS Depok (2002–2004), anggota Parlemen Kota madya Depok, Jawa Barat, (2004–2009) dan Dosen di Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, di Depok, 7 Oktober 2010. Wawancara dengan Dr. Yon Mahmudi, Pengamat PKS dan Gerakan Tarbiyah, Dosen Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia dan salah satu kader yang menandatangani deklarasi pendirian PKS, di Depok, 6 Oktober 2010. Wawancara dengan Hidayat, M.M., anggota Parlemen Kabupaten Tangerang (2005–2010), di Tangerang, 21 Oktober 2010.

lebih terbuka di dalam rekrutmen kader, sebagian besar kader mau mengakhiri debat ini.

Hingga saat ini, sebagian besar lebih suka memahami instruksi pemimpin dan melaksanakannya. Walaupun sejumlah mantan kader sangat mengkritisi kebijakan ini, banyak kader PKS yang tidak mengeluhkan 'penyesuaian politik' itu dan tidak menggunakannya untuk menyerang partai. Kesadaran untuk menjaga kesatuan partai tetap muncul dalam situasi sulit. Sebagian besar kader juga menolak mengikuti FKP, yang kemudian menjelma menjadi ajang pertemuan yang cair antarsesama kader partai yang kecewa. FKP dalam perkembangannya menjadi semacam kelompok sempalan yang kebanyakan membahas sisi-sisi negatif sebagian para pemimpin PKS, kesalahan-kesalahan partai, dan sejauh mana partai ini menyimpang dari idealisme awalnya.

Belakangan, tidak sedikit mereka yang sempat bergabung dengan kelompok sempalan itu memutuskan kembali.[82] Hal ini membuktikan, menurut sejumlah pihak yang diwawancarai, bahwa hati mereka masih berada di dalam jemaah.[83] Dalam hal ini, partai menjadi begitu berharga bagi kader dan memberikan kepuasan personal yang tidak mudah tergantikan.

Meskipun demikian, ada pula mantan kader lainnya lebih suka terus bersifat kritis atas bekas partainya.[84] Salah satu di antaranya adalah Yusuf Supendi, yang menyatakan resistensinya melalui media massa dan menyerang pemimpin partai secara langsung. Hal yang

---

[82] Wawancara dengan Sitaresmi S., M.Psi., anggota Departemen Dakwah PK DPP (2000–2003), di Jakarta, 8 Oktober 2010; dengan Aus Hidayat Nur, Ketua Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktobber 2010; dengan Musa Abdillah, Ketua Departemen Kaderisasi DPC PKS Kelapa Dua, di Jakarta, 23 Oktober 2010.

[83] Wawancara dengan Musa Abdillah, Ketua Departemen Kaderisasi DPC PKS Kelapa Dua, di Jakarta, 23 Oktober 2010.

[84] Wawancara dengan Hurriyah, M.A., Pengamat Kaderisasi PKS dan Dosen di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, di Depok, 29 Oktober 2010.

menarik adalah dia tidak menyerang partai karena telah terjadi penyimpangan ideologi. Akan tetapi, dia menuduh dua pemimpin partai, yaitu Luthfi H. Ishaaq dan Anis Matta melakukan perilaku yang tidak pantas, yaitu melakukan serangan pribadi terhadapnya, selain persoalan korupsi.[85] Dia kemudian juga menuduh sepuluh pemimpin PKS melanggar aturan main partai ketika memecatnya dari partai.[86]

Namun, sikap Supendi untuk membongkar kebobrokan pimpinan partai tidak berdampak serius secara internal. Menurut Sembiring, seluruh kader PKS di seluruh wilayah negeri ini masih solid dan tidak terpengaruh manuver politik Yusuf Supendi.[87] Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya menyerang partai bahkan dari mantan kalangan internal tidaklah mudah membuat kegelisahan apalagi membuat faksi di dalam partai ini.

Pembahasan di atas memperlihatkan bahwa komitmen untuk menjaga nilai-nilai bersama memberikan dampak positif terhadap soliditas partai. Adanya kesamaan dan pemeliharan nilai-nilai sekali lagi merupakan modal dasar. Para mantan kader yang tidak puas pun tidak serta-merta dapat membuat keretakan internal. Mereka sekadar "mengkritisi untuk kemudian meninggalkan dengan baik-baik atau sembunyi-sembunyi". Dalam perkembangannya muncul tiga tren yang terjadi, yakni mereka yang benar-benar meninggalkan partai, mereka yang menunggu perkembangan sambil melihat seberapa besar konsistensi implementasi ideologi dilakukan oleh partai di masa-masa datang, dan mereka yang kembali ke partai dengan suka rela. Kalangan kader PKS menyatakan bahwa perilaku yang tidak destruktif yang dikedepankan oleh mantan kader yang kecewa sebenarnya menunjukkan bahwa dalam hati mereka masih terbersit

[85] "Presiden PKS Dilaporkan ke BK DPR", *Republika*, 17 Maret 2011.

[86] "Yusuf Supendi Gugat 10 Petinggi PKS ke PN", di *http://us.politik.vivanews.com/news/read/217843-yusuf-supendi-gugat-10-petinggi-pks-ke-pn*.

[87] "Tifatul: PKS Tetap Solid", *Republika*, 26 Maret 2011.

cinta pada gerakan ini.[88] Meski tentu saja kalangan yang beralih dari sayang kemudian menjadi demikian membenci gerakan ini bukan tidak ada sama sekali.[89]

D. Ringkasan

PKS memperlihatkan kemampuan yang baik untuk menjaga dan mengembangkan tujuan-tujuan dakwah sebagai nilai-nilai bersama, untuk digunakan sebagai referensi utama di partai sekaligus sebagai sebuah identitas. Partai ini juga tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan infusi nilai melalui *halaqah*. Identitas sebagai *jundi* yang menjadi tugas utama untuk mencapai rida Allah telah merata dirasakan sebagian besar kader dan menjadi identitas yang melahirkan komitmen untuk menjaga idealisme partai dan menganggap hal itu sebagai prioritas mereka. Komitmen ini juga mereduksi sikap yang menganggap partai hanyalah sebagai alat yang mudah dicampakkan *disposable tool*, dengan kompensasi material dan keuntungan pribadi. Meski kerap mengalami goncangan kesadaran untuk menjaga komitmen yang mempertaruhkan eksistensi partai, upaya menjaga asa bagi perjuangan menegakkan dakwah masih tetap ada. Semua hal tersebut menyebabkan partai ini tetap berdiri kokoh. Sejumlah peristiwa rumit yang terjadi di partai ini dengan potensi memberikan guncangan hebat, tidak juga meluluhlantakkan partai. Singkatnya, dengan keberadaan infusi nilai bersama yang relatif memadai, PKS mampu menghindari konflik hingga titik yang destruktif dan secara konsisten mampu menjaga soliditasnya.

---

[88] Wawancara dengan Musa Abdillah, Ketua Kaderisasi DPC PKS Kelapa Dua, di Jakarta, 23 Oktober 2010.

[89] Wawancara dengan Hurriyah, M.A., Pengamat Kaderisasi PKS dan Dosen di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, di Depok, 29 Oktober 2010.

BAB XIII
PERBANDINGAN DAN KESIMPULAN

A. Perbandingan

Buku ini memusatkan perhatian pada peran pelembagaan sebagai salah satu hal terpenting bagi hadirnya perpecahan dan soliditas partai. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, ada empat dimensi yang terkait dengan pelembagaan yang patut diperhatikan dalam melihat dan mengkaji perpecahan dan soliditas sebuah partai. Keempatnya meliputi (1) pengambilan kebijakan atas dasar aturan main yang berlaku, (2) kaderisasi yang sistemik sebagai sarana sosialisasi dan penentuan karier seseorang, (3) adanya mekanimse resolusi konflik (CRM) yang dapat memutuskan secara otoritatif penyelesaian dan persoalan-persoalan yang berpotensi konflik, dan (4) penyamaan persepsi atas ideologi atau nilai-nilai bersama melalui infusi nilai-nilai yang dilakukan oleh perangkat partai.

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat terlihat bahwa PKB dan PKS memiliki situasi berbeda pada keempat hal itu, yang kemudian memberikan implikasi yang berbeda pula pada situasi internal partai, tertama terkait dengan munculnya persoalan fragmentasi di PKB dan kohesi di PKS. Pembahasan berikut ini akan membandingkan keduanya dalam kerangka pelembagaan dan dampak yang ditimbulkannya.

1. Kepemimpinan Prosedural

Sebuah partai yang terlembaga ditandai dengan munculnya kepatuhan seluruh anggota partai terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya dalam proses pembuatan kebijakan. Prosedur partai menjadi patokan dalam proses pengambilan kebijakan, yang membuat kepemimpinan partai dikendalikan oleh prosedur dalam menetapkan sebuah kebijakan. Sebaliknya, sebuah partai yang tidak terlembaga akan memiliki kecenderungan kuat untuk mengabaikan aturan main dalam persoalan pengambilan kebijakan.

Pada aspek normatif, baik PKB maupun PKS pada dasarnya telah memiliki seperangkat aturan main yang cukup baik dalam soal pengambilan keputusan. Hal ini ditandai dengan adanya seperangkat aturan main berikut institusi yang sejalan dengan konstitusi partai. Di PKB, meskipun belum sempurna, beberapa hal mendasar dan penting telah disentuh dalam aturan-aturan main itu meliputi di antaranya tata cara, ruang lingkup, dan tingkat kewenangan pengambilan kebijakan. Bagi sebagian kalangan, termasuk Notosusanto dan Kamarudin, Dewan Syura memiliki kewenangan yang amat luas, namun sebenarnya secara normatif tidak ada satu pun pasal dalam konstitusi partai yang benar-benar memberikan ruang bagi Dewan Syura untuk dapat menentukan sebuah kebijakan secara sepihak, apalagi perorangan. Sebagai partai yang akrab dengan nilai-nilai musyawarah, semangat konstitusi PKB dekat dengan pengambilan kebijakan secara kolektif.

Situasi normatif di PKS menunjukkan hal yang hampir sama. Dalam konstitusi partai disebutkan hierarki aturan main, lembaga-lembaga yang berwenang atas sebuah kebijakan, dan mekanisme pengambilan kebijakan yang berintikan musyawarah. Dilihat dari model pembuatan kebijakan, PKS menganut sistem yang relatif sentralistik, dengan Majelis Syura yang berperan sebagi *ahlu halii wal aqdi* sebagai penjurunya. Namun, pengambilan keputusan dalam Majelis Syura itu sendiri bersifat kolektif dan tidak dapat ditentukan oleh pemimpin atau segelintir orang saja. Dalam beberapa momen,

partai bahkan memberikan peluang bagi suara kader untuk ambil peran. Kombinasi antara elitisme dan popularisme ini mewujud dan dianggap sebagai penjelmaan dari sistem syura yang dianut oleh PKS.

Walaupun kedua partai Islam pada aspek normatif menunjukkan berlakunya semangat konsultasi dan mendengar aspirasi banyak kalangan, keduanya memiliki perbedaan dari sisi implementasi, yang menyebabkan perbedaan kualitas pelembagaan di antara keduanya dan pada akhirnya soliditas partai.

Dengan mengambil contoh kasus pemecatan pimpinan partai, yakni Ketua Umum Dewan Tanfidz, dapat dilihat adanya inkonsistensi dalam menerapkan aturan main pemecatan di partai ini. Sebelumnya, kepemimpinan personal yang dipahami dalam buku ini adalah kepemimpinan seorang tokoh partai yang cenderung berada di atas prosedur partai. Sementara itu, dipilihnya ketiga kasus pemecatan adalah karena ketiganya merupakan contoh kasus-kasus yang berdampak langsung terhadap munculnya perpecahan sekaligus juga dalam rangka memperlihatkan beragam dimensi yang relevan untuk dikaji melalui pisau analisis pelembagaan yang dikembangkan dalam buku ini.

Bentuk pelanggaran prosedur meliputi (1) medium yang digunakan, (2) waktu untuk menangani dan memutuskan kebijakan, dan (3) substansi di balik kebijakan pemecatan itu. Dalam kaitan dengan medium yang digunakan, pelanggaran prosedural dikaitkan dengan sikap DPP yang menafikan Muktamar atau MLB sebagai forum legal untuk mengevaluasi kinerja Ketua Umum Dewan Tanfidz sebelum memutuskan status mereka. Matori Abdul Jalil dipecat melalui keputusan mendadak Dewan Syura atas rekomendasi tim kecil pada hari yang sama saat dia menghadiri SI MPR tahun 2001. Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf dipecat pada sebuah forum terbatas, yang juga tidak dihadiri Alwi Shihab sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz. Adapun pada kasus Muhaimin Iskandar, partai memecatnya pada forum yang disebut 'rapat pleno', yang awalnya tidak dimaksudkan untuk membahas posisinya sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz.

Berkenaan dengan waktu, pemecatan yang diputuskan secara cepat menunjukkan bahwa partai tidak melaksanakan proses itu secara bertahap, sebagaimana yang disyaratkan oleh AD/ART. Pada kasus Matori dan Muhaimin, proses pemecatan bahkan hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja.

Terkait dengan masalah substansi, sejumlah alasan menjadi dasar pemecatan, namun tidak ada upaya untuk mendalami substansi itu agar dapat lebih dipertanggungjawabkan secara legal. Matori dipecat karena dianggap tidak loyal dengan keputusan partai dan Gus Dur. Hal yang menarik adalah walaupun dia dipecat karena kehadirannya di SI MPR Tahun 2001, sebuah forum yang dianggap ilegal oleh PKB, partai ini bersikap ambigu dalam menilai kedudukan MPR itu sendiri. Setelah sempat menyatakan keluar, sebagai bentuk protes atas sikap lembaga tersebut, PKB memutuskan untuk kembali ke MPR tidak lama setelah *impeachment* dilakukan. Sikap yang menunjukkan pengakuan atas keberadaan MPR RI dan seluruh kebijakannya, termasuk SI MPR 2001 itu sendiri.

Pemecatan Alwi Shihab dan Saifullah menjadi pertanyaan karena alasan semata rangkap jabatan. Menurut sejumlah kalangan, terutama para pendukung mereka, kebijakan ini mereduksi peluang bagi anggota partai untuk berkiprah lebih besar lagi dalam kehidupan politik. Semangat berpartai sebenarnya mendorong setiap kader untuk mengambil sebanyak mungkin peran di masyarakat. Sementara itu, untuk kasus Muhaimin, partai tidak dapat membuktikan alasan substansial pemecatan dirinya. Partai tidak dapat secara meyakinkan menunjukkan kesalahan fatal yang dilakukannya. Sejumlah kasus di tingkat lokal menunjukkan situasi serupa. Keputusan pemecatan atau pembekuan tidak didasarkan pada prosedur partai, tetapi kepentingan politik dengan alasan yang sumir.

Kasus-kasus ini juga menunjukkan peran dominan Gus Dur dalam pemecatan tersebut. Apa yang terjadi di PKB memperlihatkan dengan jelas bahwa kegagalan sebuah partai untuk membangun komitmen terhadap AD/ART telah membuka peluang yang besar

bagi seorang tokoh untuk menentukan secara personal arah kebijakan partai atau setidaknya membuat pandangannya menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh partai. Terhadap situasi ini Mustofa Bisri, salah seorang deklarator PKB, mengatakan bahwa Ketua Umum Dewan Syura atau Gus Dur terbukti selama ini merupakan 'lembaga tersendiri' di PKB.[1]

Berbeda dengan PKB, PKS tidak terlepas dari kritik mengenai bagaimana keputusan diambil, namun secara umum PKS tidak pernah benar-benar terjebak untuk meninggalkan aturan main dalam pengambilan kebijakan. Selama satu dekade keberadaannya, PKS berupaya untuk tetap konsisten bergerak dalam koridor Majelis Syura dan Musyawarah Majelis Syura dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kurun waktu itu, Majelis Syura dan Musyawarah Majelis Syura telah melembaga sebagai sebuah media dan cara atau model pengambilan keputusan-keputusan penting partai.

Walaupun Ketua Umum Majelis Syura, yakni Hilmi Aminuddin, memiliki peluang untuk menggunakan, baik 'hak kultural' maupun 'hak historis', dalam banyak kasus penting hak tersebut tidak digunakannya. Malahan dalam kebanyakan proses pembuatan kebijakan, termasuk yang paling penting, nuansa musyawarah tetap terlihat, semangat kolektivisme tetap terjaga, dan upaya-upaya yang mengarah pada pengambilan kebijakan yang bersifat melanggar aturan main jarang ditemukan. Dalam beberapa kasus karena sifatnya yang sentralistik, proses pengambilan kebijakan kerap dipandang tidak sensitif dengan asumsi atau kehendak mayoritas kader, namun dalam perjalanannya kasus-kasus sedemikian relatif jarang terjadi. Lebih dari itu, dilihat dari kacamata aturan main, pembuatan kebijakan yang tidak populer sekalipun tetap tidak bersifat melawan aturan main yang ada karena diputuskan tetap secara kolektif. Artinya, keputusan masih merupakan hasil proses musyawarah dan bukan berdasarkan kehendak segelintir orang saja di Majelis Syura.

[1] "Sekali Lagi PKB", dalam A. Mustofa Bisri, *Gus Dur Garis Miring PKB*, (Surabaya: MataAir Publishing Surabaya, 2008), 66.

Dalam kasus PKB, inkonsistensi dalam penerapan aturan main pada gilirannya menimbulkan kekecewaan dan juga pada akhirnya perlawanan para kader, baik mereka yang dirugikan maupun yang memiliki komitmen besar dalam melakukan pembenahan dalam partai. Perlawanan itu tidak saja ditunjukkan dengan sikap menentang atau mengkritisi pemimpin partai atau pihak-pihak yang berlawanan, namun juga diekspresikan dalam bentuk konsolidasi massa pendukung dan menciptakan faksi di dalam tubuh partai. Lebih dari itu, dengan terciptanya faksi yang saling bertikai, sebagai konsekuensi atau kelanjutan dari kekecewaan yang tidak terjembatani, upaya untuk memperbaiki hubungan pihak-pihak yang berkonflik menjadi semakin sulit. Situasi ini pada akhirnya makin mengkristalkan perbedaan dan berlanjut dengan upaya melegalkan keberadaan mereka melalui forum musyawarah atau MLB. Terlaksananya musyawarah dan MLB, menjadi isyarat yang jelas tentang telah tertutupnya upaya menuju perbaikan dan rekonsiliasi.

Sementara itu di PKS, adanya konsistensi dalam menjalankan aturan main menyebabkan sistem berjalan dengan baik. Kader meyakini konsistensi sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dalam pembuatan keputusan. Lebih dari itu, kepemimpinan prosedural memunculkan kepuasan para kader karena mereka merasa mendapat kesempatan berperan dalam pembuatan kebijakan atau setidaknya mengutarakan pandangan-pandangannya. Meskipun peran itu kerap hadir secara terbatas, pemberian peran itu telah relatif memupuk rasa memiliki partai. Dengan adanya situasi seperti ini, berbagai gejolak dan konflik yang ada tidak menimbulkan kekecewaan yang masif apalagi memicu terjadinya faksionalisasi yang membahayakan keutuhan partai. Dengan kemampuan partai untuk menghindari segenap situasi ini, soliditas partai pun pada akhirnya dapat terjaga.

Dari kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa kehadiran, baik perpecahan maupun soliditas tidak dapat dilepaskan dari kemampuan partai dalam menjalankan aturan main, yang juga merupakan dimensi dari pelembagaan partai.

Tabel 13.1 Perbandingan Kondisi Kepemimpinan Prosedural dalam Proses Pembuatan kebijakan PKB dan PKS

Hal	PKB	PKS
Aspek Legal Formal	Proses pembuatan kebijakan: pengakuan atas musyawarah	Komitmen atas proses musyawarah dan Majelis Syura
Pelaksanaan	Munculnya fenomena inkonstitusional Peran figur mendominasi AD/ART partai	Majelis Syura sebagai badan tertinggi partai Musyawarah sebagai mekanisme terpenting
Kecenderungan	Pelanggaran prosedural. Mengikuti kepentingan patron.	Terpeliharanya pelaksanaan prosedur. Menghormati sistem.
Dampak terhadap Partai	Munculnya resistensi internal. Munculnya pembentukan faksi dan perpecahan.	Berkembangnya kepercayaan. Terjaganya soliditas partai.

2. Mekanisme Resolusi Konflik

Dimensi lain dari partai yang terlembaga adalah keberadaan CRM yang memadai. Dimensi ini terkait dengan tingkat kesisteman, di mana persoalan yang terkait dengan konflik, sebagai sesuatu persoalan yang kerap hadir dalam partai berikut dampak yang mungkin dihasilkannya, dapat diselesaikan dan diantisipasi secara pelembagaan. Sebuah partai yang tidak terlembaga, adalah partai yang dalam menyelesaikan persoalan konflik tidak didasari oleh sebuah mekanisme yang standar. Dalam sebuah institusi seperti partai politik, keberadaan CRM mutlak adanya dan menjadi sebuah indikator apakah tingkat kesisteman partai itu tinggi atau rendah.

Pada kasus PKB, dimensi ini demikian rendah. PKB tidak memiliki CRM yang komprehensif dan hingga tahun 2005 tidak memiliki institusi yang kompeten dalam masalah ini. Partai dan para simpatisannya cukup percaya bahwa partai yang dibangun dengan euforia dan semangat yang tinggi dalam atmosfer kepentingan orang NU tidak akan mengalami konflik yang berat. Mereka juga berkeyakinan bahwa tradisi islah sangatlah efektif dalam memecahkan

konflik internal di NU sehingga dapat efektif berlangsung di PKB, sesuatu yang kemudian belakangan tidak terbukti.

Situasi ini menyebabkan tidak adanya badan yang memiliki otoritas untuk bertindak dan mendapatkan pengakuan dari seluruh elemen partai sebagai institusi yang menangani konflik. Sejumlah institusi yang diharapkan dapat berperan sebagai media untuk menyelesaikan konflik dan masalah-masalah terkait, yaitu Muktamar dan Dewan Syura, tidak dapat memainkan peranan tersebut karena dalam praktiknya sulit bersikap objektif dan imparsial. Institusi-institusi ini kerap digunakan oleh kelompok-kelompok yang berkonflik untuk melayani kepentingan mereka sendiri.

Sejumlah keputusan penting akhirnya bergantung pada pertimbangan dan kepentingan personal. Kegagalan Dewan Syura untuk berperan secara objektif dalam penyelesaian konflik, sebagaimana yang dibayangkan dan diharapkan oleh kader-kader PKB, memperburuk situasi ini. Ketiadaan sosok-sosok yang mumpuni dalam menangani soal ini ditambah dengan terbatasnya perangkat aturan main menyebabkan pengambilan keputusan berjalan tidak proporsional dan keputusan yang ditetapkan kerap bercampur pula dengan kepentingan subjektif. Pada akhirnya, partai tidak saja gagal dalam mengidentifikasi potensi konflik, namun juga tidak dapat meresponsnya dengan baik sehingga menyulitkan penanganannya. Konflik yang ada pun menjadi mudah untuk membesar.

Kasus-kasus pemecatan yang diangkat dalam buku ini memperlihatkan bagaimana kelompok-kelompok yang dirugikan tidak dapat menyalurkan keberatannya pada lembaga manapun di dalam partai. Sebaliknya, mereka secara sepihak dianggap telah memahami dan harus menuruti kebijakan yang telah digariskan. Ketiadaan ruang yang layak bagi mereka yang tersingirkan menyebabkan konflik secara substantif tidak pernah terdamaikan dengan baik sehingga praktis partai menemui kesulitan untuk benar-benar mencegah dan mengakhiri konflik. Rekonsiliasi yang diharapkan muncul tidak

pernah terjadi. Dialog-dialog konstruktif yang dapat dijadikan landasan untuk memperbaiki situasi menjadi semakin sulit terbangun. Sebaliknya, konflik mengalami eskalasi yang melibatkan lebih banyak lagi pihak, yang kemudian bersatu karena kepentingan yang sama. Dalam situasi seperti ini, faksionalisasi menjadi semakin kuat.

Lebih dari itu, ketidakpercayaan pada pihak lawan dan terhadap sistem yang ada mengundang masuknya pihak ketiga, yakni pengadilan untuk mengambil peran dalam menyelesaikan konflik. Peran pihak ketiga ini justru cenderung membingungkan dan menguatkan pertikaian dengan kebijakan-kebijakan yang tidak dapat diterima oleh semua pihak. Secara umum, kasus di PKB mengonfirmasi pandangan bahwa masuknya elemen ketiga cenderung tidak menyelesaikan masalah. Pada akhirnya, keberadaan pihak ketiga juga menjadi kurang bermakna.

Berkenaan dengan PKS, AD/ART partai menyebutkan bahwa institusi-institusi tertentu berperan sebagai unsur-unsur CRM. Institusi-institusi ini adalah Dewan Syariah, Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO), dan *halaqah* yang memiliki otoritas, misalnya menjadi badan rekonsiliasi, melakukan pengadilan internal dan investigasi, hingga sebagai medium untuk mencari resolusi terhadap sudut pandang yang berbeda. Partai juga memiliki pola standar dalam mengatasi pencegahan dan resolusi konflik. Walaupun PKS tidak dapat dikatakan telah sepenuhnya bebas dari keterbatasan, kehadiran badan-badan ini memungkinkan partai untuk memiliki pedoman yang otoritatif dalam mengatasi konflik. Hal yang pada akhirnya membantu partai meningkatkan kepercayaan dan menghindari eskalasi konflik.

Kebalikan dengan kondisi PKB, PKS mampu mendeteksi potensi konflik dan melakukan respons sejak dini. Hal ini terutama karena *halaqah* sebagai bagian dari CRM, sebagai forum pertemuan mingguan, dapat berperan sebagai media yang efektif dalam memantau perkembangan kader dan mendeteksi kegelisahan para kader.

Di sisi lain, keberadaan Dewan Syariah menyebabkan partai dapat memberikan keputusan-keputusan otoritatif dengan segera yang pada umumnya dapat merespons potensi konflik dengan saksama.

Keberadaan BPDO juga cukup membantu memberikan keputusan yang otoritatif dalam kasus-kasus yang berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan. Melalui sejumlah instrumen ini, PKS memiliki kapasitas untuk mengatasi konflik secara praktis dan langsung. Hal ini juga mencegah partai dari perselisihan berkepanjangan yang secara potensial mengarah ke faksionalisasi.

Sejumlah peristiwa dengan potensi konflik internal tidak juga mampu memunculkan perselisihan berkepanjangan atau meningkatkan konflik. Partai dapat memperlihatkan dan meyakinkan kader bahwa aturan main merupakan patokan penting dalam segenap upaya penyelesaian konflik. Selama satu dekade keberadaaanya, kebijakan PKS untuk sedapat mungkin menghindari keputusan sepihak dan memberikan kesempatan kader untuk membela diri terus diterapkan.

Meskipun demikian, tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan segera oleh partai. Kelambatan ini disebabkan oleh rasa canggung, juga untuk memberikan peluang agar kader yang bermasalah itu dapat sadar dan kembali ke jalan yang dihargai oleh partai. Sikap ini kerap diartikan sebagai sikap pilih kasih dan inkonsisten dalam menjalankan aturan main. Meskipun kasus keterlambatan itu muncul, adanya CRM yang sistematis di PKS secara umum relatif mampu menangangi persoalan konflik dengan baik, tanpa menimbulkan sebuah dampak yang dapat memecah belah partai.

Pembahasan di atas menunjukkan peran mendasar CRM sebagai salah satu indikator pelembagaan partai, yang berkaitan terutama dengan kerja lembaga peradilan internal dalam menjaga soliditas partai. Di sisi lain, kegagalan PKB menjadi sebuah bukti nyata di mana ketiadaan CRM menjadi salah satu faktor pendukung bagi terciptanya fragmentasi internal.

Tabel 13.2 Perbandingan Kondisi CRM PKB dan PKS

Masalah	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Aspek Legal Formal	Tidak adanya aturan main dan institusi CRM yang relevan	Adanya aturan main dan institusi CRM yang relevan
Pelaksanaan	Terutama berdasarkan pendapat dan kepentingan personal daripada perspektif pelembagaan	Dilakukan melalui institusi dan mekanisme otoritatif
Kecenderungan	Kesulitan mencegah dan menghentikan konflik Memiliki masalah dalam melokalisasi konflik	Mampu mendeteksi potensi konflik sejak tahap sangat awal Mampu melokalisasi konflik
Pengaruh	Eskalasi konflik dan peningkatan faksionalisasi Hilangnya dialog yang konstruktif "Resolusi" pihak ketiga	Terjaganya kepercayaan terhadap sistem internal Lemahnya potensi faksionalisasi

3. Kaderisasi Sistematis

Kaderisasi sistemis adalah dimensi lain sebuah partai yang terlembaga. Partai yang terlembaga adalah partai yang mengembangkan kadernya dengan menggunakan mekanisme yang terstandardisasi dan transparan. Tujuan proses ini adalah tidak hanya agar partai memiliki kader dengan komitmen yang sejalan dengan misi partai, tetapi juga memastikan masa depan karier mereka dengan menggunakan kaderisasi sebagai salah satu patokan atau prasyarat dalam melakukan perekrutan kader atau jabatan di dalam partai atau sebagai pejabat publik.

Dalam konteks legal-formal, PKB membuat sejumlah aturan pelaksanaan proses kaderisasi dan rekrutmen. Namun, pada umumnya, AD/ART partai tidak secara jelas menyebutkan regulasi kaderisasi dan proses rekrutmen yang lengkap dan komprehensif serta institusi yang menangani, termasuk langkah-langkah dalam mengembangkan karier kader. AD/ART partai hanya menyebutkan secara implisit bahwa proses kaderisasi akan menjadi domain Dewan Pengurus.

Walaupun partai mempunyai model pelatihan kader dan pedoman rekrutmen, tetapi pelaksanaannya cenderung bergantung pada institusi lain, seperti NU dan pesantren. Peran NU dan juga ulama yang merupakan institusi yang secara struktural tidak terkait secara langsung dengan PKB, turut mewarnai proses kaderisasi ini. Kaderisasi pun tidak dapat dijalankan secara mandiri dan sistematis, yang pada akhirnya memengaruhi proses dan kualitas penyerapan materi kaderisasi. Sementara itu, dalam soal rekrutmen partai, peran figur-figur berpengaruh, terutama para kiai, lebih menentukan ketimbang mekanisme standar dan penilaian yang objektif. Pembahasan di atas mengisyaratkan adanya beberapa pola rekrutmen yang umum terjadi di PKB, yang secara substantif melemahkan peran aturan main dan objektivitas. Proses kaderisasi yang tidak konsisten dan penuh dengan kepentingan yang eksklusif, menyebabkan partai tidak menjadi satu-satunya pelaksana dan penafsir atas idelogi partai dan aturan main partai.

Tidak adanya penafsiran yang solid dan final atas aturan main partai dan ideologi memberikan peluang bagi setiap orang untuk mengembangkan dan membuat penafsiran mereka sendiri. Perbedaan dalam pelaksanaan semangat pluralisme sebagai salah satu aspek utama ideologi partai, misalnya, merupakan salah satu refleksi kegagalan pembangunan pemahaman bersama atas ideologi partai kepada seluruh anggota. Setiap kelompok yang berkonflik akhirnya memiliki pemahaman masing-masing atas aturan main partai dan pemahaman itu kerap bertentangan satu dengan lainnya. Dalam kasus-kasus pemecatan, perbedaan pemahaman AD/ART partai menjadi faktor yang meningkatkan ketegangan dan akhirnya membuat konflik menjadi sulit untuk diselesaikan.

Dalam praktiknya, perbedaan pandangan semacam ini menjadi alasan untuk menajamkan perbedaan di antara pihak-pihak yang berkonflik. Dengan mempertahankan pandangannya masing-masing, pihak yang berkonflik memiliki alasan untuk menyerang lawan dan sekaligus memantapkan posisinya di mata para pendukung. Hal

ini diperburuk dengan lemahnya kaderisasi yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan atau kehilangan posisi dalam partai dengan mudah. Situasi ini pada gilirannya menopang terciptanya kepengurusan di masing-masing pihak yang berkonflik dengan demikian cepat. Dengan kemampuan untuk membentuk kepengurusan partai yang lengkap dalam waktu singkat, setiap kelompok yang berkonflik merasa menjadi pemilik sah partai. Penyelenggaraan Muktamar atau MLB berfungsi hanyalah untuk melegalkan keberadaan mereka.

Di sisi lain, berbeda dengan PKB, kaderisasi telah menjadi bagian terpenting di dalam tubuh PKS. Setelah tahun 2005, partai bahkan lebih jelas lagi menetapkan bahwa kaderisasi adalah salah satu tugas DPP dan sebagai basis untuk menduduki sebuah jabatan dalam partai. Dari konstitusi dan berbagai modul yang diterbitkan, kader dan calon kader dapat melihat dan memperoleh gambaran mengenai model pengaderan, materi yang akan disampaikan, hingga jenjang yang harus ditempuh oleh seorang kader.

Selain kejelasan aturan main, pelaksanaan kaderisasi di PKS juga relatif berjalan dengan baik. *Halaqah* sebagai ujung tombak pelaksanan kaderisasi, dengan pengawasan aparatus partai lainnya, relatif berjalan sebagaimana harusnya. Pertemuan mingguan, meskipun tidak seutuhnya berjalan sempurna, menjadi ciri khas partai ini. Dalam pertemuan-pertemuan itu, kader dibina dengan materi-materi standar yang langsung disampaikan oleh aparatus partai yakni *murabbi*. Belakangan bagi sebagian kalangan, kualitas *halaqah* mulai dipertanyakan, namun kegiatan ini secara umum tetap berlangsung dan relatif berkembang di daerah-daerah yang baru tersentuh oleh partai ini.

Selain itu, dalam soal rekrutmen, tidak ada sebuah otoritas tunggal yang dapat dengan mudah menentukan proses ini. Dalam menentukan anggota Majelis Syura atau caleg, terdapat unsur partisipasi kader yang berperan sebagai barometer dalam mengukur kelayakan seseorang untuk menduduki jabatan. Hal ini menghindari

kemungkinan kelompok terbatas atau individu dapat secara sepihak menentukan hasil proses ini.

Dengan adanya kaderisasi yang dikelola oleh kader-kader partai dengan komitmen yang tinggi dan kontinu, PKS relatif dapat memelihara kesatuan pandangan dan intepretasi atas tujuan dan aturan main partai dengan baik. Lebih dari itu, partai dapat pula menjaga kesetiaan kader yang terbangun dari percampuran indoktrinasi yang sistematis dan konsistensi menjalankan aturan main dalam perekrutan partai. Ini menumbuhkan sebuah prasangka baik kepada partai, menimbulkan rasa aman, dan mereduksi motif-motif yang dapat membahayakan keutuhan partai. Dalam satu dekade keberadaannya, PKS mampu membangun kepercayaan di mata mayoritas kadernya dengan relatif baik, terlepas dari banyaknya kritik atas kualitas pengambilan kebijakan yang dilontarkan oleh para mantan kader yang tersingkir dari partai. Kecenderungan ini memungkinkan partai menghindari konflik berkepanjangan dan faksionalisme yang dapat membahayakan kesatuan dan persatuan partai.

Meskipun banyak kalangan meyakini adanya 'faksionalisasi internal' di PKS, keberadaannya tetap tidak mengarah pada perpecahan. Hal ini terutama karena potensi konflik terakomodasi dalam institusi-institusi CRM. Perbedaan sikap dan pandangan di antara masing-masing pihak atau bahkan kelompok di dalam PKS, belum menjadi sesuatu yang benar-benar mengkristal sehingga memang benar dapat dibedakan antara satu kelompok dengan kelompok lain, sebagaimana yang muncul pada partai-partai yang memang memiliki faksi-faksi. Hal yang terjadi di dalam PKS adalah adanya perbedaan yang kerap cukup tajam dalam mendekati sebuah persoalan, yang pada akhirnya lebih tepat disebut sebagai tendensi. Kenyataannya, komitmen untuk mengedepankan dakwah tetap satu dan utuh dipahami oleh seluruh kader.

Di samping itu, kaderisasi yang sistematis juga memotivasi kader untuk dapat menahan diri dari mengedepankan perbedaan, membuat pengelompokan yang saling menyerang, dan apalagi melakukan

Tabel 13.3 Perbandingan Kondisi Kaderisasi Sistematis PKB dan PKS

Masalah	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Keadilan Sejahtera
Aspek Legal Formal	Aturan main partai yang parsial dan institusi yang tidak dinyatakan secara gamblang sebagai pelaksana kaderisasi.	Adanya aturan main dan institusi relevan.
Pelaksanaan	Inkonsistensi dalam melakukan kaderisasi; Rekrutmen partai dan semangat subjektivisme.	Aktivitas *halaqah* dan pemeliharaan kader; Rekrutmen atas dasar penilaian objektif.
Kecenderungan	Terbangunnya penafsiran yang berbeda; Lemahnya *esprit de corps*; Sikap yang longgar terhadap aturan main partai.	Terpeliharanya pemahaman tunggal; Berlanjutnya loyalitas tunggal; Terbangunnya kepercayaan.
Pengaruh	Adanya perbedaan dan perdebatan berkepanjangan; Munculnya resistensi; Pengelompokan yang berlang-sung cepat untuk menjaga kepentingan faksi.	Melindungi partai dari konflik berkepanjangan; Berkurangnya kecenderungan faksionalisasi; Komitmen terhadap kesatuan partai.

perlawanan sistematis terhadap pemimpin partai. Hal ini sesuai dengan makna soliditas atau kohesi yang secara substansi menghindari adanya potensi keretakan di antara sesama anggota sebuah institusi. Secara keseluruhan, komitmen untuk menjaga keutuhan partai relatif dapat dipertahankan. Beberapa kader yang dikeluarkan memang melakukan perlawanan terbuka. Namun, tindakan itu tidak mendapat respons yang luar biasa dari kader dan kerap dipandang sebagai sebuah tindakan individual dari kalangan yang sakit hati saja. Kader-kader yang berseberangan pada akhirnya memilih jalan untuk meninggalkan partai secara baik-baik.

Kasus PKB dan PKS di atas menunjukkan bagaimana pelembagaan pengaderan yang tercermin dari adanya kaderisasi yang sistematis telah memberikan pengaruh dalam menciptakan kecenderungan yang berdampak pada situasi keutuhan partai. Hilangnya kaderisasi yang

sistematis itu, telah menggiring PKB pada keterpecahan. Sementara adanya kaderisasi yang sistematis telah mendukung PKS untuk tetap dapat menjaga keutuhannya hingga satu dekade keberadaannya.

4. Infusi Nilai-Nilai Bersama

Pembahasan di atas menunjukkan sejumlah perbedaan signifikan di kedua partai politik Islam ini, berkenaan dengan komitmen atas nilai-nilai bersama. PKB relatif sudah memiliki nilai-nilai bersama, yaitu nasionalisme dan *Aswaja*. Secara normatif, keduanya dapat diterapkan sebagai unsur pemersatu. Namun sayangnya, ada beberapa persoalan dalam nilai itu sendiri, yang meliputi substansi dan aplikasi. Dari sisi substansi, soal keumuman dan kerelatifan nilai-nilai itu menyulitkan partai dalam menciptakan *distinctive values*. Sementara itu, dari sisi aplikasi, nilai-nilai yang bekerja pada level keormasan, yakni NU, tidak dengan mudah ditransformasikan pada level partai. Selain itu, di tingkat praktis, adanya keumuman yang sifatnya garis besar saja membuat nilai-nilai bersama kurang efektif dalam memainkan peran sebagai *code of conduct* internal, termasuk orientasi dan perilaku kader. Pada akhirnya, partai memiliki nilai, orientasi, dan pedoman yang relatif lemah.

Selain bermasalah dengan substansi nilai-nilai bersama yang dimilikinya, PKB juga bermasalah dengan infusi nilai. Orientasi partai, yang terutama lebih difokuskan pada masalah-masalah eksternal, membuat infusi nilai dan persoalan terkait di dalamnya, termasuk menetapkan jadwal, menyediakan materi, dan pelaksanaan evaluasi menjadi terhambat. Situasi ini diperburuk dengan kenyataan bahwa proses infusi itu tidak tertangani secara langsung oleh partai sendiri, yang berakibat tidak adanya standardisasi, baik dalam soal materi maupun pengelolaan. Proses infusi dilakukan oleh banyak pihak secara tidak terkontrol, yang kemudian memunculkan fenomena 'federasi', sebagaimana yang dikatakan oleh Staquf, atau 'negara dalam negara'. Dalam situasi ini, kecenderungan yang kemudian berkembang adalah perbedaan penafsiran atas nilai dan *code of*

conduct, munculnya loyalitas ganda para kader serta tidak dijadikannya pemahaman dan komitmen terhadap pengembangan nilai itu sebagai elemen pokok penilaian seorang kader. Akibatnya, kecenderungan untuk hadirnya multi-loyalitas dan sikap menomorduakan nilai-nilai bersama, yang kemudian memicu sikap multi-intepretasi, menjadi berkembang.

Di lain pihak, PKS memperlihatkan kemampuan yang lebih baik dalam menemukan, memelihara, mengembangkan, dan menjadikan dakwah sebagai referensi utama partai, yang juga memberikan karakter tersendiri bagi partai ini. Oleh karena itu, partai ini relatif tidak menemukan banyak masalah untuk melakukan infusi ideologi yang dianutnya. Kecenderungan yang kemudian terlihat adalah adanya seperangkat nilai-nilai yang ditumbuhkembangkan, yang kemudian berperan sebagai pedoman bertingkah laku. Prinsip seperti mencari keridaan Tuhan, semangat anti-pragmatisme, dan kesadaran sebagai alat perjuangan menjadi nilai-nilai yang tumbuh subur dan cukup mendominasi, meskipun tidak merata seutuhnya di semua kader. Begitu juga nilai-nilai seperti kebersamaan dalam jemaah yang menopang anti-individualisme, kultur konsultasi dan saling memahami serta melindungi, dan ketaatan dalam berjuang yang bersifat hierarkis yang menumbuhkan disiplin dan 'anti-federalisme' menjadi nilai-nilai yang berkembang dalam partai ini.

Meskipun terdapat pelbagai kekurangan, baik dalam konteks pengelolaan maupun SDM, secara umum dalam partai ini berkembang semangat percaya pada pemimpin, sejalan dengan semangat menguatkan dan menjaga identitas mereka atas dasar ideologi yang dianut. Hal ini melahirkan komitmen untuk menjaga idealisme partai dan menempatkan hal tersebut sebagai prioritas. Komitmen ini juga mereduksi sikap yang menganggap partai hanya sebagai *disposable tool*. Komitmen untuk mengikuti pemimpin, menjaga semangat kebersamaan, dan rasa memiliki atas dakwah di partai ini secara umum masih cukup kuat.

Dengan berbagai kecenderungan di atas, berbeda dengan PKS, PKB berkembang menjadi sebuah partai yang ringkih dalam soal pelembagaan nilai-nilai. Akibatnya, konflik mudah sekali tumbuh dan memiliki kecenderungan untuk tidak mudah terselesaikan. Beberapa contoh kasus di atas menunjukkan fenomena bagaimana potensi konflik menjadi sebuah hal yang mudah sekali membesar akibat lemahnya infusi ideologi. Tidak adanya semangat kebersamaan, sebagai dampak logis dari ketiadaan infusi ideologi, menyebabkan fragmentasi menjadi mudah tercipta.

Sementara di sisi lain, PKS dapat dikatakan mampu menjadi sebuah partai yang solid dengan berjalannya infusi ideologi secara baik. Hal ini kemudian berkorelasi dengan kemampuan partai ini untuk mampu mencegah terjadinya potensi konflik dan menyelesaikan konflik dengan serta merta, meskipun tidak selalu mudah. Sejumlah kejadian besar termasuk selama Pemilu Presiden 2004, kasus BBM, dan isu partai terbuka yang terjadi di partai ini sesungguhnya secara potensial dapat membahayakan kesatuan dan persatuan partai. Namun, berbagai potensi konflik yang cukup besar itu dapat diredam dengan baik tanpa meninggalkan banyak masalah. Oleh karena itu, secara umum partai ini mampu memelihara keutuhannya dengan lebih mudah.

Dari perbandingan di atas terlihat bahwa kemampuan partai untuk melembagakan nilai-nilai yang dimilikinya sehingga menciptakan sebuah *uniting values*, menyebabkan partai tersebut mampu menghindari fragmentasi. Di sisi lain, kegagalan partai menjalankan proses infusi membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi soliditas partai. Dengan perbandingan ini tampak terlihat peran yang dimainkan oleh infusi ideologi, sebagai salah satu elemen pelembagaan partai, dalam memelihara kohesivitas dan mencegah fragmentasi partai.

Tabel 13.4 Perbandingan Kondisi Infusi Nilai Bersama PKB dan PKS

Masalah	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Keadilan Sejahtera
Aspek Legal Formal	Nasionalisme dan *Aswaja* sebagai potensi nilai-nilai bersama. Upaya terhadap pengembangan nilai bersama.	Perjuangan dakwah sebagai nilai sentral. Pemeliharaan nilai-nilai bersama sebagai sebuah keharusan.
Pelaksanaan	Terutama didasarkan pada pendapat dan kepentingan personal daripada perspektif yang terlembaga.	Dilakukan melalui institusi dan mekanisme yang otoritatif.
Kecenderungan	Tokoh berpengaruh sebagai kekuatan pendorong. Fenomena 'bebas nilai' dan partai sebagai alat yang dapat mudah disingkirkan.	Partai sebagai 'wadah' idealisme kelompok Munculnya semangat kolektivisme
Pengaruh	Kepentingan pemimpin sebagai 'sumber yang absah' untuk bertindak. Pembentukan kelompok instrumentalis dengan tidak didasari oleh nilai-nilai bersama.	Partai sebagai perangkat idealisme. Komitmen terhadap hubungan harmonis antarkader.

B. Kesimpulan

1. Hubungan Antarvariabel

Dalam konteks perpecahan yang dialami PKB, dapat terlihat bahwa pembuatan kebijakan yang tidak didasari oleh sebuah aturan main segera menimbulkan kekecewaan dan perlawanan dari kader-kader yang dirugikan atau bersikap kritis. Lebih dari itu, ketiadaan media untuk menyelesaikan konflik menyebabkan konflik menjadi berlarut-larut dan tidak terselesaikan. Partai tidak memiliki sebuah otoritas dan saluran yang adil dan objektif untuk menyelesaikan konflik secara komprehensif. Dengan ketiadaan CRM, masing-masing pihak pada akhirnya merasa menjadi korban atau setidaknya menjadi pihak yang layak untuk terus memperjuangkan kepentingannya yang memperburuk soliditas partai.

Situasi ini diperburuk dengan minimnya kesadaran untuk bersatu dan melihat partai sebagai sesuatu yang harus dipertahankan secara kolektif karena kedudukannya sebagai alat kepentingan ideologis.

Lemahnya infusi nilai-nilai dan juga sebenarnya ketiadaan landasan nilai-nilai dalam menuntun perilaku menjadi penyebab mudahnya kader memiliki sikap saling meniadakan dan memandang pihak yang berbeda pandangan sebagai musuh yang harus disingkirkan. Secara umum, hilangnya dimensi ini menyebabkan kader PKB tidak merasa terikat oleh nilai dan kepeningan yang sama, yang kemudian memberikan peluang bagi munculnya perbedaan yang tidak terjembatani.

Tidak adanya pembinaan kader yang memadai, melengkapi, dan menguatkan potensi fragmentasi di dalam partai ini. Kader tidak saja memiliki loyalitas yang bersifat multi-loyalitas, namun pula memiliki persepsi yang berbeda-beda termasuk dalam hal aturan main. Kaderisasi yang tidak memadai juga menyebabkan pengelompokan kader-kader yang berbeda pandangan menjadi mudah, yang mengakibatkan terbentuknya kepengurusan yang melegitimasi masing-masing pihak untuk eksis. Dari berbagai kondisi di atas jelas terlihat bahwa lemahnya dimensi pelembagaan pada akhirnya mengarah pada terciptanya perpecahan.

Di lain pihak, kemampuan PKS untuk membangun dimensi-dimensi pelembagaan partai memungkinkan partai ini membangun soliditasnya. Dalam satu dekade awal keberadannya, PKS dapat secara konsisten menempatkan Majelis Syura sebagai sebuah institusi kolektif terpenting dalam menentukan proses pengambilan kebijakan dan menggunakan musyawarah sebagai media pengambilan kebijakan di semua tingkatan. Situasi ini menjadi modal dasar bagi PKS untuk dapat mempertahankan kehormatan kepada pemimpin partai. Konsistensi terhadap musyawarah pada akhirnya juga menguatkan rasa memiliki antarkader karena keterlibatan mereka dalam penyusunan kebijakan partai, terutama pada level lokal.

Kebiasaan ini menyebabkan kader juga merasa bergantung dan terikat pada sistem ketimbang pada figur-figur. Bahkan figur dapat saja terlibas oleh sistem yang dijalankan. Keutuhan PKS juga merupakan dampak dari solidaritas yang dibangun oleh proses pengaderan

yang sistematis dan rekrutmen yang memperhatikan kaidah-kaidah yang dibangun oleh partai, dengan adanya ketunggalan pemahaman dan kesetiaan di dalamnya. Solidaritas ini pulalah yang menyebabkan para kader tidak mudah untuk terprovokasi atau dipengaruhi dan menyulitkan munculnya faksi-faksi yang saling meniadakan.

PKS juga mampu mengembangkan sebuah CRM, sebagai dimenasi lain dari institusionalisasi, yang menyebabkan hampir semua perbedaan dan persoalan pelik dapat diatasi secara kelembagaan. Partai dapat mendeteksi relatif dini potensi konflik itu dengan keberadaan *halaqah* yang tersebar di banyak wilayah. Meskipun tidak semuanya berlangsung mulus, dibandingkan dengan banyaknya kasus yang dihadapi oleh partai pada kurun waktu satu dekade, cukup beralasan jika partai dapat dianggap berhasil dalam menjalankan CRM. Kasus-kasus yang berpotensi memunculkan konflik dan perpecahan dapat dihindari dalam kasus PKS karena ada penanganan yang konstitusional, ada saluran untuk menyuarakan perbedaan dan mendapatkan keadilan, kuatnya orientasi ideologis kader, dan solidaritas yang ditumbuhkan secara sistematis.

Berkenaan dengan alasan di balik kegagalan PKB untuk menegakkan pelembagaan partai, pembahasan di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek yang terkait dengan keterikatan partai ini dengan tradisi komunal. Keterkaitan itu dapat terlihat dari diberikannya peran yang besar terhadap tokoh karismatik untuk menentukan arah organisasi. Partai mengandalkan pesona tokoh tersebut selain pada dukungan dan loyalitas kader padanya. Kemudian, adanya fleksibilitas yang dalam hal ini anggota partai menempatkan sistem dan aturan main partai sebagai bagian dari perangkat yang dapat menyelesaikan masalah-masalah secara informal. Hal lain adalah penerimaan identitas dan nilai-nilai komunal dalam kehidupan politik oleh sebagian besar kader tanpa pertama-tama melakukan kajian dan rasionalitas terlebih dahulu. Kegagalan PKB untuk menegakkan kepemimpinan prosedural adalah karena tradisi partai untuk memberikan peran yang demikian besar kepada pemimpin partai

dalam proses pembuatan kebijakan. Gus Dur adalah salah satunya, yang dapat bekerja tanpa kontrol partai yang efektif dan kerap mendominasi aturan main partai. Posisi unik dan istimewa para elite dalam tradisi partai ini membuat kedudukan tokoh kerap melampaui prosedur dalam pembuatan kebijakan.

Sementara itu, dalam hal manajemen konflik, tidak adanya perangkat CRM dan aturan main partai pendukung adalah akar-akar penyebab kegagalan PKB dalam menyelesaikan konflik secara tepat. Dapat dikatakan bahwa ini bermula dari adanya keyakinan di antara anggota partai dan elite bahwa PKB dapat menghindari konflik dengan mudah karena partai ini didirikan oleh kalangan yang memiliki tradisi dan kepentingan yang homogen. Mereka juga yakin akan kekuatan tradisi NU dalam menangani konflik. Keyakinan ini menyebabkan tumbuh kepercayaan diri bahwa mereka dapat mengatasi segenap konflik yang muncul. Keberadaan ulama yang senior dan dihormati di dalam partai menebalkan kepercayaan diri bahwa PKB akan dengan sendirinya mampu secara efektif mencegah konflik. Akhirnya, partai cenderung memercayai pendekatan informal atau tradisi dalam mengatasi konflik ketimbang mencoba mengembangkan CRM secara baku dan komprehensif. Belakangan terbukti bahwa kepercayaan diri menjadi jebakan di balik tidak adanya CRM yang efektif dan berdampak amat merugikan bagi partai di kemudian hari.

Berkenaan dengan kemunduran pelaksanaan kaderisasi, ketergantungan PKB terhadap perangkat kaderisasi NU, berikut *onderbouw* yang dimilikinya, para ulama dan pesantren adalah alasan utama di balik kegagalan PKB untuk membangun kaderisasi yang terpusat, reguler, baku, dan terevaluasi dengan baik. Tradisi untuk menghormati ulama dan 'darah biru' secara bertahap menghambat upaya pelaksanaan kaderisasi yang objektif atas dasar *merit system*. Adapun kegagalan PKB dalam melakukan infusi nilai-nilai bersama terutama terkait dengan kurangnya kepedulian dalam membangun nilai-nilai yang lebih relevan dalam kehidupan internal partai.

Selain itu, partai tampak belum melihat adanya urgensi sehingga tidak tergerak untuk melakukan infusi nilai-nilai secara lebih ketat dan menjaganya agar dapat secara sistematis dilakukan oleh seluruh kader partai. Partai berkeyakinan bahwa melalui kaderisasi NU yang diterima kader partai maka sebenarnya mereka telah memahami tradisi dan nilai-nilai yang berlaku di partai. Hal tersebut belakangan terbukti kontraproduktif dalam upaya membangun kesepahaman tentang apa yang dimaksud sebagai nilai-nilai ideal dan bagaimana nilai-nilai itu hendaknya dipraktikkan. Secara umum, tradisi untuk melakukan segala sesuatu secara informal telah mengabaikan upaya melakukan sistematisasi nilai-nilai dalam PKB. Kajian di atas mengindikasikan bahwa tradisi-tradisi keorganisasian yang berkembang di kalangan Nahdiyin, yang kemudian menjadi fondasi budaya politik PKB, tidak selamanya kompatibel dalam mendukung proses pelembagaan di PKB.

Kemampuan PKS untuk membangun dan memelihara pelembagaan partai terutama dikaitkan dengan komitmen untuk menegakkan ajaran Islam di setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas politik sebagai sebuah ideologi. Secara spesifik, ideologi ini mencakup beberapa nilai, yakni Islam sebagai sesuatu yang sempurna yang mengelola setiap aspek kehidupan manusia, pentingnya membangun sistem kehidupan yang komprehensif yang dimulai pada tingkat individual (kader) agar dapat mencapai tujuan-tujuan ideal Islam; dan pentingnya kepemimpinan yang berkomitmen dan kader yang loyal berdasarkan pada nilai-nilai bersama. Nilai-nilai inilah yang dibangun dalam partai ini yang didukung dengan metode sistematis. Dalam jangka panjang, ideologi dan pelaksanaannya menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan.

Sementara itu, keberhasilan PKS dalam menegakkan kepemimpinan prosedural adalah karena adanya komitmen untuk mengutamakan sistem daripada figur. Anggota-anggota partai, baik pemimpin maupun kader, biasa dipersepsikan sebagai bagian dari sistem, yang keberadaannya tak lain adalah untuk memastikan sistem dalam partai

bekerja dengan baik. Sementara itu, komitmen untuk menegakkan CRM terhubung dengan upaya PKS menegakkan aturan main bagi seluruh kader. CRM dibangun sebagai upaya memastikan ketaatan seluruh anggota terhadap aturan main dan sebagai media untuk memberdayakan dan melindungi kader-kader partai. Komitmen partai terhadap kaderisasi sangat terkait dengan ideologi partai, yang mendudukkan kader sebagai elemen terpenting dalam mencapai tujuan. Komitmen untuk membangun peradaban yang bermula dari individu mendorong partai untuk mengembangkan dan memberdayakan pemahaman kader sehingga mereka dapat termotivasi dan bersikap militan dalam mewujudkan komitmen partai tersebut. Karena alasan ini, partai membangun seperangkat kurikulum dan institusi-institusi pelaksanaannya serta mewajibkan setiap kader untuk mengikuti dan melaksanakannya.

Terkait dengan infusi nilai-nilai bersama, keberhasilan PKS untuk menegakkan dimensi ini terutama terkait dengan upaya untuk mengembangkan ideologi dan metode (*manhaj*) Islam secara serius dan komprehensif, yang nantinya dijadikan pedoman bagi aktivitas keseharian kader. Keberhasilan untuk menegakkan dimensi ini juga terkait dengan komitmen untuk membangun sebuah sistem yang dapat mentransmisi ideologi Islam secara terus-menerus dan sistematis yang dianut partai kepada seluruh kadernya. Komitmen ini dijaga melalui *halaqah*. Kajian di atas secara umum menegaskan bahwa keberhasilan PKS dalam mengembangkan dimensi pelembagaan terkait dengan komitmen partai untuk menegakkan ideologinya. Dengan kata lain, kasus PKS menunjukkan bagaimana keberhasilan partai yang memiliki komitmen yang kuat untuk menegakkan ideologi sejalan dengan upayanya untuk menegakkan pelembagaan partai.

Dari pembahasan di atas dapat dilihat bahwa partai Islam bukanlah sebuah entitas yang monolitik. Terdapat keberagaman di dalamnya, termasuk berbagai keragaman dalam konteks pelembagaan. Dalam kaitannya dengan pelembagaan, pembahasan di atas menunjukkan bahwa perpecahan ataupun soliditas tidak ditentukan

oleh faktor Islam, namun pada bagaimana partai itu dikelola dan kemampuan partai untuk bersungguh-sungguh dan konsisten dalam menjalankan aturan main dan menciptakan perangkat-perangkat yang dapat melindungi partai dari perpecahan. Meskipun demikian, pembinaan ideologi Islam dalam partai menjadi salah satu elemen penting yang tidak juga dapat diabaikan begitu saja. Kasus PKS memperlihatkan bagaimana Islam yang coba dijadikan pegangan secara konsisten dapat menjadi elemen penting dalam memodernkan partai dan secara umum menyebabkan partai menjadi utuh dan mampu bekerja sebagaimana mestinya.

Kasus PKS menunjukkan sisi lain di partai Islam. Kemampuan partai ini untuk mempertahankan soliditasnya selama lebih dari satu dekade di era Reformasi Indonesia adalah contoh cerita sukses partai berbasis Islam dalam membangun dimensi pelembagaan ke dalam kehidupan partainya. Partai ini dalam beberapa aspek memiliki kualitas sebagai sebuah partai dengan tingkat soliditas yang tinggi. Hal ini termasuk sebagai partai kader (bukan partai massa) dan partai ideologis (bukan partai pragmatis). Namun, kesungguhan menjaga konsistensi untuk membangun sistem, menghargainya, dan konsisten dalam pelaksanaannya memainkan peran yang lebih penting dalam menegakkan pelembagaan dan akhirnya soliditas partai.

Kasus PKB memperlihatkan bagaimana dimensi-dimensi yang dulu ada dan menjadi penyebab bagi munculnya fragmentasi partai-partai Islam di masa sebelum reformasi dapat muncul kembali di era reformasi. Faktor-faktor itu termasuk yang pertama, adanya figur yang berdiri di atas konstitusi yang kerap kali menyingkirkan aturan main dan menyinggung rasa keadilan, sebagaimana yang juga terjadi di PSII yang melahirkan Partii. Kedua adalah komitmen ideologi dan nilai-nilai bersama yang lemah, yang di masa lalu telah terbukti menghadirkan SI-Merah dan juga PSII-Kartosuwiryo di dalam tubuh PSII. Faktor ketiga adalah persoalan kaderisasi yang menyebabkan munculnya multi-loyalitas dan perbedaan dalam partai seperti dalam kasus keluarnya NU dari Masyumi di mana pengaderan

pada dasarnya diserahkan kepada organisasi masing-masing. Terakhir, CRM yang tidak memadai juga makin menyulitkan setiap kader untuk membuka dialog yang sehat, yang menyulitkan kelompok Barisan Penyadar dan PSII menyelesaikan persoalan secara efektif. Fenomena ini menunjukkan keberlanjutan berbagai aspek yang dari waktu ke waktu muncul sebagai alasan kegagalan partai-partai Islam untuk menjaga soliditas mereka. Dalam hal ini, dapat dikatakan ada semacam stagnasi di dalam kehidupan partai Islam.

Meskipun pembahasan pada buku ini difokuskan pada peran institusi, buku ini juga menyentuh pula aspek-aspek seputar peranan individu dalam kehidupan riil partai. Dengan demikian, buku ini melihat adanya peranan aspek non-institusi dalam kehidupan partai. Buku ini secara umum juga melihat peranan individu itu sebagai sebuah dampak dari kondisi pelembagaan, ketimbang sebagai sebuah variabel yang menentukan dalam fenomena perpecahan atau soliditas partai. Dengan kata lain, buku ini cenderung melihat peranan individu sebagai pelengkap saja.

Penulis menyadari bahwa sejumlah pihak lebih melihat peran penting dari individu, khususnya pertarungan kepentingan, dalam persoalan munculnya perpecahan dan soliditas di kedua partai ini. Kalangan ini, misalnya, melihat peran Gus Dur dan lawan-lawan politiknya di lingkaran dalam kekuasan sebagai faktor utama di balik perpecahan PKB. Di sisi lain, kalangan ini juga melihat komitmen Aminuddin untuk mempertahankan sistem sebagai faktor terpenting yang memuluskan jalan terciptanya soliditas di PKS. Walaupun jelas naif untuk mengabaikan begitu saja peran-peran yang bersifat individual dalam kehidupan organisasi, berbagai kasus yang dikaji di atas menunjukkan bahwa munculnya resistensi yang berujung pada perpecahan di PKB dipicu terutama oleh pelanggaran prosedur partai daripada adanya kepentingan individu yang mencari kekuasaan. Lawan-lawan politik Gus Dur menyatakan dengan jelas bahwa komitmen untuk mempertahankan AD/ART partai secara konsisten dan demokrasi internal adalah tujuan utama resistensi mereka.

Di sisi lain, Gus Dur memang secara individual membuat sejumlah kebijakan kontroversial yang membahayakan kesatuan partai dan membuatnya dikenal sebagai 'tokoh kontroversial'. Akan tetapi, jika kita telaah secara saksama, terlihat jelas bahwa situasi ini terjadi karena partai tidak cukup siap untuk menempatkan gagasan, agenda, harapan, atau perilaku Gus Dur untuk tetap segaris atau sejalan dengan prosedur partai. Oleh karena itu, lemahnya pelembagaan telah membuka peluang bagi individu seperti Gus Dur untuk dapat melaksanakan keinginan dan kepentingannya dengan mudah. Dengan kata lain pula, perpecahan akan tetap mungkin terjadi dengan atau tanpa adanya 'tokoh kontroversial', tetapi juga karismatik seperti Gus Dur, sepanjang partai terus-menerus lemah dalam membangun prosedur yang dihormati, tidak didukung dengan CRM yang efektif, tidak dapat membangun kaderisasi dan rekrutmen yang objektif serta gagal meyakinkan kadernya untuk melihat partai lebih dari sebagai *dispensable tool*.

Buku ini tidak melihat relevansi reifikasi terhadap munculnya perpecahan atau soliditas partai. Reifikasi sebagai dimensi eksternal pelembagaan partai, merupakan hal yang terutama terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari pola hubungan antara masyarakat dan partai. Dalam kedudukan tersebut, reifikasi kurang relevan untuk membahas persoalan perpecahan atau soliditas partai dalam konteks partai Islam di Indonesia. Meskipun berbagai kajian melihat faktor pembelahan yang ada dalam masyarakat sebagai elemen penting yang berkontribusi terhadap pembelahan di dalam partai, kasus PKB dengan jelas menunjukkan bahwa masalah utama perpecahan internal ada di dalam partai itu sendiri. Kasus PKS juga menunjukkan bahwa faktor-faktor internal memainkan peranan utama dalam menjaga soliditas partai.

Buku ini juga mengesampingkan peranan sistem politik sebagai faktor eksternal dari fenomena perpecahan dan soliditas partai. Kasus PKS menunjukkan bahwa sistem politik yang terbuka dan demokratis tidak secara otomatis menjadi katalis atau medium untuk

perpecahan internal. Setelah lebih dari satu dekade hidup dalam sebuah sistem yang membuka peluang bagi munculnya persaingan sebagai dampak dari kebebasan berekspresi, perpecahan tidak pernah terjadi di partai ini.

Bagi sebagian kalangan, satu dekade bukanlah waktu yang cukup untuk dapat memotret kondisi keseluruhan dari sebuah partai. Sejumlah partai sosialis yang penting di Eropa, seperti Partai Demokrat Sosial Jerman (SPD) dan Partai Sosialis Italia (PSI), misalnya, mampu membangun soliditas lebih dari satu dekade sebelum akhirnya mengalami perpecahan. Meskipun demikian, berbagai kajian tentang partai-partai sosialis ini sebenarnya menunjukkan bahwa perpecahan merupakan akibat dari perselisihan ideologi dan konflik personal di tingkat elite daripada sebagai dampak langsung sistem politik. Pembahasan di atas juga menunjukkan bahwa hubungan antara sistem presidensial dan kecenderungan perpecahan, yang diyakini oleh sejumlah pakar, tampak kurang memiliki relevansi dalam kasus partai-partai Islam Indonesia. Akan tetapi, munculnya semacam pengkubuan yang tumbuh di PKS setelah sistem politik Indonesia melaksanakan pemilihan presiden langsung pada tahun 2004, merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji dalam melihat korelasi antara bentuk sistem pemerintahan dan fenomena fragmentasi internal.

Pembahasan di atas juga mengisyaratkann bahwa peran dimensi-dimensi pelembagaan jauh lebih signifikan dalam pembangunan soliditas daripada peran dari berbagai aspek lain, seperti sistem politik atau kondisi sosial dan budaya. Dengan kata lain, pada akhirnya, soliditas partai lebih ditentukan oleh situasi internal ketimbang faktor-faktor eksternal seperti sistem politik atau latar belakang budaya tempat partai itu tumbuh. Sehubungan dengan hal ini, keberadaan budaya atau nilai-nilai bersama tidak dapat diabaikan. Hal ini dapat menjelaskan perilaku anggota partai, yang akhirnya memberikan indikasi ada atau tidak adanya dimensi pelembagaan di sebuah partai.

Di lain pihak, buku ini memperlihatkan bahwa model organisasi memiliki hubungan dengan perkembangan soliditas partai. Dalam hal ini, kemampuan untuk membangun fungsi-fungsi manajerial, termasuk disiplin partai dan penegakan aturan main partai, menjadi turut menentukan. Kajian di atas juga cenderung mengonfirmasi peran krusial ideologi dalam soliditas partai. Kasus yang terjadi di PKB memang tidak mengindikasikan adanya pertarungan ideologis yang akut antara sesama kader, yang berujung pada munculnya perpecahan internal. Namun, kasus PKB menunjukkan dengan jelas bahwa perpecahan terjadi karena hilangnya relevansi ideologi dalam kehidupan partai dan kegagalan menjadikan ideologi sebagai faktor pengikat di antara sesama kader.

2. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penulis menyadari bahwa ada sejumlah aspek penting dan menarik lain yang tidak terbahas dalam buku ini. Karena keterbatasan penulislah berbagai aspek itu tidak dapat diungkap di dalam buku ini. Salah satu aspek penting itu adalah eksplorasi atas partai-partai Islam lainnya. Dalam perkembangannya, sejumlah partai Islam dapat tetap melangsungkan keberadaannya, sedangkan yang lain gagal. Di antara partai yang dapat bertahan hingga sekarang adalah PPP dan PAN. Hal yang menarik adalah selama dekade pertama Era Reformasi, keduanya juga mengalami perpecahan internal. PPP bahkan kembali mengalami sebuah konflik internal hebat di tahun 2014 menjelang dan pasca-berlangsungnya Pilpres 2014. Berbagai kajian tentang partai-partai ini sangatlah menantang. Diharapkan bahwa kajian dalam buku ini dapat memberikan sebuah perspektif dan asumsi awal yang berguna untuk membahas fenomena perpecahan dan soliditas pada partai-partai ini dan partai-partai Islam lainnya di Indonesia.

Selain itu, perkembangan internal di PKB dan PKS setelah tahun 2008 juga merupakan hal yang patut untuk dikaji. Kedua partai mengalami dinamika internal yang menarik. Setelah dinyatakan berhak oleh KPU untuk ikut pemilu, PKB-Muhaimin menjadi salah satu

partai peserta Pemilu 2009. Pada pemilu tersebut, PKB-Muhaimin menghadapi kenyataan pahit berupa turunnya suara PKB menjadi sekitar empat juta, atau turun sekitar tujuh juta suara dari pemilu sebelumnya. PKB-Muhaimin tampak merasakan dampak buruk dari perpecahan internal. Setelah Gus Dur wafat pada Desember 2010, masing-masing kelompok yang berkonflik, PKB-Muhaimin, PKB-Gus Dur, dan PKNU tetap merupakan kelompok yang terpisah. Pada 2011, PKB-Gus Dur yang dipimpin Yenny Wahid mengubah nama menjadi PKBN dan meninggalkan PKB-Muhaimin sebagai satu-satunya kelompok yang memimpin PKB.

Perpecahan yang terjadi sebanyak tiga kali pada akhirnya memberikan pelajaran bagi PKB, khususnya PKB-Muhaimin, yang mendorong partai ini lebih sadar akan pentingnya pelembagaan. Saat ini, semakin sering terlontar pernyataan dari sejumlah tokoh berpengaruh partai ini tentang pentingnya membangun pelembagaan. Kesadaran ini terlihat dengan munculnya aturan dan regulasi internal baru, misalnya dengan membuat mekanisme kaderisasi yang lebih serius dan membuat badan untuk menangani CRM. Situasi dan kondisi baru dalam hal tertentu membantu PKB-Muhaimin menjaga soliditas partai. Perkembangan semacam ini merupakan subjek yang menarik untuk dikaji, yang tentu saja membutuhkan riset mendalam untuk dapat lebih menjelaskannya.

Setelah Pemilu 2014, PKS menjadi partai Islam ketiga dengan suara terbanyak, meskipun sempat menjadi Partai Islam terbesar di Indonesia pasca-Pemilu 2009. Secara umum partai ini masih menjadi sebuah *mediocre party* dalam hal jumlah suara. Meskipun masih dapat menjaga soliditas partai, partai ini menghadapi pengalaman baru dan penting. Sejumlah kritik dan sikap resistensi dari mantan kader tampak lebih berani disampaikan kepada pemimpin partai. Tindakan hukum untuk membatalkan pemecatan yang diambil Yusuf Supendi melalui pengadilan merupakan salah satu contoh penting. Sejumlah pihak meyakini bahwa partai ini mengalami faksionalisme internal yang lebih serius dari yang diduga, yang kemudian turut memengaruhi

dinamika internal di partai ini. Unsur kritis cenderung semakin tumbuh dalam partai meskipun tetap sulit untuk benar-benar eksis. Kemudian, sejumlah pihak juga mulai mempertanyakan kualitas kaderisasi, yang kemudian berdampak pada perolehan suara yang stagnan pada Pemilu 2014, selain yang diyakini oleh banyak kalangan, terkait dengan kasus korupsi yang menimpa presiden partai. Kajian dalam buku ini tentang pelembagaan di PKS dalam batas-batas tertentu dapat memberikan sebuah perspektif dalam mengkaji situasi terkini di PKS. Namun, penelitian yang lebih komprehensif dan terperinci setelah tahun 2008 tentunya dibutuhkan dalam upaya lebih memahami perkembangan terakhir di partai ini.

BIBLIOGRAFI

A. Sumber Utama

1. Wawancara dengan Pemimpin dan Kader Partai Kebangkitan Bangsa

Wawancara dengan Abdul Khalik Ahmad, Sekretaris Faksi PKB di DPR RI (1999–2001) dan Sekretaris Jenderal PKB-Matori (2000–2005), di Jakarta, 11 Oktober 2010.

Wawancara dengan Agus Suflihat, Ketua Dewan Tanfidz PKB (1998–2001) , melalui telepon, Jakarta-Bandung, 11 Oktober 2010.

Wawancara dengan Ahmad Shodiq Noor, Sekretaris Jenderal DPW PKB DKI Jakarta, di Jakarta, 3 November 2010.

Wawancara dengan Dr. Ali Masykur Musa, Wakil Ketua Dewan Tanfidz PKB (2005–2010) dan Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB-Parung (2008–2009), di Jakarta, 19 Oktober 2010.

Wawancara dengan Anas Nashikin, Sekretaris Jenderal Garda Bangsa, di Jakarta, 26 Oktober 2010.

Wawancara dengan Andi M. Ramly, Ketua Dewan Tanfidz (2002–2010), Sekretaris Dewan Syura PKB-Muhaimin (2008–2010), dan penulis "Mabda Syiyasi PKB," di Jakarta, 15 Oktober 2010.

Wawancara dengan Choirul Anam, Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Jawa Timur (1998–2005) dan Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB-Alwi (2005–2007), di Jakarta, 13 Oktober 2010.

Wawancara dengan H.Z. Arifin Junaidi, Sekretaris Jenderal Dewan Syura PKB (2002–2005) dan Ketua Dewan Syura PKB (2005–2010), di Jakarta, 28 Oktober 2010.

Wawancara dengan Ida Fauziyah, Anggota DPR (2010–2015), di Jakarta, 14 Oktober 2010.

Wawancara dengan Khofifah Indar Parawansa, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999–2001), Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu PKB (2002–2005), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

Wawancara dengan Marinah Hardy, Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Nusa Tenggara Barat (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktober 2010.

Wawancara dengan Muamir M. Syam, Ketua PKB (2005–2010), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

Wawancara dengan Prof. Dr. Kacung Marijan, Pengamat NU dan Anggota Tim Asistensi Rencana Pembentukan PKB (versi Rembang), di Jakarta, 26 November 2010.

Wawancara dengan Zannuba Arifah "Yenny" Wahid, Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz PKB-Wahid (2008–2010), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

Wawancara dengan Tohadi, Anggota PKB (1996–2005) dan Wakil Ketua PKNU DPP, di Jakarta, 6 Oktober 2010.

Wawancara dengan Imam Nahrowi, Ketua Umum DPW PKB Jawa Timur dan Anggota DPR (2009–2014), di Jakarta, 25 Oktober 2010.

Wawancara dengan Khatibul Umam Wiranu, Wakil Sekretaris Jenderal PKB (1999–2005), dan Anggota DPR (1998–2004), di Depok, 17 Oktober 2010.

Wawancara dengan Dr. A. Effendy Choirie, Anggota DPR (1998–2011) dan Ketua Dewan Tanfidz PKB-Versi Parung (2008–2009), di Jakarta 19 Oktober 2010.

Wawancara dengan Abdul Muhaimin Iskandar, Sekretaris Jenderal PKB (2000–2002), Ketua Dewan Tanfidz (2002–2005), Ketua Umum Dewan Tanfidz (2005–2013), dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di Jakarrta, 15 Oktober 2010.

Wawancara dengan Munib Huda Abdullah, Wakil Sekretaris Jenderal PKB (2008–2010) dan Sekretaris Pribadi Abdurrahman Wahid, di Jakarta, 26 Oktober 2010.

Wawancara dengan A. Mustafa Bisri, Salah Satu Pendiri PKB, di Rembang, 11 November 2010.

2. Wawancara dengan Pemimpin dan Kader PKS

Wawancara dengan Ahmad Feri Firman Yusuf, Ketua Wilayah Dakwah III (2002–2005) Anggota Majelis Syura PKS (2002–2010), di Jakarta, 2 November 2010.

Wawancara dengan Akmal Burhanuddin, Aktivis Tarbiyah dan Mahasiswa di Mesir yang Bergabung dengan PKS Setelah Menyelesaikan Studinya, di Jakarta, 24 Oktober 2010.

Wawancara dengan Amri Yusra, M.Si., Ketua DPD PKS Depok (2002–2004), Anggota DPRD Depok, Jawa Barat (2004–2009), dan Dosen di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, di Depok, 7 Oktober 2010.

Wawancara dengan Aus Hidayat Nur, Ketua Wilayah Dakwah II (2002–2005) dan Ketua BPDO (2010–2015), di Jakarta, 15 Oktober 2010.

Wawancara dengan Dr. Kamarudin, Pakar Partai Politik Islam dan Dosen di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, di Depok, 7 Oktober 2010.

Wawancara dengan Dr. Prihandoko, Ketua DPP PKS Depok (2004–2007), di Depok, 5 Oktober 2010.

Wawancara dengan Dr. Yon Mahmudi, Pengamat PKS dan Gerakan Tarbiyah, Dosen di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, dan Penandatangan Deklarasi Pendirian PKS, di Depok, 6 Oktober 2010.

Wawancara dengan Hidayat, M.M., Anggota DPRD Kabupaten Tangerang (2005–2010), di Tangerang, 21 Oktober 2010.

Wawancara dengan K.H. Yusuf Supendi Lc, Anggota DSP PKS (2000–2005) dan Anggota DPR (2004–2009), di Jakarta, 3 November 2010.

Wawancara dengan Kemal A. Stamboel, Ketua Dewan Pakar PKS dan Anggota DPR (2009–2014), di Jakarta, 8 Oktober 2010.

Wawancara dengan Mahfudz Siddiq, Kedua Departemen Kaderisasi DPP PKS (2002–2005) dan Anggota DPR (2004–2014), di Jakarta, 27 Oktober 2010.

Wawancara dengan Musa Abdillah, Ketua Departemen Kaderisasi DPC PKS Kelapa Dua, di Jakarta, 23 Oktober 2010.

Wawancara dengan Mustofa, kader PKS dan Wartawan Majalah Profetik, di Depok, 7 Oktober 2010.

Wawancara dengan Nooryanto, Kedua Departemen Kaderisasi DPD PKS Bekasi, di Bekasi, 7 November 2010.

Wawancra dengan Selamat Nurdin, M.M., Mantan Pemimpin Aktivis *Tarbiyah* di Universitas Indonesia dan Anggota DPRD DKI Jakarta (2004–2014), di Jakarta, 22 Oktober 2010.

Wawancara dengan Sigit Sosiantomo, Koordinator Regional PKS untuk Jawa Timur dan Bali (2005–2009), di Jakarta, 25 Oktober 2010.

Wawancara dengan Sitaresmi S., M.Psi., Anggota Departemen Dakwah DPP PK (2000–2003), di Jakarta, 8 Oktober 2010.

Wawancara dengan Umar Salim Basalah, Wakil Sekretaris Jenderal PKS (2002) dan Sekretaris Pribadi Hidayat Nur Wahid, di Jakarta, 12 Oktober 2010.

Wawancara dengan Untung Wahono, Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan DPP PK (2000–2003), Kepala Departemen Politik dan Pertahanan DPP PKS (2002–2005), dan Ketua MPP PKS (2010–2015), di Jakarta, 27 Oktober 2010.

Wawancara dengan Dr. Mardani Ali Sera, Wakil Ketua MPP PKS (2010–2015), di Jakarta, 6 Oktober 2010.

Wawancara dengan Hurriyah, M.A., Pengamat Kaderisasi PKS dan Dosen di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, di Depok, 29 Oktober 2010.

Wawancara dengan Noviyanti Utamingsih, Kader PKS, di Jakarta, 9 Oktober 2010.

Penulis juga melakukan sejumlah wawancara dengan anggota Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera, namun karena sejumlah alasan mereka tidak menghendaki namanya dikutip.

2. Dokumentasi Resmi

2.1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

"Berita Acara Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa," di *Laporan Lengkap Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa.* Hotel Mercure Ancol, Jakarta, 2–4 Mei 2008. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, 2008.

"Berita Acara tentang Upaya Penyelesaian Perselisihan Politik Partai Kebangkitan Bangsa oleh Tim Utusan Muktamar Luar Biasa untuk Upaya Pe-

nyelesaian Perselisihan Politik PKB melalui Mekanisme Musyawarah." Dewan Pengurus Pusat Partai kebangkitan Bangsa, *Laporan Lengkap Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa,* Hotel Mercure Ancol, Jakarta 2–4 Mei 2008.

"Laporan Pelaksanaan Kebijakan-Kebijakan DPP PKB Masa Bakti 1998–2000," di *Dokumen Muktamar I PKB. Membangun Persaudaraan Sejati Antar Manusia sebagai Esensi Rekonsiliasi Nasional.* Jakarta: DPP PKB, 2000.

"Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa 2005–2008. Menyelamatkan Partai dan Konsolidasi Politik Menjelang 2009." Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, *Laporan Lengkap Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa.* Hotel Mercure Ancol, Jakarta 2–4 Mei 2008.

"Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Masa Bakti 2002–2005." *Membangun Demokrasi Berbasis Tradisi: Ketetapan-Ketetapan Muktamar II Partai Kebangkitan Bangsa Tanggal 1–2 Oktober 2005 di Surabaya*, Jakarta: DPP PKB, 2005.

"Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa," disampaikan dalam *Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa.* Hotel Borobudur, Jakarta, 14–16 Januari 2002. DPW PKB Provinsi Bengkulu, 2002.

"Perjalanan Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa. Jakarta, 2–4 Mei 2008." Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, *Laporan Lengkap Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa.* Hotel Mercure Ancol, Jakarta 2–4 Mei 2008.

"Pidato Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Masa Bakti 1998–2000." *Dokumen Muktamar I PKB. Membangun Persaudaraan Sejati Antar Manusia sebagai Esensi Rekonsiliasi Nasional.* Jakarta: DPP PKB, 2000.

"Rekrutmen Caleg." *PKB dalam Pemilu 2004*. Jakarta: DPP PKB.

"Sistem Kaderisasi PKB," di *Dokumen Muktamar I PKB. "Membangun Persaudaraan Sejati Antar Manusia sebagai Esensi Rekonsiliasi Nasional."* Jakarta: Dewan Pengurus Pusat PKB, 2000.

Anam, Choirul. "PKB tanpa Kiyai, A-Historis," *Membangun Demokrasi Berbasis Tradisi: Ketetapan-Ketetapan Muktamar II Partai Kebangkitan Bangsa Tanggal 1–2 Oktober 2005 di Surabaya*. Jakarta: DPP PKB, 2005.

Keputusan No. 3/MLB/PKB/V/2008 tentang *Tim Utusan Muktamar Luar Biasa untuk Penyelesaian Perselsiaihan Politik PKB melalui Musyawarah.*

Keputusan No. 5/MLB/PKB/V/2008 tentang *Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum Dewan Syura PKB Periode 2005–2010*.

Dokumentasi Hasil Muktamar II Partai Kebangkitan Bangsa, Semarang, 16–19 April, Jakarta: DPP PKB, 2005.

DPP PKB. "Membangun Politik Rahmatan Lil'Alamin: Hasil-Hasil Musyawarah Kerja Nasional I PKB dan Silaturahmi Alim Ulama." Jakarta: DPP PKB, 1999.

DPW PKB Jawa Timur. *Data dan Fakta Pelanggaran AD/ART di Muktamar II Semarang*. DPW PKB Jawa Timur, 2005.

Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, disampaikan pada *Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa*. Hotel Borobudur, Jakarta, 14–16 Januari 2002.

Menggerakan Roda Partai dan Perubahan Sosial di Tingkat Basis. Modul Pendidikan Dasar Politik Tingkat Anak Cabang Sistem Kaderisasi Partai kebangkitan Bangsa. Jakarta: DPP PKB, 2000.

Menjadi Politisi Negarawan, Modul Pelatihan dan Orientasi Politik DPC-DPW PKB Modul Orientasi Ideologi DPP PKB. Jakarta: DPP PKB, 2000.

Menjadi Politisi Organiser Masyarakat. Panduan Pendidikan Kader Basis Partai Kebangkitan Bangsa. Jakarta: Lembaga Kaderisasi dan Pendidikan Politik, 2003.

Menumbuhkan Kader Bangsa. Investasi Politik Bersama Rakyat. Konsepsi Dasar dan Metodologi Sistem Kaderisasi Partai Kebangkitan Bangsa. Jakarta: DPP PKB, 2000.

Anggaran Dasar (AD) PKB 1998.

Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB 1998.

Anggaran Dasar (AD) PKB 2000.

Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB 2000.

Anggaran Dasar (AD) PKB 2002.

Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB 2002.

Anggaran Dasar (AD) PKB 2005.

Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB 2005.

Anggaran Dasar (AD) PKB 2008.

Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB 2008.

Anggaran Dasar (AD) Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama (PKNU).

Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama (PKNU).

Wahid, Abdurrahman. "Sambutan Pembukaan Muktamar Luar Biasa PKB di Yogyakarta, 17–19 Januari 2002", dalam *AD/ART Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa,* oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa. Jakarta: Sekretariat DPP PKB, 2002.

2.2 Partai Keadilan Sejahtera

"Kebijakan Dasar PK." *Buku Anggaran Dasar Partai Keadilan*. Depok: Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Kota Depok.

Bayan DPP Partai Keadilan Sejahtera No. 02/BYN/DPP-PKS/VII/1425 tentang Sikap Politik Mendukung Pasangan SBY-JK pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua.

Bayan PKS, 6 Februari 2008.

Bidang Kewanitaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. *Rakornas Bidang Kewanitaan Partai Keadilan Sejahtera*. Jakarta: 2001.

Buku AD/ART PK Masa Bhakti 2000–2005. Depok, DPD Partai Keadilan.

Departemen Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera. *Manajemen Tarbiyah Anggota Pemula*. Bandung: Penerbit Asy-Syaamil, 2004.

Departemen Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera. *Manhaj Kaderisasi Anggota Partai Keadilan,* Tidak Diterbitkan. Jakarta: Departemen Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera.

Departemen Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera. *Sekilas tentang Sistem Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera*, Tidak Diterbitkan. Jakarta: Departemen Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera, 2004.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan. *Prinsip Dasar Partai Keadilan*. Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan, 1999.

DPP Partai Keadilan. *Risalah Am Jamahiri 1423, Seri Dokumentasi Partai*. Jakarta: DPP Partai Keadilan.

http://munaspks.info/

Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Partai Keadilan Sejahtera. *Panduan Pengambilan Kebijakan Dalam Musyawarah Partai Keadilan*. Jakarta, 2000.

Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. *Memperjuangkan Masyarakat Madani. Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera*. Jakarta: MPP PKS, 2008.

Satori, Ahmad, et al. *Taujihat Ri'ayah Ma'nawiyah Kader PKS Sejahtera*. Jakarta: Departemen Kaderisasi DPP PKS, 2003.

Sekilas Partai Keadilan. Jakarta: Sekretariat DPP Partai Keadilan, 1998.

Anggaran Dasar (AD) PKS 2002.

Anggaran Rumah Tangga (ART) PKS 2002.

Anggaran Dasar (AD) PKS 2005.

Anggaran Rumah Tangga (ART) PKS 2005.

Anggaran Dasar (AD) Partai Keadilan.

Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Keadilan.

Muqadimmah AD PKS 2005.

Bidang PSDM PK Sejahtera. *Mobilitas Kader Da'wah: Arah Kebijakan Da'wah dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia*, Tidak Diterbitkan. Jakarta: DPP Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta, 2003.

Bidang Kaderisasi DPP PK Sejahtera. *Manajemen Tarbiyah Anggota Pemula*. Jakarta: DPP PK Sejahtera dan PT Syaamil Cipta Media, 2004.

Departemen Kaderisasi PKS. *Profil Kader Partai Keadilan Sejahtera*. Bandung: Syaamil Cipta Media, 2004.

Departemen Kaderisasi PK-Sejahtera. *Manajemen Tarbiyah Anggota Pemula*. Jakarta: DPP PKS Departemen Kaderisasi dan PT Syaamil Cipta Media, 2005.

DPP Partai Keadilan Sejahtera. *Seri Manhaj Tarbiyah Manajemen Tarbiyah Anggota Pemula*, Jakarta: DPP PK Sejahtera dan PT Syaamil Cipta Media, 2004.

Tim Kerja Penyusunan Kurikulum. *Satuan Acara Pembelajaran Tarbiyah Islamiyah: Buku 1*, Tidak Diterbitkan.

Tim Kerja Penyusunan Kurikulum. *Satuan Acara Pembelajaran Tarbiyah Islamiyah: Buku 2*, Tidak Diterbitkan.

Tim Kerja Penyusunan Kurikulum. *Satuan Acara Pembelajaran Tarbiyah Islamiyah: Buku 3*, Tidak Diterbitkan.

B. Sumber Sekunder

Abdullah, Taufik. *Nasionalisme dan Sejarah*. Jakarta: Satya Historika, 2001.

Ahmad, Abdul Khaliq. "Pergumulan Politik Sang Pemberani." Dalam *Pergulatan Membela yang Benar. Biografi Matori Abdul Djalil,* diedit oleh Ali dan Nurhuda Y. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.

Ahnaf, Muhammad Iqbal. "MMI dan HTI: The Image of the Others." Dalam *Negara Tuhan The Thematic Encyclopaedia*, diedit oleh A. Maftuh Abegebriel, A. Yani Abeveiro, SR-Ins Team. Jakarta: SR-Ins Publishing.

Al-Banna, Hasan. *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimun, Jilid 2*. Solo: Eramedia, 2001.

Al-Chaidar. *Pemilu 1999: Pertarungan Ideologis Partai-Partai Islam versus Partai-Partai Sekuler*. Jakarta: Darul Falah, 1998.

Ali, Mahrus, dan M.F. Nurhuda Y., eds. *Pergulatan Membela yang Benar. Biografi Matori Abdul Djalil*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.

Al-Jufri, Salim Segaf. Pengantar dalam *Penerapan Syariat Islam di Indonesia antara Peluang dan Tantangan*, oleh Bukhori Yusuf dan Iman Santoso. Jakarta: Globalmedia Cipta Publishing dan Pusat Konsultasi Syariah, 2004.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Umat Islam Menyongsong Abad 21: Sebuah Catatan Akhir Abad, Evaluasi Perjalanan Umat Abad ke-20 dan Proyeksi Abad ke-21*. Solo: Era Intermedia, 2001.

Aminuddin, Hilmi. Kata Pengantar Ketua Majelis Syura dalam *Memperjuangkan Masyarakat Madani. Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera*, oleh Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Jakarta: MPP PKS, 2008.

Aminuddin, Hilmi. *Strategi Dakwah Gerakan Islam*. Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 2003.

Amir, Zainal Abidin. *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*. Jakarta: LP3ES, 2003.

Anam, Choirul. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Solo: PT Duta Aksar Mulia, 2010.

Anderson, Benedict. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso Editions and NLB, 1983.

Anwar, H. Fuad. *Melawan Gus Dur*. Yogyakarta: Pustaka Toko Bangsa, 2004.

Arifin, Ichwan. "Kiai dan Politik. Studi Kasus Perilaku Politik Kiai dalam Konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasca Muktamar II Semarang." Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, 2008.

Azis, Nyimas Latifah Letty. "Pelembagaan Partai Bulan Bintang (PBB): Penerus Misi Masyumi." Dalam *Pelembagaan Partai Politik Pasca Orde Baru Studi Kasus Partai Golkar, PKB, PBB, PBR, dan PD,* diedit oleh Lili Romli. Jakarta: P2P LIPI, 2008.

Azra, Azyumardi. "Islam Politik pada Masa Pasca-Soeharto." Dalam *Satu Islam Multi Partai: Membangun Integritas di Tengah Pluralitas*, oleh A.M. Fatwa. Bandung: Mizan, 2000.

Balda, Syamsul, Abu Ridho, dan Untung Wahono. *Politik Da'wah Partai Keadilan*. Jakarta: DPP Keadilan, 2000.

Barton, Greg. *Indonesia's Struggle, Jamaah Islamiyah and the Soul of Islam*. Sydney: NSW Press, 2004.

Baswedan, Anies. "Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory." *Asian Survey* 44, No.5 (Sep-Okt 2004).

Basyaib, Hamid dan Hamid Abidin. *Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam dari Pra Pemilu 1999 sampai Pemilihan Presiden*. Jakarta: Alphabet, 1999.

Bell, David S. dan Eric Shaw, eds. *Conflict and Cohesion in Western European Social Democratic Parties*. London: Pinter Publisher, 1994.

Bennet, D. Scott. "Patterns of Conflict Management and Resolution in Enduring Rivalries." Dalam *Multiple Paths to Knowledge in International Relations Methodology in the Study of Conflict Management and Conflict Resolution*, diedit oleh Zeev Maoz, Alex Mintz, T. Clifton Morgan, Glenn Palmer dan Richard J. Stoll. Oxford: Lexington Books, 2004.

Bisri, A. Mustofa. "Sekali Lagi PKB." Dalam *Gus Dur Garis Miring PKB*, oleh A. Mustofa Bisri. Surabaya: MataAir Publishing Surabaya, 2008.

Bisri, A. Mustofa. *Gus Dur Garis Miring PKB*. Surabaya: MataAir Publishing, Surabaya, 2008.

Bjorkman, James Warmer. "Party, Personality, and Dynasty." Dalam *Political Parties, Electoral Change and Structural Response*, diedit oleh Alan Ware. Oxford: Basil Blackwell, 1987.

Brass, Paul R. *Factional Politics in an Indian State – The Congress Party in Uttar Pradesh*. Berkeley: University California Press, 1965.

Bubalo, Anthony dan Greg Fealy. *Joining the Caravan? The Middle East, Islamism and Indonesia*. Alexandria: Lowy Institute for International Policy, 2005.

Burhanudin, Nandang. *Penegakan Syariah Islam Menurut Partai Keadilan*. Jakarta: Al-Jannah, 2004.

Busyaeri, Mufid A. *Menggerakkan Roda Partai dan Perubahan Sosial di Tingkat Basis. Modul Pendidikan Dasar Politik Tingkat Anak Cabang Sistem Kaderisasi Partai Kebangkitan Bangsa*. Jakarta: DPP PKB, 2000.

Cahyono, Heru. *Peran Ulama dan Golkar, 1971–1980*. Jakarta: Sinar Harapan, 1992.

Choirie, A. Effendy. *Islam-Nasionalisme UMNO-PKB Studi Komparasi dan Diplomasi*. Jakarta: Pensil-234, 2008.

Choirie, A. Effendy. *PKB Politik Jalan Tengah NU. Eksperimentasi Pemikiran Islam Inklusif dan Gerakan Kebangsaan Pasca Kembali ke Khitah 1926*. Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2002.

Crouch, Harold. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1986.

Dakhiri, M. Hanif, Eman Hermawan, dan Marwan Ja'far. *Workshop Penguatan Sistem dan Manajemen Partai Menyongsong Pemilu 2009*. Jakarta: DPP PKB, 2007.

Daman, H. Rozikin. *Membidik NU Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Damanik, Ali Said. *Fenomena Partai Keadilan, Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*. Bandung: Teraju, 2002.

Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research 2nd Edition*. London: Sage Publication, 1994.

Devine Fiona, Devine. "Qualitative Methods." Dalam *Theory and Methods in Political Sciences*, diedit oleh David Marsh dan Gerry Stocker. Basingstoke: MacMillan, 1995.

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES, 1982.

Dhume, Sadanand. "Indonesian Democracy's Enemy Within, Radical Islamic party threatens Indonesia with ballots more than bullets." *YaleGlobal* (1 Desember 2005).

Duverger, Maurice. *Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State*. London: Methuen, 1964.

Edy, Lukman, et al. "Kronologi Muktamar II PKB, Fakta Historis, Yuridis, dan Politis." Jakarta: DPP PKB, 2005. Dalam *Konflik Internal PKB*, oleh Kamarudin. Depok: Akses Publishing, 2008.

Eldersveld, Samuel J. *Political Parties A Behavioral Analyses*. Chicago: Rand McNally, 1964.

Epstein, Leon D. "Cohesion of British Parliamentary Parties." Dalam *Legislative Behaviour: A Reader in Theory and Research*, oleh John C. Wahike and Heinz Eulau. Glencoe: The Free Press, 1959.

Epstein, Leon D. *Political Parties in Western Democracies*. New Brunswick, New Jersey: Transaction Books, 1980.

Fatwa, A.M. *PAN Mengangkat Harkat dan Martabat Bangsa*. Jakarta: IntranS, 2003.

Fealy, Greg. *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952–1967*. Yogyakarta: LKiS, 2003.

Feith, Herbert. *The Decline of Constituional Democracy in Indonesia*. Itacha: Cornell University Press, 1962.

Feith, Herbert. *The Indonesian Election of 1955*. Ithaca: Cornell University, 1957.

Fickett, Lewis P. Jr. *The Major Socialist Parties of India: A Study in Leftist Fragmentation, Foreign, and Comparative Studies*. New York: Maxwell School of Citizenship and Public Affairs Syracuse University, 1976.

Fuadi, Andi Najmi, ed. "Tinjauan Ilmu Hukum tentang Keabsahan Kepengurusan Partai Kebangkitan Basca Pasca Mahkamah Agung." Jakarta: Lakumham DPPPKB, 2006. Dalam *Konflik Internal PKB*, oleh Kamarudin. Depok: Akses Publishing, 2008.

Furkon, Aay Muhammad. *Partai keadilan Sejahtera, Ideologi dan Praktis Politik Kaum Muda Kontemporer*. Bandung: Teraju, 2004.

Gafar, Affan. "Sistem Kepartaian yang Hegemonik dan Terobosan Demokrasi Indonesia." Dalam "Percikan Pemikiran Fisipol UGM tentang Pembangunan" oleh Amir Effendy Siregar, dkk. Yogyakarta: Fisipol UGM, 1990. Dalam *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi. Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu 2004*, oleh Kamarudin. Jakarta: Visi Publishing, 2003.

Gellner, Ernest. *Nations and Nationalism*. Oxford: Basil Blackwell, 1983.

Gie, Soe Hok. *Di Bawah Lentera Merah, Riwayat Sarekat Islam Semarang 1917–1920*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999.

Grey, Earl dan Henry George. *Parliamentary Government Considered with a Reference to a Reform of Parliament*. London: Rihard Bentley, 1958.

Gubernau, Montserrat dan John Rex, eds. *The Ethnicity Reader Nationalism, Multiculturalism and Migrations*. Cambridge: Polity Press, 1997.

Haidar, M. Ali. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia. Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta: Gramedia, 1998.

Hajar, Ibnu. *Kiai di Tengah Pusaran Politik. Antara Petaka dan Kuasa*. Jogjakarta: IRCISoD, 2009.

Harahap, Abdul Asri. *PPP: Sintesa Nasionalisme dan Religiusitas*. Jakarta: Integritas Dinamika Press: 2004.

Haris, Syamsuddin. "Problematik Institionalisasi PPP." Dalam *Reformasi Kelembagaan Partai Politik Pasca-Orde Baru di Indonesia*, diedit oleh Edison Muchlis. Jakarta: LIPI Press, 2007.

Haris, Syamsuddin. *PPP dan Politik Orde Baru*. Jakarta: Grasindo, 1991.

Harmel, Robert, dan Kenneth Janda. *Parties and Their Environments: Limits to Reform?* New York: Longman, 1982.

Hassan, Sahar L, Kuat Sukardiyono, dan Dadi M.H. Basri, eds. *Memilih Partai Islam, Visi, Misi, dan Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Hennessy, Bernard. "On the Study of Party Organization." Dalam *Approaches to the Study of Party Organization*, diedit oleh William J. Crotty. Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1968.

Hidayat, Syahrul, ed. *Kerangka Penguatan Partai Politik di Indonesia*. Depok: Pusat Kajian Politik, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2008.

Hilmy, Masdar. *Islamism and Democracy in Indonesia Piety and Pragmatism*. Singapore: Institute of South East Asia Studies, 2010.

Hindley, Donald. *The Indonesian Communist Party, 1951–1963*. Los Angeles: University of California Press, 1964.

Hirschman, Albert O. *Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States*. Massachusetts: Harvard University Press, 1970.

Hizbut Tahrir Indonesia. *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia*. Jakarta: HTI, 2009.

Huda, Muhammad Munib, ed. *Pro Kontra Partai Kebangkitan Bangsa,* Jakarta: Fatma Press, 1998.

Huda, Muhammad Munib, ed. *Mutiara Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Fatma Press, 1998.

Huntington, Samuel P. *Political Order in Changing Society*. New Haven: Yale University Press, 1968.

Indarini, Sri. "Dia, Elang yang Terbang Sendirian." Dalam *Pergulatan Membela yang Benar. Biografi Politik Matori Abdul Jalil,* oleh Mahrus Ali dan M.F. Nurhuda Y. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.

Indrawan, Yana, Aip Suherman, dan Tommy Andana, eds. *Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Sejarah, Realita, dan Dinamika*. Jakarta:

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2007.

Institute of History Department of General Affairs PSII, *Short History of PSII*. 1960.

Irsyam, Mahrus. *Ulama dan Partai Politik Upaya Mengatasi Krisis*. Jakarta: Yayasan Perkhidamatan, 1984.

Iskandar, A. Muhaimin. "Fundamental Politik Partai Kerja Modern: PKB Lima Tahun ke Depan." Dalam *Melampaui Demokrasi Merawat Bangsa dengan Visi Ulama. Refleksi Sewindu Partai Kebangkitan Bangsa*, oleh A. Muhaimin Iskandar. Yogyakarta: Klik.R, 2006.

Iskandar, A. Muhaimin. "PKB: Politik *Rahmatan lil Alamin",* Dalam *Memilih Partai, Visi, Misi, dan Persepsi,* diedit oleh Sahar L. Hassan, Kuat Sukardiyono dan Dadi M.H. Basri. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Iskandar, Abdul Muhiamin. *Melampaui Demokrasi Merawat Bangsa dengan Visi Ulama: Refleksi Sewindu Partai Kebangkitan Bangsa*. Jogjakarta: KLIK.R, 2006.

Ismail, Faisal. "Komitmen NU terhadap Perjuangan Bangsa." Dalam *NU, Gusdurisme dan Politik Kiai*, oleh Faisal Ismail. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.

Jalal, Dino Pati. *The Can Do Leadership. Inspiring Stories from SBY Presidency*. Jakarta: Red and White Publishing, 2008.

Jamhari dan Jajang Jahroni, eds. *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Janda, Kenneth. *Political Parties: A Cross National Survey*. New York: The Free Press, 1980.

Jeong, Ho-Won. *Conflict Management and Resolution. An Introduction*. New York: Routledge, 2010.

Junaidi, H.Z. Arifin. "Belajar dari Sejarah PKB." Dalam *9 Tahun PKB. Kritik dan Harapan*, diedit oleh Yenny Zanuba Wahid, A. Effendy Choirie dan M. Kholid Syeirazi. Jakarta: Panitia Nasional Harlah ke-9 PKB, 2007.

Kahin, George McTurner. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Jakarta: UN Press & Sinar Harapan, 1995.

Kamarudin, "Fatsoen dari Partai Keadilan", "Majalah Saksi", Edisi ke-15 tahun ketiga. Dalam "Partai Keadilan: Faktor-faktor Penguat Soliditas," oleh Subhan Akbar. Skripsi, Depok: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004.

Kamarudin. *Konflik Internal PKB*. Depok: Akses Publishing, 2008.

Kamarudin. *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi. Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu 2004*. Jakarta: Visi Publishing, 2003.

Karim, M. Rusli. *Perjalanan Partai-Partai Politik: Sebuah Potret Pasang Surut*. Jakarta: Rajawali Press, 1993.

Karim, Muslih Abdul. "Penerapan Syariat Islam pada Masa Rasulullah SAW." Dalam *Penerapan Syariat Islam di Indonesia antara Peluang dan Tantangan,* oleh Bukhori Yusuf dan Iman Santoso. Jakarta: Globalmedia Cipta Publishing dan Pusat Konsultasi Syariah, 2004.

Kartodirdjo, A. Santoso, et al. *Negara dan Nasionalisme: Integrasi, Disintegrasi, dan Suksesi*. Jakarta: Pusat Studi dan Dokumentasi Sejarah Indonesia, Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma dan Gramedia Widiasarana Indonesia, 1995.

Key, V. O. Jr. *Politics, Parties and Pressure Groups*, Edisi ke-5. New York: Thomas Y. Crowell, 1964.

Kleden, Ignas. *Partai Politik Indonesia. Dari Mesin Partai hingga Volunterisme Politik (Refleksi Wakil Tujuh Partai Politik Indonesia 2008*). Jakarta: Komunitas Indonesia untuk Demokrasi, 2009.

Koirudin. *Menuju Partai Advokasi*. Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2005.

Korver, A.P.E. *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?* Jakarta: Grafiti Press, 1985.

Kristiadi, J. "Pergulatan dan Tantangan PKB Memenuhi Harapan Bangsa." Dalam *9 Tahun PKB, Kritik dan Harapan*, diedit oleh Yenny Zanuba Wahid, A. Effendy Choirie, dan M. Kholid Syeirazi. Jakarta: Panitia Nasional Harlah ke-9 PKB, 2007.

Kumar, Kadar Nath. *India Political Parties*. New Delhi: Mittal Publication, 1990.

Laue, James H. "The Emergence and Institutionalization of Third Party Roles in Conflict." Dalam *Conflict: Readings in Management and Resolution*, diedit oleh John Burton dan Frank Dukes. Hampshire: Macmilan, 1990.

Leirissa, R.Z. *PRRI Permesta: Strategi Membangun Indonesia tanpa Komunis*. Jakarta: Pustaka Utama Grafitti, 1997.

Lembaga Sejarah Departemen Urusan Umum LT PSII. "Keringkasan Sejarah (Kronologi) Syariah Islam, 10 September 1912–10 September 1960." Dalam *Partai Islam di Pentas Nasional. Kisah dan Perkembangan Politik Indonesia 1945–1965*, oleh Noer.

Lev, Daniel S. "Political Parties in Indonesia." *Journal of Southeast Asia History* 8, No. 1 (Mar 1967).

Levitsky, Steven. "Instituionalization and Peronism. The Case, The Concept and Case for Unpacking the Concept." *Party Politics* 4, No.1.

Levitsky, Steven. "Organization and Labor-Based Party Adaptation: The Transformation of Argentine Peronism in Comparative Perspective." *World Politics* 54, No. 1 (Okt 2001).

Liddle, William. *Ethnicity, Party, and National Integration: an Indonesian Case Study*. New Haven: Yale University Press, 1970.

Loewenberg, Gerhard dan Samuel Patterson. *Comparing Legislatures*. Boston: Little Brown, 1979.

Lubis, Satria Hadi. *Yang Nyata dari PK Sejahtera. 35 Manfaat dan Alasan Mengapa Kita Mendukung PK Sejahtera*. Jakarta: Misykat Publication in Partnership with LP2U, 2004.

Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu, Masa Demokrasi Terpimpin, 1959–1965*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Machmudi, Yon. *Partai Keadilan Sejahtera, Wajah Baru Islam Politik Indonesia*. Bandung: Harakatuna Publishing, 2005.

MacIver, R.M. *The Modern State*. Oxford: Oxford University Press, 1926.

Mahendra, Yusril Ihza. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaat-i-Islami (Pakistan)*. Jakarta: Paramadina, 1999.

Mainwaring, Scott dan Timothy R. Scully. *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*. Stanford: Stanford University Press, 1995.

Mainwaring, Scott. "Politicians, Parties, and Electoral Systems: Brazil in Comparative Perspective." *Comparative Politics* 24, No. 1 (Oktober 1991).

Mainwaring, Scott "Political Parties and Democratization in Brazil and the Southern Cone." *Comparative Politics* 21, No. 1 (Oktober 1988).

Majelis Pertimbangan Pusat PK Sejahtera. *Memperjuangkan Masyarakat Madani, Falsafah Perjuangan Dasar, Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera*. Jakarta: MPP PKS, 2008.

Mandan, Arief Mudatsir. *Krisis Ideologi*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2009.

Maor, Moshe. *Political Parties and Party Systems, Comparative Approaches and The British Experience*. London: Routledge, 1997.

Maoz, Zeev. "Conflict Management and Conflict Resolution: A Conceptual and Methodological Introduction." Dalam *Multiple Paths to Knowledge in International Relations. Methodology in the Study of Conflict Management and*

Conflict Resolution, diedit oleh Zeev Maoz, Alex Mintz, T. Clifton Morgan, Glenn Palmer, dan Richard J. Stoll. Oxford: Lexington Books, 2004.

Marijan, Kacung. *Quo Vadis NU. NU Setelah Khittah 1926*. Surabaya: Penerbit Erlangga, 1992.

Martin F. Bull. "Social Democracy's Newest Recruit? Conflict and Cohesion in the Italian Democractic Party of the Left." Dalam *Conflict and Cohesion in Western European Social Democratic Parties*, diedit oleh David S. Bell, dan Eric Shaw. London: Pinter Publisher, 1994.

Mas'oed, Mohtar. *Ekonomi and Struktur Politik Orde Baru 1966–1971*. Jakarta: LP3ES, 1989.

Masyhur, Mushthafa. *Al Qiyadah Wal Jundiah*. Jakarta: Al Ishlahy Press, Tanpa Tahun.

Matta, Anis. *Menikmati Demokrasi Strategi Dakwah Meraih Kemenangan*. Jakarta: Pustaka Saksi, 2002.

McGuire, James W. *Peronism without Peron. Unions, Parties, and Democracy in Argentina*. Stanford: Stanford University Press, 1997.

Mial, Hugh, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse, eds. *Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts*. Cambridge: Polity Press-Blackwell Publishers Ltd, 1999.

Michels, Robert. *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*. New York: The Free Press, 1966.

Minan, Ahsanul dan Sulthonul Huda. *Workshop Penguatan Sistem dan Manajemen Partai. Menyongsong Pemilu 2009*. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, 2007.

Muchlis, Edison. "Upaya Pelembagaan Partai: Kasus Partai Bintang Reformasi." Dalam *Pelembagaan Partai Politik Pasca-Orde Baru: Studi Kasus Partai Golkar, PKB, PBB, PBR, dan PDS*, oleh Lili Romli. Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2008.

Mujani, Saiful dan R. William Liddle. "Indonesia's Approaching Election: Politics, Islam, and Public Opinion." *Journal of Democracy* 15, No. 1 (Januari 2004).

Mujani, Saiful dan R. William Liddle. "Voters and the New Indonesian Democracy." Dalam *Problems of Democratization in Indonesia Elections, Institutions and Society,* oleh Edward Aspinall dan Marcus Mietzner. Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 2010.

Muzadi, Hasyim. "Membangun NU Pasca Gus Dur." Jakarta: Grasindo, 1999. Dalam *Konflik Internal PKB*, oleh Kamarudin. Jakarta: Akses Publishing, 2008.

Nagazumi, Akira. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia Budi Utomo, 1908–1918*. Jakarta: Grafitipers, 1989.

Neumann, Sigmund. "Toward A Comparative Study of Political Parties." Dalam *Comparative Politics: A Reader*, diedit oleh Harry Eckstein dan David E. Apter. New York: The Free Press, 1963.

Noer, Deliar. "Ideologi, Politik dan Pembangunan." Jakarta: Yayasan Perkhidmatan 1983. Dalam *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi. Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu 2004* oleh Kamarudin. Jakarta: Visi Publishing, 2003.

Noer, Deliar. "Islam dan Politik: Mayoritas atau Minoritas?" *Prisma*, No. 5 (1988).

Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*. Jakarta: LP3ES, 1982.

Noer, Deliar. "Masjumi: Its Organization, Ideology, and Political Role in Indonesia." Tesis, Cornell University, 1960.

Noer, Deliar. *Partai Islam di Pentas Nasional. Kisah dan Perkembangan Politik Indonesia 1945–1965*. Mizan: Bandung, 2000.

Noor, Firman. "Menimbang Perjuangan Kebangsaan Sarekat Islam (SI) dan Relevansinya bagi Kehidupan Politik Bangsa Saat Ini." *Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-Ilmu Sosial di Indonesia* XXXIV, No. 2 (2008).

Noor, Firman. "Kegagalan Partai Politik Menarik Simpati Rakyat: Urgensi Sebuah Paradigma Baru Partai Politik." *Jurnal Penelitian Politik* 4, No. 1 (2007).

Noor, Firman, ed. *Nasionalisme, Demokratisasi, dan Identitas Primordialisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2007.

Nurhasim, Moch. "Pengaruh dan Kekuatan Kiai dalam Rekrutmen Politik. Kasus Kabupaten Sampang dan Pasuruan." Dalam *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai. Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu* 2004, diedit oleh Syamsuddin Haris. Jakarta: Gramedia, LIPI, dan IMD, 2005.

O'Donnell, Guillermo dan Philippe C. Schmitter. *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986.

Ostrogorski, Moisey. *Democracy and the Organization of Political Parties*. London: Macmillan, 1902.

Ozbudun, Ergun. *Party Cohesion in Western Democracies: A Causal Analysis, Comparative Politics Series*. New York: Sage, 1970.

Padgett, Stephen. "The German Social Democratic Party: Between and New Left." Dalam *Conflict and Cohesion in Western European Social Democratic Parties*, diedit oleh David S. Bell dan Eric Shaw. London: Pinter Publisher, 1994.

Panebianco, Angelo. *Political Parties: Oranization and Power*. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Parsons, Talcott. "Some Highlights of the General Theory of Action." Dalam *Approaches to the Study of Politics*, diedit oleh Ronland Yound. Evanston: Northwestern University Press, 1962.

Permata, Ahmad-Norma. "The Prosperous Justice Party (PKS) and the Decline of Political Islam in the 2009 Election in Indonesia." Dalam *Islam and the 2009 Indonesian Elections, Political, and Cultural Issues. The Case of the Prosperous Justice Party (PKS)* oleh Ahmad-Norma Permata dan Najib Kailani. Bangkok: IRASEC, 2010.

Pirage, Dennis C. *Stabilitas Politik dan Pengelolaan Konflik*. Jakarta: FIS-UI, 1982.

Poesponegoro, Marwati Djoened, dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia V Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

R, Yahya A. *Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi*. Jakarta: HTI Press, 2006.

Radi, Umar. *Strategi PPP 1973–1982. Suatu Studi tentang Kekuatan Politik Islam di Tingkat Nasional*. Jakarta: Integritas Press, 1984.

Rahmat, Andi dan Mukhamad Najib. *Gerakan Perlawanan dari Masjid Kampus*. Solo: Purimedia, 2001.

Rahmat, M. Imdadun. *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2005.

Rahmat, M. Imdadun. *Ideologi Politik PKS. Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*. Yogyakarta: LKiS, 2008.

Rambe, Safrizal. *Sarekat Islam. Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905–1942*. Jakarta: Yayasan Kebangkitan Insan Cendekia, 2010.

Ramly, Andi Muawaiyah, ed. *Saya Bekerja Maka PKB Menang. Modul Pelatihan Kader Penggerak Partai untuk Pemenangan Pemilu 2009*. Jakarta: DPP PKB, 2008.

Randall, Vicky dan Lars Svasand. "Party Institutionalization in New Democracies." *Party Politics* 8 (Januari 2002).

Randall, Vicky. *Political Parties in the Third World*. London: Sage, 1988.

Ranney, Austin. "Candidate Selection." Dalam *Democracy in Polls*, diedit oleh David Butler, Howard R. Penniman dan Austin Ranneys. Washington DC: American Enterprise Institute, 1981.

Ratnawati, Tri. "Beberapa Masalah Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Alternatif Solusi." Dalam *Pelembagaan Partai Politik Pasca Orde Baru Studi Kasus Partai Golkar, PKB, PBB, PBR, dan PDS,* diedit oleh Lili Romli. Jakarta: Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2008.

Rauf, Maswadi. *Konsensus Politik. Sebuah Penjajagan Teoritis*. Jakarta: Direktorat Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000.

Ricklefs, M.C. "Islamizing Indonesia: Religion and Politics in Singapore's Giant Neighbour." *Public Lecture* di Asian Civilization Museum, 23 September 2004.

Ridha, Abu. *Negara dan Cita-cita Politik*. Bandung: Syaamil Cipta Media, 2004.

Rinakit, Sukardi. "Indonesia." Dalam *Parties and Democracy. The KAS Democracy Report 2007*, diedit oleh Konrad-Adenauer-Stiftung. Bonn: Bouvier, 2007.

Romli, Lili. "Model Pelembagaan Partai Politik di Indonesia: Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera." Dalam *Reformasi Kelembagaan Partai Politik Pasca-Orde Baru di Indonesia,* oleh Edison Muchlis M. Jakarta: LIPI Press, 2007.

Romli, Lili. "Potret Buram Partai Politik di Indonesia." Dalam *Menggugat Partai Politik,* diedit oleh Mahrus Irsyam dan Lili Romli. Depok: Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI, 2003.

Romli, Lili, ed. *Potret Partai Politik Pasca Orde Baru*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2003.

Romli, Lili. *Islam Yes, Partai Islam Yes*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Rose, R. "Parties, Factions, and Tendencies in Britain." *Political Studies* 12, No. 1: 33–46.

Rozi, Syafuan, "Potret Hizbut Tahrir Indonesia: Pro Kontra Khilafah dan Wacana Keindonesiaan." Dalam *Nasionalisme, Demokratisasi, dan Sentimen*

Primordial di Indonesia: Problematika Identitas Keagamaan versus Keindonesiaan (Kasus Ormas Pendukung Khilafah Islamiyah), diedit oleh Syafuan Rozi. Jakarta: LIPI Press, 2010.

Ruspiyandi, Defy. "Menebak Arah Dukungan PKS." *Pikiran Rakyat*, 21 Juni 2004.

Sachsenroder, Wolfgang dan Ulrike E. Frings, eds. *Political Prty Systems and Democratic Development in East and Southeast Asia: Volume I Southeast Asia*. Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 1998.

Salim, Arskal. *Partai Islam dan Relasi Agama-Negara*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1999.

Sanchez-Cuenca, Ignacio. "Party Moderation and Politician's Ideological Rigidity." *Party Politics* 10, No. 3.

Sani, Giacomo dan Giovanni Sartori. "Polarization, Fragmentation, and Competition in Western Democracies." Dalam *Western European Party Systems. Continuity and Change*, diedit oleh Hans Daalder dan Peter Main. London: Sage, 1983.

Sanit, Arbi. "Manajemen Politik Dalam Negeri." Dalam "Tiras", 9 Februari 1995. Dalam *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi. Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu 2004*, oleh Kamarudin. Jakarta: Visi Publishing, 2003.

Sartori, Giovanni. *Parties and Party Systems, A Framework for analysis, Volume 1*. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.

Scarrow, Susan E. "The Nineteenth-Century Origin of Modern Political Parties: The Unwanted Emergence of Party-Based Politics." Dalam *Handbook of Party Politics*, oleh Richard S. Katz dan William Crotty. London: SAGE Publication, 2006.

Scott, James. "Patron Client Politics and Political Change in Southeast Asia." *American Political Science Review* 66, No. 1 (1972).

Selznick, Philip. *Leadership in Administration. A Sociological Interpretation*. New York: Row, Peterson and Company, 1957.

Siddiq, Mahfudz. *Pemikiran dan Manhaj Politik Ikhwanul Muslimin*. Bekasi: Masar Ilmu Agency, 2003.

Singh, Mahendra P. *Cohesion in Predominant Party: The Pradesh Conggress and Party Politics in Bihar*. New Delhi: S. Chand & Co. (Pvt) LTD, 1975.

Sitompul, Eimar Martahan. *NU dan Pancasila*. Yogyakarta: LKiS, 2010.

Sjamsuddin, Nazaruddin. "Akibat Kekuasaan." Dalam *Di Saat Ekonomi Terpuruk Partai Politik Rame-Rame Pecah Kongsi,* diedit oleh E. Soebekti, Achmad, dan Nirwan Ki S. Hendrowioto. Jakarta: Gria Media Prima, 2002.

Soebekti, E., Achmad, dan Nirwan Ki S. Hendrowioto, eds. *Di Saat Ekonomi Terpuruk Partai Politik Rame-Rame Pecah Kongsi*. Jakarta: Gria Media Prima, 2002.

Soltau, Roger. *An Introduction to Politics*. London: Longmans, Green & co9, 1961.

Soon, Kang Young. *Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama*. Jakarta: UI-Press, 2008.

Sukamto. *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*. Jakarta: LP3ES, 1999.

Sulistyo, Hermawan. "PKB Masa Kini dan Masa Datang." Dalam *9 Tahun PKB, Kritik dan Harapan,* diedit oleh Yenny Zanuba Waid, A. Effendy Choirie, dan M. Kholid Syeirazi. Jakarta: Panitia Nasional Harlah ke-9 PKB, 2007.

Sulistyo, Hermawan. *Palu Arit di Ladang Tebu*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2006.

Suradi. *H. Agus Salim dan Konflik Politik Dalam Sarekat Islam*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Takariawan, Cahyadi. "Anggota PKS Non-Muslim di Papua." Dalam *Bukan di Negeri Dongeng Kisah Nyata Para Pejuang Keadilan*, oleh Helvy Tiana Rosa, Izzatul Jannah, dkk. Jakarta: Penerbit Syaamil, 2003.

Taniyici, Saban. "Transformation of Political Islam in Turkey, Islamist Welfare Prty's Pro-EU Turn." *Party Politics* 9, No. 4.

Thaba, Azis. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Tocqueville, Alexis de. *Democracy in America*. New York: George Adelard, 1839.

Volkens, Andrea dan Hans-Dieter Klingemann. "Parties, Ideologies, and Issues; Stability and Change in Fifteen European Party Systems 1945-1998." Dalam *Political Parties in the New Europe, Political and Analytical Challenges*, diedit oleh Kurt Richard Luther dan Ferdinand Muller-Rommel. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Wahid, Hidayat Nur. "Menerapkan Syariat Islam dalam Bidang Sosial Budaya dan Pendidikan." Dalam *Penerapan Syariat Islam di Indonesia antara Peluang dan Tantangan*, oleh Bukhori Yusuf dan Iman Santoso. Jakarta: Globalmedia Cipta Publishing dan Pusat Konsultasi Syariah, 2004.

Waluyo, Sapto. *Kebangkitan Politik Dakwah. Konsep dan Praktek Politik Partai Keadilan Sejahtera di Masa Transisi*. Bandung: Harakatuna Publishing, 2005.

Ward, Kenneth. *The Foundation of the Partai Muslimin Indonesia*. Ithaca: Cornell University, 1970.

Ware, Alan, ed. *Political Parties, Electoral Change and Structural Response*. Oxford: Basil Blackwell, 1987.

Weiner, Myron. *Party Politics in India: The Development of a Multy-Party System*. Princeton: Princeton University Press, 1957.

Wilson, Woodrow. *Congressional Government: A Study in America Politics*. Boston: Houghton, Mifflin and Co, 1885.

Woodward, Mark R. "Indonesia, Islam and the Prospect for Democracy." *SAIS Review* XII, No. 2 (Summer-Fall, 2001).

Yudi Latif, "Transformasi PKB: Dari Jaringan Kulturan ke Jaringan Fungsional." Dalam *9 Tahun PKB, Kritik dan Harapan*, diedit oleh Yenny Zanuba Wahid, A. Effendy Choirie, dan M. Kholid Syeirazi. Jakarta: Panitia Nasional Harlah Ke-9 PKB, 2007.

Yulati, Dewi. *Semaoen. Pers Bumiputera dan Radikalisasi Sarekat Islam Semarang*. Semarang: Penerbit Bendera, 2000.

2. Artikel di Koran, Majalah, atau Internet

"Adu Kuat Dua Poros Kiai." *Gatra*, No. 36, 16 Juli 2009.

"Akhir Kisah sang Bendahara." *Tempo*, 23 Maret 2008.

"Alasan Yusuf Laporkan Petinggi PKS ke KPK." *Republika*, 21 Maret 2011.

"Ali Masykur Pelaksana Tugas Ketum." *Kompas*, 6 April 2008.

"Benang Kusut Konflik PKB (1). Pintu Islah pun Kian Menutup", *www.detik.com*, 15 Januari 2002.

"Bukan Tak demokratis, Muhaimin Memang Kuat." *Kompas*, 21 April 2005.

"Caleg PKS Ditentukan Melalui Pemilu Internal." *Republika*, 30 Desember 2003.

"Daftar Lewat Muhaimin, Gus Dur Pecat Effendy Choirie dan Ikhsan Abdullah." *www.antaranews.com*, 17 Agustus 2008.

"DPP PKB Dinilai Langgar AD/ART." *Media Indonesia*, 15 April 2005.

"DPP PKB Masih Beri Kesempatan Kepada Matori. Matori Masih Merasa Ketua Umum PKB." *Kompas*, 31 Juli 2001.

"Episode Pisah Ranjang PKB." *www.majalah.tempointeraktif.com*, 24 November 2003.

"Gus Dur Enggak Mau Mendengar." *Tempo*, 2 Oktober 2005.

"Hidayat Nur Wahid: Tidak ada Faksi di PKS." *Republika,* 22 Maret 2011.

"Ini Politik Bos." *Tempo*, 16 Oktober 2005.

"Investigasi PKB Tunjuk 10 Nama", *http://www.inilah.com/berita/politik/2008/04/05/21476/investigasi-pkb-tunjuk-10-nama/*.

"Isu Penarikan Menteri, Belum ada Pembicaraan di PKS." *www.detik.com*, 3 Juli 2006.

"Jalil Minta Pengadilan Status Quo kan PKB Wahid." *Koran Tempo*, 5 Juli 2002.

"Jateng Minta Posisi Shihab Dikembalikan." *Republika*, 22 Maret 2005.

"Kasasi Wahid Ditolak." *Kompas*, 18 Juli 2008.

"Ketua Majelis Syura: Kami Ingin Membangun Kebersamaan dan Keseragaman." *Republika*, 22 Juni 2010.

"Konflik PKB Diyakini Tidak akan Pengaruhi Konstituen." *Kompas*, 2 April 2008.

"Konflik PKB Kian Terbuka." *Kompas*, 28 Maret 2008.

"Konflik PKB Tim Investigasi Harus Tunjukkan Bukti." *http://www.sinarharapan.co.id/berita/0804/04/nas02.html.*

"Kriteria Capres 2004 dari Partai Keadilan Sejahtera." *Kompas*, 1 April 2004.

"Kriteria Capres 2004 dari Partai Keadilan Sejahtera." *www.pks-jaksel.or.id*, 14 April 2004.

"Kubu Jalil Ajukan Gugatan Baru." *Pelita*, 5 Oktober 2002.

"Kubu Saiful Ingin Muktamar Tandingan." *Koran Tempo*, 19 April 2005.

"Kubu yang Tak Puas Dianjurkan Islah." *Republika*, 23 April 2005.

"Ma'ruf Amin Saingin Wahid." *Koran Tempo,* 16 April 2005.

"Masura Jawa Tengah. Kaum Muslimin Harus Juga Mengetahui Makna Al-Qur'an." *newsletter.www.dpp-pkb.org,* edisi kedua, Mei 2007.

"Masura Jawa Timur. Kiai Kampung Padati Masjid Sunan Ampel." *newsletter.www.dpp-pkb.org*, edisi kedua, Mei 2007.

"Matori Dikukuhkan Kembali Hingga 2005." *Kompas*, 16 Januari 2002.

"Megawati Tidak Hadiri MLB Matori." *Kompas*, 15 Januari 2002.

"Melawan Sang Patron." *Koran Tempo*, 25 April 2005.

"Menakar Ancaman Partai Sempalan." *Gatra*, 28 Mei 2008.

"Meneguhkan Trilogi Perjuangan." *Saksi*, No. 14/VI/12 Mei 2004.

"Menimba Pengalaman Amien. Amien Rais Mengaku Pernah Dibohongi PKS dalam Pemilu Presiden 2004." *Suara Islam*, Edisi ke-56, 5–19 Desember 2008.

"Mereka yang Bergelimang Darah Demi Dakwah." *http://pks-jakarta.or.id/opini/item/67-mereka-yang-bergelimang-darah-demi-dakwah*.

"MLB Partai Kebangkitan Bangsa di Indonesia. Matori Abdul Djalil Ingin Lepas dari Bayangan." *Kompas*, 16 Januari 2002.

"Muhaimin Didukung dan Muspim Kukuhkan Muktamar Semarang." *Kompas*, 7 April 2008.

"Muhaimin Iskandar: Mundur atau Dimundurkan." *Jawa Pos*, 28 Maret 2008.

"Muktamar PKB Tanpa Kehadiran Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf." *Kompas*, 17 April 2005.

"Pak Ud Sarankan DPP PKB Islah dengan Shihab." *Media Indonesia*, 28 Maret 2005.

"Partai Keadilan Sejahtera Dideklarasikan Bersama Partai Keadilan." *Kompas*, 21 April 2003.

"Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009." *Tribun Timur*, 23 Juli 2008.

"Pemecatan Jalil Tidak Sah. Wahid Dkk Dihukum Rp 12,8 Miliar." *http://www.tokohindonesia.com/berita/berita/2003/02/gusdur_Jalil.shtml.*

"Pemecatan Bikin Istri Stroke. Yusuf Supendi Gugat 10 Petinggi PKS Rp 42,7 Miliar." *Republika*, 2 Mei 2011.

"Pemilu Presiden 2009." *Gatra*, No. 36, 16 Juli 2009.

"Pemira Majelis Syura PKS. Cara Unik PKS Memilih Pemimpin." *http://www.pks.or.id/v2/main.php?op+isi&id=111*.

"Penunjukan Gus Yusuf Tidak Sesuai ART." *Suara Merdeka*, 4 Mei 2007.

"Persoalan Internal PKB Sebaiknya Libatkan Kiai." *Media Indonesia*, 29 Maret 2005.

"PKB Terancam Pecah." *Suara Karya*, 18 April 2005.

"PKS Gelar Pemilihan Raya Majelis Syura." *Media Indonesia,* 22 Februari 2010.

"PKS Masih Seperti yang Dulu." *Koran Seputar Indonesia*, 10 Desember 2007.

"PKS Pledges to Help Civil Society Flourish." *The Jakarta Post*, 6 Juni 2005.

"PKS Resmi Dukung Amien-Siswanto." *Republika*, 1 Juli 2004.

“PKS Siap Layani Yusuf Supendi Lewat Jalur Hukum.” *Republika*, 2 Mei 2011.

“PKS Tetap Dukung Yudhoyono.” *Bali Post*, 28 November 2005.

“PKS Tetap Mendukung SBY-JK.” *Republika* 28 November 2005.

“PKS tidak Monolitik.” *http://www.kompas.com/read/xml/2008/12/17/14544853/pks.tidak.monolitik*.

“Presiden PKS Dilaporkan ke BK DPR.” *Republika*, 17 Maret 2011.

“Rapat Berlangsung Tragis dan Pilu. Muhaimin Dilengserkan dari Ketua Umum PKB.” di *http://hariansib.com/?p=28694*, 28 Maret 2008.

“Reposisi Subhat Cak Iful.” *Gatra*, 13 September 2003.

“Sabit Kembar di Simpang Jalan.” *Monitor*, Edisi ke-37, Tahun I/11-17 Maret 2009.

“Saifullah Yusuf Tolak Keputusan Dewan Syura PKB.” *Kompas* 9 September 2003.

“Saifullah Yusuf, Kiai dan PKB.” *Koran Tempo*, 12 September 2003.

“Sanksi Alwi tergantung DPP PKS.” *http://sijaka.wordpress.com/2010/02/12/sanksi-alwi-tergantung-dpp-pks/*

“Sejarah PK Sejahtera.” *www.pk-sejahtera.org*.

“Sepucuk Somasi Menjelang Muktamar PKB.” *Koran Tempo*, 12 April 2005.

“Sering Bekukan Pengurus, PKB Dijuluki Partai Kulkas Besar.” *www.detik.com*, 29 April 2008.

“Shihab dan Saifullah akan Gugat DPP PKB.” *Suara Karya*, 28 Maret 2005.

“Sikap FPKS dalam Rapat Pleno Panitia Anggaran Seputar Polemik Subsidi BBM.” *http://pk-sejahtera.org/modules/news/print.php?storyid=3320*.

“Sikap Resmi PKS atas Tuduhan Mantan Kader.” *pkspiyungan.blogspot.com*, 18 Maret 2011.

“Tak Ada Koalisi Tanpa Perubahan.” *Sanksi*, No.6/VIII/30 November 2005.

“Tarik Ulur Pendatang Baru di Muktamar Luar Biasa PKB.” *Koran Tempo*, 18 Januari 2005.

“Tidak Mudah Islah.” *http://ip52-214.cbn.net.id/id/arsip/2005/12/19/NAS/mbm.20051219.NAS117560.id.html,* 19 Desember 2005.

“Tifatul: PKS Itu Solid.” *http://politik.vivanews.com/news/read/58449-tifatul_pks_itu_solid*.

“Tifatul: Tidak ada Konflik Internal di PKS.” *Republika*, 24 Maret 2011.

"Tiga Syarat Abdurrahman Wahid untuk Berdamai dengan Jalil." *Kompas*, 21 Juni 2002.

"Tujuh Ribu Kiai Kampug Ngaji bersama Wahid." *newsletter www.dpp-pkb.org.*, edisi pertama, Maret 2007.

"Yusuf Supendi Gugat 10 Petinggi PKS ke PN." *http://us.politik.vivanews.com/news/read/217843-yusuf-supendi-gugat-10-petinggi-pks-ke-pn*.

"32 DP PKB Nyatakan Dukung Pencopotan Muhaimin Iskandar." *http://hariansib.com/?p=29268*.

"Jelang Muktamar PKB, Pembekuan DPW Marak." *Media Indonesia*, 5 April 2005.

"Muhaimin Iskandar: Seluruh Produk Muktamar Semarang Sah." *tempointeraktif*, 19 November 2005.

"Muktamar Dinilai Tidak Demokratis, Rekonsiliasi PKB Makin Sulit." *Kompas*, 20 April 2005.

"Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring: Tarbiyah, Menjaga Moral dan Semangat Berpartai." *Kompas*, 25 Juni 2005.

"Ratusan Kader PKS Datangi TPS Pilih Majelis Syura." *http://www.riaumandiri.net/rm/index.php?option=com_content&view=article&i.d+183:ratusan-kader-pks-datangi-tips-pilih-majelis-syura-&catid=37:politik-a-keamanan&itemid=55*.

"Tak Ada Koalisi Tanpa Perubahan." *Saksi*, No 6/VIII/30 November 2005.

Collins, Elizabeth Fuller. "Islam is the Solution, *Dakwahi* and Democracy in Indonesia." *http://www.classics.ohio.edu/faculty/collins/Islamsolution.pdf*.

Effendy, Bahtiar. "(Re)Politisasi Islam: Pernahkan Islam Berhenti Berpolitik?" *Republika*, 29 Desember 1998.

Fatah, Eep Saefullah. "Format Baru Politik Islam (1). Belajar dari Kekeliruan Politik Lama." *Republika*, 2 Januari 1999.

Hernowo, M. dan M. Zaid Wahyudi. "Konflik PKB. MLB dan Ketidakpastian Karier Politik." *Kompas*, 9 Mei 2008.

http://pkspiyungan.blogspot.com/2011/03/sikap-resmi-pks-atas-tuduhan-mantan.html.

http://www.inilah.com/berita/politik/2008/04/05/21476/investigasi-pkb-tunjuk-10-nama/

http://www.inilah.com/read/detail/81234/anggota-dprd-pks-pijat-mundur/

http://www.pk-sejahtera.org/content/saksi-pks-bacakan-surat-pemecatan-yusuf-supendi.
http://www.pk-sejahtera.org/content/saksi-pks-bacakan-surat-pemecatan-yusuf-supendi.

http://www.suaramerdeka.com/harian/0511/28/nas03.htm

Ida, Laode. "PKB Dalam Jebakan 'Wahidisme." *Media Indonesia*, 19 April 2005.

Irsyam, Mahrus. "Memahami Hakekat Nahdlatul Ulama." *Kompas*, 22 November 1999.

Kusworo, Danu. "Jalan Panjang Konflik PKB." *Kompas*, 19 Juli 2008.

Matta, Anis. "Dakwah, Politik dan Strategi." *Saksi*, Nomor 11, Tahun III, 6 Maret 2001.

Mubarakan, Taufik Al. "Pemecatan di Tubuh PKB Bukti Superioritas Wahid." *Harian Aceh*, 31 Maret 2008.

Muslim, Dudung Abdul. "Meneropong Masa Depan PKB." *Suara Merdeka*, 14 November 2001.

Muzamil, Mohammad. "Ke Arah Penyelesaian Konflik PKB." *Kompas*, 17 November 2001.

Nawangwulan, Nita. "Muktamar PKB Matori: Menghancurkan Kultur Feodal." *www.detik.com,* 10 Januari 2002.

Notosusanto, Smita. "Analisa AD/ART Partai Politik." makalah seminar paper di *http://forum-politisi,org/download/Analisa_AD-ART_Parpol_-_Smita.pdf.*

Piliang, Amir J. "Manusia dan Politik PKS." *Media Indonesia*, 27 Juli 2005.

Pujiharto, Arif Shodiq. "Benang Kusut Konflik PKB (1): Pintu Ishlah pun Kian Menutup." di *www.detik.com*, 15 Januari 2002.

Rokhmad, Abu. "PPP dan Masa Depan PKB." *Suara Merdeka*, 30 Januari 2007.

Ruspiyandi, Defy. "Menebak Arah Dukungan PKS." *Pikiran Rakyat*, 21 Juni 2004.

Salim, Arskal. "Fragmentasi Partai Islam." *Kompas*, 26 Juni 1999.

Sastra, R.B. Suryama M. "Mukernas PKS 2008." *images.suryama.multiply.com*.

Siddiqi, Mahfudz. "Normalkan Piramida Kader: Seri Siyasah Tarbiyah." *Saksi,* No. 17, VI, 23 Juni 2004.

Sita, Muhammad Adlin. "Gerakan Salafi sebagai Gerakan Islam Politik di Indonesia." *Dialog*, edisi I, 2004.

Surbakti, Ramlan. "Tingkat Pelembagaan Partai Politik." *Kompas*, 6 Januari 2003.

Syahabuddin, Muhammad. "Majelis Syura, Alternatif 'Demokrasi-Islam', dan Ketaatan Kader PKS." *www.syihabasfa.wordpress.com*, 18 Desember 2007.

Zaidi, Nur Hasan. "Resepsi PKS." *Republika*, 30 Juli 2005.

3. Koran, Majalah, dan Terbitan Lain

Bisnis Indonesia, 29 April 2004.

Detik.com, 10 Januari 2001.

Eramuslim.com, 14 November 2002.

Gatra, 21 September 2002

Gatra, 2 Juli 2004.

Gatra, Edisi 51, Jumat 31 Oktober 2003.

http://hariansib.com/?p=28694, 28 Maret 2008.

http://munaspks.info/

Jawa Pos, 29 Mei 1999.

Kompas, 19 November 2005.

Kompas, 2 Juli 2004.

Kompas, 25 November 2002

Republika, 19 November 2005.

Republika, 30 Mei 1999.

Republika, 10 Agustus 1998.

Sabili, No.3/IX, 1 Agustus 2001.

Tempo, 09, XXXIIIi, 25 April–02 Mei 2004.

www.pk-sejahtera.org

www,.dpp-pkb.or.id

4. Bacaan yang Tidak Diterbitkan

Akbar, Subhan. "Partai Keadilan: Faktor-Faktor Penguat Soliditas." Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004.

Arifin, Ichwan. "Kiai dan Politik: Studi Kasus Perilaku Politik Kiyai dalam Konflik Pasca Muktamar II Semarang." Tesis, Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008.

Collins, Elizabeth Fuller. "Islam is Solution. *Dakwah* and Democracy." Makalah yang dipresentasikan di Ohio University, 20 Juni 2004.

Hurriyah. "Sistem Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera (1998–2003)." Skripsi, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2004.

Munandar, Arief. "Antara Jemaah dan Partai Politik Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004." Disertasi, Program Pasca Sarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2011.

Noor, Firman. "Moderate Islamic Fundamentalism in Indonesia: A Study of Political Thinking and Behaviour of The Prosperous Justice Party (PKS), 1998–2005." Tesis, Faculty of Asia Studies, Australian National University, 2006.

Prabowo, Triatno Yudho. "Pengaruh Taklim Rutin terhadap Perilaku Politik Kader Partai Keadilan Sejahtera dari Perspektif Teori Intergroup Relation." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2006.

Sandi, R. Alex. "Sikap Poitik Partai Keadilan Sejahtera terhadap Pilpres 2004 dan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Studi Kasus Psikologi Politik Partai Dakwah." Tesis, Kajian Islam dan Psikologi, Program Kajian Islam dan Timur Tengah, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2006.

Soon, Kang Young. "Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama 1984–1999." Ringkasan Disertasi, Program Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2002.

Soon, Kang Young. "Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama." Disertasi, Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2008.

Subhan, Akbar. "Partai Keadilan: Faktor-Faktor Penguat Soliditas." Skripsi, Program Ekstensi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia, 2004.

Sumarno. "Perjuangan Bernegara Demokrasi H.O.S. Tjokroaminoto: Telaah Historis Pemikirannya dalam Pergerakan Nasional Sarekat Islam 1912–1934." Tesis, Fakultas Ilmu Budaya, Program Kajian Sejarah, Universitas Indonesia, 2000.

Yusra, Amri. "Mekanisme Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah: Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera dalam Pilkada Depok 2005." Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2006.

GLOSARIUM

Ahlul al-halli wa al-'aqdi*:* Sekelompok ulama atau pakar yang memiliki kewenangan untuk memutuskan *grand design* agenda politik dan kebijakan partai.

Ahlu sunnah wal jamaah: Kelompok umat Islam yang memahami dan mempraktikkan Islam dan ajaran Nabi Muhammad saw dengan mengikuti cara, aturan, metode atau tradisi yang dibangun oleh *jamaah*, yakni generasi pertama shahabat dan tabiin.

Al-Qur'an: kitab suci umat Islam

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga: Statuta dan ketentuan asosiasi atau konstitusi.

Aqidah: kepercayaan

Badan Kehormatan: dewan kehormatan

Badan Pekerja: komite eksekutif

Badan Penegak Disiplin Organisasi: Badan yang bertanggung jawab atas masalah-masalah disiplin dan mengontrol komitmen kader dalam pelaksanaan visi dan misi partai termasuk nilai-nilai bersama.

Berjamaah: berkumpul bersama

Dakwah: penyebaran atau penyiaran Islam

Daurah: pelatihan

Demokrasi Terpimpin: Era pemerintahan otoriter (1959–1965) yang dipimpin Presiden Soekarno yang meyakini tentang keunikan demokrasi Indonesia.

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII): Organisasi dakwah Islam yang didirikan pada tahun 1967 oleh Mohammad Natsir, mantan pemimpin Masyumi dan Perdana Menteri RI (1950–1951), dan beberapa mantan petinggi Masyumi.

Dewan Muhtasyar: dewan penasihat

Dewan Syura: dewan konsultatif

Dewan Syuriah: dewan penasihat

Dewan Tanfidz: badan eksekutif

Dewan Tanfidziyah: badan eksekutif

Fikrah: gagasan, pemikiran

Fiqh: sistem jurisprudensi Islam

Forum Kader Peduli (FKP): Kelompok yang didirikan oleh mantan kader PKS sebagai media informal untuk mengkritisi keberadaan PKS terutama pimpinannya.

Forum Langitan: Forum para ulama senior NU, biasa juga disebut sebagai ulama khas, yang dipimpin oleh Abdullah Faqih yang biasanya berkumpul dengan mengambil tempat di Pesantren Langitan, Tuban, Provinsi Jawa Timur.

Garda Bangsa: organisasi semi militer dan bagian dari PKB

Gerakan Pemuda Anshor: organisasi kepemudaan NU

Gerakan Tarbiyah: Gerakan pendidikan Islam yang berkembang pada tahun 1980-an terutama di masjid-masjid kampus dan menjadi embrio PKS.

Golkar: Golongan Karya. Partai politik yang didirikan oleh TNI AD pada tahun 1964 dan menjadi partai berkuasa selama Pemerintahan Soeharto (Orde Baru).

Hadis: Perkataan Nabi Muhammad saw

Halaqah: Lingkaran atau unit pengembangan. Kegiatan wajib kader PKS yang dilakukan dalam kelompok kecil yang berjumlah 5–12 anggota.

Hizbut Tahrir: Gerakan Islam trans-nasional yang didirikan oleh Taqiyyuddin a-Nabhani di Yordania yang mempromosikan pendirian kekhalifahan internasional.

Ijtihad: penafsiran dengan menggunakan nalar

Ikhwan Muslimin: persaudaran muslim, sebuah organisasi dakwah Islam yang didirikan oleh Hassan Al-Banna di Mesir pada tahun 1928.

Imam: pemimpin

Islah: rekonsiliasi atau penyelesaian konflik secara damai

Jamiyah: organisasi atau asosiasi

Jaring Capres Emas: seleksi calon presiden emas (*Jaring Emas*). Metode seleksi untuk calon presiden yang dilakukan PKS sebelum Pemilihan Presiden 2004.

Jemaah/Jamaah: kelompok atau kongregasi

Jundiyah: tentara atau pengikut

Kader Inti: kader utama

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia: Organisasi ekstrakampus yang didirikan oleh aktivis Jemaah Tarbiyah di kampus-kampus sekuler pada 1998.

Korwil: koordinator wilayah. Perangkat partai dengan fungsi utamanya melakukan koordinasi atas sejumlah dewan pengurus di tingkat kabupaten.

Kiai: ulama

Mabda Siyasi: prinsip-prinsip politik

Mabit: kegiatan bermalam untuk meningkatkan kapasitas spiritual

Majelis Syura: badan konsultatif atau dewan konsultatif

Masura: Majelis Silaturahmi Ulama Rakyat. Forum yang didirikan oleh Abdurrahman Wahid dan pengikutnya untuk menandingi keberadaan sejumlah ulama senior, terutama yang tergabung dalam Forum Langitan.

Masyumi: Partai Politik Islam Indonesia terbesar pada kurun waktu 1945–1960 yang didirikan oleh sejumlah organisasi Islam utama, seperti NU dan Muhammadiyah di Yogyakarta pada November 1945.

Mazhab: aliran pemikiran dalam jurisprudensi Islam

Mihwar: tahapan

Islam Modernis: Sayap reformasi Islam yang berupaya melakukan pemurnian ajaran Islam dan melakukan adaptasi pengetahuan barat guna meningkatkan kualitas hidup dan keagamaan umat Islam

Muffaraqah: berakhirnya hubungan dengan pihak lawan

Muhammadiyah: Organisasi kelompok modernis yang dipengaruhi oleh gagasan Muhammad Abduh di Mesir yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912.

Mukernas: Musyawarah Kerja Nasional

Muktamar: konferensi atau Kongres

Munas: Musyawarah Nasional

Murabbi: guru, mentor

Muspim: Musyawarah Pimpinan

Musyarakah: partisipasi atau kerja sama politik

Musyawarah: konsultasi

Mutarabbi: siswa atau mahasiswa

Nahdlatul Ulama: Kebangkitan Ulama Islam. Organisasi Islam yang dikaitkan dengan kelompok Islam tradisional yang didirikan pada Januari 1926 di Surabaya sebagai respons terhadap meningkatnya pengaruh kelompok modernis Islam dan membela kepentingan umat Islam tradisional.

Pancasila: Lima prinsip negara. Prinsip-prinsip tersebut adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Parmusi: Partai Muslimin Indonesia. Partai Islam yang didirikan pada 1968 berdasarkan persetujuan Pemerintah Orde Baru untuk mewakili kepentingan kelompok Islam modernis.

Partai Dakwah: Partai yang terutama ditujukan untuk menyiarkan ajaran Islam ke setiap umat Islam, masyarakat dan negara.

Partai Islam Indonesia: Partai yang didirikan oleh Dr. Sukiman, salah satu mantan pemimpin SI.

Partai Kader: Partai yang meyakini kualitas kader daripada jumlah kader yang dimilikinya.

Partai Keadilan: Partai yang didirikan oleh anggota Jemaah Tarbiyah pada 1998 dan mengubah namanya menjadi Partai Keadilan Sejahtera pada tahun 2002.

Partai Sarekat Islam Indonesia: Organisasi politik berbasis pedagang Islam yang menjadi media politik pertama untuk memperjuangkan kepentingan umat muslim dan kaum pribumi Indonesia pada umumnya.

Pengaderan Formal Dasar: Kaderisasi Formal Dasar

Pengaderan Formal Kejuruan: Kaderisasi Formal Kejuruan

Perti: *Persatuan Tarbiyah Islamiyah*. Organisasi kaum tradisionalis yang berbasis di Sumatra Barat.

Pesantren: Pemondokan Islam yang dipimpin oleh ulama sebagai tempat pengajaran agama Islam kepada para santri.

Pragmatisme: Istilah Indonesia untuk 'perilaku yang mementingkan dirinya sendiri' –berbeda dari pengertian bahasa Inggris untuk 'pragmatism' yang cenderung bermakna sikap untuk mengutamakan penyelesaian dengan tidak mengaitkannya kepada ajaran atau doktrin tertentu.

Qiyadah: pemimpin

Rihlah: aktifitas fisik atau rekreasi

Santri: peserta didik dalam lingkungan pesantren

Sarekat Dagang Islam: Organisasi pedagang batik Muslim dari Jawa yang didirikan oleh H. Samanhudi pada 1905 yang awalnya bertujuan membela kepentingan para pedagang pribumi.

Sya'bi: masyarakat, komunitas atau sosialisasi

Syariah: hukum Islam

Syura: konsultasi

SI-Merah: Faksi di dalam *Sarekat Islam* dengan orientasi Marxisme

SI-Putih: Kelompok non-komunis di dalam Sarekat Islam yang dipimpin oleh Agus Salim, Abdoel Moeis, dan Soerjopranoto

Ta'aruf: perkenalan atau berkenalan

Ta'at: ketaatan

Tafahum: saling memahami

Tafakul: saling tolong menolong atau membantu

Taklim Rutin Mingguan: pertemuan rutin mingguan

Tanzim: organisasi

Tarbiyah: Metode pendidikan atau pelatihan Jamaah Tarbiyah untuk menyebarkan gagasan dakwahnya yang diadopsi dari metode pendidikan Ikhwanul Muslimin Mesir.

Tawhid: Teologi keesaan Tuhan

Tim Sebelas: Komite independen (terdiri dari 11 anggota) yang mengadakan serangkaian verifikasi, terutama memeriksa dan menetapkan kelayakan partai-partai politik untuk ikut dalam pemilu 1999. Upaya ini penting karena tidak semua partai politik sebenarnya siap untuk mengikuti pemilu 1999.

Tim Tiga: Tim yang dibentuk DPP PKB untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran isu negatif yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Syaifullah Yusuf. Anggota tim ini adalah Prof. M. Mahfud M.D., Dr. A.S. Hikam ,dan Nur Iskandar al-Barsany.

Tsiqoh: kepercayaan

Ulama *Khos*: sangat senior atau ahli ajaran Islam yang utama

Ulama: cendekiawan atau ahli ajaran Islam

Ummah: masyarakat, komunitas, dan bangsa

Usrah: keluarga, kelompok atau sistem sel

Ustadz: guru agama

DAFTAR SINGKATAN

AD : Anggaran Dasar
ART : Anggaran Rumah Tangga
DPC : Dewan Pengurus Cabang
DPD : Dewan Pengurus Daerah
DPP : Dewan Pengurus Pusat
DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
DPTP : Dewan Pimpinan Tinggi Partai
DPW : Dewan Pengurus Wilayah
BBM : Bahan Bakar Minyak
BPDO : Badan Penegak Disiplin Organisasi
CRM : *Conflict Resolution Management*
DDII : Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
FKP : Forum Kader Peduli
ICMI : Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
ISDV : *Indische Social Deemocratische Vereeneging*
KAMMI : Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
KPU : Komisi Pemilihan Umum
MLB : Muktamar Luar Biasa
MMS : Musyawarah Majelis Syura
MI : Muslimin Indonesia

MPP : Majelis Pertimbangan Pusat
MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat
MS : Majelis Syura
NU : Nahdlatul Ulama
PAN : Partai Amanat Nasional
PK : Partai Keadilan
PKB : Partai Kebangkitan Bangsa
PKBN : Partai Kemakmuran Bangsa Nasional
PKD : Partai Kejayaan Demokrasi
PKI : Partai Komunis Indonesia
PKNU : Partai Kebangkitan Nasional Ulama
PKS : Partai Keadilan Sejahtera
PKU : Partai Kebangkitan Ummat
PMI : Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)
PBB : Partai Bulan Bintang
PBNU : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
PD : Partai Demokrat
PDI : Partai Demokrasi Indonesia
PDIP : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PMII : Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
PNU : Partai Nahdlatul Ummat
PPP : Partai Persatuan Pembangunan
PSII : Partai Sarekat Islam Indonesia
PSUNI : Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia
SI MPR : Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat
SI : Sarekat Islam
TOP : Training Orientasi Partai
TRK : Taklim Rutin Kader
TRM : Taklim Rutin Mingguan
TRP : Taklim Rutin Partai

Lampiran 1

Mabda' Siyasi PKB
(Prinsip-prinsip Politik PKB)

1. Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur sejahtera lahir dan batin, bermartabat, dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
2. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicitakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya, yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (*as-shidqu*), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (*al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli*), bersikap dan bertindak adildalam sgala situasi (*al-'adalah*), tolong menolong dalam kebajikan (*al-ta'awun*) dan konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (*al-istiqomah*), musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (al-syura) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum (*al-musawa*) adalah prinsip dasar yang harus

selalu ditegakkan. Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang dan pangan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (*hifdzu al-Nafs*), terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksanaan agama (*hifdzu al-din*), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebsan beekspresi serta berpendapat (*hifdzu al-aql*), terpeleiharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (*hifdzu al-nasl*) dan terpeliharanya harta benda (*hifdzu al-mal*). Misi ini ditempuh dengan pendekatan amar ma'ruf nahi munkar yakni menyerukan kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemunkaran.

3. Penjabaran dari misi yang diemban guna mencapai terwujudnya masyarakat yang dicitakan tersebut tidak bisa tidak harus dicapai melalui keterlibatan penetapan kebijakan publik. Jalur kekuasaan menjadi amat penting ditempuh dalam proses mempengaruhi pembuatan kebijakan publik melalui perjuangan pemberdayaan kepada masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman, tentram dan terlindungi terhadap kelompok masyarakat minoritas dan membongkar sistem politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya yang memasung kedaulatan rakyat. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, upaya mengartikulasikan garis perjuangan politiknya dalam jalur kekuasaan menjadi hal yang niscaya dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri manusia merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipkan kepada manusia yang oleh manusia hanya boleh

diberikan pada pihak lain yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengemban dan memikulnya. Keahlian memegang amanat kekuasaan itu mensyaratkan kemampuan menerapkan kejujuran, keadilan, dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat.

5. Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu menebarkan rahmat, kedamaian, dan kemaslahatan bagi semesta. Manifestasi kekuasaan itu harus dipergunakan untuk memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan lebih maslahat. Partai Kebangkitan Bangsa berketetapan bahwa kekuasaan yang hakikatnya adalah amanat itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan dapat dikontrol pengelolaannya oleh rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan itu hanya mungkin dilakukan manakala kekuasaan itu tidak tak terbatas dan tidak memusat di satu tangan serta berada pada mekanisme sistem yang institusionalistik, bukan bertumpu pada kekuasaan individualistik, harus selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan dengan perimbangan kekuasaan sebagai arena mengasah ide-ide perbaikan kualitas bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini tidak hanya berlaku saat memandang kekuasaan dalam tatanan kenegaraan, melainkan juga harus terefleksikan dalam tubuh internal partai.
6. Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras, tatanan kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut haruslah dijiwai dengan sikap mengembangkan

hubungan tali persaudaraan antarsesama yang terkait dengan ikatan keagamaan (ukhuwah diniyah), kebangsaan (ukhuwah wathoniyah), dan kemanusiaan (ukhuwah insaniyah), dengan selalu menjunjung tinggi semangat akomodatif, koperatif, dan integratif, tanpa harus saling dipertentangkan antara sesuatu dan yang lainnya.

7. Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan humanisme religius (insaniyah diniyah), amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis, yang berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara yang santun dan akhlak karimah. Partai adalah ladang persemaian untuk mewujudkan masyarakat beradab yang dicitakan serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai wadar kaderisasi kepemimpinan bangsa. Partai dalam posisi ini berkehendak untuk menyerap, menampung, merumuskan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil, dan demokratis.
8. Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dimanifestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan, dan kepemimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa bersifat independen dalam pengertian menolak segala bentuk kekuasaan dari pihak manapun yang bertentangan dengan tujuan didirikannya partai.

Lampiran 2

Naskah Deklarasi PKB

Bismillahirrahmanirrahim

Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera, yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan, dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani; bisa dipercaya, setia, dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri; bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi; tolong menolong dalam kebajikan; serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama. Bahwa dalam menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama. Bahwa dalam kurun tiga dasawarsa terakhir ini, perjuangan bangsa mencapai cita-cita tersebut terasa semakin jauh dari yang diharapkan. Pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya telah mengabaikan faktor rakyat sebagai pemegang kedaulatan, pengingkaran terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip

tersebut telah melahirkan praktik kekuasaan tidak terbatas dan tidak terkendali, yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat.

Bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai dan prinsip tersebut serta mencegah terulangnya kesalahan serupa di masa mendatang, diperlukan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Di dalam tatanan kehidupan yang demokratis itu warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari bangsa Indonesia bertekad untuk bersama komponen bangsa lain mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, berakhlak mulia, dan bermartabat melalui suatu wadah partai politik.

Maka dengan memohon rahmat, taufik, hidayah, dan inayah Allah Swt. serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka, dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa.

Jakarta, 29 R. Awwal 1419 H/23 Juli 1998 M

Para Deklarator

MUNASIR ALI — A. MUSTOFA BISRI

ILYAS RUCHIYAT — A. MUCHIT MUZADI

ABDURRAHMAN WAHID

Lampiran 3

PIAGAM DEKLARASI
PARTAI KEADILAN

Bangsa sesungguhnya bangsa Indonesia telah melintasi gelombang pasang naik dan pasang surut, menghela beban berat penjajahan, penindasan dan pengkhianatan. Tahap demi tahap perjuangan panjang mengantarkan bangsa ini ke gerbang kemerdekaan dan keadaulatan, yang pada mulanya dicitakan untuk mewujudkan Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sesuai dengan semangat Proklamasi 1945. Namun, selama lima dekade berikutnya garis sejarah itu mengalami berbagai penyimpangan sehingga cita-cita besar bangsa menjadi kabur.

Kejatuhan rezim Orde Lama, diikuti dengan keruntuhan rezim Orde Baru, merupakan tragedi yang seharusnya menyadarkan kembali bangsa ini akan cita-cita luhurnya semula. Seluruh kekuatan bangsa wajib bergandeng tangan dengan landasan persaudaraan, keadilan, dan berpacu dalam kebaikan, seraya meninggalkan permusuhan, kedhaliman, dan pertikaian antarkelompok.

Gerakan mahasiswa, yang disokong penuh rakyat Indonesia, telah mengobarkan "Reformasi Mei 1998" sebagai peretas jalan bagi terentuknya "Orde Reformasi"; orde yang diikat dengan nilai-

nilai fitri kemanusiaan berupa keimanan, moralitas, kemerdekaan, persamaan, kedamaian, dan keadilan. Berkat rahmat Allah Swt., kemudian dipicu semangat reformasi, tercetuslah momentum untuk membangun kembali negeri yang besar ini dengan cara pandang yang benar dan meninggalkan segala bentuk kesalahan generasi terdahulu. Mari besatu dalam kebenaran untuk mengisi lembaran sejarah baru agar bangsa Indonesia senantiasa berdiri tegak untuk mengisi lembaran sejarah baru agar bangsa Indonesia senantiasa berdiri tegak dan berperan serta dalam mewujudkan masyarakat international yang berperadaban.

Kejayaan atau kehancuran suatu negeri merupakan buah dari kepatuhan atau keingkaran penduduknya terhadap nilai-nilai religius dan universal, terutama nilai keadilan. Pada titik ini fitrah insani bertemu dengan tuntutan reformasi dan peluang demokratisasi. Maka perjuangan menegakkan keadilan pun menjadi keharusan, sebagai manifestasi misi utama Islam untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Demi mewujudkan cita-cita sejati Proklamasi, mengisi kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan dan persatuan serta berbekal semangat reformasi dan dukungan umat dari berbagai daerah, kami selaku anak bangsa dengan ini mendeklarasikan berdirinya PARTAI KEADILAN.

Semoga Allah Yang Mahakuasa membimbing dan memberi kekuatan untuk menegakkan keadilan, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia.

". . . Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa . . . " (Al-Quran, Surat Al-Maidah: 8).

Dinyatakan di Jakarta

Ahad, 15 Rabi'ul Tsani 1419/ 9 Agustus 1998

Dewan Pendiri
PARTAI KEADILAN

Dr. M. Hidayat Nurwahid, M.A.
Ketua

Luthfi Hasan Ishaaq, M.A.
Sekretaris

Anggota
Dr. Salim Segaf Aljufri, M.A.
Dr. Mulyanto, M.Eng.
Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc.
Drs. Abu Ridho, A.S.
Mutammimul Ula, S.H.
K.H. Abdul Hasib, Lc.
Fahri Hamzah, S.E.
Dr. Daud Rasyid Sitorus, M.A.
Dr. Agus Nurhadi
Igo Ilham, Ak.
Chin Kun Min (al-Hafizh)
Drs. Arifinto
Nursanita Nasution, S.E., M.E.
H. Rahmat Abdullah
Dr. Ahmad Satori Ismail
Ir. Untung Wahono
Ir. Suswono
Mashadi
Dra. Sri Utami
Nurmansyah Lubis, S.E., Ak., M.M.
dr. Naharus Surur
Drs. Muhroni

Drs. H. Suharna S., M.S.
H.M. Ihsan Arfansyah Tanjung
H. Aus Hidayat
Ir. H. Tifatul Sembiring
Drs. Al Muzammil Yusuf
Drs. Mukhlis Abdi
Maddu Mallu, S.E., M.B.A.
H.M. Nasir Zein, M.A.
K.H. Acep Abdus Syakur
Dr. Ahzami Samiun Jazuli, M.A.
K.H. Yusuf Supendi, Lc.
Hj. Yoyoh Yusroh
M. Anis Matta, Lc.
Ahmad Zainuddin, Lc.
Dra. Zirlirosa Jamil
Syamsul Balda, S.E., M.M.
Habib Aboe Bakar Al-Habsyi
Sunmanjaya Rukmandis, S.H.
Ahmad Heriawan, Lc.
Drs. Erlangga Masdiana, M.Si.
Didik Akhmadi, Ak. M.Com.
K.H. Abdur Roqib, Lc.
H. Abdullah Said Baharmus, Lc.
Ahmad Hatta, M.A., Ph.D.
Makmur Hasanuddin, M.A.
Dra. Siti Zainab

Lampiran 4

Deklarasi
Partai Keadilan Sejahtera

Bismillahirrahmaanirrahiim

Bangsa Indonesia telah menjalani sebuah sejarah panjang yang sangat menentukan dalam waktu lebih dari lima dekade ini dengan sebuah perjuangan yang berat dan kritis. Setelah lepas dari penjajahan Belanda dan Jepang selama tiga setengah abad, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Kebangkitan ini berjalan hingga tahun 1959 ketika upaya untuk membangun bangsa yang demokratis dan sejahtera mengalami kebuntuan dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai awal diktatorisme di Indonesia. Orde Baru muncul pada tahun 1966, tetapi ternyata hanya merupakan sebuah perpanjangan tangan kekuasaan militer yang benih-benihnya sudah mulai bersemi pada masa Orde Lama.

Pada tanggal 21 Mei 1998 bangsa Indonesia mengukir kembali harapannya untuk hidup dalam suasana yang mampu memberi harapan ke depan dengan digulirkannya Reformasi Nasional yang didorong oleh perjuangan mahasiswa dan rakyat. Reformasi Nasional pada hakikatnya adalah sebuah kelanjutan dari upaya mencapai kemerdekaan, keadilan, dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dari perjuangan panjang yang telah ditempuh selama berabad-abad.

Demokratisasi menjadi tulang punggung perjuangan tersebut yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam keseluruhan aspeknya. Bertolak dari kesadaran tersebut, dibentuklah sebuah partai politik yang akan menjadi wahana dakwah untuk mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi politik kaum muslimin khususnya beserta seluruh lapisan masyarakat Indonesia umumnya. Partai tersebut bernama Partai Keadilan Sejahtera.

Semoga Allah Swt. memberikan hidayah dan inayah-Nya kepada kita, mengikatkan hati di antara para pengikut agama-Nya dan menolong perjuangan mereka dimana pun mereka berada. Amin.

Jakarta, 20 April 2002

Atas Nama Pendiri Partai Keadilan Sejahtera

(Drs. Almuzzammil Yusuf)

Ketua

(Drs. Haryo Setyoko)

Sekretaris Jenderal

DAFTAR NAMA PENDIRI
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Abdullah

Achyar Eldine, S.E.

Ahmad Yani, Drs.

Ahmadi Sukarno, Lc., M.Ag.

Ahzami Samiun Jazuli, M.A., Dr.

Ali Akhmadi, M.A.

Arlin Salim, Ir.

Bali Pranowo, Drs.
Budi Setiadi, S.K.H.
Bukhori Yusuf, M.A.
Eddy Zanur, Ir. MSAE
Eman Sukirman, S.E.
Ferry Noor, S.Si.
H. Abdul Jabbar Madjid, M.A.
H.M. Ridwan
H.M. Nasir Zein, M.A.
Harjani Hefni, Lc.
Haryo Setyoko, Drs.
Herawati Noor, Dra.
Herlini Amran, M.A.
Imron Zabidi, M.Phil.
Kaliman Iman Sasmitha
M. Iskan Qolba Lubis, M.A.
M. Martri Agoeng
Muttaqin
Mahfuidz Abdurrahman Martarizal, Dr.
Mohammad Idris Abdus Somad, M.A., Dr.
Muhammad Aniq S., Lc.
Muhammad Budi Setiawan, Drs.
Muslim Abdullah, M.A.
Musoli, M.Sc, Drs.
Musyafa Ahmad Rahim, Lc.
Nizamuddin Hasan, Lc.
P. Edy Kuncoro, S.E. Ak.
Ruly Tisnayuliansyah, Ir.
Rusdi Muchtar
Sarah Handayani, S.KM.
Susanti
Suswono, Ir.

Syamsu Hilal, Ir.
Umar Salim Basalamah, S.IP.
Usman Effendi, Drs.
Wahidah R. Bulan, Dra.
Wirianingsih, Dra.
Yon Mahmudi, M.A.
Yusuf Dardiri, Ir.
Zaenal Arifin
Zufar Bawazier, Lc.
Zulkieflimansyah, Dr.

Lampiran 5

Dewan Pimpinan Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Periode 1999–2000

DEWAN SYURA

Ketua	: K.H. Ma'ruf Amin
Wakil Ketua	: K.H. M. Cholil Bisri
Sekretaris	: K.H. M. Dawam Anwar
Anggota	: K.H. Dimyati Rais
	K.H. Hasyim Latief
	Dr. K.H. Nahrawi A. Salam
	K.H. M. Mukeri Gawith, M.A.
	K.H. Yusuf Muhammad, M.A.
	Brigjen TNI (Purn.) Sullam Syamsun
	H. Sariana Thaba Ma'ruf
	T.G.H. Turmudzi Badruddin

DEWAN TANFIDZ

Ketua Umum	: H. Matori Abdul Djalil
Ketua	: Dr. H. Alwi Shihab
	Drs. Hj. Umrah M Tochah Mansoer
	H. Agus Suflihat Mahmud
	H. Amru Mu'tashim, S.H.
	K.H. Imam Buchari

	Drs. Yadi Thahir
	Dra. Khififah Indar Prawansa
Sekretaris Jenderal	: Drs. A. Muhaimin Iskandar
Wakil Sekjen	: Drs. Amin Said Husni
	H. Aris Azhari Siagian
	H. Yahya Cholil Staquf
Bendara	: H. Imam Churmein
Wakil Bendahara	: H. Ali Mubarak
	H. Safrin Romas, MBA

Lampiran 6

Dewan Pimpinan Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Periode 2000–2005

DEWAN SYURA

Ketua	: K.H. Abdurrahman Wahid
Wakil Ketua	: K.H. M. Cholil Bisri
Sekretaris	: H.Z. Arifin Junaidi
Anggota	: K.H. Dawam Anwar
	K.H. Dimayati Rais
	K.H. Yusuf Muhammad, M.A.
	Najib Abdurrahman
	Azidin
	dr. Sugiat
	T.G.H. Turmudzi Badruddin
	Habib Chirzin
	Imam Mansyur Burhan
	Prof. Jon Wumu
	Kamaludin Lubis
	Cholilul Rahman
	K.H. Fuad Amin Imron
	Ahmad Rofi

DEWAN TANFIDZ

Ketua Umum	: H. Matori Abdul Djalil
Ketua	: Dr. H. Alwi Shihab
	Drs. H. Umrah M. Tolchah Mansoer
	Taufikurrahman Saleh
	Shofwan Chudori
	Imam Mawardi Sanjaya
	Lulu Misbah
	Zainal Mahmud
Sekretaris Jenderal	: Drs. A. Muhaimin Iskandar
Wakil Sekjen	: H. Yahya Cholil Staqif
	Drs. Amin Said Husni
	Lilis Nurul Husna
	Chotibul Umam Wiranu
Bendahara	: Munif Basuni
Wakil Bendahara	: Nurdin Hasibuan
	Nico Krisnanto
	Erman Suparno
Dewan Pertimbangan	: K.H. Ilyas Ruchiyat
	K.H. Munasir Ali
	K.H. Muchit Muzadi
	K.H. A. Mustofa Bisri
	K.H. Ma'ruf Amin
	Khofifah Indar Parawansa
	Imam Churmein
	Muhtar Muda Nasution
	Basofi Sudirman

Lampiran 7

Dewan Pimpinan Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa–Matori
Atau Batu Tulis
Periode 2002–2005

DEWAN SYURA

Ketua	: K.H. Dimyati Rais
Wakil Ketua	: K.H. Maksum Jauhari
Sekretaris	: Drs. K.H. Masyhuri Malik
Wakil Sekretaris	: K.H. An'im Falahuddin Machrus
Anggota	: K.H. Mahfud Ridwan
	Dr. K.H. Haib Wahab Hasbullah
	Prof. Dr. K.H. Ahmadi Isa, M.A.
	Drs. K.H.M. Sholeh Harun
	H. Mahyuddin Nawawi
	K.H. Umar Anshori Khusnan
	Drs. H. Imam Sofwan
	H. Jacob Siga
	H. Habib A. Gudban
	H. Anshori Anwar
	H.R. Edy Wardoyo, S.H., M.H.

DEWAN TANFIDZ

Ketua Umum	: H. Matori Abdul Djalil
Ketua	: K.H. Musthofa Qudbi Badri, M.A.

Drs. M. Anshori Ishak
Drs. H. Agus Suflihat Machmud
Dr. Nadiroh Suherland, M.Pd.
Dr. H. Marwoto Mintohardjo, S.E., M.M.
H.M. Basuni B.N.
Daud Ali Lukman
Drs. Arvin Hakim Thoha
H. Irham Abdurrahim
H. Ibrahim Laconi, S.H.
K.H. Syarif Utsman Yahya
H. Tan Gatot Mahawisnu
H. Daud Nadjuri, MBA
Dra. Marhamah Mudjib
Drs. Isa Muchsin
H. Amru Almu'tashim, S.H., M.M.
Moh. Asyikin Kaharuddien, SmHK
Drs. H. Ahmad Syatibi
Ir. Yusuf Dali

Sekretaris Jenderal	: Drs. Abdul Khaliq Ahmad
Wakil Sekjen	: Francis Wanandi
	Suwanto D.V.M.
	T. Aminova
	Drs. Roisuddin Ilyas
	Drs. Ridwan Balia
	Dra. Desriana Elfah
	N. Syamsuddin Ch. Haesy
	Sukarman Dj. Soemarno
	Jimmy Walewangko
	Drs. Wiwid Wizyanto

Bendahara	: Nico Cristanto
Wakil Bendahara	: Ade Kardiman
	Baningsih Tedjo Kartono
	Ir. M. Yazid Bustomi
	Widi Atmaja

Lampiran 8

Dewan Pimpinan Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)–Gus Dur/
Alwi atau Kuningan
Periode 2000–2005

DEWAN SYURA

Ketua	: K.H. Abdurrahman Wahid
Wakil Ketua	: K.H. Moh. Cholil Bisri
	K.H. Idris Marzuki
	K.H. Irfan Zidni
Sekretaris	: H. Z. Arifin Junaidi
Wakil Sekretaris	: K.H. Nurhadi Iskandar Albarsani
	Drs. H. Habib Chirzin
Sekretaris	: H. Z. Arifin Junaidi
Wakil Sekretaris	: K.H. Nurhadi Iskandar Albarsani
	Drs. H. Habib Chirzin
Anggota	: K.H. Yusuf Muhammad, Lc.
	K.H. Drs. M. Dawan Anwar
	Hj. Asmah Syahroni
	Dra. Hj. Umrah M. Tolchah Mansoer
	K.H. Ma'shum Jauhari
	T.G.H. Turmudzi Badruddin
	K.H. R. Imang Mansur Burhan
	Saggaf Aljufri
	K.H. Mutawakil Alallah

dr. Sugiat A.S., SKM
K.H. Ahmad Rawi
K.H. Humaidi Dahlan
K.H. Ahmad Shoddiq
Prof. John Wumu, S.E.
H.M. Rusli
Pedande Puni Atmaja
K.H. Husein Muhammad

DEWAN TANFIDZ

Ketua Umum	: Dr. H. Alwi Shihab
Wakil Ketua Umum	: Dr. H. Moh. Mahfud M.D.
Ketua	: Dr. H. Muhammad AS. Hikam, M.A., APU
	Dr. H. Lalu Misbah Hidayat, S.E., M.Si.
	Drs. H. Ali Masykur Musa
	H. Taufikurrahman Saleh, S.H., M.Si.
	Arizna Agustina, S.E.
	H. Andy Muawiyah Ramly, M.Pd.
	H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
Sekretaris Jenderal	: H. Saifullah Yusuf, S.Sos*
Wakil Sekjen	: H. Yahya Cholil Staquf
	Drs. Amin Said Husni
	Zunnatul Mafruhah, S.H.
	Hermawi Fransiskus Taslim, S.H.
	Dra. Hj. Gefarina Johan, M.A.
	Ahmad Anas Yahya
	Abdullah Azwar Anas, S.Pd.
Bendahara Umum	: H.A. Munif Basuni
Bendahara	: H. Ir. Erman Soeparno
	H. Ali Mubarak
	Saleh Abdul Malik
	Bambang Sungkono

Ir. Arya Witoelar
Tony Wardoyo
*Digantikan oleh H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si. pada 2004
Dewan Pertimbangan: K.H. Ma'ruf Amin
K.H. Abdullah Faqih

Lampiran 9

Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)–Semarang
Periode 2005–2010

DEWAN SYURA

Ketua Umum	: K.H. Abdurrahman Wahid
Ketua	: H.Z. Arifin Junaidi
	Drs. K.H. Hamdun Ahmad, M.Ag.
	dr. H. Sugiat Ahmad Sumadi, S.KM.
	Prof. Drs. K.H. Cecep Syarifuddin, M.Pd.
Sekretaris	: H. Muhyidin Arubusman
Wakil Sekretaris	: Dra. Hj. Badriyah Fayumi
	Dra. Hj. Anisah Mahfudz
Anggota	: T.G.H. Turmudzi Badruddin
	Dr. K.H. Manarul Hidayat
	Prof. H. John Wumum, S.E.
	Ratu Krisna Bagus Oka
	Dr. Nur Rofi'ah
	Drs. H. Ali Hanafiyah
	Drs. H. Ahmad Rawi
	Drs. H. Amiruddin Nahrowi
	Dra. Hj. Umi Chusnul Chotimah, M.A.
	Buntoro
	K.H. Muzakki

K.H. A. Razaq Safawi
H.M. Hasyim Karim
Drs. K.H. Dadang Za'im Affandi, M.Si.
K.H. Hanif Ismail, Lc.
Hj. Salis Mahrus
Dr. K.H.A. Akrom Malibary, LAS, M.A.
Drs. K.H. Q. Ahmad Syahid
Hj. Ma'mullah Harun, M.Si
Drs. H. Mochamad Zein, M.B.A.
H. Ishomuddin M.
K.H. Maman Imanulhaq Faqieh, M.A.
Sigid Haryo Wibisono, S.E.
K.H. Nurbasyah Junaidi
Dr. Muslim Abdurrahman
K.H. Ibu Ubaidillah

DEWAN TANFIIDZ

Ketua Umum : H.A. Muhaimin iskandar, M.Si.
Wakil Ketua Umum : H. Ali Maskyur Musa, M.Si.
Dr. H. Lalu Misbah Hidayat, S.E., M.Si.
Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Pd., Dipl.M.
H.A. Effendy Choirie, M.Ag. M.H.
Hermawi Fransiskus Taslim, S.H.
Dra. Hj. Maria Ulfa Anshor, M.A.
Muamir Mu'in Syam
Maria Pakpahan, M.A., M.Sc.
Dr. Moh. Mahfud M.D.
Drs. Hendi Kariawan, M.Sc.
Nursyahbani Katjasungkana, S.H.
Drs. H. Ahmad Ni'am Salim
H. Abdul Kadir Karding, S.Pi.
Sekretaris Jenderal : Zannuba A.C. Wahid

Wasekjen	: Ir. H.A. Helmy Faishal Zaini
	Dra. Hj. Ida Fauziyah
	Anak Agung Ngurah Agung, S.E.
	Drs. Alexius Gregorius Plate
	Drs. H. Abdul Khobir
	Moch Munib Huda
	Munyati Sullam, S.H., M.A.
	H. Ikhsan Abdullah, S.H, M.H.
	Abdul Muis, M.Si.
Bendahara Umum	: H. Aris Junaidi, S.E.
Wakil Bendahara	: H. Bachrudin Nashori, S.Si, M.M.
	Drs. H. A. Nashihin, M.B.A., AAAIJ
	Hj. Nur Hasanah A.J.

Lampiran 10

Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)-Ulama atau Surabaya
Periode 2005–2010

DEWAN SYURA

Ketua Umum	: K.H. Abdurrahman Chudlori
Wakil Ketua	: K.H. Ahmad Warson Munawwir
	K.H. Anwar Iskandar
	K.H. Chumaidi Dahlan, Lc.
	K.H. Ubaidillah Faqih
	K.H.M. Thohir Syarkawi
Sekretaris	: Prof. Dr. H. Alwi Shihab
Wakil Sekretaris	: Drs. K.H. Ali As'ad
	K.H. Nur Muhammad Iskandar S.Q.
	Hj. Mufidah Rozi Munir
Anggota	: K.H.R. Muhammad Cholil As'ad
	K.H. Sholeh Qosim
	K.H. Hasan Amiruddin
	K.H. Muchtar Amin
	K.H. Machrus
	K.H. Abdul Haq
	K.H. Sulthon Daeng Rowa
	K.H. Amir Asyikin
	K.H. Abdul Latif Faqih

K.H. Aniq Muhammadun
K.H. Amin Siradj
K.H. Habib Anis Al-Hinduwan
Hj. Nur Hayati Agil Siradj

DEWAN TANFIDZ

Ketua Umum	: Drs. H. Choirul Anam
Wakil Ketua Umum	: Drs. H. Yahya Cholil Staquf
Ketua	: Drs. H. Habib Syarif Muhammad
	H. Aris Azhari Siagian, S.H.
	R. Saleh Abdul Malik
	Drs. H. Fathurrosyid, M.Si.
	Imam Anshori Saleh, M.Si.
	Dr. H. Heflin Frincess
	H. Rodjil Ghufron, S.H.
	Hj. Ariza Agustina, S.E.
	H. Mohamad Said
	M. Murhadi, M.Si.
	Drs. H. Ahmad Taqiyuddin Mansur
	H. Ibrahim Tambaru, S.H., M.H.
Sekretaris Jenderal	: H. Idham Cholied
Wakil Sekjen	: Mohammad Tohadi, S.H., M.Si.
	Ir. Aria Witular
	Andi Najmi Fuadi, S.H.
	Drs. H. Nur Hasan, M.Si.
	H. Syaifullah Adnawi, S.H., M.B.A.
	Drs. Muhammad AL Khadziq
	Ir. Galih Fachrudin Qurbany
	Dra. Hj. Ulha Soraya
	Imam Marsudi, M.Si.
	Zainal Abidin Amir, S.IP., S.Ag.
	Drs. Syamsu Alam

Ir. Riswan Muflihudin
M. Ghozi Al-Fatih

Bendahara	: Harry Danardoyo
Wakil Bendahara	: Dipo Nussantara Pua Upa, S.H.
	H.A. Faried Gafar, M.B.A.
	Dra. Farichatul Aini, M.Si.
	H. Saidul Khudri
	Drs. Erwan Cik Murod
	Bambang Sungkono
	H. Abdul Halim
	Ahmad Anas Yahya
	Muhammad Prayitno

MUSTASYAR

Ketua	: K.H. Abdullah Faqih
Wakil Ketua	: K.H. Ma'ruf Amin
Anggota	: K.H. A. Mustofa Bisri
	K.H. Idris Marzuki
	K.H. Muhaimin Gunardo
	K.H. Muhammad Mas Subadar
	K.H. Ahmad Basyir A.S.
	K.H. Manshur Sholeh
	K.H. Idris Abdul Hamid
	K.H. Ahmad Sufyan Miftahul Arifin
	K.H. Zainuddin Djazuli
	K.H. Abdul Djalil Ma'ruf
	K.H. Zainal Abidin Munawwir
	Habib Syaqaf Al-Jufri, M.A.
	K.H. Nurul Huda Djazuli
	K.H. Hasan Syarif
	K.H. Hasbullah Badawi
	K.H. Afif Astari

Anggota	: K.H. Khoiruddin Rais
	K.H. Abdurrahman
	K.H. A. Damiri
	K.H. Ahmad Basyir
	K.H. Abdul Azis Affandi
	K.H. Ahya Al-Anshori
	Hj. Nihayah Ahmad Siddiq
	Hj. Umroh Tolhah Mansur
	Hj. Nur Zaenal Nur

Lampiran 11

Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) - Parung
Periode 2008–2010

DEWAN SYURA

Ketua Umum	: K.H. Abdurrahman Wahid
Ketua	: H.Z. Arifin Junaidi
	Drs. K.H. Hamdun Ahmad, M.Ag.
	dr. H. Sugiat Ahmad Sumadi, S.KM.
	Prof. Drs. K.H. Cecep Syarifuddin, M.Pd.
Sekretaris	: Drs. H. Muhyidin Arubusman
Wakil Sekretaris	: Dra. Hj. Badriyah Fayumi
	Dra. Hj. Anisah Mahfudz
Anggota	: T.G.H. Turmudzi Badruddin
	Dr. K.H. Manarul Hidayat
	Prof. H. John Wumu, S.E.
	Ratu Krisna Bagus Oka
	Dr. Nur Rofi'ah
	Drs. H. Ali Hanafiyah
	Drs. H. Ahmad Rawi
	Drs. H. Amirudin Nahrowi
	Dra. Hj. Umi Chusnul Chotimah, M.A.
	Buntoro
	K.H. Muzakki

K.H. A. Razaq Safawi
H.M. Hasyim Karim
K.H. Dadang Za'im Affandi, Lc., M.Si.
K.H. Hanif Ismail, Lc.
Hj. Salis Mahrus
Dr. K.H. A. Akrom Malibaru, LAS, M.A.
Drs. K.H. Q. Ahmad Syahid
Hj. Ma'mullah harun, M.Si.
Drs. H. Mochamad Zein, M.B.A.
H. Ishomuddin Muchtr
K.H. Maman Imanul Haq, M.A.
K.H. Nur Basar Juned
Dr. Moeslim Abdurrahman
K.H. Ubaidillah Syathori
K.H. Nadlir Muhammad
Assyekh Habib Saggaf Bin Mahdi

DEWAN TANFIDZ

Ketua Umum	: Dr. H. Ali Masykur Musa, M.Si.
Wakil Ketua Umum	: Dr. H. A. Effendy Choirie, M.Ag., M.H.
	Dr. H. Lalu Misbah Hidayat, S.E., M.Si.
	Hermawi Fransiskus Taslim, S.H.
	Dra. Hj. Maria Ulfah Anshor, M.A.
	Ir. Muamir Mu'in Syam
	Dr. Maria Pakpahan, M.A., M.Sc.
	Abdullah Azwar Anas, M.Si.
Sekretaris Jenderal	: Zannuba Arifah Chafsoh, MPA
Wasekjen	: H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H.
	Munyati Sullam, S.H., M.A.
	Anak Agung Ngurah Agung, S.E.
	Drs. Alexius Gregorius Plate
	Drs. H. Abdul Khobir

		Moch. Munib Huda
		Haryanto Ogie
		Abdul Muis, M.Si.
Bendarahara Umum	:	Choirul Sholeh Rosyid, S.E.
Wakil Bendahara	:	Ali Mubarak, A.Md. Par.
		Drs. H. A. Nashihin, M.B.A.
		H. Nur Hasanah A.J.
		H. Aris Junadi, S.E.

Lampiran 12

Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) - Ancol
Periode 2008–2014

DEWAN SYURA

Ketua Umum	: K.H. Abd. Azis Manshur
Wakil ketua	: K.H. Mafudh Ridwan
	: H. Muhyidin Arubusman
	: K.H. Ali Maschan Moesa
	: K.H. Munif Zuhri
	: K.H. Abd. Hayyi Na'im
	: K.H. Saifuddin Amsir
	: K.H. Abd. Aziz Afandi
Sekretaris	: H. Andi M. Ramly
Wakil Sekretaris	: K.H. Abd. Ghafur
	: K.H. Mufid Busyairi
	: K.H. Mujib Chudlori
Anggota	: K.H. Dimyati Rois
	: K.H. Subhan Ma'mun
	: Hj. Nurhayati Said Aqil Siraj
	: K.H. Mukhlas Dimyati
	: K.H. Najib Abd. Qodir
	: K.H. Usfuri
	: K.H. Maman Imanul Haq

: Hj. Lily Rozi Munir
: Hj. Fatimah Toyyib
: Hj. Ida Kholidah Ilyah Rukhiyat
: Hj. Pegy Patricia Pattipi
: H. Otong Abdurrahman

Dewan Tanfidz

Ketua Umum : H. A. Muhaimin Iskandar
wakil Ketua Umum : Hj. Nursyahbani Katjasungkana
Ketua : H. Moh Lukman Edy
: H. A. Helmi Faisal Zaini
: H Abd. Kadir Karding
: H. Marwan Ja'far
: Muh. Hanif Dhakiri
: Hj. Ida Fauziyah
: Muamir Muin Syam
: H. Syaiful Bahri Anshori
: H. Ni'am Salim
: H. Saifullah Maksum
: Eko Putro S.
: Hj. Anna Muawanah
: H. Abd. Wahid Maktub
: H. Agus Sulistiono
: Antonius Doni Dihen
: H. Yanuar Prihatin
: H. Amir Mahmud
: Marwan Dasopang
Sekretaris Jenderal : H. Imam Nahrawi
Wakil Sekretaris : Jazilul Fawai
: H. Fathan Subchi
: H. M. Yusuf Mujenih
: H. Samsudin Pay

	: Faisol Reza
	: Luluk Nur Hamidah
	: Anggia Ermarini
	: H. Zainal Arifin Na'im
	: Chusnunnia
	: Zainul Munasichin
	: Margareth Aliyah
	: H. Mohammad Munib Huda
Bendahara Umum	: H. Bachrudin Nasori
Wakil Bendahara	: H. Arvin Hakim Thoha
	: Daniel Johan
	: Siti Mukarromah
	: H. Arif Rahman
	: Miranti Dewaningsih
	: Bambang Susanto
	: Dini Suhardiany
	: Erni Sugiyani

Lampiran 13

Dewan Pimpinan Pusat
Partai Keadilan

MAJELIS PERTIMBANGAN PARTAI

Ketua	: Dr. H.M. Hidayat Nurwahid, M.A.
Wakil Ketua	: Drs. H. Abu Ridho Abdi Sumaiti
Sekretaris	: H. Luthfi Hasan Ishaaq, M.A.
Anggota	: Drs. Arifinto
	K.H. Abdul Hasib
	H. Abdul Said Baharamus, Lc.
	Dr. Agus Nurhadi
	Dr. H. Ahmad Satori Ismail, M.A.
	Mashadi
	H.M. Ihsan Arlansyah Tanjung
	Drs. H. Suharna, M.T.

DEWAN SYARI'AH

Ketua	: Dr. H. Salim Segaf aljufri, M.A.
Wakil Ketua	: Dr. H. Daud Rasyid Sitorus, M.A.
Ketua Pelaksana	: H. Setiawan Budi Utomo, Lc., M.M., M.B.A.
Sekretaris	: Imam Santoso, Lc.
Anggota	: H. Aunur Rafiq Saleh Tamhid, Lc.
	Dr. H. Muslih Abdul Karim, M.A.

K.H. Yusuf Supendi, Lc.
H. Buchari Yusuf, M.A.
H. Asnin Syafi'uddin, Lc.
H. Ridwan Yahya
H. Thalhah Nuhin, Lc.

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Presiden	: Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc.
Wakil Presiden	: H. Syamsul Balda, S.E., M.M., M.B.A., M.Sc.
Sekretaris Jenderal	: H.M. Anis Matta, Lc.
Wakil Sekjen	: Ir. H. Suswono, M.MA.
Bendahara Umum	: Nurmasyah Lubis, Ak, M.M.
Wakil Bendahara	: Edy Kuncoro
Departemen Kaderisasi	
Ketua	: K.H. Rahmat Abdullah
Anggota	: Dr. H. Ahzami Samiun Jazuli, M.A.
	Navis Murbianto
	H. Abdul Muiz, Lc.
	H. Raihan A. Iskandar, Lc.
	Ir. Fajar Rahmat Saleh
	Drs. D.H. Al Yusni
	H. A. Madani, Lc
	Drs. Mahfudz Sidik
	H. Muslim Abdullah, M.A.
	Dra. Wiryaningsih
	Hj. Herlini Amran, M.A.

DEPARTEMEN RISET DAN PENGEMBANGAN

Ketua	: Ir. H. Untung Wahono
Anggota	: H. Budi Darmawan
	Hermanto, S.E.

DEPARTMEN PENDIDIKAN

Ketua	: R.B. Suryaa Ms, Psi.
Anggota	: F.H. Fahmi Abdul Kadir Alaydrus, PSi
	H. Abdul Jabbar, M.A.
	Drs. H. M. Idris Abdussomad, M.A.

DEPARTEMEN EKONOMI

Ketua	: Dr. H. Ahmad Hatta, M.A.
Anggota	: Didik Ahmadi, Ak., M.Com.
	Agus Puji Raharjo, S.E., Ak.
	H. Maddu Mallu, M.B.A.
	Syamsul Falah, M.Sc.
	Ir. Eddy Zanur, MSAE
	Ir. Ruly Tisna Yuliansa
	Drs. Matri Agung

DEPARTEMEN POLITIK DAN HUKUM

Ketua	: H. Mutamimul Ula, S.H.
Anggota	: H. Amang Syafruddin, Lc.
	Fauzul A. Abror, S.H.
	Drs. Al Muzzamil Yusuf
	Iman Nugraha, S.H.

DEPARTEMEN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN LINGKUNGAN HIDUP

Ketua	: Ir. M. Sohibul Iman, M.Eng.
Anggota	: Dr. Warsito, M.Eng.
	Ir. Budiarto, M.Eng.
	Ir. Purwadi, M.Eng.

Departemen Sosial dan Kesehatan

Ketua	: dr. H. Naharus Surur
Anggota	: dr. H. hardiono, Sp.B.M.
	dr. Helda

Drs. Bali Pranowo
Ahman Firman Yusuf
H. Burhanuddin, Lc.

Departemen Dakwah

Ketua : Drs. H. Mukhlis Abdi
Anggota : H.M. Nazir Zein, M.A.
Drs. H. Ahmad Yani
H. A. Jazuli Juaini, Lc.
Drs. Agus Wahid Rahman
Habibullah, Lc.
Dra. Sitaresmi
Hj. Emma Ruchaema

Departemen Pembinaan dan Pengembangan Wilayah

Ketua : H. Abdul Raqib, Lc.
Anggota : H. Ahmad Chudori
H. Aus Hidayat Nur
Drs. Muhroni
Drs. Muhammad Syahfan
Drs. Chairul Anwar, Apt.
H. Ahmad Zainuddin, Lc.
Muhammad Ferous

Departemen Seni dan Budaya

Ketua : Igo Ilham, Ak.
Anggota : H. Muhammad Ridwan
Tri Aru Wiranto
Sidik Cahyo Kusumo
Zack Sorga
Halimi
Ahmad Mabruri

Barata, S.Si.
Yose Rizal

DEPARTEMEN KEPELOPORAL PEMUDA

Ketua : Mustafa Kamal
Anggota : Abdul Azis Muhtadi
Agus Priatna, S.Pd.
Selamat Nurdin, S.Sos.
Dwi Septiawati, S.Pd.
Dra. Kingkin Anida

DEPARTEMEN PENERANGAN DAN HUMAS

Ketua : Ir. H. Tifatul Sembiring
Anggota : H. Aboe Bakar Al Habsy
M. Lili Nur Aulia
Komaruddin
Reza Syarif, Dipl.Pn
H. Taufiq Kiemas
Hj. Pujiastuti, S.H.

DEPARTEMEN KEWANITAAN

Ketua : Hj. Yoyoh Yusroh
Anggota : Dra. Zirly Rosa Jamil
Dra. Hj. Siti Zainab
Dra. Sri Utami
Nursanita Nasution, S.E., M.E.

Lampiran 14

Dewan Pimpinan Pusat
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Periode 2003–2005

Majelis Syura

Ketua	: K.H. Hilmi Aminuddin

Majelis Pertimbangan Partai

Ketua	: K.H. Rahmad Abdullah
Anggota	: Drs. H. Abu Ridho Abdi Sumaiti
	Drs. H. Arifinto
	Mashadi
	Drs. Mukhroni
	H. Abdul Said Baharamus, Lc.
	Drs. H.M. Muhammad Yusuf
	Hj. Yoyoh Yusroh
	H. Tb. Soenmandjaja
	H. Maddu Mallu, S.E., M.M.
	Dra. Hj. Aan Rohana

Dewan Syari'ah

Ketua	: Dr. H. Salim Segaf Aljufri, M.A.
Anggota	: K.H. Syauqi, Lc.
	H. Aunur Rafiq Saleh Tamhhid, Lc.

Dr. H. Muslih Abdul Karim, M.A.
K.H Yusuf Supendi, Lc.
H. Buchari Yusuf, M.A.
Imam Santoso, Lc.
H. Bakrun Syafi'i, M.A.
K.H. Tadjuddin Noor
H. Raqib Abdul Kadir, Lc.

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Presiden	: Dr. H.M Hidayat Nur Wahid
Wakil Ketua Umum	: Dr. H. Surahman Hidayat
	Drs. H. Almuzzammil Yusuf
Sekretaris Jenderal	: H.M. Anis Matta, Lc.
Wakil Sekjen	: Ir. H. Suswono, MMA.
	Riko Desendra, S.Si.
	H. Fahri Hamzah, S.E.
	H. Abu Bakar Al Habsyi
	Drs. Haryo Setyoko
Bendahara Umum	: H. Luthfi Hassan Ishaaq, M.A.
Wakil Bendum	: Edy Kuncoro, AK
	Irsyal Ismail, AK
	H. Mahfudz Abdurrahman, S.E.
Ketua Wilayah Dakwah I	: Ir. H. Tifatul Sembiring
Ketua Wilayah Dakwah II	: H. Aus Hidayat
Ketua Wilayah Dakwah III	: Ahmad Firman Yusuf
Ketua Wilayah Dakwah IV	: Ahmad Zainuddin, Lc.
Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu	: M. Razikun, M.Si., Ak.
Ketua Biro Luar Negeri	: Dipl. Eng. H. Riyatna Suryawijaya
Ketua Bidang Pembinaan Kader	: H. Abdul Hasib Jassan, Lc.
Ketua Departemen Kaderisasi	: Drs. H. Mahfudz Siddiq, M.Si.
Ketua Departemen Dakwah	: Drs. H. Ahmad Yani
Ketua Dep. Kepeloporan Pemuda	: Mustafa Kamal, S.S.

Ketua Dep. Olahraga dan Kepanduan	: Ir. Ahmad Faradis
Ketua Bid. Pembinaan SDM	: Drs. H. Suharna Surapranata, M.T.
Ketua Dep. Pembinaan Organisasi	: H. Budi Dharmawan
Ketua Departemen Pendidikan	: Drs. H. Musholli
Ketua Dep. Kesehatan dan Sosial	: Drs. H.Agus Kushartoro
Ketua Dep. Iptek dan LH	: dipl. Eng. Agung Hardianto
Ketua Bidang Kebijakan Publik	: Dr. H. Iwan Prayitno
Ketua Dep. Politik dan Hankam	: Ir. H. Untung Wahono, M.Si.
Ketua Departemen Hukum dan HAM	: H. Mutamimul Ula, S.H.
Ketua Dep. Komunikasi dan Jaringan	: R.B. Suryama Psi.
Ketua Departemen Seni dan Budaya	: H. Muhammad Ridwan
Ketua Bidang Kewanitaan	: Hj. Nuranita Nasution
ketua Dep. Pemberdayaan Wanita	: Hj. Herlini Amran, M.A.
Ketua Dep. Jaringan Lembaga Wanita	: Dra. Sri Utami, M.M.
Ketua Dep. Pembinaan Keluarga	: Dra. Hj. Wirianingsih
Ketua Bidang Ekonomi	: Didik Ahmadi, Ak., M.Com.
Ketua Dep. Pemberdayaan Ekonomi	: Ir. H. Rulli Tisna Yuliansa
Ketua Dep. Kebijakan Ekonomi	: Dr. Zulkiflimansyah
Ketua Dep. Buruh, Tani dan Nelayan	: H.M. Martri Agoeng

Lampiran 15

Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Periode 2005–2010

MAJELIS SYURA

Ketua : K.H. Hilmi Aminuddin

BADAN PERTIMBANGAN TUGAS DAN JABATAN: EX OFFICIO

Ketua : Drs. H. Suharna Supranata, M.T.

BADAN PENEGAK DISIPLIN ORGANISASI: EX OFFICIO

Ketua : H. Luthfi Hasan Ishaaq, M.A.

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Presiden Partai : Ir. H. Tifatul Sembiring
Sekretaris Jenderal : H. M. Anis Matta, Lc.
Wakil Sekjen I : Ir. H. Suswono, MMA.
Wakil Sekjen II : Ir. Ade Barkah
Wakil Sekjen III : Ir. Aboe Bakar Alhabsy
Wakil Sekjen IV : Dr. Mardani
Wakil Sekjen V : H. Fahri Hamza, S.E.
Wakil Sekjen VI : Nurhasan Zaidi, S.Sos.I
Wakil Sekjen VII : Riko Desendra, SSI
Bendahara Umum : H. Mahfud Abdurrahman

Bendahara I	: P. Edy Kuncoro
Bendahara II	: Masfuri, Ak.
Bendahara III	: Taruna Wiyasa
Bendahara IV	: H. Kiemas Taufik
Bendahara V	: H. Didin Amaruddin, Ak.
Bidang Pembinaan Kader	: Ahmad Zainuddin, Lc.
Departemen Kaderisasi	: Abdul Muiz, M.A.
Departemen Dakwah	: Thahhah Nuhin, Lc.
Departemen MDI	: Samin Barkah, Lc.
Bidang Pembinaan Wilayah	: H. Aus Hidayah Nur
Departemen Wilda Sumbagut	: Drs. Chairul Anwar, Apt.
Departemen Wilda Sumbangsel	: Drs. M. Syahfan Badri
Dep. Wilda Banten, Jakarta, Jabar	: Ir. Syamsu Hilal
Dep. Wilda Jateng dan Jogjakarta	: Zubeir Syafawi, SH.I
Departemen Wilda Jatim dan Bali	: Ir. Sigit Sosiantomo
Departemen Wilda Kalimantan	: Abdurrohman Amin
Dep. Wilda Maluku, Malut, Irian	: Ahmad Zaki, Ak.
Departemen Wilda Sulawesi	: Drs. Cahyadi Takariawan, Apt.
Departemen Wilda NTB, NTT	: Triono, S.H.
Bidang Kewanitaan	: Ledia Hanifa, M.S.
Departemen Kajian Wanita	: Dra. Sri Utami, M.M.
Dep. Jaringan Lembaga Wanita	: Netti Prasetyani
Departemen Pemberdayaan Wanita	: Dwi Septiawati
Bidang Kesejahteraan Rakyat	: Drs. H. Musholi
Departemen Pendidikan dan SDM	: Drs. Fahmi Alaydroes, Psi, M.M., Med.
Departemen Kesehatan dan Sosial	: dr. H. Agoes Koos Hartoro
Departemen Kemahasiswaan	: Ahmad Ariyandra, Ak.
Departemen Seni dan Budaya	: H. M. Ridwan
Bidang Polhukam	: Ir. H. Untung Wahono, M.Si.
Departemen Politik dan Hankam	: Drs. H. Almuzammil Yusuf

Departemen Hukum dan HAM	: Fitra Arsil, S.H., M.H.
Departemen Pemerintahan dan Otda	: Achyar Eldine, S.E., M.M.
Bidang Euintek	: Dr. Mohammad Sohibul Iman
Departemen Ekonomi, Keuangan, Perbankan	: Sigit Pramono, S.E., M.SE.
Departemen Pembinaan UKM	: Ir. H. Ruly Tisna Yuliansyah
Departemen Teknologi, Industri, LH	: Dr. Edi Syukur
Departemen Buruh Tani, Nelayan	: Edy Zannur, MSAE.
Bidang Pembinaan Pemuda	: Ir. Ahmad Faradis
Departemen Kepeloporan Pemuda	: Slamet Nurdin
Departemen Kepanduan	: Cahya Zailani
Departemen Olahraga	: Unggul Wibawa

BADAN-BADAN DI BAWAH DPP

Badan Pemenangan Pemilu	: H.M. Razikun, Ak. M.S.
Badan Legislatif	: Hermanto, S.E., M.M.
Badan Litbang	: Drs. H. Mahfudz Siddiq, MSE.
Badan Hubungan Luar Negeri	: H. Lutfi Hasan Ishaaq, M.A.

DEWAN SYARIAH PUSAT

Ketua	: Dr. H. Surahman Hidayat
Amin Maktab	: H. Bukhari Yusuf, M.A.
Amin Mali	: H. Kastiri
Laznah Qadha:	
Amin Lajnah	: Drs. Muhroni
Anggota	: Dr. H. Muslih A. Karim
	Dr. H. Mu'inuddin
	H. Abdul Hasyib Hasan, Lc.
	H. Amang Syarifuddin, Lc.,

M.Si.

LAJNAH TAHQIQ:

Koordinator	: H. Iskan Qolban Lubis, M.A.

Anggota	: Dr. H. Idris Abdu Shamad
	H. Aunurafiq Saleh Tamhid, Lc.
	Hj. Herlini Amran, M.A.
	Dra. Suzy Mardiani
	Lajnah Ifta
Amin Lajnah	: Harjani Hefi, M.A.
Anggota	: Dr. H. Muslim Abdul Karim
	Dr. H. Muiduddin
	H. Abdul Hasib Hasan, Lc.
	H. Abdul Aziz Arbi, M.A.
	H. Abdul Ghani Kasuba, Lc.

LAJNAH TAHRIB

Amin Lajnah	: H. Abdul Raqib, Lc.
Anggota	: A. Zairofi, Lc.
	Drs. H. Ahmad Yani
Staf Sekretariat/Tenologi Informasi	: Ridho Kurniawan

MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT

Ketua	: Drs. H. Suharna Surya Pranata, M.T.
Sekretaris	: Drs. H. Arifinto

KOMISI ORGANISASI DAN KEWILAYAHAN

Ketua	: Ir. Memed Sosiawan
Anggota	: Jaib Subroto, S.E., H. Refrizal

KOMISI PEMBINAAN KADER DAN KEWANITAAN

Ketua	: Drs. H. Abdi Sumaithi
Anggota	: Mustafa Kamal
	Hj. Aan Rohana, M.Ag.
	H. Yoyoh Yusroh, S.Ag.

Komisi Kebijakan Publik

Ketua : H. TB. Sunmandjaja

Anggota : Hj Nursanita Nasution, S.E., M.E.
Didik Akhmadi, Ak., M.Com.
Mutammimul Ula, S.H.

Komisi Kajian Strategis

Ketua : H. Ahmad Firman Yusuf

Angota : H. Suripto, S.H.
H. Ahmad Relyadi

Dewan Pakar

Ketua : H. Suripto, S.H.

Lampiran 16

Tabel Skor Kandidat Wali kota Depok

No.	*Name*	*Marketable*				*Acceptable*				*Leadership*				*Experience*				*Understanding Depok*				*Scoring*				*Total*
	Significance	0.3				0.25				0.2				0.15				0.1								
	Scoring	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	
1	Dr. Nur Mahmudi Ismail	14	5	0	1	12	6	1	1	9	7	2	0	15	3	2	1	1	4	12	3					
		17	4.5	0	0.3	12	4.5	0.5	0.3	7.2	4.2	0.8	0	9	1.4	0.6	0.2	0.4	1.2	2.4	0.3	45.4	15.8	4.3	1	66.45
2	Amang Syafrudin	7	8	5	0	7	8	5	1	1	6	9	5	3	8	6	3	8	10	2	1					
		8.4	7.2	3	0	7	6	2.5	0.3	0.8	3.6	3.6	1	1.8	3.6	1.8	0.5	3.2	3	0.4	0.1	21.2	23.4	11.3	1.8	57.7
3	Saleh Martapermana	2	8	8	2	2	2	10	6	1	2	9	8	3	7	7	4	10	5	3	3					
		2.4	7.2	4.8	0.6	2	1.5	5	1.5	0.8	1.2	3.6	1.6	1.8	3.2	2.1	0.6	4	1.5	0.6	0.3	11	14.6	16.1	4.6	46.25
4	Yunus Daud	0	2	8	10	0	3	8	9	2	4	9	5	0	6	8	6	1	4	8	7					
		0	1.8	4.8	3	0	2.3	4	2.3	1.6	2.4	3.6	1	0	2.7	2.4	0.9	0.4	1.2	1.6	0.7	2	10.4	16.4	7.85	36.6
5	Muslih Abd. Karim	8	6	6	1	7	5	8	1	2	3	11	5	0	5	14	2	1	8	10	2					
		9.6	5.4	3.6	0.3	7	3.8	4	0.3	1.6	1.8	4.4	1	0	2.3	4.2	0.3	0.4	2.4	2	0.2	18.6	15.6	18.2	2.05	54.45
6	Musholli	3	5	8	3	3	6	9	2	5	5	7	3	3	8	6	2	3	3	12	2					
		3.6	4.5	4.8	0.9	3	4.5	4.5	0.5	4	3	2.8	0.6	1.8	3.6	1.8	0.3	1.2	0.9	2.4	0.2	13.6	16.5	16.3	2.5	48.9
7	Bahrun Syah	0	4	14	2	1	4	14	1	2	5	11	3	1	8	10	1	1	6	13	1					
		0	3.6	8.4	0.6	1	3	7	0.3	1.6	3	4.4	0.6	0.6	3.6	3	0.2	0.4	1.8	2.6	1	3.6	15	25.4	1.7	45.7
8	Abd. Muaz	1	7	10	3	0	7	10	3	0	3	12	6	0	7	10	4	3	9	9	1					
		1.2	6.3	6	0.9	0	5.3	5	0.8	0	1.8	4.8	1.2	0	3.2	3	0.6	1.2	27	1.8	0.1	2.4	19.2	20.6	3.55	45.75
9	Ihsan Tanjung	6	9	4	2	5	5	9	2	2	5	8	5	1	4	10	5	0	2	14	6					
		7.2	8.1	2.4	0.6	5	3.8	4.5	0.5	1.6	3	3.2	1	0.6	1.8	3	0.8	0	0.6	2.8	0.6	14.4	17.3	15.9	3.45	51
10	Dr. Prihandoko	0	4	12	5	2	3	12	3	4	10	6	1	2	7	9	3	0	4	9	8					
		0	3.6	7.2	1.5	2	2.3	6	0.8	3.2	6	2.4	0.2	1.2	3.2	2.7	0.5	0	1.2	1.8	0.8	6.4	16.2	20.1	3.7	46.4

Sumber: Pusat Data Pilkada, dalam Amri Yusra *Mekanisme Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah: Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera dalam Pilkada Depok 2005*, Tesis Master, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2006), 121.

INDEKS

RIWAYAT PENULIS

Firman Noor, Peneliti pada Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Politik LIPI). Fokus kajian penelitian yang diminatinya adalah partai politik, pemilu, keterwakilan politik, dan pemikiran politik. Selama menjadi peneliti terlibat dalam berbagai penelitian seputar kajian yang diminatinya tersebut dan beberapa kajian lain seputar masalah nasionalisme, perbatasan, dan globalisasi. Selain aktif dalam kegiatan penelitian, dia menyempatkan diri untuk mengajar pada Departemen Ilmu Politik dan Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI untuk Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik, Sistem Politik Indonesia, Pemikiran Politik Barat, Pemikiran Politik Islam, Pemikiran Politik Islam di Indonesia, Metodologi Ilmu Politik dan Kekuatan-Kekuatan Politik di Indonesia. Menyelesaikan studi pada Departemen Ilmu Politik FISIP UI pada tahun 2000. Memperoleh Gelar Master of Art dari Faculty of Asian Studies Australian National University (ANU) dengan beasiswa *Australian Development Scholarship* (ADS). Pada saat kuliah di ANU dia sempat meraih penghargaan Anthony Reid Award sebagai mahasiswa dengan capaian nilai terbaik di fakultasnya pada tahun 2007. Menjadi pengurus pusat Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) dilakoninya selama studi di Australia. Melanjutkan Studi S-3 di School of Social Sciences and Humanities, University of Exeter,

Inggris dengan dukungan beasiswa dari kampusnya dan Program Beasiswa Unggulan DIKTI Kemendibud. Studi S-3 ditempuhnya dengan relatif singkat (dua setengah tahun). Menjadi narasumber dan pemakalah di sejumlah workshop serta seminar, baik nasional maupun internasional. Beberapa lembaga yang telah memintanya untuk menjadi narasumber antara lain Lemhanas, Wantannas, Kemendagri, Kemkoinfo, dan KPK. Menjadi kontributor beberapa buku di antaranya "*Improving Electoral Practices: Case Studies and Practical Approaches", "Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal", "Evaluasi Pemilu Legislatif 2009: Tinjauan atas Proses Pemilu, Strategi Kampanye, Perilaku Memilih dan Konstelasi Politik Hasil Pemilu", "Nasionalisme, Demokratisasi dan Identitas Primordialisme di Indonesia"*, "*Mereka Bicara PKS: Telaah Objektif Perjalanan Dakwah Politik PKS"*, "*Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste"*. Tulisannya telah pula tersebar di sejumlah jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional dan media cetak nasional seperti *Republika, Seputar Indonesia, Harian Pelita, Media Indonesia, Koran Tempo, Kompas* dan *the Jakarta Post*. Di sela-sela kesibukannya dia kerap melayani mahasiswa, baik sebagai pembimbing skripsi, tesis, maupun disertasi.

PARTAI ISLAM DI INDONESIA:

KASUS PKB DAN PKS DI DEKADE AWAL REFORMASI

Buku ini mengungkap latar belakang dibalik perpecahan dan soliditas partai-partai Islam di Indonesia. Dengan menjadikan PKB dan PKS sebagai objek penelitian, pembahasan dalam buku ini memperlihatkan pentingnya pemantapan kondisi internal sebuah partai, baik dalam menghadapi terciptanya perpecahan maupun soliditas. Selain itu, buku ini juga menjawab anggapan bahwa faktor individu atau aktor adalah penyebab utama, apalagi satu-satunya, yang mengganggu atau mendorong keutuhan sebuah partai. Singkatnya, buku ini mengeksplorasi dan menganalisis berbagai faktor serta alasan di balik masalah perpecahan dan soliditas partai-partai politik Islam dalam kaitannya dengan keberadaan proses pelembagaan partai pada dekade pertama Era Reformasi (1998–2008).

Tidak salah lagi jika buku ini menjadi buku wajib bagi mahasiswa, dosen, peneliti, ataupun masyarakat umum. Mengapa? Karena buku ini membuka wawasan dan pemahaman mengenai dinamika kepartaian Islam dalam politik Indonesia kontemporer. Berbagai informasi dan kajian penting dalam buku ini di antaranya: 1) Latar belakang kegagalan partai Islam dalam menjaga keutuhan, dan di sisi lain kemampuan partai Islam dalam menggalang soliditas internalnya; 2) Dampak konsistensi dalam menjalankan konstitusi dan prosedur partai dalam membangun rasa percaya pada partai; 3) Dampak keberadaan mekanisme penyelesaian konflik yang mumpuni dan terlembaga dalam menjaga rasa keadilan internal; 4) Dampak kaderisasi yang sistematis, bahwa kedudukan seseorang ditentukan oleh prestasinya dan bukan semata karena faktor *like or dislike*, terhadap terbangunnya semangat kebersamaan; 5) Dampak komitmen atas nilai-nilai yang diyakini bersama, yakni komitmen atas ideologi yang diusung oleh partai terhadap sikap mendahulukan kepentingan partai.

Distributor:
Yayasan Obor Indonesia
Jl. Plaju No.10 Jakarta 10230
Telp. (021) 319 26978, 3920114
Faks. (021) 319 24488
E-mail: yayasan_obor@cbn.net.id

LIPI Press

ISBN 978-979-799-842-4
9 789797 998424 >